SULTAN
DALAM SEJARAH
POLITIK TERNATE
1945 - 2002

Dr. Rustam Hasim, M. Hum., M.Pd.

Editor : Syawal Abdulajid SH. MH

LepKhair ISBN 978-602-6824-33-2

SULTAN DALAM SEJARAH POLITIK TERNATE 1945 - 2002

TENTANG PENULIS:

Rustam Hasim dilahirkan di Peleri, Makian Pulau, 4 Maret 1980. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Matui Kecamatan Jailolo 1992. Madrasah Tsanawiyah Negeri Ternate 1995, dan SMA 5 Ternate 1998. Menamatkan S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi PKn 2002. Menamatkan S2 di Jurusan Ilmu Sejarah UGM Yogyakarta, 2006, dan Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa (UST), jurusan Manajemen Pendidikan (MP) pada tahun 2012. Menamatkan S3 di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Jurusan Ilmu Sejarah pada 2017. Sejak tahun 2005 mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi PKn. Sekarang menjabat Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (2018-Sekarang). Wakil Ketua Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (AP3KnI) Propinsi Maluku Utara (2017-2022). Wakil Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Propinsi Maluku Utara (2015-2019). Ketua Pusat Penelitian dan Pendidikan Instutut Maloku Propinsi Maluku Utara. Karya yang pernah dipublikasikan adalah, “Dari Cengkeh ke Kerang Mutiara: Perdagangan di Karesidenan Ternate, 1956-1930” (Lepkhair,2013) dan “Manajemen Sumberdaya manusia Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Kota Ternate”, (Lepkhair,2017). Selain itu aktif menulis di beberapa artikel yang telah dipublikasikan baik nasional maupun internasional dan beberapa surat kabar lokal dan nasional.

ISBN 978-602-6824-33-2

9 786026 824332

Email: lepkhair@gmail.com
Website: https://lepkhair.unkhair.ac.id/

SULTAN DALAM SEJARAH POLITIK TERNATE 1945 - 2002

Penulis
Dr. Rustam Hasim, M. Hum., M.Pd.

Penyunting : Syawal Abdulajid, SH., M.H

LEPKHAIR

SULTAN DALAM SEJARAH POLITIK TERNATE 1945 - 2002

Penulis:
Dr. Rustam Hasim, M. Hum., M.Pd.

ISBN. 978-602-6824-33-2

Penyunting : Syawal Abdulajid, SH., M.H

Penerbit:
Lembaga Penerbitan Universitas Khairun (Le*p*Khair)

Redaksi :
Lembaga Penerbitan Universitas Khairun **(Le*p*Khair)**
Pos 97719
Telp. (0921) 3110903, 3110904, Fax (0921) 3110901, 3110902
Email : lepkhair@yahoo.com
Website : www.lep.khair.com

Distibutor Tunggal :
Lembaga Penerbitan Universitas Khairun **(Le*p*Khair)**
Jl. Pertamina Kampus Gambesi Kotak Pos 53 Ternate, Pos 97719
Kota Ternate Selatan
Telp. (0921) 3110903, 3110904, Fax (0921) 3110901, 3110902
Email : lepkhair@yahoo.com
Website : www.lep.khair.com

Cetakan Pertama, Juni 2019
Reprints, April 2022

Ternate, LEP*K*HAIR

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta yang memeliki sifat Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hambanya, sehingga buku tentang "Sultan dalam Sejarah Politik Ternate,1945-2002" akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tercurah kepada RasulNya yang mulia, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini berasal dari hasil penelitian (Disertasi) selama menempuh studi S3 pada Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2009, pada jurusan Ilmu Sejarah. Sengaja buku ini diterbitkan untuk menjadi motivasi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya tradisi intelektual sebagai refleksi sikap kritis atas masalah aktual yang dihadapi masyarakat. Selain itu, untuk melengkapi kekurangan berbagai referensi yang pernah ditulis para sejarawan dan buku-buku sejarah yang ditulis Pemerintah melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN). Sehingga karya ini diharapkan dapat membantu dan memperkayah khasanah buku sejarah lokal di Maluku Utara.

Ternate muncul dipangung sejarah terutama karena rempah-rempahnya menempatkan Ternate menjadi kota pelabuhan perniagaan yang ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa Eropa seperti; Bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda, tentu mewariksan nilai-nilai kesejarahan baik mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya. Bertolak dari konsep sejarah yang memandang dinamika masyarakat sebagai proses jalinan kontinuitas dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan, maka tulisan ini mengkaji partisipasi politik Kesultanan Ternate dari Rezim Presiden Soekarno hingga Reformasi. Tulisan ini mengungkapkan bahwa kemunculan kembali elite Kesultanan Ternate di tingkat lokal pada saat ini, dimaknai sebagai keinginannya untuk lebih diakomodasikan secara institusional kedalam panggung politik pemerintahan formal atas klaim hak asal-usul dan identitas budaya.

Dengan memaknai nilai-nilai sejarah lokal di Maluku Utara (Ternate) kita akan mempunyai wawasan luas, kritis untuk hidup bersama dalam suatu komunitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulisan sejarah lokal tidak dapat dipisahkan dengan kesadaran sejarah bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan proses yang dialami dalam perjalanan waktu dan masa lalu berguna bagi pembangunan masa depan (*historia magistra vitae*). Terdapat dua fungsi penulisan sejarah lokal, yakni; *pertama,* mengali dan mengungkapkan kembali peristiwa dimasa lalu sebagai suatu pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik, dan, *kedua*, mengajarkannya kepada generasi masa sekarang dan masa depan.

Dengan demikian, Sejarah lokal perlu dilestarikan dan merupakan bagian dari sejarah nasional yang harus dikaji, diteliti, dan dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh generasi muda. Sejarah lokal, oleh Sartono Kartodirdjo sebagai mikro-unit mempunyai ciri khas yang tidak terdapat pada makro-unit ataupun

lainnya. Sejarah lokal mempunyai permasalahannya sendiri, mempunyai latar belakang sosio-kultural sendiri, yang tidak akan tampak bila dideskripsikan secara makro pada tingkat nasional. Dengan demikian, pengkajian sejarah lokal diharapkan memiliki konstribusi dan faedah bagi pemahaman sejarah nasional yang lebih luas.

Tulisan ini dapat terwujud, tentunya tidak terlepas dari bantuan, keterlibatan, dan pengorbanan berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis.Perjalanan panjang yang ditempuh oleh penulis untuk mewujudkan tulisan ini, telah melibatkan berbagai pihak tersebut dengan bantuan yang berbeda-beda.Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Prof. Dr. Djoko Suryo, M.A, sebagai promotor dan Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A, sebagai Ko-Promotor yang telah membimbing dan memberikan pandangan-pandangan yang kritis terhadap selama penulis menempuh studi S3 di UGM. Ucapan terima kasih yang tulus, penulis sampaikan sederatan nama guru besar yang bersahaja program pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya yang telah memberikan pembekalan pengetahuan dan penyeggaran wawasan intelektual melalui perkuliahan yaitu; Bapak Prof. Djoko Sukiman, Prof. Dr. Soedarsono. Dr. Agus Suwignyo, MA. Dr. Abdul Wahid, MA. Dr Mutiah Amini, dan Dr. Nur Aini Setiawati. Teristimewa Bapak Prof. Dr. Suhartono W. Pranoto, MA Dr Pujo Semedi Hargo Yuwono. Prof. Dr Hedy Shri Ahima Putra. Prof. Dr. Sjafri Sairin, Prof. Dr. C. Soebakdi Soemanto, Prof. Dr. Sumijati Atmosudiro, Prof. Dr. Soepomo Poedjosoedarmo. Prof. Dr. Stefanus Djawanai, Prof. Dr.I Dewa Putu Wijana. Prof. Dr. PM, dan Prof. Dr. Irwan Abdullah, MA.

Taklupa terima kasih di sampaikan kepada teman-teman Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mereka adalah bapak Dr. Syahril Muhammad, M.Hum. Drs. Muhtar Yusup, MSi. Muhtar Kamisi, MSi, Jainudin Abdullah M,Pd. Rusdi Hasan, SH.M.H, Dr. Irwan Djumat, Ibu Siti Rahia, S.Ag MAg, Nani I Rajaloa, S.Pd. M.Pd, Hasmawati, S.Ag, M.Pd, Oktosisanti, S.Ag, M.Pd dan Rasti Amalia, S.H. M.H, penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan keterlibatan banyak pihak hingga buku ini selesai, tetapi kekurangan dan kekeliruan pasti akan dijumpai. Karena itu penulis menerima kritik dan sarana yang bersifat konkruktif demi penyempurnan buku ini. Apalagi buku ini bukan kajian final melaingkan sebuah lembaran awal dari pengambaran sejarah Malaku Utara yang lebih panjang dan pasti ada halaman-halaman selanjutnya yang akan hadir untuk melengkapainya. Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada penerbit LepKhair yang membantu menerbitkan buku ini. Terima yang sama pula penulis sampaikan kepada bapak Syawal Abdulajid, SH. MH yang telah meluangkan waktunya untuk mengedit buku ini di tengah kesibukannya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Warek III) Unkhair Ternate. Semoga buku ini bermanfat bagi kita semua.

Ternate, 10 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Cover Dalam ..... **ii**
Kata Pengantar ..... **iv**
Daftar Isi ..... **vi**
Daftar Tabel ..... **viii**
Daftar Gambar ..... **ix**
Daftar Lampiran ..... **x**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Pendekatan dan Tinjauan Historiografis 7
C. Sumber Penulisan 17

BAB II. MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN TERNATE **21**
Pengantar 21
A. Masyarakat Ternate 22
B. Bahasa 32
C. Budaya Politik 35
D. Kedudukan Elite Kesultanan dalam Masyarakat 40
Penutup 50

BAB III. SULTAN DAN SUMBER KEKUASAANNYA **52**
Pengantar 52
A. Silsilah Raja_Raja Ternate 52
B. Filsafat Jou se Ngofangare (Pemimpin dengan Rakyat) 59
C. Gelar, Bahasa, dan Gaya Hidup 61
D. Kadaton (Istana Kesultanan) 66
E. Sumber Ekonomi Kesultanan 72
F. Struktur Birokrasi Kesultanan 76
Penutup 83

BAB IV. KESULTANAN TERNATE PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG **84**
A. Cengkeh dan Kedatangan bangsa-bangsa Eropa 85
B. Kesultanan Ternate dalam Pengawasan Belanda 90
C. Maluku Pada Masa Pendudukan Jepang 99
D. Kesultanan Ternate Pada Masa Pendudukan Jepang 105
E. Peyerahan Kekuasaan Jepang Di Maluku Utara 111
Penutup 112

BAB V. KESULTANAN TERNATE PADA ERA ORDE LAMA 1945-1996.....114
Pengantar 114
A. Peta Kekuatan Politik Lokal Pasca Kemerdekaan 115
B. Mereka menilai pengangkatannya sebagai Residen sebagai strategi Pemerintah
C. Dari Pendidikan Belanda Hingga Menjadi Sultan Ternate Ke-47 121
D. Dari Konferensi Malino Hingga Menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT).....127
E. Republiken Versus Vederalis: Berjuang di Dalam Parlemen 139
F. Pemilu 1955 di Ternate: Elite Kesultanan vs non Kesultanan.....152
Penutup.....157

BAB VI. KESULTANAN TERNATE PADA ERA ORDE BARU 1966-1998.....159
Pengantar.....159
A. Kesultanan Ternate Pasca Iskandar Muhammad Djabir Sjah 160
B. Anak Ketiga Yang Menjadi Sultan Ternate ke-48.....160
C. Pelantikan Sultan Ternate ke 48 dan Penataan Birokrasi Kesultanan 170
D. Dukungan Terhadap Golkar Dalam Pemilu Orde Baru 176
E. Pembentukan Kabupaten Maluku Utara 183
Penutup.....191

BAB VII. KESULTANAN TERNATE PADA ERA REFORMASI 1998-2002 192
Pengantar.....192
A. Dari Kabupaten Maluku Utara Hingga Menjadi Propinsi:Tarik Menarik Nama dan Ibukota Propinsi 193
B. Pencalonan Sultan Mudafar Sjah Sebagai Gubernur Maluku Utara 199
C. Konflik Maluku Utara: Konflik SARA atau Konflik Elite Politik 210
D. Upacara Adat (Fere Kie, Kololi Kie dan Legu Gam) Sebagai Pusat Budaya. 220
Penutup 225

BAB VIII.....227
KESIMPULAN.....227

DAFTAR PUSTAKA.....230
LAMPIRAN.....243

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Model struktur elite Mosca 8
Gambar 2 : Silsilah Raja-raja Ternate 55
Gambar 3 : Mahkota Kesultanan Ternate 62
Gambar 4 : Lambang Kesultanan Ternate 62
Gambar 5 : Istana Kesultanan Ternate 68
Gambar 6 : Mesjid Agung (Sigi Lamo) Kesultanan Ternate 69
Gambar 7 : Sultan Ternate Ke 47 Iskandar Muhammad Djabir Sjah (1925-1975) 116
Gambar 8 : Kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Ternate 14 Oktober 1954 163
Gambar 9 : Kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Ternate 14 Oktober 1954 164
Gambar 10 : Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi pusat pembuatan perahu tradisional 15 Oktober 1954 164
Gambar 11 : Sultan Ternate Ke 48 Mudafar Sjah (1976-2016) 171
Gambar 12 : Gubernur Maluku Mr. Latuharhary menerima ukiran dari kayu cendana dari masyarakat Ternate pada tanggal 17 Nopember 1951 185
Gambar 13,14 : Rombongan 4 Menteri yakni Wakil perdana Menteri Mr. Moh. Roem, Menteri Penerangan Sudibjo, Menteri Dalam Negeri Sunarjo, dan Menteri Urusan Umum H. Rusli Abdul Wahid tiba di Ternate, 1 Juni 1956 187
Gambar 15,16 : Sultan Mudafar Sjah dan Permaisuri Budi Susanti Melakukan Ritual Fere Kiye (Mendaki Gunung Gamalama) dan Kololi Kie (Mengelilingi Pulau) pada tahun 2000 223
Gambar 17 : Acara Pelantikan Akbar Tanjung sebagai Kapita Korois Kesultanan Ternate 224

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama-nama marga yang ada di Ternate 26
Tabel 2 : Mata Pencarian Penduduk Ternate 29
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Desa Kotapraja Ternate
Menurut Perincian Kecamatan Pada Tahun 1961 29
Tabel 4 : Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Maluku pada tahun 1950 .31
Tabel 5 : Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate 80
Tabel 6 : Perkembangan Media Massa di Maluku 1923-1952 120
Tabel 7 : Partai Politik dan Alirannya di Wilayah NIT 142
Tabel 8 Hasil Pemilihan Umum Tahun 1955 Di Maluku 154
Tabel 9 : Hasil Pemilihan Umum di Ternate 1955 155
Tabel 10 : Nama-nama Partai Politik, Pengurus dan Jumlah Kursi 156
Tabel 11 : Objek Pemugaran Istana Ternate.....173
Tabel 12 : Hasil Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Utara Tahun 1971.....177
Tabel 13 : Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu tahun 1977-1997
Kabupaten Maluku Utara.....178
Tabel 14 : Nama-nama Pejabat Kesultanan Ternate yang menjadi anggota
Legislatif DPRD II dan I Maluku Utara
Pada tahun 1971-1997 181
Tabel 15 : Nama-nama Gubernur Maluku Periode 1945-1999 188
Tabel 16 : Nama-nama Bupati Kabupaten Maluku Utara
Periode 1958-1999.....190
Tabel 17 : Kebangkitan Kembali Kesultanan-Kesultanan di Maluku Utara
Pada Era Reformasi 197
Tabel 18 : Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara.....201
Tabel 19 : Nama-nama Pendaftar Calon Gubernur /Wakil Gubernur
Maluku Utara Juli 2001 205
Tabel 20 : Perolehan Suara Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur 2002 207
Tabel 21 : Dampak Konflik di Kota Ternate 1999 215
Tabel 22 : Daerah Yang Terkena Dampak
Konflik Maluku Utara 1999-2000 218

DAFTAR LAMPIRAN

Glosarium.....243
Kumpulan foto kesultanan.....247
Daftar singkatan.....249

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemunculan kembali entitas politik masa lalu di tingkat local pada saat ini, dapat dipahami sebagai proses transisi politik yang berlangsung sejak berakhirnya rezim[1]OrdeBaru pada 1998. Proses politik tersebut, berimplikasi pada pergeseran tata hubungan kekuasan antara institusi politik pusat dengan daerah. Pergeseran politik itu berjalan beriringan dengan menurunnya kredibilitas negara dan institusinya. Keadaan itu dijadikan momentum oleh kekuatan-kekuatan lama, termasuk kekuasaan feodalistik di daerah, untuk bangkit kembali memperjuangkan hak-hak politik di wilayah kekuasaannya dalam ranah politik lokal.[2]

Sebelum kemerdekaan, menurut Ari Dwipayana, terdapat sekitar 250 daerah swapraja atau z*elbestuurendelandschappen* dalam teritori Indonesia. Sebagian besar dari daerah swapraja tersebut sama sekali tidak meninggalkan artefak atau bukti-bukti sejarah. Namun ada beberapa di antaranya yang masih eksis secara politik hingga sekarang seperti: Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasuhunan Surakarta, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Malah beberapa keraton dapat dibangun dan tradisinya dihidupkan kembali serta menjalin kerjasama dalam Aliansi Keraton-keraton Nusantara.[3]

Salah satu kekuasaan tradisional yang tetap hidup sejak awal kemerdekaan hingga kini adalah Kesultanan Ternate. Keberadaan Sultan Ternate juga terus berlangsung mengingat secara adatmereka memiliki posisi politik sebagai pusat anutan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Ternate. Keberlangsungan para elite menunjukan peran politik mereka tidak hanya sebatas bagaimana mereka beradaptasi

---

[1] *Istilah ini sering kali digunakan secara populer dan serampangan untuk mengambarkan sebuah sistem pemerintah atau administrasi. Sehingga apapun bentuk pemerintahan akan diidentikan dengan rezim, entah itu monarki, republik, tirani bahkan rezim militer. Namun secara ilmiah istilah rezim sebenarnya dirumuskan sebagai prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa sebuah negara. Untuk lebih jelasnya baca Hasrul Hanif,Mengembalikan Daulat Warga Pesisir: Partisipasi, Representasi dan Demokrasi di Aras Lokal.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm 4-5.*

[2] *AAG. Ari Dwipayana, Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota. (Yogyakarta, IRE Press, 2004), hlm. 7. Istilah 'politik lokal' dalam tulisan ini adalah sejarah politik tingkat lokal, yakni peristiwa-peristiwa nasional yang menjadi bagian dari peristiwa lokal. Bukan peristiwa lokal yang tetap menjadi lokal, tetapi lokal yang meningkat jadi nasional, atau nasional yang meningkat menjadi internasional. Lebih jelasnya lihat Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. (Yogjakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm.166 dan Henk Schulte Nordholt, et.al. (ed), Politik Lokal di Indonesia.(Jakarta: KITLV, 2007), hlm. 16-17.*

[3] *Setelah kemerdekaan dan pasca-Orde Baru, beberapa keraton bekas swapraja mulai memiliki peran signifikan dalam politik lokal. Kemunculan entitas politik masa lalu tersebut, baik yang sudah eksis maupun yang baru muncul belakangan telah bergabung dalam suatu forum Aliansi Keraton-keraton Nusantara. Sekarang sudah terhitung kesepuluh kali mengelar Festival Keraton Nusantara (FKN), bahkan FKN X yang telah dilaksanakan di Solo 2010 dihadiri sekitar 34 peserta dari kesultanan-kesultanan di Indonesia. Ini mengalami peningkatan keanggotaan bila dibandingkan dengan festival pertama dilaksanakan di Yogyakarta yang hanya diikuti 20 peserta. Lihat AAG. Ari Dwipayana, op.cit., hlm. 8.*

dengan perubahan lingkungan, tetapi juga menempati posisi dan mempunyai pengaruh signifikan dalam sejarah politik lokal di Maluku Utara.

Sejarah menunjukan partisipasi politik Sultan Ternate dalam negara kesatuan telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, ditandai dengan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), padatanggal 24 Desember 1946. Terbentuknya Negara Indonesia Timur kemudian menjadi inspirasi politik bagi Sultan Ternate ke-47 Iskandar Muhammad Djabir Sjah(1929-1975),[4] untuk melibatkan diri sebagai anggota senat NIT mewakili Maluku Utara, sekaligus merupakan salah satu disainernya.[5]

Pembentukan Negara Indonesia Timur[6] tanggal 24 Desember 1946 mendapat sambutan antusias dari kalangan pendukung federalisme, tak terkecuali Iskandar Muhammad Djabir Sjah. Bagi Iskandar MuhammadDjabir Sjah, Negara Indonesia Timur akan menjelma menjadi negara makmur yang dapat menjamin keadilan dengan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien karena lingkup wilayahnya lebih terbatas. Selain itu, Negara Indonesia Timur juga dapat memberi ruang kepada raja-raja di Timur Indonesia untuk tetap berkuasa.[7] Atas ketokohannya

---

[4] Arsip pribadi berupa riwayat hidup (otobiografi) singkat yang ditulis langsung Iskandar Muhammad Djabir Sjah pada tanggal 24 Agustus 1950 menyebutkan bahwa Iskandar Muhamad Djabir Sjah merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan Usman Sjah (Sultan Ternate ke-45) dan Putri Mihir (bangsawan Susupu). Ia dilahirkan di Ternate tanggal 4 Maret 1902. Pendidikan dasarnya dimulai di Ternate tahun 1912 dengan memasuki Sekolah Melayu. Setelah tamat sekolah dasar tahun 1915, ia melanjutkan ke Europese Lagere School (SMP) di Ternate, namun tidak tamat karena bersama ayahnya, Sultan Usman, ia diasingkan Belanda ke Bandung. Ayahnya dituduh terlibat pemberontkan di Jailolo (Halmahera Barat) tahun 1914. Pada tahun 1917, Iskandar Muhamad Djabir Sjahmelanjutkan sekolahnya ke MULO di Batavia. Setelah tamat di sekolah lanjutan tingkat pertamanya itu, ia melanjutkan ke HBS (Horgere Burger School). Setelah tamat di HBS, pemerintah Belanda mengirimnya ke Bima tahun 1925 untuk magang atau pendidikan persiapan menjadi sultan dan diangkat Ambtenaar Terbeschikking di Kesultanan Bima. Setelah menimbah ilmu di Bima, Iskandar Muhammad Djabir Sjah dipulangkan ke Ternate dan pada tanggal 2 September 1929 dinobatkan menjadi Sultan Ternate ke-47 atas persetujuan Pemerintah Belanda.

[5]Ketertarikan Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah pada konsep negara federal telah ada sejak Perang Dunia II. Ketika Sekutu menguasai Maluku Utara, Sultan Ternate dan keluargannya diungsikan oleh Sekutu ke Brisbane Australia (1945-1946) dari kejaran pasukan pendudukan Jepang. Selama di Australia, Iskandar Muhammad Djabir Sjah ditawari oleh Herbertus J. van Mook untuk membentuk sebuah negara dengan faham federal. Iskandar Muhammad Djabir Sjah bahkan dijanjikan menjadi kepala pemerintahan Indonesia bagian Timur jika Jepang menyerah. Setelah Indonesia merdeka, sepulanganya dari Australia, Iskandar Muhammad Djabir Sjah diangkat sebagai kepala daerah (residen) Ternate dengan pangkat Kolonel Tituler der Koninghen Orange van Nasau. Lebih jelasnya lihat Irza Arnita Djafaar, Dari Moloku Kie Raha ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah. (Jakarta: Bio Pustaka, 2005), hlm.103-105.

[6] Negara Indonesia Timur (NIT) dideklarasikan tanggal 24 Desember 1946 di Denpasar dengan presiden pertamannya adalah Tjokorde Gde Rake Soekawati. Wilayahnya dibagi menjadi 13 daerah otonom: Bali, Flores, Lombok, Sumbawa, Sumbu, daerah Timor dan kepulauan sekitarnya, Sulawesi Selatan, Minahasa, Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Selatan dan daerah Maluku Utara. Untuk lebih lengkapnya mengenai pembentukan Negara Indonesia Timur lihat Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit., hlm. 141.

[7]Dikutip dalam naskah pribadi Rini Iskandar Djabir Sjah Wawaruntu berupa obiografi Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah.

dalam memperjuangkan pembentukan Negara Indonesia Timur dari Konferensi Malino sampai Konfrensi Denpasar pada 1946, sehingga dalam perkembangannya pada tahun 1949, Iskandar MuhammadDjabir Sjah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Negara Indonesia Timur kabinet J.E. Tatengkeng (27 Desember 1947-14 Maret 1950).

Ketika Negara Indonesia Serikat (RIS) bubar dan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.[8] Pemerintahan Presiden Soekarno mengasingkan Iskandar Muhammad Djabir Sjah ke Jakarta sebagai tahanan politik. Ia dituduh sebagai salah satu tokoh. Selama di Jakarta, ia ditempatkan sebagai salah satu pegawai Departemen Dalam Negeri sejak tahun 1951, hingga wafat pada 1975.

Selama pengasingannya di Jakarta, kesultanan Ternate mengalami kekosongan pemerintahan. Seluruh kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan dijalankan oleh dewan 18 (*Gam Raha* dan *Bobato Nyagimoi se Tufkange*).[9] Kekosongan itu berdampak pada merosotnya legitimasi kekuasaan elite Kesultanan Ternate akibat hilangnya kontrol politik dan birokrasi di wilayahnya. Kapasitas mereka hanya sebatas pelengkap strukutur pemerintahan hingga berakhirnya pemerintahan Soekarno. Begitu terbatas dan lemahnya kekuasaan elite Kesultanan Ternate, sehingga nyaris tidak banyak yang bisa dilakukan. Hampir semua akses yang mengarah ke kepentingan kekuatan lokal dipastikan terisolasi selama tak adanya sultan.

Ketika memasuki era Orde Baru, Kesultanan Ternate dihidupkan kembali

---

[8] *Bubarnya Negara Indonesia Serikat (RIS) tanggal 17 Agustus 1950 menimbulkan keheranan kalangan Belanda menyangkut cepatnya sistem federasi terhapus dari Indonesia. Kurang lebih enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, bentuk negara sudah berubah menjadi suatu negara kesatuan. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan kekecewaannya dan menuduh pihak Indonesia tidak jujur dalam pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Sikap Pemerintah Belanda menjelma sikap anti Pemerintah Indonesia yang teraktualisasi dalam kebijakan luar negerinya yang secara gigih menentang Indonesia dalam masalah Irian Barat di tahun 1960-an. Ketika Perdana Menteri W. Drees kembali terpilih yang keempat kalinya (1956-1958), ia menjadi pendorong utama untuk memasukan Irian Barat (sekarang Papua) dalam wilayah Kerajaan Belanda ketika diadakan perubahan Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tahun 1956. Untuk lebih lengkapnya lihat Ide AnakAgungGdeAgung, Negara Indonesia TimurKeRepublik Indonesia Serikat.(Yogkarta; UGM Press, 1985), hlm. 284.*

[9] *Dalam struktur Kesultanan Ternate Gama Raha (disamakan dengan MPR) dan Bobato Nyagimoi se Tufkange (disamakan dengan DPR). Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga tertinggi kesultanan. Fungi dan kewenangan Gam Raha adalah memilih, menetapkan dan mengesahkan sultan, meskipun keberadaan sultan telah ditetapkan oleh Bobato Nyagimoi Setofkange. Setiap calon sultan yang diajukan oleh Bobato Nyagimoi Setofkange harus mendapat legitimasi dari Gam Raha, dan apabila calon tersebut ditolak maka calon sultan harus diganti. Sementara fungsi Bobato Nyagimoi Setofkange yaitu (1).Menentukan arah pembangunan. (2).Mengangkat kolano (sultan) dan memecat (impeachment). (3).Bobato Nyagimoi se Tufkange sebagai pemegang kedaulatan, mengawasi sistem yang dijalankan kolano (sultan). Lihat Mudaffar Sjah, Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia. (Ternate : Goheba, 2009), hlm. 4-7.*

secara politik dan budaya di bawah dukungan Golongan Karya (Golkar).[10] Sejak dilantik menjadi Sultan Ternate ke-48 tanggal 29 Nopember 1976 oleh *Bobato Nyagimoi se Tufkange* (Dewan Kerajaan, Sultan Mudafar Sjah[11] mengambil keputusan politik untuk mendukung partai pemerintah Soeharto, yakni Golkar. Dukungan Kesultanan Ternate ke Golkar dipahami sebagai strategi akomodatif agar dapat tetap bertahan di tengah pusaran kekuasaan oteriter dan sentralistik pemerintahan Orde Baru dengan tiga kekuatan utamanya, yakni militer, birokrasi dan Golkar.

Sejak bergabungnya Kesultanan Ternate ke dalam Golkar, Sultan Mudafar Sjah serta para elite kesultanan, terlibat dalam aktivitas politik selama pemilihan umum yang berlangsung setiap lima tahun sekali.Sebagai fungsionaris Golkar, Sultan Mudafar Sjah langsung mengikuti pemilihan umum tahap kedua dalam era Orde Baru tahun 1977. Dukungan Kesultanan Ternate ke Golkar kemudian mengantarkan Mudafar Sjah menjadi anggota DPRD II Kabupaten Maluku Utara periode tahun 1977-1982, anggota DPR RI Fraksi Golkar 1982-1987, anggota MPR-RI 1987-1992, ketua DPD II Golkar Kabupaten Maluku Utara 1997, dan ketua DPRD Kabupaten Maluku Utara 1998. Hal yang sama juga dilakukansejumlah elite Kesultanan Ternate. Melalui partai ini pula dapat mengantarkan mereka untuk menata karir politiknya menjadi anggota legislatif II dan I, akademisi, birokrat, politisi, wartawan, dan pengusaha.

Sementara dalam bidang kebudayaan, istana atau *kadaton* Ternate dihidupkan melalui upacara-upacara tradisional seperti *Kololi Kie* (ritual mengelilingi pulau), *Fere Kie* (ritual mendaki gunung) dan *Legu Gam* (perayaan hari ulang tahun sultan). Pada periode yang sama, Sultan Mudafar Sjah juga melantik sejumlah pejabat pemerintahan kesultanan yang telah vakum sejak ditinggalkan sultan sebelumnya, seperti *sangaji* (bupati), *kapita* (panglima perang), *fanyira* (lurah) dan *salahakan* (wakil sultan pulau seberang) di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Pulau Ternate, dan Kepulauan Sula. Bahkan beberapa *sangaji* yang tersebar di wilayah Maluku Utara yang pernah menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Ternate, seperti *sangaji* Kao, Tobelo, Galela, dan Makian dihidupkan

---

[10]*Pada masa Orde Baru istilah Golkar hanya dikhususkan buat Golongan Karya. Sebagai Golongan Karya, Golkar punya keunikan, yakni bukan partai kader dan partai masa (oleh sebab itu dulunya Golkar tidak mau disebut partai). Namun demikian Selama masa Orde Baru Golkar berhasil menjadi kekuatan politik di Indonesia. Semua kebijakan Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh militer, birokrasi dan termasuk Golkar. Sementara Partai Politik dikhususkan pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).*

[11]*Mudafar Sjah di lahirkan di Ternate 13 April 1938 adalah putra ke-tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah dan Boki Mariyam Cili Gunung Sibela (putri Kesultanan Bacan). Pendidikan SD, SMP, dan SMA-nya ditempuh di Ternate, Makasar, dan Jakarta. Pada tahun 1967 ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Khairun Ternate dan meraih gelar Sarjana Muda Hukum tahun 1970 dan kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia (UI) Jurusan Filsafat dan memperoleh gelar sarjana tahun 1984. Pada tanggal 29 Nopember 1976 ia dilantik menjadi Sultan Ternate ke-47. Lebih jelasnya lihat Radjiloen L. Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal ke Dataran Rendah Limau Jore-jore sebagai Ternate Akhir. (Ternate: Depdikbud, 1982), hlm. 34-35.*

kembali dengan diberi gelar kehormatan.[12]

Langkah Kesultanan Ternate tersebut dilakukan sebagai politik kebudayaan dengan menjadikan istana sebagai pusat pengemban, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan di Maluku Utara. Selain itu, Kesultanan Ternate juga membentuk beberapa media massa lokal seperti *Parada*, *Gamalama*, dan *Foramadiyahi*. Media tersebut dijadikan corong dari pihak kesultanan untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan beberapa agenda politik seperti pemilihan anggota legislatif, walikota, maupun gubernur.

Namun demikian, pemerintahan Presiden Soeharto tidak menginginkan terbentuknya kepemimpinan lokal yang kuat sebab dianggap dapat mengancam kepemimpinan pusat.[13] Selama kekuasaan Orde Baru, elite Kesultanan Ternate tidak diberi kesempatan untuk menjadi gubernur atau bupati. Salah satu cara mencegah menguatnya pempinan lokal adalah dengan menempatkan pegawai nasional dari Jakarta ke tingkat lokal. Pada aspek ini, tentara dijadikan sebagai bagian untuk menjaga kelangsungan politik di Maluku. Pada saat itu, yang menjadi Gubernur Maluku dan Bupati Maluku Utara harus berlatar belakang militer.[14]

Saat itu, pejabat berlatar belakang militer masuk ke jajaran pemerintahan daerah melalui penunjukan langsung dari pemerintah pusat. Jabatan Bupati Maluku Utara sejak periode 1950-1998 banyak diisi pihak militer dan tokoh-tokoh dari luar (non kesultanan), seperti C.K. Soselisa, M.S. Djakir, Soemitro, J. Mansur, A.R. Royani, Supanji, Sutikno, dan Abdullah Assagaf. Selain posisi bupati, dominasi militer atas pemerintahan juga terlihat dari banyaknya orang dari militer yang dikaryakan pada jabatan-jabatan publik di berbagai bidang dan tingkatan pada tingkat provinsi dan kabupaten. Pengangkatan beberapa perwira TNI menjadi bupati

---

[12] *Mengenai kebangkitan kesultanan Ternate dalam ranah politik lokal, lihat Muchdar Abdullah, "Kesultanan Ternate dalam Ranah Politik", tesis S2 Ilmu Politik, UGM, 2006. Dan lihat, SubkhanTomaito, "Strategi Politik Aristokrat di Pemilu: Studi Komparatif tentang Kemenangan Sultan Ternate dan Kekalahan Sultan Tidore dan Sultan Jailolo di Pemilihan Umum DPD RI Tahun 2009 di Provinsi Maluku Utara". Tesis S2 Ilmu Politik, UGM, 2011.*

[13] *Sejak pembentukan pemerintahan daerah tingkat II Maluku Utara, berdasarkan UU No. 60 tahun 1958, dengan menetapkan Ternate sebagai ibukotanya. Sebagai penguasa di tingkat II (bupati) tidak lagi harus dijabat oleh sultan dan keluarganya. Sehingga, terjadi pemisahan antara institusi kesultanan didasarkan pada askriptif dan institusi publik yang dipilih melalui kontestasi partai politik. Dengan demikian, bupati tidak lagi harus dijabat oleh sultan dan keluarganya, sehingga dalam perkembangan selanjutnya jabatan-jabatan publik (bupati) didominasi oleh kelompok non-kesultanan. Mengenai keterlibatan Militer dalam panggung politik lihat, Dwi Pratomo Yulianto, "Oposisi Berseragam: Catatan tentang Hubungan Politik Soeharto dan Militer di Akhir 1980-an" dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) UGM, Vol. 6, No 3, Maret 2003.*

[14] *Selama kepemimpinan bupati yang berlatar belakang militer di Maluku Utara telah melumpuhkan atau tidak memberi ruang kepada kekuasaan tradisional untuk berkuasa. Lebih dari itu, peran politisi sipil seperti anggota DPRD, partai politik, pimpinan organisasi sosial, tokoh-tokoh agama-adat-masyarakat, dibuat tidak berdaya. Bahkan pemerintah daerah dan DPRD tidak memiliki kemampuan tawar-menawar (bargaining power) terhadap penguasa pusat. Hal itu melemahkan dinamika politik lokal terlalu dintervensi oleh pusat yang menyebabkan tidak memungkinkannya kekuatan-kekuatan politik di luar negara berpartisipasi dalam proses terbentuknya sirkulasi elite. Lebih jelasnya baca Moch Nurhasim, et. al. Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah. (Jakarta: LIPI, 2003), hlm.7.*

di Maluku Utara pada rezim Orde Baru sekaligus menunjukkan bahwa para elite Kesultanan Ternate tidak pernah menjadi pemimpin formal dalam pemerintahan daerah di Ternate.

Tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998 dan beralih ke era Reformasi, menghadirkan ruang yang lebih luas bagi elite politik lokal,[15] termasuk elite Kesultanan Ternate. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah merupakan momentum kebangkitan elite Kesultanan Ternate, yang sebelumnya terkungkung dominasi pemerintah Soeharto, untuk membangun basis kekuasaan atas klaim sejarah dan identitas budaya yang dimilikinya. Puncaknya terjadi ketika Propinsi Maluku dimekarkan menjadi dua propinsi berdasarkan UU. No.46 tahun 1999. Sultan Ternate, Mudafar Sjah, menghendaki jabatan gubernur diduduki orang yang berasal dari kalangan istana. Begitu pula pemilihan tempat ibukota propinsi yang harus ditempatkan di wilayah kekuasan Kesultanan Ternate. Besarnya kepentingan dan tajamnya perbedaan politik dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan menjadi pemicu terjadinya konflik terbuka antara kubu Kesultanan Ternate dan non-kesultanan dalam pemilihan kepala daerah di Maluku Utara.[16]

Kebangkitan Sultan Ternate pasca-Orde Baru mengambarkan bagaimana kelompok istana memainkan peran baru agar tetap berada pada posisinya sebagai pengenggam kekuasaan di ranah lokal. Dalam hal ini, munculnya Sultan Mudafar Sjah dapat dipahami dan diartikan ke dalam tiga hal. *Pertama,* bangkitnya kekuasaan feodalistik di daerah untuk memperkuat posisi politik bersumber dari konstruksi budaya yang berbasiskan pada sejarah masa lalu maupun kesamaan genealogis. *Kedua*, kebangkitan secara individual Sultan Ternate Mudafar Sjah dengan mengatasnamakan institusi kesultanan sebagai kendaraan politiknya.*Ketiga*, adanya keinginan elite Kesultanan Ternate untuk lebih diakomodasikan secara institusional ke dalam panggung politik pemerintahan formal.[17]

Realitas tersebut menunjukkan partisipasi politik Kesultanan Ternate dalam ranah politik lokal pasca-kemerdekaan hingga kini, merupakan sebuah bidang penelitian sejarah yang penting. Sebagai sebuah fenomena historis, proses dinamika politik lokal seperti ini menarik untuk diteliti, karena telah sejak lama para Sultan Ternate menjadi bagian dalam sejarah perpolitikan di Maluku Utara. Selain itu, ada sebuah pesan implisit tentang betapa parsialnya kajian politik Indonesia bila hanya memfokuskan pada dinamika politik nasional saja. Pada hal ada beberapa persoalan politik nasional yang awalnya dapat diruntut dari daerah dan begitu pula sebaliknya.

---

[15] *Mengenai elite politik lokal, lihat Henk Schulte Nordholt, et. al. Politik Lokal di Indonesia.(Jakarta: KITLV, 2007), dan lihat David Henley, et al. Adat Dalam Politik Indonesia. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 173.*

[16] *Mengenai konflik politik Kesultanan Ternate dan non kesultanan dalam pemilihan kepala daerah di Maluku Utara, lihat Gerry van Klinken, Perang Kota Kecil Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. (Jakarta: KITLV, 2007).*

[17] *Maryanto Wahyu Tryatmoko, "Pemekaran Wilayah dan Pertarungan Elite Lokal di Maluku Utara, dalam Jurnal LIPI Jilid XXXI, No 1, 2005, hlm.76.*

B. Pendekatan dan Tinjauan Historiografis

Penulisan sejarah membutuhkan kerangka teori agar dapat memahami fonomena sosial masyarakat. Menurut Sartono Kartodirdjo, teori bukan saja diperlukan dalam menyimpulkan generalisasi-generalisasi yang diambil berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan, tetapi juga dalam memberi kerangka orientasi untuk mengklasifikasikan dan menganalisis fakta-fakta sejarah yang dikumpulkan dalam penelitian.[18] Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibrahim Alfian bahwa fungsi teori dalam sejarah adalah membantu menetapkan jenis-jenis fakta yang relevan (teori sebagai orientasi), sehingga mempersempit rentan (*renge*) fakta-fakta yang harus diteliti.[19] Hal ini sesuai dengan pendapat Bambang Purwanto bahwa kebenaran sejarah sama halnya dengan kebenaran sastra, sama-sama bersifat relatif, maka diperlukan teori penjelasan yang dapat diverifikasi melalui pengujian empirik.[20] Oleh sebab itu, untuk mengindentifikasi persoalan-persoalan yang dikaji dalam penelitian ini maka penulis mengunakan beberapa konsep yang dianggap relevan dalam penilitian ini.

Konsep pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep elite[21]. Dalam konteks ini, mengenai siapa sebenarnya yang dapat disebut elite di Ternate? Hal ini penting sekali untuk membangun kesepahaman dalam kerangka analisis pada kata ini sehingga tidak mengakibatkan generalisasi yang berlebihan. Elite yang menjadi fokus penelitian ini adalah Sultan dan bangsawan, yaitu kelompok yang terbatas secara kuantitatif dan sangat menonjol dalam posisi level atas dalam politik lokal di Ternate.

Teori elite memandang bahwa dalam sistem politik umumnya ditandai oleh adanya lapisan yang berkuasa dan lapisan yang dikuasai. Konsep pelapisan ini dapat dijumpai dalam berbagai tulisan, mulai dari karya Mosca, Pareto, Michels, sampai Darso. Hampir semuanya berpendapat sama bahwa setiap masyarakat di manapun berada akan selalu dipimpin oleh sekelompok kecil individu-individu yang berkuasa yang pada gilirannya lebih dikenal dengan sebutan kelompok elite, yang terdiri dari

---

[18] *Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 4.*

[19] *Ibrahim Alfian, Tentang Metodologi Sejarah dalam T. Ibrahim Alfian, et. al. Dari Babad Hikayat Sampai Sejarah Kritis. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm.16.*

[20] *Bambang Purwanto, op.cit., hlm. 4.*

[21] *Teori ini memandang bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas dan mencakup beberapa hal. Pertama, sekelompok kecil orang yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah. Kedua, sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elite sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan maupun sedang berkuasa. Menurut Mosca, dalam sistem politik terdapat dua lapisan masyarkat. Masing-masing adalah kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah (the ruling class dan sub elite). The ruling class merupakan golongan penguasa yang jumlahnya biasanya lebih sedikit. Walau demikian, mereka memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan. Sedangkan kelas yang diperintah yang jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan kelas pertama melalui instrumen-instrumen penting organisme politik. Lihat Haryanto, Kekuasaan Elite SuatuBahasanPengantar. Yogyakarta: FISIPOL UGM, 200.*

sejumlah besar individu- individu anggota masyarakat lainnya. Mereka yang berhasil memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut dalam jumlah yang banyak pada gilirannya akan menduduki lapisan atas dari stratifikasi dalam masyarakat bersangkutan. Sebaliknya, mereka yang tidak berhasil memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut akan berada pada lapisan bawah dari stratifikasi. Dengan demikian, elite yang paling unggul kedudukannya adalah kelompok yang mempunyai kekuasaan politik. Sebab di lapangan politik, keputusan yang diambil disertai dengan sanksi yang kuat dan mengikat seluruh masyarakat.[22]

Gambar 1. Model struktur elite Mosca

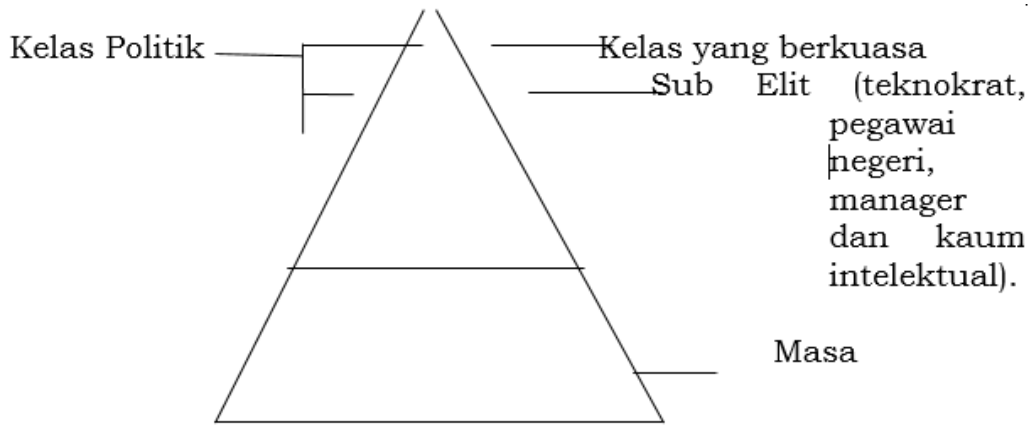

Sumber: S.P Varma (2001)

Sementara Soejono Soekanto lebih memfokuskan kajian elite dalam hubunganya dengan kekuasaan. Soejono Soekanto memberikan penjelasan penting bahwa elite sebagai kelompok orang-orang yang dalam situasi sosial tertentu menduduki posisi tertinggi, dianggap mempunyai kekuasaan besar dan hak istimewa, atau kadang-kadang diartikan sebagai golongan aristokrat yang berkuasa karena faktor keturunan. Seringkali juga diartikan sebagai posisi dalam struktur sosial yang relatif tinggi, sehingga mereka yang menduduki posisi tersebut juga mempunyai kedudukan yang tinggi.[23]

Pada masa otonomi daerah, elite tradisional seakan menemukan ruang baru untuk mengunakan basis kuasa yang dimilikinya. Dalam hal ini ada tiga basis yaitu; pertama, basis kultural. Basis ini kadang lebih menyangkut pada kesamaan etnis/ras, suku, maupun adat (indentitas lokal) yang dimilikinya.

Kesamaan indentitas lokal inilah yang kemudian menjadi kekuatan dari setiap elite untuk menyelimuti kepentingan terselubungnya, sehingga seakan-akan simbol-simbol budaya yang muncul dan dominan. Indentitas kultural semakin

[22] *Mengenai teori elite, Lihat Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elit: Peran Elit Penentu dalam Masyarakal Modern. (Jakarta: Raja Grafindo, 1984), hlm. 64-67. Battomore T.B., Elit dan Masyarakat. (Jakarta: Akbar Tanjung Institut.2006), hlm. 3-4.*

[23] *Soejono Soekanto, Kumpulan Istilah-istilah Sosiologi. (Jakarta: UI, FIS, 1997), hlm. 51.*

tempat pada konteks demokrasi lokal pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang sering disebut sebagai bagaian dari proses transisi.

Dalam perkembangan demokrasi terjadi sirkulasi elite, yaitu rotasi atau bergantinya individu yang memegang jabatan politik strategis melalui mekanisme rekruitmen politik.Jabatan-jabatan itu diduduki silih berganti berdasarkan perubahan keadaan politik, sosial, maupun karena regenerasi. Pejabat lama pergi dan digantikan pejabat baru. Perubahan-perubahan tersebut juga seringkali menimbulkan pergeseran peran serta fungsi dari lembaga lama ke lembaga baru. Hal ini dapat dilihat pasca-kemerdekaan hingga kini, terdapat sejumlah elite Kesultanan Ternate menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal seperti ketua DPRD, anggota DPRD, birokrasi, pemimpin-pemimpin partai politik, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan sebagainya. Elite ini menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat.

Dengan demikian, berlangsung rotasi atau pergantian individu yang memegang jabatan kultural ke jabatan publik melalui mekanisme rekruitmen politik. Terjadilah sirkulasi elite. Dalam kondisi itu, menurut Sartono Kartodirdjo, peranan golongan elite sangat penting, di satu pihak terdapat elit tradisional (sultan dan para bangsawannya) yang mempertahankan *status quo* dan memandang setiap perubahan sebagai ancaman bagi mereka. Sementara di lain pihak, terdapat golongan elite baru yang memegang kepemimpinan sekaligus agen pembaharuan.[24]

Sejalan dengan itu, menurut Alfian sirkulasi elite dibagi kedalam tiga tipe. *Pertama,* sirkulasi elit yang berlangsung di antara mereka yang tergabung dalam *the governing elite*. *Kedua*, sirkulasi elite, yang berlangsung antara mereka yang tergabung dalam *the governingelite* dengan massa. *Ketiga,* sirkulasi elite sebagai bentuk dari tipe kedua dapat berupa: (1), individu-individu dari strata bawahan yang berhasil masuk ke dalam jaringan elite dan, (2), individu-individu dari strata bawah yang membentuk kelompok elite baru serta berjuang melawan elite yang sudah ada untuk memperoleh kekuasaan.[25]

Konsep yang kedua yang digunakan adalah konsep pemerintahan aristokrasi.[26] Dalam konteks ini, Arsitoteles, Montesquieu, dan Miriam Budiardjo menyatakan bahwa aristokrasi sebagai suatu model pemerintahan memiliki dua bentuk, sifat, dan karakteristik. *Pertama*, bentuk susunan pemerintah aristokrasi dapat dilihat dari jumlah orang yang memegang pemerintahan, yaitu pemerintahan dipegang atau dilaksanakan oleh beberapa atau segolongan orang. *Kedua*, ciri dan

---

[24] *Sartono Kartodirdjo, Elite dalam Perspektif Sejarah. (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. viii.*

[25] *Alfian, Menjadi Pemimpin Politik; Perbincangan Kepimpinan dan Kekuasaan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009), hlm. 8.*

[26] *Secara etimologi, kata aristokrat berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu aristos (aristoi) yang berarti kaum bangsawan atau kaum cendikiawan atau orang baik-baik, dan kata kratos (kratein) yang bermakna sistem kekuasaan (pemerintahan). Dengan kata lain, pemerintahan aristokrasi adalah pemerintahan yang berpusat pada beberapa orang bangsawan (ningrat) yang berusaha menjalankan pemerintahan demi mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Lebih jelasnya lihat Haryanto, Kekuasaan Elite Suatu Bahasan Pengantar. (Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2000), hlm. 7-8.*

karakter dari pemerintahan aristokrasi ditujukan untuk kepentingan umum demi pencapaian keadilan.

Sejalan dengan itu menurut Suzanne Keller, aristokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terbaik dan dilakukan oleh warga negara terbaik untuk kepentingan semua warga. Pemerintahan aristokrasi, menurut Suzanne Keller adalah bentuk pemerintahan yang terbaik (atau setidaknya yang paling tidak pernah jelek) yang pernah dipraktekan atau pernah menjadi pilihan pemerintahan pada beberapa negara seperti; Roma (Italia),Spanyol, Yunani dan Portugal pada abad pertengahan. Sejak Revolusi Perancis, aristokrasi secara umum telah kontras dengan demokrasi, di mana beberapa Negara memilih bentuk kekuasaan politiknya bertumpuh pada pemerintahan oleh rakyat (demokrasi).

Pemerintahan aristokrasi mengandung makna kepemimpinan yang dijalankan dalam pemerintahan dengan mengedepankan kualitas moral yang tinggi dan handal. Kelompok ini memiliki sejumlah kekayaan terutama berkaitan dengan tanah. Dengan menguasai sejumlah tanah, maka kelompok (aristokrat) memiliki modal ekonomi yang cukup kuat dan strategis.[27] Seiring dengan perkembangan zaman, aristokrasi kemudian berubah bentuk menjadi sistem kekuasaan yang bersandar pada ukuran keturunan. Kekuasaannya disejajarkan dengan model "dinasti" dan menempatkan tokoh keturunan sebagai pusat kekuasaan.[28]

Terpusatnya kekuasaan yang dijalankan oleh beberapa orang, menunjukkan bahwa praktek penyelengaraan pemerintahan di Kesultanan Ternate merupakan bentuk pemerintahan aristokrasi. Hal yang menarik adalah perekrutan elite di Kesultanan Ternate tidak hanya dipertimbangkan dari hubungan pertalian darah dan legitimasi politik, tetapi juga berkaitan dengan faktor representasi etnis yang mendiami Pulau Ternate.[29]

Ini berarti bahwa masyarakat Maluku Utara terbagi habis kedalam unit-unit politik yang kecil dan dipersatukan melalui sistem perwakilan distrik. Ikatan-ikatan teritorial inilah yang menjadi pondasi legitimasi kekuasaan sekaligus landasan integrasi eksisnya Kesultanan Ternate. R.Z. Leirissa mengatakan bahwa Kesultanan Ternate adalah *aristocrat-state* dengan rezim yang tersentralisasi karena pengakatan raja atau sultan dalam tradisinya harus menempuh beberapa tahapan dengan melibatkan para pejabat Kesultanan Ternate dan melalui musyawarah.[30]

---

[27] *Suzanne Keller, op.cit., hlm. 64.*

[28] *Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.32.*

[29] *Terdapat 18 marga di Pulau Ternate. Semua marga itu memiliki perwakilan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate yang disebut bobato nyagimaoi setofkange. Pertama, terdiri dari marga Kimalaha yang meliputi Kimalaha Marsaoli, Kimalaha Tomaito, Kimalaha Tomagola, Kimalaha Tamadi, Kimalaha Payahe, Fanyira Jiko, Fanyira Jawa, Fanyira Tolangara, Fanyira Tabala. Kedua, marga Sangaji yang juga terdiri dari sembilan soa atau marga. Para pemimpinnya mempunyai pangkat yang sama namanya, yakni Sangaji yang terdiri atas Sangaji Tomajiko, Sangaji Malayu, Sangaji Limatahu, Sangaji Kulaba, Sangaji Malaicim, Sangaji Tobolen, Sangaji Tafamutu, Sangaji Tafaga, dan SangajiTokafi.*

[30] *R.Z. Leirissa, Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra. (Jakarta: Depdiknas, 1999), hlm. 34.*

Konsep yang *ketiga*, yang digunakan adalah partisipasi politik.[31] Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.Partisipasi politik yang meluas merupakan cirri khas modernisasi politik. Sehingga dalam merumuskan makna demokrasi ada tiga hal yang paling elementer; *pertama*, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pimpinan atau kebijakan. *Kedua*, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individudan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, dan *ketiga*, adanya jaminan kebebasan sipil dan politik, berupa kebebasa berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung kedalam organisasi yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.[32]

Menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Olehsebabitu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, makaakanlebihbaik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.[33]

Partisipasi politik merupakan proses dimana anggota masyarakat mampu membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan; kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Pada konteks ini bagaimana sebenarnya partisipasi politik elite Kesultanan Ternate dalam proses transisi politik dari rezim Soekarno hingga reformasi, dan bagaimana rivalitas politik kalangan elite kedalam arena kebudayaan, ekonomi dan institusi politik modern (birokrasi dan partai politik).

Konsep yang *keempat*, yang digunakan adalah konsep politik lokal. Politik sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sampai dalam melaksanakan tujuan

---

[31]*Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Lihat Suryadi, Budi, Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep. (Yogyakarta: IRCiSoD 2007), hlm, 6-7.*

[32]*Syarbaini Syahrial, et,al.,Sosiologi dan politik. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 78-79.*

[33]*Miriam Budiardjo,op.cit., hlm.41.*

tersebut. Roger F Soltau mendefenisikan politik sebagai kajian tentang negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya atau dengan negara-negara lain.[34]Sejalan dengan itu menurut Deliar Noer mengemukakan bahwa politik memusatkan perhatian pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.[35] Politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan melaksanakan kekuasaan dan mengatur pembagian nilai secara autoratatif untuk dan atas nama masyarakat.

Sejalan dengan itu menurut Kuntowijoyo, sejarah politik tingkat-lokal adalah peristiwa-peristiwa nasional yang menjadi bagian dari peristiwa lokal, bukan peristiwa lokal yang tetap lokal, akan tetapi lokal meningkat menjadi nasional, atau nasional yang meningkat menjadi internasional.[36]Konsep tersebut memberi pemahaman tentang perbedaan politik tingkat lokal dengan politik lokal.Jika politik tingkat lokal adalah kepanjangan dari peristiwa-peristiwa nasional, maka sebaliknya politik lokal adalah peristiwa-peristiwa lokal berhenti di tempat itu tanpa ada kaitannya dengan peristiwa nasional.[37] Hal ini senada di kemukakan oleh Sartono Kartodirdjo bahwa peristiwa-peristiwa politik sebagai sebuah proses yang kompleks. Proses politik sangat ditentukan oleh sikap dan kelakuan politik yang pada hakekatnya multidimensional sifatnya yang mencakup faktor ekonomi, sosial budaya, relegi dan sebagainya.[38]

Oleh karena itu, konsep politik tersebut diperlukan sebagai sebagai sebuah kerangka eksplanasi tentang perkembangan dan partisipasi politik elite kesultanan Ternate sejak kemerdekaan hingga awal.

Studi tentang "Sultan Dalam Sejarah Politik Ternate 1945- 2002" merupakan sesuatu yang baru karena belum pernah diteliti para sejarawan maupun ilmuwan politik. Kebanyakan penelitian mengenai sejarah politik di Ternate yang telah dilakukan belumlah merupakan suatu studi yang integral dalam arti suatu studi yang menempatkannya sebagai suatu studi lembaga dalam masyarakat secara utuh dan lengkap. Kebanyakan penelitian mengkhususkan diri pada katagori tertentu, seperti sejarah kebudayaan, sejarah ekonomi, sejarah agama dan lebih pada periode kekuasaan kolonial. Begitu pula penelitian pasca-kemerdekaaan yang lebih banyak berkaitan dengan konflik pemekaran daerah pada era reformasi. Namun demikian, terdapat beberapa studi tentang sejarah politik yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian itu nantinya akan dijadikan sebagai model, kasus, dan sumber rujukan dalam penulisan ini.

Salah satu tulisan berharga mengenai pemerintahan Kesultanan Ternate

---

[34] Roger F Soltau,The Study Of Politik. (Terjemahan Daniel Dhakide). (Jakarta: Rajawali. 1991), hlm. 4.

[35] Deliar Noer, Tradisi Kekerasan Politik di Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama),1995, hlm. 56.

[36]Kuntowijoyo, op cit., hlm.186.

[37]Ibid. hlm. 176.

[38] Sartono Kartodirdjo, op. cit., hlm. 174.

adalah karya Djoko Suryo.[39] Buku ini memberikan pemahaman luas dalam membicarakan proses Islamisasi dan perubahan struktur politik dari kerajaan ke struktur kesultanan. Djoko Suryo menjelaskan fase awal Islamisasi di Ternate tanpa memberikan landasan yang cukup kuat untuk pembentukan negara Islam. Agama Islam diterima di Ternate ketika pusat kekuasaan lokal (*Maloku Kie Raha*) sudah terbentuk dan memiliki basis legitimasi geneologis-teritorial yang kokoh. Konversi agama memang dilakukan, tetapi tidak selalu berarti menyebabkan terjadinya perubahan struktur politik yang sudah mapan.

Awal kehadiran Islam di Ternate seolah hanya sekedar hanya memberi konformasi atas struktur yang ada. Posisi ini mulai mengalami pergeseran ketika kolonial Portugal, lalu kemudian Belanda, datang berkuasa di kawasan ini. Lebih lanjut menurut Djoko Suryo, kondisi ini tidak banyak bergeser hingga kemerdekaan Indonesia, ketika kedudukan peripherial Ternate dari sudut ekonomi dan politik terus merosot. Akibatnya, kecenderungan mistifikasi Islam semakin meningkat, bahkan mencapai wajahnya yang cukup ekstrim, seperti terungkap dari keyakinan Mudafar Sjah (sultan saat ini) bahwa Islam di Ternate mendahului keberadaan Islam di Mekah. Oleh sebab itu, dilihat dari sudut sejarah politik, penelitian ini merupakan salah satu dasar dalam memahami dan mengkaji sistem pemerintahan tradisional di Kesultanan Ternate.

Leonard Y. Andaya, ilmuan asing yang tertarik meneliti sejarah sosial dan politik di Maluku pada masa Hindia Belanda, menghasilkan karyanya berjudul *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*.[40] Hasil penelitian Andaya menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan di Maluku, terutama pada karesidenan dan Kesultanan Ternate, memiliki struktur yang kompleks dan ekstrim.Kompleksitas tersebut hadir ketika kekuasaan Kesultanan Ternate memiliki sumber daya dan potensi untuk membangun perluasan kekuasaannya antara pusat-pinggiran yang semakin kokoh dengan melibatkan bangsa-bangsa Eropa.

Menurut Andaya, dalam struktur politik, terdapat pelapisan sosial penduduk Kesultanan Ternate yang terbagi ke dalam dua kelas sosial, yaitu penguasa (sultan) beserta institusi kekuasaannya dan kawula (warga). Sebagai penguasa dan patron, sultan beserta institusi kesultanan memiliki perbedaan kedudukan dengan para warga yang menjadi kliennya. Berbagai pembentukan legitimasi kultural dan religius ditujukan bagi pengesahan kekuasaan tersebut. Karya ini sangat penting sebagai acuan untuk memahami struktur pemerintahan tradisional Kesultanan Ternate.

Hasil penelitian lain yang sangat berguna untuk memahami asal usul elite Kesultanan Ternate adalah karya Christiaan Frans Fraasen.[41] Peneliti ini menggambarkan Ternate sebagai pusat pemerintahan yang berhubungan dengan

---

[39] *Djoko Suryo, et. al. Agama dan Perubahan Sosial: Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial Politik Indonesia. (Yogyakata: UGM LKPSM. 2001).*

[40] *Leonard Y. Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period. (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993).*

[41] *Christiaan Frans van Fraasen, Ternate, De Molukken en De Indonesische Archipel, Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cultuur en Indonesia. (Disertasi Universiteit Leiden, 1987).*

keragaman suku bangsa yang ada di dalamnya. Christiaan Frans Fraasen menampilkan bentuk-bentuk perubahan strukur politik di Kesultanan Ternate dari *kolano* (kerajaan) ke kesultanan. Hal ini berdampak pada penambahan sejumlah lembaga ke dalam struktur pemerintahan kesultanan. Dalam struktur politik tersebut, menurut Christiaan Frans Fraasen, pihak penguasa yang berperan sebagai pusat kekuasaan diwakili oleh kelompok sosial yang ada di wilayah Kesultanan Ternate.

Penelitian lain yang bermanfaat dan cukup inspiratif dalam membicarakan partisipasi Kesultanan Ternate pasca-kemerdekaan adalah karya Irza Arnita Djafar.[42]Karyanya berupa biografi politik Iskandar Muhammad Djabir Sjah yang berisi gagasan pembentukan Negara Indonesia Timur yang prakarsai Iskandar MuhammadDjabir Sjah selama menjadi anggota senat dan menteri dalam negeri Negara Indonesia Timur. Menurut Irza Arnita Djafar, dalam sisi kepentingan politik Belanda, sejak awal Iskandar Muhammad Djabir Sjah telah dipersiapkan untuk menjadi boneka Belanda. Sejak kecil dia telah dimasukan ke sekolah Belanda, ELS, MULO, dan HBS. Ia kemudian dilantik oleh Belanda menjadi Sultan Ternate ke-46 dan diangkat menjadi Residen Ternate dengan pangkat Letnan Kolonel. Sejak Konferensi Malino sampai dengan Konferensi Denpasar, Iskandar MuhammadDjabir Syah selalu berpartisipasi dengan menyetujui keputusan tentang negara federal yang diprakarsai van Mook dan secara konsisiten selalu mempertahankannya karena mirip dengan konsep Kesultanan Ternate yang selama ini dianutnya. Iskandar MuhammadDjabir Sjah selalu berpegang pada prinsip itu karena memandang situasi sosiologis-antropologis bangsa Indonesia yang bersifat majemuk sehingga konsep federalisasilah yang cocok untuk bangsa Indonesia.

Pandangan lain mengenai konsep negara federasi dapat ditemukan dalam karya Ide Anak Agung Gde Agung yang dapat membantu memahami pembentukan Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat.[43] Karya ini menjelaskan kebijakan pemerintah Belanda untuk mendirikan sebuah negara federal yang dinamakan Negara Indonesia Serikat (RIS). Secara kronologis karya ini menguraikan dengan terperinci konferensi-konferensi yang digagas van Mook mulai dari Konferensi Malino hingga Konferensi Denpasar pada tahun 1946 untuk membentuk Negara Indonesia Timur. Bentuk negara seperti itu merupakan pintu masuk bagi van Mook untuk merealisasikan cita-citanya menciptakan suatu Negara Republik Indonesia Serikat yang masih tetap berada dalam lingkungan kekuasaan kerajaan Belanda, sesuai dengan konsep yang telah diparaf kedua pihak, yakni Republik Indonesia dan pihak Belanda pada tanggal 15 November 1946.

Menurut Ide Anak Agung, sejak berdirinya Negara Indonesia Timur tanggal 24 Desember 1946, telah terjadi enam kali pergantian kabinet. Pergantian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif dan dibangun atas dasar ketidakkepercayaan lembaga pemerintahan dalam Negara Indonesia Timur. Lebih lanjut menurut Ide Anak Agung, pada dasarnya pembentukan negara-

---

[42] *Irza Arnita Djafaar, Dari Moloku Kie Raha ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Sjah. (Jakarta Bio Pustaka, 2005).*

[43] *Ide Anak Agung Gde Agung, Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat. (Yogkarta; UGM Press, 1985).*

negara bagian adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan berdasarkan keinginan Belanda untuk menanamkan pengaruhnya dalam Negara Indonesia Timur. Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, juga demontrasi-demontrasi yang membentuk pembubaran Negara Indonesia Timur sebagian datang dari pemimpin-pemimpin Indonesia, termasuk yang ada dalam parlemen. Mereka menghendaki secepatnya menghapus sistem federal dan kembali ke negara kesatuan pada 17 Agustus 1950.

Sejalan dengan itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh AA GN Ari Dwipayana.[44] Buku ini mengeksplorasi fonomena kembalinya kuasa kaum bangsawan di dua kota yaitu Kota Surakarta dan Kota Denpasar. Beberapa isu penting yang dibahas dalam karya ini adalah bagaimnaa genologis kekuasaan dari kaum bangsawan di dua kota tersebut, bagaimana krisis yang dialami oleh bangsawan di dua kota tersebut, dan bagaimana posisi kalangan bangsawan dalam proses transisi politik pasca Pemerintahan Soeharto serta bagaimana rivalitas politik kalangan bangsawan kedalam arena kebudayaan, ekonomi dan institusi politik modern (birokrasi dan partai politik).

Selain itu terdapat juga penelitian mengenai politik lokal di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Henk Schulte Nordholt et al.[45] Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis relasi negara dengan pemerintahan lokal pasca Orde Baru, dari perspektif studi politik lokal. Ditetapkannya peraturan perundangan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004), memberi angin segar bagi praktik demokrasi di tingkat lokal pemerintahan daerah. Dinamika politik dan pemerintahan lokal serta benang kusut kuasa negara terhadap pemerintah lokal dalam koridor implementasi politik desentratisasi dan otonomi daerah.Karya tersebut dipakai untuk meneropong politik lokal di Ternate.

Sejalan dengan karya tersebut, penelitian lain yang bermanfaat adalah David Henley,et al.[46] David Henley dalam buku tersebut menyebutkan kebangkitan adat di Indonesia disebabkan memudarnya kekuasaan negara yang sentralistik pasca Orde Baru memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari orde-orde lain yang bisa memberikan keadilan, ketertiban dan kedamaian bagi kehidupan mereka. Adat menjadi salah satu tempat berpulang masyarakat untuk mengorganisir dirinya atas dasar klaim-klaim tradisi masa lalu.Kembali kepada tradisi yang disebut juga tradisionalisme kemudian menjadi pengganti dari sentralisme yang gagal memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat.Selain itu, momentum reformasi juga dimanfaatkan oleh sultan-sultan untuk kembali menegaskan posisi politik dan otoritasnya mengalokasikan sumber daya dengan membentuk Forum Komunikasi Keraton-Keraton Indonesia (FKKKI). Pada wujudnya yang lain, adat mempertegas ekslusivitasnya dengan kelompok-kelompok lain atas nama hak etnis yang akhirnya menimbulkan konflik-konflik horizontal yang mengerikan. Sejumlah konflik etnis

---

[44] *AA GN Ari Dwipayana, BangsawandanKuasaKembalinya Para Ningrat di Dua Kota. (Yogyakarta, IRE Press, 2004).*

[45] *Henk Schulte Nordholt, et.al., Politik Lokal di Indonesia. (Jakarta: KITLV, 2007).*

[46] *David Henley, et al., Adat Dalam Politik Indonesia. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010).*

menunjukkan bahwa adat dapat digunakan sebagai alat etnopolitis yang turut berkontribusi pada kerusuhan etnis di Sambas dan Sampit di Kalimantan, Poso di Sulawesi Tengah, dan di Maluku Utara.

Sejalan dengan itu adalah hasil penelitian yang dilakukan Syafuan Rozi dan Tri Ratnawati.[47] Penelitian keduanya menjelaskan bahwa pemekaran Maluku Utara menjadi propinsi baru berdasarkan UU 46 tahun 1999 memperlihatkan bagaimana para elite politik lokal (Kesultanann Ternate dan non-kesultanan) saling berkompetisi memperebutkan jabatan kepala daerah. Namun demikian, studi ini tidak menggambarkan peranan dominan elite politik lokal dalam melakukan politisasi pemekaran daerah dan kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai momen politik lokal dalam pertarungan perebutan jabatan politik.

Selain beberapa karya tersebut, terdapat beberapa karya lain yang dipakai sebagai studi kasus atau studi komparatif dalam penelitian ini seperti karyaSoemarsaid Moertono.[48] Dalam bukunya, Soemarsaid Moertono memaparkan kehidupan penguasa pada masa Mataram II, yaitu bagaimana raja melegitimasikan kekuasaanya yang besar dan membuatnya supaya dapat diterima. Menurutnya, konsep magis-religius dalam kerajaan-kerajaan di Jawa memainkan peranan yang menentukan tidak hanya dalam membenarkan dan memperkokoh kekuasaan raja, tetapi juga dalam menjelaskan peranan orang yang memerintah dan diperintah maupun hubungan antara raja dan rakyatnya.

Pandangan lain mengenai elite juga terdapat dalam buku karya Sartono Kartodirdjo.[49] Ia mengungkapkan bahwa konsepsi orang Jawa mengenai kekuasaan adalah sebagai kekuatan energi yang sakti dan keramat. Kekuasaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep spiritual berupa kepercayaan adanya kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos serta jagad raya dan dunia manusia. Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa konsepsi Jawa mengenai kekuasaan berdimensi empat sesuai konsepsi yang dipakai dalam pewayangan (sakti mandraguna dan mukti wibawa). Negara kosmis sangat erat hubungannya dengan konsep raja yang bersifat dewa, yaitu anggapan bahwa raja adalah titisan dewa. Konsep raja-dewa ini pada periode kerajaan Islam tidak menempatkan raja pada kedudukan yang sama dengan Tuhan, melainkan sebagai *khalifatullah* (wakil Tuhan di dunia).

Pandangan tentang kekuasaan bangsawan juga datang dari Suhartono W. Pranoto.[50] Ia menyebutkan bahwa kedudukan sosial di masyarakat Jawa, khususnya masyarakat *vorstenlanden*, terbagi dalam dua bagian. Masing-masing golongan atas yang disebut *wong luhur, wong gede, priyayi*, dan golongan bawah yang disebut *kawalu alit, wong cilik,* serta rakyat. Kedudukan bangsawan dalam masyarakat lebih banyak didominasi oleh motivasi askriptif yang menunjukan pada keturunan sebuah

---

[47] *Nurhasim Muchtar, et al, Konflik Antar Elit Lokal dalam Pemelihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah. (Jakarta: LIPI, 2003).*

[48] *Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, abad XVI Sampai XIX. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985).*

[49] *Sartono Kartodirdjo, Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial. (Jakarta: LP3, 1984).*

[50] *Suhartono W. Pranoto, Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).*

wangsa. Menurut Suhartono W. Pranoto, garis keturunan menentukan keterdekatan dengan raja dan *privilege* memberikan imbalan. Mereka itu adalah keluarga sekitar raja, putra raja, dan keluarga yang masih mempunyai hubungan geneologis yang dekat. Mereka adalah sentana atau bangsawan yang mempunyai status tinggi dalam masyarakat Jawa.

Sejalan dengan itu, karya Benedict R. O'G. Anderson, yang menguraikan pandangannya mengenai konsep kekuasaan Jawa.[51] Ia menggambarkan kekuasaan Jawa dalam empat model politik. *Pertama,* kekuasaan adalah abstrak. *Kedua,* sumber-sumber kekuasaan adalah heterogen. *Ketiga,* pemupukan kekuasaan tak memiliki batas inheren. *Keempat,* kekuasaan secara moral ambigu. Lebih lanjut menurut Benedict R. O'G. Anderson, dalam usahanya memperoleh, menghimpun, dan mempertahankan kekuasaanya, raja Jawa melakukan tindakan-tindakan yang menekan hawa nafsu, misalnya berpuasa, bersemadi, bertapa, melakukan pemurnian ritual, dan sebagainya.

Selain itu, terdapat karya Heather Sutherland[52] yang membahas terbentuknya elite birokrasi. Menurutnya, suatu elite birokrasi terbentuk melalui hubungan-hubungan sosial dan kekerabatan yang saling menjalin. Dalam hal ini, pemerintah Hindia Belanda berperan utama melalui pendidikan dan pengawasan yang sesuai dengan kepentingan-kepentingannya. Heather Sutherland menjelaskan peran para bupati di Jawa pada masa kolonial Belanda dan bagaimana kedudukan para bupati di dalam pemerintahan.

Telaah pustaka yang telah diuraikan di atas menunjukan perlunya suatu penulisan sejarah yang lebih khusus mengenai elite Kesultanan Ternate. Penelitian ini menekankan pada upaya mencari dan mengali bagaimana geneologis kekuasaan elite Kesultanan Ternate dan bagaimana posisi kalangan elite Kesultanan Ternate dalam proses transisi politik pasca-kemerdekaan hingga Era Reformasi serta bagaimana rivalitas politik elite Kesultanan Ternate dan non-kesultanan dalam arena politik lokal. Penelitian ini menjadi penting untuk melengkapi penelitian-penelitan sebelumnya sebab sampai saat ini, belum ada satu pun hasil studi yang membahas mengenai partisipasi elite Kesultanan Ternate pada periode 1946- 2002.

C. Sumber Penulisan

Taufik Abdullah mengatakan bahwa ilmu sejarah tidaklah semata-mata bergantung pada teori, metode, dan teknik. Ilmu sejarah harus ditunjang oleh tersedianya sumber. Tanpa adanya sumber, maka penelitian dan penulisan sejarah hampir tidak mungkin bisa dilakukan.[53]

---

[51] *Benedict R. O'G. Anderson, Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia. (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000).*

[52] *Heather Sutherland, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).*

[53] *Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1996), hlm. 320. Dan lihat Sartono kartodirdjo " Ilmuan Jangan Seperti Pohon Pisang" Prisma, No.10. 1994.*

Berkenaan dengan topik dan lingkungan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini dapat dikatakan sebagai sejarah politik, di mana politik, oleh Kuntowijoyo, dipandang sebagai tulang-punggung sejarah (*politics is the backbone of history*).[54] Begitu pula menurut Djoko Suryo yang mengatakan bahwa sejarah politik (*political history*) merupakan jenis sejarah yang lebih awal muncul. Oleh karena buku-buku teks sejarah berisi rentetan kejadian-kejadian mengenai raja, negara, bangsa, pemerintahan, pemberontakan, kelompok-kelompok kepentingan (militer, partai, ulama, bangsawan, petani) dan interaksi antara kekuatan-kekuatan itu dalam memperebutkan kekuasaan, lebih mendominasi historiografi Indonesia.[55] Dengan demikian, penelitian ini merupakan sejarah politik di tingkat lokal, yaitu suatu kisah masa lampau elite Kesultanan Ternate pada periode tahun 1945-2002. Apabila mengacu kepada pemikiran Bambang Purwanto, maka konsep lokal yang digunakan adalah jika prinsip sejarah sebagai sesuatu yang unik diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa semua sejarah sebenarnya adalah sejarah lokal, sejarah nasional hanyalah representasi dari sejarah lokal.[56]

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat tahapan kerja, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan (historiografi). *Heuristik* adalah upaya penelusuran dan pengumpulkan sumber-sumber masa lampau. Sumber-sumber itu berasal dari data tertulis maupun lisan. Sumber tertulis bersumber dari dokumen pemerintah dan informan berupa otobiografi, surat-surat pribadi, buku, atau catatan harian. Beberapa otobiografi yang dipakai terdiri atas; (1). Memoar Iskandar Muhammad Djabir Sjah (Sultan Ternate ke-47) yang mengkisahkan kehidupan Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah sejak kecil, masa pendidikan, hingga terlibat kegiatan politik sebagai Residen Ternate sampai menjadi menjadi Menteri dalam Negeri dalam pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT). (2). Memoar Arnold Mononutu yang mengisahkan kehidupannya selama di Ternate. Bagaimana perjuangannya pada masa pendudukan Jepang hingga menjadi ketua Persatuan Indonesia (PI) di Maluku Utara. Keterlibatanya dalam membentuk partai progresif dalam Negara Indonesia Timur sampai menjadi anggota kabinet pada masa periode Presiden Soekarno. (3) Otobiografi Chasan Bousori yang mengisahkan kehidupannya sebagai seorang dokter dari masa pendudukan Jepang hingga pasca-kemerdekaan. Keterlibatannya di arena politik pada masa revolusi, menjadi pengurus PNI di Ternate hingga menjadi anggota senat Negara Indonesia Timur mewakili Maluku Utara. (4). Otobiografi Rini Woworuntu. Ia putri Sultan Ternate Iskandar MuhammadDjabir Sjah.Memoarnya mengisahkan kehidupan ayahnya Iskandar Muhammad Djabir Sjahsecara mendetail sejak masa kependudukan Jepang di Ternate dan ketika sultan hingga keluarganya diungsikan ke Australia.Ia menceritakan kehidupan politik Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah (1929-

[54] *Kuntowijoyo, op. cit., hlm. 174.*

[55] *Djoko SuryoTransformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern. (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 58-59.*

[56] *Bambang Purwanto, Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia, dalam Margono dan Widya Fitria Ningsih, Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global. Persembahan untuk 70 Tahun Prof. Dr.Djoko Suryo. (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 496.*

1975) dan cita-cita politiknya ketika Indonesia merdeka. Juga mengisahkan teman-teman dekat maupun lawan politiknya ketika terjun ke pentas politik hingga akhir hayatnya. Termasuk menceritkan kehidupan keseharian putra dan putri para bangsawan di Kesultanan Ternate.

Sumber informasi penting lainnya berasal dari dokumen pemerintah, majalah, dan surat kabar nasional maupun lokal. Surat kabar merupakan sumber informasi penting, terutama menyangkut periode Pemerintahan Soekarno hingga Era Reformasi. Surat kabar tersebut seperti Soeloeh Rakyat, Indonesia Timoer, Negara Baroe, Suluh Indonesia, Indonesia Raya, Kompas, Ternate Post, Malut Post, dan tabloid yang dimiliki Kesultanan Ternate yaitu Parada. Selain sumber-sumber tersebut, beberapa sumber dari masa Hindia Belanda juga digunakan dalam meneropong kehidupan elite Kesultanan Ternate pada masa sebelum kemerdekaan. Sumber itu berupa laporan pemerintah seperti *Memorie van Overgave, Algemeene Verlag, Kolonial Verslag* dan beberapa laporan pegawai Hinda Belanda mengenai gambaran umum penduduk di Kesultanan Ternate, seperti dari F.S.A. de Clercq, *Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate*, 1890.J. M. Baretta, *Mededelingen Halmahera en Morotai*, Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij, 1917. P. Hulstijn, *Soela Eilanden*(Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser & Co., 1918). P. Van der Crab, *Iets over het Rijk van Batjan* (Batavia: t.p., 1885). Dan W. Ph. Coolhaas,. "*Mededeelingen Betreffende de Onderafdeeling Bacan*" ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1926).

Sumber tertulis lainnya adalah buku-buku relevan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perpustakaan Pascasarjana UGM, Perpustakaan FIB UGM, dan Perpustakan Daerah Ternate. Semua sumber itu disertakan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Selain itu, juga akan disertakan beberapa lampiran yang berkaitan dengan tulisan ini.

Sebagai sebuah sejarah kontemporer, maka penulusuran sumber-sumber lisan (*oral history*) mutlak diperlukan. Menurut Suhartono, sebagai sejarah kontemporer, maka sumber-sumber lisan merupakan salah satu sumber utama yang dapat digunakan.[57] Sejalan dengan itu, menurut Kuntowijoyo, dalam penulisan sejarah, sumber lisan diperlukan karena dapat menambah kekayaan pemahaman sejarah dari berbagai aspek.[58]Bambang Purwanto juga mengemukakan bahwa banyak informasi penting yang bisa jadi tidak terekam secara langsung dalam sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber lisan bersifat saling melengkapi dengan sumber-sumber tertulis.[59] Sumber penting lainnya adalah cerita-cerita rakyat Ternate seperti, mitos tujuh putri dan Hikayat Rua-Rica. Menurut Bambang Purwanto yang mengacu ke cerita panji yang ditulis oleh Andrian Vickers menyebutkan bahwa cerita-cerita panji merupakan produk dari relasi budaya dan kekuasaan para

[57] *Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 32.*

[58] *Kuntowijoyo,op.cit., hlm. 86.*

[59] *Bambang Purwanto, op. cit., hlm. 71.*

sultan.[60]Oleh karena itu beberapa cerita rakyat tersebut juga dijadikan rujukan dalam penulisan ini.

Sumber lisan diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap elite Kesultanan Ternate sebagai informan kunci (*key informan*). Mereka antara lain, Sultan Ternate, *bobato nyagimao se tufkange* dan *bobato akhirat*. Peneliti juga mengkonfirmasi sumber relevan dengan mewawancarai beberapa narasumber non-kesultanan seperti anggota DPRD, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, akademisi, profesi dan sebagainya. Setelah kedua jenis sumber di atas didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber.Kritik sumber meliputi aspek eksternal dan internal. Metode ini dimaksudkan untuk memberi penilaian mengenai tingkat otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang dipakai sebagai acuan. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa terkandung unsur subjektivitas dari setiap keterangan, sehingga mesti selalu berhati-hati dalam menganalisa setiap sumber. Masalah ini antara lain dapat berusaha di atasi dengan mempertajam metodologi dengan melakukan uji silang (*cross cek*) dengan sumber-sumber lisan (wawancara).

Tahap ketiga adalah interpretasi. Bagian berarti menetapkan makna yang saling berkaitan dari fakta sejarah satu sama lain yang terdapat dalam sumber tertulis dan lisan. Dalam menginterpretasi dan menganalisis fakta, digunakan metode *hermeneutik* atau tafsir teks. Metode ini digunakan untuk menerjemahkan berbagai peristiwa yang terdokumentasi secara lebih mendalam dan menyeluruh menjadi satu kesatuan yang logis dan harmonis. Interpretasi terhadap sebuah teks dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan konsep ilmu-ilmu politik agar dapat menjelaskan partisipasi politik sultan Ternate pada periode tahun 1945-2002.

Setelah fakta-fakta tersebut diinterpretasikan dan dianalisis, barulah meningkat ke tahapan terakhir, yaitu penulisan (historiografi).[61] Penulisan ini menyangkut pula proses seleksi terhadap sumber-sumber penelitian karena tidak semua fakta sejarah dapat dimasukkan. Fakta-fakta tersebut masih harus dipilih sesuai relevansinya dengan topik penelitian yang dituliskan.

---

[60] *Bambang Purwanto, Sejarah dan Jati Diri dalam Ingatan Bersama Asia Tengara, dalam Andrian Vickers, Peradaban Pesisir Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara. (Bali: Udayana University Press, 2009), hlm. xvii.*

[61] *Dalam hubungan inilah penelusuran dan penulisan sejarah harus memperhatikan proses waktu. Itulah sebabnya, ilmu sejarah merumuskan prinsip penulisan sejarah yang kronologis. Prinsip ini juga dibangun atas pertimbangan bahwa suatu peristiwa dapat menjadi sebab munculnya peristiwa berikutnya, karena peristiwa terdahulu merupakan kondisional bagi peristiwa berikutnya. Helius Syamsudin, Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 147.*

BAB II
MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN TERNATE

Pengantar

Ternate mengemuka dalam catatan sejarah terutama karena hasil rempah-rempahnya. Tanahnya yang subur menjadikan Ternate penghasil cengkeh dan pala terpenting di Kepulauan Maluku. Keadaan itu didukung oleh posisi geografisnya yang terletak dalam kesatuan lintasan Laut Maluku, Sulawesi, dan Laut Suluyang merupakan satu kesatuan, sehingga menempatkan kawasan ini sebagai bagian dari jalur utama internasional.Menurut Leonard Y. Andaya, perdagangan rempah-rempah di Ternate menjadi penggerak aktivitas perniagaan di kawasan Asia Tenggara dan memunculkan interaksi dengan berbagai bangsa dan budaya di Nusantara.[62]

Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, hubungan komunikasi diletakkan jauh ke luar batas-batas Nusantara. Akibat hubungan-hubungan itu, terjadi konvergensi dan tercipta kondisi sosial budaya termasuk sosiolinguistik yang memungkinkan berkembangnnya segala unsur kebudayaan. Leirissa mengungkapkan bahwa penduduk Maluku (Ternate) terdiri dari berbagai suku bangsa di Nusantara yang bermigrasi ke pulau ini sejak masa kolonial. Bahkan bila dikaji lebih jauh ke belakang, sejak masa emporium dan imperium, telah banyak suku bangsa dan ras dari berbagai negeri maupun benua datang ke Ternate.[63]

Pertemuan antar-ras dan suku bangsa ini menimbulkan percampuran, sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang baru dengan berbagai pola tingkah budayanya. Maka tidak mengherankan jika penduduk Ternate saat ini memiliki beragam bahasa dan tradisi yang sama atau berbeda dalam satu lingkungan tertentu, namun tetap memperlihatkan ciri kebudayaanya masing-masing. Interaksi perdagangan rempah-rempah yang intensif dengan kelompok suku bangsa itulah yang memungkinkan terbentuknya organisasi atau pemerintahan awal di Pulau Ternate.

Melihat berbagai kondisi dan latar belakang kehidupan yang terdapat di dalamnya, menjadi penting dikedepankan untuk mendapatkan informasi atau gambaran utuh tentang dinamika internal masyarakat Ternate yang telah terpola dan mengakar dalam proses historis yang panjang.[64]Bagian ini merupakan gambaran awal berupa pemaparan deskriptif mengenai masyarakat dan kebudayaan Ternate, Kesultanan Ternate, lembaga-lembaga kerajaan, stratifikasi sosial, dan budaya

---

[62] Leonard Y. Andaya, *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period.* (Honolulu, University of Hawaii, Press, 1973), hlm.75.

[63] R.Z. Leirissa, *Halmahera Timur dan Raja Jailolo Pergolakan Sekitar Laut Seram Awal Abad 19.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 66.

[64] Penulusuran latar belakang kesejarahan ini bukan dimaksudkan untuk memberi gambaran bagi proses perkembangan politik dari awal pertumbuhannya. Tujuan utama berlandaskan pemikiran bahwa masalah-masalah yang muncul pada masa sesudahnya atau masa yang dipelajari tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa pengetahuan tentang masa sebelumnya. Lihat Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura* 1850-1840. (Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 1.

politik. Oleh karena itu, pokok bahasan ini akan diawali dengan mengungkapkan fakta mengenai masyarakat Ternate dan kebudayaannya sebagai langkah awal untuk mengetahui dan mengenal batasan spasial penulisan ini.

A. Masyarakat Ternate

> *Kiya raha fato-fato, gapi, duko, tuanane se kiye besi, doka saya rako moi. Ma ronga gam madihutu. Gam madihitu gee maronga Maloku Kiya Raha.* Artinya, empat gunung berjejer-jejer, yaitu Ternate, Tidore, Moti, dan Makean sebagai setangkai bunga mawar yang harum baunya. Namanya negeri asal kejadian, itulah namanya Ternate.[65]

Pulau Ternate merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate.[66] Wilayah kesultanan itu kini menjadi bagian dari Kotamadya Ternate yang merupakan kesatuan pemerintahan otonomi dalam Provinsi Maluku Utara. Secara etimologi, kata Ternate berasal dari tiga suku kata, yaitu *tara no ate*, yang berarti turun ke bawah dan pikat dia. Maksudnya, turun dari tempat yang tinggi (dataran tinggi) untuk mengikat para pendatang supaya mau menetap di wilayah ini (Ternate).[67] Pengunaan nama Ternate dapat ditemukan dalam berbagai sumber sejarah Eropa. De Clercq, mengidentifikasi nama Ternate dalam beberapa pengertian. *Pertama*, nama sebuah karesidenan. *Kedua*, nama sebuah kota. *Ketiga*, nama sebuah kesultanan. *Keempat*, nama salah satu pulau.[68]

Sejarah asal-usul penduduk Ternate, hingga masih diperdebatkan. Menurut R.Z. Leirissa, penduduk Ternate, termasuk kepulauan Maluku Utara, berasal dari campuran berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari ras Malanesia, Proto-Malayu atau Netro-Melayu yang mendiami daerah pedalaman bagian Utara Pulau Halmahera, kemudian menyebar ke Ternate, Tidore, dan pulau-pulau sekitarnya sejak berabad-abad lampau melalui gelombang migrasi yang panjang.[69] Sejalan dengan itu, menurut L.E. Visser, penduduk tertua kepulauan Maluku Utara mendiami daerah pedalaman Halmahera. Penduduk asli Pulau Halmahera dikenal

---

[65] Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. (Jakarta: Pustaka Utama, 2000), hlm. 34.

[66] Wilayah Kesultanan Ternate hingga kini tersebar di beberapa pulau di Propinsi Maluku Utara. Masing-masing, Pulau Ternate, Hiri, Morotai, Halmahera Utara, Barat, dan Batang Dua. Pulau-pulau tersebut kini telah memiliki pemerintahan kabupaten tersendiri. Walau demikian, mereka secara historis mengakui Kesultanan Ternate sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Hingga kini, Kesultanan Ternate juga masih menempatkan *sangaji* (wakil sultan) di wilayah tersebut.

[67] Andi Atjo. *Kamus Ternate-Indonesia.* (Jakarta: Cekoro Trirasuandra. 2008), hlm. 96.

[68] F.S.A. de Clercq, Ternate: Karesidenan dan Kesultanan.Terjemahan Noer Fitriyanti dari *Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate*, 1890. (Ternate: Komunitas Uma Sania, 2007), hlm.15.

[69] R.Z. Leirissa, *Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra*. (Jakarta: Depdikbud, 1997), hlm, 7-8.

sebagai Suku Alifuru (manusia awal). Mereka kemudian menyebar dari Pulau Halmahera ke sekitarnya, termasuk Pulau Ternate.[70]

Sejala dengan itu menurut Adnan Amal bahwa asal usul penduduk Ternate berasal dari kerajaan Jailolo (Halmahera)[71] yang bermigrasi sekitar tahun 1250 akibat konflik politik antara Raja Jailolo dengan kelompok-kelompok oposisi. Para pelarian tersebut mendirikan pemukiman didekat puncak Gunung *Gamalama* yang disebut komunitas Tobona.

Pembentukan komunitas Tobona inilah menandai permulaan terbentuknya organisasi sosial (pra kerajaan) yang di kepalai seorang pemimpin yang disebut *momole* (kepala kampung/marga). Seiring bertambahnya para imigran maka terbentuklah beberapa pemukiman (komunitas) di Pulau Ternate. Pemukiman baru tersebut yaitu *foramadiyahi* yang mendiami dataran tinggi. *Sampala* yang menempati kawasan hutan dan *Toboleu* yang menempati pesisir pantai Ternate bagian utara. Dalam perkembangannya sekitar 1251 empat kelompok sosial ini mengadakan musyawarah untuk membentuk organisasi kerajaan. Dari musyawah tersebut dipililah Ciko (kepala kampung *Sampala*) sebagai pemimpin ketiga komunitas tersebut. Pengangkatan Ciko sebagai *kolano* (raja) pertama Ternate, van der Crab menceritakan bahwa:

> Pada suatu hari Momole Guna (kepala suku Tobona), menjelajahi hutan mencari pohon enau untuk menyedap tuaknya. Ia tiba di suatu lintasan jalan dan menemukan sebuah lesung yang terbuat dari emas. Momole Guna mengambilnya dan membawa pulang ke rumah. Lesung emas itu kemudian menjadi tontonan yang aneh bagi warga Tobona. Karena yang ingin melihatnya makin banyak berdatangan, Momole Guna tidak mau menahannya lebih lama lagi dan memutuskan untuk memeberinya kepada Momole Molematitti (kepala suku Foramadiyahi). Mole matiti yang telah menerima menerima lesung anah itu, juga mengalami hal yang sama seperti di alami Momole Guna dari Tobona, karena tidak betah, ia berikan kepada Ciko dari Sampala. Ciko menerima lesung itu disertai dengan segala keajaibannya dan dengan demikian ia memperoleh kehormatan menjadi

[70] Lebih jelasnya baca L.E. Visser, *Halmahera and Beyond.* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 86-87.

[71] Dalam urutan berdirinya kerajaan-kerajaan di Maluku Utara, maka Jailolo dipandang sebagai kerajaan tertua. Walaupun diakui dalam historiografi lokal sebagai kerajaan tertua, namun tidak dapat dipastikan kapan kerajaan itu didirikan. Dalam hubungannya mengenai asal asul penduduk Maluku, maka penduduk Halmahera merupakan penduduk tertua di Maluku Utara. Menurut para ahli sejarah, arkeologi dan linguistik, asal usul penduduk Halmahera berasal dari ras Malanesia, atau lebih dikenal suku *Alifuru* artinya manusia awal. Kemudian disusul bangsa Melayu dan Mongolia. Bukti yang menunjukan benda prasejarah telah ditemukan di Pulau Waidoa dan Tameti (Kecamatan Kayoa), dan kampong Doro dan Tanjung di wilayah Kao dan Tobelo (Halmahera Utara). Sementara benda-benda peninggalan tradisi batu besar (megalitik) dan batu muda (neolitik) ditemukan di Pulau Ternate dan Kayoa. Untuk lebih jelasnya baca R.Z. Leirissa, *Sejarah Kebudayaan Maluku.* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999). Mengenai persebaran dan penelitian arkeologi dan bahasa lihat, Masinambaw E.K.M. (Ed.) *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk. Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi,* (Jakarta: LEKNAS-LIPI,1980).

penguasa atas pulau Ternate yang berakhir dengan pengobatannya sebagai raja pertama pulau itu dengan gelar kolano.[72]

Setelah pengangkatannya sebagai pemimpin, *Ciko* mengubah gelarnya dari *momole* menjadi *kolano*[73] (raja). Demikian pula namanya juga diubah menjadi Mansur Malamo. Ciko inilah yang dipercaya sebagai *kolano* pertama yang meletakan dasar bagi hadirnya kerajaan Ternate, sekaligus membentuk struktur kekuasaan dengan *kolano* sebagai penguasa tertinggi (mengenai stuktur organisasi kerajaan Ternate akan dibahas pada bab selanjutnya). Setelah itu pusat kekusaanpun di pindahkan ke tepi pantai yang diberi nama *Gamlamo* (negeri besar).

Secara kultural, penduduk Kesultanan Ternate tergolong kelompok majemuk atau multikultural. Christiaan Frans van Fraasen mengklasifikasikan penduduk kesultanan ini ke dalam dua kategori. Katagori pertama adalah penduduk pribumi (*inheemsche bevolking*), yaitu mereka yang berasal kelompok *Tubo, Tobana, Tabanga*, dan *Toboleu* yang telah lama dan menetap di Pulau Ternate. Kelompok inilah cikal-bakal terbentuknya Kerajaan Ternate. Kategori kedua adalah penduduk asli bukan orang Ternate (di luar keempat kelompok di atas) ditambah penduduk suku-suku yang berasal dari daerah lain.[74]

Penduduk asli Ternate terbagi empat kelompok kekerabatan yang bersifat otonom (marga), yaitu Marga *Soa-Sio, Sangaji, Heku*,dan *Cim*.[75]Salah satu cirinya adalah melestarikan sistem marga. Oleh sebab, itu mereka lebih mudah dikenal dengan nama belakang atau fam yang melekat di belakang namanya. Marga inilah yang ikut membedakan mereka dengan etnis lainnya di Ternate. Keempat marga tersebut, menurut Adnan Amal, berasal dari empat kelompok utama pembentukan Kerajaan Ternate, yakni Tubo, Tobana, Tabanga, dan *Toboleu* yang merupakan penduduk awal Pulau Ternate.[76] Menurut berbagai sumber hingga kini keempat

---

[72] P van der Crab, " Geschiedenis van Ternate, beschrijving van Ternaanse teskten over het Naidah" dalam BKI, jilid 26, n0 2 (Leiden,1978), hlm 381. Dan lihat Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. (Jakarta: Gora Pustaka Indonesia, 2007), hlm.53-55.

[73] Kolona (raja) berasal dari kata *Koko Lanao* artinya berdiri tegak. Dalam hubungannya dengan Kerajaan Ternate. Jika *Kolano* (raja) tegak diatas kekuasaanya maka harus di dukung oleh kekuatan dibawahnya yang terdiri atas *gam raha* (lembaga kerajaan), *bobato nyagimoi se tufkange* (dewan menteri), *sangaji* (pemerintahan wilayah) dan *Heku-cim* (angkatan bersenjata). Lebih jelasnya baca Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. (Jakarta: Pustaka Utama, 2000), hlm. 19.

[74] Christiaan Frans van Fraasen, Ternate, *"De Molukken en De Indonesische Archipel, Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cultuur en Indonesia"*, (Disertasi Universiteit Leiden, 1987), hlm. 76.

[75]Dari empat marga tersebut, terbagi pula ke dalam beberapa sub marga. Marga *Soa-Sio* terdiri dari sembilan marga. Marga Sangaji juga sembilan marga. Marga *Heku* 12 marga dan Marga Cim terdiri dari 10 marga. Setiap kelompok marga tersebut dipimpin kepala marga yang disebut *Famanyira*. Lihat Abdul Hamid Hasan, *op. cit*., hlm. 53.

[76].Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*. (Makassar: Gora Pustaka Indonesia, 2007), hlm. 39.

marga utama tersebut, secara turun-temurun memegang jabatan-jabatan politik di lingkungan Kesultanan Ternate.[77]

Sementara penduduk asli bukan orang Ternate, terdiri dari kelompok etnis Tidore, Jailolo, Loloda, Bacan, Makian,[78] dan Sanana. Etnis ini mendiami sebagain daerah Kesultanan Ternate, terutama Ternate Tengah dan Selatan. Mereka dianggap memiliki andil penting dalam proses perkembangan Kesultanan Ternate, sehingga diberikan kedudukan dalam struktur pemerintahan sebagai dewan kerajaa (*Bobato Nyagimoi se Tufkange* atau dewan delapan belas) dengan gelar masing-masing. Etnis Tidore diberi gelar Sangaji *Limatahu*. Etnis Jailolo, diberi gelar Sangaji *Tomajiko.* Etnis Bacan, diberi gelar *Kimalaha Labuha*, etnis Makian bergelar Sangaji *Tokofi*,etnis Loloda bergelar Sangaji *Malayu-Konora,* dan etnis Sula bergelar *Salahakan.*[79]

Sama halnya dengan keempat marga utama, keberadaan beberapa etnis ini, hingga kini dipegang teguh sebagai landasan utama dalam melakukan rekrutmen politik. Menurut berbagai sumber beberapa etnis tersebut merupakan kelompok inti yang menduduki struktur birokrasi Kesultanan Ternate.[80]

Selain itu, terdapat juga penduduk dari etnis lain dari luar Maluku Utara yang berdiam di wilayah Kesultanan Ternate. Menurut B. Soelarto, terdapat beberapa suku pendatang seperti etnis Melayu, Makassar, Buton, dan Jawa. Kehadiran mereka ke Ternate berkaitan dengan perkembangan perdagangan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan dalam jaringan internasional. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara, Ternate memberi kesempatan kepada kelompok suku bangsa tersebut untuk tinggal dan membentuk marga yang diberi nama menurut asal-usul leluhurnya. Misalnya marga Jawa adalah sub suku Ternate yang nenek moyangnya berasal dari Jawa, sehingga memiliki ciri fisik yang serupa dengan orang Jawa.[81]Lebih jelasnya lihat tabel berikut.

---

[77] Hasil wawancara Pebruari 2013.

[78] Hubungan antara etnis Makian dan Ternate sebenarnya sudah terjalin sejak lama.Hal ini dapat dilihat dalam struktur Kesultanan Ternate terdapat beberapa jabatan seperti *Jogugu* (perdana menteri), *Sangaji* (bupati), dan *Kapita Lao* (panglima perang) selalu diberikan kepada orang Makian.

[79] Amas Dinsie dan Rinto Taib, *Ternate: Sejarah, Kebudayaan & Pembangunan Perdamaian Maluku Utara.* (Ternate: LeKRa-MKR, 2010), hlm. xx.

[80] Hasil wawancara Pebruari 2013.

[81] Para pendatang tiba dan menetap di Ternate karena faktor perdagangan dan agama. Nenek moyang Soa Jawa adalah para ulama Jawa dari Tuban atau Gresik. Mereka masuk dalam struktur Kesultanan Ternate pada masa Sultan Zainal Abidin (1486-1500). Selama pemerintahan Zainal Abidin, lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dengan mendatangkan mubalig khususnya dari Jawa (Tuban dan Gresik) untuk mengintesifkan penyebaran agama Islam di wilayah Kesultanan Ternate. *Sekitar Tradisi Ternate.* (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan RI, 1982), hlm. 55.

Tabel 1
Nama-nama marga yang ada di Ternate

No	Nama Kelompok Marga	Nama Kepala Marga	Nama Anak Marga/ Soa
1	Sio	Kimalaha	Marsaoli Tomaito Tomagola Tamadi Payahe
		Fanyira	Jiko Jawa Tolangara Tabala
2	Sangaji	Sangaji	Tomajiko Malayu Kulaba Malaicim Tobeleu Tafamutu Tafaga Tokofi
		Kimalaha	Labuha
3	Heku	Fanyira	Takome Sula Gam cim Tabanga Siko Tafamutu Dodari- isa Mado Togolobe Faudu Tamajiko
		Kimalaha	Tabala
4	Cim	Fanyira	Talangam Moyau Tafure Maitara Koloncucu Wucu Tamao Doi Taake Tomahutu

Sumber: B. Soelarto, *Sekitar Tradisi Ternate*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan RI, 1982.

Demikian halnya dengan nenek moyang etnis Melayu, Buton, dan Makassar. Walaupun sebagai etnis pendatang, kelompok ini juga diberi kedudukan dalam pemerintahan, misalnya etnis Jawa ditempatkan dalam *bobato akhirat* (bidang agama) dengan gelar Imam Jawa, begitu pula etnis Makassar, ditempatkan dalam *bobato dunia* (pemerintahan dunia), dengan diberi gelar sebagai *Kapita* Makassar. Proses ini menarik, karena keberadaan beberapa suku yang mendiami wilayah kerajaan direkrut menjadi anggota kerajaan melalui sistem perwakilan distrik, sebagai landasan legitimasi dan integrasi.

Ternate merupakan daerah kesultanan dan agama Islam menjadi agama resmi yang dianut moyoritas masyarakat. Namun demikian kepercayaan animisme dan dinamisme (agama asal) masih dipraktekan sebagian besar masyarakat Ternate. Menurut berbagai sumber, hingga masih terdapat sebagaian masyarakat Ternate percaya kepada gunung Gamalama sebagai sumber kekuatan gaib (supranatural) yang dapat dimintai pertolongan untuk memberi keselamatan dan kesejahtraan hidup. Mereka antara lain menjalankan upacara penghormatan dan pemujaan dengan cara mengelilingi gunung Gamalama disebut *kololi kiye* dan *fere kiye.* Menurut Abdul Hamid Hasan, kepercayaan-kepercayaan tersebut sedemikian mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Ternate. Walau mereka telah memeluk agama Islam mereka masih setia dengan kepada tradisi leluhur mereka. Begitu para sultan, setelah dinobatkan wajib melakukan upacara *kololi kiye* dan *fere kiye* (mengelilingi dan menaiki puncak gunung.[82] Hanya saja, upacara itu tidak lagi ditujukan kepada kekuatan gaib gunung Gamalama, melainkan ke hadirat Allah SWT.

Selain pemujaan terhadap gunung Gamalama, kepercayaan lama lainnya yang dianut sebagian masyarakat Ternate adalah kepercayaan terhadap arca-kayu *wonge*. Benda tersebut fisik berbentuk lelaki-perempuan sebagai gambaran atau visualisasi nenek moyang mereka. *Wonge* ditempatkan di luar rumah dalam sebuah rumah-rumahan (*fala wonge*) yang berisi arca-arca nenek moyang mereka. Tempat itu dilengkapi sesajian berupa nasi kuning, sirih, pinang, tembakau, rokok tuak, dan dupa kemenyan. *Wonge* dipercaya sebagai penolak bala sekaligus pusat kekuatan gaib yang dapat dimintai pertolongan.[83]

---

[82] Abdul Hamid Hasan, *op. cit.*, hlm. 56-57.

[83] Menolak bala berarti menjuhkan pemilik *wonge* dari bahaya yang ditimbulkan oleh manusia, hewan, atau alam. Sedang yang dimaksud pemusatan kekuatan gaib yang dapat dimintai pertolongan ialah bila anggota keluarga menderita sakit, maka lewat *wonge* dapat diundang para arwah untuk menyembuhkannya.Bila hendak pergi berperang juga diperlukan pertolongan para arwah untuk menambah tenaga sakti bagi si pemilik. Jika dalam keluarga ada yang sakit, maka si pemilik *wonge* mengatur sebuah pesta *salay* (tari-tarian). Pada kesempatan itu orang yang sakit diperciki air oleh para penari dari mangkok atau piring tua untuk melindunginya dari balas dendam roh-roh jahat.Roh-roh harus dilayani oleh penduduk dan masih terus diberi sesajian berguna untuk menjaga persahabatan. Roh-roh yang tidak dilayani dipercaya akan menjadi sangat jahat dan berbahaya.Mereka berkelana berputar-putar di dalam hutan sebagai *miki* (di Halmahera disebut *meki*) atau di laut sebagai *hantu lau* (hantu laut). Lebih jelasnya baca P.H. Koagouw, *Shamanisme pada Orang Modole* dalam Masinambaw E.K.M. (ed.) *Halmahera dan Raja Ampat sebagai Kesatuan Majemuk: Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi.* (Jakarta: LEKNAS-LIPI,1980), hlm. 251.

Kepercayaan lama lainnya adalah upacara adat *joko kaha* (injak tanah).[84] Upacara ini sangat prinsipil dan wajib diselengarakan mulai dari ritus keluarga sampai penobatan sultan.Tujuan ritus ini ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib, agar membantu atau memberi keselamatan kepada manusia. Selain itu, sampai kini masih ada pemujaan terhadap roh nenek moyang berupa pemberian sesajian ke tempat keramat kuno (*jere*). Tempat keramat ini dianggap bisa membawa berkah. *Jere* sendiri berupa batu yang muncul dengan sendirinya menyerupai makam, sehingga dianggap sebagai makam keramat.[85]

Tanah dalam wilayah Ternate tergolong subur. Keadaan ini memungkinkan penduduk setempat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mengolah lahan pertanian.[86] Kombinasi antara kesuburan tanah dan iklim membuat usaha pertanian yang menonjol adalah tanaman cengkeh dan pala. Sisi kesejarahan yang penting dari Ternate adalah peranannya sebagai salah satu pulau penghasil cengkeh di Maluku. Suatu hal yang menjadikan pulau ini ajang kepentingan ekonomi, terutama perebutan rempah-rempah oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris.[87]

Faktor utama daya tarik Ternate antar-bangsa itu adalah cengkeh dan pala, sebagaimana dikemukakan Anthony Reid bahwa Pedagang Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala, serta Maluku (Ternate) untuk cengkeh, dan barang dagangan ini tidak dikenal di tempat lain di dunia kecuali di tempat itu.[88] Penduduk menanam cengkeh karena mendatangkan hasil dan keuntungan berlimpah. Pada mulanya, tanaman tersebut adalah tanaman liar yang tumbuh di hutan-hutan yang kemudian ditanam dalam usaha perkebunan.

Meskipun jumlah penduduk Ternate sangat besar dibandingkan prosentase etnis pendatang, namun karena minimnya sumber daya manusia, maka mereka lebih banyak berkerja di sektor non-formal seperti pertanian dan perikanan.[89]Selain itu,

---

[84] Upacara penghormatan dan pemujaan gunung Gamalama dengan jalan mengelilinginya disebut *kololi kiye* dan upacara mendaki puncak gunung Gamalama disebut *fere kiye*. Upacara adat ini dimaksudkan untuk memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu atau memberi keselamatan, kesejahtraan, kepada manusia.

[85] B. Soelastro,*op. cit.,* hlm. 12.

[86] Salah satu karakter yang menonjol di Pulau Ternate adalah daerah pengunungan dan pulau vulkanik. Gunung berapi tersebut menyediakan zat-zat makanan bagi tumbuhan yang tidak tersedia dalam tanah sub-tropis. Letusan gunung berapi mengeluarkan abu, lapilli, dan lahar yang mengandung mineral seperti, kalsium, nitrogen, magnesium yang bermanfaat bagi kesuburan tanah, sehingga sangat menguntungkan bagi sektor pertanian rakyat. Lihat A. Bahar Andili, *Profil Daerah Maluku Utara* dalam E.K.M. Masinambow, (ed) *op cit.* hlm. 4.

[87]Leonard Y. Andaya,*op. cit.*, hlm. 122.

[88] Anthony Reid, *Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tengara* 1450-1680. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 2.

[89] Mayoritas mata pencarian penduduk Ternate adalah petani. Mereka menanam cengkeh dan pala yang mendatangkan hasil dan keuntuntungan berlimpah. Beberapa jenis tanaman pertanian lainnya adalah kelapa, coklat, karet, lada, dan kapas. Penduduk Ternate juga memenuhi kebutuhan hidup mereka dari sektor perikanan. Pekerjaan mencari ikan di daerah ini terutama dilakukan penduduk Ternate Utara.Teknologi penangkapan ikan atau alat-alat yang digunakan masih sangat

sebagian penduduk Ternate menjadikan kerajinan rumah tangga sebagai usaha tambahan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus. Sementara jabatan-jabatan publik seperti, guru, polisi, tenaga kesehatan, maupun birokrasi, lebih banyak dikuasai etnis pendatang.

Tabel 2
Mata Pencarian Penduduk Ternate

No	Mata Pencarian	Presentase
1	Pegawai negeri/swasta	6,5 %
2	Perikanan/nelayan	21,2 %
3	Pertanian	44 %
4	Perdagangan	11, 9 %
5	Jasa/buruh	10, 4 %

Sumber: Ternate dalam Angka 1995

Jumlah penduduk Pulau Ternate berdasarkan sensus tahun 1961 sebanyak 24.287 orang (lihat tabel 3). Perkembangan jumlah penduduk Ternate dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pesat. Faktor utama daya tarik Kota Ternate adalah sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan.Terbukanya kesempatan berusaha mendorong para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia untuk berdomisili di Ternate.Dalam hal ini secara garis besar dapat disimpulkan terdapat tiga penggolongan penduduk yaitu penduduk asli Ternate, penduduk Indonesia pendatang dan golongan penduduk penduduk orang asing.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Kotapraja Ternate
Menurut Perincian Kecamatan Pada Tahun 1961

Kecamatan	Desa	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
	1. Wijk LTR. A 2. Wijk LTR. B 3. Wijk LTR. C 4. Wijk LTR.D 5. Wijk LTR.E 6. Wijk LTR.F	2. 689 5.636 1.700 1.463 710 326	2. 560 5.315 1.555 1.346 690 297	5. 249 10.951 3. 255 2. 809 1.400 623
Jumlah	Desa = 6	12. 524	11. 763	24.287
Jumlah Seluruh Kotapraja	Kecamatan =1 Desa = 6	12.524	11. 763	24.287

Sumber: Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Sulawesi dan Maluku, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Biro Pusat Statistik, 1980, hlm. 230.

sederhana. Lebih jelasnya lihat Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Maluku*. (Jakarta: Depdikbud,1978), hlm. 32.

Perkembangan pendidikan di Ternate pasca-kemerdekaan Republik Indonesia, belum mengalami kemajuan. Masih banyak penduduknya yang buta huruf. Perkembangan pendidikan di Ternate baru dimulai sejak tahun 1950 atau saat bubarnya Negara Indonesia Timur (NIT).[90] Hal ini ditandai dengan disusunnya suatu organisasi pendidikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.[91]

Usaha-usaha peningkatan pendidikan dapat berjalan dengan baik memasuki tahun 1951 dengan disusunnya organisasi pendidikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan kebudayaan Maluku. Organisasi pendidikan baru ini secara sentral mengatur semua pendidikan di seluruh pelosok Maluku dan Ambon sebagai pusat kegiatan.[92] Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu menyelenggarakan urusan-urusan pendidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan, pendidikan masyarakat seperti pemberantasan buta huruf, kegiatan-kegiatan umum seperti olahraga, pendidikan kebudayaan, kesenian, serta pengadaan tenaga pengajar. Jumlah dan gambaran aktivitas sekolah di Maluku periode tahun 1950-an dapat dilihat pada tabel 4.

[90] Pendidikan di Ternate pernah digalakan oleh dan untuk Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa itu menurut jenisnya sekolah di Ternate terbagi atas tiga katagori yaitu; Sekolah yang berbahasa Belanda, (*Hollands Inlandsche School* (HIS), Ternate *Lagere School*, *Kweek School*, dan *Ambonsche Berger Schoo*l).[90] Sekolah Melayu, dan Sekolah Nasional (Taman Siswa) atau diberi nama sekolah balai pendidikan. Akan tetapi sekolah-sekolah tersebut dikhususkan bagi anak-anak golongan atas, seperti para bangsawan, orang kaya, pegawai negeri, keturunan keluarga Belanda, orang-orang *gelijkgesteld*, Cina, dan anak-anak orang Arab. Lihat R.Z. Leirissa,*Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI 1975), hlm. 43-45.

[91]*Ibid.*,hlm. 48.

[92] Pendidikan di daerah ini mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Gubernur Maluku Muhammad Padang (1951-1956. Bersama pemerintah pusat dengan membentuk perwakilan pendidikan dan kebudayaan mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan mengkoordinasi empat kantor daerah Direktorat Jenderal, yakni Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kebudayaan, Olahraga, serta Pemuda dan Pramuka. Kantor-kantor daerah direktorat jenderal tersebut mempunyai cabang-cabang di seluruh daerah Maluku seperti Ambon, Ternate, Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tengara, Masohi, dan Tual. Selain sekolah-sekolah yang di bawah bimbingan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ada pula sekolah-sekolah yang dibuka oleh departemen lain seperti sekolah bidan/perawat, sekolah Perikanan Laut, dan Sekolah Pertanian Menengah (SPMA). Untuk lebih jelasnya lihat Sem Touwe dan Rina Pusparani, *Sejarah Pendidikan di Maluku Sejak Masa Prakolonial Hingga Orde Baru*. (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), hlm. 180-181.

Tabel 4
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Maluku pada tahun 1950

No	Nama Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
1	Sekolah Rendah	398	46700
2	Sekolah Rendah Umum	67	8600
3	Sekolah Pendidikan Guru	46	1475
4	Sekolah Normal	14	1120
5	Mulo	6	1750
6	Sekolah Menegah	19	1980
7	HBS/AMS	1	300
8	Sekolah Pangreh Praja yang Pindah dalam Pendidikan Menengah	1	60
9	Sekolah Teknik Rendah	4	100
10	Sekolah Kepandian Gadis Tingkat Pertama	10	780
11	Sekolah Pendidikan Guru	-	-
	Jumlah	3966	62865

Sumber: *Algemeen Verslag van Nijverheidsonderewijs een nijverheidssholen* 1948, dalam Arsip Tanah Toraja 489/48 Anriwil Sulsel.

Selain sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah, terdapat pula yayasan-yayasan pendidikan seperti yayasan pendidikan gereja-gereja Protestan, Roma Katolik, dan organisasi-organisasi Islam seperti Muhamadiyah dan ABRI. Pada perkembangan selanjutnya, dibangun juga beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Pattimura tahun 1956, Universitas Khairun Ternate 1964, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate 1966, Universitas Muhammadiyah 1999, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIKIP) Kie Raha tahun 2001, AIKOM Ternate, dan Akademi Keperawatan (APPER) Ternate.

Pendidikan formal ini di kemudian hari berfungsi sebagai katalisator bagi terwujudnya dua jenis elite, yakni elite tradisional (istana) dan elite modern (birokrat dan intelektual). Kedua elite tersebut berasal dari tradisi pendidikan yang sama, tetapi berada dalam lingkungan politik dan hierarki sosial berbeda. Elite pertama lebih didukung oleh legitimasi budaya, sedangkan elite kedua berkat ke unggulan merek di bidang ilmu pengetahuan. Pada aspek ini, kemajuan pendidikan memberi peluang besar bagi terjadinya perubahan sosial, khususnya mobilitas sosial. Sistem pengangkatan pegawai tidak lagi hanya berdasarkan status dan keturunan, tetapi juga berdasarkan jenjang pendidikan.

B. Bahasa

> "Sangat menarik untuk mengamati pengaruh perdagangan Portugis dengan negara-negara ini (Ternate), didalam kata-kata bahasa mereka masih tetap dipakai dikalangan penduduk pulau yang terpencil dan liar ini. *Lenco* untuk sapu tangan dan *faca* untuk pisau, dan disini di gunakan sambil mengenyampingkan istilah-istilah Melayunya".[93]

Bahasa Ternate merupakan bahasa Induk dari berbagai bahasa daerah di Maluku Utara. Sebagai bahasa pergaulan luas, bahasa Ternate digunakan di wilayah pengaruh Kesultanan Ternate. Sebagai pusat kekuasaan tradisional (kesultanan) lambat laun bahasa Ternate berkembang sebagai bahasa pengantar (*lingua france*) diwilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Lagi pula kota Ternate sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan meletakan hubungan komunikasi jauh ke luar batas-batas nusantara. Bahkan dalam perkembangannya sampai tersebar di seluruh kepulauan Halmahera, Sulawesi Utara, daerah pesisir Sulawesi tengah dan selatan, dan Papua (mengikuti perkembangan kekuasaan kesultanan Ternate pada abad-abad ke XV sampai awal abad ke XVII). Salah satunya yang terlihat adalah pengunaan istilah *kolano* (raja) dan *sangaji* (kepala distrik) yang menunjukan pengaruh sistem sosiopolitik Ternate didalam wilayah kekuasaanya.

Bahasa Ternate sebagai bahasa non- Austronesia di golongkan ke dalam kelompok bahasa Ternate Halmahera atau bahasa kekerabatan (serumpun). Menurut B. Soelarto, Bahasa Ternate termasuk dalam kelompok bahasa Ternate-Halmahera. Artinya serumpun dengan berbagai bahasa daerah yang meliputi Ternate dengan pulau Halmahera[94]. Sejalan dengan itu menurut E.M.K. Masinambouw, bahasa Ternate digolongan kedalam bahasa Austronesia.[95] Bahasa-bahasa yang termasuk kedalam kelompok Ternate Halmahera, yaitu bahasa Ternate, Tidore, Ibu, Waioli, Tabaru, Madole, Tobelo, Loloda, Galela, Tololiku, dan Isam. Dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate terdapat juga bahasa-bahasa Austronesia yaitu bahasa Gane dan bahasa Makian Barat. Namun demikian bahasa Ternate di gunakan di wilayah pengaruh Kesulanan Ternate. Penduduk yang berdiam di Halmahera Utara

---

[93] Dikutip dalam Antonio Pinto da Franca¸*Pengaruh Portugis di Indonesia.* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm, 1.

[94]Adapun Bahasa-bahasa daerah yang termasuk kedalam kelompok bahasa Ternate-Halmahera yaitu meliputi bahasa Ternate, Tidore, Ibu, Waioli, Tobaru, Madole, Tobelo, Loloda, Galela, Tololiku, dan Isam. Lihat B.Soelastro, hlm 56.

[95] Bahasa Ternate merupakan bahasa induk dari berbagai bahasa daerah di Maluku Utara. Bahakan penyebarannya berpengaruh sampai di pulau Mindano, kepulauan Sulu, Sabah di Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, sepanjang pantai Sulawesi Tengah-Selatan, pulau Banggai, kepulauan Sula, pulau Waigo, pulau Morotai. Adapun bahasa-bahasa daerah di Ternate, Halmahera, Tidore, disebut *"kie se gam"* (bahasa induk). Menurut E.K. M. Masinambaw bahwa berbagai bahasa daerah di Maluku Utara masih tetap digunakan sebagai *bahasa lokal*. Ada yang berpendapat bahwa bahasa Ternate termasuk rumpun bahasa Polinesia.Tapi ada juga yang berpendapat bahwa bahasa Ternate termasuk rumpun bahasa Austronesia, berdasarkan kesamaan dalam segi tata bahasa (*pronounciation dan vocabulary*). Utuk lebih jelasnya baca E.K. M. Masinambaw "*Halmahera dan Raia Ampat Konsep dan Strategi Penelitian*, (Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1980), hlm. 173.

pada tahun 1970-an menguasai bahasa Ternate sebagai bahasa kedua, dan digunakan sebagai bahasa pergaulan antar etnis. Bahkan penduduk di Halmahera Utara masih digunakan nyanyian-nyanyian rakyat yang dianggapnya kuno dalam bahasa Ternate. Dewasa ini bahasa Ternate hanya di pergunakan di Pulau Ternate, Pulau Hiri, dan Halmahera Barat (Jailolo dan Susupu).

Seiring dengan berkembangnya Islam dalam kehidupan masyarakat, pengaruh bahasa Arab sangat besar dan menambah perbendaharaan kata bahasa Ternate. Begitu pula dengan bahasa-bahasa non Ternate yang sedikit banyak memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Ternate, ialah bahasa Bare'e (Sulawesi Tengah), bahasa Bugis (Sulawesi Selatan), serta bahasa Jawa. Hal itu erat hubungannya dengan hubungan yang dijalin antara Kesultanan Ternate dengan wilayah Sulawesi yang dahulu pernah menjalin hubungan perdagangan.[96] Lambat laun bahasa Ternate berkembang seirama dengan perkembangan kekuasaan Kesultanan Ternate, dapat tumbuh hingga menemukan bentuknya sebagai bahasa pengantar (*lingua franca*) di kawasan Ternate, Halmahera. Bahkan juga kemudian berkembang lebih luas lagi sampai di wilayah-wilayah yang berada di luar kawasan Maluku Utara[97].

Bahasa Ternate dalam komunikasinya dengan bahasa-bahasa di luar Maluku Utara dengan sendirinya juga tidak luput dari pengaruh bahasa-bahasa non Ternate.Terutama sekali pengaruh dari bahasa Melayu.Banyak kata-kata Melayu yang dijadikan perbendaharaan kata bahasa Ternate. Misalnya dalam daftar kata bahasa Melayu Manado yang di susun oleh Clercq di indentifikasikan 358 kata bukan bearasal dari bahasa Melayu. Ternyata 46% dari jumlah tersebut berasal dari bahasa Ternate.[98] Dengan demikian tidaklah mengherangkan, apabila sastra lisan Ternate sedikit banyak terpengaruh juga oleh bahasa-bahasa lokal serta bahasa-bahasa Melayu, Arab dan Jawa.[99]

Kehadiran bangsa Portugis di Ternate sejak awal abad ke XVI rupanya juga memperkaya perbendaharaan kata bahasa Ternate. Bahkan sampai sekarang masih ada tempat-tempat yang penamaannya diambil dari bahasa Portugis. Misalnya desa Kastela, pantai Laguna. Bangsa Inggris meskipun hanya memerintah singkat di Ternate, juga ikut memberi sedikit sumbangan kata-kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Ternate. Dan bahasa Belanda merupakan bahasa asing yang paling lama

---

[96] R.Z. Leirissa, et. al., *Sejarah Kebudayaan Maluku*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rl, 1999), hlm. 53.

[97] Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Temate*. (Jakarta: Centra Pustaka Utama), 1999, hlm. 92.

[98] C.L. Voorhoeve, "The Non-Austronesia Languages in the Nort Moluccas" dalam Masinambaw EKM. (ed), *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi*. (Jakarta: LEKNAS-LIPI,1980), hlm. 172.

[99] Jenis olah vokal yang bersifat magis itu masih di hayati sampai masa kini. Dalam upacara spritisme yang sampai sekarang masih di praktekan secara perseorangan ataupun kelompok-kelompok masyarakat desa, mantra-mantra bersifat magis masih dikumandangkan. Demikian pula doa-doa kepercayaan lama yang sampai sekarang masih di ucapkan oleh sebagian dari warga masyarakat Ternate. Misalnya *doa kiye* (doa gunung) yang merupakan doa magis kepercayaan lama. Pemujaan gunung, merupakan doa tradisional yang sampai masih kini di parktekan oleh sebagian warga masyarakat. Lihat Menurut E.K. M. Masinambaw,*op cit.* hlm. 66.

dikenal, dalam daerah Ternate hanya sedikit menambah perbendaharaan kata.Kata-kata itu khususnya kata-kata atau istilah-istilah yang bersangkut-paut dengan tata pemerintahan.[100]

Kurangnya kata-kata bahasa Belanda yang masuk kedalam bahasa Ternate dikarenakan politik pemerintah Hindia-Belanda yang menyebabkan bahasa Belanda hanya dipakai dalam lingkungan yang sangat terbatas, yaitu lingkungan para pegawai negeri, lingkungan elite dan lingkungan istana saja.

Bahasa Cina yang selama berabad-abad menjadi bahasa eksklusif di kalangan masyarakat pedagang Cina di Ternate praktis tidak ada pengaruhnya dalam bahasa Ternate. Demikian pula halnya bahasa Jepang, meskipun secara intensif disebar luaskan keseluruh lapisan masyarakat oleh pemerintah tentara Jepang selama 3/2 tahun, namun jelas tidak pernah popular.[101]

Bahasa Ternate masih merupakan bahasa lisan, karena bahasa Ternate tidak mempunyai aksara/huruf sendiri. Baru setelah jaman Islam aksara/huruf Arab-Melayu dipakai untuk menuliskan bahasa Ternate.Bahkan sampai sekarang huruf itu masih terus dipakai. Hanya sayang sekali, bahwa bahasa Ternate tidak dikembangkan melewati pendidikan formil mulai dari pendidikan dasar. Meski demikian, dalam perjalanan sejarah selama berabad-abad hingga masa kini, bahasa Ternate tetap dihayati masyarakat sebagai bahasa praktis dalam pergaulan antar berbagai suku di Maluku Utara.

Sebagai bahasa pengantar (*lingua franca*) di kawasan Maluku Utara, dalam strukturnya mengenal kelamin kata dan perasaan kata, seperti halnya bahasa Jawa Kuno dan Jawa Baru. Sebagai contoh untuk menyebut *"aku"* dalam percakapan sehari-hari dengan orang yang sederajat, cukup mengucapkan *ngori*.Tapi bila kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau dianggap lebih tinggi derajatnya, maka kita harus mengucapkan *fangare*, sebagai tanda merendahkan diri.Apabila kita berbicara dengan orang yang dianggap sederajat, maka kita menyebut lawan bicara *ngona*.Yang berarti *engkau, kamu*. Tapi bila lawan kita lebih tua atau lebih tinggi derajatnya, maka kita menyebutnya *jou*, sebagai tanda penghormatan.[102]

Selain itu bahasa Ternate kaya dengan sastra lisan seperti *dola bololo, dalil moro, tifa, cum-cum,* mantra, dan *bobaso se rorasa* . Sastra lisan tersebut berisi ungkapan-ungkapan simbolis dan umumnya mengandung nilai-nilai pendidikan moral yang tradisional, bahkan ada pula yang mengandung nilai-nilai universal. Sebagian dari sastra itu di jadikan syair lagu-lagu daerah yang dinyanyikan untuk mengiringi berbagai tarian adat. Ada pula yang hanya di deklamasikan, baik dalam menolog-monolog, maupun dialog. Misalnya untuk mengiringi lagu *dola-bololo* (lagu daerah), di deklamasikan oleh para penari dalam monolog.

---

[100] E.K. M. Masinambaw, *op cit.* hlm. 180.

[101] R.Z. Leirissa, et. al., *Ternate Sebagai Bandar Jalur Sutra*. (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Diroktorat Sejarah dan Nilai Nasional, Depdikbud, Rl, 1999), hlm. 74.

[102] L. Rajiloen, *Daratan Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal ke Dataran Rendah Limau Jore-Jore Sebagai Temate Akhir.* (Jakarta: Depdikbud, 1982), hlm. 74.

Bentuk sastra Ternate yang tertua merupakan *dola bololo* (puisi). Puisinya ada yang merupakan tamsil, pepatah, ibarat, dan peribahasa. Ada pula yang merupakan pantun-pantun bersajak. Biasanya tiap-tiap bait terdiri atas empat baris kalimat, tapi ada juga yang terdiri dari dua baris kalimat. Sajaknya ada yang beraturan, tapi ada pula yang tidak terikat pada sajak, artinya sajk bebas seperti halnya bentuk dan ungkapan puisi modern. Penyaluran melalui seni suara dan tarian lebih banyak menarik pendengar dari pada melalui percakapan. Syairnya yang didendengkan di iringi dengan instrumen seperti tifa dan gong yang di ikuti dengan tarian (ronggeng) banyak menarik penggemarnya. Penyajian tersebut di laksanakan menurut perhitungan hari, yaitu lamanya berlangsung sampai sembilan hari sembilan malam, tujuh hari tujuh malam atau kurang dari itu tetapi sebanyak perhitungan hari ganjil.

Sastra lisan tersebut memeliki kaitan erat dengan tradisi lisan masyarakat berupa seperangkat kebiasaan dan perilaku kehidupan keseharian yang di wariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun di daerah ini. Sejak periode sebelum masuknya agama Islam yang dikenal sebagai periode *momole*. Masyarakat Ternate telah memeliki sejumlah tradisi lisan yang meliputi nilai budaya, adat istiadat, sistem kemasyarakatan dan sistem kepercayaan. Masyarakat Ternate sejak masa pra Islam telah mempengaruhi olah vokal yang bermotifkan religius. Dalam arti bahwa olah vokal itu merupakan bagian dari sarana ritual yang bersifat magis, terutama merupakan matra-matra atau doa-doa. Menurut Jusuf Abdulrahman bahwa masuknya agama Islam dan agama Kristen maka terjadilah akulturasi kebudayaan. Sekitar abad ke 14-17 terjadi pula pembauran dengan budaya orang-orang Spanyol, Portugis dan Belanda, tetapi dampak pembaurannya tidak sekuat pengaruh agama Islam. Tradisi lisan kesultanan Ternate pada periode tersebut telah banyak di pengaruhi oleh tradisi Islam, namun adat kebiasaan leluhur masih tetap terpelihara dan hidup berdampingan secara terpadu selama keduanya saling membutuhkan dan tidak terjadi benturan. Dalam pelaksanaan upacara-upacara adat tertentu di kawasan Ternate terdapat perpaduan tradisi lisan warisan leluhur dengan tata cara Islam.[103]

C. Budaya Politik

Masyarakat Ternate telah terorganisasi secara geneologis ke dalam kelompok-kelompok sosial dengan ciri khas masing-masing. Kesatuan kelompok sosial tersebut disebut *soa* (marga) oleh masyarakat Ternate. Tiap-tiap kampung terdiri dari beberapa *soa* dan setiap *soa* dikepalai oleh seorang *kimalaha* atau *fanyira* (kepala kampung).[104] Penggunaan sebutan-sebutan tersebut tergantung pada jauh

[103] Jusuf Abdulrahman, *Kesultanan Ternate*; *Dalam Jou Ngon Ka Dada Madopo Fangare Ngona Ka Alam Madiki*. (Manado: Media Pustaka, 2002), hlm.23..

[104] Dalam masyarakat Ternate terdapat pembagian kelompok kekerabatan kedalam 41 *soa* (marga) yang terdiri; marga *soa siu* (10 marga), *soa Sangaji* (9 Marga), *soaHeku* dan *Cim* (masing-masing 12 soa).Meskipun ada *soa-soa* tertentu yang secara tradisional mempunyai fungsi khusus yang berhubungan dengan kewajiban di dalam istana, misalnya *Soa Heku* dan *Soa Cim* mempunyai tugas kemiliteran, namun tidak ada hak-hak istimewa yang diberikan sultan kepada mereka. Hanya saja dalam suatu upacara adat terasa adanya pengutamaan, tapi lebih pada fungsi dan tugas

dekat hubungannya dengan pusat kekuasaan. Pengangkatan kepala-kepala *soa* tersebut selalu di dasarkan pada faktor keturunan.

Masyarakat Ternate pada umumnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat ketat mempertahankan aturan pelapisan sosial. Bagi mereka, mempertahankan pelapisan sosial dipandang sebagai satu syarat memperjaya dan menjaga kehormatan. Artinya, perbedaan peranan-peranan dipandang sebagai norma yang patut dipelihara, diikuti, dan dijalankan dalam kehidupan mereka. Hal penting yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan anggapan ini adalah kedudukan kelompok bangsawan sebagai kelompok yang dapat dan boleh menjadi pemimpin.[105]

Masyarakat Ternate, seperti halnya masyarakat di kerajaan Jawa (Yogyakarta dan Surakarta) yang mengenal pelapisan sosial yang tersusun secara hirarki. Meski penggolongan masyarakat tidak setajam pembagian kasta-kasta dalam struktur sosial feodal, namun ada penggolongan yang bertolak atas dasar keturunan (geneologis). Tingkatan tertinggi adalah golongan *kolano* (sultan) yang terdiri dari sultan dan keluarganya sampai tiga lapis atau tingkatan turunannya.

Tingkatan pertama adalah anak-anak sultan bergelar *kaicil* untuk putra dan *boki* atau *nyaicil* untuk putri. Jika anak-anak itu berada pada jenjang ketiga dari sultan yang berkuasa, mereka bergelar *jou ma datu.* Sementara jenjang keempat bergelar *jou mamuse.* Selanjutnya, tingkatan kedua (*danu*)atau golongan bangsawan yang masih memiliki hubungan darah dengan keluarga sultan. Seperti cucu sultan dan anak-anak yang dilahirkan dari putri sultan dengan orang dari lingkungan istana. Termasuk juga kaum bangsawan yang diangkat menjadi pejabat birokrasi kerajaan dan golongan agama. Tingkatan ketiga adalah rakyat biasa atau disebut *bala kusu se kano-kano*.[106]

Kelompok bangsawan (elite) merupakan lapisan teratas yang mempunyai kedudukan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih tinggi. Mereka inilah yang mendominasi kepemimpinan dalam masyarakat. Puncak hierarki ditempati sultan yang memiliki otoritas tradisional yang telah diterimannya sebagai hak turun-temurun. Hal itu tercermin pada nama atau gelar yang disandangnya. Di bawah sultan terdapat golongan bangsawan, yang dalam Kesultanan Ternate dibedakan atas bangsawan pusat dan bangsawan daerah.

---

mereka.Misalnya bila dalam suatu upacara adat mereka makan bersama, maka yang mendapat kehormatan untuk duduk dibagian unjung meja adalah para pemangku adat dan pemangku agama dari *Soa Sangaji* dan *Soa Sio*. Lihat Abdul Hamid hasan, *op,cit.* hlm.78-90.

[105] Lebih jelasnya baca Ch. F. van Fraasen, " Court and State in Ternatan Society" dalam Masinambaw E.K.M. (ed.) *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk. Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi.* (Jakarta: LEKNAS-LIPI,Vol II, No.2, 1983), hlm. 165-178.

[106] Dalam katogori lapisan ketiga juga termasuk para anggota sultan yang telah melakukan kejahatan besar atau pun pelanggaran adat. Selain itu dalam masyarakat Ternate juga mengenal strata budak (*opas*).Pada awalnya lapisan masyarakat ini berasal dari pulau Sanana dan Buton Sulawesi Tenggara, secara sukarela mengabdi kepada sultan.Umumnya mereka berdomisili di luar kadaton Ternate.Namun dalam perkembangan kemudian, para budak-budak ini tinggal dilingkungan istana sebagai prajurit dan pelayan istana.Untuk lebih jelasnya baca M. Shaleh A. Putuhena, "Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam" dalam Masinambaw E.K.M. (ed.) *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk. Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi.* (Jakarta: LEKNAS-LIPI,Vol II, No.2, 1983), hlm. 323.

Bangsawan pusat adalah kelompok bangsawan yang berasal dari marga *Soa-Sio*, (*SoaMarasaoli*, *Limatahu*, *Tomagola*, dan *Tomaito*). Mereka merupakan inti dari penduduk Ternate dan merupakan marga yang dipilih untuk menduduki jabatan *bobato madopolo* (dewan menteri) dan *bobato nyagimoi se tufkange* (lembaga legislatif).[107] Dengan fungsi politik yang melekat kepadanya (mengangkat dan memberhentikan) seorang sultan, maka sejak zaman dahulu hingga sekarang *soa* ini mempunyai kedudukan terhormat setelah kerabat sultan. Kelompok bangsawan ini dipandang mempunyai jenjang kebangsawanan lebih tinggi dari jenjang kebangsawanan daerah.

Sementara bangsawanan daerah adalah kelompok bangsawan keturunan marga Sangaji dan Salahakan. Mereka umumnya menjadi utusan sultan (kepala distrik) untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan serta mengurus kepentingan sultan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kerajaan atau sebarang pulau. Umumnya penempatan dan pengangkatan seorang Sangaji (kepala distrik) dan Salahakan (utusan sultan), bergantung pada kemurnian darah kebangsawanannya.[108] Hal ini dipandang sebagai suatu ketentuan karena dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, bangsawan yang berasal dari marga Sangaji tidak dapat dan tidak boleh melaksanakan kekuasaan atas golongan yang lebih tinggi (marga Soa-sio). Aturan dan ketentuan ini menuntut pengaturan jenjang kebangsawanan berkaitan sejajar dengan kepangkatan kekuasaan.

Dalam usaha untuk memperluas pengaruh, mempertinggi kewibawaan, mempertahankan kekuasaan, kaum bangsawan senantiasa mengandalkan selain kekuasaan dan kepintaran perluasan jaringan hubungan kekeluargaan. Suatu hal yang oleh Chabot disebut perkawinan politik antar-bangsawan. Menurut EdwardL.Poelingggomang, perkawinan antar-bangsawan menunjukkan dua kecenderungan. *Pertama*, usaha untuk menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih erat. *Kedua*, usaha ke arah hubungan dengan anggota kelompok lain dengan maksud mencapai hubungan yang menguntungkan.[109]

Dasar hubungan perkawinan antar-bangsawan ini juga menunjukan bahwa perkawinan merupakan alat untuk memperluas jaringan kekerabatan. Semakin luas

---

[107] Menurut beberapa narasumber bahwa dalam menjalangkan pemerintahannya sultan didampingi oleh suatu dewan kerajaan atau disebut *bobato nyagimoi se tufkange*.Sultan dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan sebagai pelindung rakyat dan agama.Fungsi ini mungkin sekali ada kaitannya dengan lambang yang berupa payung, sebagai pelindung dan lambang kerajaan berupa gunung, penyangah. Wawancara pada bulan September 2013.

[108] *Sangaji* sebagai pejabat pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh sultan dan berkewajiban mengawasi kepentingan sultan di wilayah kekuasaannya. Dalam dokumen Hindia Belanda disebtukan bahwa para *sangaji* mempunyai fungsi politik ganda. Sebagai penguasa yang disahkan oleh sultan, mereka berkewajiban mengawasi kepentingan-kepentingan *kadaton* di wilayahnya yang berupa upeti dan pengerahan tenaga untuk *hongi* (armada kerajaan) serta *extirpatie* atau ekspedisi penebangan hutan-hutan pala dan cengkeh. Karenanya mereka mendapatkan posisi di pusat kerajaan (*bobato dunia*), mereka juga dilibatkan dalam menyusun hukum-hukum adat dan berbagai kebijaksanaan kerajaan.Lebih jelasnya lihat Mvo Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo Seri 2,rel nomer 26. (Jakarta: Arsip Nasional RI 1992), hlm. 21.

[109] Edwrd L Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makasar 1906-1942*. (Ombak: Yogyakarta, 2004), hlm.69.

jaringan kekeluargaan, semakin luas pula pengaruh kelompok itu. Hal itu akan mempertinggi kewibawaan pemimpin kelompok dalam memperkuat kedudukan kekuasaannya. Dengan kata lain, kecenderungan memperluas pengaruh, kewibawaan, dan kekuasaan lewat hubungan perkawinan, menunjukan bahwa masalah kekuasaan politik tidak dapat dipisahkan dari kekerabatan.

Pembagian atau pelapisan sosial dalam masyarakat Kesultanan Ternate berdampak pada penyematan gelar atau titel yang dipergunakan sebagai ciri utama untuk membedakan mereka satu sama lain. Misalnya, gelar *Soa-Sio* dan *Sangaji* hanya diperuntukkan bagi bangsawan yang menduduki *Bobato Madopola* (dewan kerajaan). Sementara gelar *heku* dan *cim* diberikan kepada petugas-petugas yang mengurusi keamanan kerajaan.[110] Gelar pada dasarnya merupakan perwujudan dari garis keturunan yang bersandar pada individu yang berada dalam kerangka geneologis yang sama dari pihak laki-laki (patrilineal) dan terkadang terkait secara unilinear ke satu sumber.

Pada golongan bagsawan, terdapat pula perbedaan menurut tingkatannya sesuai dengan jasa dan hubungan kekerabatan seseorang dengan sultan. Hingga kini, dalam kehidupan adat masyarakat Ternate, golongan *kolano* (sultan) dan golongan *dano* (bangsawan) merupakan kelompok elite. Demikian pula pengelompokan *soa*, masih diakui sebagai lembaga adat dalam kehidupan sehari-hari. Bangsawan masih merupakan kelompok atas dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Sementara bentuk hubungan bangsawan dengan penduduk berupa hubungan tambal-balik antara *patron* dan *klien.* Kaum bangsawan berkewajiban memberikan perlindungan kepada penduduk dan sebaliknya, penduduk memberikan imbalan berupa barang, jasa, dan tenaga kepada kaum bangsawan.

Pelapisan sosial di atas memberi pengaruh pada sistem kepemimpinan politik, terutama di tingkat pusat kerajaan (sultan). Rakyat yang memandang penting adanya keluarga inti (kekerabatan patrilinial maupun bilateral) memiliki ketaatan mutlak yang didasarkan kepada tatanan budaya politik[111] (*jou kasa ngom ka ge*) yang artinya, di mana sultan, di situlah kami. Hal itu menempatkan sultan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Penolakan terhadap keputusan sultan (*iddin kolano*) akan mendatangkan malapetaka.[112] Hal itu pula diyakini oleh para bangsawan, sehingga mereka tidak perlu mengontrol rakyatnya. Ada keyakinan bahwa setiap kesalahan yang dibuat oleh rakyatnya, akan dilaporkan karena mereka takut akibatnya jika tidak segera diselesaikan. Keyakinan akan adanya hubungan erat antara *jou* (sultan) dan *bala* (rakyat), membuat tatanan kultural yang berlaku senantiasa ditaati dan dipertahankan karena dipandang memiliki kekuatan magis dengan melindungi tatanan sosial dan politik yang ada.

---

[110] Christiaan Frans van Fraasen, Ternate, *op.cit.*, hlm. 184.

[111] Secara teoritik budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memeliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Lihat Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik.* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm.54.

[112] Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir.*(Ternate: Depdikbud, 1982), hlm. 32.

Bagi masyarakat Ternate, hubungan antara sultan dan bawahan berlaku hubungan *patron-clien* (*jou se ngofa ngare*) atau menurut istilah Jawa disebut hubungan *gusti-kawula*.[113] Meskipun demikian, jika dilihat dari hierarkinya, maka raja mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada rakyat. Dalam hubungan ini, sultan mendapat kedudukan khusus dalam masyarakat sebagai kelompok tersendiri yang dapat melaksanakan kekuasaan atas rakyat dan menempati strata bangsawan yang tinggi. Mereka ditempatkan sebagai tokoh yang dapat menghubungkan dunia atas dan dunia bawah yang kemudian menjadi pemegang kendali kehidupan pemerintahan dan dianggap memiliki kekuatan suprtanatural yang dapat menciptakan ketertiban dan kesejahtraan rakyat. Oleh karena itu, segala titah dan perintah dipandang sebagai hukum yang harus ditaati suluruh rakyat. Pelagaran atau pengingkaran atas titah dan perintah sultan dipandang sebagai sikap penghinaan atas kedudukannya dan akan berdampak malapetaka.

Gambaran stratifikasi sosial itu kini telah berubah. Telah terjadi perubahan sejalan dengan proses moderenisasi. Pembukaan sekolah-sekolah pada perkembangan selanjutnya melahirkan kelas baru dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, para rakyat dapat menyekolahkan anak-anak mereka agar dapat masuk dalam jajaran birokrasi. Jika dahulu sultan dan kerabatnya yang mendominasi kegiatan pemerintahan, kini telah terbuka peluang kepada rakyat melalui pendidikan dan kemampuan dalam bidangnya menjadi prasyarat utama untuk masuk dalam jajaran birokrasi.[114]

Setelah proklamsi kemerdekaan, kedudukan kaum bangsawan mengalami transisi. Pada satu sisi, terdapat elite tradisional yang tetap mempertahankan *statusquo* dan memandang setiap perubahan sebagai ancaman bagi mereka. Sementara di pihak lain, terdapat golongan elite baru yang yang memegang kepemimpinan dan menghendaki perubahan.[115] Sementara di saat yang sama, terjadi perubahan persyaratan untuk masuk dalam lingkungan birokrasi dan terbuka peluang luas bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan yang tinggi.

---

[113] Istilah *gusti-kawula* diterapkan dalam pemerintahan dengan menganalogikan raja sebagai patron dan rakyat sebagai klien.Antara raja-rakyat terjadi hubungan simbiotik, dalam arti bahwa kedua belah pihak dapat dikatakan mempunyai hubungan seimbang dan bersifat timbal balik. Hubungan itu dapat diartikan hubungan yang setingkat artinya kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, tetapi meskipun demikian jika dilihat dari hirarkhinya maka raja mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada rakyat. Namun kedudukan yang tinggi tidak dapat berperan dengan baik untuk memenuhi kebutuhannya tanpa hidup bersama dengan rakyat. Lihat Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis* 1850-1942. (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 76.

[114] Pada mulannya penduduk Ternate hanya terdiri atas lapisan-lapisan sosial yang bersifat feodal komunal, seperti sultan dan kerabat, golongan bangsawan dan pemangku agama. Namun dalam perkembangannya kemudian, masyarakat tradisional berkembang ke arah modern. Selain itu, jawatan-jawatan pemerintah pemerintah juga terbuka untuk memperkajakan pegawai dari kalangan masyarakat umum. Akibat dari akumulasi pendidikan inilah, timbul diferensiasi, mobilitas, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat Ternate. Lebih jelasnya lihat Syahril Muhammad, *op.cit.,* hlm. 112-113.

[115] Sartono Kartodirdjo, ed. *Elite dalam Perspektif Sejarah*. (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 1-2.

Perubahan-perubahan di atas, dalam perkembangannya kemudian, mempengaruhi tatanan budaya masyarakat Ternate. Konvensi yang sebelumnya berlaku dalam masa kerajaan yang menekankan bahwa merekalah yang berada pada strata yang lebih tinggi yang boleh melaksanakan kekuasaan atas kelompok berstrata lebih rendah kini telah pudar. Tidak dapat disangkal bahwa dampak dari birokratisasi pemerintahan dan penyelengaraan pendidikan telah melapangkan terjadinya mobilisasi sosial.[116] Hal itu berpengaruh pula terhadap pola hubungan antara bangsawan dengan rakyat. Meski dalam kehidupan kekinian, keberadaan kaum bangsawan masih dapat terindetifikasi.

Dalam perkembangannya, tidak jarang tampil seorang pejabat birokrasi dari kalangan rakyat biasa dan menjalankan kekuasaan terhadap bawahannya yang berdarah bangsawan. Proses modernisasi telah mengubah masyarakat tradisional dan menciptakan pergeseran peran serta fungsi dari lembaga-lembaga lama ke baru. Sistem pendidikan yang mengarah ke birokrasi modern memungkinkan terjadinya mobilitas sosial.[117] Golongan terpelajar yang secara perlahan mendapat kesempatan untuk menduduki posisi yang sama dengan golongan aristokrat, menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Hal ini tampak pada pergeseran sistem sosial, strata ekonomi, posisi politik, sampai gaya hidup. Sementara para bangsawan, masih tetap bertahan dalam status tradisionalnya. Hal itu membuat jabatan-jabatan dalam struktur Kesultanan Ternate masih didominasi golongan bangsawan secara turun-temurun.

D. Kedudukan Elite Kesultanan dalam Masyarakat

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa di dalam kekuasaan tradisional terdapat dua lapisan atau strata sosial. Keduanya adalah kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua kelompok itu disebut Pareto dan Mosca sebagai kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah.[118] Mereka yang berkuasa biasa disebut elite, sebagaimana dirumuskan Harold Laswell.[119] Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, elite dibagi dalam dua katagori, yaitu elite yang mengatur soal-soal pemerintahan (*bobato dunia*) dan kelompok yang mengatur masalah keagamaan (*bobato akhirat*). Kedua

[116] Suhartono W. Pranoto, *Serpihan Budaya Feodal.* (Yogyakarta: Agastya Media, 2001), hlm. 32-33.

[117] Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia.* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 12.

[118] Untuk lebih jelasnya lihat Battomore T.B. *Elite dan Masyarakat*.(Jakarta: Akbar Tanjung Institut.2006), hlm 23-24.

[119] Elite menurut Harold Laswell yang merupakan suatu kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil menempati kedudukan dominasi dalam masyarakat, dalam arti bahwa nilai-nilai (values) yang mereka bentuk (ciptakan, hasilkan) mendapat penilaian tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan.Nilai-nilai tersebut mungkin dapat berwujud kekuasaan, kekayaan, kehormatan, pengetahuan dan lain-lainnya. Pada gilirannya akan menduduki lapisan atas daripada sratifikasi yang ada dimasyarakat yang bersangkutan. Lihat Harold Laswell, *Polotical Sociology.* (Oxford & LBH Publishing Co., New Delhi, 1982), hlm. 93.

kelompok ini merupakan lapisan teratas yang memiliki kedudukan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih tinggi. Sebagai elite yang memerintah, kedua kelompok ini mempunyai nilai strategis di antara sultan di satu sisi dan rakyat di pihak lain. Struktur golongan ini mendapat perhatian utama dalam penelitian ini karena menjadi pokok analisis mengapa golongan ini cukup sentral dalam masyarakat Ternate. Oleh karena itu, uraian ini akan mengambarkan bagaimana peran dan kekuasaan elite tersebut di dalam masyarakat Ternate.

1. *Bobato Dunia* (Elite Pemerintahan)

Masyarakat keraton, seperti di kebanyakan kerajaan, mengenal pelapisan-pelapisan yang tersusun secara hirarki. Raja menduduki tempat tertinggi, kemudian diikuti oleh kaum bangsawan.[120] Dalam menjalankan pemerintahannya sultan didampingi suatu dewan kerajaan yang dinamakan *bobato.*[121] Anggota-anggota dewan ini terdiri dari pejabat-pejabat kerajaan yang mengurusi pemerintahan (*bobato dunia*) dan masalah keagamaan (*bobato akhirat*).

Dalam katagori, *bobato dunia* adalah pejabat yang menduduki lembaga-lembaga kerajaan seperti *Gam Raha* (Dewan Tertinggi Kerajaan), *Bobato Nyagimoi se Tofkange* (lembaga legislatif), *Fala Raha* (Lembaga Penasehat *Kolano*), *Sabua Raha* (Empat Hakim Agung), dan Dewan Menteri atau disebut *bobato madopolo* yang terdiri dari *Jogugu* (Perdana Menteri) *Kapita Lau* (Laksamana Angkatan Laut), *Hukum Soa-sio* (Menteri dalam Negeri), *Hukum* Sangaji (Menteri Luar Negeri), *Tulilamo* (Menteri Sekretaris Negara), serta *Sangaji* (pemerintahan wilayah atau Gubernur).[122]

Sebagai pejabat yang dilantik dan disahkan oleh sultan, hubungan antara mereka sebagai *clientship*, yakni ikatan antara seorang penguasa politik tertinggi dengan orang yang dikuasakan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan penguasa tertinggi itu. Berdasarkan perjanjian *Formadiyahi*, jabatan-jabatan pada bangsawan tersebut diberikan secara turun-temurun (*dabo se barasi*), yang menurut berbagai sumber, hingga kini tetap dipegang teguh sebagai landasan rekrutmen politik di lingkungan Kesultanan Ternate. Marga *Marasa Oli,*[123] *Toma Gola,*[124]

---

[120] Mengenai lapisan sosial, gelar dan jenjang dalam kelas bangsawan, lihat Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*.(Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2002), hlm. 209-211.

[121] Istilah *bobato* dalam bahasa Ternate diterjemahkan sebagai pengatur dan penguasa.Dalam tulisan ini, kata yang digunakan sebagai padanannya adalah penguasa. Termasuk dalam lapisan yang bukan saja mereka yang mengatur soal-soal pemerintahan dipusat-pusat kerajaan (*bobato dunia*), tetapi juga mereka yang mengatur masalah keagamaan yang dinamakan *bobato akhirat.*

[122] Rustam Hasim dan Hasmawati,"Kedudukan Elite Kesultanan Dalam Masyarakat Ternate" Jurnal Ilmu Budaya UNHAS. Vol. 5. No.2 Desember 2017.

[123] *Marasaoli* adalah pelaksanaan kekuasaan *kolano,* karenanya jabatan ini juga disebut *jo gugu* (pemegang kekuasaan). Jabatan ini diberikan kepada salah satu *Momole* setelah dicapainya persetujuan *Foramadiyahi.* Para keturunannya terhimpun dalam *Soa Marasaoli* yang memiliki akses ke posisi *jogugu* (perdana menteri).

[124] *Toma Gola,* sesuai kesepakatan. *Foramadiyahi,* berfungsi sebagai pejabat keamanan kerajaan. Keturunan pejabat ini tergabung dalam *Soa Toma Gola* yang juga memiliki akses menjadi *kapita lau* (laksamana angkatan laut).

Toma Ito,[125] *Jiko,*[126] *Tabala*[127] dan *Toro Ngara*[128]adalah marga-marga yang hingga kini menduduki empat jabatan yang strategis dalam Kesultanan Ternate, yaitu *Gam Raha* (dewan tertinggi kerajaan), *Bobato Nyagimoi se Tofkange* (lembaga legislatif), *Fala Raha*. (lembaga penasehat sultan), dan *Sabua Raha* (empat hakim agung). Oleh karena status dan kekuasaan yang diperoleh para bangsawan tersebut berdasarkan prinsip keturunan, bukan hasil kecakapan, maka dalam hubungan antara sultan dan para bangsawan itu, bila dikaitkan dengan tugasnya di bidang pemerintahan, dapat dikatakan sebagai hubungan yang horizontal. Sudah menjadi kebiasaan bagi sultan-sultan di Ternate, menghadiahkan sebidang tanah kepada para *bobato dunia* untuk tempat tinggal tanah untuk pertanian yang disebut *kaha cocatu.* Pada umumnya, bobato dunia bertempat tinggal di dekat istana sultan.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, para *bobato dunia* mendapatkan kepercayaan penuh dari sultan dalam bidang pemerintahan. Karena mendapat kepercayaan penuh dari sultan, maka hubungan para *bobato dunia* dengan rakyat bersifat *patron client*. Pihak bangsawan memberi perlindungan dan pengayoman, sedangkan pihak rakyat berkewajiban memberikan pelayanan dan penghormatan. Di mata rakyat, para *bobato dunia* memiliki otoritas tradisional serta diakui hak-haknya secara turun-temurun dan berada pada puncak hirarki. Sehingga hubungan tersebut terjalin berdasarkan rasa bakti, kesetiaaan, pengabdian, serta dilandasi suatu kepercayaan bahwa para *bobato dunia* dengan segala kelebihan dan kewibawaanya, dapat memberikan kesejahtraan bagi rakyat. Meski para *bobato dunia* tersebut berkedudukan di ibukota kerajaan, namun tugasnya tidak hanya terbatas di istana. Para pejabat-pejabat itu juga banyak mengurusi daerah-daerah luar yang secara geografis jauh dari pusat kerajaan. Namun bagi mereka mengabdi kepada kerajaan merupakan kehormatan besar dan selalu siap mengorbankan segala milik maupun nyawanya demi keselamatan kerajaan.[129]

---

[125] *Toma Ito* juga merupakan jabatan yang diberikan pada *Momole* yang bertanggung jawab atas perekonomian dan perniagaan kerajaan. Anak keturunannya tergabung dalam *Soa Tomaito* dan memiliki akses ke empat lembaga politik yang ada.

[126] *Jiko* yang berasal harafiah berarti teluk atau lekuk, berfungsi dalam mengatur seluk beluk adat dan agama.Keturunannya yang tergabung dalam *Soa Jiko,* dalam struktur kerajaan, menduduki posisi *Sabua Raha* dan *Gam Raha*.*Fanyira Jawa* mewakili warga masyarakat pendatang yang berasal dari pulau Jawa yang bukan saja berfungsi sebagai pengajar berbagai ilmu pengetahuan, tetapi juga mengindikasikan eratnya hubungan (perdagangan) antara kedua masyarakat ini. Dalam struktur pemerintahan Ternate, *Fanyira Jawa* menduduki posisi sama sebagai *bobato akhirat* (ulama kerajaan).

[127] *Tabala* adalah jabatan berkaitan dengan urusan-urusan luar negeri. Keturunannya disebut sebagai *Soa Tabala* dan menduduki posisi *Hukum Sangaji* (menteri luar negeri).

[128] *Toro Ngara* berfungsi mengatur urusan-urusan dalam negeri. Keturunannya disebut *Soa Torongara* dan menduduki *Hukum Soa-sio* (menteri dalam negeri).

[129] Sejak berabad-abad, para elite Kesultanan Ternate, mulai dari yang paling tinggi (*bobato nyagimoi setufkange*), sampai yang paling rendah *mahimo* (kepala desa) menjadi satu lapisan sosial yang mempunyai seperangkat keyakinan dan nilai tersendiri. Bangsawan Ternate seperti halnya bangsawan Jawa, merupakan kelas sosial yang memiliki kayakinan dari nilai-nilai khusus dan berada di antara raja di satu sisi dan rakyat di pihak lain. Soemarsaid Moertono menyebut bangsawan sebagai abdi dalem atau punggawa kerajaan. Mereka merupakan salah satu unsur elite yang memerintah dan terdiri dari dua kelompok, yaitu aristokrasi darah dan aristokrasi jabatan. Lebih jelasnya lihat

Dalam struktur Kesultanan Ternate, selain terdapat lembaga eksekutif, juga terdapat suatu dewan yang dikenal dengan sebutan *Bobato Nyagimoi se Tufkange* (lembaga legislatif). Lembaga ini terdiri dari wakil-wakil rakyat dari kedelapan belas marga yang disebut *Soa*. *Soa* tersebut mewakili 41 *Soa* yang ada di Ternate. Anggota dewan ini berasal dari sembilan pemimpin marga *Soa-Sio* dan sembilan pemimpin dari marga Sangaji. Kedua marga tersebut merupakan marga bangsawan dan secara turun-temurun menduduki jabatan dalam Kesultanan Ternate.[130]

Sama halnya lembaga-lembaga di atas, rekrutmen *bobato nyagimoi setofkange* juga didasarkan faktor keterunana daan pertimbagan etnis. Ini berarti bahwa ikatan-ikatan geneologis merupakan landasan legitimasi kekuasaan sekaligus menjadi landasan integrasi. Dewan ini berfungsi meletakkan adat-istiadat dan aturan dalam tata kehidupan bermasyarakat dan dari merekalah hukum adat Ternate disusun berdasarkan karakteristik dan budaya masing-masing suku bangsa.[131]

Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan, bangsawan dan masyarakat harus berpegang dalam hukum dasar yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Ada enam sila dasar yang menjadi falsafah kenegaraan Kesultanan Ternate yang disebut *Kie se Gam Magogugu Matiti Rara.*[132] Masing-masing adalah:

1. *Adat se Atorang* adalah hukum dasar yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap kerajaan, pengangkatan sultan, dan pengangkatan pejabat-pejabat politik lainnya.
2. *Istiadatse Kabasarang*, yakni aturan yang menyangkut kekuasaan dan hak kesultanan, seperti hak mendapatkan kehormatan yang tertinggi, hak mendapat gelaran, mahkota, singgasana, keraton, dan lain-lain.
3. *Galib se Likudi* adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan hak-hak warga masyarakat seperti kedudukan dan hak *soa* (marga) menurut asal-usulnya, hak milik seseorang menurut kebiasaan hak dan kedudukan orang asing yang diterima dalam *soa* (marga).
4. *Ngale se Duku*, yakni mengatur tata cara bentuk budaya masing suku bangsa dan digunakan secara bersama menurut kebiasaan masing-masing.

Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Mataram II Abad ke XVI Sampai XIX*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 52.

[130]*Memorie van Overgave C. Bosscher* Residen Ternate (1859). (Jakarta, ANRI, 1980),hlm. 92.

[131] Hukum dasar ini disebut *adat se atorang*, yakni kebiasaan yang terdapat pada marga atau suku bangsa itu sendiri yang disepakti secara bersama.Misalnya, kepada golongan Islam berlaku hukum Islam baginya walaupun terkadang di dalamnya terdapat juga kebiasaann yang telah berlaku sejak lama, bagitu pula hukum-hukum yang lainnya.

[132] Keenam sila dasar ini menjadi ikatan yang menyatukan sistem kekerabatan dalam peragulan masyarakat Ternate. Ketika terjadi sengketa dalam masyarakat, maka sandaran penyelesaiannya dikembalikan ke hukum dasar tersebut. Hukum dasar ini dijalankan oleh seluruh komponen masyarakat (adat maupun di luar adat). Sementara kepada penegak hukum ke lembaga-lembaga yang telah diberikan tugas dan tangungjawab masing-masing. Lebih jelasnya lihat Anas Dinsie & Rinto Taib *Ternate Sejarah, Kebudayaan & Pembangunan Pedamaian Maluku Utara.* (Ternate: LeKRa-MKR, 2010), hlm. 77-78

5. *Sere se Doniru* adalah aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan seni budaya dan kebiasaan yang timbul dalam pergaulan masyarakat yang diterima secara bersama.
6. *Cing se Cingare*, yakni aturan yang mengatur pergaulan (wanita-pria) dalam masyarakat, perkawinan, dan upacara adat, yang merupakan satu kesatuan dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Sebagai bentuk pemerintahan aristokrasi, kapasitas sultan hanya sebatas mengorganisir kelompok aristokrat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini, tidak semua keputusan sultan bersifat final, tetapi harus meminta pertimbangan dan nasihat dari kelompok *bobato nyagimoi setofkange* (lembaga legislatif).[133] Hal ini, sebagaimana dikisahkan de Clereq bahwa pada abad ke 19, dewan ini beranggotakan 18 orang berusia lanjut berwenang sebagai pengadilan tinggi dengan tugas menentukan perang dan damai, mengangkat pejabat-pejabata daerah, meletakan adat-istiadat, serta mengendalikan dan mengatur kehidupan masyarakat.[134] Ikatan atau kebersamaan kelompok inilah yang kemudian dijadikan semboyang kenegaraan Kesultanan Ternate *Ino fo makati nyinga, doka gosora se balawa, om doro yo momote, fo magogoru fo madodara* (Mari kita bertimbang rasa seperti pala dengan fulinya, masak bersama, gugur bersama, saling membina kasih dan sayang).

Kesultanan Ternate merupakan kerajaan maritim yang sebagian wilayah kekuasaanya tersebar ke beberapa pulau di wilayah Maluku Utara, seperti Halmahera Barat dan Utara, Pulau Sanana, Makian, dan Kayoa. Untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan serta mengurus kepentingan sultan di daerah kekuasaanya, ditetapkan dua jenis jabatan yang disebut sangaji (semacam bupati) dan *salahakan* (utusan sultan). Jika pengangkatan para *bobato madopolo* (dewan menteri) mempertimbangkan faktor geneologis, maka pengangkatan para *sangaji* selalu berpedoman pada kriteria adanya hubungan darah dengan sultan.[135]

Salah satu cara yang lazim dilakukan oleh sultan-sultan Ternate dalam usaha memperkuat status maupun kekuasaanya sampai di tingkat bawah ialah melalui politik perkawinan. Jaringan sosial yang saling mengikat dari atas sampai ke bawah, terjalin sebagai suatu ikatan feodal yang semata-mata berdasarkan atas kepercayaan dan kesetiaan. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran pada sultan dan bangsawan menggunakan otoritas tradisional semata-

[133] Kelompok yang menduduki jabatan ini, memiliki otoritas untuk menentukan pemimpin adat jika terjadi kekosongan kepemimipinan dalam pemerintahan akibat mangkatnya seorang pemimpin atau pemimpin yang bersangkutan telah menyalahgunakan wewenang, sehingga menimbulkan persoalan sosial maupun krisis kepercayaan dari pemerintahan yang dijalankan. Layaknya dalam sistem pemerintahan modern, DPR melakukan fungsi kontrol kepada presiden jika presiden telah mengkhianati undang-undang. *Bobato* delapan belas bisa memberhentikan sultan jika yang bersangkutan tidak menjalankan tugas atau menyalahgunakan wewenang. Lebih jelasnya lihat Shaleh A. Putuhena, *Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam.*(Jakarta: Leknas LIPI, 1987), hlm. 67-69.

[134] de Clercq, *op cit.*, hlm. 92.

[135] Shaleh A. Putuhena, *op. cit.*, hlm. 64-65.

mata hanya untuk memperkuat hegemoninya. Semua gagasan politiknya disalurkan kepada pejabat kesultanan sehingga memperkuat pula hubungan pemerintah kolonial dengan rakyat.[136]

Sebagai pejabat pemerintah para *sangaji*diangkat dan diberhentikan oleh sultan dan berkewajiban mengawasi kepentingan sultan di wilayah kekuasaannya. Khusus di wilayah Halmahera Barat dan Utara para sangaji mempunyai fungsi politik ganda. Selain sebagai penguasa yang disahkan oleh sultan, mereka juga berkewajiban memelihara hubungan antara distriknya dengan *kadaton.* Hubungan ini paling nyata terwujud dalam suatu sistem *nagse* (upeti) yang mengatur berbagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi penduduk kepada sultan.[137] Hal itu membuat mereka menempati posisi di pusat kerajaan sebagai dewan kerajaan (*bobato madopolo*). Mereka juga dilibatkan dalam menyusun hukum-hukum adat dan berbagai kebijaksanaan kerajaan.

Sekalipun status para *sangaji* dalam struktur kekuasaan berada di bawah dewan kerajaan, namun dalam distrik masing-masing, mereka seperti "raja". Hal ini tampak dari kelengkapan staf pemerintahan mereka. Rekrutmen stafnya merupakan hak prerogatif sangaji yang berasal dari keluarga-keluarga inti utama dalam distrik (negeri induk). Bersama sangaji dan keluarganya, anggota-anggota staf dan keluargannya itu merupakan suatu lapisan tersendiri yang berdiam di kampung tersendiri.[138] Menurut berbagai sumber, wewenang para sangaji tidak terbatas pada masalah-masalah politik. Sebagai wakil sultan, para sangaji juga mengurus peradilan dalam menegakan norma-norma adat dan menjatuhkan sanksi-sanksi kepada pelanggarnya. Selain itu, mereka juga memelihara perbatasan-perbatasan di seluruh wilayah kekuasaannya.[139]

Sementara para *salahakan* (utusan sultan) ditempatkan di wilayah Kepulauan Sula dan Banggai. Petugas-petugas daerah itu berkewajiban menjaga, mengurus, dan mengadili perkara-perkara perdata dan pidana. Selain itu, juga mengumpulkan upeti untuk diserahkan kepada *kadaton* secara periodik. Kedua pejabat ini diangkat oleh sultan dan berasal dari pusat pemerintahan. Oleh karena itu, mereka dapat diganti sesuai dengan keinginan sultan. Para sangaji dan *salahakan* mempunyai suatu tanda pengenal status yang khas, yaitu pakaian kebesaran yang terdiri dari sebuah jubah panjang dan sorban berwarna hitam yang disebut *dastar ngongare* serta lencana kerajaan. Hanya sultan yang berhak menggunakan jubah dan bersorban putih. Dalam wilayah Kesultanan Ternate terdapat 33 sangajiyang tersebar di beberapa tempat, yaitu di Pulau Ternate, Makian, Kayoa, Gane, Jailolo, Sahu, Ibu, Loloda, Morotai, Galela, Tobelo, Kao, Sula,

---

[136]***Memori van Overgave,*** Residen Ternate K.A. James, 1920. (Jakarta: ANRI, 1980), hlm, 19.

[137] R.Z. Leirissa, *op. cit.*, hlm. 64-65.

[138]Memorie van Overgave J.H. Tobias (1857) (Jakarta: ANRI, 1980), hlm. 23.

[139] Hasil wawancara Mei 2013.

Mangoli, dan Taliabu. Para sangajiitu diberi gelar *jiko makolano* (penguasa tanjung).[140]

Meskipun dalam struktur Kesultanan Ternate terdapat kelas elite yang terbuka, seperti para *Bobato Madopolo* (dewan menteri) dan *Bobato Nyagimoi se Tufkange*,yang diangkat berdasarkan perwakilan etnis, tetapi dalam beberapa alasan keamanan untuk menjaga stabilitas politik antara pusat dan daerah, sultan memilih dan mengangkat para sangaji dari kalangan keluargannya maupun dari kalangan bangsawan lain. Ada beberapa jabatan yang pejabatnya diangkat berdasarkan faktor keturunan, seperti *Bobato Nyagimoi seTufkange* dan *Gam Raha*.[141] Jabatan perdana menteri (*jogugu)* misalnya, harus diduduki oleh pengikut sultan yang paling dipercayai atau tangan kanannya. Biasanya ditempati oleh mereka yang berasal dari etnis Makian. Walau demikian, kecenderungan untuk memilih berdasarkan keturunan dapat juga ditemukan dalam jabatan ini.[142]

Sultan memang tetaplah merupakan pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan *jogugu* (perdana menteri). Dalam hubungan ini, menurut Djoko Suryo, sultan dipandang menempati kedudukan sentral sebagai penghubung antara *jagad cilik* (*micro cosmos*) atau jagad tempat manusia hidup di dunia termasuk di dalamnya istana dan kerajaanya dengan *jagad gedhe* (alam semesta raya) atau jagad sang khalik (*macro cosmos*). Dalam hubungan ini, sultan memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memerintah kerajaanya sesuai dengan tujuan idealnya, yakni menciptakan kehidupan yang teratur, aman ,tenteram, damai, subur, makmur, dan sejahtera.[143]

---

[140] Dalam rekrutmen *sangaji* di Kesultanan Ternate tidak hanya dipertimbangkan dari hubungan pertalian darah dan legitimasi politik, tetapi berkaitan dengan faktor representatif etnis yang mendiami Maluku Utara.Ini berarti bahwa masyarakat Maluku Utara terbagi habis kedalam unit-unit politik yang kecil dan dipersatukan melalui sistem perwakilan distrik. Ikatan-ikatan teritorial inilah merupakan landasan legitimasi kekuasaan sekaligus menjadi landasan integrasi eksisnya Kesultanan Ternate. Lihat Leonard Leonard Y. Andaya, *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), hlm. 154.

[141] Keangotaan mereka diikat dengan satu simbol yang sama sebagaimana di gambarkan dalam bendera Kesultanan Ternate berbentuk persegi empat, yang berarti mewakili empat soa/marga yakni, marga *Soa-sio, Sangaji* (bangsawan), heku dan cim (bukan bangsawan). Dengan warna putih di tengahnya berwarna putih melambangkan sultan, warna kuning melambangkan bangsawan (*sangaji dan soa-sio*), dan warna merah melambangkan marga *heku* dan *cim*. Hasil wawancara Pebruari 2013.

[142] Menurut beberapa responden bahwa jabatan perdana menteri (*jogugu)*, misalnya harus diduduki oleh pengikut sultan yang paling dipercayai atau tangan kanannya biasanya ditempati oleh soa *Marasaoli* (etnis Ternate). Yang menjadi patokan penting untuk masuk kedalam harus berasal dari etnis tersebut sehingga duduk dalam dinas kerajaan. Akibatnya bilang seorang itu bukan pejabat kerajaan, maka masuknya ia sebagai abdi dalem kerajaan, tergantung pada dekatnya hubungan marga (soa) dengan seorang pejabat kerajaan. Semakin tinggi kedudukan seorang pejabat, makin panjang garis keturunannya akan tergolong kelompok elite ini.

[143] Lihat Djoko Suryo, *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern.*(Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 213.

2. *Bobato Akhirat* (Elite Keagamaan)

Salah satu fungsi yang terpenting dalam golongan elite di Kesultanan Ternate yang berperan sebagai pimpinan agama Islam adalah *bobato akhirat.* Demikian pentingnya peran agama menyebabkan lembaga ini cukup sentral masyarakat Ternate.Sebagai penguasa yang disahkan kedudukannya oleh sultan maka loyalitas para *bobato akhirat* juga ditujukan pada penguasa kerajaan bahkan merupakan perpanjangan dari alat kekuasaan sultan.Sistem nilai yang memberi legalitas kedudukan sultan sebagai pemimpin agama (*amir mukminin*) atau penganti rasul (*Tubaddilur rasul*) juga menjadi legalitas *bobato akhirat*.[144]

Persoalan tentang kapan dan bagaimana proses rekrutmen *bobota akhirat* menjadi elite dalam kesultanan hingga kini masih membutuhkan kajian yang mendalam. Berdasarkan keterangan-keterangan lisan atau cerita beberapa penulis hikayat, seperti Naidah (hikayat Ternate), sebelum diangkat menjadi sultan Zainal Abidin berangkat ke Jawa dan memperdalam agama Islam di Giri. Setelah kembali barulah agama Islam mulai memasuki struktur pemerintahan. Hal itu sebagaimana dikisahkan oleh Naidah sebagai berikut:

> "Madero Sijou Tjitjo sareat ikoewat hango ino simangofa kolano Gapij Baguna simara oena sima ngofa Kitjil Djainalabudin isidie toma kaha Djawa iwosa iman simpoernawa iman Islam, tauhid Marifat Allah."[145]

Sejak pemerintahan Zainal Abidin (1486-1500), Islam secara resmi dilembagakan menjadi agama negara. Zainal Abidin juga menetapkan gelar sultan untuk setiap raja-raja Ternate berikutnya.[146] Perubahan dari bentuk *kolano* (kerajaan) ke kesultanan berimpilkasi pada penambahan sejumlah lembaga ke dalam struktur pemerintahan. Guna mengakomodir elemen Islam di dalam politik Ternate, maka ditambahkan lembaga *bobato akhirat* (mengurusi urusan-urusan keagamaan) ke dalam struktur pemerintahan kerajaan Ternate.[147]

Menurut Djoko Suryo, perubahan bentuk dari *kolano* (kerajaan) ke kesultanan oleh Zainal Abidin lebih dikarenakan alasan politis. Bentuk kesultanan tampaknya dengan sengaja diambil karena merupakan bentuk yang paling umum

---

[144] R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hlm. 91.

[145] P.van der Crab. "Geschiedenis van Ternate, in Ternataansche en Maleische Teks, Beschreven Door den Ternataan Naidah, Met Vertaling en Aantekeninghen Door" dalam *BKI*, Jilid 26 nomor 2. hlm. 95.

[146] Islamisasi di Ternate dimulai dari elite kerajaan. Mereka didik dan belajar Islam di pusat-pusat pengajaran Islam di Jawa. Setelah selesai belajar, mereka kembali ke daerahnya untuk mengajarkan ilmu yang diperolehnya dan mengislamkan keluarga. Untuk lebih jelasnya baca Shaleh Putuhena, *op.cit.*, hlm. 381.

[147] Sultan Zainal Abidin ((1486-1500) adalah sultan pertama Ternate. Ia mengubah struktur pemerintahan dari kerajaan (*kolano*) ke kesultanan. Menurut F.S.A. de Clercq, Sultan Zainal Abidin bukan saja telah mengukuhkan agama Islam dengan memasukkannya dalam struktur politik, tetapi berusaha memperluas dan menanamkan ajaran-ajaran agama itu melalui pendidikan. Lebih jelasnya lihat F.S.A. de Clercq, *Ternate, Karesidenan dan Kesultanannya*, terj. Noer Fitriyanti dari *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, 1890. (Ternate: Komunitas Uma Sania, 2007), hlm. 143.

dikenal di berbagai kawasan yang berada dalam jangkauan pemahaman elite politik Ternate.[148]

Dalam struktur keagamaan (*bobato akhirat*) di Kesultanan Ternate, sultan adalah pemimpin tertinggi atau imam agung. Sebagai imam agung, sultan berkewajiban menjaga, melindungi, menyebarkan dan melestarikan agama Islam. Dalam kedudukannya sebagai seorang imam, sultan dibantu oleh para ulama yang memiliki pangkatnya sendiri-sendiri dan dilabelkan dari asal usul mereka. Ulama tertinggi yang membantu sultan di sebut *kadhi*, biasanya disebut *jo kalem. Kadhi* mengurus masalah yang bertalian dengan agama, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan sultan dan keluargannya. Keberadaan jabatan *kadhi* telah ada sejak zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin (1486-1500).[149]

Sebagai ulama tertinggi di kerajaan, kedudukan *kadhi* sangat penting. Ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa tidak bolah ada satu vonis atau hukuman yang ditetapkan tanpa kehadiran *kadhi*. Menurut berbagai sumber, kedudukan *kadhi* begitu penting karena sebagai salah satu anggota dewan kerajaan, kalau *jogugu* (perdana menteri) berhalangan hadir, maka *kadhi* yang mengantikannya. Menurut Antonio Galvao, di Kesutanan Ternate terdapat seorang *kadhi* (*casis general*). *Kadhi* mengepalai para imam di mesjid kesultanan yang terdiri dari empat orang imam, empat orang *modim* (muadzin), dan mengepalai pegawai-pegawai dari masjid-masjid lainnya di Ternate. *Kadhi*, para imam, dan khatib termasuk dalam urusan keagamaan yang disebut *bobato akhirat*.[150]

Dalam menjalankan tugasnya, *kadhi* dibantu oleh lima orang imam. Kelimanya adalah Imam Jiko, Imam Sangaji, Imam Moti, Imam Jawa[151] dan Imam Bangsa. Dalam struktur Kesultanan Ternate keempat imam tersebut (selain Imam Nangsa), bertugas menyiarkan agama, mengurus upacara kematian, perkawinan, serta pembagian harta warisan di tingkat distrik.

Sementara Imam Bangsa, secara khusus hanya mengurus dan menyelengarakan masalah yang menyangkut sultan, bangsawan, dan keluargannya. Jika dicermati dari fungsi dan peranannya, golongan agama itu telah menempati posisi yang tinggi dan strategis sebagai elite religius. Posisi strategisnya di peroleh dari kedudukan struktural maupun informal dilingkungan wilayah kesultanan (*kadaton*), distrik, hingga di kampung-kampung.Sebagaimana halnya dengan rekrutmen*bobato dunia* pengangkatan *bobato* akhirat juga tidak didasarkan pada pertalian darah melaingkan representasi etnis.

---

[148] Djoko Suryo, *op. cit.*, hlm, 210.

[149] Shaleh A. Putuhena, *op. cit.*, hlm, 12.

[150] Antonio Galvao, *Bijdragen tot de Kennis van Het Ternate.* (Leiden: Brill), 1890, hlm. 75.

[151] Kehadiran Imam Jawa dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate (*bobato akhirat*) merupakan suatu tanda keakraban hubungan para Sultan Ternate dengan para mubalig Jawa, khususnya Giri dan Tuban. Hubungan Kesultanan Ternate dengan Sultan Giri sejak Sultan Zainal Abidin (1580-1500) memperdalam Islam di pulau Jawa. Sejak saat itu para Sultan Ternate selalu memperdalam pengetahuan agama/ilmu agama dengan belajar di pondok-pondok Pesantren Giri. Untuk lebih jelasnya lihat, Djoko Suryo, *et al*. *op. cit.*, hlm. 87-88.

Di bawah para imam ini terdapat jabatan yang disebut *Khatib*. Jumlah mereka juga lima orang sama dengan jumlah para imam. Para *khatib ini* terdiri dari *khatib Jiko, Jawa,* Sangaji, *Moti dan Bangsa.* Setiap wilayah yang diperintah oleh seorang sangaji maka diangkat seorang imam distrik dimana wilayah kerjanya mencakup imam distrik[152].Dalam menjalangkan tugasnya imam distrik didampingi oleh para khatib dan mu'addin, begitu pula sampai pada aparat bawahannya imam kampung.Paling akhir dalam struktur *bobato akhirat* ini ditempati oleh para modin dan muadzin.Sebagai kelengkapan administrasi diangkat seorang khatib juru tulis untuk mengurus dan menyelengarakan tata usaha kerajaan.Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Cambier.

> Kegiatan para *bobato akhirat* yang dengan tekun melaksanakan pengajian, melayani ibadah di masjid, upacara sunatan, dan pernikahan. Suatu hal yang terutama menarik perhatian pejabat tersebut adalah pelaksanaan puasa yang selalu diawasi dengan ketat oleh para penguasa keagamaan itu. Demikian pula larangan makan daging babi yang ada di kalangan penduduk Halmahera yang tersebar secara luas.[153]

Kedudukan *bobato akhirat* yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Ternate. Mereka menimbulkan kepercayaan bahwa ibu kota kerajaan (istana), bukan saja sebagai pusat politik dan kebudayaan, tetapi juga pusat magis-religius kerajaan. Status *bobato akhirat* sebagai *tubaddilur rasul*, melahirkan suatu kepercayaan bahwa para *bobato akhirat* dianggap mempunyai kekuatan magis yang sama dengan sultan. *Bobato akhirat* juga dianggap dapat memberi perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Semua itu terlukis dalam berbagai doa keselamatan, doa *tolak bala*, doa *kololi kie* (mengelilingi gunung), doa *fere kiye* (naik gunung) dan doa upacara pelantikan sultan.

Otoritas kharismatik yang dimiliki para *bobato akhirat* yang dipengaruhi latar belakang agama yang dikenal oleh masyarakat Ternate berhubungan dengan wawasan mitologis. Konsep ini dilukiskan dalam suatu kepercayaan bahwa para *bobato akhirat* (ulama) memiliki kekuatan magis dan kosmologis. Anggapan seperti ini sama dengan konsep kekuasaan pada orang Jawa, bahwa raja dianggap sebagai penitisan atau keturunan dewa yang oleh Heine Gelderen disebut dewa raja.[154]

Walaupun struktur pemerintahan kerajaan Ternate mengalami perubahan dari kerajaan (*kolano*) ke kesultanan dan sultan sebagai pemimpin agama (*amir mukminin*), namun tidak otomatis menghilangkan simbol-simbol politik tradisional

---

[152] Setiap wilayah yang diperintah oleh seorang *sangaji* (camat), diangkat seorang sebagai imam distrik. Wilayah kerjanya mencakup wilayah kecamatan tersebut. Jika seorang *sangaji* diberi gaji oleh sultan, maka imam distrik mengabdi semata-mata karena agama. Kelengkapan imam distrik didampingi para khatib dan muaddin sampai pada aparat bawahannya, imam kampung. Lebih jelasnya A.B. Lapian, dalam pengantar *Memorie van Overgave* J.H. Tobias (1857), dan *Memorie van Overgave C. Bosscher* Residen Ternate (1859), Jakarta: ANRI, 1980).

[153] Surat *Gecommitteerde* P.C. Cambier yang ditulis tahun 1825 dan diterbitkan oleh P.J.B van der Aa dalam *BKI*, jilid 19, hlm. 66.

[154] Robert Heine Gelderen, *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara.* (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 13.

yang ada pada diri *kolano* (raja).Bagi masyarakat Ternate, walaupun sudah terjadi konversi pemerintahan dari *kolano* (kerajaan) ke kesultanan.Namun antara kata *kolano* dan sultan memeliki fungsi dan peran yang berbeda.Sampai saat ini posisi *kolano* tetap di pergunakan sebagai instrument pengendalian dan pengelolaan politik dalam negeri.Sementara posisi sultan lebih banyak diarahkan pada kepentingan-kepentingan hubungan internasional. Bahkan menurut salah satu nara sumber menegaskan bahwa gelar tertinggi bukannya sultan, tapi *kolona* karena hanya *kolona* yang dapat mengeluarkan *iddin.*[155]

Kewenangan inipun berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, misalnya hanya *kolona* yang memeliki hak-hak veto (*jaib kolano*), atas lembaga legislatif (*Bobato Nyagimoi Setofkange*) sampai sekarang tetap dimilikinya. Bahkan fungsi dan hak yang ada semakin diperluas dengan adanya pengunaan sebutan sultan. Di mana sultan berperan ganda yakni menjalangkan fungsi dalam bidang pemerintahan dan keagamaan.Dalam hal agama sultan adalah imam agung yang menjaga dan melindungi penyebaran dan kelestarian agama Islam atau kewajiban sultan untuk melindungi dan menyebarkan Islam. Poin inilah menjadi elemen baru yang ditambahkan pada kewajiban-kewajiban tradisional seorang *kolano.*Demikian pula, dengan posisinya sebagai *imam besar*, merupakan fungsi baru yang ditambahkan kepadanya.[156]

Penutup

Penduduk Ternate dewasa ini terdiri atas berbagai suku bangsa Indonesia yang berimigrasi ke daerah ini sejak masa Kolonial. Bahkan bila dikaji lebih jauh ke belakang sejak masa Emporium dan masa Emperium, telah banyak suku bangsa bahkan ras-ras dari berbagai negara dan benua telah datang ke daerah ini. Pertemuan antara ras dan suku bangsa ini, kemungkinan besar telah terjadi pencampuran sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang baru dengan berbagai polah tingkah budayanya. Kota Ternate tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan meletakkan hubugan komunikasi jauh keluar batas-batas Nusantara. Sebagai akibat hubungan-hubungan itu terjadi konvergensi gerakan barang dan manusia ke kota-kota tersebut. Dengan demikian tercita kondisi sosial budaya bahkan sosiolinguistik yang memungkinkan berkembangnya segala unsur kebudayaan.

Sebelum agama Islam diterima oleh penduduk Pulau Ternate, orang Ternate telah terbagi atas empat kelompok kekerabatan. Keempatnya adalah Marga Tubo, Marga Tabona, Marga Tabanga, dan Marga Toboleu. Masyarakat Ternate terbagi dalam susunan sosial yang tradisioal. Meskipun penggolongan masyarakat tidak setajam pembagian kasta-kasta dalam struktur sosial feodal, namun ada penggolongan yang bertolak atas dasar keturunan. Dengan kata lain pembagian

[155] *Iddin* atau semacam perintah yang di patuhi oleh masyarakat karena merupakan hak prerogatif atau hak veto yang dimiliki oleh sultan. Lihat Mudaffar Syah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. (Ternate : Goheba, 2009). hlm. 84.

[156] M Shaleh A. Putuhena, *op.cit.*, hlm. 5.

masyarakat Ternate tidak bersifat fungsional. Disamping pembagian struktur kehidupan sosial seperti tersebut diatas, masih ada lagi pembagian kelompok kekerabatan dalam soa atau marga, yang merupakan kelompok berdasarkan kekerabatan murni yang membagi seluruh masyarakat Ternate atas 41 kelompok kekerabatan.

Bahasa Ternate merupakan bahasa induk dari berbagai bahasa daerah di Maluku Utara. Bahkan pengaruhnya sampai di pulau Mindano, kepulawan Sula, Sabah di Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, sepanjang Sulawesi Tengah-Selatan, pulau Banggai, pulau Waigeo, Pulau Morotai. Adapun bahasa-bahasa daerah di Ternate, Halmahera, Tidore disebut "*Kie se gam*". Berbagai bahasa daerah di Maluku Utara masi tetap dipergunakan sebagai bahasa lokal. Ada yang berpendapat bahwa bahasa Terante termasuk rumpun bahasa Austronesia, berdasarkan kesamaan dalam segi tata bahasa (*pronauncation* dan *vocabulary*).

BAB III
SULTAN DAN SUMBER KEKUASAANNYA

Pengantar

Setelah dibahas mengenai gambaran umum masyarakat dan kebudayaan Ternate pada bab sebelumnnya. Maka pada bab ini lebih spesifik mengkaji sultan dan sumber kekuasaannya. Dalam hal ini di telusuri strategi apa saja yang digunakan oleh elite Kesultanan Ternate dalam membangun basis kekuasaanya, sehingga kelompok ini tampil menjadi pusat anutan dan berkuasa dalam kehidupan masyarakat Ternate.

Untuk memahami lebih jauh mengenai kekuasaan para sultan Ternate, terutama menyangkut konsep kekuasaan, bagaimana membangun kekuasaan, serta mempertahankan kekuasaan tersebut. Maka diperlukan penelusuran terhadap kedudukan dan peran para Sultan Ternate, mulai dari periode kolonial hingga pasca-kemerdekaan. Dalam hal ini ditelusuri dua strategi yang dibangun Kesultanan Ternate dalam upaya mempertahankan dan memperkokoh basis kekuasaannya. *Pertama*, doktrin mitos *Tujuh Putri*, di mana pihak *kadaton* (istana) melakukan doktrin pusat anutan yang menjadikan raja atau sultan sebagai representasi kekuasaan Tuhan (mikro kosmos). Untuk itu, diciptakanlah mitos *Tujuh Putri* sebagai legitimasi politiknya. *Kedua*, filosofis *Jou se Ngofangare* (raja dan hamba) dengan memposisikan istanasebagai tempat yang memiliki kedudukan identitas adat tertinggi. Istana dijadikan sumber acuan nilai-nilai adat yang juga berhubungan erat dengan sumber kepercayaan yang bersifat magis. Sultan dianggap memiliki kharisma dan kesaktian. Berbagai lambang dan benda-benda pusaka milik sultan seperti senjata dan gelar yang berfungsi mengabsahkan kedudukan sultan sebagai penguasa.

Beberapa konsep mengenai elite kekuasaan yang digunakan untuk menoropong hal tersebut, antara lain dari Clifford Geertz, Soemarsaid Moertono, Heather Sutherland, Kuntowijoyo, Darsiti Soeratman, Djoko Suryo, Suhartono W. Pranoto, Sartono Kartodirdjo, dan Benedict R. O'G. Anderson. Konsep mereka dapat membantu mengurai mulai dari aktivitas elite dalam dimensi politik, relevansi kekuasaan politik dengan penguasaan secara hegemonik pada level ekonomi, bagaimana istana dijadikan sumber tunggal produksi wacana pengetahuan, sistem kepercayaan, acuan sistem stratifikasi sosial, simbol status, gaya hidup, serta kesenian dalam masyarakat Ternate.

A. Silsilah Raja_Raja Ternate

Konsepsi kekuasaan Kesultanan Ternate tidak terlalu berbeda dengan konsep kekuasaan raja-raja di Jawa.[157] Konsep kekuasaan Kesultanan Ternate selalu

[157] Soemarsaid Moertono mengatakan konsepsi tentang kekuasaan Jawa (Dinasti Mataram) adalah menciptakan silsilah yang dimulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Karena itu, raja-raja Mataram menggambarkan diri sebagai raja yang agung dan binathara. Dalam usahanya memperoleh, menghimpun, dan mempertahangkan kekuasaanya, raja Jawa melakukan tindakan-tindakan yang menekan hawa nafsu, misalnya berpuasa, bersamadi, bertapa, melakukan pemurnian

menempatkan asal-usul sebagai sesuatu yang sangat penting. Hal itu membuat elite Kesultanan Ternate sangat berorentasi kepada teks babad maupun silsilah. Orientasi itu kemudian memunculkan penciptaaan sebuah mitos yang digunakan untuk legitimasi politik.

Pembicaraan mengenai geneologis atau silsilah raja-raja Ternate tidak dapat dipisahkan dari mitos *Tujuh Putri* atau yang dikenal sebagai Hikayat Ternate. Mitos itu ditulis oleh Naidah (1856-1866), seorang pujangga istana yang menjabat sebagai *Hukum Soa-Sio* (Mahkam Agung) Kesultanan Ternate pada masa pemerintahan Sultan Ternate ke-41 Muhammad Arsyad (1852-1869).[158] Mitos ini memberi peran sentral kepada seorang tokoh legendaris dari Arab, Jafar Shadik (terkadang disebut Jafar Nuh), yang tiba di Ternate pada hari Senin 6 Muharram 643 Hijriah atau 1250 Masehi. Jafar Shadik, yang nasabnya dihubungkan dengan Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, kemudian kawin dengan seorang putri bernama Nur Sifa. Naidah kemudian mengisahkan asal-usul Kerajaan Ternate sebagai berikut:

> Syahdan, datanglah seorang Arab yang bernama Jafar Shadik. Dia membangun rumah di atas sebuah bukit yang bernama Jore-jore, dan di kaki bukit itu terdapat sebuah mata air bernama *Ake Sentosa*.
>
> Pada suatu hari, sewaktu Jafar Shadik hendak mandi di mata air itu, ia melihat tujuh bidadari cantik yang tengah mandi. Jafar Shadik berkesempatan mengambil sepasang sayap milik salah satu dari bidadari itu dan menyembunyikannya. Setelah puas mandi-mandi, bersiaplah para bidadari itu pulang ke kayangan, tapi salah satu di antaranya, bernama Nur Sifa, terpaksa tinggal karena sayapnya hilang, yang akhimya kawin dengan Jafar Shadik.
>
> Dari perkawinan mereka ini, lahirlah tiga anak laki-laki. Masing-masing

---

ritual dan sebagainya. Hal senada juga dikemukakan oleh Benedict R. O'G.Anderson, bahwa konsepsi Jawa mengenai kekuasaan berdimensi empat sesuai konsepsi yang dipakai dalam pewayangan (sakti mandraguna dan mukti wibawa). Menurut Sartono Kartodirdjo, negara kosmis sangat erat hubungannya dengan konsep raja yang bersifat dewa, yaitu anggapan bahwa raja adalah titisan dewa. Konsep raja-dewa ini pada periode kerajaan Islam tidak menempatkan raja pada kedudukan yang sama dengan Tuhan, melainkan sebagai *khalifatullah* (sebagai wakil Tuhan di dunia). Begitu pula menurut Suhartono W. Pranoto yang mengatakan bahwa konsepsi orang Jawa mengenai kekuasaan sebagai kekuatan energi yang sakti dan keramat itu adalah konsepsi yang selalu dipakai raja-raja untuk mengemban misi memperkuat dinasti, sebab bilama mana usahanya berhasil, maka itu sekaligus akan dapat memperkuat kedudukannnya sendiri di dalam dinasti. Lebih jelasnya lihat Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Binna Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Mataram II Abad ke XVI Sampai XIX* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985); Benedict R. O'G. Anderson, *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia.* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), hlm.44-46; Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial.* (Jakarta:LP3, 1984); Suhartono W. Pranoto, *Serpihan Budaya Feodal* (Yogyakarta: Agastya Media, 2001).

[158] Naskah yang bercerita tentang asal-usul raja-raja Maluku Utara yang ditulis Naidah mengunakan Bahasa Ternate. Naskah tersebut hingga kini tersimpan di *kadaton* Ternate dan disebut "Buku Tembaga." Pada masa Residen Ternate, P. van der Crab (1863-1864), naskah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan diterbitkan tahun 1879 dalam *Bijdragen tot de Taal-Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie (BKI*) dengan judul *Geschiedenis van Ternate, in Ternataansche en Maleische Teks, Beschreven Door den Ternataan Naidah, Met Vertaling en Aantekeninghen Door. P. van der Crab*.

diberi nama Buka, Darajat, dan Sahajat. Suatu hari, saat Nur Sifa tengah memandikan Shajat, secara kebetulan ia melihat bayangan sayapnya terpantul dari air yang digunakan untuk memandikan anaknya. Akhimya diketahuilah olehnya di mana sayap itu disimpan oleh suaminya. Segera bersiaplah ia untuk pulang, namun setiap ia hendak terbang, selalu saja si bungsu menangis. Kemudian ditampunglah air susunya untuk kemudian diberikan kepada si sulung Buka, sambil berpesan agar diberikan kepada adiknya kalau menangis dan agar memberi tahu ayahnya kalau ia sudah pulang ke tempat asalnya. Terbanglah ia kemudian meninggalkan suami dan anak-anaknya.

Demi mendengar bahwa istrinya telah pergi, menangislah Jafar Shadik. Tanpa disadari, seekor burung tengah mengamatinya. Burung *Goheba* (garuda berkepala dua) itu bertanya kepadanya perihal kesedihannya.

Burung *Goheba* terharu mendengar cerita Jafar Shadik dan menawarkan diri mengantarkan ke kayangan untuk mencari istrinya. Sesampai di sana ia bertemu dengan ayah Nur Sifa dan menanyakan perihal istrinya. Kepada Jafar Shadik kemudian dihadapkan tujuh bidadari yang ternyata sangat mirip satu sama lain, baik wajah atau perawakannya, untuk ditunjuk yang mana istrinya yang dimaksudnya. Disyaratkan pula kepadanya, kalau ia bisa menunjuk secara tepat, ia bisa membawanya pulang. Tapi kalau tidak, nyawa Jafar Shadik sendiri taruhannya.

Dalam kebimbangan itu, tiba-tiba hinggap di pundak Jafar Shadik seekor lalat hijau (*gufu sang*). Lalat itu menawarkan jasanya sambil meminta imbalan. Kepada lalat hijau itu Jafar Shadik menjanjikan semua yang berbau busuk di muka bumi ini untuknya, dan tawaran itu disepakati oleh sang lalat. Dengan mudah akhimya lalat itu dapat mengenali Nur Sifa hanya dari bau badannya yang berbeda dari bidadari lainnya karena baunya yang khas sebagai seorang wanita yang tengah menyusui. Atas bantuan lalat itulah akhimya Jafar Shadik dapat mengenali istrinya, Nur Sifa.

Jafar Shadik akhirnya diterima sebagai anggota keluarga penuh dan perkawinannya dengan Nur Sifa mendapat restu dari sang Ayah. Selama tinggal di kayangan, mereka mendapatkan putra ke empat, yang kemudian mereka beri nama Mashur Malamo. Setelah Malamo genap berusia setahun, mereka berpamitan untuk kembali ke bumi. Tapi rencana itu selalu tertunda gara-gara Malamo selalu menangis setiap hendak berangkat. Mashur Malamo baru diam setelah oleh kakeknya memberinya *tolu* (mahkota) yang tengah dikenakannya. Segeralah mereka bertiga kembali ke Bumi.

Setiba di Bumi mereka bertemu kembali dengan ketiga anaknya yang ditinggalkan sekian lama. Kemudian kepada ke empat anaknya itu Nur Sifa memberinya tanda-tanda pengukuhan kedudukan mereka dalam hal pembagian kekuasaan. Kepada anak pertama, Buka, diberinya *age* (kayu) sebagai tempat duduknya. Buka kemudian segera berangkat menuju Makian dan menjadi cikal-bakal *kolano* (raja) dan diberi gelar *Dehe Ma Kolano* (penguasa tanjung). Anak kedua, Darajat, mendapat kayu *ginoti*,

dan kelak menjadi cikal-bakal *kolano* (raja) Jailolo dan diberi gelar *Jiko Makolano* (penguasa teluk). Sahajat, anak ketiga, mendapatkan tempat duduk dari batu dan menjadi cikal-bakal *kolano* (raja) Tidore dan diberi gelar *Kie Ma Kolano* (penguasa gunung). Sementara Mashur Malamo, si bungsu, mendapatkan sebuah kursi dan menjadi cikal-bakal *kolano* (raja) Ternate dan diberi gelar *Alam Ma Kolano* (penguasa dunia) dan *Kolano Maluku* (penguasa Maluku).[159]

Silsilah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Silsilah Raja-raja Ternate

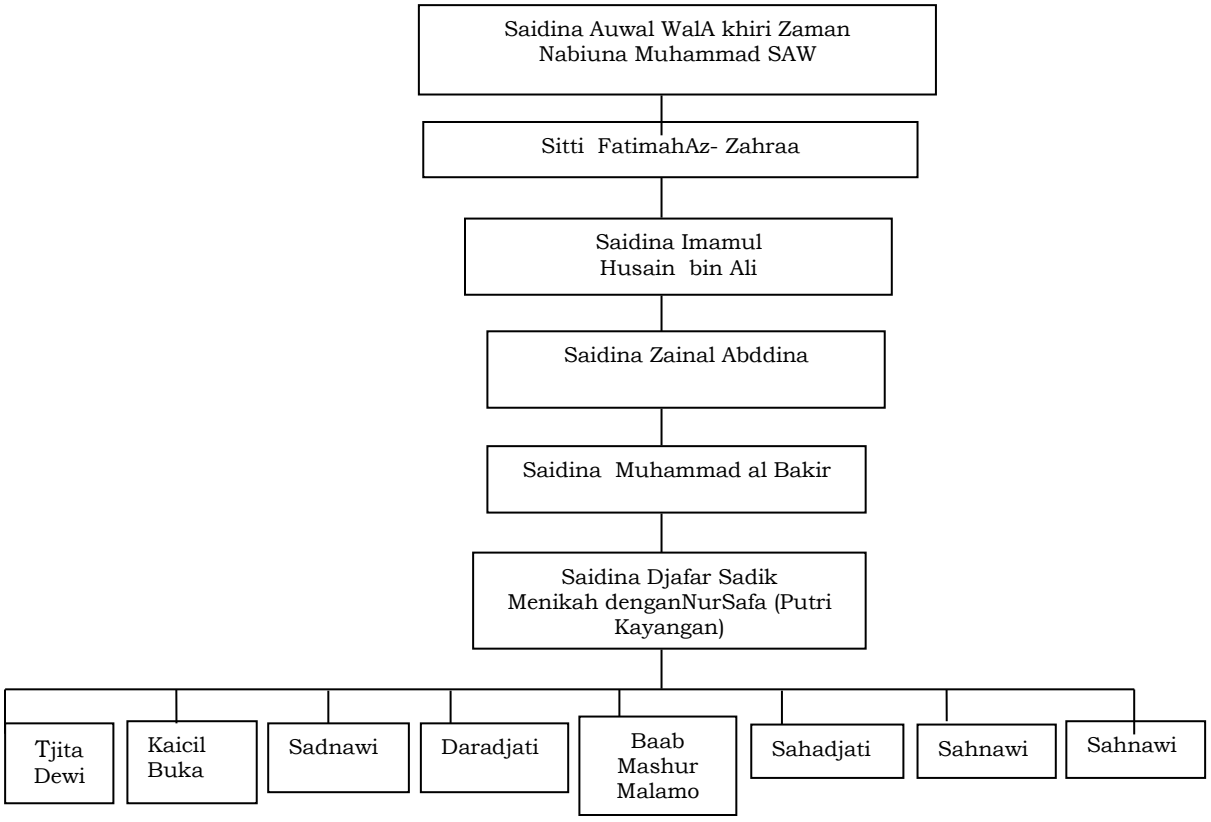

Silsilah ini memperlihatkan bahwa keturunan sultan-sultan Ternate adalah keturunan tokoh-tokoh luar biasa. Kelompok pertama (pihak laki-laki) adalah keturunan nabi dan kelompok kedua (pihak ibu) adalah keturunan raja kayangan atau

[159] Dikutip dalam P van der Crab, *Geschiedenis van Ternate, in Ternataansche en Maleische Teks, Beschreven Door den Ternataan Naidah, Met Vertaling en Aantekeninghen Door*, *BKI*, jilid 26, nomor 2, hlm. 135-137. Lihat juga F.S.A. de Clercq, *Ternate: Karesidenan dan Kesultanan*, terjemahan Noer Fitriyanti dari *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, *1890*. (Ternate: Komunitas Uma Sania, 2007), hlm. 137-200.

dewa. Maka memenuhi syaratlah kalau dinasti ini menjadi penguasa kerajaan. Nadiah seolah hendak menunjukkan kesan politis bahwa Jafar Shadik merupakan leluhur dari raja-raja yang berkuasa di Maluku Utara. Sedangkan Masyhur Malamo yang dilahirkan di kayangan merupakan cikal-bakal raja-raja Ternate berikutnya dan menempati kedudukan yang utama.[160] Selanjutnya, ia ditetapkan sebagai raja Ternate yang pertama pada zaman *kolano* (kerajaan). Sementara saudara-saudaranya menjadi cakal-bakal raja-raja pada kerajaaan lainya (Bacan, Jailolo, dan Tidore) di Maluku Utara sekaligus pemimpin dari suatu konfederasi yang kemudian dikenal sebagai *Moloku Kie Raha* (Empat Kerajaan: Bacan, Jailolo, Tidore, dan Ternate).

Sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Ternate bahwa para sultan Ternate adalah dinasti yang berasal dari keturunan para nabi. Suatu hal yang kemudian membuat kedudukan sultan memperoleh dukungan kuat dari sisi keagamaan. Kedudukan sultan bahkan dapat dikatakan berlandaskan agama. Kepercayaan orang Ternate yang masih dipengaruhi kepercayaan animisme dan dinamisme juga membenarkan bahwa sultan adalah pemegang kuasa yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan.[161]

Islamisasi di Ternate selalu dihubungkan dengan tokoh sentralnya yakni Imam Jafar Shadiq atau Syarif Rafi'ah Tasyriful As Jafar Shadiq yang merupakan cicit Nabi Muhammad SAW dari Madinah datang Nusantara melalui Jawa dan tiba di Ternate, pada hari Senin 6 Muharram 643 H. Walaupun kebenaran sumber ini masih dipertanyakan, namun sampai sekarang terdapat beberapa tradisi-tradisi keagamaan Syiah seperti upacara hari asyura, doa-doa selalu menyebut nama Imam Ali dan keturunannya. Begitu pula dalam cerita lisan masyarakat Ternate sekitar abad kedua Hijriah (abad ke-8 Masehi), telah tiba empat orang Syeh yang bermahzab Syiah yaitu Syeh Mansur, yakub, Ami dan Umar, yang dikaitkan dengan terjadinya pergolakan politik di Irak, ketika golongan Syiah di buru oleh penguasa setempat baik Bani Umayah maupun Abasyiah. Keempat orang ini kemudian menyebarkan Islam di Ternate dan wilayah Maluku Utara. Kiranya cerita ini bukanlah sesuatu yang berlebihan karena banyak bukti yang menunjukan bahwa kepulauan rempah-rempah (Maluku), bukanlah kawasan yang terlampau asing bagi orang-orang Arab.

Mitos *Tujuh Putri* yang diciptakan pada masa pemerintahan Sultan Ternate ke-41 Muhammad Arsyad (1852-1869) merupakan strategi untuk mempertahankan kekuasaannya ketika rempah-rempah (cengkeh) tidak lagi menjadi sumber ekonomi dan politiknya. Ketika itu, pemerintah Hindia Belanda memegang kendali monopoli

[160] Pembentukan kerjaaan Ternate, sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya, menempatkan tokoh Masyhur Malamo dari Marga Tobona sebagai cikal-bakal pembentukan kerajaan Ternate. Ia juga merupakan orang pertama yang bergelar *kolano* (raja). Hal tersebut juga disebutkan dalam mitos *Tujuh Putri*. Ini mengindikasikan bahwa sumber-sumber yang digunakan dalam menelusuri awal pembentukan kerajaan Ternate berasal dari Naidah, sebagaimana sering dijadikan rujukan oleh banyak penulis lokal maupun asing.

[161] Rustam Hasim "Dari Mitos Tujuh Putri Hingga Legitimasi Agama: Sumber Kekuasaan Sultan Ternate" Journal of Humanities Sasdaya Gadjah Mada. Vol. 1, No.2, Mei 2017.

dengan melakukan kebijakan *extirpatie*[162] dan *hongitochten*[163] secara ketat dan sistematis guna mengendalikan harga cengkeh di tingkat internasional. Sistem eksploitasi komoditi dengan cara paksa tersebut mengubah wajah Ternate sebagai pengekspor rempah-rempah menjadi daerah penyerahan wajib rempah-rempah.[164] Pada saat yang sama, para elite juga tidak bisa lagi mejadikan rempah-rempah sebagai sumber ekonominya. Sepinya perdagangan rempah-rempah, membuat sepi pula gaung kekuasaan politik elite Kesultanan Ternate. Implikasi yang ditimbulkannya, elite Ternate tidak lagi menjadikan cengkeh sebagai pusat rujukan identitas diri.

Kesimpulan di atas memang spekulatif. Tetapi kenyataannya, pada periode tersebut, kekuasaan elite Kesultanan Ternate tunduk pada hegomoni ekonomi dan politik pemerintah Hindia Belanda sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat. Akibat lainnya demi mempertahankan kedudukannya elite Kesultanan Ternate menjadikan agama sebagai sumber kekuatan baru. Mitos *Tujuh Putri* kemudian digunakan sultan untuk membenarkan kedudukannya yang besar melalui konsep-konsep magis-religius (yang diperoleh dari dunia atas) dan menjadikan sarana agar dapat diterima. Menciptakan silsilah yang menghubungkan diri sultan sebagai nabi dipakai untuk mengokohkan kembali kedudukannya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Menurut Ibrahim Alfian, mitos yang ditulis para pujanga istana demi kepentingan dinasti yang berkuasa saat itu berfungsi memperkokoh legitimasi serta memperbesar kesaktian raja yang pada gilirannya dipandang akan dapat menambah kemakmuran dan kesejahtraan rakyat.[165] Hingga kini, cerita *Tujuh Putri*[166] tetap memainkan peranan menentukan dalam

---

[162] *Extirpatie* merupakan perwujudan dari sistem monopoli rempah-rempah Hindia Belanda di Maluku Utara. Sejak awal abad 17 telah tercapai kesepakatan antara para sultan Ternate degan pihak COV yang menjadi dasar bagi VOC untuk menebang semua pohon pala dan cengkeh di wilayah kerajaan Ternate, sehingga produksi perdagangan rempah-rempah dihalangi. Lebih jelasnya *Memorie van Overgave* J.H. Tobias (1857). Jakarta: ANRI, 1980, hlm. 11-12.

[163] *Hongitochten* adalah satuan ekspedisi atau patrol bersenjata yang beroperasi secara rutin mengawasi kawasan perkebunan rempah-rempah yang tersebar di Kepulauan Maluku.Satuan ini tidak sagan-sagan mempergunakan kekuatan kekerasan bersenjata untuk menghukum siapa saja yang sengaja melanggar ketentuan atau melakukan penebangan secara sistemtis untuk bisa mengendalikan tingkat laju produksinya sampai seperempat dari jumlah yang biasanya. Lebih jelasnya lihat *Memorie van Overgave C. Bosscher* Residen Ternate (1859). Jakarta: ANRI, 1980, hlm. 10-12.

[164]Djoko Suryo, *et al*. *Agama dan Perubahan Sosial Studi: Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*. (Yogyakata: UGM LKPSM. 2001), hlm. 211.

[165] Ibrahim Alfian, *et.al*. *Dari Babad Hikayat sampai Sejarah Kritis*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 35.

[166] Mitos *Tujuh Putri* ternyata bukan hanya milik Kesultanan Ternate. Versi yang sama juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia, seperti Babad Tanah Jawi, Hikayat Aceh, sehingga membentuk cerita rakyat secara umum masyarakat di Indonesia. Hal yang sama juga ditemui di berbagai cerita rakyat, seperti Panji. Cerita Panji tidak hanya hidup di kalangan orang Melayu, Jawa, sampai Thai yang merasa terikat secara biologis, antopologis, dan politis tertentu, melainkan juga menyebar secara merata melewati batas-batas ikatan tersebut. Secara langsung, cerita *Tujuh Putri* membangun sebuah budaya kawasan yang oleh Bambang Purwanto disebut manifestasi dari sebuah "peradaban" bersama. Sejalan dengan itu, menurut Adrian Veckers, khasanah cerita Panji menunjukkan bagaimana perubahan budaya, sosial, politik, dan ekonomi dikonseptualkan. Lihat

membenarkan dan memperokoh kekuasaan sultan Ternate dalam hubungan dengan rakyatnya.

Para sultan Ternate memang selalu terlibat dalam usaha-usaha untuk mengukuhkan diri dengan menggunakan simbol-simbol dalam mitos *Tujuh Putri*. Salah satunya adalah menggunakan gelar *Alam ma Kolano* (penguasa dunia). Dengan menyandang gelar *Alam ma Kolano* dan *Kolano Maluku* (penguasa Maluku), sultan Ternate dianggap terkuat dan terpandang di antara raja-raja Maluku di Utara. Penggunaan gelar tersebut dapat ditemukan dalam berbagai dokumen bangsa-bangsa Eropa. Salah satunya, C. Bossher, yang menulis bahwa Belanda menyebut sultan Ternate sebagai 'penguasa Maluku'. Bahkan sultan Ternate sendiri melalui dokumen Belanda dari abad 18 menyebut diri sebagai 'penguasa Maluku' dan 'sultan Maluku'. C. Bossher menulis:

> Raja Ternate biasanya disebut sebagai *Alam ma Kolano* (penguasa dunia), dan *Kolano Maluku* (penguasa Maluku) yang membawa pada kekuatan dan kekayaannya. Raja *Tidoor* (Tidore) biasa disebut *Kie ma Kolano* (raja gunung). Bacan secara khusus dikenal dengan nama *Kolano Madehe* atau sama dengan raja pintu keluar atau ujung. Jailolo secara khusus disebut sebagai *Jiko ma Kolano* atau raja pelabuhan karena istana berada di Pelabuhan Jailolo.[167]

Dengan menyandang gelar *Alam ma Kolano,* para Sultan Ternate memandang kekuasaan sebagai suatu ketunggalan, utuh, dan bulat. Maksudnya, kekuasaan itu tidak boleh bersaing, terkotak-kotak atau terbagi-bagi. Oleh sebab itu, para penguasa dalam dinasti Ternate merasa bahwa dengan menyandang gelar *Alam ma Kolano* (penguasa dunia), maka tiap raja yang memerintah berkewajiban mengemban misi memperkuat dinasti. Mereka percaya bahwa apabila kekuasaanya berhasil, maka sekaligus akan dapat memperkuat kedudukannya dalam kerajaan.

Selain itu, buku adat raja-raja[168] Ternate (buku tembaga) juga menyebutkan bahwa Sultan Ternate bergelar *Alam ma Kolano* mempunyai kesaktian dan memiliki berkat yang mendatangkan keselamatan maupun kebahagian. Kemampuan ini dipercaya sebagai anugerah dari Tuhan, sehingga pada konsep inilah kekuasaan para sultan-sultan di Ternate tidak dapat dipisahkan atau selalu dihubungkan dengan konsep spiritual yang berhubungan dengan kepercayaan adanya kesejajaran antara jagad raya dan dunia manusia. Hal ini sejalan dengan konsep kekuasaan Jawa yang menempatkan raja sebagai penguasa tunggal di bidang kekuasaan fisik maupun spiritual (raja sebagai sentral yang memancar ke alam makrokosmos dan

---

Bambang Purwanto, *Sejarah dan Jati Diri dalam Ingatan Bersama Asia Tengara* dalam Andrian Vickers, *Peradaban Pesisir Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara.* (Bali: Udayana University Press, 2009), hlm. xiv.

[167] Laporan serah terima jabatan pemerintah Keresidenan Ternate dari Residen C. Bossher kepada Residen baru C.I. Boss tahun 1859. (Jakarta: ANRI), hlm. 53.

[168] Untuk menghindari kejenuhan dalam pengunaan kata sultan berulang-ulang, maka digantikan kata raja yang keduanya memiliki makna yang sama, yaitu pemimpin di Kesultanan Ternate.

mikrokosmos).[169] Itulah mengapa kemudian para sultan-sultan di Ternate ditempatkan sebagai khalifatullah atau wakil Tuhan di dunia. Pada tataran inilah, menurut Djoko Suryo, agama menjadi sumber legitimasi sekaligus sumber-daya politik atau sarana kekuasaan.[170]

B. Filsafat *Jou se Ngofangare* (Pemimpin dengan Rakyat)

> "*Dara to Lefo Mapila Soro Gudu to Nunako. Gudu Moju si to Suba, ri Jou Si to Nunako"*(Burung merpati kuberi tanda pada sayapnya terbang jauh kukenali. Dari jauh ku menyembahNya karena aku sudah mengenalNya) (Sastra Lisan Ternate).

Kekuasaan dan legitimasi Kesultanan Ternate tidak hanya di topang oleh mitos tujuh putri sebagaimana dikemukakan diatas, tetapi juga meletakan basis kekuasaanya pada hegomoni kebudayaan dan teologi keagamaan. Hal ini terjadi karena istana menjadi sumber tunggal produksi wacana pengetahuan, sistem kepercayaan, stratifikasi sosial, simbol status, dan gaya hidup.[171] Diantara sekian banyak produksi wacana[172] tersebut, ada satu nilai budaya yang mempunyai bobot politik yang cukup penting yaitu yaitu filosofis *Jou se Ngofa Ngare* (Tuhan dengan hamba) yang dijadikan sebagai falsafah dan ideologi Kesultanan Ternate.

Sebenarnya filosofis *Jou se Ngofa Ngare* merupakan nilai dasar religus yang hidup dimasyarakat Ternate jauh sebelum kedatangan agama Islam. Filosofis hidup religi ini di pakai masyarakat Ternate pada usaha menelusuri asal usul kejadian tentang manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta. Dalam perkembangganya, ketika Islam di terima sebagai agama resmi kerajaan Ternate pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abiding (1486-1500) falsafah *Jou se Ngofa Ngare* mengalami proses materialisasi sehingga dijadikan sebagai lambang kesultanan Ternate yang berbentuk burung garuda berkepala dua, berbadan satu dan berhati satu yang disebut *goheba dopolo romdidi* (burung garuda berkepala dua).[173]

---

[169] Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Binna Negara di Jawa Masa Lampau:Studi Tentang Mataram II Abad ke XVI Sampai XIX*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 32-33.

[170] Djoko Suryo, *et al*., *op. cit.*, hlm. 102-107.

[171] Mengenai sistem kepercayaan, stratifikasi sosial, simbol status, dan gaya hidup di Kesultanan Ternate lihat B. Soelarto, *Sekitar Tradisi Ternate.*(Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan RI, 1982).Dan lihat Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. (Jakarta: Pustaka Utama, 2000).

[172] Sampai sekarang masih dijumpai sastra lisan Ternate yang diproduksi oleh pihak Kesultanan Ternate, seperti *dola Balolo, dalil moro, dalil tifa, pantun, cum-cum, mantra, tamsil, roraso, moro-moro se saluma, legu dan salai jin.* Apabila di telaah secara mendalam bentuk dan isi syair dari sastra lisan tersebut, maka sastra tersebut mengungkap peristiwa periode sebelum Islam dan sesudah Islam.

[173]Menurut berbagai sumber makna hakekat dari burung *Goheba* berkepala dua, berbadan satu dan berhati satu dalam ajaran Islam merupakan "dua kalimat sahadat" yang melambangkan pengetahuan akali dan indrawi.Sementara dalam sisi politik bahwa sultan dan rakyatnya harus menyatu.

Namun pemikiran tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan Tuhan dengan hamba.[174]Pemikiran ini diejawantahkan dalam konsep ketatanegaraan Kesultanan Ternate dimana kata *Jou* diartikan sultan dan *Ngofa Ngare* sebagai rakyat. Atau sebagai sebuah sistem hubungan masyarakat dengan penguasa dan relasi antara Sultan dan para pembantunnya dalam sistem pemerintahan di Kesultanan Ternate.Sejalan dengan itu menurut Mudaffar Syah secara implisit kalimat *Jou se Ngofa Ngare,* mengandung dua makna yakni unsur pemerintahan dan agama. Dalam pemerintahan kata *Jou* berarti Engkau, mengandung arti pemimpin negara/pemerintahan, dan kata *Ngofa Ngare* yang mengandung arti rakyat. Ini berarti dalam sebuah negara harus ada pemerintah dan rakyat (apa yang ada pada engkau, ada pada aku dan sebaliknya apa yang ada padaku, ada juga pada engkau). Sementara dalam pengertian agama kata *Jou* mengandung makna Tuhan, sedangkan kata *Ngofa Ngare* berarti hamba.[175]

Persoalan mengenai kapan falsafah ini di konfersikan dalam struktur politik Kerajaan Ternate adalah sesuatu yang masih di perdebatkan. Kuat dugaan kehadiran falsafah *Jou se Ngofa Ngare* bersamaan dengan hadirnya mitos " Tujuh Putri" yang di tulis oleh Naidah (1856-1866) seorang punjanga istana pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Arsyad (1852-1869).

Dalam masyarakat istilah *Jou* (sultan) *Se Ngofa Ngare* (rakyat) atau persatuan rakyat dan raja, terpakai tidak hanya dalam politik dan agama, tetapi disimbolkan dalam praktek keseharian pada saat upacara adat, dimana nasi kuning di samakan dengan rakyat dan telur disamakan sultan. Di samping itu falsafah *Jou se Ngofa Ngare* dilambangkan burung garuda berkepala dua. (*Goheba Madopolo Romdidi)* dimana keputusan raja adalah keputusan rakyat yang persatuan rakyat dan raja. Bagi masyarakat Ternate, sultan memeliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki kebanyakan orang.[176]Di antaranya keunggulan memimpin (*superiority inleadership*), keungulan ilmu, keungulan fisik dan mental, sehingga nampak di mata rakyat sang pemimpin mempunyai kekuatan luar biasa (kesaktian).

Dengan demikian, falsafah *Jou se Ngofa Ngare* tidak hanya terbatas pada hubungan dimensi agama. Melaingkan dimanifestasikan dalam konsep ketatanegaraan dimana sultan di samakan dengan Pemimpin (*jou*).Hal ini sebagaimana digambarkan dalam sastra lisan Ternate (*dola bololo*) yaitu "*gudu moju si to nunako, ri jou si to suba*" (aku sudah mengenalNya, karenanya aku menyembahNya). Akibatnya, kecenderungan mistifikasi Islam semakin meningkat,

[174]Anas Dinsie & Rinto Taib *Ternate Sejarah,Kebudayaan & Pembangunan Pedamaian Maluku Utara.* (Ternate: LeKRa-MKR), hlm. 32.

[175]Wawancara dengan Sultan Ternate Mudaffar Syah pada April 2013.

[176]Masyarakat Ternate memandang sultan memeliki kelebihan yang tidak Tuhan kepada yang lain. Oleh karena itu, menjadi kewajiban rakyat untuk mematuhinya.Dalam konsep itulah para sultan-sultan di Ternate di tempatkan sebagai khalifatullah atau wakil Tuhan di dunia.Dengan kedudukannya sebagai wakil Tuhan dan memerintah berdasarkan hukum keadilan, oleh sebab itu rakyat wajib mengikutinya. Orang yang tidak mengikuti raja atau menolak perintahnya berarti ia menentang kehendak Tuhan. Menurut beberapa narasumber begitu besarnya kelebihan dan kharisma sang sultan, bekas air cuci tangan diperebutkan oleh masyarakat untuk diminum pada saat upacara-upacara adat. Hasil wawancara Mei 2013

bahkan mencapai wajahnya yang cukup ekstrim, seperti terungkap dari keyakinan Sultan Mudafar Syah bahwa Islam di Ternate mendahului keberadaan Islam di Mekah.[177] Sebuah pernyataan dipakai sebagai contoh bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh bangsawan Kesultanan Ternate bukan hanya berasal dari apa yang mereka percayai, tetapi berasal dari kemampuan untuk menjadikan apa yang dipercayai sebagai acuan kepercayaan dalam masyarakat. Pada tataran inilah falsafah *Jou se Ngofa Ngare* menjadi sumber legitimasi.

C. Gelar, Bahasa, dan Gaya Hidup

Dalam struktur politik kesultanan Ternate, sultan adalah titik pusat kekuasaan. Sebagai puncak hierarki, sultan memegang kekuasaan yang besar. Hal itu tercermin dari kepemilikannya terhadap benda-benda pusaka, gelar, ataupun silsilah geonologis. Salah satu benda pusaka yang dipercaya memiliki nilai magis adalah *stampa* (mahakota)[178] Kesultanan Ternate yang dipercayai berasal dari kayangan. Mahakota ini diyakini berasal dari 'dunia atas' dan menjadi mujizat bagi sultan dalam kepemimpinannya dari masa ke masa. Hal ini diceritakan dalam mitos *Tujuh Putri* berikut:

> Setelah Mansur Malamo genap berusia setahun, mereka berpamit untuk kembali ke bumi. Tapi rencana itu selalu tertunda gara-gara Malamo selalu menangis setiap hendak berangkat. Penguasa Nirwana berkata ia akan aman dengan tutup kepala saya. Mansur Malamo baru diam setelah kakeknya memberinya *stampa* (mahkota) yang tengah dikenakannya.[179]

[177]Djoko Suryo, *et al*., *op. cit.*, hlm. 121.

[178] Menurut beberapa sumber mahakota (*stampa*) berambut panjang terurai kebelakang, dililit dengan perak dan berbentuk topi. Mahkota ini dihiasi batu-batuan permata kurang lebih seratus buah, yang terdiri dari perunggu, perak, mutiara, emas, berlian, akik, shafier, dan jamrud, yang dilekatkan di samping kiri kanan dan bagian depan. Mahkota diletakkan pada sepotong kayu yang dibuat khusus, yang disebut kalbu. Setiap tahun dalam tradisi kesultanan Ternate, bila datang Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Haji), maka dilakukan pemotongan rambut mahakota. Mahakota dipakai oleh sultan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penobatan sultan yang baru. Upacara pelantikan sultan biasanya disebut upacara *kabasarang kolano*, di mana sultan didudukkan di kursi kerajaan. Selanjutnya, *Kimalaha Marsaoli* sebagai Ketua Dewan Delapan Belas atau legislatif (*Bobato Nyagimoi Se Tufkange*) mengangkat mahkota dari kalbunya dan melatakkan di kepala sultan diiringi doa semoga mendapat ridha Allah SWT. Satu hal manarik yang diyakini masyarakat Ternate adalah bila akan datang musibah, penyakit, peperangan, dan keonaran yang menimpa Pulau Ternate, maka posisi mahkota akan kembali ke keadaan aslinya dan rambut mahkota berdiri seperti seekor ayam jantan sedang berkelahi. Lebih jelasnya lihat Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir*, (Ternate: Depdikbud, 1982).

.

[179] P van der Crab, *op. cit*., hlm. 12.

Gambar 3
Mahkota Kesultanan Ternate

Sumber: http://www Kesultanan-Ternate

Gambar 4
Lambang Kesultanan Ternate

Sumber : Tabloid Parada, 2001.

Selain mahakota, benda pusaka lain yang dianggap sebagai benda-benda keramat dan sakti adalah kursi kerajaan, payung kerajaan, tongkat kerajaan dari rotan kembar berkepala gading, bedil emas, pedang beraneka bentuk, lampu kristal besar bercabang enam melengkung dengan tiga mata lampu, baju tembaga, perisai, meriam kecil dan sedang, serta lambang kerajaan *Goheba ma Dopolo Romdidi* (burung garuda berkepala dua).[180] Benda-benda tersebut sampai sekarang dipercayai masyarakat sebagai sumber kemakmuran.

Dalam kehidupan sebagai penguasa, sultan berhak mengambil tindakan dengan cara apa dan bagaimana saja terhadap segala isi di dalam kerajaannya,

[180] Penggunaan burung *Goheba* (elang) sebagai lambang Kesultanan Ternate, sebagai bentuk balas jasa telah mengantarkan Jafar Shadik terbang ke kayangan untuk mencari istrinya, Siti Nur Safa (sebagaimana diceritakan dalam mitos di atas). Benda-benda historis tersebut hingga kini dianggap memberi kekuatan dan kebahagian kepada orang yang memilikinya. Lebih jelasnya lihat Jusuf Abdulrahman, *Kapita Selekta: Sejarah, Bahasa, dan Budaya Moloku Kie Raha.* Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 72.

termasuk manusia. Kekuasaan besar itu membuat rakyat menjadi begitu takut pada *kolano* (sultan). Sultan juga memiliki hak-hak istimewa dalam politik berupa *Jaib Kolano* dan *Iddin Kolano* (hak veto). Dengan hak prerogatif yang dimilikinya secara politik, membuat sultan memiliki kekuasaan begitu besar tanpa ada batasanya. Di mata rakyat, kekuasaan itu begitu besar, sehingga mengakui sultan sebagai pemilik segala sesuatu, baik harta benda maupun manusia. Karena itu, terhadap keinginan sultan, rakyat hanya mengatakan *Jou kasa ngom kage* (di mana ada sultan di situlah kami).[181] Dalam keadaan demikian, orang hanya dapat tunduk-merunduk di hadapan sultan. Kalau berbicara mesti menyembah dulu dan mengatakan kata sembahan *Jou Suba* (minta permisi), setelah itu baru mengatakan apa hajatnya. Berkali-kali ia berbicara berarti berkali-kali ia harus menyembah dan mengatakan kata sembahan *Jou Suba*.[182]

Bagi Kesultanan Ternate, kekuasaan tidak hanya dibuktikan dengan luasnya wilayah atau banyaknya pengikut. Raja juga hendak dianggap sebagai puncak keindahan, kemahalan, dan kemewahan. Kekuasaan yang besar itu tampak pula pada banyaknya punggawa yang menghadiri upacara pelantikan sultan (*jou khalifah jau kolano*), yang dapat menjadi ukuran besarnya kekuasaan sultan sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Sejak abad 19, sebagaimana dilaporkan residen Tobias, bahwa upacara pelantikan sultan baru selalu diselenggarakan secara meriah yang dihadari sultan, permaisuri, dan seluruh keluarga, para gubernur atau residen, perdana menteri, para menteri serta dewan perwakilan yang mewakili 18 *soa* (marga). Selain pelaksanaan acara-acara kebesaran menurut adat, disertai pula dengan penyumpahan menurut tradisi Islam.

> Putra raja memakai baju yang terbaik dan memakai mahkota di kepalanya. Ia mengambil tempat bersama pengawalnya di lapangan yang terletak di depan istana. Di sana telah siap-siap pembesar-pembesar melakukan sembah (penghormatan). Kemudian mereka menunduk dan mencium kaki pangeran berulang kali sebagai tanda kesetian mereka. Dari sini mereka mengantar calon sultan itu ke mesjid dengan semeriah mungkin disertai elukan-elukan dengan berbagai macam cara. Kemudian mereka mengantar sultan itu kembali ke rumahnya dengan upacara yang sama.[183]

Setelah sultan dilantik, rakyat dan tentara gerilya istana bersorak-sorak menyebut nama sultan baru, disertai tembakan-tembakan meriam di darat dan laut. Lalu dilanjutkan dengan upacara *Joko Kaha* (menginjak tanah) disertai dengan korban binatang. Pada hari berikutnya dilakukan upacara mengelilingi gunung dan mendaki gunung *Gamalama* (*kololi kiye* dan *fere kiye matubu*). Dalam melaksanakan upacara mengelilingi dan mendaki gunung, sultan menaiki kereta kerajaan atau

[181] Tabloid. *Parada*, Ternate, edisi 05, "Lingkungan Hukum Ternate", tanggal 20-05 Juni 2000.
[182] Wawancara pada September 2013.
[183] J.H. Tobias, "Memorie van Overgave 1857". (Jakarta: ANRI, 1980), hlm. 91.

ditandu dan diiringi oleh kepala adat dan agama, perdana menteri dan para dewan menteri (*bobato nyagimoi se tufkange*) dan para kepala *soa* (marga).[184]

Upacara megah bukan hanya ditunjukkan saat pelantikan seorang sultan, tetapi juga saat sultan wafat. Pemakan para sultanpun dilaksanakan secara besar-besaran disertai aneka macam upacara kebesaran. Akan tetapi, dalam perkembangannya di masa Sultan Muhammad Zain (1823-1859). Upacara pemakaman dengan cara berlebihan dianggap bertetangan dengan ajaran Islam sehingga di hapus.[185]

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Kesultanan Ternate adalah dinasti yang berasal dari keturunan para nabi dari kayangan. Sebab itulah dia bergelar sebagai *Alam ma Kolano* (penguasa alam). Walaupun sultan menjadi pemimpin pusat kerajaan, namun gelar tertinggi bukannya sultan, tetapi *kolano*, karena hanya *kolano* yang dapat mengeluarkan *iddin* (hak veto) yang dipatuhi masyarakat. Dengan demikian, pada diri seorang sultan terdapat dua gelar kebangsawanan, yakni *kolano* dan sultan. Posisi *kolano* hingga saat ini tetap dipergunakan sebagai instrumen pengendalian dan pengelolaan politik dalam negeri. Sementara posisi sultan lebih banyak diarahkan pada kepentingan-kepentingan hubungan internasional.[186]

Sejalan dengan itu, untuk memperkokoh kedudukan sultan sebagai kelas penguasa, para sultan selalu menggunakan gelar Arab. Contohnya, Sultan Anhar (Sultan Ternate kep41) mengunakan gelar Asultan Tadjul Mahful Binajatilahi Lhanan Sirajul Mulki Amirudin Iskandar Munawarusadik Wahoewaminaladdin Syah Putra Ajanhar Raja Ternate serta penambahan gelar "Syah" (gelar para raja-raja Persia) di belakang nama seorang sultan. Suatu gelar yang digunakan para sultan Ternate sejak abad 19 hingga sekarang.[187]

Tujuan penggunaan gelar-gelar tersebut adalah untuk merebut pengaruh massa (efek sosial), yang menurut Sartono Kartodirdjo, digunakan untuk membangun kekuasaan dinasti agar tetap lestari.[188] Oleh karena itu, setiap sultan Ternate yang memerintah merasa berkewajiban mengemban misi untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan dinastinya. Apabila ia berhasil melakukannya, maka ia sekaligus memperkuat kedudukannya sendiri di dalam dinasti tersebut.

Kehadiran bangsa Belanda di Ternate pada abad 16 memungkinkan terjadinya kontak budaya yang kemudian menghasilkan perpaduan budaya. Selama Belanda berkuasa di Ternate, para penguasa Ternate meniru gaya hidup mewah

---

[184] "Memori van Overgave Karesidenan Maluku", Residen B.J. Haga Mvo seri II E. koleksi Arsip Nasional, 1867. (Jakarta: ANRI, 1989),hlm.8-10.

[185] Lihat F.S.A. de Clercq, *op. cit.*, hlm. 100.

[186] Djoko Suryo, *et al*. *op. cit.*, hlm.121.

[187] Mengenai pengaruh Islam terhadap struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, lihat Shaleh A. Putuhena, *Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam.* Jakarta: Leknas LIPI, 1987.dan Djoko Suryo, *et al*. *Agama dan Perubahan Sosial Studi: Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial Politik Indonesia*. Yogyakata: UGM LKPSM. 2001. Dan Darsiti Soeratman, (*Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2002).

[188] Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif.* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 230.

orang Belanda. Kedudukan sebagai kelompok penguasa berupaya menjaga pristise dan kedudukannya melalui berbagai cara. Kewibawaan, kekayaan, dan kebesaraannya, ditampilkan agar tampak lebih mewah dan agung. Tanda-tanda kebesaraan sebagai lambang status seperti, payung kerajaan, sejumlah pengiring, kehidupan mewah, semuanya bertujuan untuk mengokohkan kekuasaanya.[189]

Pengaruh kehadiran Belanda di Ternate mempengaruhi gaya hidup penguasa tradisional. Djoko Soekiman menyebut gaya hidup bangsawan tersebut dengan istilah gaya Indis. Suatu perpaduan kebudayaan yang diciptakan serta tumbuh dan berkembang dalam kelompok masyarakat di Nusantara yang menjadi wilayah koloni Belanda.[190] Selain menampilkan kewibawaan, kekayaan, dan kebesarannya, sultan Ternate juga pengembangkan bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan (*language franca*) di wilayah Maluku Utara[191] yang tujuan sebagai alat komunikasi dan pembangunan politik.

Kebudayaan Indis adalah kebudayaan campuran atara Jawa dengan Eropa (khususnya Belanda).Pada saat Kebudayaan Indis masih berjaya di Indonesia dulu, masyarakat Indonesia masih sering menggunakan bahasa campuran antara Bahasa Belanda dan Bahasa Jawa.Tidak hanya bahasa yang ditinggalkan oleh Kebudayaan Indis, tapi juga ada bangunan dan seni kerajinan yang juga ditinggalkan.Dalam konteks Ternate pengaruh kehadiran Belanda di Ternate mempengaruhi gaya hidup penguasa tradisional masih terlihat seperti; kesenian istana, kuliner, bangunan, dan seni kerajinan. Dengan demikian pengunaan kata Indis dalam tulisan ini lebih pada peningalan dari aspek-aspek tersebut bukan penyamaan bahwa kebudayaan Indis yang ada d Jawa sama seperti di Ternate.

Dalam kaitannya dengan pengembangan kekuasaan, yang menjadikan bahasa Ternate sebagai pengatur jarak sosial, Kesultanan Ternate ingin menujukan bahwa dirinya bukan keluarga sembarangan, malainkan *clan* terpilih yang mengungguli *clan-clan* lain (seperti telah dijelaskan di atas). Untuk menunjukkan keunggulan, kejayaan, dan kebesaran, maka perlu menciptakan jarak sosial. Alat untuk menciptakan jarak sosial itu adalah pengembangan bahasa *Kadaton.*[192]

---

[189] Mengenai kehidupan para raja dalam istananya lihat Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Mataram II Abad ke XVI Sampai XIX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985) dan Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2002), hlm. 160.

[190] Mengenai gaya hidup, lihat Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat di Jawa Abad XVIII–Medio Abad XX*. (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2000), hlm. 82.

[191] Penggunaan bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan, lihat E.K. M. Masinambaw, *Halmahera dan Raja Ampat Konsep dan Strategi Penelitian.* (Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1980), hlm 127-129.

[192] Bahasa *kadaton* Ternate disebut bahasa *Kie Se Gam* yang di dalamnya juga berisi doa-doa kepercayaan lama yang sampai sekarang masih diucapkan oleh sebagian warga masyarakat Ternate. Misalnya *doa kiye* (doa gunung) yang merupakan doa magis kepercayaan lama. Pemujaan gunung, merupakan doa tradisional yang sampai masih kini diparktekkan sebagian warga masyarakat. Lebih jelasnya lihat "Sekilas Mengenai Bahasa Ternate", dalam *Tabloid Parada* Edisi 18, tanggal 23-05 Januari 2001.

Berkaitan dengan hal itu, Charles Andrain mengatakan bahwa ada dua sumber kewenangan yang diperoleh raja-raja dahulu. *Pertama,* wewenang atau kewenangan yang dapat diperoleh dari sumber-sumber primodial, khususnya dari keturunan. Hanya orang-orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan atau keturunan raja yang mempunyai hak untuk berkuasa. *Kedua,* kewenangan dapat diperoleh dari sumber-sumber yang diangggap suci, yakni dari Tuhan. Sumber kewenangan ini menunjukan bahwa hak untuk memerintah dinilai bersifat sakral.[193]

Untuk itu, dalam upaya memperkuat kedudukan dan mempertinggi kemuliaannya, para sultan juga menciptakan atau mengembangkan kebudayaan istana yang bercorak halus. Menurut B. Soelarto, kebudayaan istana yang bercorak halus itu tampak dalam berbagai unsur, seperti (1) cara berpakaian dengan macam pakaian yang serba indah beserta segala warna yang menyimbolkan strata mereka dalam keraton, (2) cara mengambil sikap, semua orang yang lebih rendah harus menyembah, (3) cara berbicara yang statusnya lebih rendah, lebih muda usia atau lebih muda dilihat dari hubungan kekeluargaan.[194]

D. *Kadaton* (Istana Kesultanan)

> Gedung ini adalah tempat orang-orang tertinggi dan termulia, yaitu tempat bersemayamnya sultan-sultan yang digelarkan di atas pundaknya beliau-beliau itu “sirajul gulub” cahaya hati. Sultan-sultan Islam yang digelarkan menurut adat Iskandar Zulkarnain keturunan sultan-sultan yang adil bahkan saleh. Yaitu Sultan Muhammad Ali ibnu Sultan Sirajurrahman beserta menteri-menteri dan semua orang besar bermusyawarah mencari satu tempat yang layak untuk mendirikan *kadaton* sebagai tanda kenang-kenangan bagi keturunan beliau yang menjadi sultan pada akhir zaman. Dengan kodrat Allah Azza wa Jallah terkabullah cita-cita beliau maka *kadaton* Sultan Ternate dibangun di atas sebuah bukit. Dengan takdir Allah, terpancarlah sebuah mata air di bawah kaki bukit tersebut dan sampai sekarang terkenal dengan nama "air sentosa" air inilah tempat beliau mandi dan mengambil air wudhu. Sedang beliau duduk lalu berwasiat kepada segenap menteri dan rakyat bahwa barang siapa yang mendiami *kadaton* ini, sebagai amanat Allah SWT bahwa yang menjadi sultan harus mentaati: "amar ma'ruf nahi munkar, salat, puasa, kasihi fakir miskin, dan semua rakyat" bahwa yang menjadi sultan dan mendiami kadaton ini dengan tidak menepati wasiat tersebut, maka tidak akan selamat dunia dan akhirat lam yalid sala'matan fiddunya wal-akhirat”. Semoga yang mendiaminya agar dapat mentaati wasiat dimaksud"wadumtum shalimien fi hifdhil wasiah minassulta'nil - amien.-
> Permulaan tiga puluh hari zulkaidah hijratun nabi dua ratus dua puluh tatkala ini rumah dari pada bulan hari ahad seribu dua ratus delapan tahun.[195]

---

[193] Charles Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 15.

[194] B. Soelarto, *Sekitar Tradisi Ternate*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan RI, 1982), hlm. 23-24.

[195] Tabloid *Parada*. Ternate, edisi 8, 3-16 Juni 2000, hlm. 7.

Kutipan di atas merupakan isi prasasti istana Ternate yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali (1801-1807). Isi prasasti di atas menggambarkan bahwa dalam membangun basis kekuasaanya, para sultan Ternate membuat istana memiliki doktrin pusat anutan magis-religius. Hal itu dapat dilihat dari kalimat yang menyebutkan bahwa yang berhak mendiami *kadaton* adalah orang-orang tertinggi dan termulia "sirajul gulub" untuk menjaga dan menyebarkan agama Islam.

Doktrin kekuasan tersebut dijadikan pembenaran bahwa sumber kewenangan yang diperoleh para Sultan Ternate dalam memerintah berasal dari sumber yang diangggap suci, yakni Tuhan. Kepercayaa dan agama menguasai masyarakat Ternate dan kedudukan sultan dalam masyarakat memperoleh dukungan yang kuat dari keyakinan agama. Alasan inilah yang membentuk pemikiran bahwa hanya orang-orang anggota keturunan sultanlah yang mempunyai hak untuk tetap berkuasa. Legitimasi magis-religius tersebut menyebabkan *kadaton* bukan semata-mata tempat tinggal raja dan kerabatnya, melainkan juga dipandang sebagai negara itu sendiri. Menurut AA GN Ari Dwipayana, istana dalam sejarah perkembangannya, menjadi institusi kekuasaan yang secara politik mempunyai bobot yang sama dengan institusi kebangsawanan itu sendiri.[196]

Sebagai pusat anutan, sultan dan keluargannya merupakan komunitas yang mempunyai ruang hidup sendiri. Ruang hidup para sultan dalam Kesultanan Ternate adalah *kadaton*,[197] yang sejak kelahirannya ditata menurut adat-istiadat, agama, dan kepercayaan tertentu. *Kadaton* memiliki seluas 44.560 M2. Kompleks *kadaton* meliputi *Sigi Lamo* (masjid sultan), *Ngara Opas* (pintu gerbang istana), *Ngara Lamo*[198] (gedung pertemuan dewan kerajaan), *Ake Santosa* (tempat mandi dan wudhu), alun-alun *Kadaton*, *Dodoku Mari* (pelabuhan sultan[199] dan makam raja-raja

---

[196] Untuk lebih jelasnya dalam melihat kemampuan bangsawan dalam mengelola kekuasaan politiknya, baca AA GN Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota.* (Yogyakarta, IRE Press, 2004), hlm. 32.

[197] *Kadaton* merupakan istilah yang mempunyai beberapa arti. *Pertama*, berarti negara atau kerajaan.*Kedua*, merupakan tempat tinggal raja bersama keluarga dan abdi dalemnya. *Kadaton* juga digunakan untuk menerima tamu resmi serta untuk tempat kegiatan atau upacara resmi. Dalam *kadaton* terdapat banyak ruang untuk tempat berkerja sebagian abdi dalem dan juga untuk menyimpan barang-barang milik raja. Menurut Darsiti Soeratman, istana merupakan bangunan yang unik, disebabkan ukurannya yang paling luas dan struktur bangunan yang khusus, dan dimonopoli oleh raja. Dalam penjelasan ini, agar tidak mengalami kejenujan, penulis menggantikan *kadaton* dengan kata istana, yang secara secara substansial memeliki makna yang sama, yaitu tempat tinggalnya para reja dan kerabatnya. Untuk lebih jelasnya lihat Darsiti Soeratman, *op. cit.*, hlm. 64-68.

[198] Bentuk bangunan arsitektur berlantai dua difungsikan sebagai pusat kegiatan dari lembaga *komisi nga ruha* (komisi emapt bidang pemerintahan eksekutif) dan *bobato nyagimoi se tofkange* (dewan delapan belas bidang perwakilan rakyat atau legislatif). "Pengaruh Kebudayaan Cina Terhadap Kebudayaan Masyarakat Ternate", dalam*Tabloid Parada*, Ternate, edisi 3,tanggal 3-22 April 2001.

[199] Menurut beberapa narasumber keberadaan pelabuhan sultan dengan pangkal jembatannya berbentuk bundar yang disebut *Bololu Madehe* dianggap tempat yang sakral. Jembatan ini memiliki nilai magis dengan bangunan lainya di keraton. Di mana *bolulu madehe* sebagai tempat atau ruangan tunggu sultan saat meninjau wilayah pemerintahannya di berbagai daerah. Jika sultan hendak kembali

Ternate yang berbatasan dengan masjid sultan. Elemen-elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keberadaannya saling mengikat dan dianggap sebagai tempat yang keramat.

Menelusuri sejarah Kesultanan Ternate dari awal hingga kini, maka terdapat empat elemen penting dalam institusi Kesultanan Ternate yakni; *Kadato* (Istana Sultan), *Sigi Lamo* (Mesjid Agung), *Ngara Lamo* (Pintu Besar/tempat ruangan dua lembaga adat yaitu Komisi *Nga Ruha* dan *Bobato Nyagimoi se Tufkange*), dan Dodoku Mari atau Dodoku Ali (Pelabuhan Sultan). Keempat elemen tersebut merupakan mata rantai Kesultanan Ternate yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainkarena merupakan satu kesatuan budaya dan politik. Di samping itu keberadaannya saling mengikat dan mempunyai makna filosofis yang mengandung falsafah daerah *Maloku Kie Raha* yakni *Memori se Rorasa,Galib se Likudi* dan *Bobaso se Rasai.*Lihat foto 3 dan 4 berikut ini.

Gambar 5
Istana Kesultanan Ternate

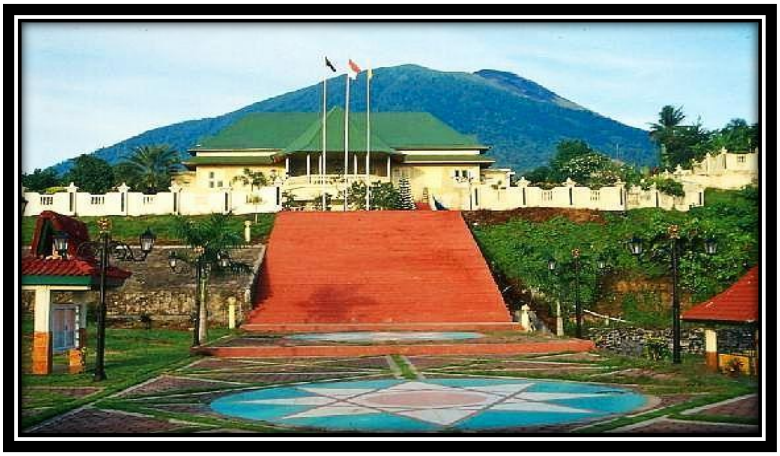

Sumber: Sumber: http://www.geheugenvan

ke istana, ia dijemput oleh para *bobato* dengan segala kebesarannya menuju kembali ke istana. Wawancara pada bulan Juni 2013.

Gambar 6
Mesjid Agung (*Sigi Lamo*)Kesultanan Ternate

Sumber: http://www Kesultanan-Ternate

Sesuai kepercayaan orang Ternate, *kadaton* Ternate bergaya bangunan abad 19. Berlantai dua mengadap ke arah laut ibarat seekor singa dari kayangan yang sedang duduk dengan dua kaki depan menopang kepalanya. Sementara menurut berbagai sumber yang diwancarai, bentuk *kadaton* diibaratkan berbentuk tubuh manusia yang sedang duduk bersila (*Cako Tertib*) menghadap ke barat (terbitnya matahari). Mengandung makna bahwa setiap sultan siap sedia melaksanakan pengabdiannya terhadap agama, bangsa, dan negara.[200]

Menurut Radjiloen L. untuk dapat sampai ke dalam *kadaton*, orang harus melalui tiga buah pintu (*ngara*). Masing-masing pintu tengah, selatan, dan pintu utara yang dikhususkan bagi sultan dan bangsawannya. Setiap pintu terdiri atas 27 anak tangga. Angka 27 mengandung arti keistemewaan malam langit, yaitu 27 malam bulan Ramadhan (lailatul qadar) dan 27 hari bulan Rajab, yakni malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pintu utama atau tengah hanya dikhususkan bagi sultan dan keluargannya. Pintu selatan hanya untuk para *bobato dunia* (bidang pemerintahan) seperti *bobato madopolo* (dewan menteri) dan *bobato nyagomoi se tufkange*(badan legeslatif). Sementara pintu bagian utara, diperuntukan bagi *bobato akhirat* (bidang keaagamaan).[201]

Tinggi bangunan *kadaton* dari dasar sampai ke bubungan setinggi 17 meter. Angka 17 secara filosofis berhubungan dengan jumlah bilangan rakaat dalam sholat lima waktu, yaitu Shubuh dua rakaat, Dhuhur empat rakaat, Ashar empat rakaat, Magrib tiga rakaat, dan Isya empat rakaat. Angka 17 juga dihubungkan dengan hari

[200] Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir,* (Ternate: Depdikbud, 1982), hlm.64.

[201] *Ibid.*,hlm. 67.

ke-17 bulan Ramadhan, yakni peristiwa Nuzulul Qur'an.[202] (Mengenai *Kadaton* Ternate lihat lampiran).

Dalam bangunan *kadaton,* sultan memiliki ruangan tersendiri yang terletak di bagian utara dan selatan.[203] Ruangan sebelah utara terdiri dari tiga ruangan. *Pertama,* ruangan ibadah sultan (kamar puji). Fungsinya sebagai tempat ibadah sultan, di ruangan ini juga terdapat sebuah meja marmar berbentuk bundar, di atasnya diletakkan sebuah Qur'an pusaka dan keris pusaka. Wanita dilarang memasuki ruangan ini dan dianggap sebagai tempat yang paling keramat.[204] Ruangan ini juga digunakan untuk beribadah oleh sultan, seorang yang diyakini sebagai perantara tunggal antara mikrokosmos dan makrokosmos. Di depan ruangan ini terdapat sebuah ruangan khusus (*gonyihi kolano*). Ruangan ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai tempat penyambutan tamu agung secara tradisional, ruangan ramah tamah para pembesar, tempat menyambut tamu kesultanan dari dalam dan luar negeri, tempat musyawarah antara *komisi ngaruha* dan *bobato nyagimoi se tufkange* (lembaga legislatif), serta digunakan dalam upacara penobatan seorang sultan (*upacara kabasaran kolano*). *Kedua*, ruangan perpustakaan pribadi sultan, dan. *Ketiga,* ruangan makan keluarga sultan dan permaisurinya.[205]

Sementara ruangan di sebelah selatan terdiri atas dua bagian. *Pertama,* kamar khusus untuk permaisuri. *Kedua,* kamar tengah dan belakang yang menjadi tempat istirahat putra-putri sultan bersama pengasuhnya. Selain ruangan itu, terdapat pendopo bangunan arsitektur tradisional berbentuk kerucut yang difungsikan sebagai ruangan ramah-tamah dan tempat pertunjukan kesenian kerajaaan bila ada kunjungan tamu agung ke istana Kesultanan Ternate. Ruangan ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan antara sultan dan rakyatnya (*bala kusu sekano-kano*) dalam menyelasaikan masalah-masalah yang dihadapinya.[206]

Di sudut bangunan dan pintu utama menuju *kadaton* ditempatkan replika binatang singa, macan, ular, dan lipan. Replika tersebut merupakan perlambang bahwa dalam bidang pemerintahan, para sultan harus disegani dan dikagumi oleh kawan maupun lawan. Sementara pada sisi lain, sultan juga harus selalu waspada dan siap siaga dalam menghadapi setiap musuh, sehingga dapat menjaga keutuhan dan keselamatan masyarakat di walayah kekuasaanya.

---

[202]"*Kadaton* Ternate dalam catatan Sejarah", dalam *Tabloid Parada*.Ternate, edisi 14 tanggal 28 Oktober 10 Nopember 2001.

[203] Dalam kepercayaan orang Ternate, dunia ini terdiri atas dua hal berlawanan yang disebut "*boboso*" yang berhubungan dengan empat penjuru mata angin. Utara menunjukan ke arah gunung berlawanan dengan selatan yang menunjukan ke arah laut.Timur arah matahari terbit berlawanan dengan barat arah matahari terbenam. Pembagian dalam penempatan ruang yang berlawanan tersebut didasarkan atas kepercayaan untuk terciptanya keteraturan.

[204]"Mesjid Kesultanan Ternate sebagai Sarana Pembinaan Umat di Kesultan Ternate", dalam *Tabloid Parada.* Ternate, edisi 14 tanggal 16-25 Nopember 2001.

[205] Anas Dinsie & Rinto Taib *Ternate Sejarah, Kebudayaan & Pembangunan Pedamaian Maluku Utara.* (Ternate: LeKRa-MKR, 2010), hlm. 5-7.

[206]Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir.*(Ternate: Depdikbud, 1982), hlm. 67-68.

Selain replika binatang, terdapat juga jenis tumbuhan yang dipakai sebagai simbol kepemimpinan berupa pohon beringin. Pohon ini memeberi makna bahwa sebagai pemimpin, sultan harus menaungi dan memberi kesejukan seluruh masyarakat di wilayah kekuasaanya. Sementara di halaman kanan *kadaton* terdapat pintu gerbang yang disebut *ngara opas* (pintu khusus para abdi dalem) yang selalu dikawal 13 prajurit istana.

Pengaturan bangunan *kadaton* dengan berbagai macam klasifikasi yang penuh makna filosofis dan religi tersebut, menunjukan adanya upaya untuk menjadikan istana sebagai pusat anutan. Dalam hal ini, kekuasaan yang dimiliki sultan Ternate adalah suatu yang utuh dan tunggal. Maksudnya, kekuasaan itu tidak boleh bersaing, menyeluruh, dan tidak terkotak-kotak atau terbagi-bagi.

Kadaton Ternate sebagai pusat kosmos dianggap tempat yang keramat, hingga kini diyakni masyarakat berasal dari "dunia atas" sebagaimana diceritakan dalam mitos *Tujuh Putri*. Pengaturan bangunan ini juga sama dalam pemikiran Jawa, yang menurut Darsiti Soeratman, pola pengaturan bangunan di dalam istana itu tidak terlepas dari usaha raja untuk menyelaraskan kehidupan warga masyarakat atau komunitas istana dengan jagad raya. Dengan demikian, istana merupakan lambang penuh arti dan pusat magis.[207]

Perwujudan sebagai pusat anutan juga nampak dari kemegahan upacara-upacara yang diselengarakan di *kadaton*,seperti acara penobatan sultan baru (*jou kolano*), hari ulang tahun sultan (*legu gam*), dan upacara kematian sultan. Upacara-upacara tersebut menjadi kriteria status sosial yang melambagkan kekuasaan, kekayaan, dan kewibawaan sultan. Selain itu, dalam kehidupan *kadaton*, keluarga sultan dan bangsawan mempunyai gaya hidup sendiri, terikat oleh nilai-nilai tertentu. Seperti dalam hal aturan pakaian yang diberlakukan di dalam istana, misalnya warna putih hanya dipakai oleh sultan, warna kuning untuk para bangsawan (*bobato dunia*) yang berasal dari marga *Soa-sio* dan *Sangaji*. Warna hitam untuk para imam (*bobato akhirat*), warna merah untuk para prajurit dari marga *Soa*, *Heku*, dan C*im*.[208]

Sementara bagi masyarakat biasa, untuk masuk ke *kadaton* harus melepaskan sandal, barang-barang yang di bawa di atas kepala harus diturunkan, dan tidak boleh memakai payung. Begitu pula dalam hal berbicara dan bersikap sesuai dengan tata karma seperti menyembah, (*suba*), duduk bersila bagi pria, bersimpuh bagi wanita, dan membungkukkan badan. Menurut Soemarsaid Moertono peraturan-peraturan istana itu sengaja dibuat untuk memuliakan sekaligus mengokohkan legitimasi raja dan institusinya.[209]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sultan dan istananya merupakan kesatuan integral yang saling menguatkan. Seorang sultan tidak akan mempunyai arti secara politis kalau tidak dikokohkan oleh istana. Sultan yang tidak memiliki istana akan mengalami kemerosotan status sosial, yang dalam bahasa Clifford Geertz

[207] Darsiti Soeratman, *op. cit.*, hlm. 121.
[208] Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Pustaka Utama, 2000.
[209] Soemarsaid Moertono, *op. cit.*, hlm. 142.

menyebutnya sebagai status yang menurun.[210] Sebaliknya, istana tidak bisa menjadi institusi penting jika tidak diperkuat oleh keterampilan politik dari bangsawan yang setiap saat dengan daya kreasi mereka akan meningkatkan kewibawaan istana.

E. Sumber Ekonomi Kesultanan

Sumber ekonomi Kesultanan Ternate pada umumnya diperoleh melalui sistem *ngase* (upeti/pajak) yang bersumber dari hasil hutan dan hasil laut. Dalam kepemilikan tanah, di Kesultanan Ternate mengenal tiga tingkatan tanah yaitu; tanah sultan (*aha kolano*), tanah marga (*aha soa*) dan tanah masyarakat (*kaha cacu*). Masing-masing memeliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda. Untuk *aha kolano* (tanah sultan) diperuntukan untuk sultan. Sampai sekarang sultan memeliki monopoli sejumlah tanah diwilayah kekuasaanya, dan hak penguasaan tanah tersebut bersifat tetap yang disebut *aha kolano, dan aha cocatu* (tanah sultan). Tanah-tanah tersebut tersebar dibeberapa daerah di Pulau Ternate Utara dan Halmahera Barat.

Disamping kepemilikan tanah yang bersifat tetap, dikenal pula hak atas tanah sultan yang bersifat sementara, yaitu; *hak tolagumi, hak safa, hak ruba bangga* dan *hak jurami*. Tanah tersebut merupakan hak sultan yang diberikan kepada salah satu soa atau marga berupa sebidang tanah untuk kepentingan marga itu sendiri atau disebut *kaha soa*. Tanah-tanah tersebut dilarang tidak boleh pindah kemarga lainnya atau pribadi lainnya. Sementara *kaha cacu* adalah tanah yang diberikan oleh sultan untuk dikelola secara individu dengan sistem bagi hasil dalam bentuk *nagse* (pajak). Selain memeliki penguasaan sejumlah tanah, sultan juga memeliki penguasaan atas hasil laut yang terbagi kedalam tiga katagori yaitu; *ngola sahe* (laut dangkal), *ngolo ngido* (laut dalam), dan *ngolo lamo* (laut luas/samudera).[211] Bagi penduduk yang menangkap ikan pada daerah *ngolo ngido* dan *ngolo lamo* dikenakan pajak hasil laut yakni ikan dan kerang mutira. Jika dikaji lebih jauh kebelakang, pendapatan Kesultanan Ternate tidak hanya diperoleh pada wilayah kekuasaannya di Pulau Ternate. Dengan wilayah kekuasaanya yang luas mencakup Propinsi Maluku Utara (sekarang), banyak pajak dan hadiah-hadiah diperoleh daerah taklukannya.

J.H. Tobias menyebutkan pada abad ke XIII-XIX, Kesultanan Ternate punya sumber pengahasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan *kadaton* berasal dari pajak yang diberikan oleh daerah taklukannya. Di Halmahera Utara *terutama di afdeling* Jailolo, Sahu, Gamkonora, Loloda, Kao dan Galela. Pendapatan pajak dari Kesultanan Ternate di daerah tersebut berupa; 20 orang dan empat kora-kora bagi pelayanan umum, 275 pon beras putih sosoh (tumbuk) dan 42 pon beras yang belum sosoh (tumbuk) bagi setiap penduduk laki-laki. Dan untuk wanita yang belum menikah, 5 pon beras tumbuk dalam bakul bambu yang indah. Desa Kao harus memberikan 12 orang dan 4 kora-kora untuk pelayanan umum, 1 botol atau ½ mutiara. 50 orang dipekerjakan dikapal yang berlayar secara teratur antara Ternate

[210] Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa.* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), hlm. 165.

[211] Mudafar Syah, *op.cit*.hlm, 12.

dan Sulawesi. Sementara dikepulaun Sula harus mengirim 15 koyan (1 koyan= 2 pikul) beras tumbuk, 180 *koele* minyak kelapa, 1 pikul lilin, 160 pak sagu, 12 batu giling, 30 cengkang penyu, 1 keranjang anyaman, 1 ikat kepala, 26 potong balok kayu, 26 ikat kayu bakar dan 2-10 orang untuk awak perahu dan militer.[212]

Sebagaimana di kemukakan sebelumnya, bahwa setiap wilayah kekuasaan Ternate ditempatkan seorang wakil sultan (utusan) dan *sangaji* (bupati). Salah satu fungsi politiknya adalah memelihara hubungan antara distriknya dengan *kadaton*. Hubungan itu terwujud dalam suatu sistem upeti yang mengatur berbagai bentuk kewajiban yang harus dipenuh penduduk kepada sultan. Kewajiban para para *sangaji* di bagi menjadi dua bagian, *pertama* adalah kewajiban menyediakan sumberdaya manusia untuk kepentigan *kadaton* dan *kedua*, adalah kewajiban menyediakan sumberdaya manusia untuk kepentingan *kadoton* (*heerrendiensten*). Untuk pengerahan sumberdaya manusia dibedakan dalam tiga bagian yaitu; (1), penyediaan sumberdaya manusia untuk kepentingan rumah tangga *kadaton*, (2), penyediaan sumberdaya manusia *extirpatie* atau penghancuran hutan-hutan dan cengkeh, (3), penyediaaan untuk *hongi* atau armada kerajaan.[213]

Kewajiban menyerahkan upeti di masing-masing wilayah tampaknya berbeda-beda tergantung kemampuan sumberdaya yang dimiliki daerah masing-masing yang diserahkan para *bobato dunia* (sangaji) setahun sekali dan terutama terdiri dari produk-produk pertanian. Hal ini sebagaimana di laporkan Residen C. Bosscher, Berapa distrik di Halmahera Barat seperti Distrik Loloda, setiap tahun berkewajiban menyediakan 6-10 karung sarang burung, menyediakan 3 orang prajurit untuk bertugas di pos penjagaan pintu gerbang *kadaton* dan 1 orang pengawal Sultan, dan menyediakan 4 perahu korra-korra pada setiap penduduk dari empat kampung. Distrik Gamkonora, menyediakan 6 orang prajurit untuk bertugas di pos penjagaan pintu gerbang *kadaton* dan 2 orang pengawal Sultan dan diwajibkan untuk menyediakan 2 perahu korra-korra. Distrik Tolofuo, menyediakan 1 orang prajurit untuk bertugas di *kadaton* dan penduduk diwajibkan untuk menyediakan satu perahu korra-korra.

Sementara di daerah distrik Tobaru, menyediakan 10 tabung bambu *loeries* , 270 bungkus damar,180 tabung bambu damar, 10 buah pedang yang terbuat dari kayu dengan dihias bulu-bulu untuk para penari Sultan. Distrik Sahu, menyediakan beras dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan *kadaton* maupun para pegawai Belanda menurut permintaan Sultan yaitu kadang-kadang sebanyak 1/5, 1/4, 1/3, atau 1/2 dari hasil panen[214], menyediakan 6 orang prajurit untuk menjaga istana, dan 2 orang pengawal sultan. Distrik Jailolo, menyedikan sejumlah beras seharga 48 duit porotjo

---

[212]*Memorie van Overgave* J.H. Tobias 1857. (Jakarta: ANRI).

[213] R.Z. Leirissa, *Halmahera Timur dan Raja Jailolo Pergolakan Sekitar Laut Seram Awal Abad 19.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 173.

[214] Selain untuk pajak padi tersebut dibeli dengan harga 48 *duit* porotjo besar–6 gantang 1 pipa- 70 sampai dengan 80 katje tergantung kepada keadaan kematangan padi. Hasil panen padi yang belum lama ini dilakukan dibeli Sultan dengan harga 520 real atau sekitar f.1000,- (48 duit) untuk sebanyak 75 koiyang atau setara denga separuh hasil panen. Apabila jumlah itu dijual di pasar maka harganya bisa mencapai f.7500,- yang sesudah dikurangi pajak akan menjadi f.6500. Lihat Memori van Overgave karesidenan Maluku, Residen B.J. Haga Mvo seri II E koleksi Arsip Nasional.

raja atau f.5260,dan 1 orang laki-laki sebagai pembantu rumah tangga (*ngongere itji*). Distrik Dodinga, menyediakan 20 tabung bambu damar dan 150 bungkus damar. Distrik Kao, menyediakan 3 fardu sagu bagi laki-laki menikah dan 1 fardu bagi lajang (belum menikah) per tahun. (1 fardu sama dengan 20 kati). 120 fardu sagu per tahun bagi tiap kepala keluarga. Merawat dan membangun kora-kora bagi semua penduduk. 30 fardu sagu dan 5 tikar bagi semua penduduk, yang dikirimkan pada akhir puasa. 80 ekor ayam pertahun bagi seluruh penduduk, dan menyediakan 1 orang utusan dari Kao tiap 3 bulan untuk kerwa wajib di *kadaton* Ternate[215].

Di samping memperoleh sejumlah pendapatan tersebut, sultan juga memperoleh pajak dengan persetujuan pemerintah kolonial Belanda dipungut dari hasil hutan. Sebagaimana di laporan Niewennijs bahwa sultan Ternate mendapat masukan dalam bentuk pajak hutan seperti *ngase* damar sejumlah f 7,50 perkapala dan setiap tahun harus menyerahkan; *ngase* kebun, *ngase* kayu, *ngase* perahu, *ngase* bambu, *ngase* dendeng rusah, dan *ngase* kalero. Selain itu sultan juga mendapat hadiah dari ratu Belanda, Cina berupa mangkok-mangkok berkuran besar terbuat dari perak, gelas dan piala dari kristal, pedang dan pistol yang indah-indah, gerabah, dan porselin, kain sutra dan satin dan banyak benda lainnya. Ada juga mutiara dan kerang mutiara, kulit penyu dan gigi dugong, batu karang berwarna-warni yang indah serta kerang laut.[216]

Selain upeti dan hadiah-hadiah yang diperoleh dari berbagai daerah kekuasaanya. Ternate sebagai salah satu kota niaga dikawasan Timur Indonesia dan sebagai pulau penghasil rempah-rempah yang di minati oleh berbagai negara, maka pedagangan menjadi sumber kekayaan Kesultanan Ternate yang penting. Pada periode VOC, Sultan dan Bangsawanya aktif berdagang rempah- rempah (cengkeh) dengan menempatakan petugas atau wakil sultan yang mengurus perdagangan di pelabuhan yang disebut shabandar.[217] Anthony Reid mengemukakan bahwa raja-raja dari masa pra-kolonial di Asia Tenggara memasukan pendapatan dari berbagai cara dan selalu tidak langsung. Pajak tidak hanya dapat ditarik dari hasil pertanian tetapi juga dari perdagangan. Tugas memungut pajak biasanya dilakukan oleh kepala-kepala di daerah bersama penduduknya yang dapat merupakan sistem pengumpulan hasil untuk raja.[218]

Memasuki abad ke XVII, keuntungan-keuntungan yang didapati para sultan dan bangsawan lewat berdagang rempah- rempah dan pungutan-pungutan berupa cukai perdagangan, pajak, penjualan hasil pelabuhan harus berakhir. Pada saat di berlakukannya *hongitochten* dan *ekstirpasi* para sultan dilarang berdagang rempah-

---

[215] *Memorie van Overgave C. Bosscher* Residen Ternate (1859), (Jakarta: ANRI).

[216] ANRI, Memori van Overgave Residen Ternate Niewennijs (1867-1869), hlm. 13.

[217] Shabandar ini bertugas untuk memungut pungutan-pungutan berupa cukai perdagangan, pengumutan pajak, penjualan hasil pelabuhan. Bagi pedagang asing seperti Cina, Makasar-Bugis, Jawa yang mendatangi atau meningalkan pelabuhan Ternate harus mendapat surat izin berlayar (zijlpas) dari shabandar. Surat izin itu mencantumkan nama kapal, pemilik, nahkodanya, muatannya serta tujuan pelayaran. Lebih jelasnya lihat Anthony Reid *Dari Ekspansi Hingga Krisis : Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara* 1450-1680. Jilid II, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

[218] Anthony Reid *Dari Ekspansi Hingga Krisis : Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara* 1450-1680. Jilid II, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 14.

rempah pada 1728-1790. Sebagai pengantinya VOC memberikan uang imbalan kepada para sultan atas hilangnya pendapatan dari perdagangan rempah-rempah di wilayah mereka. Sultan Ternate mendapat 9 600 ringgit setiap tahun, untuk bangsawan *(bobato dunia)* 1.200 ringgit. Penguasa (*sangaji*) distrik pulau Moti dan Makian, 300 ringgit dan 4000 ringgit[219]. Sultan Tidore 1200 ringgit setiap tahun dan para bangsawan 1600 ringgit, sementara beberapa *sangaji* didistrik Weda 50 ringgit dan para pembantunya *(kimalaha)* 25 ringgit. Distrik Maba 100 ringgit dan 250 untuk 10 pembantunya (*kimalaha*) serta distrik Patani 37,24 ringgit. Selain uang penganti tersebut, mereka juga mendapatkan hadiah-hadiah berupa bahan makanan dan minuman beralkohol (*recognitiepenningen*).[220]

Di bidang politik dalam rangka mengukuhkan hegomoninya, maka pada 1881 pemerintah kolonial Belanda membuat kontrak politik dengan Sultan Ternate Anjanhar bersama seluruh bangsawan yang isinya "sultan dan para bangsawan mengakui hak pemerintah Belanda untuk mengangkat semua bangsawan, pejabat dan perwira atas seluruh wilayah kesultanan dan pemecatnya". Untuk mempertahankan perjanjian tersebut sultan Ternate mendapat imbalan senilai f. 11,200 setahun. Para bangsawan dan pimpinan Pulau Moti senilai f. 3,200, kepala pribumi Makian f.3 000 serta subsidi senilai f 17.400 untuk dijadikan kas kesultanan.[221]

Pada periode yang sama, di bidang ekonomi Sultan Bacan mendatangani kontrak dengan perusahaan *Bacan Maatschapij* yang bergerak di bidang perkebunan, perikanan dan pertambangan yang setiap tahunnya Sultan Bacan mendapat tunjangan sebesar f. 1500.[222] Hal yang sama juga di lakukan oleh sultan Ternate, pada 1895 memberi izin kepada pengusaha Eropa untuk pengangkutan kayu di wilayah Karesidenan Ternate. Dimana sultan diberi tunjangan f. 1000 selama 15 tahun dan bangsawannya 2% dari hasil penjualan. Tindak lanjut dari kebijakan ini pada 27 September 1902 sultan Ternate Usman Syah, menyetujui kontak dagang dengan sebuah maskapai dagang Amsterdam untuk mengeksplorasi mutiara dan perikanan di teluk Bangai, sekaligus melimpahkan wewenang kepada pemerintah Belanda untuk memungut bea cukai ekspor-impor dan pajak pelabuhan, pajak berlabuh kapal, hak untuk mengelola pelabuhan serta keamanan pelabuhan diwilayahnya.[223] Begitu juga dengan sultan Tidore pada 1916 memberi izin kepada perusahaan *Retty* dan *Steward Brown* untuk burung cendrawasih di Papua (namun tidak disebutkan berapa tunjangan yang diberikan kepada sultan atas izin tersebut).[224] Dengan demikian para penguasa dan keluarganya hidup dengan cukup nyaman dalam istana-istana dengan tidak melakukan pekerjaan apapun.

---

[219] ***Kolonial Verslag***, 1859, hlm. 10.

[220] Mvo Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo Seri 2,rel nomer 26 (Arsip Nasional RI Jakarta), hlm. 69.

[221] ***Rustam Hasim, Dari Cengkeh Ke Kerang Mutiara: Perdagangan Di Karesidenan Ternate, 1854-1930. Ternate; Lepkahir***, 2013. hlm. 16.

[222] ***Kolonial Verslag*** tahun 1883, hlm. 21.

[223] ***Kolonial Verslag***, 1903, hlm. 19.

[224] ANRI, ***Memori van Overgave,*** Residen Ternate K.A. James, 1920, (Mailrapport N0.209/19),hlm. 19.

Memasuki awal abad ke XX pendapatan yang diperoleh para bangsawan seperti gaji pemimpin soa, *Jogugu, hukum Soa Sio* dan perangkat yang menduduki jabatan tinggi lainnya di tahun 1914 mengalami peningkatan *fl*. 2.960, pertahun. Di kesultanan Ternate jabatan *Jogugu, hukum Soa-Sio* dan sekertaris, memeliki peranan penting untuk kepentingan pemerintah kolonial sehingga diberi tunjangan, dan keberadaan mereka selalu berada dalam pengawasannya terutama para kepala soa yang diangkat menjadi kepala distrik Ternate Barat dan Ternate Timur[225].

Dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Sejak pasca kemerdekaan pada umumnya sultan dan bangsawan menganut gaya hidup yang mengutamakan status dengan kecenderungan memola gaya hidup mereka. Para sultan dan bangsawan sadar akan kedudukannya sebagai pelindung kebudayaan Ternate, berusaha untuk melestarikan dan memperluasnya. Gaya hidup bangsawan terbawa keluar dari *kadaton*, karena lapisan masyarakat tertentu memola gaya hidup itu, walaupun pelaksanannya terbatas pada dana dimiliki atau tergantung pada kemampuan finasial mereka.

Inilah alasannya mengapa sehingga sesudah Soekarno dan Moh. Hatta memproklamirkan bangsa ini pada tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Ternate Muhammad Iskandar Djabir Syah di minta oleh Soekarno untuk menandatangani surat pernyataan pengabungan Kesultanan Ternate ke dalam NKRI, namun di tolak dengan alasan bahwa "dalam segi tata pengelolaan atas segala sumber daya alam telah diatur secara sempurna dalam hukum adat kesultanan dan masyaraktnya sehingga tidak boleh dikuasai oleh negara karena yang demikian akan menghilangkan sistem nilai lokal yang diwariskan oleh para leluhur dan diyakini sebagai amanah dari Tuhan untuk dijaga dan lestarikan". [226] Bagi Sultan Ternate Muhammad Iskandar Djabir Syah (1929-1975) tidak menyerahkan tanah wilayah Maluku Utara kepada NKRI diera Soekarno adalah bahwa segala sesuatu yang terkandung diatas tanah dan segala isinya adalah milik rakyat yang semestinya di miliki dan dikuasi oleh rakyat demi kesejahtraan hidupnya berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat. Meskipun dilakukan pendekatan demi mendapatkan legalitas dari kesultanan Ternate. Hingga kini tidak ada sepucuk surat ataupun pernyataan dari pihak kesultanan Ternate yang membuktikan bahwa kesultanan Ternate menyarahkan tanah atau wilayah kekuasaanya kepada NKRI. [227]

F. Struktur Birokrasi Kesultanan

Masyarakat *kadaton* Ternate, seperti halnya masyarakat di kerajaan di Jawa yang mengenal pelapisan-pelapisan yang tersusun secara hirarki. Sultan menduduki tempat tertinggi, kemudian diikuti oleh kaum bangsawan dan abdi dalem kerajaan

[225] Memor1e van overgave residen. Ouwerling, Ternate Tahun 1934 *Reel Mikrofilm Nomor 6, Koleksi Mvo 2e ANRI*

[226] Mudaffar Syah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. Ternate : Goheba, 2009, hlm. 5.

[227] *Ibid*,hlm.9.

(*opas)*. Status sosial tertinggi dalam *kadaton* dan kekuasaa raja tercermin pada nama, atau gelar yang disandangnya. Bagi masyarakat Ternate hubungan antara Sultan dan bawahan berlaku hubungan patron-klien (*jou se ngofa ngare*) atau menurut istilah Jawa disebut hubungan *gusti-kawula*. Menurut Suhartono istilah *gusti-kawula* diterapkan dalam pemerintahan dengan menganalogikan raja sebagai patron dan rakyat sebagai klien. Antara raja-rakyat terjadi hubungan simbiotik, dalam arti bahwa kedua beah pihak dapat dikatakan mempunyai hubungan seimbang dan bersifat timbal balik[228].

Persoalan tentang kapan dan bagaimana proses masyarakat Ternate membentuk suatu komunitas politik yang terstruktur hingga kini masih membutuhkan kajian yang mendalam. Menurut Djoko Suryo, proses terbentuknya masyarakat politik dikawasan yang dulunya dikenal dengan istilah *Moluku Kie Raha* (empat kerajaan; Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo). Empat gunung tempat asal cengkeh ini berovolusi sejalan dengan semakin krusialnya peran cengkeh dalam tata perdagangan internasional[229].

Menurut Radjiloen, bahwasebelum terbentuknya organisasi kerajaan, di pulau Ternate terdapat empat kelompok masyarakat (marga), yaitu *pertama*, marga Tubo (puncak) yaitu sekelompok orang yang mendiami disekitar gunung Gamalama (Gam Lamo: negeri besar). *Kedua*, marga Tobona yang mendiami dataran tinggi foramadiyahi. *Ketiga*, marga Tabanga yaitu sekelompok orang yang mendiami hutan, dan *keempat*, marga Toboleu yang mendiami dataran rendah atau pantai[230].

Pada tahun 1251, para *momole* (kepala Marga) tersebut melakukan musyawarah yang dikenal dengan nama persetujuan Fora Madiyahi. Menurut Abdul Hamid Hasan, dalam persetujuan itu, disepakati tiga butir kesepakatan yaitu; *pertama*, Fora Madiyahi atau menduduklah yang benar yaitu menempatkan bentuk organisasi kerajaan dengan tugas dan jabatan masing-masing kepada marga (momole dan sangaji) dalam struktur pemerintahan dan dewan perwakilan. *Kedua*, *koko la nao* (kolano), artinya tegak supaya kuat. Agar organisasi kenegaraan dapat berjalan dengan efektif dan menjadi kuat maka harus ada pemimpinnya yang disebut kolano, dan *ketiga*, Tara no ate, atau turun kau pikat, yakni setelah tegak organisasi ini maka para pemimpin harus menyatukan semua suku bangsa yang mendiami pulau Ternate[231].

Satu hal yang menarik bahwa perubahan struktur pemerintahan dari Kolano ke Kesultanan, tidak otomatis menghilangkan simbol-simbol politik pada ada pada

---

[228] Hubungan itu dapat diartikan hubungan yang setingkat artinya kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, tetapi meskipun demikian jika dilihat dari hirarkhinya maka raja mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada rakyat. Namun kedudukan yang tinggi tidak dapat berperan dengan baik untuk memenuhi kebutuhannya tanpa hidup bersama dengan rakyat. Lihat Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis* 1850-1942. (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 76.

[229] Djoko Suryo, *et al*. *Op,cit*. hlm.94.

[230]Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir*, Ternate: Depdikbud, 1982. hlm 34.

[231] Bagian terbesar dari uraian tersebut di ambil dari Abdul Hamid Hasan *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. (Jakarta: Pustaka Utama, 2001), hlm. 37-38.

diri *kolano*. Menurut Djoko Suryo, perubahan bentuk dari kolano ke Kesultanan lebih dikarenakan oleh alasan politis[232]. Bentuk kesultanan tampaknya dengan sengaja diambil karena merupakan bentuk yang paling umum dikenal diberbagai kawasan yang berada dalam jangkauan pemahaman elite politik Ternate.

Bagi masyarakat Ternate, walaupun sudah terjadi konversi pemerintahan dari *kolano* ke kesultanan.Namun antara kata kolano dan sultan memeliki fungsi dan peran yang berbeda.Sampai saat ini posisi *kolano* tetap di pergunakan sebagai instrument pengendalian dan pengelolaan politik dalam negeri.Sementara posisi sultan lebih banyak diarahkan pada kepentingan-kepentingan hubungan internasional. Bahkan menurut salah satu nara sumber menegaskan bahwa gelar tertinggi bukannya sultan, tapi *kolona* karena hanya *kolona* yang dapat mengeluarkan *iddin*[233].

Kewenangan inipun berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, misalnya hanya *kolona* yang memeliki hak-hak veto (*jaib kolano*), atas lembaga legislatif (*Bobato Nyagimoi Setofkange*) sampai sekarang tetap dimilikinya. Bahkan fungsi dan hak yang ada semakin diperluas dengan adanya pengunaan sebutan sultan. Di mana sultan berperan ganda yakni menjalangkan fungsi dalam bidang pemerintahan dan keagamaan.

Dalam hal agama (*bobato akhirat*), sultan adalah imam agung yang menjaga dan melindungi penyebaran dan kelestarian agama Islam atau kewajiban sultan untuk melindungi dan menyebarkan Islam.Poin inilah menjadi elemen baru yang ditambahkan pada kewajiban-kewajiban tradisional seorang *kolano.*Demikian pula, dengan posisinya sebagai *imam besar*, merupakan fungsi baru yang ditambahkan kepadanya[234].

Dalam kedudukanya sebagai imam besar, sultan dibantu oleh sejumlah ulama (*Bobato Akhirat*), yang memeliki nama dan gelar sendiri-sendiri. Ulama tertinggi yang membantu sultan di sebut Qadhie, ia diangkat dan diberhentikan oleh sultan, biasanya disebut *Jo Kalem.* Dalam menjalangkan tugasnya *Jo Kalem*ini dibantu oleh empat orang imam yaitu; Imam Jiko, Imam Sangaji, Imam Moti dan Imam Jawa[235]. Selain itu terdapat juga Imam Bangsa, yang bertugas mengurus dan menyelesaikan masalah secara khusus yang menyangkut dengan para bangsawan dan keluarganya.

Di bawah para imam ini terdapat para ulama yang disebut *Khatib* yang terdiri dari *khatib Jiko, Jawa, Sangaji, Moti dan Bangsa.*Setiap wilayah yang diperintah

---

[232] Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia, 2007, hlm, 210.

[233] *Iddin* atau semacam perintah yang di patuhi oleh masyarakat karena merupakan hak progreatif atau hak veto yang dimiliki oleh sultan. Lihat Abdul Hamid,*op,cit.* hlm. 84.

[234] Irza Arnita Djafaar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. Jakarta Bio Pustaka, 2005.

[235] Kehadiran Imam Jawa dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate (*bobato akhirat*) merupakan suatu tanda keakraban hubungan para Sultan Ternate dengan para mubalig Jawa, khususnya Giri dan Tuban. Hubungan Kesultanan Ternate dengan Sultan Giri sejak Sultan Zainal Abidin (1580-1500) memperdalam Islam di pulau Jawa. Sejak saat itu para Sultan Ternate selalu memperdalam pengetahuan agama/ilmu agama dengan belajar di pondok-pondok Pesantren Giri. Untuk lebih jelasnya lihat, Djoko Suryo, *et al*. *op,cit.* hlm.87-88.

oleh seorang sangaji maka diangkat seorang imam distrik dimana wilayah kerjanya mencakup imam distrik.Dalam menjalangkan tugasnya imam distrik didampingi oleh para khatib dan mu'addin, begitu pula sampai pada aparat bawahannya imam kampung.Paling akhir dalam struktur *Bobato Akhirat* ini ditempati oleh para modin dan muadzin.Sebagai kelengkapan administrasi diangkat seorang khatib juru tulis untuk mengurus dan menyelengarakan tata usaha hakim syarah kerajaan.

Menurut Mudaffar Syah, susunan organisasi kenegaraan Kerajaan Ternate terdiri atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang menjalangkan pemerintahan yang disebut *kolano* (sultan/raja). Fungsi *kolano* yaitu; *pertama*, pemimpin pemerintahan. *Kedua*, melaksanakan keputusan dewan 18. Disamping itu, *kolano* memiliki 2 macam hak prerogatif (hak veto) yaitu Idhin kolano dan Jaib kolano[236].

Dalam menjalangkan roda pemerintahan sultan dibantu para menteri-menterinya yang disebut *Bobato Madopolo*, terdiri dari:*pertama*, Jogugu, yaitu mangkubumi atau perdana menteri sekaligus menjabat kepala Staf Angkatan Bersenjata Kesultanan. Dalam bidang pemerintahan *Jogugu* (mangkubumi atau perdana menteri) adalah orang pertama dibawah raja. Menunjukan betapa besar kekuasaan patih kerajaan itu. Hubungan *jogugu* kerajaan dengan raja diumpamakan sebagai keris dan sarungnya atau madu dan rasa manisnya. Ini berarti bahwa segala tindakannya raja dan *jogugu* harus selalu seia-sekata.

Kedua, Kapita perang atau Menteri Pertahanan dan Keamanan. Selain *jogugu*, Kapita perang termasuk orang dekat dengan raja. Jika datang menghadap, tempat duduknya tidak jauh dari raja. Karena sebagai pelindung raja, maka jika menghadap raja kedudukanya duduk sejajar. *Ketiga*, Kapita Lau, yaitu Laksamana Angkatan Laut Kesultanan. *Keempat*, hukum Soa-sio, atau Menteri Dalam Negeri. *Kelima*, hukum Sangaji, atau Menteri Luar Negeri, dan *keenam*, Tulilamo atau Menteri Sekretaris Negara[237]. Hal ini sebagaimana tergambarkan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate berikut ini.

[236] Mudaffar Syah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. Ternate : Goheba, 2009, hlm. 5.

[237] Shaleh Putuhena, *Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam*. (Jakarta: Leknas LIPI,1987), hlm.15.

Tabel 5
Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate

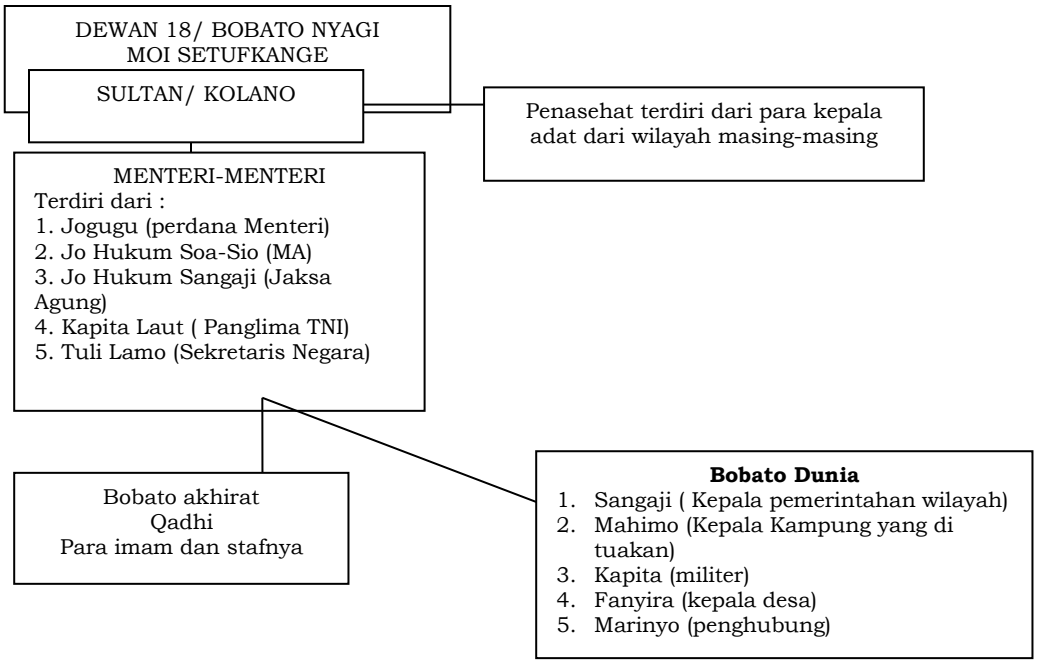

Sumber: Mudaffar Syah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. Ternate : Goheba, 2009, hlm. 8.

Perlu dijelaskan bahwa kedudukan pengurus agama dalam hal ini 'hakim agung kerajaan' juga disebut hakim syara kerajaan. Dalam hukum adat dikenal sebagai bobato akhirat (Urusan Agama). Tugasnya adalah membidangi syariah agama Islam sebagai syariah kerajaan yang terdiri dari; *pertama*, sultan. Dari tata kehidupan spiritual, sultan adalah imam agung yang berkewajiban menjaga tata tertib dan penyebaran agama. Menjaga dan melindungi, menyebarkan dan melestarikan agama Islam. Para sultan di Ternate tidak menyebut dirinya sebagai kalifatullah. Dalam kedudukannya sebagai seorang imam, sultan dibantu oleh para ulama yang memiliki pangkatnya sendiri-sendiri dan dilabelkan dari asal usul mereka. *Kedua*, Qadhie sebagai ulama dengan jabatan tertingi dalam syariah Islam ialah *Jo Kalem*. Dia diangkat dan diberhentikan oleh sultan dan dibantu empat imam kerajaan yaitu Imam Jiko, Imam Jawa[238], Imam Sangaji, dan Imam Moti. Selain

[238] Kehadiran Imam Jawa dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate (*bobato akhirat*) merupakan suatu tanda keakraban hubungan para Sultan Ternate dengan para mubalig Jawa (khususnya Giri dan Tuban). Hubungan Kesultanan Ternate dengan Sultan Giri sejak Sultan Zainal Abidin (1580-1500) memperdalam Islam di pulau Jawa. Sejak saat itu para Sultan Ternate selalu memperdalam pengetahuan agama/ilmu agama dengan belajar di pondok-pondok Pesantren Giri. Untuk lebih jelasnya lihat, Djoko Suryo, *et al*. *op, cit*. hlm.87-88.

keempat Imam tersebut terdapat imam kelima yaitu imam Bangsa, yang mengurus dan menyelengarakan masalah secara khusus yang menyangkut para bangswan dan keluargannya.

Dalam meleksanakan tugasnya para imam di dibantu para khatib dan muadzin bagi setiap imam tersebut. Sebagai kelengkapan adminstrasi diangkat seorang khatib juru tulis untuk mengurus dan menyelengarakan tata usaha hakim syara kerajaan. Setiap wilayah yang diperintah oleh seorang *sangaji* (camat), diangkat seorang sebagai imam distrik. Wilayah kerjanya mencakup wilayah kecamatan tersebut. Jika seorang sangaji diberi gaji oleh sultan, maka imam distrik mengabdi semata-mata karena Allah SWT. Kelengkapan imam distrik didampingi para khatib dan muadzin sampai pada aparat bawahannya imam kampung.

Sesuai tradisi, setiap orang yang memasuki keraton harus berpakaian adat. Ruangan atau lingkungan keraton mempunyai keunikan tersendiri, sehingga setiap bobato/pemangku yang bertugas diistana, masing-masing menempatkan diri sebagaimana tugas yang diembannya. Masuk keluar istana diatur oleh tata tertib keraton (kadaton) dan tidak semua *bobato* bertugas disini.

Urusan rumah tangga keraton diurus oleh pemangku-pemangku adat antara lain:

1. Imam Sadaha adalah ajudan pribadi sultan
2. Sawohi adalah protokoler istana
3. Sadaha Kadato adalah perlengkapan istana
4. Soseba Jotuli adalah petugas tata usaha istana
5. Saraha Kadato adalah pengurus perawatan benda-benda pusaka kesultanan
6. Soseba Kadato
7. Sadaha Kie
8. Fanyira Soa Ngare

Sementara itu, lembaga legislatif dalam Kesultanan Ternate disebut Dewan 18 (*Bobato nyagimoi setofkange*), terdiri dari wakil-wakil rakyat 41 marga yang berdomisili di Ternate. Kedelapan belas soa atau marga merupakan suatu *gemeinschaft* yang masing-masing soa mempunyai kepala soa/marga. Fungsi Dewan 18 yaitu (1). menentukan arah pembangunan. (2). Mengangkat sultan (kolano) dan memecat (*impeachment*). (3). Babato 18 sebagai pemegang kedaulatan, mengawasi sistem yang dijalankan kolano. Nama sistemnya asalah "*bala kusu se kano-kano*"[239]. Seperti disinggung, bahwa bobato 18 adalah pemegang kekuasaan tertiggi (kedaulatan). Dalam mencapai musyawarah mufakat maka mekanisme kerjanya sebagai berikut:

1. Sahnya sidang dewan 18 jika di hadiri kapita laut
2. Kapita lau tidak mempunyai hak suara, sehingga tidak dapat mempengarui jalannya sidang dewan 18

[239] Abdul Hamid,*op,cit.* hlm. 124.

3. Segala keputusan yang di ambil dewan 18 di sampaikan kepada kolano (sultan) untuk di bahas oleh pemeintah. Hasilnya dibawah kembali kepada dewan 18 untuk diminta pendapat dewan. Diberi kesempatan untuk meneliti hasil kompilasi kolano (sultan) ini di namakan idhin kolano diberikan kesematan untuk menerima atau menolak dalam arti melakukan perubahan. Hasil perubahan ini dibawah lagi ke kolano (sultan) atas hasil perubahan ini kolano (sulan) melakukan perubahan dengan *TAU-RAHA* (Pemerintahan harian) setelah itu kolano (sultan) mengambil keputusan. Keputusan kedua dinamakan *Jaib Kolano*. Jaib Kolano tidak dapat dirubah lagi[240].

Dalam struktur kelembagaan di atas, hal yang menarik adalah bahwa rekrutmen aristokrat di Kesultanan Ternate tidak hanya dipertimbangkan dari hubungan pertalian darah dan legitimasi politik, tetapi berkaitan dengan faktor representatif etnis yang mendiami Maluku Utara. Ini berarti bahwa masyarakat Maluku Utara terbagi habis kedalam unit-unit politik yang kecil dan dipersatukan melalui sistem perwakilan distrik. Ikatan-ikatan teritorial inilah merupakan landasan legitimasi kekuasaan sekaligus menjadi landasan integrasi eksisnya Kesultanan Ternate. Burger menyebut masyarakat Ternate telah memiliki kecanggihan dalam membangun struktur politik dan dinilai sebagai "organisasi kenegaraan bertaraf tinggi"[241]. Hal ini mempertegas apa yang dikemukakan AA GN Ari Dwipayana bahwa kekuasaan aristokrasi tidak selamanya menempatkan tokoh keturunan sebagai pusat kekuasaan, namun bertumpu pada beberapa orang bangsawan untuk menjalankan pemerintahan yang berpusat dalam area tertentu[242].

Seperti halnya berlaku pada masyarakat pada umumnya, *kadaton* mengenal adanya pelapisan sosial. Bangsawan dan pegawai istana merupakan dua macam pelapisan yang selalu ada didalam masyarakat istana. Pada umumnya antara kedua lapisan tersebut terdapat garis pemisah yang tegas. Kelompok bangsawan yaitu golongan yang masih berdarah dekat dengan raja, mendapat penghargaan lebih dari golongan lain. Jika bangsawan memperoleh status dari kelahiran, maka punggawa kerajaan atau pegawai istana mendapatkannya karena berprestasi. Namun dalam perkembangan selanjutnya banyak juga bangsawan yang menjadi pegawai istana, sebaliknya banyak *abdi dalem* bukan bangsawan diterima sebagai kerabat raja. Baik pada lapisan bangsawan , maupun pada lapisan punggawa kerajaan, yang dalam *kadaton* disebut sebagai abdi dalem, terdapat hirarki. Dalam hal ini menurut Darsiti Soeratman sebagai suatu komunitas keraton, yang memeliki kebudayaan sendiri, sering dihadapkan pada tradisi kecil yang berhasil menembus dinding-dinding keraton[243].

[240] Mudaffar Syah, *op. cit.*, hlm. 6.

[241] Burger, *Sejarah Ekonomis Sosialis Indonesia.* (Jakarta; Pradnjaparamita, 1962), hlm. 65.

[242] AA.GN. Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota.* (Yogyakarta: IRE Press, 2004), hlm. 28.

[243] Darsiti Soeratman, *op,cit*. hlm. 64.

Penutup

Kesultanan Ternate tumbuh dalam ikatan kekerabatan dari persekutuan politik empat marga utama, yaitu *Soa-sio, Sangaji, Cim*, dan *Heku*. Hingga kini, keempat marga tersebut memegang jabatan-jabatan strategis dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate dan dijabat secara turun-temurun. Ikatan kekerabatan ini tumbuh dan berkembang menjadi suatu bentuk persekutuan politik yang melahirkan Kesultanan Ternate. Struktur pemerintahan kesultanan itu terdiri dari sultan dan pejabat-pejabat yang membantunya dalam melaksanakan pemerintahan. Sebuah dewan perwakilan (*BobatoNyagomoi se Tufkange*) dan *Gam Raha*, yang anggotanya terdiri dari marga *Soa-sio* dan *Sangaji*. Sultan dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan berfungsi sebagai pelindung rakyat dan agama.

Dalam membangun dan mempertahankan basis kekuasaannyamulai dari periode kolonial hingga pasca-kemerdekaan, setidaknya dua strategi yang digunakan elite Kesultanan Ternate. *Pertama*, doktrin kekuasaan, di mana pihak *kadaton* (istana) melakukan doktrin pusat anutan yang menjadikan raja atau sultan sebagai representasi kekuasaan Tuhan (mikro kosmos). Untuk itu, diciptakanlah mitos *Tujuh Putri* sebagai legitimasi politiknya. *Kedua*, rekayasa kebudayaan dengan memposisikan *kadaton* sebagai tempat yang memiliki kedudukan identitas adat tertinggi. *Kadaton* dijadikan sumber acuan nilai-nilai adat yang juga berhubungan erat dengan sumber kepercayaan yang bersifat magis. Sultan dianggap memiliki kharisma dan kesaktian. Berbagai lambang dan benda-benda pusaka milik sultan seperti senjata dan gelar yang berfungsi mengabsahkan kedudukan sultan sebagai penguasa. Semua itu memberi kesan seolah kekuasaan raja-raja Ternate tanpa batas.

Masyarakat Ternate dikenal sebagai masyarakat adat (*bala kusu se kano-kano*) yang loyal kepada sultan. Relasi antara *bala kuso se kano-kano* dengan sultan disimbolkan sebagai lambang Kesultanan Ternate berupa burung berkepala dua (*goheba madopolo romdidi*), berbadan satu dan berhati satu.

BAB IV

KESULTANAN TERNATE PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG

> "Pedagang Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk Pala dan Maluku (Ternate) untuk cengkeh, dan barang dagangan ini tidak dikenal ditempat lain di dunia kecuali di tempat itu".[244]

Ternate telah berintegrasi dalam perdagangan maritim Nusantara dan Asia jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat di wilayah kepulauan Nusantara pada permulaan abad ke-16. Menurut Leirissa, perdagangan di Ternate tidak dapat ditempatkan secara terpisah dari sejarah perdagangan di wilayah kepulauan Indonesia pada khususnya, Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah dan Eropa pada umumnya. Tidak dapat di sangkal lagi Ternate merupakan pangkalan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan antar bangsa tersebut.Jalur pelayaran dan perdagangan ini terbentang dari Indonesia bagjan ibarat melalui selat Malaka terus kepesisir utara Jawa Timur terus ke Banda dan Maluku (Ternate).Faktor utama daya tarik Maluku (Ternate) bagi para pedagang antar bangsa itu ialah rempah-rempah, sehingga daerah Maluku oleh orang barat di beri julukan *The Spice Islands* (kepulauan rempah-rempah).[245] Kegunaan rempah-rempah di dunia Barat diperlukan oleh orang-orang Eropa sebagai bahan untuk mengawetkan daging ternak yang nantinya akan disimpan dan dipergunakan kembali ketika musim dingin datang. Karena pentinganya cengkeh, buah pala, lada dan bunga pala ini, membuat akan menjadi perebutan bagi bangsa-bangsa Eropa lain selain Portugis seperti Spanyol, dan Belanda.

Dalam jaringan perdagangan tersebut, komoditi perdagangan yang banyak diminati oleh para pedagang adalah Cengkih, Pala, dan Fuli. Tanaman ini dihasilkan terutama dipulau-pulau; Ternate, Tidore, Moti, dan Makian. Dengan potensi inilah menempatkan Ternate sebagai salah satu jalur perdagangan internasional di kawasan Timur Indonesia.[63]. Oleh Tomi Pires, disebut bahwa cengkeh (*eugenia aromatica*) di Maluku dihasilkan terutama dipulau-pulau: Ternate, Tidore, Moti, Makian, Bacan dan sedikit Halmahera (Jailolo). Pulau-pulau ini menghasilkan sekitar 6.000 bahan cengkeh setahun bahkan lebih dari itu. Sementara pala (*myristica fragrans*) terdapat di Halmahera Timur (Maba, Patani, Weda) dan kepulauan Banda.

Orang-orang Cina menurut Galvao dianggap sebagai orang pertama yang mengadakan perdagangan di Maluku hingga paroh kedua abad 14.Cengkeh bagi

---

[244] Di kutip dalam Anthony Reid, *Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tengara* 1450-1680. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 2.

[245] R.Z Leirissa, et aL, *Ternate Sebagai Bandar Jalur Sutra,* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Diroktorat Sejarah dan Nilai Nasional, Depdikbud, RI, 1999), hlm. 2.

[63] M.C, Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1990) hlm. 28

orang Cina bukan hanya berfungsi sebagai obat, stimulasi selera makan, parfum, dan meningkatkan kemampuan seksual, tetapi lebih dari itu merupakan aksesori kalangan menengah keatas. Pelabuhan terbesar yang dapat digunakan untuk berlabuh dan pusat perdagangan pada saat itu adalah Pulau Makian. Di pelabuhan Makian inilah orang-orang Cina membeli cengkih yang pertama, dan alat tukar yang digunakan adalah "fang" mata uang Cina. [64]Melalui hubungan dagang yang semakin meningkat dan lalulintas perdagangan yang semakin lancar, penduduk di Wilayah Kesultanan Ternate mengenal berbagai konsep pengetahuan dalam bidang perekonomian, seperti mengenal pengunaan mata uang kepeng, ringgit, real dan gulden. Di masa kejayaan kerajaan Ternate, ada kelompok penduduk sudah memeliki armada-armada dagang pelayaran membawa rempah-rempah sampai ke Jawa, Malaka bahkan sampai ke Sulu dan Mindanao.

Sisi kesejarahan yang penting dari Ternate adalah peranannya sebagai pelabuhan dagang utama sebagai penghasil rempah-rempah.Hubungan yang dijalin dengan pedagang-pedagang nusantara seperti, Bugis, Makasar, Jawa bahkan Cina dan Eropa adalah dalam perdagangan rempah-rempah. Melalui hubungan dagang yang semakin meningkat dan lalulintas perdagangan yang semakin lancar, penduduk Ternate mengenal berbagai konsep pengetahuan dalam bidang perekonomian, seperti mengenal pengunaan mata uang kepeng, ringgit, real dan gulden. Di masa kejayaan kerajaan Ternate, ada kelompok penduduk sudah memeliki armada-armada dagang pelayaran membawa rempah-rempah sampai ke Jawa, Malaka bahkan sampai ke Sulu dan Mindanao.[246] Kehidupan perekonomian Ternate mulai merosot ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menjalangkan sistem *hongi* dan *ekstirpasi*[247] pada akhir abad ke-18. Tanaman cengkeh dan pala di tebang atau dibakar untuk mencegah merosotnya harga rempah-rempah dipasaran dunia, mengakibatkan keadaan konomi dan sosial semakin merosot.

A. Cengkeh dan Kedatangan bangsa-bangsa Eropa

Keterlibatan Ternate dalam perdagangan sudah lama bahkan sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Informasi awal mengenai perdagangan cengkeh disebut dalam ekspedisi Ibnu Batutah (1350). Juga Tome Pires dan Antonio Galvao menyebut Maluku (Ternate, Tidore, Moti, Makian) sebagai penghasil cengkeh yang di butuhkan dalam perdagangan. Lebih jauh menurut Leirissa bahwa perdagangan di Ternate tidak dapat ditempatkan secara terpisah dari sejarah perdagangan di wilayah

[64] R.Z Leirissa, et. al., *op.,cit* hlm. 9-11.

[246]Sebagian besar uraian diatas dikutip dalam R.Z. Leirissa, *Sejarah Kebudayaan Maluku.*(Jakarta: Depdikbud,1999), hlm 8-9. Mengenai monopoli perdagangan rempah-rempah lihat W.R. van Hoevell, *Sejarah Kepulauan Maluku: Kisah Kedatangan Orang Eropa Hingga Monopoli Perdagangan Rempah.* (Yogyakarta: Ombak, 2014).

[247] Satuan ekspedisi atau patrol bersenjata yang beroperasi secara rutin mengawasi kawasan perkebunan rempah-rempah yang tersebar di kepulauan Maluku. Satuan ini tidak segan-segan mempergunakan kekerasan bersenjata untuk menghukum siapa saja yang sengaja melangar ketentuan atau melakukan penebangan secara sistematis untuk bisa mengendalikan tingkat laju produksinya sampai seperempat dari jumlah biasanya.Untuk lebih jelasnya Lihat Djoko Suryo, *op cit.* hlm. 130-140

kepulauan Indonesia pada khususnya, Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah dan Eropa pada umumnya. Tidak dapat di sangkal lagi Ternate merupakan pangkalan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan antar bangsa pada abad ke-14. Jalur pelayaran dan perdagangan ini terbentang dari Indonesia bagian barat melalui selat Malaka terus kepesisir utara Jawa Timur terus ke banda dan Maluku (Ternate)[248]. Di dalam sistem perdagangan antar bangsa ini selain tekstil dari India dan beras dari Jawa serta rempah-rempah (cengkeh dan pala) yang berasal dari Maluku.

Cengkeh di kenal sebagai tanaman asli yang berasal dari Maluku Utara (Ternate, Tidore, Moti dan Makian). Hasil utama pohon ini adalah kuncup bunga yang belum mekar. Setelah dikeringkan kuncup bunga itu digunakan sebagai bumbu masakan dan minuman. Bahkan dalam pengobatan dengan fungsi sebagai penghilang kembung, perangsang, maupun anti kejang. Minyak berasal dari daun cengkeh juga banyak di manfaatkan dalam industri farmasi atau parfum[17].

Cengkeh mulai di anggap bernilai dan dengan demikian mulai di pelihara sekurang-kurangnya beberapa ribu tahun lampau, tapi hanya beberapa abad terakhir saja pembudidayaannya terdokumentasi. Cengkeh telah dikenal pada zaman klasik. Cengkeh di masukan melalui teluk Persia dan Mesir, Yunani dan Romawi Kuno[18]. Saudagar-saudagar Venesia dan Genoa menyalurkannya ke seluruh Eropa paa abad pertengahan. Pulau-pulau tempat asalnya yang nama dan lokasinya sama sekali tidak diketahui orang Eropa, memperoleh makna yang sama sekali tidak seimbang dengan ukuran dan jumlah peduduknya. Cengkeh memang tumbuh di pulau-pulau lain, tetapi cengkeh yang unggul datangnya dari Ternate, Tidore dan tiga pulau di dekatnya, yakni Moti, Bacan dan Makian, yang sejauh tercatat dalam buku, baru di huni manusia sekitar tahun 1250[19]. Namun agaknya pengumpul cengkeh telah mendatangani pulau-pulau itu seribu tahun sebulumnya.

Pohon cengkeh banyak dahannya dan bungannya tidak sedikit, yang kemudian menjadi buah-buah yang di namakan *cloves* karena bentuk mirip *claws*, 'cakar'. Cengkeh tumbuh seperti bunga *Mirtle.* Dahan cengkeh yang paling unjung banyak di gunakan baik untuk memasak daging maupun untuk meramu obat. Penduduk Pulau Jawa suka menggunakan buah cengkeh berwarna kelabu yang menggantung di pohon selama setahun penuh (atau lebih). Dan tidak memakan buah jantannya. Sewaktu masih hijau, cengkeh lazimnya dibubuhi garam dan cuka, dan ada orang yang memberinya gula, dan membuatnya sangat enak di makan. Air cengkeh hijau yang disuling harum baunya, dan menguatkan jantung, yang sakit cacar menjadi berkeringat dengan cengkeh, pala, bunga pala, dan cabai hitam. Ada lagi orang yang menaburkan serbuk cengkeh di kepala orang yang sakit selesma.[20]

---

[248] Z Leirissa, et. al., *Ternate Sebagai Bandar Jalur Sutra*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan okumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Nasional, Depdikbud, RI, 1999) hlm. 2.

[17] Jusuf Abdulrahman, *Kesultanan Ternate Dalam Jou Ngon Ka Dada Madopo Fangare Ngona Ka Alam Madiki*, (Manado: Media Pustaka), 2002. Hlm. 39.

[18] I Gde Parimartha, *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1816-1915*, (Jakarta: Penebit Djambatan:2002). hlm 78

[19] Jusuf Abdulrahman,*op.,cit*. Hal 21

[20] Clercq,F.S.A. *Bijdngen tot de Kennmis der Residentie Ternate*. (Leiden: Brill. 1820). Hal 33

Cengkeh memperkuat hati, tenggorakan, jantung, dan melancarkan pencernaan. Selain itu cengkeh memudahkan keluarnya air seni, dan menghentikan mencret-mencret, dan bila di taruh di mata, dapat memelihara penglihatan, dan apabila di campur dengan susu, akan mendatangkan gairah.[21]

Beberapa ahli berpendapat bahwa produk tanaman yang termasuk dalam suku *Myrtaceae* ini telah di kenal sebagai rempah-rempah dan bahan pemeliharaan gigi sejak 220 SM. Adapun berasarkan hasil ekskavasi atas kubur-kubur *merovingiennes,* diketahui untuk pertama kalinya cengkeh muncul di Eropa pada abad ke-6.[22] Namun, pada abad berikutnya, Eropa mengalami kesulitan untuk memperoleh produk eksotik itu karena jalur darat caravan/kavilah pembawanya terputus akibat serangan orang Arab dan Turki.

Jan Huygen van Linschoten, pelaut Belanda kenamaan yang berlayar dengan orang-orang Protugis dan mempelajari serta membeberkan rahasia-rahasia mereka dari segi navigasi, menulis dengan gaya liris tentang keindahan pohon penghasil rempah-rempah dan keajaiban buah itu, daya sembuh dan daya perangsangnya yang meyakinkan konsumen bahwa harga tinggi itu bukan masalah.[23]

Cengkeh yang dikenal sebagai bahan rempah-rempah dalam banyak hal dapat dipakai sebagai ramuan obat-obatan tradisional, dipakai sebagai bumbu masak (laut pauk maupun kue). Apabila berada di kebun cengkehnya (lebih-lebih menjelang dan saat panen), petani cengkeh menggosok pucuk-pucuk daun yang muda pada bagian badan yang terluka untuk menolak/melawan sengatan serangga dan sejenisnya[24].

Pada zaman dinasti Han di Cina, cengkeh digunakan para hakim untuk melegakan tenggorokan sebelum mengucapkan putusan atau menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa. Para punggawa juga diharuskan mengunyah cengkeh untuk mengharumkan suasana audensi mereka atau ketika menghadap kaisar untuk menerimah titah, supaya mereka dapat lancer bisa berbicara dengan suara yang bagus dan lancer. *History of the Dynasty* (618-906) adalah sumber Cina yang pertama kali menyinggung keberadaan cengkehnya. Sumber ini memperkenalkan cengkeh melalui nama *Mi Li-Ku,* dan itu dihubungkan dengan upaya menerangkan letak Pulau Bali. [25]] Nama ini tidak terdengar lagi hingga abad ke-16, ketika *History of the Ming Dynasty* menyebutkan tentang kepulauan penghasil cengkeh itu serta kedatangan sejumlah besar saudagar Cina untuk berdagang ke sana[26].

---

[21] A.M. Beretta , *Halmahera and Morotai,* (Batavia: Javasche Boekhandel, 1917). Hal 30

[22] Jusuf Abdulrahman, *op.,cit*. Hal 10

[23] Andaya, Leonard Y. *The Wold of Maluku Eastem lndonesia in the Early Moden Period*, (Honolulu: University of Hawai Press). 1993, hlm. 29

[24] M. Adnan Amal *Op., Cit.* hlm. 120.

[25] Hanna Willard A dan Des Alwi, *Ternate dan Tidore Masa Lalu Penuh Gejolak*, (Jakarta: Sinar Harapan), 1996. Hal 44.

[26] Jusuf Abdulrahman, et al., *Ternate Bandar Jalur Sutra*, (Jakarta:LlTS). 2001. Hal 40

Ahli Geografi Cina, Wang Ta-Yuan, mengatakan bahwa perahu-perahu Cina dengan teratur mengunjungi Maluku pada tahun 1340-an untuk mengangkut sejumlah kecil cengkeh: "Pohon ini terhampar di perbukitan meksipun tidak terlalu banyak yang memberikan hasil pada saat yang bersamaan. "ini sama dengan apa yang diceritakan oleh orang-orang Ternate kepada orang Protugis bahwa nenek moyang mereka pertama kali mengetahui nilai cengkeh ari orang Cina, yang perahunya datang dari utara, untuk pertama kalinya menginjak kepulauan itu. Lalu orang Jawa dan orang melayu mengikutinya, berlayar dari selatan, dan orang Cina itu tidak datang lagi[27].

Sebuah laporan terperinci membantu mengkonfirmasikan adanya pergeseran, yaitu dari pembelian cengkeh langsung oleh orang Cina di Maluku ke permintaan orang Cina melalui perantaraan pedagang Melayu dan Jawa. Mengingat betapa besarnya bantuan para migrant Cina kepada perdagangan Indonesia tidak mengherankan jika orang-orang Melayu dan Jawa itu sendiri sebagian adalah keturunan Cina[28].

Ekspor rempah-rempah Maluku ke Cina dan Eropa tiba-tiba melonjak sekitar tahun 1400 dan dengan pelan meluas selama abad ke-15. Meksipun Tom Pires mengunjungi Kepulauan Maluku, ia memperoleh informasi bahwa sekitar tahun 1500 pohon cengkeh telah tumbuh menjadi liar dan tidak diperhatikan di pedalaman di Pulau Bacan tetapi segera dibudidayakan dan dikembangkan di sana[29].

Walaupun demikian, perkiraan perdagangan orang Portugis di Malaka juga menunjukan bahwa ekspor cengkeh meningkat menjadi sangat tinggi justru sebelum Portugis jatuh, keadaan yang di Inonesia Timur tidak pernah terjadi sampai tahun 1512. Sejak saat itu agaknya Maluku mampu memenuhi kebutuhan dunia akan cengkeh dan pala[30]. Peperangan dan perompakan di sepanjang jalur perdaganganlah yang menyebabkan variasi yang besar itu. Antonio Pigafetta, telah mengunjungi salah satu pulau penghasil cengkeh yang tertua, Tidore, dan ia mengetahui sampai saat kedatangan orang Islam di Ternate dan Tidore, yang diperkirakannya sekitar tahun 1470, orang Maluku tidak peduli terhadap cengkeh. Cengkeh mempunyai beberapa nama sesuai dengan bahasa setempat. Di Ternate, pada awal cengkeh disebut *gaumedi,* di Tidore *gomode,* di Makian Luar *ada*, di Makian Dalam *odai,* di Malaka *chiance,* dan di Seranghani *bunga lawa.* Penanaman ini di pakai orang Ternate hingga sekarang oleh pengaruh perdagangan[31].

Pada abad 16, kehadiran bangsa Portugis dan Spanyol di Ternate. Kehadiran kedua bangsa didaerah ini, paling tidak memeliki dua motif. Yang

---

[27] Abdul Hamid Hasan, *Op., cit.* Hal 34

[28] Edward L. Poelinggomang, Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makasar Pada Abad ke-19, (Amsterdam: Academisch Proefschrieft de Vrije Universiteit te Amsterdam, 1991). Hal 46

[29] Jusuf Abdulrahman et al., *op., cit*. Hal 55.

[30] Rustam Hasim, *Dari Cengkeh Ke Kerang Mutiara*: *Perdagangan Di Karesidenan Ternate 1854-1930*. (Ternate: LepKhair), 2013. Hal. 50.

[31]. L. Rajiloen, *Daratan Tinggi Foramadiahi adalah Temate Awal ke Dataran Rendah Limau Jore-Jore Sebagai Ternate Akhir*. (Jakarta: Depdikbud, 1982). Hal 51

pertama adalah faktor politik, yakni tekanan Islam, yang terjalin erat dengan tradisi perang salib, dengan maksud menciptakan lingkaran persekutuan negara-negera Kristen dan para penganutnya[32]. Sedang yang kedua adalah faktor komersial, suatu motif yang dirasa sangat mendesak bagi ekspansinya untuk mendapatkan secara langsung pasokan berbagai mata dagangan, terutama remapah-rempah yang memeliki nilai komersial tinggi di Eropa[33]. Sebagai perbandingan, harga cengkih pada abad ke-16 dipasaran lokal dan internasional dapat dikemukakan; cengkih I *bahar* (456 1b) di pasaran lokal seharga 1 sampai 2 ducat. Di Malaka 1 *bahar* bisa berharga 10-14 ducat. Semantera di Calcutta sekitar 500 hinga 600 fanam (1 fanam 1 real), dan untuk cengkih kualitas utama seharga 70 fanam. Pada tahun 1600, 10 pon cengkih di Maluku seharga setengah penny per pon bila dijual di Eropa, akan menghasilkan keuntungan sebesar 32.000 persen[34].

Memasuki dekade pertama abad ke- 16 Ternate melakukan kontak dagang dengan bangsa Eropa adalah Spanyol dan Portugis yang menjadi *super pawer* yang saling bersaing pada masa itu. Kemudian di susul Belanda dan Inggris pada abad ke- XVII-XVIII. Bagi bangsa Eropa sendiri, paling tidak ada dua motif dasar yang mengerakan mereka untuk menuju kebelahan bagian timur. Yang pertama adalah faktor politik, sedangkan yang kedua adalah faktor komersial, terutama rempah-rempah yang diangap punya nilai komersial tinggi di Eropa[249].

Faktor inilah mendorong para pedagang dari berbagai negara atau dari penjuru dunia berdatangan ke wilayah ini untuk menukar hasil produksi mereka dengan rempah-rempah maka terjalin hubungan niaga antar pusat-pusat perdagangan. Hal ini bukan hanya didasarkan atas kenyataan bahwa kegiatan perdagangan berkitan erat dengan interaksi antara seseorang dengan yang lainya atau antara kelompok dalam kegiatan tukar –menukar barang dan jasa, tetapi juga percaturan ekonomi yang kuat antara kelompok dan bangsa dalam menguasai sumber ekonomi. Semua itu menjadi lancar manakala dipadu dengan restu yang diberikan monarki dan tata kerajaan di Eropa yang tidak segan-segan ikut membiayai dan mengorganisirnya[250]. Hal ini dibuktikan sejak kehadiran Portugis 1512-1612

---

[32] Joko Suryo, *op., cit.* hlm. 113

[33] Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya.* (Jakarta:Centra Pustaka Utama. 1999) hlm 14.

[34] Paramita R. Abdurachman, *op., cit.* Hal 18

[249] Sebagaimana diketahui cengkeh mempunyai banyak kegunaan antara lain sebagai bumbu penyedap masakan, untuk pengobatan, stimulasi selera makan dan sebagai parfum, serta bubuk cengkih dipakai sebagai obat hirup yang biasanya merupakan asesori kalangan menengah keatas, bahkan mereka percaya bahwa cengkih dapat meningkatkan kemampuan seksual manusia. Lebih jauh lihat, Adnan Amal, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah Jilid I 1250-1800*,(Ternate.Unkhair).

[250] Joko Suryo, et al., *Agama dan Perubahan Sosial Studi Tentang Hubungan Antar Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik,* (Yogyakarta UGM LKPSM,2001), hlm.113.

kawasan Maluku termasuk claimmnya sesuai dengan perjanjian Tordesillas[251]. karena itu laut Maluku merupakan laut tertutup bagi bangsa lain[5].

Akan tetapi keberadaan mereka di Ternate tidak berlangsung lama (1512-1575). Sesuai dengan semangat *glory,gospel and glory*, mereka juga berusaha untuk menyebarkan agama Katholik Roma dengan mengganti agama Islam yang telah lama dianut oleh keluarga kerajaan. Puncaknya adalah terbunuhnya sultan Khairun oleh Gobernandor Lopez de Mosquito. Hal ini membuat marah para penguasa kesultanan, dan menyatakan perang dan pengusiran terhadap bangsa Portugis di wilayah Maluku pada tahun 1575, dibahwa pimpinan Sultan Baabulah[6].

B. Kesultanan Ternate dalam Pengawasan Belanda

Pada abad 16, Ternate telah menjadi pusat perhatian para pedagang internasional di jalur pelayaraan dan perdagangan Indonesia Bagian Timur. Daya tarik utama Maluku, termasuk Ternate, bagi pedagang antar-bangsa itu adalah rempah-rempah (cengkeh dan pala). Bangsa-bangsa Barat bahkan menjuluki Maluku sebagai *The Spice Island* (kepulauan rempah-rempah). Pada waktu itu, negara-negara Eropa (Portugis, Spanyol, dan Belanda) telah mengetahui nilai ekonomis dari tanaman cengkeh,[252] sehingga mendorong mereka melakukan ekspansi untuk menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah di Maluku.

Tahun 1599 merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah Ternate. Pada tahun itu, Sultan Said Barakati (1584-1610) menjalin hubungan dagang dengan bangsa Belanda yang dipimpin Kapten Wijbrant van Warwijk ketika mengunjungi Ternate.[253] Dalam kunjungan tersebut, Sultan Said Barakati meminta agar Belanda

---

[251] Traktat Tordesillas (1493) perjanjian ini pada prinsipnya membagi dunia dalam dua bagian, Amerika dan sekitarnya berada dibawah kekuasaaan Spanyol, dan Asia untuk Portugis. Lebih jelas lihat Adnan Amal, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah Jilid I,*Ternate.Unkhair dan R.Z Leirissa, et. al., *Ternate Sebagai Bandar Jalur Sutra,* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Diroktorat Sejarah dan Nilai Nasional, Depdikbud, RI, 1999)

[5] Paramita Abdurahman (Maluku, Portugal dan Spanyol: Hubungan Antara Kerajaan Maluku Dengan Kerajaan Portugal dan Spanyol Dalam Abad XVI dan XVII Sebagaimana Tersirat Dalam Surat-Surat dan Dokumen Resmi) dalam E.K.M Masinambow (Ed) *Halamahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk: Studi Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi*. (Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI). hlm. 252

[6] Adnan Amal, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah Jilid I 1250-1800,*(Ternate.Unkhair). hlm. 64.

[252]Orang Maluku memanfaatkan cengkeh sebagai obat, bumbu penyedap masakan, bahan maupun pengawet makanan. Orang Cina mengunakan cengkeh untuk pengobatan dan dipercaya dapat meningkatkan kemampuan seksual manusia serta digunakan untuk stimulasi selera makan. Di Eropa, selain untuk pengobatan dan penyedap masakan, cengkeh juga juga digunakan sebagai parfum. Bubuk cengkeh dipakai sebagai obat hirup yang biasanya merupakan asesori kalangan menengah ke atas. Lebih jelasnya lihat Crafton R.H, *A Peagent of Spice Island,* (London: John Bale dan Sons, 1946), hlm. 43.

[253]Orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kaki di Ternate adalah Kapten Wijbrant van Warwijk. Ia tiba di Ternate tanggal 22 Mei 1599 bersama 560 awak dengan menggunakan dua kapal layar, Amsterdam dan Utrech. Kedatangannya adalah untuk memenuhi undangan Sultan Said Barakati yang ditujukan ke atasan van Warwijk Laksamana Jacob Cornelis van Neck. Hubungan

meninggalkan tenaga kerja untuk menimbun cengkeh yang sewaktu-waktu dapat diambil jika ke Ternate. Sultan Said juga mengajak Belanda memerangi pedagang asing, khusunya Spanyol dan Portugis.

Selama berada di Ternate, Belanda memanfaatkan situasi memburuknya hubungan antara Ternate dan Tidore. Kedua wilayah itu sedang bersitegang akibat persaingan menegakkan dominasi. Situasi ini diperparah dengan keterlibatan orang-orang Belanda dan Spanyol. Belanda mendukung Ternate[254] dan Spanyol membantu Tidore. Dukungan Belanda itu berujung imbalan berupa konsesi yang terkait dua hal. *Pertama*, monopoli dalam pembelian rempah-rempah dan penyediaan lahan. *Kedua*, izin untuk tinggal permanen dalam bentuk fasilitas pembangunan benteng atau loji. Periode tersebut menjadi babak baru bagi Ternate dalam kekuasaan Belanda.

Setelah memperoleh izin pembelian rempah-rempah dan mendirikan benteng di Pulau Ternate, tetapi pelaksanaan pemerintahan secara resmi baru dimulai setelah terbentuknya *Landvoogdij der Moluksche Eilanden* dengan diangkatnya gubernur pertama, Paulus van Carden, tahun 1610.[255] VOC kemudian fokus untuk memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah. Untuk mempertahankan monopoli perdagangan cengkeh di Ternate, VOC membuat perjanjian kerja-sama dengan Sultan Mudafar (1610-1627) yang isinya sebagai berikut:

1. VOC memperoleh monopoli produksi rempah-rempah, yaitu rempah-rempah dijual kepada VOC.

---

antara van Neck dengan Said Barakati dimulai ketika mereka berjumpa di Ambon. Pada waktu itu van Neck sedang mengadakan kontak dagang dengan penguasa Hitu serta berdagang tembakau tahun 1599. Sultan Said tertarik dengan kedatangan Belanda yang dipimpin van Neck dan melihat kemungkinan untuk mengajak rombongan van Neck sebagai sekutu militer sekaligus mitra dagangnya. Maka Sultan Said kemudian mengundang van Neck untuk mengunjungi Ternate. Dalam rangka memenuhi undangan tersebut, maka van Neck mengutus van Warwijk untuk mewakilinya mengungjungi Ternate. Lihat R.Z. Leirissa, *Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra.* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999), hlm. 64-65.

[254]Sebelum kehadiran Belanda di Ternate tahun 1599, hubungan antara Kesultanan Ternate dengan bangsa Portugis telah terjalin pada masa kepemimpinan Sultan Tabariji (1535-1570). Namun hubungan ini tidak berlangsung lama. Perselisihan mulai muncul ketika orang Portugis, selain berdagang dan menyiarkan agama, juga mencampuri urusan politik kesultanan. Hubungan ini semakin memanas pada masa kepemimpinan Sultan Khairun (1537-1570) yang mengambil kebijakan memutuskan hubungan dagang dengan Portugis dan meminta mereka meningalkan Ternate. Namun orang-orang Portugis tidak bersedia memenuhi tuntutan Sultan Khairun. Puncak ketegangan terjadi ketika Sultan Khairun terbunuh di benteng Portugis. Peristiwa itu memicu kemarahan orang-orang Ternate yang bangkit mengepung benteng Portugis dibawah putra Sultan Khairun, Babullah. Akibatnya, pada tahun 1575, orang-orang Portugis mengirimkan utusan menghadap Sultan Babullah agar diperkenankan meninggalkan benteng dan pindah ke pulau lain. Sultan Babullah mengijinkan dan sejak itu, orang-orang Portugis meninggalkan Ternate. Lihat Harto Juwono dan Yosephine Hutagalung, *Sejarah Kerajaan Gorontalo.* (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 48-49.

[255]VOC memandang Ternate sebagai wilayah yang sangat potensial. Sehingga sejak tahun 1612 sampai 1616, terdapat tiga Gubernur Jenderal yang pernah bermarkas di Ternate, yaitu Pieter Both, Gerard Reynst, dan Laurens Real. Setelah Jan Pieterzoon Coen menjabat Gubernur Jenderal, ia memindahkan markas VOC ke Batavia pada tahun 1616. Adnan Amal dan Irza Arnita Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800-1950*, jilid 2. (Unkhair: Ternate, 2003), hlm. 72-73.

2. Barang-barang impor maupun ekspor dipegang langsung oleh VOC.
3. Hanya kapal-kapal VOC yang boleh mengangkut barang-barang import maupun eksport.[256]

Sejak memonopoli produksi dan perdagangan rempah-rempah di wilayah Kesultanan Ternate, VOC mulai bersahabat, berkerjasama, dan bersedia memberi bantuan, baik keuangan maupun militer kepada Kesultanan Ternate. Sikap sultan dan bangsawan Ternate yang kooperatif tersebut bersedia kehilangan pendapatan dari perdagangan rempah-rempah di wilayah mereka membuat VOC memberikan uang imbalan yang disebut *recognitiepenneingen* ke sultan dan para bangsawan.[257] Dengan pembayaran subsidi atau tunjangan tahunan tersebut, para sultan tidak diizinkan lagi melakukan perniagaan rempah-rempah.

Apa yang dilakukan sultan ke-28 itu, dalam membangun kerja-sama ekonomi dan politik dengan VOC, ternyata dalam perkembangannya diikuti pula oleh sultan-sultan berikutnya. Seperti Sultan Mandarsah (1628-1648) yang membuat perjanjian dengan Gubernur Jenderal Karel Reineerszoon tanggal 31 Januari 1652. Perjanjian itu menyebutkan bahwa Kesultanan Ternate sepakat melepaskan daerah Ambon untuk VOC. Lalu Sultan Muhammad Nurul Islam (1675-1691) juga melakukan perjanjian dengan VOC pada tahun 1683. Sultan Muhammad Nurul –yang secara formal memegang kekuasaan atas Seram Barat, termasuk Luhu, Kambelo, Lusidi, Hitu, dan Maluku Selatan setuju menyerahkan kekuasaan atas daerah tersebut ke VOC. Kebijakan itu membuat Sultan Muhammad Nurul diberi gelar Sultan *Si Bori Amsterdam* (Si Emas dari Belanda). Sejak saat itu, VOC dapat lebih jauh mencampuri urusan politik internal istana Kesultanan Ternate, termasuk pengangkatan para sultan.

Memasuki awal abad 19, setelah Hindia Belanda kembali mengambil-alih Indonesia dari tangan Inggris berdasarkan Konvensi London 1814, pemerintah Hindia Belanda melakukan perubahan struktur pemerintahan di Maluku. Jika sebelumnya Maluku sebagai *Landvoogdij der Moluksche Eilanden* terdiri dari Karesidenan Ternate dan Manado yang berkedudukan di Ternate, dihapus dan dibentuk *Gouvernement der Moluksche Eilanden* (Pemerintahan Kepulauan Maluku), yang terdiri dari Karesidenan Ternate, dan Banda berpusat di Ambon.[258] Alasan pemindahan pemerintahan ini, agar Pemerintah Hindia Belanda dapat

---

[256] Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: dari Emporium Sampai ke Imperium, jilid I.* (Jakarta; Gramedia, 1987), hlm. 176.

[257]Pada dasarnya, pihak yang pertama-tama berhak atas uang imbalan ini adalah para sultan Ternate, Tidore, dan Bacan. Selain sultan adalah para bangsawan yang berfungsi dalam kerajaan serta para *sangaji* di pusat-pusat kerajaan tersebut. Sultan Ternate mendapat 9. 600 ringgit setiap tahun, bangsawan *(bobato dunia)* 1.200 ringgit, penguasa distrik Pulau Moti dan Makian, 300 ringgit dan 4.000 ringgit, Sultan Tidore 1.200 ringgit, dan para bangsawan 1.600 ringgit. Sementara beberapa *sangaji* didistrik Weda 50 ringgit dan para pembantunya *(kimalayha)* 25 ringgit. Distrik Maba 100 ringgit dan 250 untuk 10 pembantunya (*kimalayha*) serta distrik Patani 3.724 ringgit. Selain uang penganti tersebut, mereka juga mendapatkan hadiah-hadiah berupa bahan makanan dan minuman (*recognitiepenningen*). Mvo Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo Seri 2, rel nomer 26 Arsip Nasional RI Jakarta, hlm. 69

[258]*Kolonial Verslag* tahun 1884-1885.(Jakarta: ANRI), hlm. 23

menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku bagian selatan, sekaligus menguasai daerah-daerah koloni yang baru. Dalam rangka mengokohkan hegemoninnya, pada tanggal 27 Mei 1824, Gubernur Jenderal Baron van der Capellen mengunjungi Ternate dan Tidore. Dalam kunjungan tersebut, disepakati beberapa perjanjian oleh Sultan Ternate Muhammad Zan dan Sultan Tidore Ahmadul Mansur dengan Gubernur Jenderal van der Capellen, sebagai berikut.[259]

1. Pemerintah Hindia Belanda menjalin persahabatan dengan Kesultanan Ternate dan Tidore.
2. Kesultanan Ternate dan Tidore mengakui hak gubernemen atas beberapa daerah di sebarang lautan (Buru dan Seram Timur) dan berjanji membantu gubernemen bila terjadi perang serta kawula kesultanannya tidak akan menjadi kawula atau rakyat kerajaan asing.
3. Kedua kesultanan tidak akan membuat perserikatan apapun dengan kekuasaan lain tanpa seizin gubernemen dan segala perselisihan antara keduannya atau antara kawula kesultanan keduannya akan dilaporkan ke gubernemen.
4. Kedua kesultanan mengakui hak gubernemen menempatkan pegawainnya di daerah kekuasaanya atau mendirikan bangunan perkantoran atau perumahan yang akan dipilih sendiri oleh gubernemen.
5. Orang Eropa atau bangsa Eropa lainnya, orang Cina, Makassar, atau orang asing lain, berada di bawah kewenangan gubernemen. Pihak kesultanan tidak boleh memberikan izin tempat tinggal di wilayah kesultanan tanpa izin khusus dari gubernemen.
6. Pemilik perkebunan rempah-rempah wajib menjaga produk yang dihasilkannnya dan hanya boleh dijual ke gubernemen. Para sultan mewajibkan para produsen rempah-rempah untuk memelihara pohon-pohon mereka sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Perjanjian tersebut membuat penguasa kedua kesultanan itu menjadi perpanjangan tangan dari Gubernur Belanda. Sejak saat itu, pengangkatan para sultan Ternate lebih didominasi kehendak dan pilihan Belanda. Sultan tidak lagi dipilih oleh *Bobato bobato nyagimoi setufkange*[260] (dewan delapan belas) dan *Gam Raha* (legislatif). Hal ini sebagaimana di kemukakan Tobias: "Pergantian sultan terpergantung dari pilihan gubernemen dalam menetapkan syarat-syarat tertentu bagi calon sultan yang mana dalam hal ini tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dahulu dan terikat pada adat istiadat, akan tetapi pilihan itu tergantung dari banyak sedikitnya kesanggupan keturunan raja yang dianggap layak."[261]

---

[259]M. Shaleh A. Putuhena, *Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam*, dalam E.K.M Masinambow (Ed.), *Halamahera dan Raja Ampat sebagai Kesatuan Majemuk: Studi Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi*, (Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI), hlm. 315-316.

[260]Muridan S. Widjojo, *Cross Cultur Aliance Making and Lokal Risistence in Maluku During the Revolt of Prince Nuku 1780- 1810*. (Disertasi, Universiteit Leiden, 2007), hlm. 26-27.

[261]Tobias, *op, cit*., hlm. 23.

Pengangkatan seorang sultan harus mendapat pertimbangan residen dan harus memenuhi beberapa kriteria. *Pertama*, calon sultan seorang anak bangsawan yang mempunyai seorang ibu terhormat atau bangsawan pula. Calon sultan hendaknya seorang yang bijaksana, berani, dan tanpa cacat. Kedua, calon sultan yang diangkat sudah menunjukkan kesetiaan terhadap pemerintah Belanda dan mempunyai karakter terpuji. *Ketiga*, menandatangani pernyataan tertulis yang isinya mengakui serta tunduk kepada kekuasaan Belanda. *Keempat*, dipandang cakap dalam mengendalikan pemerintahan. Apabila sultan meninggal dunia, maka sultan yang dipilih oleh *bobato nyagimoi setufkange* (dewan delapan belas) dan *Gam Raha* harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari residen.[262]

Untuk memantapkan kekerabatan dalam hubungan pemerintahan dengan para sultan Ternate, sultan diperlakukan sebagai anak wakil Pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini residen. Jadi sultan wajib menyebut bapak kepada residen Belanda dan kakek kepada Gubernur Belanda.[263] Sejak itulah Belanda mempunyai pengaruh terhadap Kesultanan Ternate dan banyak melakukan campur tangan dalam urusan pemilihan sultan.

Janji setia calon sultan Ternate ke Belanda terlihat ketika Sultan Tadjul Mahful Bijanatillah Lhanan Sirajul Mulki Amirudin Iskandar Munawarusadik Wahoewa Manaladdin Syah Putra Anhar (1859-1876) dilantik sebagai Sultan Ternate ke-44. Seperti dikisahkan Tobias sebagai berikut:

> "Saya akan tetap tunduk dan setia kepada Ratu Belanda dan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai wakil ratu di wilayah ini dan Kerajaan Ternate akan saya titipkan dan demikian saya menerima dengan segala khidmat, kerajinan, dan penuh perhatian untuk memenuhi perintah yang dikeluarkan dari pemerintah Hindia Belanda mengenai persoalan yang tidak muncul dalam kesepakatan ini, agar disesuaikan dengan tuntutan masa sekarang dan selanjutnya, saya akan berusaha keras agar tetap bertindak sebagai raja atau sultan dan penguasa yang diangkat secara penuh hormat dan kepercayaan. Pernyataan ini saya buat dengan sumpah, diberi cap dan tandatanggan di depan Residen Ternate Owen Mauirts de Munninck, dan disaksikan oleh bangsawan Bunga (*jogugu/*perdana menteri), Abdul Aji (*soseba*/sekertaris), Mahdum (*kadh/*imam kesultanan), dan Muhadim (*hokum soa-sio/*menteri dalam negeri)[264].

Meski sultan menjadi hak turun-temurun bagi keluarga bangsawan, tetapi penunjukan seorang sultan bukan lagi menjadi hak mutlak para anggota dewan kerajaan yang berasal dari *bobato nyagimoi setufkange* (dewan delapan belas) dan *Gam Raha*, melainkan kewenangan Belanda. Dengan demikian, para elite kehilangan pengaruh dan kontrol atas institusi politik dan birokrasi di daerah-daerah

---

[262]*Memorie van overgave*k.a. James Residentie van Ternate En Onderhoorigheden. (Jakarta: ANRI), hlm. 9.

[263]Bossher, *op, cit.*, hlm. 7.

[264]L. E. Visser, (ed), *Halmahera and Beyond, Social Science Research in The Moluccas.* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 32-33.

kekuasaannya. Sejak saat itu, pemerintah Hindia Belanda memegang kontrol penuh terhadap kekuasaan para elite Kesultanan Ternate sekaligus mengganti sistem birokrasi tradisional yang bersandar pada garis keturunan ke birokrasi modern. Hal ini menyebabkan merosotnya peran dan fungsi beberapa pejabat kerajaan *Bobato Madopolo* (Dewan Menteri) seperti *Jogugu* (Perdana Menteri), *Kapita Lao* (Menteri Pertahanan dan Keamanan) dan *Hukum Sangaji* (Hakim Agung) dalam hubungan kewenanganya dalam Kesultanan Ternate.[265]

Sebelum kedatangan bangsa Belanda, keberadaan *Jogugu* mengatur segala sesuatu dan mempunyai wewenang yang sangat luas. Ia seperti wali sang raja dan lebih ditakuti serta ditaati daripada raja sendiri. Karena itu, menurut Clercq, jabatan ini mereka sebut *Kolano Magugu* yang berarti orang yang memegang raja dan kerajaan di tangannya. Akan tetapi, memasuki abad 18 ketika Kesultanan Ternate tunduk pada kekuasaan politik pemerintah kolonial Belanda akibat konsesi-konsesi politik yang diberikan sultan kepada Belanda. *Jogugu* tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar dan sering disaingi oleh *Kapita Lao.*[266]

Menguatnya *Kapita Lao* dan surutnya kekuasaan *Jogugu* sangat erat kaitannya dengan politik Belanda yang lebih senang mendukung sultan secara langsung daripada pembantunya, *Jogugu*. Menurut Shaleh Putuhena, Belanda sering berkerja-sama dengan Ternate dalam bidang militer dengan membantu memimpin ekspedisi militer melakukan penebangan pohon cengkeh (*hongi tochten*) pada tahun 1728-1790. Ekspedisi tersebut dipimpin langsung *Kapita Lao*.[267] Sebagai panglima perang, *Kapita Lao* bertugas memimpin pasukan untuk menaklukan daerah lain atau memadamkan pemberontakan dalam negeri. Hal ini sebagaimana dilakukan *Kapita Lao* Ali yang berjaya pada masa Sultan Hamzah (1627-1648) dan Sultan Mandarsyah (1648-1675).

Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, *Kapita Lao* harus dijabat oleh anggota keluarga sultan. Hal itu disebabkan *Kapita Lao* bertugas menjaga keselamatan sultan dan juga mendapat kesempatan untuk menjadi sultan. Namun dalam perkembangannya, memasuki abad 19 sebagaimana dilaporkan Residen Bossher— peranan *Jogugu* dan *Kapita Lao* makin berkurang. Para pejabat tersebut hanya sekedar pelaksana dari kehendak sultan. Seiring berakhirnya kebijakan *extirpatie* dan *hongi tochten* oleh pemerintah Belanda, maka fungsi *Kapita Lao* tidak lagi memimpin perjalanan perang dan tugasnya lebih sering diserahkan ke pejabat lain.[268]

Hal yang sama juga dialami pejabat *Hukum Sangaji*. Jika pada masa permulaan, pejabat ini hanya tinggal di istana sebagai petugas administrasi dan hakim serta menerima para pengunjung serta melakukan perjanjian-perjanjian, maka pada periode itu peranan digantikan oleh sekertaris. Hal ini dapat dimengerti karena mekanisme pemerintahan makin birokratis dan makin penting hubungan tertulis

[265] R.Z. Leirissa, *op.cit*, hlm. 54.
[266] de Clercq, *op. cit.*,hlm. 72.
[267] Shaleh Putuhena, *op. cit.,* hlm. 184.
[268] Bossher, *op. cit.*, hlm. 12-13.

dengan Belanda.[269] Jika pada abad sebelumnya, peran utama dalam kesultanan dipegang *Hukum Sangaji* sebagai petugas administrasi dan hakim, maka pada abad ini peranan utama dalam jalur politik ditangani oleh sekertaris. Munculnya jabatan sekertaris pada abad 19 sangat berhubungan dengan perannya sebagai adiministrator atau juru tulis antara sultan dengan Belanda. Hal ini dibuktikan pada masa pemerintahan Muhammad Arsad (1859-1862) sebanyak 48 perjanjian dan surat antara sultan dan pemerintah Belanda dalam tulisan Jawi dan bahasa Melayu.[270] Dengan demikian begitu pentingnya peran sekertaris pada periode tersebut.

Dengan membiarkan pemerintah kolonial Belanda mencampuri urusan-urusan politik dan pemerintahan serta mendapatkan hak untuk melantik dan memberhentikan sultan, berakibat timbulnya perubahan sikap rakyat terhadap sultan. Sultan di mata rakyat tidak lagi dianggap sebagai pengayom dan kesultanan bukan lagi dianggap sebagai benteng pelindung rakyat. Hal ini memperlebar jarak politik antara masyarakat dengan penyelenggara negara ataupun wakilnya di keraton, sehingga menimbulkan krisis legitimasi. Rakyat di daerah-daerah menjadi resah dan hendak melepaskan diri dari kekuasaan sultan.[271]

Situasi tersebut memicu timbulnya pemberontakan di beberapa daerah pada abad 19 sampai awal abad 20. Halmahera Utara mulai membangkang pada tahun 1840. Pulau Makian sesudah tahun 1846 berusaha melepaskan diri dari sultan Ternate dan lebih suka berada langsung di bawah kekuasaan Belanda.[272] Pemberontakan lalu menjadi lebih mudah terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pusat kontrol kekuasaan Ternate. Sebutlah misalnya pemberontakan di Banggai dan Tobungku tahun 1841-1842. Menyusul pemberontakan Danu Baba Hasan di Halmahera tahun 1876. Pemberontakan Banau di Halmahera Barat (Jailolo) tahun 1914. Pemberontakan-pemberontakan tersebut, sebagaimana dikemukakan Adnan Amal, timbul disebabkan para bangsawan dianggap tidak berfungsi dalam kehidupan politik, sehingga daerah-daerah dengan mudah melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Ternate.[273]

Sementara krisis legitimasi kekuasaan tersebut terjadi akibat campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam banyak hal dengan melangkahi norma-norma politik Kesultanan Ternate yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Sebagai contoh, meredupnya kekuasaan *bobato* sebagai pejabat yang bertugas mengangkat sultan karena dikalahkan oleh kekuasaan Belanda untuk mengangkat figur yang dipandang bisa diajak kerja-sama. Landasan legitimasi kekuasaan tradisional dengan sendirinya mengalami erosi.[274] Berbagai fungsi yang melekat dalam berbagai jabatan atau struktur kenegaraan mengalami pengkerdilan. Kedudukan *Fala Hara* (Hakim

---

[269] Rustam Hasim "Produksi dan Pemasaran Hasil Bumi di Kesultanan Ternate 1882-1930" Jurnal Pendidikan Edukasi, Unkhair. Vol. 3 No. 1 Juli 2006.

[270] Titik Pujiastuti, *Naskah-naskah Kuno Maluku Utara Koleksi Perpustakaan Nasional* dalam Ade Kamaluddin, ed., *Ternate Bandar Jalur Sutra.* (Ternate: Lintas), hlm. 130.

[271] Syahril Muhammad, *Kesultanan Ternate Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik.* (Yogyakarta: Ombak. 2004), hlm. 46.

[272] Clercq F.S.A. de Clercq, *op, cit.*, hlm. 168.

[273] Adnan Amal, *op, cit.*, 2002, hlm. 11-13.

[274] Djoko Suryo, *et. al, op, cit.*, hlm. 139.

Agung), *Sabua Raha* (MPR) dan *bobato nyagimoi se tufkange* (DPR) dipersempit ruang lingkup jangkauan kekuasaannya dan "dipenjara" ke dalam lembaga baru yang disebut Komisi Empat yang diberi label lokal *Komisi Naruha*.[275]

Meski kekuasaan pemerintah Belanda makin kokoh terhadap Kesultanan Ternate, namun Belanda masih tetap mengakui dan menghormati hak-hak sultan atas daerahnya, yang pada abad 19 meliputi Pulau Ternate, Pulau Halmahera, Pulau Sula, Kepulauan Banggai, dan Tobungku di pantai Timur Sulawesi Tengah. Pada periode yang sama, pemerintah Hindia Belanda melakukan perubahan struktur pemerintahan Maluku (reformasi birokrasi). Jika sebelumnya, Maluku terdiri dari Karesidenan Ambon, Banda, Ternate, dan Manado di bawah gubernur yang berkedudukan di Ambon, maka status pemerintahan kepulauan Maluku (*Gouvernement der Moluksche Eilanden*) dihapus. Selanjutnya, menetapkan Ternate, Ambon, Banda, dan Manado sebagai karasidenan mandiri atau otonom dan berada di bawah Gubernur Jenderal, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal No. 2 tanggal 6 Desember 1866 (S.1866 No.139).[276] Sebagai karesidenan mandiri, wilayah Karesidenan Ternate meliputi seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan[277].

Namun dalam perkembangannya, wilayah Karesidenan Ternate, yang mencakup wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan kemudian dibatasi. Keputusan Gubernur Jenderal, No. 19, tertanggal 15 Pebruari 1898 menetapkan bahwa wilayah Karesidenan Ternate hanya meliputi seluruh wilayah Kesultanan Ternate yang dibagi ke dalam delapan daerah *(afdeling)* dan masing-masing *afdeling* dibantu oleh asisten residen yaitu.

1. *Afdeling* Ternate di bawah pemerintahan langsung residen.
2. *Afdeling* Bacan di bawah seorang kontrolir yang berkedudukan dilabuha.
3. *Afdeling* Halmahera bagian utara yang berpusat di Galela, dibantu oleh seorang *bestuur asisten.*
4. A*fdeling* Halmahera bagian Timur dan Selatan dipimpin seorang *posthouder* yang berkedudu*kan* di Patani.
5. *Afdeling* Kepulauan Sula dipimpin seorang *posthouder* yang berkedudukan di Sanana.
6. *Afdeling* Banggai dipimpin seorang *posthouder* yang berkedudukan di Kintang, pantai Timur Sulawesi.
7. *Afdeling* Papua bagian Utara dipimpin seorang *kontolir* di Manokowari.

---

[275]*Ibid.*,hlm. 139.

[276]A. B. Lapian, *op, cit.*, hlm. 1-2.

[277]Wilayah masing-masing kesultanan di Maluku Utara sebagai berikut: *Pertama*, wilayah Kesulatanan Ternate yang terdiri atas Pulau Ternate, Hiri, Makian, Kayoa, Morotai, Halmahera Utara, Barat dan Selatan (khususnya selat Pontiti dan Danuar), Batang Dua, Sula-Taliabu, Mami-Womini, dan Banggai Pantai Timur Sulawesi. *Kedua*, wilayah Kesultanan Tidore, meliputi Pulau Tidore, Maitara, Mare, Halmahera Timur dan Tengah, Sibu, Woda, Rajai, Goratu, Tawin, Joji, Tofango, dan Foya. *Ketiga*, wilayah kesultanan Bacan meliputi Pulau Bacan, Seki, Kasiruta, Tawale Besar, Mandaoli, Obi, Lata-lata, Nusa Raloid dan Gilalang. Lihat Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950,* (Makassar: Nala Cipta Litera, 2007), hlm. 348.

8. *Afdeling* Papua bagian Barat dan Selatan dipimpin seorang *kontolir* yang berpusat di Kepulauan Raja Ampat.[278]

Pemisahan ini didasarkan atas pertimbangan efisiensi pelaksanaan administrasi pemerintahan. Sekaligus juga berarti mengukuhkan kekuasaan penjajah Belanda.

Rangkaian perubahan di atas bukannya terjadi tanpa perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Menurut Djoko Suryo, pada tahun 1914, Sultan Usman Syah (1896-1930) berupaya mengembalikan kekuasaan Ternate dengan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sultan mempolitisir rakyat di wilayah kekuasaannya di Halmahera Barat (Jailolo) untuk memberontak.[279] Sultan Usman Syah akhirnya ditangkap bersama putranya Pangeran Muhammad, yang saat itu menjadi *Kapita Lao* dan diasingkan ke Bandung tahun 1915.[280]

Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 23 September 1915 No. 47, Sultan Usman Syah dicopot dari kedudukannya sebagai Sultan Ternate. Pada saat yang sama, *jogugu* atas nama Kesultanan Ternate menandatanggani perjanjian pendek yang mengakhiri kedaulatan Kesultanan Ternate atas kerajaannya.[281] Sejak periode tahun 1915-1929, tahta Kesultanan Ternate mengalami kekosongan pemerintahan. Seluruh kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan diatur dan ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijalankan oleh *Bobato Madopolo* (dewan meteri) dan *Bobato Nyagomoi se Tufkange* (lembaga legislatif).

Kesultanan Ternate terus mengalami kemerosotan. Posisi sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate sejak tahun 1866 hingga merosot kedudukannya menjadi sebuah *afdeling* pada tahun 1921. Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan tertanggal 16 April 1921, yang menetapkan perubahan status dari keresidenan menjadi *afdeling.*[282]

Perubahan status ini tidak lepas dari upaya pemerintah Hindia Belanda menguasai Ternate dan mengintegrasikan seluruh Kawasan Timur Indonesia ke dalam Propinsi Timur Besar (*Grote* Oost) di bawah seorang gubernur yang

---

[278]Dalam perkembangannya pemerintah Hindia Belanda memisahkan beberapa *afdeling* tersebut dari Karesidenan Ternate. Seperti pemisahan *afdeling* Papua Selatan tahun 1902, sehingga menjadi pemerintahan langsung dan dijalankan seorang asisten residen. Pada tahun 1912, *afdeling* Papua Utara dan Raja Ampat dimasukan ke dalam Karesidenan Maluku Selatan yang berpusat di Ambon. Pada tahun 1907 dilakukan pemisahan *afdeling* Banggai dan digabungkan ke dalam *Gouvernement der Celebes en* Onderhorigheden yang bepusat di Makassar. Lihat Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950,*(Makasar: Nala Cipta Litera, 2007), hlm. 348-349.

[279]Djoko Suryo, *et. al, op, cit.,* hlm. 176-177.

[280]Setahun setelah pengasingan Sultan Usman Syah ke Bandung, Belanda menangkap semua anak laki-lakinya, Ikhtira Jurahman dan Muhamad Nasir. Keduanya juga diasingkan ke Bandung. Mereka dikhawatirkan akan menyulut pemberontakan terhadap Belanda. Lihat Adnan Amal dan Irza Arnyta Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800–1950, Jilid II* (Ternate: Unkhair, 2002), hlm. 285.

[281]*Memori van Overgave* Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksiMvo Seri 2,relnomer 26. (Jakarta: ANRI), hlm. 13.

[282]*Memori van Overgave* Karesidenan Maluku, Residen B.J. Haga, 1930. Mvoseri II E.(Jakarta: ANRI), hlm. 4-5.

berkedudukan di Makassar. Sejak saat itu, pelaksanaan pemerintahan dijalankan langsung oleh Belanda dan bukan di bawah kendali para *Bobato Madopolo* (dewan menteri),hingga dilantiknya sultan ke-47, Sultan Iskandar Djabir Syah, tanggal 2 September 1929.[283]

Sejak Iskandar Djabir Syah dilantik sebagai sultan, pada 1930, Pemerintah Belanda mengeluarkan *Zelf Bestuur Regeling,* yang menetapkan Pembagian Maluku Utara kedalam tiga swapraja, yaitu; Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan.[284] Tiap-tiap kesultanan dibagi dibagi kedalam distrik-distrik, yang dikepalai oleh kepala distrik, dan membawahi onder-distrik. Kepala distrik diangkat dan diberhentikan oleh masing-masing sultan di wilayahnya.

Dengan demikian terdapat dua bentuk pemerintahan yakni, pemerintahan langsung Belanda dan pemerintahan tidak langsung dibawah para sultan dan pembantunnya. Bentuk pemerintahan tersebut berlangsung hingga masuknya tentara pendudukan Jepang. Ketika Jepang memasuki kawasan Maluku Utara tahun 1942, dengan alasan politik Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah memilih bekerja-sama dengan Sekutu (Belanda) ketimbang memihak Jepang.

C. Maluku Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada tahun 1941 tentara Jepang memaklumatkan perang terhadap sekutu. Berkobarlah perang Pasifik di Asia yang merupakan sebagain dari perang dunia II. Deangan sangat cepat tentara Jepang dapat menduduki seluruh Indonesia. Jepang menyebarkan pamflet dengan pesawat terbang sampa ke desa-desa. Dalam pamflet-pamflet dan gambar-gambar yang disebarkan itu berisi antara lain: (1). Jepang akan membebaskan rakyat Asia dari setan-setan orang kulit putih, (2), Jepang akan datang untuk membuang setan-setan, (3).Gambar-gambar yang membuat kebangunan Asia, (4), Gambar-gambar yang melukiskan kedatangan Jepang bukan untuk berperang dengan orang-orang Asia, tetapi datang untuk makan pisang bersama-sama dengan orang Asia, dan (5), Jepang adatang untuk bekerja sama dengan orang-orang Indonesia.[285]

---

[283]Sejak diasingkannya Sultan Usman ke Bandung pada tahun 1915, maka selama 15 tahun Kesultanan Ternate mengalami kekosongan pemerintahan. Berdasarkan musyawarah *Bobato Nyagomoi se Tufkange* (lembaga legislatif) dan *gam raha* (lembaga MPR) yang mendapat persetujuan residen, maka tanggal 2 September 1929 Iskandar Muhammad Djabir dilantik menjadi Sultan Ternate ke-47. Sejak saat itu, Iskandar Muhammad Djabir memakai gelar Syah di belakang namannya. Namun tempat pelantikannya tidak dilakukan di dalam *kadaton,* tetapi di sebuah rumah penduduk di Kampung Makassar Ternate. Setelah Iskandar Muhammad Djabir dilantik menjadi sultan, ia meminta kepada Belanda agar membebaskan dan memulangkan kembali ayahnya (Sultan Usman) ke Ternate karena sudah usia lanjut. Permintaan tersebut dikabulkan Belanda, maka pada tahun 1933 Usman Syah dipulangkan ke Ternate. Lihat Adnan Amal ,*op. cit.*, hlm. 290-291.

[284]*Memori van Overgave* Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934. KoleksiMvo Seri 2, Nomor 26 ArsipNasional RI Jakarta.

[285] R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI 1975), hlm.23.

Kemenagan Jepang atas Belanda ditanggapi oleh rakyat dengan berbagai reaksi. Dapat dikatakan reaksi masyarakat Maluku atas kemenangan (kedatangan) Jepang ini dapat dibagi atas tiga longan:

a. Golongan Islam, menyambut Jepang sebagai pembuka belenggu penindasan dan menganggap Belanda sebagai penindas. Mereka menyambut kedatangan Jepang dengan suatu kegembiraan yang dinyatakan melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh mereka dalam menumpas kaki tangan Belanda di daerah.
b. Golongan Kristen, melihat kedatangan Jepang sebagai datangnya suatu malapetaka besar atas jiwa dan keamanan mereka. Mereka melepaskan Belanda sebagai melepaskan pembela dan penyokong mereka.
c. Golongan pergerakan nasional, menerima Jepang dengan suatu sikap hati-hati. Mereka mempergunakan kesempatan ini untuk menyusun diri yang pada masa perang dikocar-kacirkan oleh pihak pemerintah Hindia Belanda dan golongan ini terdiri dari orang-orang Kristen dan Islam.[286]

Akan tetapi dalam perkembanganya politik pemerintah Jepang mulai berubah terhadap masyarakat Maluku dan mulai kelihatan apa maksud dan tujuan mereka. Jepang datang bukannya sebagai kaka kepada adik seperti apa yang mereka propagandakan, tetapi mereka ingin menaklukan daerah ini agar tunduk dibawah kekuasaan Jepang. Kegiatan organisasi politik dilarang keras, mereka mulai mengemukakan pandangan radikal tentang hak milik, yang menurut Jepang bahwa manusia, tanah air, tumbuhan dan binatang itu semua milik Nippon (Jepang).[287] Pandangan ini telah membuat suatu kejutan bagi rakyat yang sudah erbiasa atas pemilikan pribadi dan kebebasan pribadi.

1. Keadaan Pemerintahan

Pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun mengubah seluruh struktur masyarakat kolonial yang dibina oleh Belanda. Dalam waktu yag singkat semua orang kulit putih dihilangkan dari pandangan masyarakat. Mereka semua ditawan dalam kamp-kamp konsentrasi. Sebagai pengganti mereka dan untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan sebagai pengawai, Jepang mengangkat orang-orang Maluku secara langsung. Pegawai-pegawai bekas pemerintahan Belanda dan guru-guru sekolah tetapbekerja sebagai semula akan tetapi gerak-gerik mereka diawasi dengan ketat. Meskipun mereka boleh memegang pemerintahan sendiri, namun mereka tidak bebas sama sekali dalam geraknya. Malah kebebasan itu lebih dipersempit lagi daripada di zaman kolonial Belanda. Masyarakat sangat takut terhadap aparat pengamanan dan dinas rohasia atau mata-mata Jepang yaitu Kempetai, semacam Polisi militer yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas.[288]

Organisasi-organisasi sosial hanya dapat didirikan kalau dibentuk sendiri oleh Jepang. Semua organisasi dengan gerakan politk, berupa partai politik,

---

[286] Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*. (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978), hlm.32.

[287] *Ibid,* hlm. 76

[288] R.Z. Leirissa,*op,cit.*, hm. 65.

organisasi pemuda atau apapun yang berbau politik dan bertentangan dengan ideologi Jepang dilarang sama sekalai. Sejak saat itu organisasi pergerakan nasional yang sudah ada di Ambon dan di tempat-tempat lain tidak lagi menampakan diri. Untuk membantu tentara Jepang memenangkan peperangan melawan sekutu, maka bekas tentara KNIL dijadikan Heiho yaitu pembantu prajurit Jepang dan dikirim ke daerah-daerah perang sebagai pekerja. Pengawasan yangketat juga dilakukan terhadap masyarakat, terlebih dikota-kota. Dapat dikatakan bahwa kehidupan waktu pada itu serba menakutkan.[289]

Selama penduduka Jepang tidak terdapat perubahan-perubahan yang penting di dalam tatat pemerintahan. Pemerintahan lebih bersifat militer atau disesuaikan dengan kepentingan militer. Pada waktu itu juga terdapat aparat-aparat pemerintahan sipil yaitu Minseibu Chokan, semacam kepala daerah yang berkedudukan di Ambon, Tual dan Ternate. Namun dalam banyak hal kekuasaan pemerintahan sipil ini dibatasi atau tunduk kepada kekuasaan militer, sehingga wewenang pemerintahan sipil hampir tidak ada sama sekali. Keadaan tersebut berlangsung hingga menyerahkan Jepang pada sekutu tahun 1945.[290]

Pendudukan Jepang atas Indonesia selama tiga setengah tahun mengubah seluruh struktur masyarakat kolonial yang dibina oleh Belanda itu. Dalam sekejap mata saja semua orang kulit putih lenyap dari pandangan umum karena dimasukan dalam kampung konsentarasi Jepang. Sebagai pengganti mereka, tentara pendudukan Jepang mengangkat orang-orang Indonesia. Orang-orang ini menyadari kenyataan bahwa merekapun dapat menjalankan berbagai badan pemerintahan seperti halnya dengan orang-orang Belanda. Maka timbullah perasaan bahwa mereka tidak membutuhkan orang-orang Belanda itu. Selain itu martabat dunia Barat yang diwakili oleh Belanda itu hilang samasekali dalam mata mereka.[291]

Biar pun struktur pemerintahan adat tidak dirubah oleh Jepang tetapi pemerintah negeri merasa kehilangan hak-hak warisan mereka atas tanah, hutan dan tanah yang mereka miliki atau yang diwariskan oleh orang tua mereka. Walaupun ada kegelisahan yang demikian tetapi tidak ada seorang pun berani melawan kekuasaan Jepang. Organisasi politik tidak dapat bergerak, biarpun mereka diberi kekuasaan dalam beberapa bidang, tetapi tokoh-tokoh ini tidak berani menentang kekuasaan Jepang. Jepang memerintah dengan tangan besi, setiap gerakan akan ditumpas sampai ke akar-akarnya. Masyarakat sangat takut terhadap dengan aparat keamanan dan dinas rahasia Jepang yaitu Kempeti, yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas.

---

[289] Sutrisno Kutoyo, *op,cit.*, hm. 74.

[290] Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Maluku*. (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977), hlm. 32-33.

[291] Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. (Jakarta: Gora Pustaka Indonesia, 2007), hlm. 221.

2. Kehidupan sosial ekonomi

Suasana peperangan yang tidak henti-hentinya telah menghambat pembangunan ekonomi yang disusun oleh Jepang untuk daerah Maluku. Masyarakat Maluku yang berdiam di kota-kota pada umumnya menggunakan beras merupakan bahan makanan pokok, sedangkan daerah ini bukan daerah penghasil beras. Zaman Belanda beras di datangkan dari luar daerah, tetapi sekarang karena peperangan maka suplai bahan makanan ini macet. Pulau Jawa maupun Sulawesi tidak dapat lagimengsuplai secara kontinyu beras yang diperlukan daerah Maluku karena di daerah ini terasa juga adanya kekurangan bahan pokok ini.[292]

Kehidupan sosial dan ekonomi merosot sama sekali. Kehidupan rakyat, terutama mereka yang tidak mempunyai hubungan resmi dengan pemerintahan militer Jepang tidak menyenangkan. Penduduk diatur sedemikian rupah sehingga muda diawasi. Mereka yang mempunyai anggota-anggota keluarga yang dicurigai Jepang, selalu hidup dengan perasaan bahwa sewaktu-waktu Kempetai akan menagkap mereka dan pasti membunuhnya. Suasana yang demikian terhadapdi kota-kota maupun di desa-desa.[293]

Koperasi adalah satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk menjual barang-barang keperluan rakyat. Tokoh-tokoh sama sekali tidak berfungsi lagi, karena tidak adanya barang yang akan diperdagangkan. Semua bahan dagang yang utama yaitu sandang dan pangan dimonopoli Jepang dan disalurkan melalui koperasi. Pada setiap desa di instruksikan mendirikan koperasi untuk malayani masyarakat desa membeli bahan keperluan seperti beras, garam, gula, ikan asin, kain, terigu dan bahan lainnya. Untuk mendapa bahan ini maka pimpinan koperasi (biasanya pemuka rakyat) mengajukan surat permintaan barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Surat ini diajukan pada badan pelaksana pusat koperasi yang berkedudukan di Ambon. Melalui badan inilah daftar permintaan itu dimasukan dalam daftar tersendiri dengan daftar dari koperasi di desa-desa lain untuk dimintakan dengan daftar-daftar dari bagian penyaluran bahan makanan Jepang.[294] Setelah bahan ini dikeluarkan, baru badan pelaksana menyalurkan ke desa-desa sesuai dengan jumlah yang mereka minta.

Kedaan ekonomi dapat dikatakan macet sama sekalai dan ini mengakibatkan kemelaratan. Semua kegiatan ekonomi ditujukan untuk membantu angkatan perang Jepang. Para petani dan buruh memikul beban ekonomi yang berat. Mereka di jadikan "Rumusha" yaitu pekerja-pekerja paksa yang tidak di gaji, kadang-kadang diberi makan tidak cukup dan kesehatannya samasekali tidak terjamin. Banyak yang meninggal dunia karena sakit, kelaparan dan di siksa oleh tentara Jepang. Para petani dan nelayan tidak luput dari pemerasan. Sebagian hasil panen harus diserahkan pada Jepang, bahkan sering dipaksa menyerahkan seluruhnya. Kalau dibayar itupun dengan harga yang tidak memadai. Bagi golongan menengah, bangsawan dan hartawan jelas bahwa mereka tidak dapat mempertahankan kedudukannya seperti

[292] R.Z. Leirissa,*op,cit.*, hm. 65.

[293] Adnan Amal, *op,cit.*, hm. 65.

[294] Adnan Amal dan Irza Arnita Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah* 1800-1950 Jilid 2. (Ternate, Unkhair, 2003), hlm. 243.

pada zaman sebelum tibanya Jepang. Semua harta kekayaan mereka diambil oleh Jepang. Selanjutnya golongan buruh lainnya tidak luput dari siksaan. Mereka dipaksa bekerja untuk kepentingan Jepang. Kadang-kadang mereka harus berpisah dengan keluarganya ke tempat-tempat kerja yang jauh dengan resiko yang besar.[295]

Untuk menanggulangi kedaan ekonomi yang makin merosot dari hari ke hari, Jepang memaksa rakyat untuk bekerja di perkebuanan Jepang dengan upah yang sangat rendah. Kemudaian atas prakarsa Jepang rakyat dibagi berkelompok untuk membuka kebun-kebun baru dan hasilnya dibagi dua, setengahnya untuk Jepang dan setengah untuk kelompok kerja, dan kebun semacam ini disebut Tonari. Negari dibagi menurut keterampilan yang mereka memiliki dalam memproduksi bahan pangan. Misalnya negri dengan mata pencaharian rakyatnya nelayan ditugaskan untukmembuat alat-alat penangkapan ikan dan diwajibkan mencari ikan yang hasilnya dibagi dua dengan Jepang. Negeri yang mata pencariannya membuat gula aren ditugaskan membuat gula aren untuk kepantingan tentara Jepang.[296]

Dalam biadang pengerahan tenaga, Jepang telah mengumpukan sejulah tenaga di desa-desa sebanayak limahpulu atau seratus orang laki-laki untuk memukul sagu dan mengusahakan bahan makanan lain di hutan-hutan Ambon, Seram dan Buruh. Karena pada prinsipnya seluruh alam dan isinya ini milik Nippon, maka Jepang juga berkuasa atas hutan-hutan sagu rakyat. Tenaga ini di kerahkan ke hutan-hutan sagu tanpa seijin yang empunya, hanya kepala desa yang diberitahukan bahwa tenaga Jepang akan bekerja di hutan sagu desa itu untuk mengambil sagunya.[297]

Tindakan-tindakan Jepang bukan hanya merampas harta benda, memperkosa hak-hak rakyat, akan tetapi mereka juga menghukum rakyat diluar perikemanusiaan. Selain itu perbuatan asusila dilakukan oleh prajurit-prajurit Jepang, terutama terhadap para wanita dan gadis-gadis. Masa pendudukan tiga setengah tahun itu sebenarnya tidak terlalu lama, akan tetapi bagi rakyat Maluku dianggap cukup lama karena penderitaan yang dialami benar-benar berat.

3. Kehidupan Pendidikan dan Budaya

Khusus dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah masi berjalan seperti biasa, akan tetapi fungsi sekola tak ubahnya sebagai tempat propaganda Jepang. Masyarakat dilarang keras menggunakan bahasa Belanda, bahkan buku-buku berbahasa Belanda diharuskan dibakar. Semua sekolah-sekoalah Belanda (H.I.S., M.U.L.O.) ditutup. Sebagai bahasa pengantar untuk sementara diperguanakan bahasan Indonesia. Selanjutnya bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah dan dikantor-kantor. Bagi pegawai negaeri diadakan ujian. Yang lulus dalam ujian mempergunakan bahasa Jepang (membaca dan menulis) mendapat hadia tambahan

---

[295] Sutrisno Kutoyo, *op,cit.*, hm. 104.

[296] Hanna Willard A& Des Alwi, *Ternate dan Tidore Masa Lalu Penuh Gejolak,* (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hlm. 214.

[297] B. Soelarto, *Sekitar Tradisi Ternate.* (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan RI, 1982), hlm. 78.

gaji.[298] Setiap pagi sebelum bekerja dan belajar, semua pegawai dan murid-murid harus melakukan senam pagi (taiso). Latihan-latihan jasmani secara seperti sumo (bergulat), yudo (silat), kendo (silat memakai pedang) diajarakan di sekolah-sekolah. Para pemuda diharuskan mengikuti latihan-latihan kemiliteran yang kemudian dipakai membantu tentara Jepang. Mereka diorganisasi dalam barisan Keobodan (barisan bantu polisi), Seinendon (barisa pemuda), Sui Sin Tai (barisan pelopor) dan lain-lain. selainitu Heiho dipersenjatai untuk tugas-tugas kemanan dan pertahanan. Untuk memperkuat mental masyarakat yang pro Jepang, diadakan propaganda-propaganda yang mengambil hati rakyat seperti: Nippon adalah pelindung Asia; Nippon adalah saudara orang Indonesia; hancurkan Belanada dan Inggris serta lain-lain semboyan.[299]

Pergerakan Nasional baru pada tahun 1944. Inipun dengan pengawasan ketat dari pihak Jepang. Di Jawa sejak semula terdapat komite-komite Ambon yang bertugas untuk membantu keluarga-keluarga Ambon yang ditimpah malah petaka atau ancaman Kempeitai. Salah satu dari organisasi-organisasi semacam ini adalah Badan Pertolongan Ambon Timur (BAPATI) di Jakarta. Di dalam badan ini tergabung tokoh-tokoh Maluku yang sebelum perang terkenal dalam dunia pergerakan nasional. Antara lain terdapat dr. J. Kayadu, bekas ketua sarekat Ambon. Selain itu juga terdapat Mr. J. Latuharhary, bekas ketua sarekat Ambon di Surabaya sejak tahun 1942 telah dipindahkan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Kemudian J. D. Syaranamual, A. C. Tupamahu, P. A. de Queljoe, dan S. J. Pieter, semuanya bekas anggota sarekat Ambon yang dibubarkan itu.[300]

Tokoh-tokoh pergerakan tersebut dibatasi kebebasan dan bidang geraknya. Para cendikiawan di tugaskan memutar roda pemerintahan sehari-hari membantu Jepang. Ada dari golongan ini mati dibunuh karena dianggap mata-mata dan pro pemerintah Belanda. Tokoh-tonkoh pergerakan nasional di Ambon dan tempat-tempat lain mengubah taktik mereka dan bekerjasama dengan Jepang terutama dalam bidang sosial kemasyaraktan. Karena penganiyayaan dan tekanan fisik yang keras kadang-kadang timbul perlawanan terhadap Jepang, terutama dari para Heiho. Mereka dikejar-kejar dan keluarganya dibunuh. Setelah kapitulasi tahun 1945 banyak diantara mereka yang selamat.[301]

Hubungan dengan dunia luar tertutup sama sekali. Alat-alat komunikasi dan media massa dapat dikatakan tidak ada. Siaran-siaran radio diawasi dan hanya kemenangan-kemenangan Jepang di medan perang yang disiarkan kedalam masyarakat. Hubungan kaum pergerakan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional di pulau Jawa sangat sulit. Mereka hanaya dapat berhubungan melalui gerakan-gerakan dibawah tanah. Melalui mata-mata sekutu, mereka dapat menganalisa situasi dan keadaan perang untuk mempersiapkan diri bagi perjuangan kemerdekaan.

---

[298] Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. (Jakarta: Pustaka Utama), 2000.

[299] Sutrisno Kutoyo, *op,cit.*, hm. 126.

[300] R.Z. Leirissa,*op,cit.*, hm. 165.

[300] Sutrisno Kutoyo, *op,cit.*, hm. 104.

[301] Abdul Hamid Hasan, *op,cit.*, hm. 114.

Dengan sangat hati-hati mereka berusaha melatih dan mengorganisasi para pemuda dan masyarakat lainnya dalam sarana-sarana yang telah diciptakan Jepang untuk perjuangan mereka. Setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus tahun 1945 persiapan-persiapan dan latihan-latihan tersebut diarahkan ke perjuangan kemerdekaan melawan Belanda.[302]

Kebebasaan untuk berorganisasi sangat dibatasi, jauh kurang lagi daripada batasan-batasan yang diberikan oleh Belanda. Organisasi-organisasi sosial hanya dapat didirikan apabila dibentuk sendiri oleh Jepang. Untunglah dalam hal ini Jepang masih membutuhkan tokoh-tokoh Pergerakan Nasional Indonesia. Tokoh Pergerakan Nasional dari kalangan Maluku adalah Mr. J, Latuharhary, seorang tokoh terkenal dari sarikat Ambon. Latuharhary rupanya sejak tahun 1942 telah dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta Ia ditempatkan sebagai pegawai di pemerintahan dalam negeri. Sumbangannya bagi masyarakat Maluku nasih tetap di jalankannya dengan memasuki organisasi Badan Pertolongan Ambon-Timur bersama tokoh-tokoh sarekat Ambon lainnya. Karena mereka juga berasal dari daerah Indonesia yang dikuasai oleh angkatan laut Jepang, maka tidaklah mengherankan apabila Latuharhary kemudian tertarik pada Asrama Indonesia Merdeka.[303] Demikian pula tokoh-tokoh Sulawesi seperti Dr. Sam Ratulangi dan Mr. A. A. Maramis. Melalui organisasi ini mereka dapat membina kembali hubungan dengan dunia Pergerakan Nasional. Peranan mereka untuk mempertahankan daerah-daerah mereka dalam bualan-bulan pertama sejak diproklamaskannya kemerdekaan Indonesia, sangat penting.

D. Kesultanan Ternate Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, Maluku merupakan salah satu dari ke empat wilayah pemerintahan di Indonesia bagian Timur. Keempat wilayah itu adalah Kalimantan dengan ibu kota Banjarmasin, Sulawesi dengan ibu kota Makassar, Nusa Tenggara dengan ibu kota Denpasar di Bali dan Maluku dengan ibu kota Ambon. Masing-masing wilayah ini dikuasai seorang Gubernur Militer. Daerah Indonesia Timur berada langsung di bawah Komando Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*).[304]

Dalam kaitannya dengan pendudukan Ternate tanggal 5 April 1942, sebanyak 19 kapal perang Jepang mendarat di Pulau Ternate. Kedatangan armada angkatan laut Jepang tersebut mengemparkan penduduk Ternate. Sementara di depan *Kadato* Ternate, Kampung Cina hingga Jembatan Residen, pesawat-pesawat Jepang menjatuhkan selebaran yang isinya: “Semua orang-orang Belanda dan Tentara KNIL harus menyerahkan diri pada Dai Nippon dan harus berkumpul di Jembatan Residen. Jika dalam waktu satu jam bendera putih tidak dikibarkan, Kota Ternate akan digempur.” Ketika batas waktu yang diberikan telah lewat dan tidak ada tentara KNIL dan pejabat sipil Belanda menyerahkan diri, maka pesawat-

[302] Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir,* (Ternate: Depdikbud, 1982),hlm.76.

[303] R.Z. Leirissa,*op,cit.*, hm. 87.

[304]Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Maluku*. (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977), hlm. 32.

pesawat Jepang dan kapal perang menjatuhkkan bom dan menembaki Benteng Orange, gudang Coprafonds (Kantor KPM), rumah sakit, dan *kadaton* Tidore. Serangan itu menyebabkan 56 orang tewas.[305]

Dalam keadaan panik, kontrolir Syirik van der Groot yang bertugas ketika waktu itu, menemui Jeanne dan dr Chasan Boesoirie (keduanya berkerja sebagai dokter Belanda) di rumah sakit dan memerintahkan kepada mereka untuk mengikat seprei putih dan memasangnya di dekat pantai dekat rumah sakit Benteng Orange sebagai tanda menyerah. Untuk memberitahukan penyerahan kepada Jepang, van Diejen, van der Groot, dan dr Chasan Boesoirie menaiki sebuah perahu nelayan menuju ke kapal perang Jepang. Dalam pertemuan itu, mereka diterima Mayor Laut Fujia Egawa[306]. Pada kesempatan itu, kontrolir Syirik van der Groot menandatangani naskah penyerahan kepada Jepang.

Dalam waktu singkat, seluruh penguasa Belanda –baik militer maupun sipil ditawan oleh tentara Jepang. Setelah menduduki dan mengambilalih kekuasaan Belanda di Ternate, Jepang membentuk sebuah pemerintahan militer (*Minsebu*) yang dijabat oleh Noro San, seorang perwira menengah. Pada dasarnya, struktur pemerintahan Hindia Belanda tidak diubah, kecuali penamaannya diganti dengan menggunakan istilah Jepang. Kepala pemerintahan setempat yang dahulunya disebut *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* (HPB) atau *afdeling* diganti namanya menjadi *gunco. Onderafdeling* yang membawahi kepala-kepala distrik yang disebut *bungunco* serta nama kepala kampung diganti menjadi *sonco.*

Jabatan-jabatan tersebut dipercayakan untuk dijabat penduduk Ternate, kecuali *minseibu* dan ketua pengadilan yang dijabat oleh militer Jepang. Pemerintah Jepang kemudian mengangkat orang-orang Ternateyang pernah menjadi bekas pegawai Pemerintahan Belanda untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan seperti pegawai dan guru-guru. Meski mereka boleh memegang pemerintahan sendiri, namun mereka tidak bebas sama sekali, gerak-gerik mereka diawasi dengan ketat.[307]

Sejak kehadirannya di Ternate, pemerintah militer Jepang senantiasa mempropagandakan posisinya sebagai saudara tua dari rakyat setempat yang disebutnya saudara muda. Propaganda lainnya adalah Gerakan 3A. Yakni, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia, dan Nippon cahaya Asia. Propaganda itu bertujuan mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam Perang Asia Timur Raya. Propaganda itu untuk meningkatkan hubungan dan dukungan penduduk kepada Jepang. Hubungan yang pada saat yang sama akan memudarkan pengaruh Belanda.

Jepang kemudian juga menggantikan sistem pendidikan di sekolah-sekolah peninggalan Belanda dengan sistem pendidikan Jepang berbasis pengajaran bahasa

---

[305]Chasan Bousoiri, *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*, (Jakarta: Tanpa Tahun), hlm. 17-19.

[306]Sebelum perang dunia ke II, Fujia Egawa di kirim oleh Jepang untuk menjadi mata-mata di Indonesia.Ia ditugaskan di Kao (Halmahera Utara) sebagai pengusaha perkebunan Kumis Kucing. Selama perang dunia ke II, ia berperan sebagai penerjemah dan rekrutmen anggota HEIHO untuk kepentingan militer Jepang. Lebih jelasnya lihat Herry RD.Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*. (Ternate, YayasanKieRaha, 2003), hlm. 45-46.

[307]Tabloid Parada, edisi 17, "Jepang di Ternate dalam Catatan Sejarah", tanggal 9-22 Januari 2001.

Jepang. Bahasa Belanda dan bahasa Inggris serta semua pelajaran yang bercorak Belanda atau Eropa, dilarang untuk diajarkan. Selain itu, pada bidang politik, semua organisasi dan gerakan politik, seperti partai politik, organisasi pemuda, atau apapun yang berbau politik dan bertentangan dengan ideologi Jepang, dilarang sama sekali. Sejak saat itu, organisasi pergerakan nasional yang ada di Ternate, tidak menampakkan diri.

Untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya, tentara Jepang menjadikan wilayah Kao (Halmahera Utara) sebagai pusat pertahanan angkatan perang di kawasan Pasifik.[308] Sementara untuk membantu tentara Jepang memenangkan peperangan melawan Sekutu, maka direkrut bekas tentara KNIL untuk dijadikan *heiho*.[309] Mereka dididik dan dilatih selama tiga bulan oleh seorang perwira tinggi Jepang yang bernama Fujiu Egawa yang sebelum Perang Dunia II telah berdomisili di Ternate. Para anggota *heiho* tersebut yang kemudian dikenal sebagai Pasukan Kuning dari Utara, dikirim ke medan perang dalam dua kelompok. Kelompok pertama dikirim ke Ambon dan kelompok kedua dikirim ke Kao[310] bersama tentara Jepang sesuai strategi perang.

Meski Jepang telah menguasai wilayah Ternate dan melakukan penataan kedudukan kekuasaan dan pengembangan pendidikan dan kehidupan sosial, tetap saja mereka tidak menganggap aman Kota Ternate. Hal itu berkaitan dengan Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah belum memberi dukungan politik kepada Jepang. Sultan juga ditudah menyembunyikan orang-orang Belanda di *kadaton* Ternate. Hal itu membuat serdadu Jepang setiap hari datang mengawasi *kadaton*. Begitu seringnya mereka datang ke *kadaton*, sehingga membuat Sultan Iskandar Djabir Syah menjadi marah. Akhirnya sultan menyurati Fujia Egawa sebagai penangungjawab keamanan di Maluku Utara untuk melarang para tentara Jepang

[308]Secara geografis, Maluku Utara yang berbatasan langsung dengan kawasan Papua,Papua Nugini, Kepulauan Salomon dan beberapa Negara Kepulauan Pasifik Selatan dipilih oleh Laksamana Yamamato sebagai strategi militer dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Dengan menjadikan Maluku Utara sebagai titik kunci untuk mnengontrol Asia Pasifik. Lebih jelas lihat L. Rajilun, *op. cit*, hlm. 45.

[309]Dalam membantu prajurit Jepang, mereka merekrut para pemuda Maluku Utara ke dalam Heiho untuk didik dan dilatih sebagai prajurit angkatan perangnya. Setelah selesai pendidikan yang berlangsung selama tiga bulan, mereka kemudian dikirim ke daerah-daerah perang sebagai pekerja, dibeberapa pangkalan militer Jepang yang dibangun disejumlah kawasan di Maluku Utara, seperti; di Kao, Subaim, Wasilei, Galela, Morotai, dan Bacan. Jumlah anggota Heiho dari Maluku Utara, diperkirakan sebanyak 3.000 orang. Pekerjaan membangun fasilitas militer Jepang baru berakhir, setelah pasukan Sekutu menduduki Morotai pada 25 April 1945 dan melakukan pemboman basis-basi pertahanan Jepang di Halmahera Utara dan Tengah. Lihat Adnan Amal, *op,cit*, hlm. 216- 217.

[310]Dari sumber yang penulis peroleh dilapangan, penempatan anggota Heiho di daerah Kao (Malifut), hanya ditugaskan secara khusus sebagai kordinasi, pengamanan dan pengawasan terhadap satuan instalisasi militer dan objek-objek vital lainnya. Salah satu narasumber L. Radjiloen, misalnya di tugaskan mengurus perkebunan Egawa Nojo didaerah Waringin untuk mempersiapkan bahan makanan, seperti sayur mayur yang dihasil perkebunan tersebut untuk disalurkan ke kepada anggota atau perwira Jepang yang berada di wilyah Kao. Begitu juga Gaus Fabanyo, ditugaskan pada lokasi Mekiroba (pedalaman Kao didaerah waringin) sebagai *Sokiho* untuk pembangunan lapangan terbang di bawah pimpinan Mus-Juki. Wawancara bulan Maret 2014.

yang selalu mematai-matai sultan. Dengan alasan politik, Jepang mempunyai kepentingan dengan sultan, maka Fujia Egawa mengeluarkan surat larangan melakukan pemeriksaan-pemeriksaaan terhadap sultan dan keluargannya.

Pada tanggal 15 September 1944, pasukan Sekutu yang dikomandoi Jenderal Douglas Mac Arthur, melakukan pendaratan di Pulau Morotai.[311] Di Morotai, pasukan Sekutu kemudian membangun landasan pesawat terbesar di Pasifik dan menjadikannya sebagai markas komando (*operation base and consolidation*) atau sebagai basis pertahanan untuk menghadang pasukan Jepang yang berada di daerah Kao. Peperangan antara kedua pihak pun dimulai di wilayah Maluku Utara. Kekuatan militer Jepang terus mengalami kemunduran di hampir semua lini pertempuran itu.

Pada tanggal 17 Oktober 1944, pesawat tempur Sekutu menjatuhkan bom di Pulau Ternate, terutama di Kampung Cina, Kampung Palembang, dan *Fort Orange*, menyebabkan puluhan orang meninggal serta luka parah. Akibatnya, penduduk mengungsi ke luar Pulau Ternate atau membangun lubang perlindungan yang disebut *lofra*. Keesokan harinya, Jepang meminta menggali lubang untuk mengubur para korban, tetapi banyak penduduk yang telah pergi, maka digunakan tenaga narapidana yang ditawan tentara Jepang untuk menggali kuburan massal. Keadaan darurat membuat semua korban dikubur tanpa dikafani.[312] Sementara itu, di Ternate Selatan, Tentara Jepang dengan kejam melakukan pembantaian massal terhadap rakyat di kampung Kastela dan Rua. Hal itu membuat marah Sultan Iskandar Djabir Syah dan memerintahkan *gorela*, pasukan gerak cepatnya, memantau kegiatan tentara Jepang di wilayah Maluku Utara.

Posisi tentara Jepang yang terus terdesak di berbagai medan pertempuran di Maluku Utara membuat mereka merencanakan menangkap Sultan Iskandar Djabir Syah. Sebagai penguasa di Maluku Utara, Sultan Iskandar Djabir Syah tentu saja memiliki ribuan pendukung setia yang dapat dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan memenangkan perang. Informasi tentang rencana penangkapan sultan diketahui oleh pasukan Sekutu yang berada di Morotai. Pada tanggal 24 April 1945, Sultan Iskandar Djabir Syah menerima surat dari Letnan Hubertus J. van Mook yang isinya: "Meminta Sultan dan keluargannya meninggalkan Ternate. Orang-orang Indo-Belanda diberi tahu bahwa Ternate akan dibom selama dua hari, yakni pagi hari pada pkl 06.00-09.00 dan sore pkl 16.00-18.00, dengan maksud untuk memberi kesempatan sultan dan keluargannya untuk lolos."[313]

---

[311]Pasukan Sekutu yang melakukan pendaratan di Pulau Morotai terdiri dari dua devisi komando Australia (devisi 7 dan 9), serta satu devisi Tentara Amerika (devisi 93 Negro). Dari Morotai, Pasukan sekutu kemudian diterjunkan di Sulawesi Utara dan Selatan, Nusa Tenggra dan Kalimantan. Sementara devisi Tentara Amerika Negro ditugaskan membebaskan Filipina. Lihat Adnan Amal, dan Irza Arnita Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah* 1800-1950 Jilid 2. (Ternate, Unkhair, 2003), hlm. 172-173.

[312]Tabloid Parada, edisi 12, " Kehadiran Militer Jepang di *Maloku Kie Raha* ", tanggal 26 Agustus - 8 September 2001.

[313]Chasan Bousoiri, *op. cit*, hlm. 17-19.

Pada bulan Mei 1944, panglima perang Sekutu Jenderal Mac Arthur menginstruksikan agar menjemput Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah dan keluarganya dibawa ke Pulau Morotai.[314] Usaha sekutu tersebut berhasil. Pada tanggal 5 Oktober Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah dan keluargannya berhasil dievakuasi dari Ternate oleh regu *Hulptroepen* dibantu tentara Australia. Ia pertama-tama dibawa ke Pulau Hiri kemudian ke pangkalan Sekutu di Morotai. Setiba di Morotai, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober, atas perintah Jenderal Mac Arthur, mereka diungsikan ke Brisbane, Australia, dan bermukim di sana hingga perang usai.[315]

Berita diungsikannya Sultan Iskandar Djabir Syah dan keluarganya oleh Sekutu, membuat Jepang marah. Mereka tidak bisa lagi memanfaatkan sultan untuk kepentingan perangnya.[316] Karena gagal mendapat dukungan dari Iskandar Djabir Syah, Jepang kemudian melantik Muhammad Nasir (saudara Iskandar Djabir Syah) sebagai Sultan Ternate dan ditempatkan di Kao, pusat komando tertinggi Tentara Jepang di Halmahera. Pada waktu yang sama, Sultan Tidore, Zainal Alting, juga dijemput dari Soisio, Tidore, dan tempatkan di Jailolo.[317] Pengangkatan kedua sultan

---

[314]Pada bulan 1994, Sultan Ternate Muhammad Jabir Syah, menerima sepucuk surat dari Panglima Perang Sekutu Jenderal Mac Arthur, yang diantarkan beberapa orang gerilyawan Indonesia yang berkerja-sama dengan Sekutu ke *kadaton* pada pukul 9 malam. Mereka membicarakan hal-hal yang serius dan sangat rahasia yang tidak bisa didengar orang lain kecuali sultan sendiri. Isi surat itu memerintahkan bahwa sultan Ternate dan keluarganya akan dievakuasi ke Morotai oleh satuan tentara Australia. Pasukan ini akan menjemput dan membawa sultan beserta keluarganya dengan perahu ke Pulau Hiri. Malam itu juga kami dibangunkan. Seluruh keluarga, yaitu istri dan anak-anak disuruh segera berkemas-kemas. Dengan terburu-buru kami meningalkan *kadaton* berjalan kaki tanpa alas kaki sampai di Desa Togolobe. Dari sana kami dibawa ke Pulau Hiri. Sebuah perahu motor berkecepatan tinggi akan membawa sultan dan keluarganya dari Hiri ke Morotai. Lebih jelasnya Lihat Irza Arnita Djafar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. Jakarta Bio Pustaka, 2005.

[315]Setibanya di Brisbane Australia, Sultan Ternate Djabir Syah dan keluargannya dijemput oleh Kapten Julius Tahia, yang ditugaskan untuk memindahkan penduduk sipil Belanda dari Jawa ke Australia. Mereka kemudian ditempatkan di Camp Colombia di Wacol. Kamp ini merupakan perkemahan besar masyarakat Indonesia dan Belanda yang terdiri dari orang-orang sipil dan militer. Namun di kamp ini, meraka hanya tinggal kurang lebih dua bulan. Setelah itu, mereka dipindahkan ke sebuah rumah yang dinamakan *Farmer House*. Setelah enam bulan mendiamai *Farmer House*, mereka dipindahkan ke sebuah rumah peninggalan keluarga Belanda I *Brunswek Street* berdekatan dengan Hotel Indonesia, tempat tinggal keluarga sultan lainnya. Rumah ini mereka ditempati sampai meraka dipulangkan ke Ternate. Lihat Irza Arnita Djafar, *op.cit.*, hlm. 87-89.

[316]Sebagai seorang sultan yang memiliki kekuasaan luas (Propinsi Maluku Utara sekarang), ia tentu sangat dibutuhkan oleh Jepang. Luas wilayah kekuasaannya dan jabatan *kolano* (sultan) dianggap sakral oleh segenap rakyat. Titah sultan juga merupakan sesuatu yang tidak boleh dilangar.Fanatisme yang berlebihan terhadap seorang sultan memberi pengaruh yang kuat terhadap rakyatnya.Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang maupun Belanda. Tetapi nasib baik lebih berpihak kepada Belanda karena dalam Perang Pasifik, panglima sekutu Jenderal Mac Arthur memerintahkan untuk mengungsikan sultan dan keluargannya ke Australia, sebagai suatu strategi untuk mengamankan wilayah koloninya di Maluku Utara. Lihat Junaidi Muslim, *Antara Unitarisme dan Federalisme: Kesultanan Ternate Pada masa Revolusi (1945-1950)*, Tesis S2 Sejarah Universitas Gadjah Mada, 2012.

[317]Irza Arnita Djafar, *op,cit.* hlm. 102-103.

tersebut merupakan upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat dalam menghadapi perang Asia Timur Raya.

Selama di Australia, Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah tidaklah secara penuh tinggal di sana, hanya keluargannya saja. Beberapa kali sultan dipangil ke Morotai karena dibutuhkan oleh Sekutu untuk mempersatukan masyarakat Maluku Utara yang sudah berantakan selama pendudukan Jepang. Selama di Morotai, sultan diperintahkan memberitahu kepada rakyatnya tentang situasi perang yang sedang berlangsung. Pemberitahuan itu disiarkan lewat selebaran berbahasa Ternate, Galela, dan Tobelo agar penduduk menghindarkan diri dari rayuan propaganda Jepang yang menginginkan kemenangan dalam Perang Dunia II. Pesan-pesan itu dicetak dan sebarluaskan lewat pesawat tempur Sekutu ke suluruh pelosok Maluku Utara.[318]

Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan Jepang berakhir ketika pasukan Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hirosima dan Nagasaki tanggal 6 dan 8 Agustus 1945. Serangan itu memaksa Kaisar Hirohito mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Informasi penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu mendorong tokoh-tokoh pergerakan pemuda untuk memaksa Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Pegangsaan Timur, No.56, Jakarta. Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia didampingi Bung Hatta dan para anggota PPKI. Proklamasi yang dikumandangkan itu sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia tidak ingin dijajah lagi dan membentuk sebuah pemerintahan yang merdeka dan berdaulat.

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru diketahui penduduk kota Ternate pada awal September. Namun demikian, berita kemerdekaan RI ini dapat diketahui oleh penduduk di Halmahera Utara, khususnya di Pulau Morotai. Fasilitas komunikasi berupa radio milik tentara Sekutu dapat diakses luas. Sementara pihak militer Jepang di Galela juga memberitahukan hal itu kepada penduduk. Dari merakalah berita kemerdekaan RI kemudian tersebar luas di Wilayah Maluku Utara.

Setelah kekalahan Jepang tanggal 17 Agustus 1945, *minseibu* yang dijabat Noro San melakukan pertemuan dengan seluruh aparat pemerintahan Ternate dan Tidore. Termasuk para kepala kampung dari kedua pulau itu. Setelah pertemuan dibuka, Noro San mengucapkan pidato singkat, "Tuan-tuan, perang telah selesai dan kami harus pergi. Tuan-tuan harus memilih seorang kepala daerah yang akan menggantikan kami."[319]

Peserta pertemuan banyak yang bingung mendengar pidato singkat itu. Mereka belum mengetahui bahwa perang telah usai dan Jepang sudah menyerah

---

[318]Pada bulan September 1945, setelah kurang lebih lima bulan pergi-pulang Australia dan Morotai, sultan dipangil ke Morotai, ia di-*militariseer* sebagai Letnan Kolonel untuk menerima *Over Civil Administration* di bawah perintah Jenderal Blamey dan wakilnya, Kolonel Thompson. Lihat Tabloid Parada, edisi 5, " Sultan Ternate ke-47 Kolano Iskandar DJabir Syah: Khalifah Islam dan Penakluk Kaum Imperialis", tanggal 5-20 Mei 2001.

[319]Irza Arnita Djafar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. (Jakarta Bio Pustaka, 2005), hlm. 23-25.

tanpa syarat kepada tentara Sekutu. Setelah itu, Noro San meminta kepada peserta untuk menerima pimpinan kekuasaan pemerintahan dari Jepang. Pertemuan tersebut mengusulkan tiga nama calon. Masing-masing Arnold Mononutu, Raden Slamet, dan dr. Chasan Boesoirie. Mayoritas peserta pertemuan akhirnya memberikan suara mereka ke Chasan Boesoirie. Ia kemudian ditetapkan sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Maluku Utara untuk menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang.[320]

E. Peyerahan Kekuasaan Jepang Di Maluku Utara

Segera setelah Jepang menyerah, markas besar pasukan sekutu di Morotai mengeluarkan perintah pelucutan senjata tentara Jepang. Mereka harus memusnahkan diri seluruh peralatan militernya, dan sengan tidak bersenjata semua pasukan Jepang di Maluku Utara – termasuk para Heiho – berkumpul di Kao, menunggu kapal yang akan memulangkan mereka ke negeri asalnya. Beberapa perwira Jepang dan oknum kenpetai, yang dipandang sebagai penjahat perang, dibawah sekutu ke Morotai. Tetapi, nasib mereka tidak diketahui dengan pasti. Untuk memusnahkan peralatan militernya, Jepang membutuhkan waktu satu bulam. Selain dirusak, banyak senjata berat dan senapan di tenggelamkan ke laut atau dibenamkan ke dasar danau Galela.

Setelah kekalahan Jepang, pada 25 Agustus 1945, Minseibu melakukan pertemuan dengan seluruh aparat pemerintahan Ternatedan Tidore, termasuk para kepala kampung dari kedua pulau itu. Setelah pertemuan dibuka, Minseibu mengucapkan pidato singkat: “Tuan-tuan, perang telah selesai dan kami harus pergi. Tuan-tuan harus memilih seorang kepala daerah yang akan menggantikan kami”.[321]

Mendengar pidato seingkat itu banyak peserta pertemuan bengong, karena belum mengetahui bahwa perang telah usai dan Jepang telah mennyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah itu, Minseibu meminta kepada peserta pertemuan mengajukan calon kepala daerah yang akan menerima pimpinan kekuasaan dari Jepang. Pertemuan tersebut mengusulkan tiga nama calon: Arnold Mononutu, Raden Slamet, dan dr. Chasan Boesoirie. Mayoritas peserta pertemuan akhirnya memberikan suara mereka kepada Boesoirie, dan ia dikukuhkan sebagai pejabat sementara kepala daerah Maluku Utara yang akan menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan Jepang.

---

[320]Masa jabatan sementara Chasan Boesoirie sebagai kepala daerah yang dipilih oleh Jepang tidak berlangsung lama. Pada bulan September 1945, jabatan tersebut diserahkan kapada Sultan Iskandar Djabir Syah yang telah dilantik oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi Residen Maluku Utara. Dengan pengangkatannya sebagai residen yang membawahi dua *afdeling–afdeling Noord Molukken* dan *Afdeling* Tidore, sultan mulai menjalankan roda pemerintahan sipil hingga bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1950. Morotai yang sebelumnya hanya merupakan distrik, kini ditingkatkan statusnya menjadi HPB (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur)*. Selain Pulau Morotai, Bacan dan Tidore juga memperoleh status yang sama. Status keswaprajaan itu kemudian ditingkatkan menjadi *afdeling* dan merupakan salah satu bagian di bawah Keresidenan Maluku Utara. Lebih jelasnya lihat Chasan Bousoiri,*op. cit,* hlm. 43.

[321] Irza Arnita Djafar, *op. cit,* hlm. 83.

Pada september 1945, dua korvet Australia membawa pulang Sultan Ternate, Muhammad Jabir Syah. Ketika merapat di dermaga Ternate, Sultan turun dikawal beberpa serdadu Australia dan di iringi sejumlah perwira NICA. Selama di Australia, Sultan telah menjalin kontaks yang intens dengan Pemerintah Hindia Belanda dalam pengasingan yang dipimpin van Mook. Hasilnya, Maluku Utara kembali memperoleh status keresidenan dan seltan sendiri di angkat sebagai residennya.

Jabatan kepala daerah sementra kemudian diserahkan Boesoirie kepada Sultan. Dengan pengangkatannya sebagai Residen yang membawahi dua *afdeling-afdeling noord Molukken* dan *Afdeling* Tidore-sultan mulai menjalankan roda pemerintahan sipil. Morotai yang sebelumnya hanya merupakan distrik, kini ditingkatkan statusnya menjadi HPB (*Hoofd van Plaatsselijk Bestuur*), selama sekutu masi berada disana. Selain morotai, Bacan dan Tidore memperoleh status yang sama. Status kesewaprajaan ini kemudian ditingkatkan menjadi afdeling dan merupakan salah satu bagian di bawah Keresidenan Maluku Utara.

Penutup

Realitas menunjukan faktor utama yang mendorong kedatangan pedagang-pedagang dari Cina, India, dan Arab sebelum abad ke- XVI karena di dorong kebutuhan akan rempah-rempah. Hal yang sama juga mendorong bangsa-bangsa Barat berdatangan di wilayah kepulauan Maluku pada permulaan abad ke-XVI Ternate.Keberadaan bangsa-bangsa Barat terutama Belanda dengan VOCnya berhasil menguasai aspek ekonomi dan politik.Kemudian di representasi secara dominan oleh kolonialisme dan kapitalisme, ketika kekuasaan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda, dan sekaligus menandai terbentuknya secara formal pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal yang sama juga ketika Ternate di jadikan sebagai pelabuhan Bebas pada tahun 1854, tidak terlepas dari kepentingan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi. Bahkan telah menjadi bagian yang integral dalam aktifitas di wilayah koloninya. Kehadiran bangsa-bangsa Belanda di Maluku Utara bertujuan menguasai sumber rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, sekaligus menandai dimulainya babak baru perjuangan rakyat Maluku Utara dalam melawan dominasi bangsa-bangsa Barat di Maluku Utara.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun di Ternate tidak terdapat perubahan-perubahan penting dalam tata pemerintahan. Pemerintahan lebih bersifat militer atau disesuaikan dengan kepentingan militer. Kehidupan sosial ekonomi merosot sama sekali. Kehidupan rakyat, terutama yang mereka yang tidak mempunyai hubungan resmi dengan pemerintah militer Jepang tidak menyenangkan, penduduk diatur sedemikian rupa sehingga mudah diawasi. Semua kegiatan ekonomi di tujukan untuk membantu angkatan perang Jepang. Khusus dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah masih berjalan seperti biasa akan tetapi fungsi sekolah tak ubahnya sebagai tempat propaganda Jepang. Dalam bidang kesenian, pemerintah Jepang dan para prajut Jepang berusaha pula memperkenalkan seni budaya Jepang. Kehidupan intelektual

juga dibatasi kebebasan dan bidang geraknya. Dalam kehidupan beragama dapat dikatakan tidak tidak berkembang. Perkumpulan-perkumpulan ibadah selalu diawasi, begitu pula hubungan dengan dunia luar tertutup sama sekali. Siaran-siaran radio diawasi dan hanya kemenangan-kemenangan Jepang dimedan perang yang disiarkan kedalam masyarakat. Keadaaan tersebut berlangsung hingga Jepang menyerah pada sekutu 1945.

BAB V

KESULTANAN TERNATE PADA ERA ORDE LAMA 1945-1996

Pengantar

Bab ini menjelaskan partisipasi politik Sultan Ternate ke-47 Iskandar Muhammad Djabir Sjah pada era Pemerintahan Soekarno.Secara politik dengan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945, bagi Kesultanan Ternate merupakan awal keruntuhan pranata feodalisme dengan lahirnya negara baru (negara kesatuan RI). Tentu menjadi ancaman supermasi politik dan ekonomi mereka. Paling tidak, bagi elite Kesultanan Ternate dengan adanya kehadiran negara bangsa (*nation state*), akan menjadi ancaman tiga pilar penyangga supermasi politik dan ekonomi.

Kehadiran negara kesatuan RI, mendapat tantangan dari elite Kesultanan Ternate.Landasan yang memberikan kedudukan mulia bagi sultan yang sudah diubah pada zaman penjajahan Belanda (penobatan sultan harus mendapat restu Belanda), kembali mendapat pukulan dengan dibangunya ideologi negara kesatuanyang mengedepankan basis loyalitas pada negara dengan dilakukannya pemisahan antara jabatan-jabatan publik dalam format politik modern dengan kekuasaan tradisional. Konsekwensinya akan ada pemisahan antara antara jabatan-jabatan istana yang didasarkan pada keturunan dan institusi publik. Dengan demikian seorang sultan tidak secara otomatis menjadi gubernur maupun bupati, melaingkan dipilih melalui kontestasi melalui partai politik atau jabatan-jabatan dalam birokrasi bukan lagi suatu yang melekat secara geneologis melaingkan harus didasarkan atas kompotensi tertentu.[322]

Dalam menghadapi perubahan tersebut, strategi survivalitas yang digunakan oleh Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah, sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia yakni mengambil sikap politik yang berbeda dengan sebagian besar kaum nasionalis Indonesia. Ia menerima gagasan negara federal yang digagas oleh Herbertus J. van Mook. Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah mengikuti Konferensi Malino dan Konferensi Denpasar tahun 1946 sebagai anggota senat mewakili Maluku Utara dalam rangka pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT).Pilihan politik inilah, melahirkan pergolakan ideologis dan politis, antara kekuasaan tradisional (Kesultanan Ternate) mendapat tantangan dari kelompok-kelompok anti swapraja (republik vs federalis).

Oleh karena itu, untuk menjelaskan bagaimana strategi yang digunakan Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah dalam upaya mempertahankan kekuasaannya pada pemerintah Soekarno. Maka Alur kajian akan dimulai dengan menelusuri terlebih dahulu bagaimana peta politik lokal pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Era ini penuh dengan pergolakan ideologis dan politis, kaum bangsawan (kekuasaan tradisional) mendapat tantangan dari kelompok-kelompok

[322] AA GN Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*.(Yogyakarta, IRE Press, 2004), hlm.107.

anti swapraja. Selanjutnya menelusuri aktivitas pendidikan Iskandar Muhammad Djabir Sjah hingga dilantik menjadi Sultan Ternate ke 47dan Residen Maluku Utara pada 1945. Bagian selanjutnya akan memaparkan beberapa peristiwa politik seperti; keterlibatan Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjahdari konferensi Malino dan Denpasar hingga terpilih menjadi Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur pada 1949, bagaimana respons Pemuda Maluku Utara atas Pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), penolakan Sultan Iskandar Djabir Syah atas pembentukan Republik Maluku Selatan (RMS), Bagian terakhir bab ini mengetengahkan Pemilu 1955 di Ternate: Elite Kesultanan vs non Kesultanan. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan mengambarkan secara terperinci peristiwa-peristiwa politik tersebut.

A. Peta Kekuatan Politik Lokal Pasca Kemerdekaan

Proklamsi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tanggal 17 Agustus 1945, bagi elite Kesultanan Ternate merupakan awal keruntuhan pranata feodalisme dengan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia (RI), tentu menjadi ancaman supermasi politik dan ekonomi mereka. Peran dan kedudukan kaum elite yang telah berabad-abad dinikmati, mendapat tantangan dengan dibangunya ideologi negara kesatuanyang mengedepankan basis loyalitas pada negara. Namun demikian,hubungan politikantara elite Kesultanan Ternate dengan pemerintah Hindia Belanda, dapat dikatakan terjalin dengan baik.

Realitas menunjukan selama pendudukan Jepang di Ternate 1942-1945, Sultan Ternate ke-47 Iskandar Muhammad Djabir Sjah dan keluarganya diungsikan ke Brisbane Australia atas perintah H.J. van Mook. Pada 27 September 1945 SultanIskandar Muhammad Djabir Sjah kembali keTernate, dan langsung dilantik sebagai Residen Maluku Utara[323] dengan pangkat Letnan Kolonel KNIL (Kolonel *Tituler der Koninghen Orange van Nasau*).Surat pengangkatannya sebagai Residen tertanggal 16-9-1945, yang isinya "bahwa sehubungan dengan pembicaraan kita beberapa lalu, nampak memberikan jawaban bagi rencana mengangkat Sultan Ternate sebagai perwira KNIL. Mengingat dia berada di bawah pimpinan Paku Alam dan Mangkunegara dan biasanya berpangkat Kolonel, dia harus diangkat menjadi Letkol".[324]

---

[323] Karesidenan Ternate (Maluku Utara), meliputi tiga wilayah Kesultanan di Maluku Utara yaitu; wilayah kekuasaan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan. Wilayah Kesultann Ternate meliputi; Pulau Ternate, Hiri, Halmahera Barat dan Utara, Moti, Makian, Kayoa, Guraici, Morotai, Mayo, Tofure, Sula-Taliabu dan Bangai. Wilayah Kesultanan Tidore meliputi, Pulau Tidore, Maitara, Mare, dan Halmahera Tengah dan Timur.Wilayah Kesultanan Bacan meliputi; Pulau Bacan, Kasiruta, Tawale Besar dan Obi. Lebih jelasnya baca, Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. (Jakarta: Gora Pustaka Indonesia, 2007), hlm. 237-238.

[324] ANRI, *Algemene Secretarie*, No. 1361 bundel 11.

Kehadirannyasebagai Residen Maluku Utara, mendapat reaksi dari tokoh-tokoh dan pejuang pro-republik.[325] Mereka menilai Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah adalah boneka Belanda, karena sejak awal proses penetapannya sebagai sultan sudah diintervensi dan mendapat restu dari Pemerintah Hindia Belanda. Mereka menilai pengangkatannya sebagai Residen sebagai strategi Pemerintah Hindia Belanda agar tetap kembali menguasai daerah koloninya.[326]

Gambar 7
Sultan Ternate Ke 47 Iskandar Muhammad Djabir Sjah (1925-1975)

Sumber: Tabloid Parada, 2000

Sebagai Residen, Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah aktif membangun kerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat pada Desember 1945, komisaris Pemerintah Belanda untuk Indonesia Timur van Hoven melakukan kunjungan ke Ternate.Pada kesempaan itu, Residen Maluku Utara sekaligus Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah mengusulkan pembentukan federasi swapraja antara Kesultaan Ternate, Tidore, Bacan dan Luwuk (Sulawesi

[325] Gerakan anti Pemerintah Belanda dimotori para pemuda pro-republik yang sebagian besar anggotanya bekas pejuang-pejuang kemerdekaan yang tidak puas dengan sikap yang diambil oleh Sultan Iskandar Djabir syah pada saat kedatangan dari tempat pengungsian ke Ternate. Perlawanan mereka dilakukan dalam bentuk perampokan, penculikan dan sabotase kepentingan pemerintah Hindia Belanda.Pada tanggal 12 September 1946 Tentara KNIL melakukan aksi pembersihan dengan menangkap dan menembak mati kelompok yang dipandang ekstrimis (kaum pendukung negara kesatuan).Mereka itu adalah Muhammad Abd. Rahman Tibi, Sabtu Mataoga, Ahmad Yunus, Katidja, Hasan Esa, Djafar, Said Alting, Abdul Wahab Alting, dan Mohidddin. Aksi pembersihan itu dimaksudkan untuk menciptakan ketakukan kepada tokoh pro-republik, sekaligus membuka jalan agar kehadiran Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah yang diboncengi NICA di Ternate, situasi aman dan tidak menimbulkan gejolak. Lihat Chasan Boesoirie, *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*. (Jakarta: tanpa Tahun), hlm.8-11. Dan lihat Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir*, (Ternate: Depdikbud, 1982).

[326]*Ibid.*,hlm. 12-13.

Tengah).[327]Oleh karena itu pemerintah Belanda merespon dengan mengelurkan keputusan No, 27.1946 tentang pembentukan daerah otonomi Maluku Utara yaitu TTB (Ternate, Tidore dan Bacan) dalam federasi berbentuk Dewan Swapraja.

Sikap Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah yang loyal terhadap Pemerintah Hindia Belanda, mulai berkembang menjadi gerakan politik yang menentang kembalinya Pemerintah Hindia Belanda di Ternate dan pemerintahan *swapraja*.Kondisi inilah melahirkan dua kelompok yang berbeda secara ideologi politik yaitu; kelompok swapraja (bangsawan) dan kelompok pro-republik.[328]

Dukungan Belanda yang diberikan terhadap sultan, memunculkan sikap perlawanan dari tokoh pro-republik. Pada tanggal 12 Nopember 1945, tokoh-tokoh pro-republik seperti; Arnold Mononutu, Chasan Boesoirie, Abjan Soleman, Abubakar Bachmid, M.A. Hanafi, M. Zen Assagaf, Umar Assagaf, Abd. Rahman Zougira, Muhammad Abd. Rahman, dan Habib Ali Syeh Abubakar melakukan pertemuan untuk membahas kondisi Maluku Utara pasca proklamasi kemerdekaan RI. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain. *Pertama*, melarang kehadiran Belanda di Ternate.*Kedua*, menuntut dihapusnya daerah swapraja Ternate yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.Ketiga, mensosialisasikan proklamsi kemerdekaaan Republik Indonesia (RI).Hal ini dilakukan, karena sebagian besar masyarakat Maluku Utara belum mengetahui berita kemerdekaan RI.[329]

Untuk meredam kelompok pro-republik, pada 11 Desember 1945 Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah sebagai Residen Maluku Utara mengundang Arnold Mononutu dan Chasan Boesoirie[330]di istana Kesultanan Ternate. Sultan mengajak kedua tokoh pro-republiktersebut, untuk membentuk partai politik yang bercorak *rijksverband* sehingga dapat berkerjama dengan pemerintah Hindia Belanda.Namun, saran dari Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah tersebut ditolak. Setelah pertemuan tersebut, IskandarMuhammad Djabir Sjah mendirikan partai yang berhaluan *rijksverband* yang dinamakan Pasmo (Partai Sedjarah Maluku Utara). Partai ini di pimpin oleh M. Nasir saudara Sultan Iskandar Muhammad Djabir

---

[327]Luwuk adalah salah satu swapraja di Sulawesi Tengah, yang bersama Banggai dan Tobungku pernah menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate hingga permulaan abad ke-20. Untuk lebih jelasnya lihat Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia, 2007, hlm. 460-462.

[328] Rustam Hasim dan Mokhtar Yusuf "*Sultan In the History of Ternate 1946-2002*". Jurnal Ilmu Budaya UNHAS. Vol. 4, Nomor 2, Desember 2016.

[329]*Menara Merdeka*. Ternate,12 Desember 1946.

[330]Chasan Boesoirie, di lahirkan 13 Agustus 1910 di Semarang. Setelah lulus menjadi dokter pada tanggal 2 Juni 1937. Pada tanggal 9 Oktober 1937 di tugaskan ke Weda (suatu kampung kecil dipantai timur Halmahera). Weda termasuk dalam daerah *zelfbestuurende landsrechtshappen* Ternate, Tidore dan Bacan dengan Kota Ternate sebagai ibu kota. Selain bertugas sebagai dokter kepala yang membawahi dokter-dokter di Maluku Utara, Chasan Bousoiri meniti karier politiknya sebagai pengurus Partai Indonesia Maluku Utara pada 1945.Kemunculnya di pangung politik dimulai ketika masa kemerdekaan pada saat di bentuknya negara Indonesia Timur (NIT), pada tanggal 24 Juni 1946. Pada saat itu dr. Chasan Boesoirie mewakili Maluku Utara sebagai anggota Senat dari partai Indonesia (PI) yang pro-republikan. Untuk lebih jelasnya baca, Chasan Boesoirie, *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*. (Jakarta: Tanpa Tahun).

Sjah, yang beranggotakan para bangsawan seperti; Hasan Ayanhar dan Dano Syafei.[331]Dengan demikian Pasmo merupakan organisasi politik lokal pertama yang didirikanolehelite Kesultanan Ternate pada awal kemerdekaan.

Sejak saat itu suhu politik di Ternate sedang 'hangat", pada bulan Desember 1945 para pemuda pro-republik kemudian merespon dengan membentuk organisasi tandingan, yang dinamakan Persatuan Indonesia (PI).[332] Sebagai ketuanyadipilih M.A. Kamaruddin[333], dan sejumlah anggotanya terdiri dari; Arnold Mononutu, Chasan Boesoirie, Abubakar Bachmid, M.A. Hanafi, M. Zen Assagaf, dan Abjan Soleman.Keterlibatan tokoh-tokoh tersebut dalam organisasi politik, bukan merupakan hal yang baru.Sebelum kemerdekaan mereka pernah terlibat sebagai pengurus organisasi sosial seperti; Gabungan Politik Indonesia (GAPI), PARINDRA (Partai Indonesia Raya), GERINDO (Gabungan Rakyat Indonesia).Di samping itu mereka juga mendirikan sebuah tabloid mingguan yang dinamakan "Bulan Kebangunan Timur" dipimpin Umar Assagaf dan Abubakar Bachmid.[334]

Persatuan Indonesia adalah partai politik lokal pertama pro-Republik yang lahir dikawasan Timur Indonesia, dengan tujuan memberi dukungan kepada Negara Republik Indonesia (RI). Organisasi ini dipakai sebagai alat untuk mengkritik kehadiran kolonial Belanda yang sudah lama berkuasa di Maluku Utara dan daerah-daerah lain di Timur Indonesia.[335]Dalam perkembanganya PI mengalami perkembagan yang pesat, hingga di akhir tahun 1947 PI telah mempunyai cabang di luar Kota Ternate, seperti; Tobelo, Galela, Tidore, Bacan, Makian, Sanana, Weda, dan Jailolo, dengan jumlah anggota kurang lebih 10.000. orang.[336]

Dalam menyebarluaskan informasi dan perjuangannya, mereka mendirikan sebuah tabloid mingguan dengan nama "Menara Merdeka" dipimpin Umar Assagaf dengan redaktur Arnold Mononutu. Melalui Menara Merdeka, mereka menyebarluaskan Proklamasi kepada masyarakat agar bangkit dan menghadapi penjajah yang ingin berkuasa kembali di Maluku. Koran ini tidak hanya diedarkan di Maluku Utara, tetapi juga ke Minahasa (Sulawesi Utara), dan Maluku bagian Selatan. Melalui PI para pemuda selalu memonitor kejadian-kejadian yang terjadi di Jakarta dan kemudian disampaikan kepada masyarakat di Maluku Utara. Pada setiap

---

[331] Lihat Hamid Kotambunan,*Perjuangan Rakyat Maluku Utara Membebaskan Diri dari Kolonialisme*. (Jakarta: Gamalama Media, 2003), hlm 12.

[332]Kapan tepatnya PI berdiri tidak diketahui secara pasti. Penulis tidak berhasil mengkonformasinya karena seluruh tokoh pimpinan PI semuanya telah meninggal. Seperti di jelaskan Chasan Boesoirie dalam memorinya, PI dideklarasikan beberapa hari setelah pertemuan dengan Sultan Iskandar Djabir Syah.Berdasarkan pernyataan tersebut kuat dugaan PI didirikan pada bulan Desember 1945.

[333] Alasan pemiliahan M.A. Kamaruddin sebagai ketua PI didasarkan pada kriteria bahwa ia merupakan putra Ternate yang ketokohannya sebagai seorang Digulis sangat menyakinkan. Kamaruddin adalah pengikut setia Bung Hatta dan pernah melakukan pemberontakan melawan Belanda 1927 sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Lihat Hamid Kotambunan, *op.cit.*, hlm.14.

[334] R. Nalenan, *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot.*(Jakarta: Gubung Agung, 1981), hlm. 23.

[335]*Menara Merdeka*. Ternate: 9 Januari 1947.

[336]*Menara Merdeka*. Ternate: 22 Desember 1947.

pemberitaanya surat kabar Menara Merdeka sangat aktif menghidupkan semangat perjuangan dan sikap anti Belanda.[337]

Dalam merespons kegiatan politik tokoh-tokoh PI tersebut, pada Agustus Residen Iskandar Muhammad Djabir Sjah membuat surat ederan kepada seluruh *onderafdeling* (pemerintahan wilayah setempat) yang isinya (1), jangan bentrok melawan Nederland atau kelompok rakyat lainnya, dan (2), ikatan persahabatan dengan Nederland supaya tetap dipelihara. Oleh karena itu, Residen Djabir Syah meminta aparat pemerintah di *onderafdeling* agar tetap tenang dan memelihara keamanan.[338]

Perjuangan yang sama pun dilakukan pemuda-pemuda pro-republik di Ambon. Pada 15 Mei 1946 mereka mendirikan Partai Politik Maluku (PARPIM) dengan beranggotakan J. Latuhaharhary, M.Putuhena, Mohammad Padang, dan M.Ruhupatty. Tujuannya ialah mempertahankan Negara Kesatuan RI dan Undang-Undang dasar 45, serta mempertahankan daerah Maluku dalam wilayah RI. Pada tanggal 8 Oktober 1946 ditempat kediaman Gubernur Maluku perserikatan pemuda Ambon mengeluarkan Maklumat:

1. Kami Orang Ambon bertanah air Indonesia
2. Kami bedjoeang bersama-sama saoedara- saoedara lain golongan bangsa Indonesia oentoek membela dan mempertahankan Repoeblik Indonesia
3. Kami tidak maoe saoedara- saoedara kena ditipoe Moeslihat Belanda, maka dari itoe kami minta soepaja;(1) Djangan saoedara- saoedara dipakai sebagai alat Belanda, (1), bekas militer-militer Belanda dan sjoega jang sekarang berkerja dalam tentara Belanda, djanganlah menghalangi-halangi kemerdekaan Indonesia.[339]

Sejarah menunjukan tokoh-tokoh asal Maluku memainkan peran penting pada masa pergerakan, pendudukan Jepang hingga kemerdekaan. Pada masa pergerakan, perjuangan melalui organisasi-organisasi sosial telah berkembang di Ambon seperti; *Ambon Raad*, *Moloeksch Politiek Verbond*, Sarekat Ambon dan *Ambon Voeruit* sebagai dampak dari gerakan kebangkitan nasional, yang muncul pada awal abad ke-20 di Pulau Jawa. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk membina persatuan dan kesatuan menuju gerakan kesadaran nasional. Disamping itu, fungsi organisasi tersebut sebagai sarana pendidikan untuk merubah adat kebiasaan yang telah usang yang mengekang perkembangan masyarakat Maluku dan juga memberi kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan[340]. Untuk memperjuangan cita-cita organisasi tersebut, mereka kemudian menerbitkan surat kabar sebagai sebagai wadah perjuangannya.

---

[337] R.Z. Leirissa, *op cit.*, hlm. 83.

[338] Adnan Amal, *op cit.*, hlm. 472.

[339] "Ambon tidak bisa terpisah dari Republik", dalam *Menara Merdeka*. Ternate, 12 Oktober 1946.

[340] Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*. (Jakarta: Depdikbud,1978), hlm. 31.

Tabel 6
Perkembangan Media Massa di Maluku 1923-1952

No	Nama Surat Kabar	Pendiri	Tahun Terbit
1	Ambon Vooruit	C.F. de Fretes	1923
2	Minggu Sentosa	Siechan Becmid	1937
3	Sinar Maluku	D. Ajawaila	1930
4	Berita Maluku	P. Tutuarima	1934
5	Masohi Ambon	John Tupamahu	1933
6	Ambon Baru	C.Watimena	1938
7	Utusan Maluku	E.U. Pupella	1934-1935
8	Utusan Kita	Ferderik Kansil	1937-1945
9	Sinar	E.U. Pupella	1946-1952
10	Pendidikan	OT.Pattimaipau	1936-1940
11	Pendidikan Rakyat	E.U. Pupella	1946-1952
12	Siwa Lima	Z. Pesuarissa	1948-1950
13	Suara Rakyat Maluku	C.A. Wairita	1946-1950
14	Menara Merdeka	Arnold Mononutu	1945-1951

Sumber :Di olah dari berbagai sumber

Sejalan dengan situasi politik yang kian meningkat secara nasional, surat kabar tersebut diatas pada masa pergerakan hingga pasca kemerdekaan memaingkan peranan penting dalam menyebarluaskan informasi, sekaligus meningkatkan semangat nasionalisme rakyat Maluku. Walaupun keberadaan surat-surat kabar tersebut tergolong kecil, akan tetapi sebagai sumber informasi, media-media tersebut cukup berhasil membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Maluku di saat itu.

Pada tanggal 9 Januari 1946, partai Persatuan Indonesia mengadakan kongres ke-2 di Ternate. Kongres tersebut akhirnya memilih Chasan Boesoirie sebagai ketua dan Arnold Manonutu sebagai sekertaris. Terpilihnya kedua tokoh pro-Republik tersebut, PI tampil sebagai organisasi yang sangat tegas menentang seluruh kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Maluku Utara. Dalam laporannya Residen Maluku Utara pada tanggal 15 April 1946, Iskandar Muhammad Djabir Sjah, menyebutkan bahwa PI telah mendongkrak kesadaran politik rakyat Maluku Utara, sehingga menimbulkan kekhwatiran pihak Pemerintah Hindia Belanda di Ternate. Pada tanggal 12 Juli Residen Iskandar Muhammad Djabir Sjah memangil Chasan Bosorie sebagai ketua PI, memintaanya bahwa dalam perjuangannya tidak boleh menimbulkan kekacuan. Dalam hal ini Iskandar Muhammad Djabir Sjah dan berkata kepada Chasan Boshorie " *Dokter ik kan niet op tegen de speldeprikken van U. Iktreed af een word van U is voldurde om Noord Moluccan in opstand te brengen.*[341]

[341] Dikutip dari Arsip pribadi yang ditulis langsung oleh Iskandar Muhammad Djabir Sjah, berupa riwayat hidup yang ditulis sejak tahun 1950.

Hubungan yang tidak harmonis antara kedua kelompok tersebut, menyebabkan beberapa tokoh pro republik seperti Chasan Boshorie dan Arnold Manonutu di berlakukan oleh secara tidak adil oleh tentara KNIL. sebagaimana dikisahkan oleh Chasan Boesoirie "Di Morotai, saya dinterogasi oleh seorang kapten intel Belanda. Ditanyakan alasan mengapa tidak mematuhi perintah D.J. van Mook untuk mengungsi dari Ternate ke Morotai. Saya menyatakan tuan adalah seorang militer, saya seorang dokter, tuan tidak akan mengerti, disatu pihak tuan harus membunuh banyak musuh sedangkan saya menyelematkan jiwa. Jelas kita bertolak belakang"[342].

Dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal H.J. van Mook berupaya mengembalikan pemerintahan koloni diatas tanah jajahannya di Indonesia dengan membentuk Negara-negara bagian. Untuk mewujudkan rencananya itu, van Mook bertindak sendiri untuk melaksanakan Konferensi Malino di Makasar 1946. Tujuanya mau mendirikan negara-negara bagian yang dapat dipakainya sebagai alat untuk menandingi republik, dengan sasaran menjadikan wilayah Indonesia Timur sebagai tujuan utama.[343] Dalam konferensi tersebut utusan yang hadir mewakili Maluku Utara terdiri atas; Chasan Boesorie dari Persatuan Indonesia, Salim Fabanyo dari Partai Sedjarah Maluku Utara, dan Residen Maluku Utara Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah.

B. Dari Pendidikan Belanda Hingga Menjadi Sultan Ternate Ke-47

Iskandar Muhammad Djabir dilahirkan di Ternate pada tanggal 4 Maret 1902, sebagai anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan Hi Usman Sjah (Sultan Ternate 46) dan putri Mihir (bangsawan Susupu). Pendidikan dasarnya dimulai pada tahun 1912 dengan memasuki Sekolah Melayu di Ternate. Setelah tamat dari sekolah dasar pada tahun 1915, ia melanjutkan ke *Europese Lagere School* (SMP) di Ternate. Akan tetapi tidak tamat karena ayahnya Sultan Usman Sjah di asingkan oleh Belanda ke Bandung karena dituduh terlibat pemberontakan di Jailolo (Halmahera Barat).[344]

Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 23 September 1915 No. 47, Sultan Usman Sjah dicopot dari kedudukannya sebagai Sultan Ternate. Pada saat yang sama, *jogugu* atas nama Kesultanan Ternate menandatanggani perjanjian pendek yang mengakhiri kedaulatan Kesultanan Ternate atas

---

[342] Chasan Boesoirie,*op.cit.,* hlm. 12-13.

[343]Mengenai konferensi Malino lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat.*Yogkarta; UGM Press, 1985.

[344] Pada tahun 1914, Sultan Usman Sjah (1896-1930) berupaya mengembalikan kekuasaan Ternate dengan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sultan mempolitisir rakyatdi Halmahera Barat (Jailolo) untuk memberontak.[344] Sultan Usman Sjah akhirnya ditangkap bersama putranya Pangeran Muhammad, yang saat itu menjadi *Kapita Lao* dan diasingkan ke Bandung tahun 1915. Setahun setelah pengasingan Sultan Usman Sjah ke Bandung, Belanda menangkap semua anak laki-lakinya, Ikhtira Jurahman dan Muhamad Nasir. Keduanya juga diasingkan ke Bandung. Mereka dikhawatirkan akan menyulut pemberontakan terhadap Belanda. Lihat Adnan Amal dan Irza Arnyta Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800–1950, Jilid II* (Ternate: Unkhair, 2002), hlm. 285.

kerajaannya.[345] Sejak periode tahun 1915-1929, tahta Kesultanan Ternate mengalami kekosongan pemerintahan. Seluruh kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan diatur dan ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijalankan oleh *Bobato Madopolo* (dewan menteri) dan *Bobato Nyagomoi se Tufkange* (lembaga legislatif).*[346]*

Selama dipengasingannya Iskandar Muhammad Djabir memilih melanjutkan sekolahnya ke MULO di Batavia pada tahun 1917. Selama menimba ilmu di Batavia, ia banyak berteman dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional salah satunya adalah Agus Salim. Dari pertemanan inilah Iskandar Muhammad Djabir bergabung dengan organisasi politik PSI dari tahun 1920-1925. Dari organisasi inilah Iskandar Muhammad Djabir mengenaldan belajar tentang politik, sehingga dalam perkembangannya ia tampil sebagai tokoh yang sangat berperan dalam pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT).[347]

Walaupun selama studinya, ia bergabung dengan tokoh-tokoh nasionalis, namun pihak Belanda telah mempersiapkannya untuk menjadi Sultan Ternate, sehingga dapat berkerjasama dengan Belanda. Hal ini dapat dilihat, setelah Iskandar Muhammad Djabir menyelesainnya studinya di MULO, pada 1925 pihak Belanda mengirimnya ke Sumbawa Besar untuk magang kepemimpinan di Kesultanan Bima sebagai *Ambtenaar Terbeschikking* selama 2 tahun untuk dipersiapkan menjadi sultan Ternate kelak.[348]

Setelah magang di kesultanan Bima, pada 1927, Iskandar Muhammad Djabir dijemput oleh Pemerintah Belanda dipulangkan ke Ternate. Berita kepulangan Iskandar Muhammad Djabir membuat gembira semua masyarakat Ternate. Kedatangannya dengan kapal milik Belanda disambut oleh seluruh lapisan masyarakat Ternate, dan menginginkannya sebagai calon Sultan Ternate. Kedatangannya di Ternate ia tidak langsung ditempatkan di *kadaton,* melaingkan di Kantor Residen (*Residentie Kantor*).

Berdasarkan musyawarah *Bobato Nyagomoi se Tufkange* (lembaga legislatif) dan *gam raha* (lembaga MPR), serta mendapat persetujuan Residen

---

[345]Memori van Overgave, Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo Seri 2,rel nomer 26. (Jakarta: ANRI), hlm. 13.

[346] Kesultanan Ternate terus mengalami kemerosotan. Posisi sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate sejak tahun 1866 hingga merosot kedudukannya menjadi sebuah *afdeling* pada tahun 1921. Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan tertanggal 16 April 1921, yang menetapkan perubahan status dari keresidenan menjadi *afdeling.* Perubahan status ini tidak lepas dari upaya pemerintah Hindia Belanda menguasai Ternate dan mengintegrasikan seluruh Kawasan Timur Indonesia ke dalam Propinsi Timur Besar (*Grote* Oost) di bawah seorang gubernur yang berkedudukan di Makassar. Memori van Overgave Karesidenan Maluku, Residen B.J. Haga, 1930. Mvo seri II E.(Jakarta: ANRI), hlm. 4-5.

[347]Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui riwayat hidup Iskandar Muhamad Djabir Sjah dari masa kecil, masa perjuangan, hingga akhir hayatnya. Silahkan baca Irza Arnita Djafaar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Sjah*. (Jakarta Bio Pustaka, 2005).

[348]Arsip pribadi yang ditulis langsung oleh Iskandar Muhammad Djabir Syah, *op.cit.*,hlm. 9-11.

Belanda, pada tanggal 2 September 1929 Iskandar Muhammad Djabir dilantik menjadi Sultan Ternate ke-47 (Lihat lampiran pengangkatan Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah). Sejak saat itu, Iskandar Muhammad Djabir memakai gelar Sjah di belakang namanya.[349] Tempat pelantikannya tidak dilakukan di dalam *kadaton,* tetapi di sebuah rumah penduduk di Kampung Makassar Ternate. Setelah Iskandar Muhammad Djabir Sjah dilantik menjadi sultan, ia meminta kepada Belanda agar membebaskan dan memulangkan kembali ayahnya (Sultan Usman Sjah) ke Ternate karena sudah usia lanjut. Permintaan tersebut dikabulkan Belanda, maka pada tahun 1933 Usman Sjah dipulangkan ke Ternate.[350]

Sejak Iskandar Muhammad Djabir Sjahdilantik sebagai sultan, pada 1930, Pemerintah Belanda mengeluarkan *Zelf Bestuur Regeling,* yang menetapkan Pembagian Maluku Utara kedalam tiga swapraja, yaitu; Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan.[351] Tiap-tiap kesultanan dibagi dibagi kedalam distrik-distrik, yang dikepalai oleh kepala distrik, dan membawahi onder-distrik. Kepala distrik diangkat dan diberhentikan oleh masing-masing sultan di wilayahnya.

Dengan demikian terdapat dua bentuk pemerintahan yakni, pemerintahan langsung Belanda dan pemerintahan tidak langsung dibawah para sultan dan pembantunnya. Bentuk pemerintahan tersebut berlangsung hingga masuknya tentara pendudukan Jepang. Ketika Jepang memasuki kawasan Maluku Utara tahun 1942, dengan alasan politik Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah memilih bekerja-sama dengan Sekutu (Belanda) ketimbang memihak Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang, Maluku merupakan salah satu dari ke empat wilayah pemerintahan di Indonesia bagian Timur. Keempat wilayah itu adalah Kalimantan dengan ibu kota Banjarmasin, Sulawesi dengan ibu kota Makassar, Nusa Tenggara dengan ibu kota Denpasar di Bali dan Maluku dengan ibu kota Ambon. Masing-masing wilayah ini dikuasai seorang Gubernur Militer. Daerah Indonesia Timur berada langsung di bawah Komando Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*).[352]

Pada tanggal 15 September 1944, pasukan Sekutu yang dikomandoi Jenderal Douglas Mac Arthur, melakukan pendaratan di Pulau Morotai.[353] Di Morotai,

---

[349]Pengunaaan gelar Sjah (ada juga mengunakan kata Syah) hanya diberikan kepada sultan yang baru terpilih.Asal usul pengunaan gelar Sjah dan sejak kapan gelar ini digunakan oleh sultan-sultan Ternate masih menjadi polimik. Menurut beberapa sumber bahwa pengunaan gelar Sjah dari Sultan Ternate diambil dari gelar nama-nama sultan dari Aceh atau gelar-gelar sultan dari Persia (Iran). Lebih jelasnya lihat Djoko Suryo, *et al*. *Agama dan Perubahan Sosial Studi: Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*. (Yogyakata: UGM LKPSM. 2001), hlm. 125-126.

[350] Irza Arnita Djafaar,*Op.cit.*,hlm. 35-36.

[351]Memori van Overgave, Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934. Koleksi Mvo Seri 2, Nomor 26 Arsip Nasional RI Jakarta.

[352] Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Maluku*.(Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977), hlm. 32.

[353] Pasukan Sekutu yang melakukan pendaratan di Pulau Morotai terdiri dari dua devisi komando Australia (devisi 7 dan 9), serta satu devisi Tentara Amerika (devisi 93 Negro). Dari Morotai, Pasukan sekutu kemudian diterjunkan di Sulawesi Utara dan Selatan, Nusa Tenggra dan Kalimantan. Sementara devisi Tentara Amerika Negro ditugaskan membebaskan Filipina. Lihat

pasukan Sekutu kemudian membangun landasan pesawat terbesar di Pasifik dan menjadikannya sebagai markas komando (*operation base and consolidation*) atau sebagai basis pertahanan untuk menghadang pasukan Jepang yang berada di daerah Kao. Peperangan antara kedua pihak pun dimulai di wilayah Maluku Utara. Kekuatan militer Jepang terus mengalami kemunduran di hampir semua lini pertempuran itu.

Posisi tentara Jepang yang terus terdesak di berbagai medan pertempuran di Maluku Utara membuat mereka merencanakan menangkap Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah. Sebagai penguasa di Maluku Utara, Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah tentu saja memiliki ribuan pendukung setia yang dapat dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan memenangkan perang. Informasi tentang rencana penangkapan sultan diketahui oleh pasukan Sekutu yang berada di Morotai. Pada tanggal 24 April 1945, Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah menerima surat dari Letnan Hubertus J. van Mook yang isinya: "Meminta Sultan dan keluargannya meninggalkan Ternate. Orang-orang Indo-Belanda diberi tahu bahwa Ternate akan dibom selama dua hari, yakni pagi hari pada pkl 06.00-09.00 dan sore pkl 16.00-18.00, dengan maksud untuk memberi kesempatan sultan dan keluargannya untuk lolos."[354]

Pada bulan Mei 1944, panglima perang Sekutu Jenderal Mac Arthur menginstruksikan agar menjemput Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah dan keluarganya dibawa ke Pulau Morotai.[355] Usaha sekutu tersebut berhasil. Pada tanggal 5 Oktober Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah dan keluargannya berhasil dievakuasi dari Ternate oleh regu *Hulptroepen* dibantu tentara Australia. Ia pertama-tama dibawa ke Pulau Hiri kemudian ke pangkalan Sekutu di Morotai. Setiba di Morotai, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober, atas perintah Jenderal Mac Arthur, mereka diungsikan ke Brisbane, Australia, dan bermukim di sana hingga perang usai.[356]

Adnan Amal, dan Irza Arnita Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah* 1800-1950 Jilid 2. (Ternate: Unkhair, 2003), hlm. 172-173.

[354]Tabloid *Parada*, *Ibid.*,hlm. 201.

[355] Pada bulan 1994, Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah, menerima sepucuk surat dari Panglima Perang Sekutu Jenderal Mac Arthur, yang diantarkan beberapa orang gerilyawan Indonesia yang berkerja-sama dengan Sekutu ke *kadaton* pada pukul 9 malam. Mereka membicarakan hal-hal yang serius dan sangat rahasia yang tidak bisa didengar orang lain kecuali sultan sendiri. Isi surat itu memerintahkan bahwa sultan Ternate dan keluarganya akan dievakuasi ke Morotai oleh satuan tentara Australia. Pasukan ini akan menjemput dan membawa sultan beserta keluarganya dengan perahu ke Pulau Hiri. Malam itu juga kami dibangunkan. Seluruh keluarga, yaitu istri dan anak-anak disuruh segera berkemas-kemas. Dengan terburu-buru kami meningalkan *kadaton* berjalan kaki tanpa alas kaki sampai di Desa Togolobe. Dari sana kami dibawa ke Pulau Hiri. Sebuah perahu motor berkecepatan tinggi akan membawa sultan dan keluarganya dari Hiri ke Morotai. Lebih jelasnya Lihat Syharinsad Waworuntu, *Sekelumit Kisah Hidup Rini Waworuntu,* (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1996), hlm. 24-25.

[356]Setibanya di Brisbane Australia, Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah dan keluargannya dijemput oleh Kapten Julius Tahia, yang ditugaskan untuk memindahkan penduduk sipil Belanda dari Jawa ke Australia. Mereka kemudian ditempatkan di Camp Colombia di Wacol. Kamp ini merupakan perkemahan besar masyarakat Indonesia dan Belanda yang terdiri dari orang-

Berita diungsikannya Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah dan keluarganya oleh Sekutu, membuat Jepang marah. Mereka tidak bisa lagi memanfaatkan sultan untuk kepentingan perangnya.[357]Karena gagal mendapat dukungan dari Iskandar Muhammad Djabir Sjah, Jepang kemudian melantik Muhammad Nasir (saudara Iskandar Muhammad Djabir Sjah) sebagai Sultan Ternate dan ditempatkan di Kao, pusat komando tertinggi Tentara Jepang di Halmahera. Pada waktu yang sama, Sultan Tidore, Zainal Abidin, juga dijemput dari Soisio, Tidore, dan tempatkan di Jailolo.[358] Pengangkatan kedua sultan tersebut merupakan upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat dalam menghadapi perang Asia Timur Raya.

Selama di Australia, Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah tidaklah secara penuh tinggal di sana, hanya keluargannya saja. Beberapa kali sultan dipangil ke Morotai karena dibutuhkan oleh Sekutu untuk mempersatukan masyarakat Maluku Utara yang sudah berantakan selama pendudukan Jepang. Selama di Morotai, sultan diperintahkan memberitahu kepada rakyatnya tentang situasi perang yang sedang berlangsung. Pemberitahuan itu disiarkan lewat selebaran berbahasa Ternate, Galela, dan Tobelo agar penduduk menghindarkan diri dari rayuan propaganda Jepang yang menginginkan kemenangan dalam Perang Dunia II. Pesan-pesan itu dicetak dan sebarluaskan lewat pesawat tempur Sekutu ke suluruh pelosok Maluku Utara.[359]

Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan Jepang berakhir ketika pasukan Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hirosima dan Nagasaki tanggal 6 dan 8 Agustus 1945. Serangan itu memaksa Kaisar Hirohito mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Informasi penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu mendorong tokoh-tokoh pergerakan pemuda untuk memaksa Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa

---

orang sipil dan militer. Namun di kamp ini, meraka hanya tinggal kurang lebih dua bulan. Setelah itu, mereka dipindahkan ke sebuah rumah yang dinamakan *Farmer House*. Setelah enam bulan mendiamai *Farmer House*, mereka dipindahkan ke sebuah rumah peninggalan keluarga Belanda I *Brunswek Street* berdekatan dengan Hotel Indonesia, tempat tinggal keluarga sultan lainnya. Rumah ini mereka ditempati sampai meraka dipulangkan ke Ternate. Irza Arnita Djafaar,*Op.cit.*,hlm. 27.

[357] Sebagai seorang sultan yang memiliki kekuasaan luas (Propinsi Maluku Utara sekarang), ia tentu sangat dibutuhkan oleh Jepang. Luas wilayah kekuasaannya dan jabatan *kolano* (sultan) dianggap sakral oleh segenap rakyat. Titah sultan juga merupakan sesuatu yang tidak boleh dilangar.Fanatisme yang berlebihan terhadap seorang sultan memberi pengaruh yang kuat terhadap rakyatnya.Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang maupun Belanda. Tetapi nasib baik lebih berpihak kepada Belanda karena dalam Perang Pasifik, panglima sekutu Jenderal Mac Arthur memerintahkan untuk mengungsikan sultan dan keluargannya ke Australia, sebagai suatu strategi untuk mengamankan wilayah koloninya di Maluku Utara. Lihat Junaidi Muslim, *Antara Unitarisme dan Federalisme: Kesultanan Ternate Pada masa Revolusi (1945-1950)*, Tesis S2 Sejarah Universitas Gadjah Mada, 2012.

[358]Arsip pribadi Iskandar Muhammad Djabir Sjah,*op.cit.*, hlm. 9-11.

[359] Pada bulan September 1945, setelah kurang lebih lima bulan pergi-pulang Australia dan Morotai, sultan dipangil ke Morotai, ia di-*militariseer* sebagai Letnan Kolonel untuk menerima *Over Civil Administration* di bawah perintah Jenderal Blamey dan wakilnya, Kolonel Thompson. " Sultan Ternate ke-47 Kolano Iskandar Muhammad Djabir Sjah: Khalifah Islam dan Penakluk Kaum Imperialis", dalam *Tabloid Parada*, edisi 5, tanggal 5-20 Mei 2001.

campur tangan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Pegangsaan Timur, No.56, Jakarta. Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia didampingi Bung Hatta dan para anggota PPKI.[360] Proklamasi yang dikumandangkan itu sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia tidak ingin dijajah lagi dan membentuk sebuah pemerintahan yang merdeka dan berdaulat.

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru diketahui penduduk kota Ternate pada awal September. Namun demikian, berita kemerdekaan RI ini dapat diketahui oleh penduduk di Halmahera Utara, khususnya di Pulau Morotai. Fasilitas komunikasi berupa radio milik tentara Sekutu dapat diakses luas. Sementara pihak militer Jepang di Galela juga memberitahukan hal itu kepada penduduk. Dari merakalah berita kemerdekaan RI kemudian tersebar luas di Wilayah Maluku Utara.

Setelah kekalahan Jepang tanggal 17 Agustus 1945, *minseibu* yang dijabat Noro San melakukan pertemuan dengan seluruh aparat pemerintahan Ternate dan Tidore. Termasuk para kepala kampung dari kedua pulau itu. Setelah pertemuan dibuka, Noro San mengucapkan pidato singkat, "Tuan-tuan, perang telah selesai dan kami harus pergi. Tuan-tuan harus memilih seorang kepala daerah yang akan menggantikan kami".[361]

Peserta pertemuan banyak yang bingung mendengar pidato singkat itu. Mereka belum mengetahui bahwa perang telah usai dan Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada tentara Sekutu. Setelah itu, Noro San meminta kepada peserta untuk menerima pimpinan kekuasaan pemerintahan dari Jepang. Pertemuan tersebut mengusulkan tiga nama calon. Masing-masing Arnold Mononutu, Raden Slamet, dan dr. Chasan Boesoirie. Mayoritas peserta pertemuan akhirnya memberikan suara mereka ke Chasan Boesoirie. Ia kemudian ditetapkan sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Maluku Utara untuk menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang.[362]Masa jabatan sementara Chasan Boesoirie sebagai kepala daerah yang dipilih oleh Jepang tidak berlangsung lama. Pada bulan September 1945, jabatan tersebut diserahkan kepada Sultan Iskandar Djabir Syah yang telah dilantik oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi Residen Maluku Utara. Dengan pengangkatannya sebagai residen yang membawahi dua *afdeling–afdeling Noord Molukken* dan *Afdeling* Tidore, sultan mulai menjalankan roda pemerintahan sipil hingga bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1950. Morotai yang sebelumnya hanya merupakan distrik, kini ditingkatkan statusnya menjadi HPB (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur)*. Selain Pulau Morotai, Bacan dan Tidore juga memperoleh status yang sama. Status keswaprajaan itu kemudian ditingkatkan menjadi *afdeling* dan merupakan salah satu bagian di bawah Keresidenan Maluku Utara.[363]

---

[360] Marwati Djoened Poesponegoro Nugrogo Natosusanto, (ed), *op.cit.*,hlm. 133.

[361]Irza Arnita Djafaar,*op.cit.*, hlm. 23.

[362] Lebih jelasnya lihat Chasan Bousoiri,*op. cit.*, hlm. 43.

[363]Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia, 2007, hlm. 321.

C. Dari Konferensi Malino Hingga Menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT)

Pada saat Soekarno dan Hatta memproklamsikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Belanda di Den Haag maupun pemerintah Hindia Belanda dipengasingan bawah pimpinan Letnan Jenderal H.J. van Mook yang berkedudukan di Brisbane (Australia) mempunyai rencana mengembalikan pemerintahan koloni diatas tanah jajahannya di Indonesia, dengan membentuk negara-negara bagian (federalis).[364]Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pada tanggal 24 Agustus 1945 Pemerintah Belanda yang berkedudukan di Brisbane membuat perjanjian dengan Inggris yang pada waktu itu ditugaskan untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang yang ada di Indonesia. Dalam perjanjian itu pihak Belanda di izinkan memegang kekuasaan sipil di Indonesia.[365]

Setelah tentara Sekutu meningalkan kawasan Timur Indonesia pada bulan Juli 1946. Letnan Jenderal H.J. van Mook membentuk *Algemeen Reggeringngs Commissaris* (ARC), yang bertugas menjalangkan pemerintahan sipil mengantikan *Chief Officers* dan *Staff Officers* dari NICA. Selain itu pejabat-pejabat Hindia Belanda yang telah dibebaskan dari tawanan Jepang diangkat lagi. Agar pemerintahan ini dapat berjalan dengan lancar, ia memaklumkan undang-undang keadaan bahaya diwilayah itu. Sehingga semua aturan-aturan militer yang telah dibuat oleh NICA tetap dipertahankan.[366]Dengan demikian Belanda berangsur-angsur membangun kekuasaanya dikawasan Timur Indonesia dengan pusatnya di Makasar.

Pada tanggal 16 Juli-25 Juli 1946 diselengarakan konferensi Malino[367] dibuka dengan resmi oleh Gubernur Jenderal Dr.H.J van Mook atas nama

---

[364]Sebelum kemerdekaan gagasan pemerintah Belanda untuk membangun Uni Belanda-Indonesia telah direncanakan oleh Letnan Gubernur Hindia Belanda Herbertus J. van Mook. Rencana ini telah di siarkan oleh van Mook setelah tiba di Jakarta. Gagasan ini sebenarnya menawarkan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia namun tidak lepas dari Belanda. Indonesia akan dibangun dalam bentuk negara ferderal dan menjadi bagian dalam Uni Belanda-Indonesia. Ratu Belanda akan menjadi pemimpin simbolis dari Indonesia Serikat. Maka tidaklah mengherangkan apabila tokoh-tokoh Republik yang sebagian besar merupakan pejuang pergerakan nasional menentang gagasan ini. Karena federalisme yang diingingkan oleh van Mook itu harus dipimpin oleh Belanda. Pergolakan dalam periode 1946-1950 adalah usaha untuk mengalahkan kebijakan van Mook tersebut.Lebih jelasnya lihat George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme and Revolusi Indonesia.*(ter). Ismail Muhammad dan Zakaren Abdul Rashid.(Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980), hlm. 67-69.Dan Lihat, Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit*.,hlm. 1-3.

[365]Arthur A. Schillers, *The Formation of Federal Indonesia 1945-1949*,Bandung, 1989, hlm. 126.

[366] R.Z. Leirissa,*Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI 1975), hlm. 47.

[367]Malino adalah sebuah tempat di Sulawesi Selatan yang terletak 70 km dari Makasar. Kata Malino (bahasa Bugis) "tempat yang damai". Suatu tempat perisitirahatan yang dulu ditahun 1932 dibangun oleh Gubernur J. Caron yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi.Konferensi Malino diadakan di Malino Sulawesi Selatan, daerah yang menghubungkan wilayah Timur Besar (Indonesia Timur) dengan Kalimantan dilihat dari sudut politis, ekonomis maupun geografis.Kota Makassar adalah pusat kehidupan ekonomis di wilayah bagian Timur Indonesia dan merupakan suatu bandar

Pemerintah Hindia Belanda. Konferensi ini diikuti oleh 39 perwakilan dari berbagi daerah seperti; Bali, Lombok, Riau, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Borneo Barat, Borneo Timur, Minahasa, Sangir Talaud, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Neeuw Guinea (Irian), Flores, Timor, Sumba, Sumbawa, Borneo Selatan,Maluku Selatan dan Maluku Utara. Utusan Maluku Utara di wakili oleh Chasan Boesoirie (PI), Salim A. Fabanyo (Pasmo), dan Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah (Residen Ternate).[368]Para utusan yang hadir pada konferensi tersebut didominasi raja-raja dan pegawai Belanda yang memerintah di daerahnya masing-masing.

Dalam pidato pembukaanya, H.J. van Mook mengatakan bahwa gagasan Pemerintah Belanda menyelengarakan Konferensi Malino telah disampaikan kepada perdana menteri RI Sutan Syahrir.Pada Konferensi tersebut, J.H. van Mook mengungkapkan niatnya untuk membangun "Negara federalis Indonesia"[369] yang meliputi Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Besar. Dalam konferensi itu direncanakan bahwa Negara Indonesia Timur akan diperintah suatu kabinet parlementer dan dikepalai seorang presiden. Selain itu akandibentuk suatu dewan perwakilan rakyat. Semuanya berkedudukan di Makasar.[370]

Setelah pidato pembukaan, H.J van Mook diminta para peserta konferensi memberi tanggapan mengenai gagasan pembentukan Negara Indonesia Timur.Diantara para peserta yang memberi tanggapan pada konferensi tersebut adalah Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah. Pada kesempatan itu Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah, memberi pandangan dengan mengatakan bahwa keinginan penduduk swapraja Ternate, Tidore dan Bacan agar konferensi

---

besar, sekaligus merupakan pusat lalulintas samudera di bagian Timur Kepulauan Indonesia.Lebih jelasnya baca Ide Anak Agung Gde Agung, *Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat.*(Yogkarta; UGM Press, 1985), hlm. 96.

[368]Iskandar Muhammad Djabir Sjah adalah sultan Ternate ke-47. Iskandar Muhamad Djabir Syah merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan Hi Usman syah (Sultan Ternate 45) dan putri Mihir (bangsawan Susupu). Ia dilahirkan di Ternate pada tanggal 4 Maret 1902. Pendidikan dasarnya dimulai pada tahun 1912 dengan memasuki Sekolah Melayu. Setelah tamat dari sekolah dasar pada tahun 1915, ia melanjutkan ke *Europese Lagere School* (SMP) di Ternate. Akan tetapi tidak tamat karena ayahnya Sultan Usman di asingkan oleh Belanda ke Bandung karena di tuduh terlibat pemberontkan di Jailolo (Halmahera Barat).Pada tahun 1917 Iskandar Muhamad Djabir melanjutkan sekolahnya ke MULO di Batavia.Selama menimbah ilmu di Batavia banyak bertemen dengan tokoh-tokoh pergerakan salah satunya haji Agus Salim, yang mengajaknya untuk bergabung dengan organisasi politik PSI dari tahun 1920-1925.Dari sinilah Iskandar Muhamad Djabir mengenal politik secara langsung sehingga mempengaruhi pemikiran politiknya di kemudian hari.Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui riwayat hidup Iskandar Muhammad Djabir Sjah dari masa kecil, masa perjuangan, hingga akhir hayatnya. Silahkan baca Irza Arnita Djafaar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. (Jakarta Bio Pustaka, 2005).

[369]Rencana itu dinamakan federalisme.Maksudnya suatu negara terdiri dari berbagai negara bagian. Sumatra direncanakan sebagai suatu negara, demikianpun Jawa. Indonesia Timur akan merupakan suatu Negara pula, dan demikian pula Kalimantan. Walaupun rencana ini dengan sendirinya berbeda dengan dengan cita-cita seluruh bangsa Indonesia yang menganut unitarisme atau Negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Lihat "Konferensi Radja-Radja di NIT", dalam Surat Kabar *Soeloeh Rakyat*, Makasar, 18 Juli 1946.

[370] "NIT Djundjung Kemerdekaan Politik", dalam *Soeloeh Rakyat*, Makasar 23 Juli 1946.

dapat mengambil keputusan-keputusan bersejarah bagi Indonesia. Apabila rakyat Maluku Utara memperoleh kemerdekaanya, ia akan setara dengan rakyat Nederland (Belanda) dalam ikatan persaudaraan. Menurutnya, kesamaan derajat dan status antara Indonesia dan Belanda inilah yang ingin dicapai. Ia kemudian mengusulkan bahwa bila parlemen telah terbentuk untuk Indonesia Timur dan Borneo (Kalimantan), hendaklah dibentuk senat atau majelis tinggi yang anggota-anggotanya diambil dari unsur swapraja (*zelfbestuurrders*), pemimpin persekutuan hukum, dan pemuka masarakat.[371]

Selain Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah, para peserta lain yang memberi tanggapan yakni; E.D. Dengah (Minahasa), J.P. Mangula (Minahasa), Sarapie (Sangir Talaud), Katili (Gorontalo), R.J. Matekohy (Maluku Selatan), Kaisepo (Papua), Nadjamuddin daeng Malawe (Sulawesi Selatan) dan I Gusti Bagus Oka (Bali). Semua pembicara tersebut berpendapat yang sama yakni menyetujui kerja sama yang erat antara Indonesia-Belanda. Karena itu pemerintah Belanda harus memperhatikan secara serius pendapat dan pikiran kalangan rakyat Indonesia Timur dan menekankan bahwa Indonesia Timur sebagai sebuah wilayah kesatuan harus tetap berada dibawah bendera Belanda. Mereka juga menyetujui usulan dari Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah yang menghendaki bahwa jika Negara Indonesia Timur telah dibentuk, maka Kalimantan harus di pisah sehingga federasi Indonesia hanya meliputi; Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur yang terdiri atas, Sulawesi, Bali, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.[372]

Sementara itu pandangan yang berbeda di kemukakan oleh Hasan Bosorie (wakil PI Maluku Utara).Ia mengawali pidatonya dengan sebuah pernyataan bahwa ia ingin mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diputuskan Konferensi Malino kepada Indonesia Merdeka. Menurutnya, politik Belanda di Indonesia selalu menjurus kepada pemikiran untuk tidak mengakui Indonesia memeliki pemerintahan sendiri.Belanda tidak pernah mengakui bahwa Indonesia telah mampu untuk merdeka. Indonesai yang merdeka akan berkerjasama dengan masyarakat dunia termasuk Belanda. Menurutnya hal terpenting yang harus dibahas pertemuan Malino adalah menyiapkan semua pranata dan sarana untuk sebuah Indonesia yang segera harus bebas dari kolonialisme.Selanjutnya Chasan Bosorie menyatakan bahwa memperkenalkan bendera Indonesia merupakan suatu keharusan. Maluku Utara siap mengibarkan bendera kebangsaan seperti yang dikibarkan di Jawa dan Sumatera. Indonesia yang merdeka akan menjalin kerjasama yang erat dengan Belanda atas dasar kebebasan dan persemaaan derajat.[373]

Satu hal yang menarik selama diselengarakannya konferensi Malino utusan dari Maluku Utara Chasan Bosorie yang berlahuan republik menuntut agar Merah Putih di jadikan Bendera NIT dan lagu Indonesia Raya di jadikan lagu kebangsaan NIT. Pada konferensi itu, terlihat perbedaan yang menyolok antara

[371]Memoar Iskandar Muhammad Djabir Sjah, *op.cit.*,hlm 9-11.

[372]Lebih jelasnya G. Kolff, *De* Conferentie Te Denpasar 7-24 December 1946. *Deel I: Handelingen*. (Batavia: tanpa tahun penerbit), hlm. 7-12.

[373]*Menara Merdeka*. Ternate: 27 Juli 1946.

Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah dan Chasan Bosoirie dimana Sultan Ternate setuju dengan ide federalisme, sementara Chasan Bosorie bersimpati dengan negara kesatuan.[374]Perbedaan ideologi inilah kemudian Chasan Boesorie tidak di undang dalam konferensi Denpasar, karena ditakutkan kehadirannya dapat mengganggu jalannya konferensi.

Pada sidang hari terakhir H.J van Mook memutuskan membentuk sebuah panitia mewakili Timur Besar, Bangka/Belitung, Riau dan Kalimantan. Wakil dari Indonesia Timur di wakili oleh Iskandar Muhammad Djabir Sjah, (Maluku Utara) Najamuddin daeng Malawa (Sulawesi Selatan), E.D. Dengah (Minahasa) dan Kapten Julius Tahiya. Panitia ini ditugaskan untuk merumuskan resolusi yang menjadi keputusan Konferensi Malino.Diantara beberapa keputusan yang hasilkan dalam Konferensi Malino, sebagai berikut:

I. Mengenai soal lagu kebangsaan dan bendera, konferensi mengambil suatu keputusan bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya di terima sebagai lagu kebangsaan.
II. Dalam bidang politik dan ketatanegaraan.
    a. Konferensi Malino memutuskan dengan suara bulat dalam bidang pembangunan kembali ketatanegaraan di wilayah Hindia Belanda dulu pembentukan suatu federasi yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda dulu bernama Negara Indonesia Serikat yang terdiri dari bagian-bagian (negara-negara) dengan daerah kekuasaan yang besar dan wewenang kekuasaan memerintah sendiri yang luas mungkin.
    b. Hubungan dengan Belanda
        1. Konferensi Malino menyatakan sebagai keyakinannya dianggap perlu untuk ditetapkan secara teliti kurun waktu yang dianggap perlu untuk mengadakan kerjasama di lingkungan kerajaan, yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Negara Indonesia Serikat untuk mewujudkan organisasi dalam bidang ketatanegaraan, ekonomi, sosial dan kebudayaan, dan untuk memperoleh perlengkapan-perlengkapan yang akan memberi kemungkinan-kemungkinan kepada Negara Indonesia Serikat dengan segala kebebasan dan merdeka mengambil keputusan sendiri mengenai kelanjutan hubungan antara Belanda dan Indonesia.
        2. Sebagian peserta konferensi menganggap kurun waktu peralihan selama lima tahun sudah cukup, sedangkan kelompok lain

[374]Pada konferensi itu, terlihat perbedaan yang menyolok antara Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah dan Chasan Bosoirie dimana Sultan Ternate setuju dengan ide federalisme, sementara Chasan Bosorie bersimpati dengan negara kesatuan. Perbedaan ideologi inilah kemudian Chasan Boesorie tidak di undang dalam konferensi Denpasar, disamping mereka sangat lantang menentang kebijakan van Mook pada konferensi Malino, sehingga ditakutkan kehadiran mereka dapat mengganggu jalannya konferensi. Lebih jelasnya lihat " Kesatoean dan Federasi", dalam surat kabar *Negera Baru* 15 Januari 1947.

berpendapat bahwa masa peralihan dapat diperpanjang selama-lamanya sampai sepuluh tahun.

III. Hubungan dengan Republik Indonesia
1. Konferensi Malino menyatakan keinginannya agar Timur Besar dan Kalimantan diwakili dalam perundingan dengan Syahrir cs dan Pemerintah Hindia Belanda bila dikehendaki oleh kedua belah pihak.
2. Memperhatikan keputusan Konferensi Malino agar struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem federal dan selanjutnya ditetapkan suatu masa peralihan sebelum negera Indonesia Serikat yang merdeka diwujudkan, maka dianggap wajar untuk minta perhatian Syahril cs atas keputusan-keputusan tersebut dan mengharapkan dalam waktu yang singkat dapat diadakan kerjasama demi kesejahtraan Indonesia Raya.[375]

Konferensi Malino sebagai peletak dasar terbentuknya negara Indonesia Timur (NIT). Hal ini dapat dilihat semua wakil daerah (utusan) sepakat untuk menerima sistem federal, sebagaimana disampaikan wakil-wakil mereka seperti; Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan termasuk dan Maluku Utara.[376]Najamudin Daeng utusan Sulawesi Selatan menyatakan daerahnya dapat menerima seluruh kesimpulan konferensi.Menurutnya titik tolak sebuah Negara Indonesia Serikat melalui aliansi dengan Belanda harus diwujudkan tanpa perlu adanya jangka waktu tertentu.[377]

Konsep negara federal juga menjadi cita-cita kaum nasionalis, seperti Bung Hatta. Dalam deklarasi PNI Baru 1932, Bung Hatta mengatakan negara federal menjadi garansi dalam menata harmonisasi dan menjamin keadilan

[375]Uraian terbesar dri bagian diatas di kutip dalam Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hlm. 114-117.

[376]Partisipasi politik Iskandar Muhamad Djabir Sjah pada konferensi Malino dengan melibatkan diri sebagai anggota senat NIT mewakili Maluku Utara, menunjukan keberpihakan politinya tidak bisa lepas dari pengaruh pemerintah Hindia Belanda. Ketika ditawari untuk membentuk sebuah negara dengan faham federalis oleh van Mook, Iskandar Muhammad Jabir langsung menyetujuinya dengan mengikuti berbagai macam konferensi Malino dan Denpasar. Bagi Iskandar Muhammad Jabir Syah pembentukan negara federal bukanlah disintegrasi tapi suatu sistem pemerintahan yang tidak berbeda dengan negara kesatuan.Ide dasar negara federal yang paling subtansial agar terjamin keadilan dalam alokasi sumber daya, disamping itu memungkinkan manajemen adiministrasi menjadi lebih efektif dan efisien, karena lingkupnya lebih terbatas. Di samping itu negara Indonesia Timur akan menjelma menjadi sebuah negara yang makmur dan dapat mengembangkan identitasnya sendiri, sebagimana diingingkan semua pihak. Oleh karena itu menurut Iskandar MuhammadJabir Sjah bahwa sistem federalislah yang cocok untuk Indonesia, sehingga memberi ruang kepada para raja-raja di timur Indonesia tetap berkuasa. Lebih jelasnya lihat Arnita Djafar, *op.cit.*, hlm. 34-35.

[377] "Sidang Parlemen NIT", dalam *Soeloeh Rakyat*. Makasar 12 Agustus 1946.

masyarakat.Sehingga pulau-pulau pinggiran dan daerah-daerah pedalaman yang jauh dari pusat dapat lebih bebas memekarkan diri.[378]

Menurut Deliar Noer pemikiran tentang Mohammad Hatta negara federal telah lama cita-cita perjuangannya sebelum kemerdekaaan RI.Hatta berpegang pada prinsip itu karena memandang situasi sosiologis-antropologis bangsa Indonesia yang majemuk maka konsep federalislah yang cocok untuk bangsa Indonesia[379].

Hal senada juga dikemukakan oleh Mangunwijaya, pemikiran Muhammad Hatta pada tahun 1950-an didasarkan pada pandangannya, mengingat beragamnya penduduk, kebudayaan, dan kondisi geografis, Indonesia lebih baik berbentuk federasi daripada negara kesatuan[380].

Sesuai kesepakatan Konferensi Malino bahwa Konferensi kedua (sebagai kelanjutannya) akan diadakan kurang lebih empat bulan di Denpasar.[381]Konferensi ini mempunyai wewenang berdasarkan keputusan Konferensi Malino untuk menyusun tata pemerintahan dan ketatanegaraan baru di wilayah Timur Besar melalui perundingan-perundingan dan pembicaraan-pembicaraan dengan wakil-wakil Pemerintah Belanda yang diprakarsai oleh Dr H.J. van Mook. Menurut Audrey R. Kahin, Konferensi Denpasar merupakan embrio lahirnya RIS, yang merupakan prototipe negara–negara boneka yang kemudian secara terus-menerus di bentuk Belanda.[382]

Sebelum dilaksanakan Konferensi Denpasar, pada tanggal 15 Nopember 1946 Pemerintah Belanda yang diwakili Schermerhorn dan Sutan Syahrir[383] dari Indonesia menandatanggani persetujuan penyelesaian masalah Indonesia yang disebut "Persetujuan Linggarjati" yang bertempat di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Isi persetujuan tersebut adalah:

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
2. Akan dibentuk negara federal dengan nama Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia

---

[378]. Lihat Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 256.

[379]Deliar Noer, *Muhammad Hatta Biografi Politik.*(Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 84.

[380]Mangunwijaya, Y.B. *Menuju Indonesia Serikat.*(Jakarta: PT. Gramedia, 1998), hlm. 73.

[381]Denpasar (Bali) di pilih sebagai tempat penyelengaraan Konferensi karena tempatnya aman setelah perang Margarana yang menewaskan Letnan Kolonel Ngurai dan 96 prajuritnya pada tanggal 20 November 1946. Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hlm. 75-77.

[382] Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan.* (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm. 54.

[383]Selama memimpin Kabinet Syahrir I dan II.Kebijakan politiknya lebih mengutamakan diplomasi, hal ini banyak ditentang oleh lawan politiknya seperti Tan Malaka karena diangap merugikan eksistensi Republik Indonesia. Namun demikian politik diplomasi yang dianutnya tetap dijalangkan, dsaat dilantik dan pembentukan kabinet Syahril II pada tanggal 12 Maret 1946, dengan tegas mengatakan tetap menjalangkan perundingan-perundingan dengan pihak Belanda berdasarkan pengakuan sepenuhnya terhadap Republik Indonesia. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional.* (Jakarta:Pustaka UtamaGrafiti, 1987), hlm. 7-8.

3. Dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan ratu Belanda sebagai kepala uni
4. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Uni Indonesia-Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949.[384]

Dengan disahkannya naskah tersebut, maka van Mook dapat leluasa bertindak membentuk Negara Indonesia Timur yang tidak bertentangan dengan semangat dan jiwa persetujuan Linggajati. Persetujuan Linggajati itu memberi kesan yang sangat mendalam kepada para utusan Konferensi Denpasar,karena mempengaruhi sikap politik mereka untuk mendukung pembentukan NIT.Sementara pihak peserta konferensi yang pro-Republik pun ikut mendukung pembentukan Negara Indonesia Timur karena naskah persetujuan Linggajati itu menegaskan bahwa "Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera.Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Sekutu atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak akan dimasukan pula di dalam atau ke dalam daerah republik".[385]Oleh karena itu pembentukan NIT yang dibahas pada konferensi Denpasar mendapat legalitas nasional sehingga membutanya menjadi akseptabel bagi semua golongan politik.

Konferensi Denpasar di mulai 7-24 Desember 1946, diikuti oleh 55 perwakilan utusan daerah dan tambah 15 utusan dari golongan minoritas (Cina dan Timur Asing lainnya) sehingga berjumlah 70 orang peserta. Untuk wilayah timur besar dibagi atas 13 daerah. Tiap-tiap daerah memilih wakilnya berdasarkan tata cara pemlihan yang ditentukan oleh daerah-daerah itu sendiri. Misalnya daerah-daerah yang telah memeliki dewan perwakilan seperti Bali, Sulawesi Selatan, Maluku Selatan, dan Minahasa. Maka kewenangan itu dipilih oleh dewan perwakilan yang bersangkutan.Sementara daerah-daerah lain yang tidak mempunyai dewan perwakilan maka dibentuklah dewan pemilih yang diberi wewenang untuk memilih wakil-wakil mereka untuk menghadiri konferensi Denpasar.[386]Delegasi Maluku Utara diwakili oleh Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah dan Sultan Tidore Zainal Abidin Alting.[387]

---

[384] Marwati Djoened Poesponegoro Nugrogo Natosusanto, et.al, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). hlm. 269.

[385] "Republik Mengakoei NIT", *Negara Baru.* Makasar, 1 Januari 1947.

[386]Satu hal yang sangat penting dalam penyelengaraan konferensi ini adalah penetapan kriteria soal penunjukan wakil-wakil daerahnya. Satu hal yang patut di garis bawahi yang menjadi utusan daerah adalah umumnya diwakili oleh para sultan/raja dan berhaluan federalis. Disamping itu golongan minoritas Cina dan Timur Asing lainnya merupakan wakil dari golongan dan aliran, dan kehadiranya pun harus mendapat persetujuan dari van Mook. Lihat G. Kolff, *De Conferentie Te Denpasari* 7-24 Desember 1946, Deel I. Handelingenn (Batavia. Tanpa tahun), hlm. 51-52. Dan lihat " Perwakilan Parlemen NIT Wanita Tidak Turut Serta", *Soeloeh Rakyat*, Makasar, 3 Januari.

[387] Keterwakilan Sultan Ternate dan Sultan Tidore yaitu Zainal Abidin Alting mewakili Maluku Uatara mengindikasikan yang diundang oleh van Mook adalah mereka yang menyetujui gagasan dan pro negera federal. Sementara Chasan Boesorie dan fabanyo tidak di undang dalam konferensi Denpasar, disamping mereka sangat lantang menentang kebijakan van Mook pada konferensi Malino, sehingga ditakutkan kehadiran mereka dapat mengganggu jalannya

Jika pada Konferensi Malino pembicaraan-pembicaraan masih bersifat umum dan menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia pada umunya. Sementara dalam Konferensi Denpasar pembicaraan dipusatkan pada satu masalah pokok, yaitu pembentukan susunan ketatanegaraan di wilayah Indonesia Timur. Satu hal yang menjadi perdebatan alot dalam konferensi tersebut adalah pasal yang mengatur peraturan Pembentukan Negera Timur Besar. Dalam hal tidak dimasukannya wilayah Irian Barat (sekarang Papua) dalam salah satu pasal anggaran dasar NIT. Para peserta konferensi menanyakan, mengapa masalah Irian Barat yang tidak dimasukan dalam Negara Indonesia Timur, namun van Mook menjawab bahwa wilayah itu akan dimusyawarahkan secara sendiri setelah NIT terbentuk.[388] Dalam Konferensi Denpasar, persoalan Irian Barat yang sangat menentang pemisahan Irian Jaya dari wilayah Negara Indonesia Timur adalah wakil dari Maluku Utara Zainal Abidin (Sultan Tidore Ke 36). Ia mengatakan bahwa dari dahulu kala wilayah Irian Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Tidore dan oleh karena itu swapraja ini mempunyai hak sepenuhnya terhadap wilayah Papua.[389] Oleh karena itu, Zainal Abdin mengusulkan agar Irian Barat tetap berada di lingkungan wilayah Negara Indonesia Timur. Usulan Zainal Abidin tersebut didukung oleh E. Katoppo dari Minahasa yang mempunyai tujuan yang sama. Ia menegaskan bahwa wilayah Nieuw Guinea (Irian Barat) adalah bagian wilayah Hindia Belanda, dan oleh karena Negara Indonesia Serikat meliputi seluruh

konferensi,karena mereka pro ada Republik. Lebih jelasnya lihat Chasan Bousoiri, *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter,op.cit.,* hlm. 23-25.

[388]"Radja2 dari Neeuw- Guinea Maoe Bergaboeng dalam NIT", dalam *Indonesia Timoer*. Makasar, 3 Januari 1947.

[389]Hubungan antara Maluku (Ternate, Bacan dan lebih khususnya lagi Tidore) dengan Papua sudah terjalin jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Hubungan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan bukan hanya dibuktikan dengan sumber-sumber tertulis. Bahkan cerita-cerita rakyat yang berasal dari Maluku (Kronik Tidore dan Bacan) dan Papua (Kronik Biak) mengkisahkan ikatan persaudaraan itu. Menurut Andaya, sejak awal abad ke 18, diketahui bahwa kerajaan-kerajaan Raja Ampat mengakui kekuasaan dan kewenangan Sultan Tidore. Pada tahun 1705, raja, jogugu dan kapita lau di salawati menerima seorang utusan dari Tidore dengan penuh rasa hormat.Sejak terintegrasi ke dalam wilayah pinggiran Tidore, orang-orang Papua mengasosiasikan Tidore dengan Islam. Sejalan dengan itu menurut Muridan Widjojo, hubungan antara Papua dan Tidore di mulai pada tahun 1569, ketika pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Tidore. Dari kunjungan tersebut terbentuklah kerjasama diantara mereka.Lebih lanjut menurut sejarah lisan orang Biak.Hubungan Tidore dan Papua, terjalin melalui pernikahan antara para kepala suku dan para Sultan Tidore. Memasuki abad ke 18 ketika pemerintah Belanda menguasai Papua, maka kolonial Belanda merubah nama Papua menjadi Nieuwe Guinea. Untuk memudahkan urusan administrasinya, maka daerah itu dimekarkan menjadi dua bagian,yakni*Afdeeling Noord Nieuwe Guinea* (Nieuwe Guinea Utara) dan *Afdeeling West en Zuid Nieuwe Guinea* (bagian Selatan dan Barat). Lebih jelasnya Leonard Y. Andaya, *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), hlm, 175, dan lihat Muridan Widjojo, *Pemberontakan Nuku, Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm, 143.dan lihat Herry Rd.Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*. (Ternate: Yayasan Kie Raha, 2003), hlm. 86.

wilayah Hindia Belanda, maka Irian Barat harus masuk dalam wilayah Negara Indonesia Serikat sebagai bagian dari Negara Indonesia Timur.[390]

Pada kesempatan itu Zainal Abidin mengajukan permohonan agar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang sikapnya mengenai tidak dimasukannya Papua dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Sebagaimana di beritakan koran Negara Baru. Zainal Abidin menyampaikan kekecewaanya sebagai berikut*:*

> ''Paduka Tuan Ketua yang Utama,
>
> Saya selaku Kepala Kerajaan Tidore dengan banyak penyesalan tidak dapat menyetujui hasil-hasil Konferensi Denpasar karena dengan hasil tersebut kerajaan saya, walaupun untuk sementara waktu telah dipisahkan, yaitu satu bagian masuk dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat dan lain bagian ialah Irian Barat termasuk di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Pada akhirnya saya kemukakan, bahwa dalam keterangan yang pendek ini, dapat diambil kesimpulan, bahwa Kerajaan Tidore tetap mempertahankan haknya atas bagian Irian Barat yang menurut sejarah termasuk dalam lingkungan Kerajaan Tidore. Sekian, Terima kasih".[391]

Selain masalah Irian Barat, masalah yang mendapat sorotan dari peserta konferensi adalah kewenangan kekuasaan para raja dalam wilayah swapraja. Daerah Indonesia Timur terdiri dari 75% daerah swapraja atau 115 pemerintahan swapraja, dimana kedudukan dan kewenangannya diatur dalam *"korte verklaring"* (pernyataan pendek) dan *"lange kontrakten"* (kontrak panjang). Aturan tersebut dibuat sebagai pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap kedudukan istimewa para raja yang secara turun temurun memerintah pada daerah swapraja.Akan tetapi pada realitasnya yang berkuasa adalah wakil-wakil Pemerintah Hindia Belanda seperti para kontrolir dan asisten residen, sehingga raja hanya merupakan boneka saja.Selain itu kekuasaan pemerintah swapraja tidak meliputi orang-orang asing yang bermukim di daerah swapraja.[392]

Dalam konferensi Denpasar inilah van Mook memaksakan ide federalismenya. Apa yang dilakukan tanpa kerjasama dengan pihak Republik Indonesia sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian Linggarjati. Akhirnya konferensi ini diakhiri tanggal 24 Desember 1946 yang melahirkan Negara Indonesia

---

[390]Kendatipun hampir semua anggota meyatakan penyesalannya bahwa masalah Irian Barat masih merupakan suatu sengketa namun para anggota dapat meyakini bahwa Delegasi Negara Indonesia Timur sudah berjuang secara maksimal untuk menghindarkan terpisahnya wilayah Irian Barat dari Negara Indonesia Timur (NIT). Untuk lebih jelasnya baca Lebih jelasnya baca " Pembagian NIT dalam daerah2 Oentoek Mengimbangi Keadaan Setempat2", dalam *Soeloeh Rakyat*, Makasar, 2 Januari 1947.

[391] "Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hlm. 77-78.

[392]Lihat G. Kolff, *De Conferentie Te Denpasari* 7-24 Desember 1946, Deel II. Handelingenn (Batavia. Tanpa tahun), hlm. 13-14.

Timur (NIT) dan menetapkan Makasar sebagai Ibukotanya.[393] Kongres juga menetapkan bahwa negara Indonesia Timur akan diperintah oleh suatu kabinet parlementer yang dikepalai oleh seorang presiden. Tokoh yang terpilih menjadi Presiden adalah Tjokorde Gde Rake Soekawati dari Bali.[394] Sementara yang menjadi Perdana Menteri adalah Nadjamoeddin Daeng Malewa dan Ketua Parlemen Sementara NIT adalah Tadjuddin Noer yang berasal dari Makasar.[395] Kabinet Nadjamoeddin ini sangat tampak campur tangan dari van Mook. Hal ini terlihat dari manifesto politik yang dikeluarkan dengan jelas Nadjamoeddin berjanji akan melaksanakan segala rencana yang bersumber pada van Mook.

Konferensi Denpasar yang diakhiri tanggal 24 Desember 1946 melahirkan Negara Indonesia Timur yang didukung oleh peserta kongres. Hanya kaum republikan berpendapat bahwa pembentukan Negara Indonesia Timur dalam rangka pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat hanya merupakan satu tahap dalam proses perjuangan menuju Negara Republik Indonesia sesuai dengan semangat proklamasi 1945.[396]Sementara mereka yang mendukung federalisme, memang mengangap Negara Indonesia Timur sebagai tujuan dalam rangka pembentukan Negara Federal yang tetap berada dalam lingkungan kerajaan Belanda.

---

[393]Negara Indonesia Timur (NIT) terbentuk pada tanggal 24 Desember 1946 merupakan negara bagian yang terbesar yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda. NIT memeliki luas wilayah 449.088 km2 terbagi atas 13 daerah otonom yaitu; daerah Baki, Flores, Lombok, Maluku Selatan, Maluku Utara, Minahasa, Sangihe, Talaud, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Bali, Symba, Sumbawa dan Timur. Sebagai negara bagian yang tertua, maka NIT diserahi otonomi dalam mengurus kekuasaan meliputi bidang keuangan, pengadilan, ekonomi, kepolisian, pendidikan, penerangan, kesehaatan, pertanian, industri kerajinan dan masalah-masalah sosial.Untuk mengontrol kinerja para menteri maka bulan Mei 1948 dilangsungkan pemilihan anggota Senat yang diwakili daerah masing-masing. Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*,hlm. 105-107.

[394] Terpilihnya Tjokorde Gde Rake Soekawati sebagai presiden Indonesia Timur sudah direncanakan oleh van Mook. Tjokorde Gde Rake Soekawati adalah seorang bangsawan Bali yang lama berkerja sebagai pamong praja di Bali dalam kedudukannya sebagai penggawa(kepala distrik). Kemudian diangkat sebagai anngota dewan rakyat (volksraad) oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mewakili daerah Bali. Dalam dewan itu dia bergabung dengan fraksi *Politiek Ekonomische Bond* (PEB) suatu badan yang mengingingkan kerjasama dengan Pemerintah Belanda dalam masalah politik dan pembangunan ketatanegaraan.Pandangan politiknya dianggap moderat dalam masalah perkembangan politik di Indonesia sesudah perang dunia ke II. Dia menginginkan adanya kerja sama dengan pemerintah Belanda dalam menuju kepada perwujudan Indonesia merdeka. Lihat R. Nalenan, *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot.*(Jakarta: Gubung Agung, 1981), hlm. 67-69.

[395]" Berita Resmi Oentoek Negara Indonesia Timoer", dalam *Indonesia Timoer*: Makasar, 7 Pebruari 1947.

[396]Menurut Arnold Monunuttu yang dikutip dalam harian Negara Indonesia Timur 28 Pebruari 1948, bahwa "tujuan dari Konferensi Denpasar adalah menelorkan Negara boneka terbesar yang namanya Negara Indonesia Timur.Wilayahnya meliputi Kepuluan Bangka dan Riau, Berneo, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Negara Indonesia Timur ini sangat strategis bagi van Mook dalam mencapai cita-citanya menciptakan suatu Negara Republik Indonesia Serikat yang masih tetap dalam lingkungan kerajaan Belanda, sesuai dengan konsep yang telah diparap kedua pihak yakni Republik Indonesia dan pihak Belanda pada tanggal 15 November 1946". Lihat " Mononutu: Bangsa Indonesia Tidak Membentji Belanda", dalam *Negara Indonesia Timur,* Makasar 28 Pebruari 1948.

Dalam perkembangannya van Mook berhasil mendirikan negara-negara bagian di wilayah yang diduduki Belanda seperti: Negara Sumatra Timur yang didirikan pada tanggal 29 Jauari 1948 dengan Presidennya Tengku Mansur. Negara Madura dibentuk pada tanggal 22 Januari 1948 dengan Presidennya R.A.A Tjakraningrat.Negara Pasundan didirikan pada tanggal 26 Januari 1948 dengan Kepala Negaranya R.A.A Wiranatakusumah.Negara Jawa Timur didirikan pada bulan Nopember 1948, dipimpin oleh R.A. Kusumonegoro sebagai Kepala Negara.[397] Dengan adanya negara bagian tersebut, maka pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS) yang mencakup keseluruhan wilayah Indonesia yang di rencakan van Mook dapat terwujud pada tahun 1949.

Sejak Konferensi Malino sampai dengan Konferensi Denpasar, Iskandar Muhammad Djabir Sjah selalu berpartisipasi dengan menyetujui konsep negara federal, dan secara konsisten selalu mempertahankannya karena sesuai dengan ideologi politik yang dianutnya. Ia selalu berpegang pada prinsip itu, karena memandang situasi sosiologis-antropologis bangsa Indonesia Timur yang bersifat majemuk, maka konsep negara federal yang cocok untuk bangsa Indonesia.[398] Menurut Mudafar Sjah, pemikiran Iskandar Muhammad Djabir Sjahpada tahun 1950-an didasarkan pada pandangannya, mengingat beragamnya penduduk, kebudayaan, dan kondisi geografis, Indonesia lebih baik berbentuk federasi daripada negara kesatuan.[399]

Sejak awal pembentukan Negara Indonesia Timur yang digagas oleh van Mook atas nama Pemerintah Belanda. Iskandar Muhammad Djabir Sjahtelah menunjukan partisipasinya. Partisipasinya sungguh beralasan karena secara politik ia memeliki kedekatan dengan Pemerintah Belanda atas jasa-jasa yang diberikan kepadanya.Misalnya, pada 1929 ia dilantik menjadi Sultan Ternate ke 47, bahkan pada saat Jepang menduduki Pulau Ternate, Iskandar Muhammad Djabir Sjah bersama keluarganya diungsikan Brisbane Australia hingga September 1945.[400] Setelah kepulanganya dari Australia Iskandar Djabir Syah diangkat sebagai Kepala Daerah (Residen) Maluku Utara dengan pangkat Kolonel *Tituler der Koninghen Orange van Nasau*.[401]

Sebagai tokoh yang mendukung pembentukan NIT, maka dalam perkembangannya pada tanggal 27 Desember 1949 Iskandar Djabir Syah dilantik oleh Presiden Negara Indonesia Timur (NIT), Tjokorde Gde Rake Soekawati dalam Kabinet Tatengkeng.[402]Adapun susunan Kabinet J.E. Tatengkeng sebagai berikut.

---

[397] R. Nalenan, *op.cit.*,hlm. 190.

[398]Memoar Iskandar Muhammad Djabir Sjah, *op.cit.*, hlm 3-5.

[399] Hasil wawancara dengan Sultan Mudafar Sjah pada 2013.

[400]Rustam Hasim, "Sultan Iskandar Djabir Syah: from Malino Conference To The Minister Of Internal Affairs Of Negara Indonesia Timur. Jurnal Paramita, Vol.26, No.2, 2016

[401] Mengenai riwayat Iskandar Muhammad Djabir Sjah dalam pembentukan negara Indonesia Timur, lihat Irza Arnita Djafaar, *op.cit.*, hlm.117-121.

[402]"Soesoenan Kabinet dan Perwakilan Dewan2 NIT", dalam *Soeloeh Rakyat*, Makasar, 23 Januari 1947.Dan Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hlm. 178-179.

1. J.E. Tatengkeng. Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan
2. Iskandar Muhammad Djabir Sjah, Sultan Ternate. Menteri Urusan Dalam Negeri
3. Drs. Tan Tєĸ Heng — Menteri Keuangan
4. Abdul Rajab Daeng Massikki — Menteri Perekonomian
5. I.H. Doko — Menteri Penerangan
6. Mr. S. Binol — Menteri Sosial
7. Mr. S. Binol — Menteri Kesehatan
8. Ir. D.P. Diapari — Menteri Pekerjaan Umum
9. Mr. Dr. Ch. R.S. Soumokil — Menteri Kehakiman

Kabinet Tatengkeng, merupakan kabinet kelima dari dalam wadah Negara Indonesia Timur (NIT). Kabinet ini merupakan perpanjangan tangan dari kabinet sebelumnya (Anak Agung Gde Agung).Walaupun masa kerjanya singkat hanya 4 bulan (27 Desember 1949-14 Maret 1950.Iskandar Muhammad Djabir Sjah, sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri dapat membentuk daerah-daerah otonom di kawasan Timur Indonesia yang disetujui oleh Badan Perwakilan Sementara, untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam susunan ketatanegaraan NIT, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis.[403]

Mamasuki akhir Kabinet J.E. Tatengkeng, situasi dan keamanan tidak kondusif dengan munculnya berbagai pemberontakan seperti pertikaian antara APRIS dan TNI mendorong sejumlah daerah otonom di wilayah NIT tampil memproklamasikan daerahnya keluar dari NIT.Misalnya pada 26 April 1950, Andi Idjo Karaeng (Sulawesi Selatan), memproklamirkan Sulawesi Selatan keluar dari NIT dan menjadi bagian propinsi RI.[404] Hal yang sama juga dilakukan pula oleh Adjuba Wartabone untuk daerah Sulawesi Utara. Di samping itu pemberontakan Andi Aziz di Makasar awal April 1950 mengakibatkan terjadinya krisis Kabinet NIT.Pada tanggal 20 April tokoh Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Pupella, mengajukan mosi tidak percaya dalam parlemen NIT.

Menurut Edward L.Poelinggomang, peristiwa-peristiwa ini menunjukan bahwa aliran politik uniteralis menolak sepenuhnya pembentukan Negara federal. Selain itu para pemuda pejuang RI juga mengorganisasikan diri dan bergiat untuk mendorong daerah-daerah lain dalam wilayah NIT untuk melucuti senjata APRIS dan mengambilalih tugas pengawasan pemerintahan.[405]

Perkembangan demikian tentunya mempengaruhi suasana politik di Negara Indonesia Timur dan memberi dorongan besar kepada golongan unitaris untuk

---

[403]Memoar Iskandar Muhammad Djabir Sjah, *op.cit*, hlm. 9-10.

[404]Peristiwa-peristiwa ini menunjukan bahwa aliran politik uniteralis menolak sepenuhnya pembentukan Negara federal.Selain itu para pemuda pejuang RI juga mengorganisasikan diri dan bergiat untuk mendorong daerah-daerah lain dalam wilayah NIT untuk melucuti senjata APRIS dan mengambilalih tugas pengawasan pemerintahan. Lihat Edwrd L Poelinggomang, *Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah.* (Yogyakarta: Ombak: 2004), hlm. 67-69.

[405]*Ibid.*,hlm. 228-229.

mewujudkan tujuannya yakni membubarkan Negara Indonesia Timur. Hal ini sebagaimana di beritakan surat kabar Negara Baroe 16 Maret 1950, bahwa kelompok uniteralis bergiat membubarkan gagasan Negara federal yang direalisasikan oleh pemerintah Belanda. Kelompok ini kemudian melakukan konferensi di Polobangkeng (Sulawesi Selatan) pada tanggal 5-7 Pebruari 1950. Hasil dari konferensi ini menghasilkan resolusi yang berisikan tuntutan: (1). Bubarkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Yogyakarta, (2). Datangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga keamanan di Sulawesi Selatan.[406] Atas dasar itulah, dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan ke-5, secara resmi mengumumkan pembubaran RIS dan terbentuknya negera kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[407]"

Bubarnya Negara Indonesia Timur pada tanggal 17 Agustus 1950 menimbulkan keheranan dibanyak kalangan tentang cepatnya sistem federasi terhapus dari Indonesia.Kurang lebih enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat bentuk Negara sudah berubah menjadi suatu Negara kesatuan. Menurut Anak Agung Gde Agung, perubahan bentuk kenegaraan tersebut di kalangan Pemerintah Belanda meningalkan kesan yang sangat mendalam. Pemerintah Hindia Belanda menuduh pihak Indonesia tidak jujur dalam pelaksanaan Konferensi Meja Bundar dan menyatakan kekecewaannya'[408]

Bubarnya Negara Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950, bagi tokoh-tokoh federalis merupakan periode "kebencian".Banyak para tokoh federalis yang ditangkap dan dijadikan tahanan politik karena merupakan kaki tangan Belanda.Hal ini dialami oleh Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjahdi asingkan ke Jakarta dan ditempatkan sebagai salah satu pegawai Departemen Dalam Negeri, karena dituduh sebagai salah satu tokoh federalis.

D. Republiken Versus Vederalis: Berjuang di Dalam Parlemen

Konferensi Denpasar yang diakhiri 24 Desember 1946, melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT). Para peserta konferensi ditetapkan sebagai anggota parlemen sementara, menunggu pelaksanaan pemilihan umum untuk pembentukan sebuah parlemen yang defenitif. Tadjuddin Noor dipilih sebagai Ketua Parlemen. Perdana

[406]Sebelum pemerintahan NIT resmi membubarkan, rakyat di propinsi-propinsi Maluku, Sulawesi dan Nusa Tenggara telah menyatakan melepaskan diri dari ikatannya dengan NIT dan langsung menggabungkan diri dengan RI. Pernyataan tersebut di wujudkan dalam bentuk proklamasi yang dikeluarkan di Polongbakeng pada tanggal 17 April 1950 dan di tandatangani oleh Makkaraeng Dg. Djarung yang mengatasnamakan gubernur-gubernur Provinsi Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Lihat "Kedoedoekan & sikap NIT Menghendaki Kemerdekaan", dalam Negara Baroe. Makasar, 16 Maret 1950.

[407]"Pengoemoeman Pembubaran NIT Berkenaan Pada Pembentukan Pemerintah Peralihan", dalam *Indonesia Timoer*, Makasar. 21 Agutus 1950.

[408] Ide Anak Agung Ode Agung, *op. cit.*, hlm. 284.

Menterinya ialah Nadjamuddin Daeng Malewa, dan Tjokorda Gde Raka Sukawati sebagai Presiden NIT. Dengan dibentuknya NIT, bagi van Mook sebagai fase awal dalam rangka pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS) yang tetap berada dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Pembentukan NIT tidak mendapat sambutan yang baik dari kalangan pro-Republik Indonesia. Sejak Konferensi Malino dan Denpasar dianggap sebagai suatu usaha pihak Belanda untuk menggalang dukungan dari wakil-wakil daerah diluar Jawa sebagai strategi untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bahkan Konferensi Denpasar diangap akal-akalan baik pada sisi penyelengaraan maupun penetapan utusan-utusan daerah.[409]Namun demikian, terdapat sebagian tokoh pro-Republik ikut mendukung pembentukan NIT, karena naskah Persetujuan Linggajati menegaskan bahwa "Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh Tentara Serikat atau Tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak akan dimasukan pula di dalam atau ke dalam daerah republik"(pasal 1).[410]

Di Ternate reaksi terhadap Pembentukan NIT muncul daritokoh-tokoh Persatuan Indonesia yang terdiri dari; Arnold Mononutu, Chasan Bosorie, M.S. Jahir, Abjan Soeleman dan Abubakar Bahmid. Melalui surat kabar Menara Merdeka, mereka mengkritik pembentukan NIT dengan mengatakan "bahwa pembentukan Negara Indonesia Timur dalam rangka pembentukan Negara Indonesia Serikat hanya merupakan proses perjuangan menuju Negara Republik Indonesia sesuai dengan semangat proklamasi 1945. Persatuan Indonesa hanya berdiri di belakang RI dengan Presidennya Sukarno Hatta dan Perdana Meterinya Sutan Syahrir".[411]

Reaksi yang sama juga terjadi di Ambon, melalui Partai Indonesia Merdeka (PIM), para pemuda yang pro-Republik dengan tegas menolak pembentukan NIT. Mereka mengatakan "pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai suatu konspirasi politik Belanda oleh karena itu rakyat Maluku hanya bergabung dengan republik Indonesia berdasarkkan pasal 3 Perjanjian Linggarjati yang dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan adanya Negara Indonesia Timur".[412]

Negara Indonesia Timur merupakan negara boneka pertama yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda, dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia Serikat (RIS). Sebagai negara bagian yang baru dibentuk, maka para anggota senat masih bersifat sementara dan di ambil dari utusan-utusan daerah,[413]

---

[409]"Berdjoang Untuk Seluruh Indonesia NIT tidak pro Belanda tidak pro Republik", dalam *Soeloeh Rakyat*. Makasar, 23 Maret 1947.

[410] "Pengakoean Republik Terhadap Negara Indonesia Timoer", dalam *Indonesia Timoer*. Makasar, 24 Januari 1948.

[411]*Menara Merdeka.* Ternate, 7 Januari 1947.

[412] R.Z. Leirissa,*Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI 1975), hlm. 23-24.

[413]Senat NIT beranggotakan 13 orang yang mewakili tiap pemerintah daerah. Dari 13 anggota senat tersebut, 10 kursi berasal unsur bangsawan (sultan/raja), dan hanya 3 kursi berasal dari non bangsawan. Maluku Utara dalam senat ini diwakili Sultan Iskandar Djabir Syah sekaligus residen

sambil menunggu pelaksanaksanaan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya secara defenitif. Negara boneka (NIT) ini, meskipun masih mengikut sertakan sejumlah bekas pejabat Belanda dalam organisasi pemerintahan, namun telah melapangkan dan mengikutsertakan semua aliran yang berkembang dalam pemerintahan.

Kebijakan itu melapangkan aliran republiken (uniteral) untuk terus berjuang secara terbuka. Pendirian partai politik di era itu dimungkinkan karena ketika itu NIT menganut dan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dan membuka peluang bagi aliran politik.[414] Dengan demikian partai-partai politik dapat berlomba untuk memenangkan perolehan kursi di parlemen NIT (pusat), untuk masuk dalam Badan Perwakilan Rakyat Sementara (sekarang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD) di setiap daerah otonom. Untuk memenuhi hal tersebut maka didirikanlah partai sebagai instrument perjuangan. Sebagai tokoh pro-Republik dan sekertaris Persatuan Indonesia, maka Arnold Mononutu[415] dipilih sebagai utusan anggota parlemen yang mewakili Maluku Utara bersama Sultan Iskandar Djabir Syah yang pro- federalis.

Di dalam Perlemen NIT terdapat tiga fraksi yang berbeda secara ideologi yaitu *pertama*, fraksi Demokrat, adalah fraksi yang pro pemerintahan. Fraksi ini menginginkan suatu negara berbentuk federal juga menginginkan ikatan yang lebih erat lagi dengan Belanda. Perjuangan mereka berkisar pada politik yang dijalangkan Kabinet Nadjamoeddin yang pro kepada Belanda.[416] Fraksi Demokrat di dukung

---

Maluku Utara. Sementara utusan non bangsawan di wakili oleh Arnold Mononutu. Lebih jelsnya lihat R. Naelan, *op.cit.,* hlm. 154.

[414]Edwrd L. Poelinggomang,*op.cit.,* hlm. 221.

[415] Arnold Mononutu dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1896 di Manado (Sulawesi Utara). Pendidikanya formalnya di mulai di Manado Sekolah Rendah Eropa Pertama *Eerste Europeesche Lagere School* ELS. Pada tahun 1918 pindah ke Ternate karena orang tuanya berkerja sebagai pegawai Belada sebagai *algemene Ontvanger* (kantor Bendahara Negara). Setelah tamat ELS ia melanjutkan sekolah menengahnya MULO, yang kemudian dilanjutkan sekolah HBS di Jakarta. Pada tahun ia melanjutkan kuliahnya di Middelbare Nederlands. Setelah pendudukan Jepang mendirikan organisasi pemuda Maluku yang bernama Persatuan Indonesia (PI). Arnold Mononutu meniti karier politiknya sebagai pengurus Partai Indonesia Maluku Utara pada 1945. Kemunculnya di pangung politik dimulai ketika masa kemerdekaan pada saat di bentuknya negara Indonesia Timur (NIT), pada tanggal 24 Juni 1946. Pada saat itu Arnold Mononutu mewakili Maluku Utara sebagai anggota Senat dari partai Indonesia (PI). Peranannnya mulai nampak Setelah bubarnya RIS ia diangkat sebagai sebagai Menteri Penerangan, pada beberapa yaitu; Kabinet Syahrir, Kabinet Sukiman dan Menteri Kabinet Wilopo. Setelah Menjadi duta besar pada Konferensi Asia Afrika, menjadi Rektor Uiversitas Hasanudin, dan Ketua DPP IKA Krisna. Lebih jelasnya baca R. Nalenan, *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot.* (Jakarta: Gunung Agung, 1981).

[416] Sikap Kabinet Nadjamoedddin terhadap Republik Indonesia dapat dilihat dalam peristiwa yang terjadi ketika Parlemen NIT bersidang untuk pertama kalinya dalam bulan April 1947. Ketika itu Presiden Sukawati mengundang tokoh-tokoh Republik untuk menyaksikan persidangan itu. Dalam rombongan yang bertolak ke Makasar itu terdapat pula J. Latuharhary. Tetapi sesampainya di Makasar Latuharhary tidak diperkenangkan masuk ke ruang sidang. Alasannya ialah karena ia adalah Gubenrur Maluku dari RI. Menurut Nadjamoedddin daerah Maluku tidak boleh dicampuri oleh pejabat-pejabat RI. Mereka mendasarkan aturan ini atas perjanjian Ligarjati. Larangan ini sebenarnya datang dari van Mook dan dilaksanakan oleh Nadjamoedddin. Padahal Latuharhary dikirim oleh

oleh beberapa partai seperti PASMO dari Ternate, Partai Demokrat, Singa Minahasa, (Manado) Sembilan Serangkai (Ambon) Lima Serangkai (Timor) dan Gabungan Sembilan Serangkai. Kelompok ini dinamakan kelompok van Mook.[417] Partai-partai tersebut dalam perkembangannya ketika NIT bubar, mereka menolak bergabung dengan RI yang kemudian membentuk kelompok separatis yang dikenal Republik Maluku Selatan. (mengenai RMS dijelaskan kemudian).

Kedua, fraksi progresif, merupakan fraksi oposisi. Fraksi Progresif ini diketuai oleh A. Mononutu (utusan PI dari Maluku Utara). Fraksi ini, selain bertujuan memperjuangkan kemakmuran di Indonesia Timur adalah memperjuangkan integrasi Indonesia, dan *ketiga*, fraksi Nasional adalah fraksi neral. Mengenai aliran dan ideologi yang dianut berbagai partai politik diwilayah NIT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Partai Politik dan Alirannya di Wilayah NIT

Karesidenan	No	Nama Partai	Pimpinan	Aliran
Manado	1	Barisan Nasional Indonesia (BIN)	G.E. Dauhan	Republikan
		PSSI Sulawesi Utara		
	2	KRIS	Y. Intan	Republikan
	3	Communisten	Permata	Republikan
	4	GIM (Gerakan Indonesia Merdeka)	C.L. Ponto	Republikan
	5	GAPERBOM (Gabungan Perjuangan Rakyat Bolmong)	J. Dengah	Republikan
	6	GERKINDO (Gerakan Kebangsaan	B.H. Woworuntu	
	7	Indonesia		Republikan
		Partai Demokrat	A.C. Manoppo	
	8	Singa Minahasa	A.Uno	Republikan
	9		G.M. Bokings	Federalis
	10			Federalis
Maluku	1	PI (Persatuan Indonesia)	A. Mononutu	Republikan
		Gerakan Indonesia Merdeka		Republikan
	2	PASMO (Partai Sejarah Maluku	Dano Umar	
		Utara)	Saifuddin Pupella	Federalis
	3	PIM (Partai Indonesia Merdeka)		Republikan
		Sembilan Serangkai	Litaay	Federalis
	4			
Timor	1	Lima Serangkai		Federalis

Sumber: Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. (Jakarta: Gora Pustaka Indonesia, 2007),

Dalam perkembanganya pada tanggal 20 Desember 1947,organisasi-organisasi pergerakan melakukan kongres di Makasar. Kongres tersebut

pemerintah RI bukan sebagai Gubernur Maluku tetapi seorang tokok Maluku biasa. Lebih jelasnya lihat R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hlm. 141-142.

[417] Partai ini merupakan gabungan dari bond-bond yang terdapat di Ambon. Tergabung dalam kelompok ini antara lain *Regentenbond, Volksbond, Inlandsleeraarsbond*, Guru *Jemaatbond*, Milite Pensiun, Militer Ambon dan kelompok-kelompok konservatif lainnya yang mendukung Belanda. Lihat Koran *Indonesia Timoer*. Makasar, 27 Oktober 1950.

memutuskan pembentukan Partai Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI). Arnold Mononutu dipilih menjadi ketua, J.E. Taengkeng sebagai wakil ketua, dan Henk Rondonuwu sebagai sekertaris. GAPKI terdiri atas gabungan dari organisasi-organisasi pro-republik yakni: Barisan Nasional Indonesia (Manado), Gerakan Indonesia Merdeka (Ternate), Persatuan Indonesia (Ternate), Partai Indonesia Merdeka (Ambon), Gerakan Kebangsaan Indonesia (Gorantalo), Badan Penyelengaraan Suara rakyat (Gorontalo), Partai Kedaulatan (Makasar), Partai Kebangsaan (Makasar), Partai Buruh Indonesia (Makasar), Partai Warganegara Indonesia (Makasar), PSSI (Indonesia Timur), dan Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku (Makassar).[418] Tujuan partai ini jika sebelumnya tuntutan mereka untuk berkerja sama dengan pihak Belanda dalam membentuk negara federal (sesuai perjanjian Linggajati), maka kini tujuannya adalah Negara Indonesia yang berdaulat dan makmur.[419]

GAPKI yang dipimpin oleh Arnold Mononutu merupakan aliansi politik terbesar dan terkuat di Indonesia Timur. Sebagai sebuah kekuatan oposisi GAPKI sangat di segani dan di perhitungkan pemerintah NIT[420]. Setelah dipilih menjadi ketua GAPKI, Arnold Mononutu dan kawan-kawanya menjadikan partai untuk meningkatkan perjuangan pro-Republik di samping perjuangan dalam parlemen. Adapun pedoman perjuangan GAPKI ialah:

1. Soekarno-Hatta adalah lambang perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia
2. Yogyakarta adalah lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia
3. Sekali ke Yogya, tetap ke Yogya[421].

Pada 9 Januari 1948 PI mengadakan kongres ke-II di Ternate, untuk memilih kepengurusan baru. Dalam kongres tersebut terpilihnya Chasan Boesorie sebagai ketua umum, mengantikan Arnold Mononutu yang ditunjuk sebagai anggota senat NIT mewakili Maluku Utara. Sebagai organisasi yang pro-Republik, maka PI dibawah pimpinan Chasan Boesorie menyatakan dukungan dan bergabung dengan Partai GAPKI yang dipimpin oleh Arnold Mononutu.[422]Arnold Mononutu dalam dalam parlemen NIT mempunyai peranan yang strategis, selain menjadi ketua GAPKI, juga dipilih menjadi ketua Fraksi Progresif. Sehingga dalam perkembangannya parlemen NIT yang di kuasai Fraksi Progresif memeliki peran penting dalam menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis.

---

[418] "Indonesia Timoer dan Federasi", *Indonesia Timoer*. Makasar, 3 Januari 1948.

[419]" Sidang Parlemen NIT", dalam *Indonesia Timoer*. Makasar 23 Desember 1947.

[420]Selain itu diluar parlemen terdapat organisasi-organisasi pro republik seperti; organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku (KRIM), organisasi Pemuda Patimura, dan organisasi-organisasi lainya di Kawasan Timur Indonesia yang berasal dari Makasar-Bugis, Minahasa, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Organisasi pemuda itu bertindak sebagai pendorong wakil-wakil mereka di parlemen yaitu fraksi progresif. Lihat "Arnold Mononutu: Indonesia Timoer tidak bisa terpisah dari Republik", . *Indonesia Timoer*. Makasar, 25 Pebruari 1947.

[421] R. Nalenan, *op.cit.,* hlm.200.

[422] " Bung Mononutoe Maoe Kemana?", *Menara Merdeka.* Ternate 9 Maret 1948.

Hal ini dapat dilihat ketika Belanda melakukan agresi militer I di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 1947. Para anggota parlemen yang tergabung dalam Fraksi Progresif menyepakati mengirim misi muhibah ke Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta.[423] Misi Muhibah ini bertujuan mempererat hubungan hubungan NIT dan RI. Gagasan tersebut disetujui perdana Menteri NIT Anak Agung Gde Agung, dan ketua Parlemen NIT Tajuddin Noor, keduanya pro-Republik. Pada tanggal 18 Pebruari 1948, berangkatlah misi muhibah ke Yogyakarta, yang diketuai oleh Arnold Mononutu.[424]

Rombongan yang berangkat menuju Yogyakarta mendarat di lapangan Udara Maguwo Yogyakarta diterima oleh wakil Republik yang terdiri dari ketua KNIP, Mr. Assat dan wakil Pemerintah Hamengku Buwono IX, rombongan langsung menuju istana kepresidenan di mana Bung Karno dan Bung Hatta serta seluruh anggota Kabinet dan anggota KNIP menerima rombongan dalam sambutan yang sangat meriah. Dalam pertemuan tersebut, Arnold Mononutu yang dipercayakan sebagai juru bicara dari NIT menyampaikan bahwa "meskipun rombongan datang ke daerah Republik mewakili Negara Indonesia Timur dan mewakili suatu pemerintahan ciptaan van Mook, namun hendaknya disadari bahwa NIT sudah dikuasai oleh kelompok nasionalis pro-republik. Jadi hendaknya tidak diragukan lagi dukungan penuh dari Negara Indonesia Timur untuk perjuangan menegakkan Negara Proklamasi 17 Agustus". Dalam perpisahan antara pemerintah Republik dengan rombongan dari NIT, Bung Karno dan Hatta mengatakan kepada Arnold Mononutu "kami mempercayakan perjuangan kita di Negara Indonesia Timur kepada kalian". Arnold Mononutu menjawab saya dan teman-teman dari bagian Timur Indonesia selama in tidak pernah tinggalkan RI dalam perjuangan meskipun jalannya berbeda.[425]

Seusai melaksanakan tugas sebagai misi muhibah NIT ke Yogyakarta. Pada tanggal 19 Maret 1948 Arnold Mononutu kembali ke Ternate disertai Rosihan Anwar wartawan, sekaligus pemimpin redaksi 'siasat'. Arnold Mononutu didampingi Rosihan Anwar melakukan pertemuan dengan Sultan Tidore Zainal Abidin serta pimpimpinan PI Tidore. Dalam pertemuan tersebut Sultan Tidore meminta kepada Arnold Mononutu agar memperjuangkan Papua ke dalam NIT.

---

[423]*Indonesia Timur*. Makasar, 25 Februari 1948.

[424]Dalam rangka persiapan missi muhibah ke Yogyakarta Arnold Mononutu meminta fasilitas transportasi dari pihak Belanda di Jakarta, dan selama tiga bulan pihak Belanda belum menyediakan pesawat udara untuk pengangkutan goodwill mission NIT. Dari pihak Belanda menyampaikan kepada Arnold Mononutu bahwa pemerintah bersedia memberikan fasilitas anggutan udara bagi rombongan tapi dengan syarat Pemerintah RI di Yogyakarta harus mengakui NIT sederajat dengan Negara RI. Akhirnya pemerintah RI mau menerima syarat dari Belanda di Jakarta. Dengan demikian tidak ada alasan lagi dari Belanda untuk menolak penyediaan angkutan udara kepada rombongan goodwill mission dari NIT. Anggota rombongan itu keseluruhannya terdiri dari tujuh anggota Palemen yaitu Arnold Mononutu dan Ayub Wartabone (fraksi progresif), Andi Massarapi dan Andi Gappa (fraksi Nasional), DS. Bergma, (wakil Protestan), Pastor Conterius (wakil Khatolik), dan The Sin Ho (golongan Tionghoa). Baca R. Nalenan,*op.cit*., 186-188. Dan lihat " Missie NIT besok akan ke Djokja", *Soeloeh Rakyat*. Makasar, 7 Agustus 1947.

[425]"Pengakoean NIT oleh Republik Indonesia", dalam *Negara Baru*. Makasar, 27 Juli 1947.

Arnold Mononutu menjawab bahwa masalah Papua harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia dan bagi NIT merupakan harga mati. Masalah Papua harus menjadi agenda utama dalam program kerja-kerja partai di parlemen NIT dan juga pemerintah NIT sendiri sehingga setahun dalam kepemimpinannya dapat diwujudkan.[426]

Sementara itu, di Ternate suhu politik semakin memanas, pada tanggal 23 Maret 1948, Perdana Menteri NIT, Anak Agung Gde Agung mengunjungi Ternate. Pada malam harinya, sewaktu tengah berlangsung jamuan makan malam yang diadakan oleh Residen Maluku Utara Iskandar Djabir Syah di istana Kesultanan Ternate. Para pengurus PI, dimotori Abjan Soelemen melakukan unjung rasa menolak kedatangan Anak Agung Gde Agung karena dianggap boneka Belanda. Dengan spanduk yang bertulisan "*go home duch* man", rombongan pawai menuju istana, setiba di depan Benteng Organje dihadang tentara KNIL. Dalam insiden ini, terjadilah perkelahian massal yang menyebabkan sejumlah simpatisan PI luka-luka. Sehubungan dengan itu Anak Agung Gde Agung atas nama pemerintah NIT meminta maaf kepada PI dan rakyat Ternate. Akhirnya beberapa tentara KNIL dipindahkan ke Makasar.[427] Dalam laporanya ke Anak Agung Gde Agung, Residen Maluku Utara, Iskandar Djabir Syah mengatakan bahwa PI telah berhasil mendongkrak kesadaran politik masyarakat Maluku Utara.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer II terhadap Republik. Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia diduduki dan pimpinan Republik Soekarno dan Mohammad Hatta ditangkap. Hal tersebut membuat golongan federalis kehilangan kepercayaan terhadap Belanda dan janji-janjinya. Mereka kini terang-terangan menyatakan simpati mereka pada RI. Sehari sesudah berita agresi Belanda, maka pada tanggal 20 Desember Parlemen NIT mengadakan sidang pleno. Parlemen NIT yang dikuasai oleh Fraksi Progresif menunjuk kembali Anak Agung Gde Agung sebagai Perdana Menteri, menggantikan Warrou yang pro-Belanda dengan program yaitu; *pertama*, membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta dan kembalikan ke Yogyakarta. *Kedua*, dalam waktu sesingkat-singkatnya mengadakan konferensi Meja Bundar (KMB) untuk membentuk Negara RIS yang merdeka dan berdaulat.[428] Akibat aksi Militer II tersebut, organisasi GAPKI pimpinan Arnold Mononutu mengutuk agresi Kolonial Belanda, dan menolak gagasan van Mook yang terus membentuk negara-negara boneka dalam rangka pembentukan negara serikat yang mencakup kesuluruhan Indonesia. Menurutnya agresi Militer II, bertentangan dengan Perjanjian Linggarjati serta bertujuan memecah belah bangsa Indonesia dan melemahkan RI.[429]

Dalam keadaan politik yang demikian, Anak Agung Gde Agung untuk kedua kalinya mengusulkan agar Parlemen NIT mengirimkan utusan-utusan resmi untuk meninjau keadaan di daerah RI dan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan

---

[426] "Sultan Tidore Tanam Persaudaraan dengan NIT", dalam *Menara Merdeka*, Ternate, 21 Maret 1948.

[427] "Keonaran di Ternate", dalam *Indonesia Timoer. Makasar*, 1 April 1948.

[428] *Negara Baroe.* Makasar, 5 April 1948.

[429] Ide Anak Agung Gde Agung,*op.cit.,* hlm. 115.

pihak RI. Dengan membawa pandangan yang demikian itu, Arnold Mononutu dan beberapa tokoh Fraksi Progresif mengunjungi Yogyakarta dan Jakarta sebagai misi parlementer dari NIT. Dalam hal ini terdapat kesepakatan Parlemen NIT dengan RI dalam menghadapi Belanda. pada pada 1949, Arnold Mononutu terpilih sebagai delegasi NIT Kemudian mereka ikut dalam perundingan-perundingan RI dan BFO (*Bijeenkomst voor Federal* Orvelg) di Yogyakarta dan Jakarta.

Dalam perkembangannya kabinet Anak Agung Gde Agung di gantikan J.E. Tatengkeng sebagai Perdana menteri. Dalam kabinet inilah, Iskandar Djabir Syah, Sultan Ternate dan Residen Maluku Utara diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri (27 Desember 1949-14 April 1950). Akan tetapi kabinet ini tidak berlangsung lama, pada tanggal 20 April tokoh Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Pupella, mengajukan mosi tidak percaya dalam parlemen NIT. Akibatnya, Perdana Menteri NIT J.E. Tatengkeng mengundurkan diri dan kabinet bubar.

Pada era kabinet Poetoehena (10 Mei-16 Agustus 1950), telah muncul berbagai pemberontakan, diantaranya adalah pemberontakan Andi Aziz di Makasar awal April 1950 mengakibatkan terjadinya krisis Kabinet NIT. Selain faktor tersebut pada awal bulan Maret, sebagaimana di beritakan Koran Soeloeh Rakyat, pergolakan dan pertentangan antara golongan federalis dan unitaris di Sulawesi Selatan dan terutama di Makasar berkobar dengan hebat sehingga timmbul suasana yang sangat gawat. Dari golongan unitaris yang dipelopori oleh anggota-anggota parlemen Fraksi Kesatuan Nasional Indonesia, mendesak kepada pemerintah Negara Indonesia Timur segera di bubarkan dan dimasukan kedalam daerah kekuasaan Republik Indonesia.[430]

Dalam usaha menghadapi permasalahan tersebut, kabinet Poetoehena tidak banyak berbuat banyak. Alat kekuasaan Negara seperti polisi Negara di Sulawesi Selatan tidak berdaya untuk mengatasi segala kekacauan yang timbul, bahkan sudah tidak teratur lagi dan sudah kehilangan semangat sama sekali. Demikian juga pemerintahan daerah yang tidak berfungsi lagi.[431] Selain itu para pemuda pejuang RI juga mengorganisasikan diri dan bergiat untuk mendorong daerah-daerah lain dalam wilayah NIT untuk melucuti senjata APRIS dan mengambilalih tugas pengawasan pemerintahan[432].

Dalam perkembangannya pada tanggal 16 Agustus 1950 Perdana Menteri Poetoehena dan seluruh kabinetnya melatakan jabatan. Pada hari yang sama Badan Perwakilan Rakyat Negara Indonesia Timur sudah dianggap bubar dan demikian juga Negara Indonesia Timur yang mulai saat itu terpecah menjadi tiga propinsi, yaitu:

1. Propinsi Sunda Kecil, di bawah pimpinan Residen I Goesti Bagoes Oke.
2. Propinsi Sulawesi di bawah pimpinan Residen B.W. Lapian.

---

[430]*Soeloeh Rakyat*. Makasar, 12 Maret 1949.

[431]*Negara Baroe.* Makasar 23 Juni 1950.

[432]Edward L.Poelinggomang, *Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah.* (Yogyakarta: Komunitas Bambu),hlm. 228-229.

3. Propinsi Maluku, di bawah pimpinan Administrator P.T. Mantouw.[433]

Dengan demikian, pada tangal 17 Agustus 1950 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI ke-5, Presiden Soekarno secara resmi mengumumkan pembubaran RIS. Maka berakhirlah riwayat Negara Indonesia Timur.[434]Akhirnya pihak republikanlah yang menang. Dengan demikian cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat terlaksana setelah selama empat tahun terhalang oleh kekuatan-kekuatan kolonialis di negeri Belanda dibantu oleh pengikut-pengkutnya di Indonesia. Setelah penyarahan kedaulatan dari Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Republik Indonesia (RI), pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada saat yang sama Komisi Tiga Negara (KTN), secara resmi mensahkan Maluku Utara sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Atas perjuangan dan jasa Arnold Mononutu dan Chasan Boesorie, Pemerintah Kota Ternate kemudian mengabadika keduanya sebagai nama jalan dan nama salah satu Rumah Sakit.

E. Penolakan Sultan Ternate Atas Terbentuknya Republik Maluku Selatan (RMS)

Awal dari persoalan Republik Maluku Selatan (RMS), adalah ide beberapa politisi Ambon yang berkuasa pada masa NIT (1946-1950). Para politisi ini sebagian besarnya tergabung ke dalam organisasi Gabungan Sembilan Serangkai yang dipimpin oleh Dolf Metekohy, sejak awal mendukung konsep negara federal yang digagas oleh van Mook. Selain itu terdapat pula orang-orang yang tergabung dalam Partai Timur Besar yang orientasi politiknya pro-Belanda. Dalam perkembangannya tokoh-tokoh seperti; J. Manusama (Direktur Ambonsche Burgerschool), dan Ch. Soumokil (mantan Menteri Kehakiman NIT), tersingkir ketika pemerintahan NIT dikuasai oleh kelompok pro-Republik (Kabinet D.P. Diapari dan Poetoehena) pada 14 Maret-16 Agustus 1950. Akhirnya tokoh-tokoh tersebut ingin memisahkan diri dari NIT.

Sejalan dengan itu, menurut R.Z. Leirissa, pemberontakan RMS sebenarnya merupakan kelanjutan dari pertentangan antara golongan nasionalis (republikan) dengan golongan federalis yang telah berkembang sejak tahun 1946 dalam konferensi Denpasar. Aktor atau tokoh utama gagasan separatis RMS di prakarsai

---

[433] Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 172.

[434]Jika di lihat dari sudut pandang politik, sejak berdirinya Negara Indonesia Timur pada 24 Desember 1946 hingga bubarnya RIS 16 Agustus 1950. Dalam usianya sangat singkat hanya 4 tahun telah terjadi pergantian 6 kali kabinet yaitu kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa, Idan II (13 Januari 11 Oktober 1947), kabinet Warrou (11 Oktober -15 Desember 1947), kabinet Ide Anak Agung Gde Agung, I dan II (15 Desember 1947-27 Desember 1949), kabinet J.E. Tatengkeng (27 Desember 1949-14 Maret 1950), kabinet Ir.D.P. Diapari (14 Maret-10 Mei 1950), kabinet Ir. J. Poetoehena (10 Mei-16 Agustus 1950). Pergantian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif dan dibangun atas dasar ketidak kepercayaan lembaga pemerintahan dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Lihat Marwati Djoened Poesponegoro Nugrogo Natosusanto, *et.al,op,cit*. hlm. 269.

[434] Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 269.

oleh Manusama yang pada waktu menjabat sebagai direktur *Ambonsche Burgerschool* dan Ch.R.S. Soumokil[435]. Tokoh-tokoh tersebut tidak dikenal dalam masa pergerakan nasional bahkan tidak mau mengambil bagian dalam pergerakan rakyat yang dipimpin oleh Sarekat Ambon atau Partai Indonesia Merdeka.

Secara sosiologis tokoh-tokoh itu lahir dan dibesarkan dilingkungan masyarakat Belanda totok. Tempat kediaman mereka terpisah dan terletak di tempat-tempat kediaman elite yang disediakan untuk orang-orang Belanda totok yang menjadi pejabat-pejabat tinggi dalam pemerintahan kolonial. Kedudukan mereka secara hukum dengan status *gelijkgesteld* (kewarganegaraan Belanda) diperlakukan sama seperti orang Belanda. Dengan demikian secara sosiologis dan politik bukan saja terpisah dari orang-orang Ambon, tetapi juga terpisah dari arus pergerakan nasional.[436] Mereka inilah yang memaksa rakyat Maluku di pertengahan tahun 1950 mendeklarasikan berdirinya RMS.

Menjelang Proklamasi RMS, para tokoh RMS memobilisasi semua pasukan KNIL, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, untuk memanggul senjata mempertahankan RMS. Soumokil berhasil menghimpun kekuatan yang ada dilingkungan masyarakat Maluku Selatan, terutama anggota KNIL, dan kalangan pensiunan pegawai Belanda. Pada permulaan bulan April 1950 terjadi pemberontakan Andi Aziz menyebabkan kesatuan-kesatuan KNIL dari suku Ambon dipindahkan dari Makasar ke Ambon, terutama dari kesatuan-kesatuan " Baret Merah" dan " Baret Hijau" yang merupakan kesatuan-kesatuan komando yang berkemampuan tempur tinggi.[437] Mereka ini merupakan kesatuan KNIL yang paling banyak mengalami indoktrinisasi sebagai pengawal kolonialisme Belanda yang paling gigih. Moment tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Soumokil menjadikan mereka sebagai kesatuan Polisi Negara.

Seperti halnya dengan Soumokil, hal yang sama juga di lakukan oleh Manusama menggalang dukungan dari Rajapati (penguasa desa). Pada tanggal 4 April J. Manusama mengundang rapat para Rajapati (penguasa desa) dari Pulau Ambon bertempat dikantornya. Dihadapan para Rajapati ia melemparkan issue-issue terhadap TNI, antara lain bahwa TNI akan memusnahkan suku Ambon dan mengislamkan orang-orang Kristen, dan pengabungan wilayah Maluku Selatan pada Negara Indonesia mengandung bahaya. Propaganda ini ternyata berhasil, mengingat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang keadaan sebenarnya.[438]

Upaya tokoh-tokoh RMS untuk menggalang dukungan bukan hanya di lakukan di daerah Maluku Selatan. Hal yang sama juga dilakukan di daerah Maluku Utara. Untuk menyakinkan masyarakat Maluku Utara, issue yang sengaja dibangun para tokoh RMS adalah mendirikan "Republik Maluku Raya". Dalam memperkuat perjuangan politiknya pada tanggal 4 Maret 1950 membentuk "Persatuan Maluku", dibawah pimpinan J. Rieupassa dan mengirimkan 1 Peleton Baret Merah ke Ternate

[435] R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Memperjuangkan Nasional Indonesia.* (Jakarta: UI, 1975), hlm. 204.

[436] Adnan Amal, *op.cit.,* hlm. 322.

[437] "Kesatuan KNIL Mendarat di Ambon", dalam *Indonesia Timur*. Makasar, 17 April 1950

[438] "2.000 Pemuda Ambon Angkat Sendjata", dalam *Soeloeh Ambon*. Ambon, 26 April 1950.

sebagai penjaga keamanan. Akan tetapi keberadaannya di Ternate tidak mendapat simpati dari masyarakat. Beberapa kekerasan yang dilakukan seperti; membakar bendera merah-putih, menangkap pemuda yang pro-Republik. Bahkan menyebut tokoh-tokoh pro-Republik seperti; Chasan Bosoroe, Arnold Mononutu, dan Ali Kamah dengan panggilan "Anjing Soekarno".[439] Tindakan-tindakan tersebut menyebabkan terjadinya insiden dengan pemuda Republikan, sehingga mereka di tarik kembali ke Ambon.

Pada tanggal 12 April 1950, tokoh-tokoh RMS yang dimotori Soumokil mengunakan pesawat Catalina (semacam amphibi) mengunjungi Ternate. Mereka mengajak Sultan Iskandar Djabir Syah, sekaligus Residen Maluku Utara untuk bergabung mendirikan Negara Republik Maluku (RMS), yang terpisah dari Negara Indonesia Serikat (RIS). Walaupun Sultan Iskandar Djabir Syah adalah seorang yang pro-federal, namun ia menolak, selain alasan ideologi RMS bertentangan dengan konsep yang dianut dalam pembentukan Negara Indonesia Timur,yang menyebut bahwa NIT adalah salah satu negara bagian dari Republik Indonesia.Disamping itu Sultan Iskandar Djabir Syah mengatakan ia lebih menyukai satuan federal lebih luas yang mencakup seluruh Indonesia Timur, dimana orang Ambon tidak bisa mendominasi dan harus berada di bawah Negara Indonesia Timur (NIT).[440]Dari segi geografis wilayah Maluku Selatan merupakan daerah yang miskin dalam sumber daya alam sehinga tidak layak dijadikan sebagai sebuah negara.

Selain alasan politik dan ekonomi adalah alasan historis dan agama.Bagi Iskandar Muhammad Djabir Syah daerah Maluku Selatan (Ambon) pernah menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate, yang kemudian dianeksasi oleh Belanda pada abad ke 18. Satu hal yang tidak mungkin harus menjadi bawahan atau mengakui Ambon sebagai Ibukota Negara RMS jika perjuangan dikemudian hari tercapai. Disamping itu perbedaan agama juga juga menjadi pertimbangan politik mengapa Sultan Ternate menolak untuk bergabung dengan RMS. Dengan penolakan tersebut maka seluruh aktivitas yang berhubungan dengan RMS tidak dijinkan beroperasi wilayah Maluku Utara.[441]Dengan demikian RMS tidak mendapat dukungan dari Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah, dan seluruh masyarakat Maluku Utara.

Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). RMS yang dipimpin Christian Robert Steven Soumokil merupakan sebuah gerakan separatisme yang bertujuan bukan hanya ingin memisahkan diri dari NIT melainkan untuk membentuk Negara sendiri terpisah dari RIS.[442]Proklamasi RMS merupakan peristiwa yang

[439]Chasan Bosoroe, *op.cit.*,hlm. 22.

[440]Arsip pribadi Iskandar Muhammad Djabir Syah, *op.cit.*, hlm.5-6.

[441]Wawancara dengan Mudafar Syah Sultan Ternate pada tanggal 24 April 2013.

[442]Republik Maluku Selatan atau RMS yang diproklamirkan pada tanggal 25 April 1950, wilayahnya meliputi Maluku Bagian Selatan seperti Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Baca Semuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. (Jakarta Pustaka Obor, 2011), hlm 204.

mengkagetkan banyak kalangan, baik jajaran pimpinan RIS maupun NIT.[443]

Adapun alasan yang digunakan untuk memproklamasikan RMS adalah, *pertama*, NIT tidak sanggup mempertahankan kedudukannya sebagai negara bagian selaras dengan keputusan Konferensi Denpasar yang sah dan masih berlaku. *Kedua*, RIS telah bertindak bertentangan dengan KMB dan undang-undang dasarnya sendiri. *Ketiga*, Proklamasi RMS dipandang sah karena sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD, Raad Ambon), tertanggal 11 Maret l947.[444] Adapun bunyi teks proklamsi RMS sebagai berikut:

Proklamasi Kemerdekaan Republik Maluku Selatan

> "Memenuhi kemauan jang sungguh, tuntutan dan desakan rakjat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamir KEMERDEKAAN REPUBLIK MALUKU SELATAN, defakto de jure, jang berbentuk Republik, lepas dari pada segala perhubungan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur dan R.I.S., beralasan N.I.T. sudah tidak sanggup mempertahankan kedudukanja sebagai Negara Bahagian selaras dengan peraturan2 Mutamar Denpasar jang masih sjah berlaku, djuga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947, sedang R.I.S. sudah bertindak bertentangan dengan keputusan2 K.M.B. dan Undang2 Dasarnja sendiri".[445]

Selain alasan diatas, hal lain yang membuat mengapa mereka memproklamasikan RMS, bahwa di dalam konstitusi RIS pada pasal 2 secara jelas menyebutkan adanya negara-negara bagian dari RIS. Negara-negara tersebut sebelum bergabung ke dalam RIS, merupakan negara yang sah dan masing-masing mengurus rumah tangganya sendiri.[446] Di dalam konstitusi RIS secara eksplisit memberikan kesempatan kepada rakyat negara-negara bagian untuk menyatakan pendapatnya untuk dapat melepaskan diri dari ikatan RIS.[447] Di samping itu dalam lembaran Negara Hindia Belanda (*Indische Staatsblad*) No. 27 tahun 1946 yang menjadi landasan bagi penyelengaraan pemerintahan pada awal pembentukan NIT mengisaratkan daerah swapraja secara mandiri maupun beberapa swapraja dapat berkerja sama untuk mengadakan: (1). Dewan Pembuat Undang, dan (2). Dewan yang turut membuat undang-undang. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah menghendaki daerah otonom memiliki lembaga legislatif. Aspek inilah di jadikan alasan mengapa mereka memproklamirkan RMS.[448]

Pemerintah RI berusaha mengatasi masalah ini secara damai dengan mengirimkankan Leimena dan Sultan Ternate Iskandar Syah yang berasal dari

---

[443] "Rakjat Ambon Tengah Berjuang Lawan NIT", *Indonesia Timur*. Makasar, 23 Juni 1950.
[444]RZ. Leirissa, *op.cit.,* hlm.56.
[445]*Ibid.,* hlm. 218.
[446] Semuel Waileruny, *op.cit.*, hlm. 74.
[447]*Sinar Maloekoe*. Ambon, 27 April 1950.
[448] "Soumokil Kudeta di Maluku", dalam *Indonesia Timur*. Makasar, 1 Juli 1950.

Maluku. Akan tetapi, misi damai ini ditolak oleh Soumokil bahkan mereka meminta bantuan, perhatian dan pengakuan dari dunia luar, terutama dari negeri Belanda, Amerika Serikat, dan komisi PPB untuk Indonesia. Selain pemerintahan RIS para tokoh-tokoh Ambon pun ikut membantu mencoba mencari penyelesaiannya, dengan tujuannya untuk mencegah meluasnya provokasi dari kelompok-kelompok yang mendukung RMS.[449]Karena upaya damai mengalami jalan buntu maka, akhirnya pemerintah RI dibawah pimpinan Sukarno-Hatta, mengultimatum semua para tokoh RMS yang memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan untuk menyerahkan diri kepada pemerintah RI.

Pada Juli 1950 akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan RMS. Gerakan operasi militer ini dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.[450] Dalam waktu sekitar empat bulan yakni pada Juli-Nopember tahun itu juga operasi penumpasan RMS dipandang berhasil dan selesai. Sebahagiannya ditangkap dan dikirim ke Pulau Jawa, sementara sebahagian yang lain melarikan diri ke Negeri Belanda. Kepindahan para pimpinan RMS ini mendapat bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Belanda pada saat itu.[451] Dengan jatuhnya Ambon maka perlawanan RMS dapat dipatahkan dan sisa-sisa kekuatan RMS banyak yang melarikan diri ke Pulau Seram.

Beberapa pimpinan RMS seperti Manuhutu (Presiden), Wairisal (Perdana Menteri) dan Caspersz (Menteri Dalam Negeri), sempat melarikan diri ke Seram. Sementara Manuhutu berhasil melarikan diri ke Belanda dan meninggal di sana. Penggagas intelektual RMS, Soumokil, yang juga ikut melarikan diri ke Seram, akhirnya tertangkap dan dihukum mati. Setelah penumpasan habis-habisan gerakan separatis RMS, Pemerintah RIS mengirim Latuharhary sebagai Gubenur untuk menjalankan pemerintahan sipil di Maluku, termasuk Maluku Utara[452]. Proklamasi RMS merupakan noda hitam dalam sejarah Maluku. Untunglah rakyat di Maluku Utara yang memiliki garis perjuangan yang tegas sejak proklamasi RI, tidak tertarik dan tidak terkontaminasi gagasan-gagasan RMS.

Setelah bubarnya negara Indonesia Serikat 17 Agustus 1945, Leimena sengaja menghembuskan isu bahwa Sultan Iskandar Djabir Syah selain sebagai tokoh federalis adalah pendukung RMS, dan membuat makar terhadap Republik Indonesia karena ideologi federalisme yang dianutnya. Akibatnya pada 21 Agustus

---

[449]Pada tanggal 12-13 Juni 1950 diselengarakan Konferensi Maluku di Semarang. Dalam konferensi tersebut para politikus asal Ambon yang terdiri dari tokoh pergerakan nasional mengajurkan agar masyarakat Maluku mengirim misi perdamaian ke Ambon. Mereka juga menyusun daftar usul kepada pemerintah agar diberikan otonomi kepada Maluku Selatan. Lihat R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hlm. 221.

[450]" PM Natsir Tentang Soal Ambon", dalam *Pikiran Rakjat.* Jakarta, 7 Juli 1950.

[451]Operasi berlangsung dari tanggal 14 Juli 1950, berhasil menguasai pos-pos penting di Pulau Buru. Pada tanggal 19 Juli 1950 pasukan APRIS berhasil menguasai Pulau Seram. Pada tanggal 28 September 1950 Ambon bagian utara berhasil dikuasai. Pada tanggal 3 November 1950 benteng *Nieuw Victoria* berhasil dikuasai. Lihat "Operasi didaerah Maluku terus diadakan", dalam *Indonesia Timur*. Makasar, 12 Juli 1950.

[452] "Penambahan Kekuatan Militer di Maluku", dalam *Indonesia Timur*. Makasar,8 Juli 1950.

1950, pemerintah RI mengirimkan 50 anggota TNI dari Yogyakarta yang ditugaskan untuk menangkap Sultan Iskandar Djabir Syah. Pasukan di bawah pimpinan Letnan Koraag bertemu dengan Sultan Iskandar Djabir Syah di istana. Mereka lalu menginterogasinya tentang laporan keterkaitan dengan RMS dan kefanatikannya pada konsep federalisme yang ia perjuangan dalam NIT. Sultan Iskandar Djabir Syah menjawab, bahwa "apakah dilarang kalau Indonesia adalah negara demokrasi, dengan ideologinya adalah federalis yang mendapat jamin dalam UUD 1945". Tentang keterlibatannya dengan RMS, Sultan dengan tegas membantah, ia tidak ada kaitan sedikitpun dengan gerakan RMS tersebut. Ia memang pernah mendapat surat dan kunjungan dari tokoh RMS tapi ia menolak usulan tersebut. Setelah diperiksa selama 2 jam akhirnya sultan dijadikan tahanan rumah.[453]

Meskipun tidak terbukti bahwa Sultan Iskandar Djabir Syah terlibat dengan gerakan RMS, namun ia tetap ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk menjelaskan keterlibatannya sebagai tokoh federalis.[454] Selama di Jakarta Sultan Iskandar Djabir Syah tinggal di rumah Gubernur Maluku Latuharhary. Presiden Soekarno kemudian memanggil Sultan Iskandar Djabir Syah ke istana negara dan menanyakan tentang ideologinya. Sultan menjawab bahwa Maluku adalah daerah 1.000 pulau dengan 2 juta lebih manusia dengan segala beragam budayanya, hanya efektif jika Indonesia menganut negara federal, apakah dilarang kalau Indonesia adalah negara demokrasi dengan ideologinya federal.[455] Dengan alasan itulah kemudian Presiden Soekarno menjadikanya sebagai tahanan politik dengan mengangatnya sebagai pegawai tinggi pada Kementerian Dalam Negeri hingga wafat pada tahun 1976.

F. Pemilu 1955 di Ternate: Elite Kesultanan vs non Kesultanan

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, untuk pertama kalinya Negara Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1955 dibawah Kabinet Boerhanoeddin Harahap (Masyumi).[456] Sebagai negara demokrasi partai politik memegang peranan penting dalam memperjuangan aspirasi politik. Dalam konteks itu, elite Kesultanan Ternate melihat partai politik sebagai instrumen politik untuk membangun kembali kekuasaan politiknya pasca pengasingan Sultan Iskandar Djabir Syah ke Jakarta.

Sebagaimana disinggung diatas, perbedaan persepsi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, mendorong elite kesultanan mendukung partai yang memeliki ideologi yang sejalan dengan kepentingan politiknya. Dalam hal ini mereka memilih bergabung dengan Partai Indonesia Raya

---

[453] Sejak Sultan Iskandar Djabir Syah dijadikan tahanan rumah, setiap hari istananya dijaga oleh 10 Tentara Branjangan yang datang dari Jawa yang dibawah pimpinan Letnan Seosila. Lebih jelasnya Irza Arnita Djafar,*op.cit.,* 159.

[454]*Ibid.,* hlm. 211.

[455]Wawancara dengan Sultan Ternate Mudafar Syah, pada tanggal 13 April 2012.

[456]Sita van Bemmelen dan Remco Raben, (ed), *Antara Daerah dan Negara Indonesia Tahun 1950-an.* (Jakarta: KITLV, 2011), hlm. 1.

(PIR) pada bulan Mei 1950 yang berideologi Swapraja.[457] Dalam konteks itu, elite kesultanan melihat PIR sebagai sebagai instrumen politik yang cukup penting. Lebih-lebih kekuasaan yang mereka miliki dalam struktur kenegaaraan sudah dihapuskan, sejalan dengan pembubabaran dewan raja-raja (badan eksekutif), dan *Noord Molukken Raat* (badan legislatif).

Beberapa argumen mengapa elite kesultanan mendukung PIR, yakni; *pertama*, daerah swapraja, diakui, disahkan dan dijamin sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. *Kedua*, Swapraja, dijamin, diakui, disahkan oleh UUDS Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejak bergabung dengan PIR, elite kesultanan terlibat aktif dalam perorganisasian gerakan-gerakan pendukung swapraja. Seperti mengadakan unjung rasa besar-besaran di lapangan Salero saat pengasingan Sultan Iskandar Djabir Syah ke Jakarta pada 1951. Pilihan politik dengan tidak mendukung partai pemerintah (PNI), tentu tidak menguntungkan, karena mereka harus menghadapi, tidak hanya rival politik nasional tetapi juga lokal.

Pilihan untuk masuk keranah politik, bukan merupakan hal baru bagi elite Kesultanan Ternate. Pada awal kemerdekaan elite kesultanan sudah mendirikan partai politik lokal yang bercorak *rijksverband* yakni PASMO (Partai Sedjarah Maluku Utara). Melalui partai tersebut dapat mengantarkan Salim A. Fabanyo dan Sultan Iskandar Djabir Syah sebagai anggota senat mewakili Maluku Utara pada konferensi Malino dan Denpasar 1946. Ketika bubarnya Negara Indonesia Serikat (RIS), maka kegiatan berpolitik, dialihkan dengan mendukung PIR yang dipimpin Saban Amra, perdana menteri Kesultanan Ternate.[458]

Pemilihan Umum yang diselengarakan pada tahun 1955 berlangsung dibawah sistem demokrasi liberal sesuai jiwa dan semangat pasal-pasal UUD Sementara. Di tingkat pusat, terdapat empat partai yang memperoleh jumlah kursi yang besar seperti PNI (57), Masyumi (57), NU (45) dan PKI (39).[459] Khusus untuk daerah Maluku, Partai Masyumi memperoleh 117.440 suara. Parkindo berada pada posisi kedua dengan meraih 108.920 suara. Urutan ketiga PNI dengan meraih 36.602, sedangkan partai PIR mendapatkan 19.068 suara dan menduduki urutan keempat.[460]

Kemenangan Masyumi tentu sangat mengejutkan karena pada saat itu Masyumi bukan partai yang tergolong besar di Propinsi Maluku yang mayoritasnya beragama Kristen. Kemenangan yang sama pun di peroleh Partai Masyumi untuk daerah pemilihan Maluku Utara (Ternate). Hasil perolehan suara di daerah pemilihan Ternate menghasilkan lima besar yakni; Masyumi dengan meraih 51.410suara dan memperoleh 5 kursi. Parkindo meraih 25.594 suara dan memperoleh3 kursi. PIR meraih 17.080 suara mendapat 3 kursi baik di DPRD Maluku maupun di

---

[457] Tabloid, *Parada.* Ternate, edisi 17, 4 Juli-12 Agustus, 2001

[458] *Ibid.*

[459] R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik.* (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 23.

[460] Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Maluku*. (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977), hlm.87-88.

Konstiuante. PNI meraih 14.977 suaradan memperoleh 2 kursi, dan PSII2.729 suara dan memperoleh 2 kursi.[461] Hasil perolehan Pemilu 1955 di Maluku sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Pemilihan Umum Tahun 1955 Di Maluku

NO	PARTAI PESERTA	UNTUK DPR	UNTUK KONSTITUANTE
1	MASYUMI	117.440	102.615
2	PNI	30.218	36.602
3	NU	-	-
4	PKI	3.792	4.936
5	PSII	11.310	8.762
6	PARKINDO	108.920	109.262
7	P. KHATOLIK	18.710	18.906
8	PSI	1.358	1.814
9	PERTI	-	-
10	IPKI	2.733	2.649
11	GP.PANCASILA	345	390
12	PRN	287	1.115
13	PPPRI	2.900	2.042
14	P.MURBA	1.553	-
15	PARTAI BURUH	3.073	1.491
16	PII	-	-
17	PERSATUAN DAYAK	-	-
18	P. WANITA RAKYAT	1.353	471
19	APTI	-	-
20	P. RAKYAT DESA	-	-
21	R.YUJONO	-	-
22	PIR	19.068	18.204
23	PERBAI	8.470	-2.210
24	BAPERKI	-	-
25	GERINDO	-	-
26	PPDMT	147	137
27	NUSA INA	651	1.381
	JUMLAH	332.128	312.987

Sumber : Direktorat Sosial Politik Kantor Gubernur KDH Tingkat I Maluku 1955

Kemenangan Masyumi di Kota Ternate, tentu saja menyulitkan posisi elite kesultanan, karena bagaimanapun Masyumi adalah kekuatan politik utama yang menggerakan anti pemerintahan *swapraja* yang dimotori tokoh-tokoh Persatuan Indonesia (PI). Walaupun PIR mendapat dukungan dari Kesultanan Ternate, namun

[461] Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku. (Ambon, 1993). hlm. 95

Masyumi mendapatkan suara mayoritas dengan mengunguli partai-partai lainnya di Maluku Utara termasuk PNI.Lihat tabel 9.

Kekalahan Partai Indonesia Raya (PIR) pada Pemilihan Umum tahun 1955 di Ternate, sangat berkaitan dengan pengasingan Sultan Iskandar Djabir Syah di Jakarta. Selama pengasingannya di Jakarta, kesultanan Ternate mengalami kekosongan pemerintahan tradisional maupun politik formal (sebagai pengurus PIR). Sehingga, seluruh kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan dijalankan oleh elite kesultanan yang secara politik tidak memeliki basis kuasa yang kuat. Ketiadaan Sultan itu berdampak pada merosotnya legitimasi kekuasaan elite Kesultanan Ternate akibat hilangnya kontrol politik dan birokrasi di wilayahnya, termasuk ketidak kemampuan mengkonsolidasikan masyarakat Ternate dalam Pemilu 1955. Kapasitas mereka hanya sebatas pelengkap strukutur pemerintahan hingga berakhirnya pemerintahan Soekarno. Begitu terbatas dan lemahnya kekuasaan elite Kesultanan Ternate, sehingga nyaris tidak banyak yang bisa dilakukan. Hampir semua akses yang mengarah ke kepentingan kekuatan lokal dipastikan terisolasi selama tak adanya sultan.Bagi masyarakat Ternate sultan adalah segalannya, salah satu nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat Ternate adalah menjunjung tinggi perkataan atau perintah sultannya dengan semboyang *jou kasa ngom kage* (dimana ada sultan disitulah kami).

Tabel 9
Hasil Pemilihan Umum di Ternate 1955

No	Nama Partai	Tahun 1955
1	PERTI	-
2	PSII	2.729
3	NU	-
4	MASYUMI	51.410
5	PARTAI BURUH	210
6	KHATOLIK	460
7	PARKINDO	25.594
8	MURBA	521
11	PNI	14.977
12	IPKI	730
13	PPPRI	450
14	PIR	17.080
15	PKI	1.571

Sumber: Direktorat Sosial Politik Kantor Gubernur KDH Tingkat I Maluku 1955

Kemenangan Masyumi pada pemilu 1955 di daerah pemilihan Ternate disebabkan persoalan ideologi. Bagi kelompok non-kesultanan khususnya etnis Tidore, Makian dan Bacan yang fanatik Islam mendukung Masyumi dengan pertimbangan bahwa Partai ini sedang berada pada posisi kekuasaan dan berpotensi

menjadi partai besar.Kemenangan Masyumi di Ternate, menurut berbagai sumber yang diwawancarai kegiatan kampanye Masyumi sangat di warnai isu-isu keagamaan. Dimana Agama dijadikan sebagai alat untuk menciptakan simbol partai, membangun basis massa, mengemas isu, sekaligus target perjuangan partai.[462] Di berbagai surat kabar tokoh-tokoh Masyumi seperti Abjan Soelemen, Arsyad Hanafi dan Abdul Halil menyerang dan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Sultan Iskandar Djabir Syah sebagai tokoh pro-Belanda, sehingga kenyataanya diasingkan oleh Soekarno ke Jakarta.[463]

Kekalahan Partai Indonesia Raya (PIR), sebagaimana dikemukakan diatas, adalah disebabkan faktor non teknis seperti; banyak masyarakat yang buta huruf sehingga tidak mampu membedakan partai yang dipilih, adalah faktor ketidak mampuan para elite untuk menggalang massa tradisionalnya. Dengan demikian kekalahan PIR dalam Pemilu 1955 memperlihatkan betapa lemahnya kedudukan politik elite kesultanan tanpa dukungan politik Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah. Namun demikian, Pemilu 1955 termasuk peristiwa unik dalam sejarah Indonesia, karena sebagai sebuah negara baru telah mampu dan sukses menyelenggarakan pemilu nasional yang paling demokratis.[464] Menurut Ruth McVey Pemilu 1955 tersebut telah menghasilkan satu-satunya pemilihan umum yang betul-betul bebas, jujur dan adil yang pernah dialami dan disaksikan di negara ini.[465]

Tabel 10
Nama-nama Partai Politik, Pengurus dan Jumlah Kursi
di DPRD Maluku Utara 1955

No	Nama Partai	Nama Ketua Partai	Perwakilan di DPRD TKT II
1	Masyumi	-	5 kursi
2	PNI	N. Iskandar Alam	2 kursi
3	PIR	Hadji Saban Amra	3 kursi
4	PARKINDO	Joh Tak.	3 kursi
5	PSII	Darwis Pryono	2 kursi
6	PKI	Hadji N.B. Madjid	1 kursi
7	PARTINDO	Ismail Madjid	-
8	KATOLIK	Padachan. Padachan	-

Sumber: Naskah Pengusulan Tingkat I Provinsi Maluku Utara, 1964.

[462] Wawancara dengan *Bobato Dunia* Kesultanan Ternate pada bulan Agustus 2013.

[463] "Seruan Tokoh-tokoh Masjumi pada orang2 Islam".*Berita Maluku*. Ternate, 18 Agustus 1955.

[464]Peristiwa tersebut sangat menarik perhatian karena selain sebagai eksperimen pertama yang bersifat nasional dalam menjalankan demokrasi, pemilu ini merupakan konsensus tertinggi yang pertama kali dicapai pasca revolusi nasional. Masih dapat dikatakan lebih jauh lagi bahwa pemilu 1955 sebagai peristiwa terpenting kedua setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lebih jelasnya baca Daniel Dhakidae, "Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik," dalam M. Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik.* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 172.

[465] Ruth T. McVey, "The Case of the Disappearing Decade" in David Bourchier and Legge (eds), *Democracy In Indonesia 1950 and 1990.* (Australia: Monash University, 1994), hlm. 3.

Satu hal yang sangat menarik pada pemilu 1955 di Ternate adalah kehadiran Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI menduduki peringkat ke 6 dari 15 partai peserta Pemilu, bahkan suaranya singnifikan dengan memperoleh 1.571 suara sehingga dapat mengemparkan masyarakat Ternate yang dikenal agamais.[466] Keberadaan PKI di Pulau Ternate merupakan pelarian tokoh-tokoh PKI berasal Digul Papua dan Pulau Banda. Di motori oleh M.A kamaruddin dan Bohang, mereka kemudian memperluas pengaruhnya di Pulau Ternate PKI. Ketika meletusnya pemberontakan G.30.S/PKI 1965, selain kedua tokoh tersebut, para simpatisan PKI dan masyarakat yang diduga terlibat dalam Peristiwa G.30.S/PKI di tangap di bawa ke Pulau Buru dengan kapal laut.[467]

Dalam upaya menumpas komunisme khususnya di bidang ideologis. Di Pulau Ternate di beberapa tokoh buku di larang mengedarkan buku-buku karangan Pramoedya Ananta Toer, Joebaar Ajoeb, Rivai Apin, dan menyita serta membekukan buku-buku yang dikarangnya, karena dianggap mengandung ajaran komunis, sehingga buku-buku tersebut dilarang beredar di masyarakat. Penyitaan dan pembekuan buku-buku tersebut didasarkan pada intruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republk Indonesia No. 1381/1965.[468]

Penutup

Sejarah menunjukan partisipasi politik elite Kesultanan Ternate dalam negara kesatuan telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, ditandai dengan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), pada tanggal 24 Desember 1946. Terbentuknya Negara Indonesia Timur kemudian menjadi inspirasi politik bagi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah (Sultan Ternate ke-47), untuk melibatkan diri sebagai anggota senat NIT mewakili Maluku Utara, dengan mengikuti konferensi Malino dan Denpasar sebagai anggota senat mewakili Maluku Utara sekaligus merupakan salah satu disainernya. Sebagai tokoh federalis yang memperjuangankan pembentukan Negara Indonesia Timur dari konferensi Malino hingga Denpasar, maka dalam perkembangannya pada tahun 1949, Iskandar Jabir Syah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri NIT pada kabinet J.E. Tatengkeng (27 Desember 1947-14 Maret 1950).

Realitas politik menunjukan, tatkala rezim Soekarno berkuasa, elite Kesultanan Ternate mengalami pembatasan. Pilihan politik Sultan Ternate ke-47 Iskandar Djabir Syah (1929-1975), dalam mendukung pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) yang diprakarsai oleh Herbertus J. van Mook pada 1946, berimplikasi diasingkannya ke Jakarta pada 1950, karena dituduh sebagai tokoh federalis. Perbedaan persepsi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan inilah, mendorong elite kesultanan tidak mendukung partai

[466] Organisasi Islam Milik PKI" dalam *Berita Maluku*. Ternate, 12 Agustus 1955
[467] *Berita Maluku*. Ternate, 19 Oktober 1965.
[468] *Ibid.*

pemerintah Soekarno pada pemilu 1955. Pilihan politik tersebut tentu tidak menguntukan posisi mereka, kerena harus menghadapi, tidak hanya rival politik lokal, namun juga kekuatan nasional.

Sikap konfrontatif elite kesultanan tersebut, mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam membatasi peran politik mereka, seperti; *pertama*, pembubabaran dewan raja-raja (badan eksekutif), terdiri dari Sultan Ternate, Tidore dan Bacan dan *Noord Molukken Raat* (badan legislatif) yang mendukung federalisme pada tahun 1950. Konsekuesinya elite kesultanan tidak lagi mempunyai instrumen legal-formal dalam mempengaruhi pemerintahan lokal. Kontrol mereka terhadap terhadap birokrasi kemudin digantikan oleh bupati yang dipilih oleh DPRD. *Kedua*, penghapusan Karesidenan Ternate dan pembentukan pemerintahan daerah tingkat II Maluku Utara, berdasarkan UU. No. 60 tahun 1958. Konsekuesinya penguasa di tingkat II (Bupati) tidak lagi harus dijabat oleh sultan dan keluarganya tetapi dipilih melalui pemilu dalam format politik modern. Ketiga, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tentang pembatasan dan kepemilikan tanah atau pengambil alihan oleh negara terhadap tanah-tanah swapraja.

Selama pemerintahan Soekarno, elite Kesultanan mengalami krisis politik. Sikap konfrontatif mereka dengan tidak mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) dan partai pemerintah (PNI), menimbulkan pertanyaan, mengapa Presiden Soekarno tidak menghancurkan eksistensi politik mereka dalam ranah politik lokal di Ternate. Apakah beberapa kebijakan tersebut diatas, berpengaruh terhadap eksitensi politik mereka di Ternate atau sebaliknya. Faktanya, walaupun eksistensi politik mereka mendapatkan pembatasan. Namun secara kultural, tidak berdampak pada merosotnya kekuasaan elite kesultanan. Salah satu nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat Ternate adalah menjunjung tinggi perkataan atau perintah sultannya dengan semboyang *jou kasa ngom kage* (dimana ada sultan disitulah kami).

Dalam budaya Ternate, kaum bangsawan dihormati dan dipatuhi karena diyakini mewarisi kebesaran dan kewibawaan yang membawa pada kedamaian, keadilan dan memberikan kesejahtraan masyarakat. Ini sekaligus menjelaskan bahwa kedamaian, keadilan dan kesejahtraan adalah kata kunci bahwa begitu pentingnya bangsawan dimata rakyat. Hubungan sosial tersebut bukan hanya bersifat *patron-clein*, namun pada dasarnya mencerminkan ciri budaya masyarakat yang bersifat khusus dalam menjaga hubungan antara masyarakat dan pimpinan dalam tradisi sosial Ternate. Hal ini tercermin dalam semboyang hidup masyarakat Ternate "*ino foma Makati nyinga, doka gosora se bualawa, om doro ya momote, fo magogoru fo madudara"I* (mari kita berkasih saying, seperti buah pala dan fulinya, matang bersama, gugur bersama, dilandasi kasih dan sayang).

BAB VI

KESULTANAN TERNATE PADA ERA ORDE BARU 1966-1998

Pengantar

Bab ini menjelaskan strategi politik Sultan Ternate ke-48 Mudafar Sjah dalam menata kembali basis kekuasaannya pasca mangkatnya Sultan Ternate ke-47 Iskandar Muhammad Djabir Sjah1975. Dalam sejarahnya, para Sultan Ternate tidak hanya mengandalkan pada apa yang mereka percaya bahwa mereka adalah pusat anutan, tetapi juga mengunakan strategi untuk memperluas dan mengukuhkan kekuasaannya. Dalam hal ini di telusuri strategi apa saja yang digunakan oleh Sultan Mudafar Sjah dalam membangun kembali basis kekuasaanya di tengah pusaran kekuasaan Orde Baru dengan tiga kekuatan utama yaitu; Militer, Birokrasi dan Golkar.

Tekanan bab ini ditelusuri dua strategi Kesultanan Ternate dalam upaya mempertahangkan eksistensi politiknya pada ranah politik lokal. Pertama, berasosiasi dengan partai pemerintah. Pada periode pemerintahan Soeharto, Sultan Ternate Mudafar Sjah mengambil keputusan politik untuk mendukung partai Pemerintah (Golkar). Dukungan Kesultanan Ternate pada Golkar, dipahami sebagai strategi akomodatif dan menjaga agar tetap bertahan di tengah pusaran kekuasaan yang oteriter dan sentralistik.Pendekatan akomodatif bertujuan agar bisa selamat dari penghancuran sebagaimana terjadi pada Pemerintahan Soekarno, serta bisa memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh kekuatan Orde Baru.

Kedua, arena kebudayaan.Dalam membangun kekuasaanya strategi yang digunakan Kesultanan Ternate tidak hanya melalui partai politik, tetapi juga meletakan basis kekuasaanya dalam bidang kesenian, teologi keagamaan dan kebudayaan.Perwujudan sebagai pusat anutan istana tetap mempertahangkan upacara-upacara tradisional istana seperti *Kololi Kie* (ritual mengelilingi pulau), dan *Fere Kie* (ritual mendaki gunung).Ritus- ritus istana ini tetap dijalangkan karena merupakan sumber legitimasi kultural bahwa istana masih mempunyai daya magis, sakral dan simbol kewibawaan.Selain itu, merancang upacara-upacara yang mempunyai bobot politik seperti *legu gam* (perayaan hari ulang tahun sultan), mendirikan beberapa media massa seperti; Parada, Gamalama, dan Foramadiyahi, dan membangun jaringan kekerabatan (politik kekerabatan) dengan memberikan gelar kehormatan pada pejabat atau mantan pejabat baik pusat maupun daerah. Setidaknya strategi kebudayaan sebagai titik masuk (*entry point*) untuk menjadikan istana sebagai pusat pengemban, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Ternate.

Alur kajian bab ini akan dimulai dengan menelusuri terlebih dahulu tentang dukungan Kesultanan Ternate ke Golkar, pelantikan Sultan Ternate dan konsolidasi elite kesultanan. Bab ini diakhiri dengan menjelaskan pembentukan Kabupaten Maluku Utara dan penguasa non kesultanan.

A. Kesultanan Ternate Pasca Iskandar Muhammad Djabir Sjah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah, melibatkan diri sebagai anggota senat mewakili Maluku Utara, pada konperensi Malino dan Denpasar yang diprakarsai oleh Herbertus J. van Mook, guna pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) pada tahun 1946. Pilihan politik inilah kemudian mengantarkannya menjadi anggota senat NIT hingga diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur pada 27 Desember 1949 dalam kabinet J.E. Tatengkeng.

Implikasi dari kebijakan politik tersebut, ketika bubarnya Negara Indonesia Serikat (RIS) 17 Agustus 1950.Sebagai tokoh federalis Iskandar Djabir Sjah, oleh Presiden Soekarno memindahkan atau mengasingkannya ke Jakarta.[469]Di Jakarta Iskandar Muhammad Djabir Sjah yang saat itu masih menjabat Residen Maluku Utara dimutasikan sebagai pegawai tinggi pada Kementerian Dalam Negeri. Pada saat yang sama jabatannya sebagai Residen Maluku Utara digantikan oleh Sultan Tidore Zainal Abidin Alting.

Selama pengasingan di Jakarta, Kesultanan Ternate mengalami kekosongan pemerintahan.Seluruh kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan di jalankan oleh *Bobato Madopolo* (dewan Menteri), dan *Bobato Nyagimoi se Tufkange* (lembaga legislatif). Kekosongan itu berdampak pada merosotnya legitimasi kekuasaan elite (bangsawan) istana, akibat hilangnya kontrol politik dan birokrasi di wilayahnya. Kapasitas mereka hanya sebatas pelengkap strukutur pemerintahan.Hal ini disebabkan oleh otoritas kepemimpinan yang berada ditangan sultan.

Pada periode tersebut belum juga pergantian atau pelantikan sultan baru di Kesultanan Ternate.Hal ini bisa di pahami karena dalam tradisi Kesultanan Ternate tidak mengenal putra mahkota, yang telah disiapkan oleh sultan sejak masih hidup.[470]Bahkan pengangkatan seorang *kolano* (sultan), tidak semua sultan sampai melihat bagaimana putranya naik tahta dan memerintah, karena pergantian tahta dari sultan kepada anak hanya terjadi setelah yang ayahnya meninggal.

Selama berkuasanya rezim Presiden Soekarno, ada sejumlah kebijakannya dalam membatasi peran politik elite Kesultanan Ternate, seperti; *pertama*, pembubabaran dewan raja-raja (badan eksekutif), terdiri dari Sultan Ternate, Tidore dan Bacan dan *Noord Molukken Raat* (badan legislatif). Konsekuesinya elite kesultanan tidak lagi mempunyai instrumen legal-formal dalam mempengaruhi pemerintahan lokal.Kontrol mereka terhadap terhadap birokrasi kemudin digantikan oleh bupati yang dipilih oleh DPRD.*Kedua*, penghapusan Karesidenan Ternate dan pembentukan pemerintahan daerah tingkat II Maluku Utara, berdasarkan UU No.

---

[469] Irza Arnita Djafar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. (Jakarta :Bio Pustaka, 2005),hlm 192.

[470]Lihat F.S.A. de Clercq, Ternate:Karesidenan dan Kesultanan.Terjemahan Noer Fitriyanti dari,*Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate*, 1890. (Ternate: Komunitas Uma Sania, 2007), hlm. 21-24.

60 tahun 1958.[471]Konsekuesinya penguasa di tingkat II (Bupati) tidak lagi harus dijabat oleh sultan dan keluarganya tetapi dipilih melalui pemilu dalam format politik modern.

Setelah dibubarkannya dewan raja-raja dan *Noord Molukken Raat* (badan legislatif) pada tahun 1951, maka secara politik elite kesultanan tidak lagi mempunyai instrumen legal-formal dalam mempengaruhi pemerintahan lokal.Kontrol mereka terhadap birokrasi kemudian digantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRDS).Dengan demikian pengaruhi istana hanya tersisa pada wilayah-wilayah kultural.Begitu terbatas dan lemahnya kekuasaan dan kekuatan politik elite Kesultanan Ternate, sehingga nyaris tidak banyak yang bisa dilakukan. Hampir semua akses yang mengarah pada kepentingan kekuatan lokal dipastikan terisolasi semuanya, pada saat ketiadaan sultan. Dengan demikian wilayah kekuasaan elite kesultanan hanya terbatas pada tembok-tembok istana. Walaupun masih memiliki birokrasi pemerintahan, namun hanya mengurusi kepentingan-kepentingan rumah tangga istana.

Selain krisis politik, elite kesultanan juga mengalami krisis ekonomi, akibat merosotnya keuangan berdampak pada kemampuan istana untuk membiayai struktur birokrasinya.Misalnya, dengan alasan keuangan, *kadaton* kemudian membubarkan *bala kusu-sekano-kano* (prajurit istana). Hal tersebut mendorong Mudafar Sjah (putra ke-3 Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah) mengadaikan beberapa pusaka kerajaan seperti; tongkat komando sultan berkepala berlian, pedang bersarung emas, sepucuk senapan emas, dan peluruh emas pada bank BRI.[472]Krisis tersebut berlanjut ketika diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, tentang pengambil alihan Negara atas tanah-tanah bekas swapraja dan asset-asset ekonomi lainnya.Hal ini berbeda dengan Kasultanan Yogyakarta dan Pura Paku Alaman yang mempunyai payum politik sebagai daerah istimewa memungkimkan mereka tetap menguasai tanah diwilayah kekuasaanya dan mempunyai akses pada pemerintahan maupun politik lokal, sesuatu yang tidak dimiliki Kesultanan Ternate.

Para elite kesultanan hanya mengandalkaan penghasilan berupa *ngase* (pajak) dari tanah-tanah yang masih berada di wilayah kecamatan Pulau Ternate. Dalam mengatasi kesulitan ekonomi, para elite melakukan perubahan orientasi pekerjaan, jika pada pemerintahan swapraja mereka terserap dalam birokrasi pemerintahan *swapraja,* maka setelah bubarnya dewan raja-raja, memilih berkerja disektor non birokrasi, seperti bisnis. Namun tidak semua kalangan elite memasuki sektor kapitalisme, beberapa diantara mereka masih bertahan dalam sektor negara, dengan menjadi birokrat.Namun, posisi mereka di birokrasi ditopang oleh pendidikan yang mereka dapatkan pada masa kolonial maupun revolusi.

Pada 17 November 1951, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Ternate. Ini merupakan kunjungan pertama seorang Presiden ke Ternate.Pada waktu kedatangannya di Ternate, Presiden Soekarno disambut dengan meraih oleh masyarakat Ternate. Dalam pertemuannya dengan bangsawan di istana Ternate,

---

[471] Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. (Jakarta: Pustaka Utama, 2000), hlm. 219.

[472]*Ibid.,* hlm. 225.

Presiden Soekarno menawarkan membentuk daerah istimewa atau daerah tingkat I. Namun para elite kesultanan mengatakan " Untuk daerah istimewa biarlah Presiden Soekarno memberikan kepada Aceh dan Yogyakarta lebih dulu, untuk Maluku Utara setelah kedua daerah tersebut diistimewakan".[473]Selain itu ada aspirasi yang disampaikan agar Maluku Utara dimekarkan menjadi daerah Tingkat I yang terpisah dari Ambon.Presiden Soekarno dengan mengatakan bahwa justru Maluku harus menjadi dua propinsi.[474]Namun dalam perkembangannya janji tersebut tidak terealisasi hingga berakhirnya kekuasaan Soekarno.

Foto 6 dan 7. Presiden Soekarno bersama keluarga Sultan Ternate pada kunjungan di Ternate 17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 18

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 21

Dalam perkembangannya pada 15 Oktober 1954, Wakil Presiden

[473] Herry RD.Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*. (Ternate, Yayasan Kie Raha, 2003), hlm. 186.

[474]"Kunjungan Presiden Soekarno ke Ternate", dalam *Tabloid Parada*.Ternate, edisi X, 19 September- 6 Oktober, 2001.

Mohammad Hatta melakukan kunjungan ke Ternate untuk melihat kondisi keamananan Maluku Utara pasca bubarnya Negara Indonesia Timur (NIT) dan Pemberontakan Republik Maluku (RMS) 1950. Dalam pertemuan dengan Mohammad Hatta, Dewan Perwakilan rakyat sementara (DPRDS) meminta kepada pemerintah agar dalam waktu yang singkat status tingkat II Maluku Utara ditingkatkan menjadi daerah I kerena sesuai dengan tujuan pembentukan negara RI. Selama kunjungan di Ternate Mohammad Hatta meresmikan pembangunan dermaga pelabuhan Ternate (sekarang pelabuhan Ahmad Yani) dan meresmikan galanggan perahu tradisional di Kota Baru.[475]

Setelah mengadakan berbagai pertemuan dengan sejumlah anggota DPRDS dan tokoh masyarakat. Pada kesempatan tersebut Mohammad Hatta juga melakukan pertemuan dengan Residen Maluku Utara sekaligus Sultan Tidore Zainal Abidin Alting.Dalam pertemuan itu Zainal Abidin Alting meminta kepada pemerintah agar mengintegrasikan Papua kedalam negara kesatuan RI dan jangan sekali-kali melepaskannya. Menurut Zainal Abidin Alting, ada upaya yang sistematis dan semakin jelas dari Belanda untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Lebih lanjut menurut Zainal Abidin Alting mengatakan bahwa Rakyat Tidore dan Maluku Utara tidak sabar lagi menantikan pembebasan Papua dari Kolonial Belanda. Dalam merspon tuntutanan tersebut Mohammad Hatta mengatakan bahwa tentang Papua ini merupakan salah satu program perjuangan politiknya.[476]

Gambar 8
Kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Ternate 14 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen 541015 w 3

[475] Hal inilah hendak diatasi dengan usaha-usaha pembangunan dalam bidang perhubungan dengan membangunan fasilitas-fasilitas pelabuhan dan perkapalan di Maluku Utara. Hal ini sangat dirasakan perhubungan laut.Maluku yang terdiri atas beribu-ribu pulau hanya dapat dijangkau terkecuali melalui perhubungan laut. Lihat J. Mansur " Naskah Pengusulan Tingkat I Propinsi Maluku Utara Dewan Perwakilann Rakyat Gotong Royong Daerah Tingkat II Maluku Utara". Ternate, 1964, 25.

[476] Herry RD.Nachrawy,*op.cit.*, hlm. 129.

Gambar 9

Sumber: ANRI, Kempen 541015 w 7

Gambar 10
Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi pusat pembuatan perahu tradisional 15 Oktober 1954

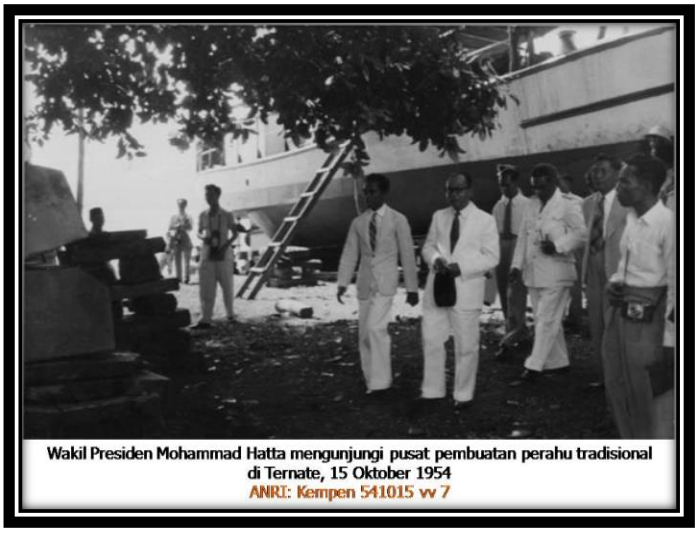

Sumber: ANRI, Kempen 541015 w 7

Pada tahun 1953 Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah, mengujungi Ternate, tanah kelahirannya.Sebanarnya kunjungan ke Ternate bukan atas insiatifnya, melaingkan atas permintaan rakyat dan kepala Residen Maluku Utara Zanal Abidin Alting.Permohonan tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, akhirnya permohonan tersebut dikabulkan dan diberi izin melakukan kunjungannya ke Ternate selama satu tahun.Kedatangannya disambut oleh Residen Maluku Utara Zainal Abdin Alting, para bangsawan dan ribuan masyarakat

Ternate.[477]Selama di Ternate Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah melakukan kunjungan ke daerah-daerah kekuasaanya di Maluku Utara.Ia ditemani Sultan Tidore Zainal Abidin dan Sultan Bacan Muksin Usman. Selama kunjungan Sultan Iskandar Djabir Syah selalu berdialog dan menerima laporan dari para *sangaji* (bupati) mengenai situasi dan kondisi rakyatnya.

Selain itu, agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di Kesultanan Ternate.Sultan Iskandar Djabir Syah melantik *Bobato Madopolo* (dewan Menteri) yang baru. Noho Badi Madjid dari marga Tomaito sebagai*jogugu* (perdana menteri). Haji Abdul Habib Djiko sebagai *Hukum Soa Sio* (Jaksa Agung) dari marga Djiko.Samaka Ali diangkat sebagai *Hukum Sangaji* (menteri dalam negeri) dari marga Payahe, dan Saleh Badrun diangkat sebagai *Tulilamo* (sekertaris negara) dari marga Tabala. Mereka ditugaskan untuk menata kembali lembaga-lembaga adat. Atas nama sultan mereka kemudian melantik beberapa kepala *Soa* (kepala desa) yang tersebar didaerah kekuasaan Kesultanan Ternate. Pada tanggal 15 Maret 1954 Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah mengakhiri kunjungannya di Ternate dan kembali ke Jakarta.[478]

Setelah pensiun dari dinas kementerian dalam negeri pada 1969, sisa hidup Sultan Iskandar Djabir Sjah dihabiskannya di Jakarta. Pada tanggal 4 Juli 1975 Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah meninggal dalam usia ke 75 tahun dan dimakamkan di pemakaman umum Pekuburan Karet.[479]Selama berada di Jakarta (1950-1976) atau sebelas tahun Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah belum menyiapkan pergantian atau pelantikan sultan baru di Kesultanan Ternate.

B. Anak Ketiga Yang Menjadi Sultan Ternate ke-48

Mudafar Sjah di lahirkan di Ternate 13 April 1938 adalah putra ke-3 dari 4 bersaudara dari pasangan Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah dan Boki Mariyam Cili Gunung Sibela (putri Kesultanan Bacan). Sejak awal kehidupannya, ia telah mengalami perjuangan yang berat bersama keluargannya pada masa Pendudukan Jepang di Ternate. Mereka harus diungsikan di Brisbane Australia untuk menghindari upaya pemanfaatan dan pembunuhan Tentara Pendudukan

---

[477] Sebagai sultan yang dicintai oleh seluruh masyarakat Ternate, sejak kedatangannya didermaga Ternate, ia disambut dalam upacara resmi kesultanan oleh pemangku adat yang dinamakan upacara " *Ige-ige se Bonofo* dan *Joko Kaha*. Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah diusung dengan kursi kerajaan sampai memasuki *kadaton*. Sepanjang jalan ia dielu-elukan dengan tarian dan nyayian masyarakat Ternate. Lebih jelasnya lihat Irza Arnita Djafar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. (Jakarta :Bio Pustaka, 2005).

[478] "Pergantian Pemangku Adat Kesultanan", dalam *TabloidParada*. Ternate, edisi XVII, 4 Juli-12, Agustus 2001.

[479] Berita mangkatnya Sultan Iskandar Djabir Sjah dimuat pada halaman pertama surat kabar *Sinar Harapan.* Dalam Koran tersebut diulas, Sultan Iskandar Djabir Sjah yang pernah menduduki Menteri Dalam Negeri pada Negara Indonesia Timur dan merupakan salah satu pendiri NIT telah meninggal dunia dan dimakamkan di kuburan Umum Karet, pada tanggal 5 Juli 1975. Lihat Koran *Sinar Harapan* 5 Juli 1975.

Jepang.[480] Dengan penuh pengorbanan dan perjuangan inilah membuat anak-anak Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah(Sultan ke-47) tampil sebagai tokoh pejuang dan pewaris kerajaan yang memeliki visi politik untuk menjadi raja besar. Salah satu diantaranya adalah Mudafar Sjah yang kemudian menjadi pewaris tahta dan dalam perjalanan sejarahnya menjadi sanga measto politik di Maluku Utara.

Tidak seperti anak-anak sultan didaerah lainya yang membedakan status bangsawan dalam pergaulan kesehariannya.Mudafar Sjah diasuh oleh orang-orang kampung (Dufa-dufa) dan hidup diluar istana. Meskipun Muhammad Djabir Sjahberasal dari kalangan bangsawan, tetapi ia didik oleh orang tuanya harus bersama dengan masyarakat biasa.

Hal ini sesuai dengan falsafah Kesultanan Ternate yakni *dadah madopo* (nasi kuning dan telur).[481] Maka tidak mengherankan Mudafar Sjah tumbuh normal sebagaimana anak-anak kebanyakan yang ada pada waktu itu, karena ia tidaklah dibesarkan dilingkungan istana tempat ayah dan ibunya tingal. Dari pergaulan yang tidak membedakan status tersebut, ia tumbuh sebagai seorang *kaicil* (pangeran) yang bebas, termasuk dalam hal menentukan jodohnya. Hal ini dapat dilihat *Kaicil* (pangeran) Mudafar Sjah pernah mempersunting seorang istri yang beragama Nasrani dari Minahasa. Bila setiap ke Gereja, Mudafar Sjah membonceng istrinya ke Gereja untuk ibadah.Sampai indahanya selesai, barulah keduanya membonceng pulang ke istana.[482]begitula seterusnya sebelum menjadi mualaf (masuk Islam), sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Kesultanan yang dianut oleh masyarakat Ternate.

Pendidikan formalnya (SD, SMP dan SMA) ditempuh di Ternate, pada sekolah Nasrani.Pada hal di Ternate pada waktu itu sudah ada sekolah-sekolah umum atau sekolah Agama Islam.Hal ini berbeda yang dilakukan oleh kakeknya (Sultan Usman Sjah) yang sangat anti pada Belanda maka anak-anaknya tidak diperbolehkan memasuki sekolah Belanda, dengan alasan Belanda semuanya kafir maka sudah sewajuarnya sekolahnyapun kafir.Maka semua anak-anaknya disekolahkan di Sekolah Melayu.[483] Pada tahun 1967 melanjutkan pendidikan tinggi pada Universitas Khairun Ternate dan meraih gelar Sarjana Muda Hukum pada 1970, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia (UI) jurusan Filsafat dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1984.

Pendidikan terakhir inilah, ia memeliki peran besar dalam memperkenalkan dan mendudukan kembali ideologi Kesultanan Ternate yakni *Jou se Ngofa Ngare* (pemimpin dan rakyat) yang telah lama menjadi falsafah *Moloku Kie Raha* dan dalam berbagai seminar atau tulisan. Bagi Mudafar Syah filosofis *Jou se Ngofa*

---

[480] Irza Arnita Djafar, *op.cit.*,hlm. 120.

[481]*Dadah Madopo* (Nasi Kuning dan Telur), nasi kuning (kuning) disimbolkan warna pakaian Kesultanan Ternate. *Dadah Madopo* berbentuk gunungan dipuncaknya dihiasi sebutur telur.Nasi kuning adalah rakyat sedangkan telur adalah sultan.Keduanya memeliki hubungan yang tak bisa dipisahkan tidak ada sultan tanpa rakyat dan sebaliknya.

[482] Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. (Jakarta: Pustaka Utama, 2000), hlm. 207

[483] Irza Djafar, *op.cit.*, hlm. 78-79.

Ngare tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan pemimpin dan rakyat. Ideologi tersebut sudah mengalami proses materialisasi kedalam bentuk lambang Kesultanan Ternate *Goheba Dopolo* Romdidi (burung berkepala dua, berbadan satu dan berhati satu), bahkan berkembang menjadi pemikiran religi (Tuhan dan Hamba) yang tertuang dalam bentuk dua kalimat syahadat pada ajaran Islam. Argumentasi tersebut tentu menjadi polemik, jika falsafah*Jou se Ngofa Ngare* yang hanya terbatas pada soal budaya dan politik dikonversikan dalam aspek keyakinan (agama). Oleh karena itu pada aspek ini, perlu adanya pembatasan bahwa falsafah *Jou se Ngofa Ngare*(pemimpin dan rakyat) hanya terbatas pada soal budaya politik, dan tidak sama sekali berhubungan dengan dimensi agama, apalagi menyamakan sultan adalah wakil Tuhan atau dewa sebagaimana keyakinan sebagian kerajaan-kerajaan tradisional lainnya di Indonesia.

Selama pengasingannya di Jakarta (1950-1975), Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah mengeluarkan *idin kolano* (fatwa) menunjuk pelaksanaan tugas harian kepada empat pemangku adat (*bobato madopolo*) dari empat marga utama, yakni; Ahmad Yusup Madjid dari Marga Marsaoli, Abdul Habib Djoko dari marga Djiko, Samaka Ali dari Marga Payahe, dan Saleh Badrudin dari Marga Tabala. Dengan jabatannya masing-masing yaitu; Ahmad Yusup Madjid sebagai *jogugu* (perdana menteri), Abdul Habib Djoko sebagai *Hukum Soa-Sio* (menteri dalam negeri), Samaka Ali sebagai *Hukum Sangaji* (menteri luar negeri), dan Saleh Badrudin sebagai *Tullamo* (sekertaris kerajaan).[484] Para pemangku adat ini melaksanakan fatwa *kolano* (sultan) menata adat se atorang atau dengan menjalangkan roda pemerintahan hingga pelantikan sultan baru.

Pada 1969 *Jo gugu* (perdana menteri) Ahmad Yusup Madjid wafat dan belum selesai menunaikan tugasnya untuk melantik sultan baru sebagaimana perintah (*idin kolano*), Sultan Muhammad Djabir Sjah. Dalam struktur Kesultanan Ternate *jogugu* merupakan orang kedua setelah sultan, dan keduanya sama-sama terikat akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam keutuhan yang tak terpisahkan. Keduanya diibaratkan seperti pedang dengan sarungnya sebagaimana tertuang dalam falsafah Ternate *rubu-rubu fo ma moi-moi doka saya rako moi* (berbondong-bondong kita semua seperti rangkaian kembang).[485]Sementara semua harapan *bala kusu se kano-kano* (masyarakat) menginginkan sudah ada putra mahakota (*kaicil*) yang disiapakan oleh *bobato madopolo* (dewan menteri) sebagai penganti sultan Iskandar Djabir Sjah yang sementara diasingkan ke Jakarta.

Walaupun kesultanan Ternate tidak mengenal putra mahakota, bahkan sesuai tradisi Kesultanan Ternate, seorang calon sultan tidak selamanya diangkat putra dari sultan yang memerintah. Antonio Galvao menyatakan bahwa Kesultanan Ternate tidak mengenal putera mahkota, yang berhak menggantikan raja adalah anak laki-laki yang berasal dari empat marga/soa (*sabua raha*) yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah Dewan Kerajaan. Lebih lanjut Valentijin mengatakan bahwa ada suatu tradisi di Ternate, yang dinobatkan menjadi raja bukanlah anak raja, tetapi saudara

[484]Abdul Hamid Hasan, *op,cit.,*. hlm. 76.

[485]Mudaffar Sjah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. (Ternate : Goheba, 2009), hlm. 9-10.

laki-laki raja atau anak dari saudara laki-laki atau anak lelaki saudara perempuan dari raja yang mangkat.[486] Namun demikian, seluruh dewan menteri dan masyarakat menginginkan *kaicil* Mudafar Sjah yang kelak akan menjadi sultan, karena wibawa dan kharismannya yang dapat diterima oleh semua kalangan.

Sementara itu aktivitas Mudafar Sjah disibuki menjalankan usaha bisnisnya mengelola hasil bumi dengan berkerjasama dengan beberapa PT, disamping itu ia juga disibuki sebagai mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Khairun Ternate. Di saat yang sama ia juga ditunjuk sebagai ketua Badan parawisata Daerah (Baparda) untuk mempromosikan parawisata daerah Maluku Utara.[487]

Pada 1975 Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjahmeninggal di Jakarta.*Bobato Nyagimo se-Tufkange* atau dewan delapan belas(lembaga legislatif) tersebut memutuskan untuk melantik Mudafar Sjah sebagai Sultan Ternate ke 48, pada 29 Nopember 1976 dalam upacara penobatan sultan yang dinamakan *Jou Khalifah, Jou Kolano* Upacara penobatan sultan atau *Jou Khalifah, Jou Kolano* merupakan upacara kenegaraan yang terpenting dan terbesar. Dengan disaksikan oleh segenap para anggota keluarga istana, Perdana Menteri (*Jojugu*), para Menteri serta seluruh peserta 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para tetua, para kepala Soa, para ulama, kadhi, imam, dan khatib. Putra mahakota duduk di tahta.Kemudian kepala Soa, Kimalaha Marsaoli sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan didampingi oleh kepala pemangku adat istana dan kepala pemangku istana melangkah kedepan untuk memberikan penghormatan sembah.Lalu dua orang petugas khusus yang disebut *Sawohi* dan *Sadaha* membawa mahakota (stampa) menghampiri tahta dan mengenakannya ke kepala putra mahakota.Sejak detik itulah putra mahakota telah menjadi Sultan (*Jou Khalifah, Jou Kolano*). Diiringi do'a oleh mufti serta lima imam istana (Imam Jiko, Imam Jawa, Imam Sangaji, Imam Moti, Imam Bangsa) pada saat itulah para tamu turun dari empat duduk mereka untuk menghaturkan sumpah pegukuhan pada Sultan yang baru. Kemudian Perdana Menteri (*jojugu*) tampil ke depan, berhenti beberapa langkah di hadapan Sultan, menghaturkan sembah dan meyampaikan laporan (Suba) khusus dalam upacara penobatan Sultan. Laporan mempergunakan berbahasa Ternate, sebagai berikut:

'*Saililla suba Jou Kolano lamo-lamo toma kaus Kolano, toma hadrat nan calamoi maadu-adu.Saililla suba Jou Kolano lamo-laamo no khalifat magori-gori No Khalifat-ur-Rasyid, no tubaddilur-Rasul. No gugu tabdir parenta amar se nahi toma alam daerah Moloku istana baldan Ternate, no tego toma singgasana Kolano, ni jo joko no sijoko toma thinil molok, ni momina seni gogise mangganggungagu intan se yakut malili parmata jambrut, mabobela ratna mut jaohar manikam, ma cahaya isi woro toma alam daerah Moloku istana baldan Ternate, limau duko se gapi, gapi se seki, matubu la idadi ka cahaya akal ikhsan kolano. Saililla suba jou kolano lamo-lamo no khalifat magori-gori. Kum-kum ua moju ni sosyusyu kani ra'sul wajir fangare jojugu he abdul-habib Djiko to tede re suba paksaan mangale tosi waje-waje ni molok kier aha Ternate se Tidore, Baca se Jailolo, sema mie gudu-*

[486]F.S.A. de Clercq, *op.,cit,* hlm. 78.

[487] Abdul Hamid Hasan, *op,cit,* hlm. 76.

gudu Tobuku se Banggai, sama sare gudu-gudu Sula se Taliabo seni ronga seni bobato dunya se akhirat, soa sio se Sangaji, Heku se cim, seni bangsa bara bangsa seni ngofa-ngofa Kolano, seni ngofangare pehak ber pehak se agama rasulullah majojaga Jo kalem, se jo Imam se jo khatib bobula raha, seni bala, seni rakyat, seni sahabat ya mukaram hoframintu walandawi, ma sitiadat sema kabasarangma adat sema troran, ma galib sema lukudi, mangale se macara, mangaro sema biasa, ngofangare ngom mi ma moi-moi mihadir saddia tatap lengkap mi tede semi saha, zaman mula akhirin itola ua moju toma safutu se wange isi dutu hari qiamat saililla suba jou kolano lamo-lamo no khalifat ma gori-gori. Kum-kum ua moju ni sosyusyu ngofagare Jojugu he abdulhabib djiko tolede rusuba paksan.[488]

Secara garis besar laporan itu berisi: (1). Wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate yang meliputi daerah-daerah jajahan serta kepemimpinan Kesultanan Ternate daalam Konfederasi tempat Kesultanan Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo. (2). Agama Islam sebagai agama Kesultanan dan Adat Ternate. (3). Adat nenek moyang yang dihormati oleh rakyat Ternate. (4). Kesetiaan rakyat Ternate terhadap Sultan. (5). Pangkat-pangkat, jabatan-jabatan para pembantu Sultan, dan (6). Para sahabat Kesultanan Ternate.[489]

Setiap zaman pasti memeliki pemimpin dengan karakteristik yang berbeda.Adegium tersebut tepat bila disandingkan peran politik yang berbeda antara Iskandar Muhammad Djabir Sjah (Sultan ke-47) dan Mudafar Sjah (Sultan ke-48). Jika kiprah politik Iskandar Muhammad Djabir Sjah pada awal kemerdekaan adalah mengambil sikap politik yang berseberangan dengan sebagian besar kaum nasionalis Indonesi, dengan melibatkan diri sebagai anggota senat NIT mewakili Maluku Utara, pada konperensi Malino dan Denpasar pada tahun 1946 yang di yang diprakarsai oleh Herbertus J. van Mook, dalam rangka pembentukan Negara Indonesia Timur. Sehingga dalam perkembangannya ia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) pada 27 Desember 1949 dalam kabinet J.E. Tatengkeng. Implikasi dari kebijakan tersebut, ketika bubarnya Negara Indonesia Serikat (RIS) 17 Agustus 1950.Sebagai tokoh federalis Iskandar Muhammad Djabir Sjaholeh Soekarno memindahkan atau mengasingkannya ke Jakarta dan ditempatkan sebagai salah satu pegawai departemen dalam negeri hingga wafat 1975.

Belajar dari kegagalan politik Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjahpada zaman Orde Lama yang berseberangan dengan kepentingan politik pemerintah pusat. Memasuki era Orde Baru, peta politik nasional mengalami perubahan yang mendasar. Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto berusaha berkerja sama kekuasaan-kekuasaan tradisional di Indonesia. Pada periode itu, sejak dilantik Sultan Ternate ke 47, pada 29 Nopember 1976, Kesultanan Ternate dibawah kepemimpinan Sultan Mudafar Sjah mengambil keputusan politik untuk mendukung partai pemerintah Soeharto (Golkar). Dukungan Kesultanan Ternate pada politik Golkar, dipahami sebagai strategi akomodatif dan menjaga agar tetap bertahan di tengah

[488]Lihat B. Soelarto, *Sekitar Tradisi Ternate.*(Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan RI, 1982), hlm. 122.

[489]*Ibid*., hlm.174.

pusaran kekuasaan yang oteriter dan sentralistik pemerintahan Orde Baru dengan tiga kekuatan utama yaitu: militer, birokrasi dan golkar. (mengenai dukungan kesultanan Ternate pada Golkar akan dijelaskan pada sub bab berikutnya).

C. Pelantikan Sultan Ternate ke 48 dan Penataan Birokrasi Kesultanan

Sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, setelah bubarnya Negara Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950.Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah di asingkan ke Jakarta oleh Pemerintahan Soekarno, karena dituduh sebagai tokoh federalis dan pendukung Republik Maluku Selatan (RMS). Selama di Jakarta, ia ditempatkan sebagai staf departemen dalam negeri hingga wafat pada bulan Juni 1975. Selama pengasingannya, Kesultanan Ternate mengalami kekosongan pemerintahan.Seluruh kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan di Kesultanan Ternate di jalankan oleh lembaga *bobato madopo* (dewan menteri) yang ditunjuk oleh Sultan Iskandar Djabir Syah. Kekosongan itu berdampak pada merosotnya kekuasaan elite kesultanan akibat hilangnya kontrol politik dan birokrasi di wilayahnya.Kapasitas mereka hanya sebatas pelengkap strukutur pemerintahan dan hanya mengurusi kepentingan-kepentingan rumah tangga istana.Hal ini disebabkan oleh otoritas kepemimpinan dalam Kesultanan Ternate berada ditangan sultan.

Setelah meningalnya Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah pada Juni 1975.Sesuai tradisi kesultanan setiap sultan yang mangkat, maka kandidat sultan diajukan oleh *Bobato Nyagimo se-Tufkange* atau dewan delapan belas[490] (lembaga legislatif) ke *Gam Raha*[491] (dewan tertinggi/MPR).Kedua lembaga tersebut memutuskan untuk melantik Mudafar Sjah sebagai Sultan Ternate ke 48, pada 29 Nopember 1986 dalam upacara penobatan sultan yang dinamakan *Jou Khalifah, Jou Kolano*.[492]Sejak dilantik sebagai sultan Ternate ke 48, Sultan Mudafar Sjah melakuan penataan dan pengisian pengurus baru lembaga kesultanan yang terdiri atas pemerintahan pusat (*bobato madopolo*) dan pemerintahan wilayah (*Sangaji* dan *Salahan*) menurut adat istiadat kesultanan.

Dalam struktur Kesultanan Ternate, sultan adalah kepala pemerintahan yang tertinggi.Dalam menjalangkan pemerintahannya sultan dibantu dewan menteri atau disebut *bobato madopolo.* Mereka ini adalah pejabat-pejabat inti struktur politik di pemerintahan pusat, yang terdiri atas; *Jogugu* (Perdana Menteri),*Kapita Lau*

---

[490] Sebagai lembaga legislatif, fungsi lembaga ini, yaitu;(1), menentukan arah pembangunan.(2). Bersama sama dengan *Gam Raha,* mengangkat dan memberhentikan sultan. (3). Mengawasi sistem pemerintahan yang dijalankan *kolano* (sultan). Lebih jelasnya lihat Mudaffar Sjah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. (Ternate : Goheba, 2009).

[491] Fungi dan kewenangan *Gam Raha* sebagai dewan tertinggi terdiri atas; *pertama,* memilih dan mengangkat *kolano* (sultan).*Kedua,* Setiap calon sultan yang diajukan oleh *bobato nyagimoi setofkange* (dewan 18) harus mendapat legitimasi dari *Gam Raha,* dan apabila calon tersebut ditolak maka calon sultan harus diganti. *Ketiga,* menyatakan perang dan damai.

[492] Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir,* (Ternate: Depdikbud, 1982), hlm. 75.

(Menteri Pertahanan dan Keamanan),*Hukum Soa-sio*, (Menteri Dalam Negeri), *Hukum Sangaji*, (Menteri Luar Negeri), *Tulilamo* atau (Menteri Sekretaris Negara).Oleh karena itu, langkah pertama yang ia lakukan adalah melantik *Kaicil* Afendi sebagai *Jogugu* dan *Kaicil* Hamid sebagai *Kapita Lau*.[493]

Gambar 11
Sultan Ternate Ke 48 Mudafar Sjah (1976-2016)

Sumber: http://www Kesultanan-Ternate

Dalam bidang pemerintahan *Jogugu* dan *Kapita Lau* memegang peranan yang strategis.Posisi *Jogugu* adalah orang pertama dibawah raja. Hubungan *Jogugu* dengan sultan diumpamakan sebagai keris dan sarungnya. Ini berarti bahwa segala tindakannya sultan dan *Jogugu* harus selalu seia-sekata. Selain *Jogugu*, adalah *Kapita Lau* termasuk orang dekat dengan raja. Jika datang menghadap, tempat duduknya tidak jauh dari raja.Karena sebagai pelindung raja, maka jika menghadap raja kedudukanya duduk sejajar.Jabatan-jabatan itu memeliki peran penting, oleh karena itu Sultan Mudafar Sjah mencari figur yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut.

Selain melantik jabatan-jabatan utama pada pusat pemerintahan adalah melantik pejabat-pejabat daerah, yang terdiri atas; *Sangaji* (Bupati)[494], *Kapita*,

[493] Kebijakan Sultan Mudafar Sjah mengangkat suadara kadungnya, *Kaicil* Afendi sebagai *jogugu* (perdana menteri) dan *Kaicil* Hamid sebagai *Kapita Lau* (menteri pertahanan), mendapat penolakan dari *Bobato Nyagimo se-Tufkange*, karena dianggapbertentangan dengan *adat se atoran* (hukum adat kesultanan), dimana kedua jabatan tersebut tidak boleh diisi oleh keluarga dekat sultan. Walaupun sultan memeliki otoritas penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri.Namun dalam hal tersebut, harus berkonsultasi dengan lembaga tersebut, sesuai dengan tradisi pengangkatan pejabat dalam Kesultanan Ternate.Kebijakan ini tentu bertentangan dengan adat yang berlaku dalam Kesultanan Ternate yaitu mengabaikan musyawarah dan mufakat, sekaligus merubah sistem pemerintahan dari monarkhi konstitusional menjadi monarkhi absolut.Wawancara dengan bangsawan Kesultanan Ternate, pada Nopember 2013.

[494]Dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate terdapat 33 orang *Sangaji*. Mereka tersebar pada beberapa Pulau di daerah Maluku Utara, yaitu 12 sangaji yang ditempatkan diwilayah Makean.

(kepala keamanan), *Fanyira* (kepala kampung), *Kimalaha* (kepala adat) dan *Salahakan* (utusan sultan) di wilayah Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Pulau Ternate. Bahkan beberapa *Sangaji* yang tersebar di wilayah Maluku Utara yang pernah menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Ternate, seperti *Sangaji* Kao, Tobelo, Galela, dan Makian dihidupkan kembali dengan di beri gelar kehormatan.[495]

Dalam upaya pemanfaatan istana sebagai pusat pelestarian kebudayaan Ternate. Pada tahun 1977, pemerintah pusat mengukuhkan status istana Ternate sebagai peningalan budayaNo: KC-IV/III-3/606/77, melalui menteri pendidikan dan kebudayaan RI Daoed Joesoef, yang harus dipelihara sebagai asset budaya dan parawisata (meseum memorial)[496].

Sejak saat itu, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh istana dalam rangka mensosialisasikan atau memperluas pengetahuan kepada masyarakat.*Pertama,* menjadikan istana sebagai pusat pengetahuan tentang sejarah, kesenian, pendidikan dan sebagainya.Sehingga masyarakat bebas mengunjungi *kadaton* yang sebelumnya tidak terbuka untuk umum.*Kedua,* dalam upaya melestarikan budaya Ternate, maka dilakukan kerjasama dengan Dinas Parawisata dan Diknas Pendidikan.Beberapa kegiatan yang ditempuh yaitu; (1).Membentuk beberapa desa adat seperti; Desa Dufa-dufa, Sangaji dan Tubo. (3), menyelengarakan tarian, lomba bahasa daerah, drama, sastra daerah dan sebagainnya melalui perayaan dan upacara-upacara di istana. (2), membina budaya dan bahasa daerah pada pelajaran muatan lokal (Mulok). *Ketiga,* berkerjasama dengan penguruan tinggi dalam upaya pengembangan kebudayaan.Dalam hal ini menjadikan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Kharun Ternate dan STAIN Ternate sebagai mitra kebudayaan.[497]Langkah ini diharapkan terjalin hubungan istana dengan dunia akademik.

Dengan menjadikan istana sebagai pusat budaya, sejak saat itu istana meletakan basis kekuasaanya pada hegomoni dalam bidang kesenian, teologi keagamaan dan kebudayaan.Kesenian, ritual keagamaan dan pertunjukan-

---

12 *Sangaji* di tempatkan pada Pulau Sanana dan dan 9 *Sangaji* ditempatkan di Halmahera Utara dan Barat.Dalam pemerintahan Kesultanan Ternate S*angaji* mempunyai fungsi ganda.Sebagai penguasa yang disahkan oleh sultan, mereka berkewajiban mengawasi kepentingan-kepentingan *kadaton* di wilayahnya yang berupa upeti dan pengerahan tenaga.Karenanya mereka mendapatkan posisi dipusat kerajaan (*bobato Madopolo*), mereka juga dilibatkan dalam menyusun hukum-hukum adat dan berbagai kebijaksanaan kerajaan. Para *Sangaji* ini mempunyai suatu tanda pengenal status yang khas yaitu dianugrahi pakaian kebesaran yaitu sebuah jubah panjang berwarna hitam dengan sorban berwarna hitam yang dinamakan "*dastar ngongare"*. Lebih jelasnya baca R.Z. Leirissa, *Halmahera Timur dan Raja Jailolo Pergol*akan di *Laut Seram Abad Ke-19.* (Jakarta: Balai Pustaka. 1996), hlm. 65.

[495] "Pelantikan Pejabat Struktural Kesultanan Ternate", Tabloid *Parada.*Ternate, edisi 6, 03-16 Pebruari 1999.

[496]Penetapan Istana Ternate oleh negara dengan surat penyerahan ahli waris Mudafar Sjah (Sultan Ternate) tanggal 28 Maret 1977, No: KC-IV/III-3/606/77 kepada menteri pendidikan dan kebudayaan RI Daoed Joesoef. Lihat Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir*, Ternate: Depdikbud, 1982.

[497]Muchdar Abdullah, " Kesultanan Ternate Dalam Ranah Politik" Tesis S2 Ilmu Politik, UGM,2006.hlm. 129.

pertunjukan kebudayaan, tidak berdiri sendiri melaingkan merupakan media untuk menunjukan kekuasaan.Tidak aneh kemudian istana merancang upacara-upacara mulai dari upacara kelahiran, perkawinanan, hari ulang tahun dan kematian seringkali digunakan untuk menunjukan kemegahan agar mempunyai bobot politik di hadapan masyarakat umum.Langkah ini menjadikan istana sebagai pusat pengemban, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Ternate.

Tabel 11
Objek Pemugaran Istana Ternate

No	Objek Pemugaran	Lokasi
1	Istana Kesultanan Ternate	Ternate
2	Masjid Kesultanan Ternate	Ternate
3	Pelabuhan Kesultanan Ternate (dodoku Ali	Ternate
4	Taman Istana dan tempat Istirahat Sultan	Ternate
5	Taman Ake Santosa	Ternate
6	Kadato Ici	Ternate
7	Rumah Adat Sahu	Halmahera Barat

Sumber :Muchdar Abdullah, "Kesultanan Ternate Dalam Ranah Politik". Tesis S2 Ilmu Politik, UGM, 2006.

Selain itu, dalam upaya pemanfaatan *kadaton* secara ekonomi, para elite kesultanan membangun relasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Utara maupun pemerintah pusat. Dengan demikian, istana mendapatkan bantuan rutin dari dinas parawisata daerah dan Kementerian Parawisata. Bantuan tersebut dipergunakan untuk pengelolaan, perawatan, dan pembiayaan rumah tangga istana serta penyelengarkan acara *legu gam* (ulang tahun sultan) setiap tahun pada bulan April. Pada tahun 1992, Kesultanan Ternate mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melakukan renovasi dan pemugaran beberapa bagian *kadaton* Ternate. (lihat table 10).

Dalam menghadapi tekanan ekonomi, para elite memperoleh pendapatan atas penguasaan tanah-tanah dalam bentuk *ngase* (pajak).[498]Selain pendapatan tersebut,

[498] Dalam kepemilikan tanah, di Kesultanan Ternate mengenal tiga tingkatan tanah yaitu; tanah sultan (*ahakolano*), tanah marga (*aha soa*) dan tanah masyarakat (*kaha cacu*). Masing-masing memeliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda.Untuk *ahakolano* (tanah sultan) hanya diperuntukan untuk sultan.Disamping kepemilikan tanah yang bersifat tetap, dikenal pula hak atas tanah sultan yang bersifat sementara, yaitu; *hak tolagumi, hak safa, hak ruba bangga* dan *hak jurami*.Tanah tersebut merupakan hak sultan yang diberikan kepada salah satu soa atau marga berupa sebidang tanah untuk kepentingan marga itu sendiri atau disebut *kaha soa*.Tanah-tanah tersebut dilarang tidak boleh pindah kemarga lainnya atau pribadi lainnya.Sementara *kaha cacu* adalah tanah yang diberikan oleh sultan untuk dikelola secara individu dengan sistem bagi hasil dalam bentuk

juga terdapat pendapatan Kesultanan Ternate yang lainnya umum berasal dari pajak (*ngase*) dari daerah taklukannya. Dari berbagai sumber yang diwawancarai bahwa daerah-daerah kekuasaan terutama di Ternate bagian Utara dan Halmahahera Barat, pada setiap tahun menjelang bulan ramadhan dikenakan upeti (*ngase)* berupa hasil bumi seperti; minyak kelapa, sagu, kayu bakar, keranjang anyaman, dan hasil hutan seperti; *ngase* kebon, *ngase* kayu, dan *ngase* ikan.[499]Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penghasilan kesultanan berupa pajak (*ngase*) hingga kini masih berasal dari daerah-daerah kekuasaanya yang bersumber dari hasi hutan dan laut.

Selain mengandalkan pajak (*ngase)* dan tanah-tanah yang masih dimiliki oleh istana.Elite kesultanan melakukan perubahan orentasi pekerjaan.Jika pada periode pemerintahan Soekarno mereka tidak terserap dalam birokrasi pemerintahan.Pada perode pemerintahan Soeharto, disamping ada yang tetap memilih masuk kesektor birokrasi negara, menjadi birokrat.Beberapa diantaranya mulai masuk ke sektor non birokrasi atau terjun kedalam dunia bisnis, pengusaha dan lain-lain. Selain itu untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah, strategi yang diambil oleh *kadaton* Ternate dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi istana juga mempromosikan pengelaran hari ulang tahun sultan (*Legu Gam*). Beberapa bangunan *kadaton* seperti, lapangan Salero, *Ngara Lama* dan pandopo *kadaton* di manfaatkan untuk kepentingan rapat, seminar, dan pergelaran kesenian.

Begitu pula dalam pendidikan, para elite mengunakan strategi pendidikan sebagai cara untuk bertahan. Putra-putri mereka disekolahkan ke sekolah-sekolah di luar Maluku Utara seperti di Makasar, Surabaya dan Jakarta. Mereka juga tidak segan-segan menyekolahkan anak mereka ke luar negeri. Strategi ini dilakukan untuk tidak mengisolasi diri dari dunia modern, serta memberikan akses bagi keturunannya untuk mendapatkan pendidikan formal. Dengan bermain dengan kriteria "modern" adalah upaya sangat jitu untuk tetap bertahan.

Pada masa Orde Baru secara politik dan kultural Kesultanan Ternate dihidupkan kembali di bawah dukungan Golkar. Sejak di lantik sebagai Sultan Ternate ke 48, pada 29 Nopember 1976, Mudafar Sjah.Sultan Ternate tampil dalam hajatan politik selama pemilihan umum lima tahunan sebagai fungsionaris partai Golkar. Keterlibatan keluarga Sultan Mudafar Sjah juga diikuti oleh para bangsawan seperti Ismunandar, Hidayat Mudafar Sjah dan Talabudin Yusuf, kemudian banyak terlibat dalam kepengurusan Golkar Kabupaten Maluku Utara.[500]

Dengan adanya dukungan dari Golkar, maka strategi ini digunakan untuk lebih efektif untuk memaksimalkan kepentingan istana, baik secara ekonomi, politik maupun budaya.Dalam hal ini melalui partai ini pula dapat mengantarkan mereka untuk menata karir politiknya menjadi birokrat, politisi, wartawan dan pengusaha.

---

ngase (pajak).Sampai sekarang sultan memeliki monopoli sejumlah tanah diwilayah kekuasaanya.Tanah-tanah tersebut tersebar dibeberapa daerah di Pulau Ternate Utara dan Halmahera Barat. Baca Mudaffar Sjah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. (Ternate : Goheba, 2009),

[499] Adnan Amal dan Irza Arnita Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah* 1800-1950 Jilid 2. (Ternate, Unkhair, 2003).

[500] Wawancara pada Mei 2013.

Selain itu dengan memanfaatkan jaringan Golkar dan kapasitas mereka sebagai bangsawan, mereka dengan mudah menjadi pimpinan organisasi sosial keagamaan dan menjadi akademisi pada beberapa perguruan tinggi di Maluku Utara.

Posisi politik yang begitu besar, mendorong Sultan Mudafar Syah membangun pengaruh melalui arena kebudayaan lainnya; misalnya pada tahun 1996 membentuk pasukan keamanan kerajaan yang dinamakan Generasi Muda Sultan Babullah (GEMUSBA).[501] Pasukan keamanan tersebut kemudian disebut sebagai "Pasukan Kuning".Selain dimaksudkan sebagai pejaga keamanan, Pasukan Kuning diharapkan mampu menarik simpati rakyat Ternate.Disamping itu Kesultanan Ternate juga membentuk beberapa media lokal seperti; Tabloid Parada yang diketuai Hidayatullah Mudafar (putera Sultan Ternate).

Pembentukan beberapa media ini selain berfungsi sebagai sarana informasi dan pendidikan, adalah sebagai corong penyampain aspirasi politik yang berhubungan dengan beberapa agenda politik yang dihadapi pihak Kesultanan Ternate seperti pemilihan Wali Kota Ternate 1997 dan pemilihan Gubernur Maluku Utara 2001. Media ini juga pakai untuk meyuarakan kepentingan politik pada beberapa pemilihan bupati di Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Kepulauan Sula[502], dimana daerah-daerah tersebut masih memeliki hubungan secara kultural maupun historis dengan Kesultanan Ternate.

Pada masa pemerintahan Mudafar Sjah kedudukan istana sebagai pusat politik sangat menonjol. Kekuasaan sultan tidak datang dengan sendirinya, melaingkan dicapai dengan cara melakukan revitalisasi lembaga-lembaga adat, dan memanfaatkan secara kreatif warisan yang diperoleh dari pendahulunya. Salah satu kebijakan politiknya adalah menghibahkan tanah-tanah *kadaton* kepada pemerintah daerah untuk pembangunan sarana-sarana publik seperti; Universitas Khairun Ternate, Bandar Udara Sultan Babullah, dan sebagainya.

Ada sejumlah alasan mengapa tanah tersebut dihibahkan untuk kepentingan umum. *Pertama,* diharapkan istana mempunyai akses dalam pembuatan-pembuatan kebijakan-kebijakan birokrasi pemerintahan, istana tidak dirugikan. *Kedua*, istana membangun relasi patron-klien yang baru. Dalam kultur yang masih patrimonialistik seperti Ternate seorang sultan yang mengadakan upacara di istana, maka bupati memberikan bantuan sebagaimana pada era Bupati Mansur dan Abdullah Assagaf.[503] Hal ini menyiratkan kedudukan sebagai patron merupakaan jaminan untuk mendapatkan loyalitas dan keuntungan ekonomi dari kliennya.Hal ini dapat dilihat pemerintah daerah kemudian memberi bantuan untuk renovasi beberapa bangunan istana.

Walaupun dimensi politik sangat menonjol, namun sultan sangat berperan dalam menjaga fungsi istana sebagai pusat budaya.Semua itu dapat dilakukannya, karena sultan dipandang sebagai pusat anutan yang menguasai dunia aktual maupun simbolik. Hal tersebut dapat dilihat pada penyelengaraan upacara-upacara yang

---

[501]*Tabloid*, *Parada.* (Ternate, 12 Agustus 2001 .

[502]Lebih jelasnya lihat *Tabloid*, *Parada.* 26 Juli 2002.

[503] Lihat Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Pustaka Utama, 2000.

diselengarakan oleh *kadaton* Ternate makin diperhebat, sehingga fungsi upacara dan itu berubah menjadi lambang untuk menujukan kebesaran dan kewibawaannya.

D. Dukungan Terhadap Golkar Dalam Pemilu Orde Baru

Memasuki era Orde Baru, peta politik nasional mengalami perubahan yang mendasar.Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto berusaha berkerja sama dengan kekuasaan-kekuasaan tradisional di Indonesia.Dalam konteks perubahan konstelasi politik itulah, Kesultanan Ternate mengambil pilihan politik untuk mendukung Golkar. Sejak di lantik sebagai Sultan Ternate ke-48, pada 29 Nopember 1976, Mudafar Sjah mengambil keputusan politik untuk mendukung partai Pemerintah Soeharto (Golkar). Dukungan Kesultanan Ternate pada Golkar, dipahami sebagai strategi akomodatif dan menjaga agar tetap bertahan di tengah pusaran kekuasaan yang oteriter dan sentralistik pemerintahan Orde Baru.

Bahkan sebelum dilantik menjadi Sultan Ternate ke-48 pada 1976, Mudafar Sjah telah menjadi fungsionaris Partai Golkar pada awal pemerintahan Soeharto, sehingga mengantarkannya sebagai anggota DPRD tingkat II pada pemilu pertama 1971.[504]Dengan adanya dukungan tersebut, menjadi penting untuk memberikan legitimasi politik kepada pemerintah dalam menjalangkan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Dalam hal ini melalui pemilu rakyat diberi kebebasan dan kesempatan untuk memilih kebijakan-kebijakan yang ditawarkan partai politik sesuai dengan preferensi politiknya, termasuk memilih orang-orang yang dianggap layak menjalangkan kebijakan tersebut. [505]

Strategi survavilitas yang digunakan elite Kesultanan Ternate dengan mendukung Golkar memungkimkan terbangunnya hubungan yang mutualistik.Keberadaan beberapa anggota bangsawan yang menduduki struktur di dalam istana dan memeliki pengaruh di masyarakat didayagunakan untuk mendukung program-program partai politiknya, termasuk membangun akses untuk menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

Sejak bergabungnya Kesultanan Ternate kedalam Partai Golkar, pada awal pemerintahan Soeharto.Sejak itulah Golkar selalu mendominasi perolehan suara Pemilu-pemilu di era Orde Baru. Jika pada Pemilu sebelumnya (1955), bersandarkan pada dominasi partai-partai keagamaan seperti Partai Masyumi (45 persen) dan Parkindo (22 persen).[506] Sejak Pemilu 1971 harus bergeser ke arah mayoritas

---

[504] "Kesultanan Ternate di Masa Lalu: Catatan Politik", dalam *Tabloid Parada.*Ternate, edisi 3 tanggal 20-Desember-4 Januari 1999.

[505]Tujuan pelaksanaan pemilu di zaman Orde Baru adalah (1).Menciptakan kemantapan dan stabilitas Orde Baru, (2).Perombakan struktur politik dengan pengakuan bagi Golongan Karya, (3). Menciptakan mekanisme dan infrastruktur politik yang dapat berkerja sama dengan pemerintah dalam melansir usaha-usaha pembangunan, dan (4). Membangkitkan demokrasi rakyat banyak. Lihat Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 112.

[506]Sutrisno Kutoyo, et al, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daaerah Propinsi Tingkat I Maluku*.(Ambon: Tanpa Penerbit, 1993), hlm. 42-44.

tunggal Golkar. Dengan dukungan jaringan birokrasi dan militer, Golkar meraih suara terbanyak dalam Pemilu 1971 dengan memperoleh 243.492 suara (63 persen) jauh melampaui suara partai-partai lainya seperti Parkindo 98.379 suara (13 persen), PARMUSI (difusi dari Masyumi) 75.893 suara (10 persen) dan PNI yang hanya berhasil mendapatkan 21.614 suara (7persen).[507]Sebagimana digambarkan pada tabel 9.

Dukungan Kesultan Ternate ke Golongan Karya pada periode 1971-1997 menjelma menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Kemengangan Golkar di Maluku Utara pada Pemilu-pemilu di era pemerintahan Soeharto, mendapat didukung penuh oleh pihak Kesultanan Ternate yang basis massanya hampir tersebar sebagian besar penduduk di Kabupaten Maluku Utara. Dengan semboyang *Jou kasa ngom kage* (dimana ada sultan di situlah kami), sultan memanfaatkan daerah-daerah di wilayah kekuasaannya seperti; Pulau Ternate, Pulau Hiri dan Halmahera Barat dan Utara. Memanfaatkan para *sangaji* (wakil sultan), dan *Fanyira* (kepala desa) di daerah-daerah kekuasaanya, mereka melakukan sosialisasi politik melalui jalur informal atau jalur bawah seperti pertemuan-pertemuan informal antara tokoh tokoh adat dan kaum muda (kader) di desa-desa[508].

Tabel 12
Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Utara Tahun 1971

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Pemilih
1	P. Khatolik	16.367			
2	PSII	15.415			
3	NU	33.653			
4	PARMUSI	75.893	510.645	24.987	535.632
5	GOLKAR	243.492			
6	PARKINDO	98.379			
7	MURBA	2.004			
8	PNI	21.614			
9	PERTI	2.321			
10	IPKI	1.507			

Sumber : Direktorat Sosial Politik Kantor Gubernur KDH Tingkat I Maluku 1971

Kuatnya dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar, setidaknya, hal ini terlihat jelas dari data hasil Pemilu di era Orde Baru yang menunjukan kecenderungan bahwa kenaikan suara Golkar didaerah-daerah yang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Dalam perkembangannya Golkar terus meningkatkan prosentase perolehan suaranya, pada Pemilu 1971 dari 63 persen

[507]Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku. (Ambon:Siwa Lima,1994), hlm. 89-90.

[508] Hasil wawancara Mei 2013.

menjadi 78 persen pada pemilu 1977. Begitu pula dengan Pemilu-pemilu berikutnya meningkat tajam, mulai dari Pemilu 1982 (81 persen), Pemilu 1987 (89 persen), Pemilu 1992 (90 persen) sampai dengan Pemilu 1997 (95 persen). Kemenangan besar (mutlak) Golkar di Ternate pada pemilu 1997, menjadi tajuk utama menghiasi berbagai surat kabar lokal di Ternate dalam berita utamanya "Kemenangan Golkar adalah kemenangan Kesultanan Ternate". Dengan demikian Partai Golkar tampil sebagai partai tunggal atau *single mayority* dalam pemilihan umum di Maluku Utara.Hal ini tergambarkan pada tabel berikut.

Tabel 13
Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu tahun 1977-1997
Kabupaten Maluku Utara

No	Tahun	Perolehan Suara Partai Politik			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Pemilih
		PPP	Golkar	PDI			
1	1977	166.090	436.983	56.039	609.112	33.931	643.043
2	1982	136.766	533.040	41.202	711.067	38.772	749.839
3	1987	109.366	670.850	43.658	822.974	47.070	870.914
4	1992	87.582	759.839	39.628	910.980	41.980	989.982
5	1997	66.751.	897. 170	28. 832	103.661.	42.872.	114.521.

Sumber : Direktorat Sosial Politik Kantor Gubernur KDH Tingkat I Maluku 1997

Kemenangkan Partai Golkar di Ternate selain didukung penuh pihak Kesultanan Ternate adalah dukungan dari birokrasi.Beberapa organisasi birokrasi merupakan perpanjangan tangannya seperti SOKSI, MKGR, Kosgoro, Gakari, MDI, GUPI, FKPPI dan AMPI.Selain itu, kuatnya posisi Golkar karena didukung oleh kebijakan pemerintah tentang kepartaian khususnya Undang-Undang No. 3/1985 yang menetapkan kepenguruan organisasi politik hanya sampai di tingkat II.[509]Khusus mengenai hubungan Golongan Karya dan militer memang tidak bisa dipisahkan.Di satu pihak, bukan saja karena struktur organisasi Golkar yang dibuat sejajar dengan organisasi militer. Tetapi kemandirian Golkar akan membawa peroalan baru bagi militer, sebab Golkar berfungsi sebagai kepanjangan fungsi sosial dan politiknya.[510]

[509] Sri Yanuarti " Implikasi Kebijakan Politiik Massa Mengambang di Maluku Tengah" dalam Indria Samego, *Masyarakat, Politik dan Pembangunan Pedesaan*. (Jakarta: PPW-LIPI, 1996), hlm 25.

[510] Riswandha Imawan, "Prospek Peranan Golkar dalam Demokratisasi di Indonesia, dalam *Jurnal Prospektif,* Vol.5 No. 3 1993, hlm. 172.

Selain mendapatkan dukungan dari birokrasi dan militer, adalah menyatukan pegawai negeri beserta keluargannya untuk mendukung dan memilih Golkar. Melalui peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 (Permen 12) para pegawai negeri tidak mempunyai pilihan lain kecuali mendukung dan memilih Golkar. Permen 12 ini di perkuat dengan PP No 6 tahun 1970 yang melarang semua pegawai negeri (termasuk ABRI) terlibat dalam kegiatan partai politik.[511]Sebagai keluarga besar Golkar, birokrasi dan militer (saat itu ABRI) mempunyai tanggungjawab moral untuk memenangkan Golkar.Sebagai imbalannya elite birokrasi dan ABRI selama Orde Baru mendapat keuntungan dapat mengontrol struktur dan jalannya pemerintahan termasuk dalam pengambilan kebijakan politik dan ekonomi.[512]

Pilihan politik elite kesultanan untuk mendukung Golkar tentu menguntungkan posisi politik baik pada ranah lokal maupun nasional.Selain menduduki jabatan legisltatif, birokrat dan sebagainya.Sejak bergabung dengan Partai Golkar pada 1971, struktur kepengurusan partai Golkar dari DPD I, II dan PAC dan sayap organisasi Golkar seperti AMPI dan KNPI didominasi oleh elite Kesultanan.[513]Dengan menduduki kepenguran di partai Golkar, maka memungkimkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang bersingungan dengan istana. Salah satu konsesi yan diberikan oleh rezim Soeharto adalah keputusan pemerintah Pusat No: KC-IV/III-3/606/77 menetapkan istana Ternate dijadikan sebagai asset budaya dan parawisata (meseum memorial) yang

[511]Golongan Karya yang didukung oleh ABRI dan segolongan cendikiawan, berusaha untuk mendapat kepercayaan bagi usaha pembangunan Indonesia seperti yang dicanangkan oleh Orde Baru pada tahun 1966.Isu kampanye sangat berpengaruh kepada kemenangan Golangan Karya karena pada saat itu masyarakat sedang dilanda kelesuan dan ketidaksenangan dengan tingkah laku partai-partai politik di masa lalu.Hal ini semakin diperkuat dengan adanya sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi usaha kemengangan Golongan Karya.Berkaitan dengan usaha memenangkan Golongan Karya, peran ABRI tidak dapat dikesampingkan, karena ABRI merupakan salah satu kekuatan yang mendukung Golongan Karya. Sehingga secara nasional dalam pemilihan umum 1971 Golongan Karya mendapatkan 547 kursi yang merupakan gabungan Golongan Karya dan ABRI. Pada periode ini pemerintah mengeluarkan program Trilogi Pembagunan yaitu; (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menunjuk pada terciptannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (2), pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (3), stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. . Lihat Daniel Dhakidae, " Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik" dalam *Prisma*, No, 9, 1981, hlm. 34-45.

[512]Sebagai pejabat negara tugas pegawai negeri seharusnya melayani semua kekuatan politik yang ada bukan memihak pada partai Golkar. Dalam periode ini, para Camat di Pulau Ternate mempunyai posisi yang sangat strategis untuk mengelola hasil perolehan suara OPP. Oleh karena itu bisa dipahami jika setiap menjelang Pemilu biasanya, para camat tersebut mendapatkan fasilitas seperti mobil sebagai modal untuk menyuskseskan program kemenangan Golkar. Singkat kata birokrasi benar-benar dapat difungsikan sebagai mesin politik pemerintah.

[513]Menurut berbagai sumber yang diwancarai pengurus Gokar sejak periode 1971-1997 lebih didominasi elite kesultanan.Keterlibatan sejumlah elite Kesultanan Kesultanan Ternate pada partai Golkar dan beberapa jabatan publik tersebut, sebagai strategi mengkembalikan dan mengulangi sejarah keemasan masa lalu yang pernah menjadi kebanggaan dan diyakini mampu menjadi perekat dan kemakmuran bagi kelompoknya.

harus dipelihara.[514] Dengan demikian, istana menerima dana bantuan rutin dari pemerintah pusat untuk biaya operasional dana renovasi.

Dengan adanya dukungan dari Kesultanan Ternate, birokrasi dan militer, Golkar dengan mudah memenangkan pemilihan umum di masa Orde Baru. Kemenangan Golkar sejak periode 1971-1997 di Ternate telah mengantarkan Sultan Mudafar Sjah menjadi anggota DPRD II periode 1971-1982, anggota DPRD I 1982-1987, anggota MPR-RI 1987-1992.[515]Melalui partai ini pula dapat mengantarkan sejumlah pejabat kesultanan menjadi anggota legislatif DPRD II dan I, birokrat, akademisi, wartawan dan dunia bisnis, sesuatu yang tidak pernah dilakukan elite kesultanan di masa Pemerintahan Soekarno.Dengan demikian dapat disimpulkan di masa Orde Baru elite kesultanan mengalami pemberdayaan politik.(Lihat tabel 12).

Sultan Mudafar Sjah merupakan tokoh kunci kemenangan Golkar pada pemilihan umum 1997 di Maluku Utara dengan memperoleh 85 persen suara.Kemenangan tersebut mengantarkan Golkar menguasai mayoritas kursi yakni 17 kursi dari total 25 kursi DPRD Maluku Utara.[516]Sebagai kader Partai Golkar yang telah berjasa membesarkan dan memenangkan Golkar di Maluku Utara sejak pemilu 1971-1997.Mendorong Sultan Mudafar Sjah mencalongkan diri sebagai ketua DPD II Golkar Kabupaten Maluku Utara.Pada Musawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Maluku pada Desember 1998 Sultan mencalonkan diri, ternyata dalam musyawarah itu, para peserta memilih calon lain yaitu Kahar Limatahu (bangsawan kesultanan Ternate).Namun para para Gemusba (laskar kesultanan), yang militan dan loyal kepada sultan telah mengelilingi gedung dan dengan tegas berseru agar keputusan itu diubah.[517]Dengan berbagai tekanan dari pihak kesultanan, akhirnya musyawarah tersebut menetapkan Sultan Mudafar Sjah sebagai ketua DPD Golkar Maluku Utara 1998-2003.Hal ini menempatkan Sultan Mudafar Sjah sebagai pengendali Golkar di Maluku Utara.

Terpilihnya Sultan Mudafar Sjah sebagai ketua Golkar Kabupaten Maluku Utara, dijadikan momentum oleh Kesultanan Ternate untuk bangkit kembali memperjuangankan *privilege*nya.Dalam hal ini kemenangan tersebut mengilhami Sultan Mudafar Sjah menginginkan agar jabatan ketua DPRD harus berada di gengamannya.Golkar menjadi benar-benar menjadi milik Mudafar ketika dilakukan pemilihan ketua DPRD Maluku Utara pada Mei 1999. Sultan Mudafar Sjah

---

[514] "Keraton Ternate Adalah Benteng Terakhir Pelestarian Budaya", dalam *TabloidParada.*Ternate, edisi 14 tanggal 28 Oktober-10 Nopember 2002.

[515]*Tabloid Parada.*Ternate, edisi 11 tanggal 26 Juni- 8 Juli 2002.

[516]*Tabloid, Parada.*Ternate, edisi 14, tanggal 28 Oktober-10 Nopember 2002.

[517] Dalam Musda Golkar tersebut, dukungan peserta tidak diberikan kepada Sultan Mudafar Sjah, tetapi diberikan kepada Kahar Limatahu Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, yang juga salah seorang pejabat struktural Kesultanan Ternate (*Hukum Soa Sio* atau Menteri Dalam Negeri). Namun, tekanan fisik yang dilakukan oleh Organisasi Gemusba (sayap militer Kesultanan) menyebabkan yang bersangkutan menyerahkan jabatannya kepada Sultan Mudafar Sjah. Dalam proses pemilihan tersebut tekanan politik dari kelompok kesultanan yang sehinga mengabaikan unsur demokrasi. Lebih jelasnya lihat Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia.* Jakarta: KITLV, 2007.

didukung penuh seluruh fraksi dan terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaen Maluku Utara 1999-2004.[518]

Terpilihnya Sultan Mudafar Sjah sebagai ketua Golkar Dan DPRD Kabupaten Maluku Utara merupakan awal kebangkitan Kesultanan Ternate.Dalam hal ini sultan sudah mempunyai pijakan untuk mencalongkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara pada 2002.Munculnya Sultan Mudafar Sjah dalam pentas politik lokal, dimaknai kemunculan neo patrimonialisme yang ditandai oleh kebangkitan Kesultanan Ternate dengan pemakaian identitas kekuatan tradisional sebagai kendaraan politiknya.

Tabel 14
Nama-nama Pejabat Kesultanan Ternate yang menjadi anggota Legislatif DPRD II dan I Maluku Utara Pada tahun 1971-1997

No	N a m a	Jabatan dalam Kesultanan Ternate	Jabatan Legislatif	Periode
1	Mudafar Sjah	Sultan	Anggota DPRD I Propinsi Maluku	1971-1982
2	Yusuf Madjid	*Jogugu* (Perdana Menteri)	Anggota DPRD I Propinsi Maluku	1971-1977
3	Abdul Kahar Limatahu	Hukum Soa-Sio (menteri dalam negeri)	Kajari Malut	1971-1977
4	Hidayat M.Sjah	Pangeran	Anggota DPRD II Kab. Maluku	1977-1982
5	Talabudin Yusuf	Hukum Sangaji	Anggota DPRD II Kab. Maluku	1977-1982
6	Boy Anggrek	Kapita Cina	Anggota DPRD II Kab. Maluku	1982-1987
7	Soraya M.Sjah	Kaicil (Putri Sultan)	Anggota DPRD Kota Ternate	1987-1992
8	Ismunandar	*Tulilamo* (sekertaris kerajaan)	Wakil Ketua DPRD II Kab. Maluku	1987-1992
9	Ridwan Gafur	*Sowohi* (protokoler kerajaan)	Anggota DPRD II Kab. Maluku	1992-1997
10	Muchdar Mustafa	Perdana Menteri	Kanwil Perindustrian Maluku	1992-1997
11	Iksir Baay	*Hokum Soa-sio* (menteri dalam negeri)	Anggota DPRD II Kab. Maluku	1992-1997
12	Jalil Pora,	Salahakan	Sekda Kabupaten	1982-1987

[518]*Tabloid, Parada*. Ternate, edisi 9, tanggal 2 Maret- 12 April 2003.

No	N a m a	Jabatan dalam Kesultanan Ternate	Jabatan Legislatif	Periode
			Maluku Utara	
13	Abdurahman Marabesy,	*Bobato akhirat*	Ketua STAIN Ternate	1977-1982
14	Sidik Marabesy.	*Bobato dunia*	Anggota DPRD II Kab. Maluku	1977-1982
15	Yusuf Wahid Siokona	*Bobato dunia*	Anggota DPRD I Propinsi Maluku	1987-1992
16	Mahmud Tolangara	*Hukum Sangaji* (Menteri Luar Negeri)	Anggota DPRD I Propinsi Maluku	1987-1992
17	Heri Saroeddin	*Bobato dunia*	Anggota DPRD I Propinsi Maluku	1992-1997

Sumber:Muchdar Abdullah, " Kesultanan Ternate Dalam Ranah Politik" Tesis S2 Ilmu Politik, UGM,2006.

Strategi akomodatif tidak hanya melalui politik kepartian atau berasosiasi dengan partai pemerintah (Golkar). Namun juga berpolitik melalui upaya membangun jaringan kerabat.Politik kekerabatan ini diambil dengan beberapa alasan.*Pertama*, mengubah kekuatan politik yang berpengaruh dan potensial menjadi musuh menjadi kawan atau kerabat. Misalnya, keraton selalu menggangkat setiap pejabat militer dan kepolisian di Maluku menjadi kerabat melalui pemberian gelar. Demikian pula dengan pejabat birokrasi sipil, seperti; gubuernur, bupati dan walikota. *Kedua*, melalui perkawinan, untuk mendapatkan pihak-pihak yang menguntungkan secara ekonomi maupun politik.

Selain itu, strategi kebudayaan juga melalui perluasan aliansi keraton-keraton se-Nusantara.[519] Strategi itu merupakan cara Kesultanan Ternate untuk memperkuat posisi tawar istana berhadapan Negara. Salah satu agenda yang dimiliki oleh alinasi keraton adalah kejelasan tanah-tanah bekas swapraja yang diambilalih oleh negara pada pemerintahan Soekarno.Sampai saat ini, Kesultanan Ternate belum mempunyai dasar hukum dalam bidang pertanahan.

Berbeda dengan Keraton Yogyakarta yang memeliki payung hukum keistimewaan.[520] Karena ketiadaan payung hukum beberapa tanah yang diklaim milik Kesultanan Ternate di ambil alih oleh Negara pada 1950-an. Kesultanan Ternate melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah adat disekitar Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao (Kabupaten Halmahera Utara), yang merupakan areal

[519] Forum Komunikasi Keraton-keraton se Indonesia (FKKI), di selengarakan pertama di Solo pada 1995. Sampai sekarang keanggotannya telah berjumlah 34 termasuk beberapa yang baru dibentuk.Mengenai kebangkitan Keraton-keraton se Indonesia lihat David Henley, et al., *Adat Dalam Politik Indonesia*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010. Lihat AA GN Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*. (Yogyakarta, IRE Press, 2004).

[520] Mengenai keistimewaan Yogyakarta, lihat Ahmad Nashih Luthfi, et al, *Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat Dan Yang Dilupakan*. (Yogyakarta: STPN, 2009).

penambangan emas yang sementara di eksplorasi PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM). Tanah tersebut kemudian diklaim oleh Kesultanan Ternate sebagai *Aha Kolano* sebagai tanah sultan.Dari sinilah merupakan awal terjandinya konflik Maluku Utara karena pertarungan kepentingan ekonomi dan politik antara Kesultanan Ternate dan non kesultanan.

E. Pembentukan Kabupaten Maluku Utara

Uraian ini menjelaskan bagaimana respon elite kesultanan Ternate, terhadap kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 60 tahun 1958, tentang pembentukan Kebupaten Maluku Utara.Hal tersebut menjadi penting dalam pembahasan ini, karena dengan adanya UU tersebut, maka status Karesidenan Ternate yang membawahi seluruh wilayah Maluku Utara, secara otomatis dihapus. Pengahapusan tersebut mendapat reaksi dari elite Kesultanan Ternate, karena berimplikasi pada penguasaan jabatan Bupati tidak lagi harus dijabat oleh sultan dan keluarganya tetapi dipilih melalui pemilu dalam format politik modern.

Daerah Maluku Utara, pada awal kemerdekaan merupakan suatu pemerintahan gabungan daerah tiga pemerintahan swapraja yaitu Ternate, Tidore dan Bacan.[521]Dalam perkembangannya ketika pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), maka daerah Maluku Utara diatur dalam Undang-Undang. NIT No. 44, tahun 1950 tentang pokok pemerintahan daerah.Daerah Maluku Utara dibawah kekuasaan Dewan Raja-raja (badan eksekutif), terdiri dari Sultan Ternate, Tidore dan Bacan dan *Noord Molukken Raat* (badan legislatif) yang terdiri atas para bangsawan.Pemerintahan Swapraja tersebut berlangsung hingga pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 60 tahun 1958, tentang pembentukan Kebupaten Maluku Utara.[522] Dalam periode tersebut (1945-1958), daerah Maluku Utara dijabat oleh tiga orang residen yaitu Sultan Ternate Iskandar Jabir Syah (1945-1950), Sultan Tidore Zainal Abdin Alting (1950-1956), dan Sultan Bacan Dede Usman Syah (1956-1959).

Sejak bubarnya Negara Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang UU No. 44 tahun 1950 mengenai pembentukan daerah-daerah otonomi di Maluku.[523]Sebagai

---

[521] Pembagian daerah dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1925, saat itu *Gouvernement der Molukken* dibagi menjadi dua karesidenan yaitu Karesidenan Amboina dan Karesiden Ternate.Karesidenan Amboina kemudian dibagi menjadi 15 *Onderafdeeling* dan Karesidenan Ternate ke dalam 12 *onderafdeeling*.Masing-masing karesidenan diperintah oleh seorang residen sedangkan masing-masing *onderafdeeling* diperintah oleh seorang asisten residen. Lihat ANRI ***Memori van Overgave*** Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo Seri 2, Nomor 26.

[522] J. Mansur, "Naskah Pengusulan Tingkat I Propinsi Maluku Utara Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong daerah Tingkat II Maluku Utara.(Ternate, 1964), hlm. 16-17.

[523] Penganturan wilayah ketika itu hanya berpedoman pada UUD 1945 pasal 18 yang mengatkan bahwa " Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya di tetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingkat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang

realisasi dari UU tersebut maka pada 1951, pemerintah pusat menetapkan daerah Maluku Tengah dan Tenggara dimekarkan menjadi daerah otonom tingkat II berdasarkan PP No. 35 tahun 1951. Pada tahun sama wilayah Ambon ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 1951. Setelah penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemerintah pusat mengkeluarkan UU Darurat No. 22 tahun 1951 yang menetapkan kembali Ambon sebagai ibukota propinsi Maluku. [524]

Pemekaran beberapa daerah tersebut, mendorong Residen Maluku Utara sekaligus Sultan Tidore Zainal Abidin Alting mengagas ide pembentukan daerah Tingkat I Maluku Utara.Gagasan tersebut tidak hanya didukung oleh elite Kesultanan Ternate tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat Maluku Utara, termasuk partai-partai politik. Anggota-anggota parlemen yang berasal partai-partai politik seperti; PNI, PSSI, Masyumi, dan Parkindo yang tergabung dalam Komite Nasional Indonesia (KNI) Maluku Utara, membentuk sebuah delegasi yang diketuai Hasan Radjaloa. Pada bulan Mei 1951, delegasi itu menyampaikan tuntutan rakyat Maluku Utara kepada pemerintah pusat agar mengembalikan Provinsi Maluku pada kekuasaan RI dengan penempatan ibu kota di Ternate, sebagai penolakan terhadap proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) pada 1950.[525]

Namun tuntutan delegasi itu tidak mendapat respon dari pemerintah pusat. Pada bulan Agustus 1951, untuk kedua kalinya KNI mengirimkan delegasi yang diketuai Residen Maluku Utara, Zainal Abidin Alting untuk mempertegas keinginan rakyat Maluku Utara agar dimekarkan menjadi daerah Tingkat I. Dalam merespon tuntutan tersebut, maka pada bulan Pebruari 1952 Gubernur Maluku Latuharhary mengunjungi Ternate. Dalam pertemuannya dengan para tokoh-tokoh masyarakat, Latuharhary mengatakan tuntutan rakyat Maluku Utara mengenai pembentukan Propinsi Maluku Utara akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. Selama di Ternate, ia atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) yang di ketuai Residen Zainal Abidin Alting sesuai surat keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 3 Maret 1952.[526]

Menunggu tanpa ketidakpastian dari pemerintah pusat dalam memenuhi tuntutan pemekaran Propinsi Maluku Utara.Pada 27 Januari 1957 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perjuangan (DPRDP) membentuk sebuah badan yang disebut "Badan Musyawarah Rakyat Daerah Perbatasan Maluku Utara".Badan itu mengeluarkan

---

bersifat istimewa". Lebih jelasnya lihat Adnan Buyung Nasution, *et. al., Federalisme Untuk Indonesia*.(Jakarta: Kompas, 1999), hlm 54-57.

[524]Selama meletuskan pemberontakan Republik Maluku Selatan 25 April 1950, dengan alasan keamanan Pemerintah Pusat menetapkan Ternate sebagai ibukota sementara Propinsi Maluku.Dalam periode tersebut roda pemerintahan Propinsi Maluku di pusatkan di Ternate. Lihat J. Mansur, "Naskah Pengusulan Tingkat I Propinsi Maluku Utara Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong daerah Tingkat II Maluku Utara.(Ternate, 1964).

[525] J. Mansur, *op.cit.*, hlm. 16-17.

[526]Fachry Ammari dan J.W. Siokona, *Ternate, Kelahiran dan Sejarah Sebuah Kota*.(Ternate: Pemda Kota Ternate, 2003), hlm. 8-11.

resolusi No. 1/BM/M.U./57 tertanggal 22 Januari 1957. Isi resolusi itu mendesak kepada pemerintah pusat, agar Maluku Utara dimekarkan menjadi tingkat I, jika tidak, maka Maluku Utara akan menggabungkan diri dengan Propinsi Irian Barat. Sekaligus mengirim kembali Residen Maluku Utara Dade Usman Syah (Sultan Bacan) dan Wakil ketua DPRDP Jon untuk menjelaskan tuntutan masyarakat Maluku Utara kepada pemerintah pusat.

Dalam merespon tuntutan tersebut, 4 Menteri yakni Wakil perdana Menteri Mr. Moh. Roem, Menteri Penerangan Sudibjo, Menteri Dalam Negeri Sunarjo, dan Menteri Urusan Umum H. Rusli Abdul Wahid tiba di Ternate, 1 Juni 1956. Dalam kunjungan beberapa menteri tersebut mereka meninjau syarat-syarat formal yang disiapkan jika Maluku Utara di mekarkan menjadi daerah tingkat I.

Dalam pertemuannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perjuangan (DPRDP), salah satu pembahasan utama ialah tuntutan rakyat Maluku Utara adalah pemekaran daerah tingkat I Maluku Utara. Dalam sambutannya menteri Dalam Negeri menjanjikan bahwa persoalan tuntutan tingkat I Maluku Utara akan dibahas dalam sidang kabinet. Akan tetapi, Presiden Soekarno menghendaki agar peningkatan status tingkat I Maluku Utara di tangguhkan sampai kembalinya Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.[527]

Gambar 12.
Gubernur Maluku Mr. Latuharhary menerima ukiran dari kayu cendana dari masyarakat Ternate pada tanggal 17 Nopember 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 4

[527]Partisipasi masyarakat Maluku Utara dalam memperjuangkan Papua ke dalam Negara Indonesia memeliki konstribusi yang besar.Ketika Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Dana Revolusi. Para petani kelapa Maluku Utara menyumbangkan 1000 ton kopra untuk digunakan dalam pembebasan Papua dan di serahkan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Utara, Jakub Mansur di Jakarta. Atas jasa itulah, Presiden Soekarno melantik Residen Maluku Utara Zainal Abidin Alting sebagai Gubernur Papua pertama dan menjadikan daerah Sosia (Tidore) sebagai ibukotannya. Herry RD.Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*. Ternate, Yayasan Kie Raha, 2003.

.

Dengan melihat belum ada niat baik dari pemerintah pusat dan perjuangan melalui jalur diplomasipun sudah mengalami kebuntuan. Di saat sama meletusnya pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) pada tahun 1958 di Sulawesi Utara. Isu sentral gerakan itu adalah otonomi daerah, termasuk perimbangan ekonomi pusat dan daerah. Pemberontakan PERMESTA ini kemudian dimanfaatkan oleh para pejuang Propinsi Maluku Utara untuk menekan pemerintah pusat untuk mempercepat pembentukan Propinsi Maluku Utara.

Pada September 1958, tokoh-tokoh Maluku Utara seperti; Abdul Kadir, Arifin Assagaf, Wahab Kasim, Ismail Nachrawy, dan Usman Djafar mendeklarasikan "Proklamasi Akerica", yang mengatakan masyarakat Maluku Utara melepaskan diri dari Pemerintah Pusat dan bergabung dengan PERMESTA. Untuk mendukung perjuangannya diangkatlah Abdul Kadir sebagai Panglima PERMESTA untuk daerah Maluku dan Irian Barat.Setelah PERMESTA di tumpas, tokoh-tokoh yang terlibat tersebut dalam perkembangannya ditangkap dan dipenjarakan di Nusakembangan sebagai tahanan militer.[528]Sejak saat itu, gerakan tuntutan tingkat I dengan sendirinya mereda.

Dengan adanya peristiwa tersebut, mendorong pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 60 tahun 1958 tentang pembentukan Kebupaten Maluku Utara.Dengan adanya UU tersebut secara otomatis, status Ternate hanya menjadi Kabupaten Tingkat II yang memeliki keterbatasan adiministratif.Atas dasar itulah sebagian besar masyarakat dan kalangan kesultanan Ternate mengajukan protes atas dihapusnya status Karesidenan Ternate yang membawahi seluruh daerah Maluku Utara. Alasan sejarah dan politik itulah perasaan tidak puas di kalangan rakyat muncul ke permukaan untuk memperjuangkan status propinsi bagi Maluku Utara secara otonom atau terpisah dari propinsi Maluku. (mengenai pembentukan propinsi akan jelaskan pada bab selanjutnya.

Memasuki pemerintahan Soeharto (Orde Baru), gaung dan gema pemekaran tingkat I tidak terdengar lagi.Sejak saat itu, tentara (militer) telah menjadikan dirinya sebagai bagian untuk menjaga kelangsungan politik.Pada saat itulah yang menjadi Gubernur Maluku dan Bupati Maluku Utara harus berlatarbelakang militer. Dominasi militer atas pemerintahan ini terlihat dari banyak orang dari militer dikaryakan pada jabatan-jabatan publik diberbagai bidang dan tingkatan. Jika pada pada zaman Seokarno tentara merupakan pihak yang menguasai sistem politik pada akhir 1960-an, maka di era Soeharto tentara menjadi alat kekuasaan Soeharto.[529]

[528]Fachry Ammari dan J.W. Siokona,*op,cit*. hlm.75

[529] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional.* (Jakarta:Pustaka UtamaGrafiti, 1987), hlm 25-27.

Gambar 13 dan 14.
Rombongan 4 Menteri yakni Wakil perdana Menteri Mr. Moh. Roem, Menteri Penerangan Sudibjo, Menteri Dalam Negeri Sunarjo, dan Menteri Urusan Umum H. Rusli Abdul Wahid tiba di Ternate, 1 Juni 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560601 w 38

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pada masa Pemerintahan Soehartosecara politik dan kultural Kesultanan Ternate dihidupkan kembali di bawah dukungan Golkar.Namun demikian, Orde Baru tidak pernah mengingingkan terbentuknya kepemimpinan lokal yang kuat.Salah satu jalan mencegah menguatnya pempinan lokal adalah dengan menempatkan para pegawai nasional dari Jakarta ke tingkat lokal.Maka para Gubernur dan Bupati di tunjuk langsung oleh pemerintah pusat.[530]

Diangkatnya beberapa perwira TNI menjadi gubernur dan bupati di Maluku pada periode Orde Baru adalah salah satu contoh paling aktual dari kehadiran militer

[530] Dwi Pratomo Yulianto, " Oposisi Berseragam: Catatan Tentang Hubungan Politik Suharto dan Militer di Akhir 1980-an, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* , UGM, 2003, hlm, 250.

dalam pemerintahan daerah.Menurut John Pires, *d*engan diterapkannya cara-cara otoriter selama kepemimpinan Gubernur Soemitro, Soemeru, Hasan Slamet dan Soekoso (semuanya TNI AD), selama 25 tahun, dengan kendali pemerintah pusat yang dipegang oleh Presiden Soeharto, mereka telah melumpuhkan peran politisi sipil dan mematikan demokrasi di Maluku. Semua anggota DPRD, partai-partai politik, pimpinan Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku dan semua organisasi sosial dan tokoh-tokoh agama, masyarakat dan adat, dibuat tidak berdaya.[531] Adapun gubernur-gubernur yang pernah memimpin propinsi Maluku sebagaimana tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel 15
Nama-nama Gubernur Maluku Periode 1945-1999

No	Nama Gubernur	Periode
1	J. Latuharhary	1945-1955
2	S.M. Djosan	1956-1960
3	Mohammad Padang	1960-1965
4	Kolonel J. Latumahina	1966-1968
5	Kolonel Sumitro	1969-1973
6	Brigadir Jenderal Sumeru	1974-1976
7	Mayor Jenderal Hasan Selamat	1976-1987
8	Soekoso	1987-1991
9	M. Akib Latukonsina	1991-1995
10	Dr. Ir. M. Saleh Latuconsina,	1995-1999

Sumber: Maluku dalam Angka Tahun 1998

Pergantian kepala daerah tingkat I dari J. Latuharhary (sipil) dan penempatan S.M. Djosan hingga Soekoso yang berasal dari militer didasarkan pertimbangan pemerintah pusat bahwa daerah Maluku pasca pemberontakan RMS pada tahun 1950 harus dipimpin tokoh militer agar menjaga stabilitas nasional. Sehingga pemerintah pusat memulai suatu percobaan baru yakni memasukan tokoh-tokoh militer ke dalam jajaran pemerintahan sipil, sehingga dalam perkembangannya hampir semua

[531]Sistem pemilihan Bupati di Maluku Utara adalah contoh yang gamblang. Biasanya pemerintah pusat telah menetapkan Bupati yang dikehendaki sebelum proses pemelihan secara ketat mulai dari babak nominasi hingga pemelihan itu sendiri dan melakukan intervensi agar calonnya bisa menang. Bahkan pemerintah daerah dan DPRD tidak memeliki kemampuan tawar menawar (*bargaining power*) terhadap penguasa pusat.Oleh karena itu tidak salah jika pemerintah daerah tidak memeliki *sense of urgency, sense of emergence and sense of prority* terhadap pembangunan yang seharusnya diterapkan didaerah Maluku.Dengan demikian kehadiran penguasa dan pemerintahan militer serta dominannya pengaruh pemerintah pusat memberi dampak yang besar dalam perpolitikan di daerah Maluku dan Maluku Utara.Pembentukan dan pelaksanaan pemerintah sipil didaerah menjadi tergantung pada dua unsur ini. Dengan kata lain pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat sipil didaerah sangat ditentukan oleh pemerintah pusat. Lebih jelasnya lihat, John Pires, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Perdaban.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 67.

Gubernur dan Bupati di Maluku berasal dari militer.[532]Kebijakan lain dari Presiden Soeharto adalah ketika TNI AD menempatkan perwira-perwira non putra daerah sebagai komandan dari masing-masing unit territorial. Semua Pangdam, Danrem, Dandim dan Danramil juga berasal dari luar Maluku.[533]

Campur tangan militer dan pemerintah pusat bukan hanya di bidang ekekutif, melaingkan juga terlihat dalam lembaga legislatif daerah.Begitupula struktur kepemimpinan tradisional juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan administratif yang dilakukan oleh rezim Orde baru.Setelah tahun 1979, posisi perangkat-perangkat adat beralih dari pimpinan tradisional ke kepala desa.Menurut Riswanda Imawan, dengan hilangnya kepemimpinan tradisional, masyarakat mulai beralih ke aparatur modern seperti guru, birokrasi atau pengawai negeri lainnya yang didukung oleh kekuasaan negara, dan mulai meninggalkan tradisi mereka. *Regrouping* desa setelah 1979 turut mempersulit kedudukan kepemimpinan tradisional.[534]

Hal yang sama juga dialami pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Utara. Disamping dominannya peran militer, pemilihan kepala daerah (Bupati) Maluku Utara sejak tahun 1970-an juga banyak tergantung pada kemauan pihak pusat. Proses pemilihan itu sendiri sebetulnya hanya sebuah sandiwara, sebab setiap bupati yang diangkat di Maluku Utara sebetulnya adalah tokoh yang telah direstui (dikirim) oleh pusat. Perubahan lain terlihat dari adanya pola kaderisasi pengganti pejabat yang akan mundur. Sandiwara pemilihan kepala daerah juga terlihat adanya calon utama atau calon unggulan dan calon pendamping (biasanya calon yang diambil dari pejabat pemerintah daerah). Dengan cara pencalonan dan pemelihan seperti ini, maka calon unggulan sudah dapat dipastikan mendapat suara terbanyak. Untuk mengurangi aroma sandiwarannya, maka calon pendamping juga diberi suara yang juga diatur sebelumnya.[535] Begitulah cara dan proses pemilihan Bupati di Maluku Utara pada masa Orde Baru. Walaupun ada beberapa pengecualian, namun pengecualian itu terasa langka.

Sejak saat itu kehadiran militer dalam jajaran pemerintah daerah Kabupaten Maluku Utara mendapat restu dari Jakarta dan didominasi oleh pihak militer, seperti C.K. Soselisa, M.S. Djakir, Soemitro, J. Mansur BA, A.R. Royani, Supanji, Sutikno, dan Abdullah Assagaf. Di samping posisi bupati, pihak militer juga menduduki

[532]John Pires, *op. cit.,* hlm, 31 .

[533] Dwi Pratomo Yulianto, *op. cit.,* hlm, 250.

[534] Dengan adanya UU no 5/1979, merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap komunitas lokal yang mempunyai dampak terhadap perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya pergeserann kekuasaan dan kepemimpinan pada tingkat lokal. Konfiguasi kepemimpinan dan kekuasaan menjadi lebih variatif sifatnya dengan sumber legitimasi yang berbeda. Lihat Riswanda Imawan, " Prospek Peranan Golkar dalam Demokratisasi di Indonesia" dalam *Jurnal Prospektif*. Vol.5, No, 3, 1993.

[535] Biasanya suara bagi para calon pendamping (pengembira) ini berkisar antara dua sampai lima tergantung kesepakatan DPRD, namun hampir tidak pernah calon pendamping ini tidak memeperoleh suara, strategi ini untuk tidak menguranggi wibawa mereka. Lihat John Pires, *op. cit.*, hlm, 25.

posisi strategis lainnya, yakni ketua dalam lembaga legislatif tingkat provinsi dan kabupaten.

Dari nama-nama bupati Maluku Utara tersebut, semuanya berlatar belakang karir dari kalangan militer. Selain itu lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh dari luar Maluku. Diangkatnya tokoh dari Jawa dan perwira militer sebagai Bupati Maluku dan Maluku Utara merupakan fonomena baru dalam sejarah pemerintahan daerah Maluku.Berikut ini nama-nama Bupati Kabupaten Maluku Utara, pada periode 1950-1999.

Tabel 16
Nama-nama Bupati Kabupaten Maluku Utara
Periode 1958-1999

No	Nama Bupati	Periode
1	JK. Soulissa	1958-1960
2	M.S. Djakir	1960-1965
3	Soemitro	1965-1970
4	Yakub Mansur	1970- 1974
5	AR. Royani	1974-1976
6	Supanji	1976-1987
7	Sutikno	1987-1995
8	Abdullah Assagaf	1995-1999

Sumber: Maluku Utara dalam Angka 2000

Selama kepemimpinan Presiden Soekarno hingga Soeharto, satu-satunya putra asli Maluku yang pernah menjabat Gubernur Maluku hanya J. Latuharhary. Walaupun demikian, yang menjadi bupati Maluku Utara berasal dari kalangan militer, namun dalam posisinya sebagai pendukung partai pemerintah (Golkar), elite Kesultanan mengalami pemberdayaan politik pada rezim Soeharto. Realitas menunjukan para bangsawan Kesultanan Ternate tidak hanya menata karir politiknya sebagai politisi, wartawan, dan pengusaha, melaingkan juga menduduki jabatan birokrat. Hal ini dapat lihat ketika Ternate di mekarkan menjadi kota administratif pada 11 Maret 1992 berdasarkan PP No. 45 tahun 1991.[536]

[536] Fachry Ammari dan J.W. Siokona, *op.cit.,* hlm. 82-83.

Penutup

Ada tiga strategi bertahan yang dipakai oleh Sultan Mudafar Sjah untuk membangun kembali basis kekuasanya pada era Pemerintahan Soeharto. Pertama, strategi berasosiasi dengan partai pemerintah.Belajar dari kegagalan politik Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah sebelumnya yang tidak mendukung partai pemerintah Soekarno. Realitas menunjukan, Sejak di lantik sebagai Sultan Ternate ke-48, pada 29 Nopember 1976, Mudafar Sjah mengambil keputusan politik untuk mendukung partai Pemerintah Soeharto (Golkar). Dukungan Kesultanan Ternate pada politik Golkar, dipahami sebagai strategi akomodatif agar menjaga tetap bertahan di tengah pusaran kekuasaan yang oteriter dan sentralistik serta bisa memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh kekuatan besar itu.Keberhasilan strategi tersebut, terbukti dapat mengantarkan sejumlah elite kesultanan menjadi anggota legislatif, birokrat, politisi, wartawan, dan pengusaha. Sesuatu yang tidak pernah dialami elite kesultanan di masa Pemerintahan Soekarno.Strategi berasosiasi dengan partai pemerintah digunakan karena dipandang lebih efektif untuk memaksimalkan kepentingan istana, secara ekonomi, politik maupun budaya.

Kedua, arena kebudayaan.Elite Kesultanan Ternate menghidupkan kembali upacara-upacara istana seperti *Kololi Kie* (ritual mengelilingi pulau), *Fere Kie* (ritual mendaki gunung), *Legu Gam* (ulang tahun sultan), Maulid Nabi dan Isra'Miraj.Ritus-ritus istana ini selalu menunjukan kemegahan, karena merupakan sumber legitimasi kultural bahwa istana mempunyai daya magis, sakral dan simbol kewibawaan. Dalam periode yang sama, elite kesultanan juga melakukan perluasan jaringan kekerabatan dengan memberikan gelar kehormatan pada pejabat atau mantan pejabat baik pusat maupun daerah. Di pakainya politik kekerabatan, maka kesemua elemen sosial politik secara resmi menjadi bagian dari kerabat Kesultanan Ternate, tentu saja mempunyai konsekuensi logis baik secara ekonomi, politik dan budaya.Langkah ini dilakukan sebagai politik kebudayaan dengan menjadikan istana sebagai pusat pengemban, pelestarian dan pusat pengembangan kebudayaan Ternate.

Ketiga, dalam arena ekonomi. Untuk bertahan secara ekonomi, selain menghandalkan pada tanah-tanah yang masih dimiliki oleh keraton. Elite kesultanan melakukan perubahan orentasi pekerjaan.Jika pada periode pemerintahan Soekarno mereka tidak terserap dalam birokrasi pemerintahan.Pada perode pemerintahan Soeharto, disamping ada yang tetap memilih masuk kesektor birokrasi negara, menjadi birokrat. Beberapa diantaranya mulai masuk ke sektor non birokrasi atau terjun kedalam dunia bisnis.

BAB VII
KESULTANAN TERNATE PADA ERA REFORMASI 1998-2002

Pengantar

Bab ini menjelaskan strategi politik Mudafar Sjah dalam upaya mempertahankan kekuasaannya di tingkat lokal pada saat Maluku Utara menjadi propinsi baru.Lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 dinamika politik didaerah memasuki era baru.Para aktor, institusi, dan budaya lokal bermunculan kembali dan memulai memainkan peran di dalam arena politik lokal.Dengan adanya regulasi UU tersebut, negara memberi pengakuan terhadap adanya hak asal-usul, kemudian dimanfaatkan secara baik oleh elite Kesultanan Ternate untuk membangun basis kekuasaanya atas klaim sejarah dan usul budaya.

Pemekaran Maluku Utara menjadi propinsi baru berdasarkan UU No. 46/1999, melahirkan kontestasi politik antara elite kesultanan dan non kesultanan.Beberapa isu penting seperti; mengenai nama dan penempatan ibu kota propinsi, perebutan kursi gubernur, dan jabatan birokrasi pemerintahan baru kabupaten/kota.Semua itu menjadi isu yang strategis yang sengaja dibangun oleh elite lokal untuk mencari legitimasi atas kepentingannya.

Kembangkitan Kesultanan Ternate seiring dengan paradigma baru otonomi daerah menarik untuk dikaji.Munculnya Sultan Mudafar Sjah sebagai calon Gubernur Maluku Utara, sebagai usaha pemunculan kembali kekuatan-kekuatan feodal yang telah lama bersemayam dengan menghidupkan lembaga-lembaga adat sebagai identitas kekuatan tradisional. Strategi ini merupakan upaya yang ditempuh elite kesultanan agar tetap terakomodasikan secara institusional ke dalam panggung politik pemerintahan formal.

Pembentukan Propinsi Maluku Utara ternyata diikuti dengan kebangkitan Kesultanan Ternate. Implikasi dari kebangkitan kesultanan tersebut adalah upaya sultan Ternate, Mudafar Sjah memfungsikan kembali instrumen kerajaan dalam rangka mencari legitimasi peran sultan. Persaingan elite kesultanan Ternate dan non kesultanan bukan saja menyangkut perebutan kepentingan terhadap sumberdaya baru, melaingkan juga berkaitan dengan memori sosial kejayaan masa lalu. Tajamnya kepentingan politik dan perbedaan kepentingan dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan ditingkal lokal merupakan pemicu lahirnya konflik pemelihan kepala daerah di Maluku Utara. Dari berbagai persoalan tersebut, akan diuraikan dibawah ini.

A. Dari Kabupaten Maluku Utara Hingga Menjadi Propinsi:Tarik Menarik Nama dan Ibukota Propinsi

Tuntutan masyarakat Maluku Utara untuk menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Malukumemeliki sejarah yang panjang. Upaya ini dirintis sejak pasca bubarnya Negara Indonesia Timur (NIT) dalam wadah Negara Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 17 Agustus 1950. Hal ini dimotori oleh Zainal Abidin Alting (Residen Maluku Utara) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Maluku Utara. Mereka membentuk sebuah badan yang disebut "Badan Musyawarah Rakyat Daerah Perbatasan Maluku Utara" untuk memperjuangkan daerah Maluku Utara menjadi daerah otonom tingkat I. Namun aspirasi tersebut ditangguhkan oleh Presiden Soekarno sampai kembalinya Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.[537]

Perjuangan Propinsi Maluku Utara kembali menggema ketika memasuki tahun 1964, disaat pemerintah pusat tidak merealisasikan janjinya untuk memekarkan Maluku Utara, setelah Papua bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia 1962. Di motori Bupati Maluku Utara M.S. Djahir, dan sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, intelektual serta tokoh-tokoh partai politik seperti; Partindo, PSSI, NU, Partai Katolik dan Parkindo. Pada tanggal 23 Agustus 1964, mereka kemudian mengadakan musyawarah besar rakyat Maluku Utara. Dalam musyawarah tersebut dihasilkan beberapa keputusan yaitu: (1). Pengiriman sebuah delegasi ke Jakarta. (2).Penyusunan *Buku Putih* yang memuat seluruh argumentasi politik, sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan mengapa Maluku Utara menuntut daerah tingkat I. dan (3). Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Kabupaten Maluku Utara untuk memperjuangkan pembentukan daerah tingkat I.[538]

Untuk menindaklanjuti hasil keputusan tersebut, DPRD-GR kemudian mengeluarkan rekomendasi No.4/DPRD-GR/1965 yang memberi dukungan atas upaya pembentukan provinsi Maluku Utara, dengan membentuk sebuah wadah yang dinamakan "Badan Pemekaran Daerah Tingkat I (BAPPERAN) Maluku Utara. Pada 1967 DPRDGR mengerimkan delegasi[539] ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi

---

[537]Mengenai sejarah perjuangan pembentukan Propinsi Maluku Utara lihat Fachry Ammari dan J.W. Siokona, *Ternate, Kelahiran dan Sejarah Sebuah Kota*. (Ternate: Pemda Kota Ternate, 2003), hlm. 8-11.

[538] J. Mansur. "Naskah Pengusulan Tingkat I Provinsi Maluku Utara Dewan Perwakilan Gotong Royong Daerah Tingkat II Maluku Utara".Ternate, 1964.Tanpa Penerbit hlm. 6-8.

[539]Para delegasi ini terdiri atas, M.S. Djahir, (ketua) M. Adnan Amal, (sekertaris), para anggotanya yaitu; Mochtar Mustafa, pendeta Magani, dan Oei Tjoe Hauw. Tugas delegasi ini adalah menyampaikan aspirasi dan rekomendasi masyarakat Maluku Utara kepada pejabat Kementrian Dalam Negeri dan pimpinan DPR-RI. Delegasi kemudian bertemu dengan Sekjen Depdagri, Mr. Sumarno, dan Dirjen PUOD. Sementara di DPR, delegasi bertemu dengan Wakil Ketua DPR, Syarif Thayeb, K.H. Hasbullah, dan Jenderal A.H. Nasution. Pada pertemuan itu, delegasi menyerahkan *Buku Putih,* dan menyampaikan alasan-alsan tuntutan rakyat Maluku Utara menuntut daerah tingkat I. Akhirnya berhasil DPR dan Departemen Dalam Negeri membentuk tim pencari yang diketuai Dachlan Ranuwihardja dan Amin Elly dan Gubernur Maluku J. Wayong untuk menilai syarat-syarat

masyarakat Maluku Utara. Namun dengan adanya pergantian dari rezim Presiden Soekarno ke Pemerintahan Soeharto mengakibatkan upaya-upaya rintisan tidak terealisasi.

Memasuki pemerintahan Soeharto (Orde Baru), gaung dan gema pemekaran tingkat I tidak terdengar lagi atau dikubur total.Hal tersebut disebabkan kebijakan politik di era Orde Baru lebih berorintasi pada pembangunan ekonomi dari pada politik.Untuk merealisasikan hal ini rezim Orde Baru menerapkan kebijaksanaan ganda, pertama, melakukan stabilisasi dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan.Kedua, melakukan penataan politik dengan harapan terbentuknya suatu sistem politik yang kondusif bagi pilihan kebijaksanaan ekonomi.Presiden Sukarno mengunakan jargon "revolusi" dan Presiden Soeharto menggunakan jargon "pembangunan" untuk mengemas hal itu.[540]Dengan demikian, arah penataan politik yang dilakukan pada periode awal pemerintahan rezim Orde Baru adalah menyederhanakan struktur kepartaian, baik dan segi jumlah, pola dukungan, basis massa, maupun aliran serta ideologi yang dianut bagi partai-partai. Dengan berbagai kebijakan tersebut tampaknya tidak bersahabat dan menutup peluang bagi Maluku Utara untuk memperjuangkan status provinsinya.

Berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, dinamika politik Indonesia memasuki era baru. Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia mengalami desentralisasi secara besar-besaran.Momenttersebut kemudian dimanfaatkan tokoh-tokoh Maluku Utara seperti; Sultan Ternate Mudaffar Sjah, Asisten I Provinsi Maluku Thaib Armayin, Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili, dan Walikota Ternate Syamsir Andili, berinsiatif untuk memperjuangkan Maluku Utara menjadi sebuah propinsi defenitif.

Menurut berbagai sumber yang diwawancarai pemekaran propinsi Maluku merupakan "harga mati" karena pembentukan Provinsi Maluku Utara sejak lama telah diperjuangkan dan tidak tanggapi oleh pemerintah Soekarno maupun Soeharto.[541] Di samping itu pemekaran Maluku Utara untuk menjadi provinsi sendiri dan terpisah dari Maluku telah memenuhi syarat-syarat formal yakni; *pertama*, pertimbangan administrasi, untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. *Kedua*, pertimbangan ekonomi bahwa Maluku Utara memiliki potensi strategis untuk dikembangkan dan dapat digunakan untuk kesejahtraan rakyat.*Ketiga*, sosial budaya, *keempat*. Pertimbangan sosial politik, *kelima*, jumlah penduduk, *keenam*, luas daerah,dan pertimbangan lainnya.[542]

Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara kemudian membentuk timyang dinamakan "tim sembilan" yang di

---

formal pembentukan sebuah propinsi. Lihat Hamid Kotambunan, *Perjuangan Rakyat Maluku Utara Membebaskan Diri dari Kolonialisme.* (Jakarta: Gamalama Media), hlm. 12-14.

[540] Purwo Santoso" Merajut Kohesi Nasional: Etno-nasionalisme dan Otonomi daerah" dalam *Jurnal Ilmu Sosial da Ilmu Politik*. Vol. 4, No 3, Maret 2001, hlm. 265.

[541]Hasil pada April 2014.

[542]Nurhasim Muchtar, *et. al, Konflik Antar Elit Lokal dalam Pemelihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah*. Jakarta: LIPI, 2003.

pimpin oleh Abdullah Assagaf Bupati Maluku Utara.Beranggotakan sejumlah perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan DPRD Kabupaten Maluku Utara. Tim ini kemudian melakukan konsultasi dengan DPR-RI dan Pemerintah Pusat.[543] Hasil dari konsultasi tim tersebut, akhirnyaPemerintah Pusat merespon dengan membentuk team yang terdiri atas Depdagri dan Komisi II DPR-RI. Tim ini kemudian menilai syarat-syarat formal yang harus dipenuhi sebuah provinsi baru termasuk mengenai nama dan kedudukan ibukotanya.[544]

Persoalan pembentukan nama dan kedudukan ibukota propinsi mendorong Kesultanan Ternate, memprakarsai diadakannya seminar pada tanggal 21 November 1998. Seminar tersebut dihadiri Sultan Ternate Mudafar Sjah, Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili, Walikota TernateSamsir Andili, Bupati Maluku UtaraAbdullah Assagaf dan Dandim 1501 Ternate. Seperti halnya yang terjadi dibanyak daerah, persoalan pemekaran wilayah di Kepulauan Maluku menimbulkan perdebatan yang serius antara elite lokal. Perdebatan yang muncul di kalangan elite tersebut terutama berkaitan dengan nama propinsi hasil pemekaran dan berkaitan dengan pembagian kekuasaan/jabatan didaerah yang baru dimekarkan.

Persoalan pertama yang berkaitan dengan pemekaran wilayah di Kepulauan Maluku berkaitan dengan nama propinsi hasil pemekaran. Usulan dari kalangan non kesultanan bahwa propinsi Maluku akan dimekarkan menjadi dua propinsi dengan nama propinsi Maluku Utara dan Propinsi Maluku Selatan. Perdebatannya hanyalah pada istilah "Maluku Selatan" yang identik dengan kelompok RMS. Maka dari itu, kebijakan yang diambil untuk Maluku wilayah selatan tetap menggunakan nama Propinsi Maluku, sedangkan Maluku bagian utara dinamakan dengan Propinsi Maluku Utara.[545]

Sementara dari Kesultanan Ternate menginginkan nama*Maloku Kie Raha*[546] dan kedudukan ibukota propinsi tetap berada di Kota Ternate atau di wilayah Halmahera Barat (Jailolo dan Sidangoli). Secara historis daerah tersebut merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate.Bahkan kelompok ini juga menginginkan propinsi ini memeliki status daerah istimewa seperti di berlakukan di Daerah

[543]Satu hal yang menarik ketika Team Sembilan meminta dukungan politik dari Abdul Gafur (putra Maluku Utara) yang pada saat itu menjabat sebagai anggota MPR-RI dan ketua DPP Partai Golkar untuk memperjuangkan pemekaran Propinsi Maluku Utara. Namun ia menolak, dengan mengatakan bahwa "Maluku Utara belum layak untuk dimekarkan karena pendapatan asli daerah tidak cukup membiayai daerahnya". Dengan sikap politik itulah dikemudian hari ketika mencalongkan menjadi Gubernur Maluku Utara pada 2002, publik Maluku Utara menolaknnya. Hasil wawancara dengan sejumlah narasumber 2014.

[544]Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia.* (Jakarta: KITLV, 2007), hlm.93.

[545]Maryanto Wahyu Tryatmoko, "Pemekaran Wilayah dan Pertarungan Elite Lokal di Maluku Utara, dalam *Jurnal LIPI* Jilid XXXI, No 1, 2005, hlm. 70.

[546]*Moloku Kie Raha* berarti empat kesultanan/kerajaan yang ada di Maluku Utara yaitu; Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Alasan utama kenapa nama ini dipilih karena untuk menghidupkan kembali kejayaan kerajaan tersebut yang telah redup sejak zaman Kolonial Belanda. Leonard Y. Andaya, *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), hlm. 54.

Istimewa Yogyakarta (DIY) atau Daerah Istimewa Banda Aceh. Akhirnya seminar tersebut, merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan nama propinsi yang dimekarkan adalah *Maloku Kie Raha* dan Ternate sebagai ibukotannya. Untuk mengawal agenda tersebut, pihak Kesultanan Ternate kemudian membentuk lembaga adat yang dinamakan Generasi Muda Sultan Babullah (Gemusba), sebagai media perjuangannya.

Gayungpun bersambut, dalam rangka mendukung rekomendasiKesultanan Ternate. Para elemen Pemuda dan mahasiswa Ternate yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Maluku *Kie Raha* (HIPMA MKR) dan Forum Studi Pemuda Kreatif Maluku *Kie Raha* (FSPKMKR) dan Generasi Muda Sultan Babullah (GEMUSBA), mengelar seminar nasional pada 1 Desember 1998, dengan menghadirkan pembicara pusat maupun daerah seperti; Herman Charuman. Agung Prabowo, Saleh Latuconsina, Mayjen Hohny Lumintang, Lakolo, Abdullah Assagaf, Bahar Andili, dan Herry Nachrawy. Salah satu keputusanseminar tersebut mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan *Maloku Kie Raha*sebagai nama propinsi dan Ternate sebagai ibukotanya.[547]

Persoalan pembentukan namapropinsi *Maloku Kie Raha*bukan hanya didukungoleh Kesultanan Ternate. Disaat yang samaternyata diikuti dengan kembangkitan Kesultanan Tidore.Dihidupkannyakembali Kesultanan Tidore yang telah lama vakum semenjak Sultan Zainal Abidin wafat 1967, dan dinobatkannya Djafar dano Yunus sebagai Sultan Tidore ke-28 pada 2 Januari 1999 diduga erat kaitannya dengan pembentukan aliansi-aliansi Kesultanan di Maluku Utara guna mewujudkan pemebentukan propinsi *Maloku Kie Raha*.[548]Sekaligus merespon manuver Bahar Andili (Bupati Halmahera tengah), yang berambisi menjadikan Tidore sebagai ibukota propinsi Maluku Utara sekaligus ingin mencalongkan diri sebagai gubernur.

Selain kebangkitan kembali Kesultanan Tidore ternyata diikuti pula dengan munculnya kembali dua Kesultanan lainnya yakni Bacan dan Jailolo. Padahal menurut van Frassen kedua kesultanan ini sudah lama tenggelam karena dianeksasi oleh kolonial Belanda.[549] Kebangkitan kelompok kesultanan tersebut mengundang pertanyaan apa sebenarnya motif dibalik munculnya ketiga kesultanan dalam waktu yang bersamaan. Paling tidak kemunculan kekuatan primodial tersebut mengambarkan bagaimana kelompok elite istana tampil dan memaingkan peran-peran baru dalam perpolitikan di Maluku Utara. Menurut Gerry van Klinken, kembalinya para sultan di Maluku Utara dalam pentas gerakan komunitarian dalam politik lokal pasca Orde Baru adalah upaya kembangun kembali hegomoni politik

[547]*Tabloid Parada*. Ternate, edisi 2, tanggal 3-20 Desember 2008.

[548] Maryanto Wahyu Tryatmoko,*op,cit*. hlm.73.

[549]Christiaan Frans van Fraasen, Ternate, "De Molukken en De Indonesische Archipel, Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cultuur en Indonesia", Disertasi Universiteit Leiden, 1987.

dengan merepresentasikan diri sebagai representasi adat, identitas, dan nilai-nilai lokal yang ada di Maluku Utara.[550]

Tabel 17

Kebangkitan Kembali Kesultanan-Kesultanan di Maluku Utara
Pada Era Reformasi

Lokasi	Kabupaten	Berakhir atau pewaris terakhir	Bangkit kembali
Maluku Utara	Bacan	1983	1999, Sultan
Maluku Utara	Ternate	1975	1976, Sultan
Maluku Utara	Tidore	1967	1999, Sultan
Maluku Utara	Jailolo	1656?	2000, Sultan

Sumber :David Henley, et al., *Adat Dalam Politik Indonesia.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010)

Kembangkitan kembali kesultanan-kesultanan di Maluku Utara pada era reformasi mengambarkan bagaimana kelompok elite istana tampil dan memaingkan peran-peran baru dalam perpolitikan di Maluku Utara.[551]Kebangkitan kembali empat Kesultanan di Maluku Utara dianggap menjadi ancaman politik bagi kelompok non kesultanan.Mengingat agenda terdekat adalah pemilihan Gubernur Maluku Utara.Para tokoh non kesultanan seperti Syamsir Andili (Walikota Ternate), Bahar Andili (Bupati Halmahera Tengah) dan Taib Armain (Asisten I Gubernur Maluku) berupaya mengagalkan penetapan Ternate atau Halmahera Barat sebagai ibukota propinsi. Bahkan kelompok tersebut berkerja sama denganlembaga survei dari ITB. Konon meraka diminta untuk merekayasahasil survey bahwa Pulau Ternate dan Halmahera Barat tidaklayak sebagai ibukota Propinsi karena merupakan pulau vulkanik dan rawan gempa bumi.[552]Manuver yang dilakukan elite non kesultananyang diketuai Bahar Andiliditumpangi kepentingan dalam pencalonannya sebagai Gubernur Maluku Utara pada tahun 2001.Untuk mewujudkan ambisinya ia mengusulkan Tidore sebagai ibukota Propinsi Maluku Utara.Tujuannya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Tidore.

Tarik menarik nama dan kedudukan ibukota propinsi antara kedua kubu tersebut, bukan hanya berhubungan dengan soal politik melaingkan kepentingan

[550] Gerry van Klinken, " Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian Dalam Politik Lokal" dalam David Henley, et al., *Adat Dalam Politik Indonesia.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010),hlm.182.

[551] Mengenai kebangkitan keraton-keraton di Maluku Utara, lihat "Pelantikan: Tau Raha, Bobato Dunia, dan Bobato akhirat Kesultanan Jailolo", dalam *Tabloid Parada.* Ternate, edisi 10 25 Juni-15 Juli 2000. Dan lihat David Henley, et al., *Adat Dalam Politik Indonesia.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010).

[552]Maryanto Wahyu Tryatmoko,*op,cit*. hlm.75.

ekonomi. Daerah-daerah yang ditetapkan oleh pihak Kesultanan Ternate yakni Pulau Ternate atau daerah Halmahera Barat (Jailolo dan Sidangola) merupakan *aha kolano* (tanah Sultan), sehingga ketika ditetapkan menjadi ibukota propinsi, tentu mendatangkan sumber kemakmuran bagi rakyat yang berada daerah kekuasaanya. Begitu pula sebaliknya kelompok non kesultanan yang mengingingkan Tidore sebagai ibukota propinsi Maluku Utara memeliki motif yang sama pula yakni penguasaan basis ekonomi.[553]

Dari sinilah terbentuklah polarisasi kekuatan kelompok elite di Maluku Utara kedalam dua kubu. Kubu pertama adalah "Kubu Ternate" yang terdiri atas; Sultan Ternate Mudafar Sjah, Sultan Tidore Djafar Dano Yunus, Sultan Bacan Gahral Syah, dan Sultan Jailolo Mahmud Syah. Sedangkan kubu yang kedua adalah "Kubu non kesultanan" yang terdiri dari Sekwilda Maluku Utara Taib Armain, Bupati Maluku Utara Abdullah Asaggaf, Wali Kota Ternate Syamsir Andili, dan Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili.[554]

Pembentukan aliansi tersebut membuat perdebatan nama dan kedudukan propinsi yang berlarut-larut. Akhirnya mendorong Menteri Dalam Negari dan Otonomi Daerah Ryas Rasyid atas nama pemerintah pusat dan DPR-RI menetapkan UU. No. 46 tahun l999, tertanggal 27 Oktober 1999 tentang pemekaran Propinsi Maluku Utara dan menetapkan Sofifi (Halmahera Tengah) sebagai ibukotanya. Sehubungan dengan infrastrukur belum tersedia, maka untuk sementara waktu Ternate ditetapkan sebagai ibukota transisi Propinsi Maluku Utara.[555]

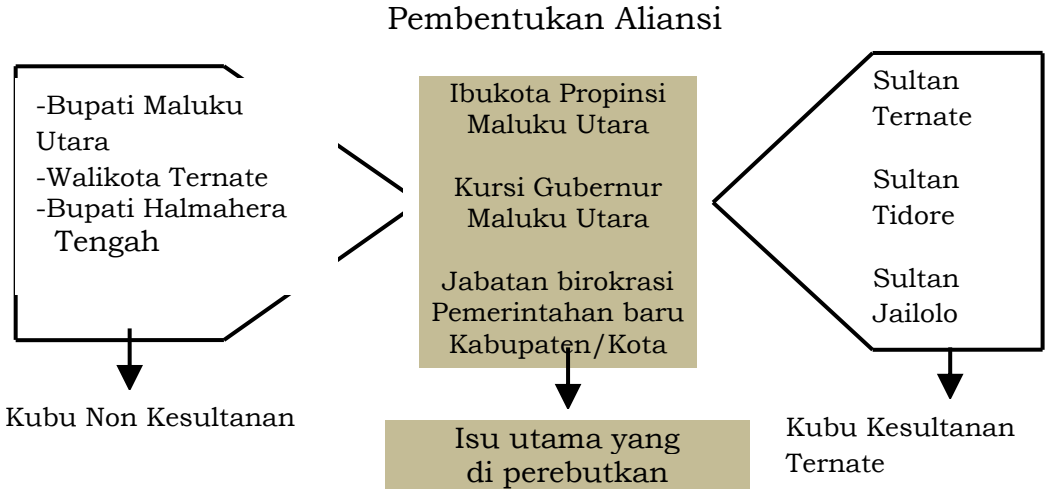

Penetapan Ternate sebagai ibukota transisi propinsi Maluku Utara. Maka dengan sendirinya perdebatan tentang nama dan kedudukan ibukota provinsi telah selesai. Seluruh komponen masyarakat Maluku Utara termasuk pihak non-

[553]*Tabloid, Parada*.Ternate, edisi 12, tanggal 19 Januari- 22 Pebruari 2000.
[554] Maryanto Wahyu Tryatmoko, *op.cit*. hlm 80.
[555]*Ternate Pos*. Ternate, tanggal 30 Oktober 1999.

kesultanan dapat menerima keputusan Pemerintah Pusat.Sementara itu, Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili, sekaligus tokoh non kesultanan mendapat tekanan dari masyarakatnya sendiri, karena gagal dalam mewujudkan ambisinya menjadikan Tidore sebagai ibukota propinsi. Masyarakat menekan Bupati Halmahera Tengah tersebut untuk mempertangungjawabkan dana daerah konon dipakai untuk mempromosilkan Tidore sebagai ibukota transisi Propinsi Maluku Utara.[556]

B. Pencalonan Sultan Mudafar Sjah Sebagai Gubernur Maluku Utara

Penerapan otonomi daerah telah membuat pergumulan politik lokal menarik untuk dicermati.Salah satu "produk" dari reformasi adalah pemekaran wilyah di Indonesia.Salah satu diantaranya pemekaran propinsi Maluku Utara (propinsi ke-27) berdasarkan UU No. 46 tahun l999. Kelahiran UU tersebut juga dipandang merupakan peluang untuk mewujudkan aspirasi yang sempat terhambat akibat politik sentralistik rezim Orde Baru yaitu keinginan untuk memeliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat. Alasan utama adalah bahwa "putra daerah" selama periode pemerintahan Soeharto tidak pernah mendapat kesempatan untuk memimpin daerahnya.Gubernur dan Bupati selalu ditunjuk oleh pusat, sehingga kebijakan mereka tidak mengakar di kalangan masyarakat setempat.

Pengalaman historis itulah kemudian mendorong elite kesultanan mengambil bagian dalam "gerakan daerah" untuk menuntut Maluku Utara menjadi provinsi sendiri lepas dari Maluku. Ketika pemerintah pusat (Pemerintahan Habibie) merespon dengan lahirnya UU No. 46 1999, maka Sultan Ternate Mudafar Sjah tidak hanya menjadi simbol, tetapi mengingkan kekuasaan sebagai gubernur ada ditanganya. Kebangkitan elite Kesultanan Ternate pasca Orde Baru, menurut Gerry van Klinken dilatar belakangi beberapa hal, *pertama*, kebangkitan simbolik dari sebuah entitas yang pernah diruntuhkan dan dibiarkan hancur pada periode Orde Lama dan Orde Baru. Sejak Orde Lama hingga Orde Baru, elite Kesultanan Ternate tidak menjadi bagian penting dalam bidang pemerintahan (eksekutif) baik jabatan Bupati ataupun Gubernur.[557]

Padahal menurut Andaya, Sultan-sultan Ternate jauh sebelum kehadiran Kolonial Belanda pernah merepresentasikan hegomoni di seantero Maluku Utara.[558]Akan tetapi di akhir abad ke 19 Belanda secara bertahap menguasai mereka

---

[556]Maryanto Wahyu Tryatmoko, *op.cit.,* hlm. 85.

[557] Sejarah mencatat pasca kemerdekaan kekuasaan elite Kesultanan Ternate benar-benar diruntuhkan pemerintahan Soekarno di penghujung 1950-an. Pengasingan Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah ke Jakarta karena di tuduh berfaham federalis dan lahirnya UU Pokok Agraria 1960 tentang pembatasan tanah-tanah swapraja adalah represi atau ketidakadilan negara dizaman Orde Lama. Begitu pula di era pemerintahan Soeharto (Orde Baru).Salah satu jalan mencegah menguatnya kepemimpinan lokal adalah menjadian militer sebagai bagian untuk menjaga kelangsungan politik.Pada saat itulah yang menjadi Gubernur Maluku dan Bupati harus berlatarbelakang militer. Dominasi militer atas pemerintahan ini terlihat dari banyak orang dari militer dikaryakan pada jabatan-jabatan publik diberbagai bidang dan tingkatan. Lebih jelasnya lihat Gerry van Klinken, " Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian Dalam Politik Lokal" dalam David Henley, et al., *Adat Dalam Politik Indonesia.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

[558]Leonard Y. Andaya,*op.cit.*,hlm.61.

sehingga menjadi sekedar perantara dalam sistem pemerintahan, oleh Houben disebut sebagai pemerintahan tidak langsung atau *indirect rule*.[559]

Kedua, kebangkitannya secara individual dengan mengatasnamakan kesultanan sebagai kendaraan politiknya.Keinginan ini sebagai sebagai upaya membangkitkan kejayaan Kesultanan Ternate dan tetap berada pada posisinya sebagai pengenggam kekuasaan diranah lokal.*Ketiga,* tidak bisa dilepaskan dari keinginan kesultanan diberbagai daerah di Indonesia untuk lebih diakomodasi secara institusional kedalam panggung politik pemerintahan formal.*Keempat*, mereka dapat tampil dalam bentuk naiknya pamor dari lembaga-lembaga adat dalam kerangka regulasi UU No. 22 tahun 1999, dimana negara memberi pengakuan terhadap adanya hak asal-usul.[560]Pengakuan terhadap hak asal-usul ini, kemudian dimanfaatkan secara baik oleh Kesultanan Ternate untuk membangun kembali basis kekuasaannya atas klaim sejarah dan identitas budaya.

Dengan kapasitasnya sebagai Sultan Ternate, ketua DPRD Kabupaten Maluku Utara, dan Ketua DPD Golkar, mendorongnya mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara,[561] dalam hal ini ia mengatakan bahwa:

> "Pergualatan politik setelah pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan keikutsertaan Kesultanan Ternate dalam politik lokal telah menunjukan bahwa saya tidak hanya sekedar sultan.Kalau hanya sekedar sultan maka tidak banyak ikut memberikan andil dalam memakmurkan masyarakat.Sebagai Sultan Ternate harus berada dalam sistem (sebagai gubernur), sehingga dapat memberikan warna politik yang bepihak pada masyarakat. Keuntungan lain sebagai raja memasuki politik lokal akan menarik gerbong institusi kesultanan, sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengan adat istiadat dapat terlaksana. Terbukti ketika saya menjadi ketua Golkar pada pemilu 1998 banyak masyarakat adat terutama pejabat stuktural Kesultanan Ternate terpilih menjadi anggota DPRD, I dan II di Maluku Utara*"*[562]

Pemilihan Gubernur Maluku Utara yang direncanakan dilangsungkan pada Nopember 2000, merupakan pemilihan gubernur pertama dalam suasana multipartai, dimana partai-partai baru bermunculan setelah kejatuhan era Soeharto.Walaupun secara nasional suara Golkar mengalami penurunan, namun demikian bagi daerah Ternate hanya sedikit partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Ternate.Dapat dikatakan perolehan suara Golkar tetap pada posisi *single majority* dalam Pemilu 1999 sebagaimana pada pemilu-pemilu Orde Baru.Hal tersebut mengindikasikan

---

[559] Houben, V.J.H. *Keraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta,* 1830-1870. (Leiden: KITLV Press,1994), hlm. 71.

[560] Lihat Gerry van Klinken, *op.cit.*,, hlm. 168.

[561]Maryanto Wahyu Tryatmoko,*op,cit*., hlm. 86. Lihat R. Siti Zuhro, et,al. *Demokrasi Lokal Peran Aktor Dalam Demokratisasi.* (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 6-7.

[562]Muchdar Abdullah, " Kesultanan Ternate Dalam Ranah Politik" Tesis S2 Ilmu Politik, UGM,2006.hlm 113.

masih kuatnya dukungan rakyat terhadap Sultan Ternate tanpa terpengaruh dengan perubahan politik nasional.[563]

Berdasarkan hasil pemilu tahun 1999, Partai Golongan Karya (P-Golkar) unggul.Dengan 17 kursinya sehingga mendominasi DPRD Provinsi Maluku Utara yang keanggotaannya berjumlah 45.Di urutan kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), masing-masing dengan 7 (tujuh) kursi.Selain ketiga partai itu terdapat 8 (delapan) parpol lain yang ada di DPRD Provinsi, yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa (2 kursi), dan masing - masing 1 (satu) kursi yaitu: (1). Partai Amanat Nasional; (2). Partai Kebangkitan Bangsa); (3). Partai Demokrasi Indonesia-Budi Hardjono; (4). Partai Persatuan; (5). Partai Bulan Bintang; (6). Partai Keadilan; dan (7). Partai Krisna. Lihat tabel berikut:

Tabel 18
Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara
(Hasil Pemilu 1999)

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Golkar	17
2	PDI-P	7
3	PPP	7
4	Fraksi-TNI/Polri	5
5	PAN	1
6	PKB	1
7	Partai Demokrasi Indonesia	1
8	Partai Persatuan	1
9	Partai Bulan Bintang	1
10	Partai Keadilan	1
11	Partai Krisna	1
12	Partai Demokrasi Kasih bangsa	1
13	Fraksi Gabungan	1
	JUMLAH	45

Sumber: Muchtar Nurhasim, *et. al*, *Konflik Antar Elit Lokal dalam Pemelihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah*. (Jakarta: LIPI, 2003).

[563]Tabloid *Parada*, edisi 5, tanggal 9 Juni-27 Juli 2009.

Melalui penerapan otonomi daerah maka DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang legitimasi politik dan yuridis formal untuk melakukan pemilihan kepala daerah. Di balik itu ada harapan agar dalam pelaksanaan wewenangnya maka DPRD akan dapat memilih kepala daerah yang benar sesuai dengan aspirasi rakyat daerah. Berdasarkan peraturan tata tertib pemilihan dan pengesahan Gubernur dan Wakil kepala daerah Provinsi Maluku Utara Nomor: 167.02/31/DPRD/MU/2000, yang mengacu UU No. 46 tahun 99 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara dan peraturan No.151 tahun 2000. Maka DPRD Propinsi Maluku Utara menetapkan ada 8 (delapan) tahap proses pemilihan terdiri dari; (1). Pengumuman pendaftaran. (2). Pendaftaran bakan calon. (3). Penyaringan bakal calon. (4). Penetapan pasangan calon. (5). Konsultasi nama-nama calon oleh DPRD kepada Presiden RI (melalui Menteri Dalam Negeri). (6). Pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil. (7). Pengesahan pasangan Gubernur dan Wakil Kepala Daerah oleh panitia pemilihan. (8). Pelantikan.[564]

Sebelum proses penjaringan pasangan bakal calon dimulai tahun 2000, masing-masing partai telah melakukan proses penjaringan didalam mencari figur masing-masing.[565]Di internal partai Golkar terdapat dua figur yakni Abdul Gafur dan Sultan Mudafar Sjah. Dari awal pengajuan nama bakal calon gubernur iklim persaingan sudah terasa. Abdul Gafur yang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dan mantan ketua DPP Golkar, dan kedekatan emosional para petinggi Golkar seperti Akbar Tanjung sebagai ketua DPP Golkar DPP Golkar diprediksi Abdul Gafurmemenangkan persaingan tersebut. Keputusan akhir dari DPP Golkar menunjuk nama Abdul Gafur dan Yamin Tawary (anggota DPR Pusat dari Golkar) dalam rekomendasinya tertanggal 22 Desember 1999 yang harus diperjuangkan oleh Golkar sebagai calon Gubernur. Keputusan DPP Golkar ini menyebabkan kubu Sultan Mudafar Sjah kecewa.[566]

---

[564] Muchtar Nurhasim, *et. al, Konflik Antar Elit Lokal dalam Pemelihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah*. (Jakarta: LIPI, 2003), hlm. 99-100.

[565] Menurut PP No. 151 tahun 2000 setiap fraksi berhak menetapkan maksimal dua pasangan bakal calon. Nama-nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan dengan SK DPRD dikonsultasikan kepada Presiden yang didelegasikan kepada Mendagri.Rusdi J. Abbbas, *Demokrasi di Aras Lokal Praktek Politik Elite Lokal di Maluku Utara.*Yogyakarta: Cerah Media, 2012.

[566]Tidak terakomodirnya Sultan Ternate sebagai calon gubernur oleh partai Golkar, menurut beberapa narasumber ibarat kata pepatah "makan Kacang lupa kulitnya". Pada awal Orde Baru Kesultanan Ternate telah mendukung Partai Golkar pada pemilu 1971, sehingga mengantarkan Sultan Mudafar Syah menjadi anggota DPRD II Kabupaten Maluku Utara 1971-1977 dan anggota DPR/MPR RI pada tahun 1978-1988. Dengan dukungan Kesultanan Ternate ke Golkar menjelma menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Peranan Golkar sebagai kekuatan mayoritas tunggal dalam kancah perpolitikan dan pembangunan di Ternate dapat dilihat dari setiap pemilu Golkar selalu mendominasi perolehan suara terbanyak atau pemang atas partai politik lainya.Kemenangan Golongan Karya di Ternate karena mendapat dukungan pihak Kesultanan Ternate yang basis massanya hampir tersebar sebagian besar penduduk di Kabupaten Maluku Utara. Lebih jelasnya lihat Nurhasim Muchtar, *et. al, Konflik Antar Elit Lokal dalam Pemelihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah*. Jakarta: LIPI, 2003.

Intervensi dewan pimpinan pusat (DPP), Golkar dalam mendudukan atau sebaliknya, menggusur, seseorang untuk menjadi bakal cagub/cawagub.Tampaknya cukup kuat pengaruhnya dalam kasus kegagalan Sultan Mudafar Sjahsebagai calon Gubernur Maluku Utara dari partai Golkar.Menurut ketentuan UU No. 22 tahun 1999, gubernur adalah pegawai pusat dan sekaligus daerah.Dalam menjalangkan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertangungjawab kepada DPRD propinsi.Namun dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah gubernur berada dibawah dan bertangungjawab kepada presiden.[567]Posisi gubernur yang dualistik (sebagai alat Pemerintah Pusat sekaligus alat Daerah), memungkinkan Presiden dan Menteri dalam Negeri untuk melakukan intervensi dalam tahap konsultasi oleh DPRD Provinsi, mengenai bakal calon.

Merasa terzalimi dan tidak diakomodir oleh partai Golkar dalam pencalonan dirinya sebagai Gubernur Maluku Utara. Sebagai Sultan Ternate dan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Utara,ia memerintahkan kepada semua masyarakat adat dan elemen yang bernaung di bawah Partai Golkar, untuk mengundurkan diri. Pada tanggal 24 Desember 1999, Sultan Mudafar Sjah menyatakan sikap resmi keluar dari Partai Golkar. Keluarnya Sultan dari partai Golkar ditandai dengan pembakaran sejumlah atribut partai seperti; bendera, kaos, topi maupun atribut lain yang dipusatkan di *kadaton* Ternate.[568]

Tidak terakomodirnya Sultan Mudafar Sjah dari DPP Partai Golkar dalam pencalonannya sebagai Gubernur Maluku Utara, selain intervensi pusat, adalah ia termasuk orang Golkar yang punya kedekatan dengan rezim Orde Baru. Apalagi pada masa itu, reformasi masih dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah gerakan "peninjauan" atas kekuasaan Orde Baru.Selain itu juga dipengaruhi "ketakuatan" kembali berkuasanya kekuasaan tradisional di panggung politik formal. Tak heran nuansa penolakan juga dihubungkan tentang masa lalu "cacat historis" para sultan Ternate, pada awal kemerdekaan telah mendukung pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS) dan tidak punya integritas terhadap negara kesatuan RI. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat Maluku Utara menilai Sultan Mudafar Syah sebagai tokoh antagonis.[569]

---

[567] Lebih jelasnya lihat Agung Djojosoekarto dan Utama Sandaya, (ed), *Transformasi Demokrasi Partai Politik di Indonesia: Model Strategi dan Praktek.*(Jakarta: Kemitraaan, 2008), hlm 34-35.

[568]Bagi masyarakat Ternate, Sultan Mudafar Syah dipandang sebagai tokoh yang menyelamatkan dan memberi kesejahtraan bagi masyarakat, yang selama ini rakyat merasa tidak puas dengan kepemimpinan selain Sultan, dengan slogan *jou kasa ngom kage* (dimana sultan berada di situlah kami). Hal ini terbukti ketika sultan gagal mencalongkan dirinya sebagai gubernur maka seluruh masyarakat melakukan tindakan-tindakan anarkis sebagai bentuk protes. Hasil Wawancara dengan sejumlah narasumber pada 2014.

[569] Sejak terpilihnya Mudafar Sjah menjadi ketua Golkar DPRD tahun 1999, terjadi hubungan tidak harmonis antara Mudafar Sjah dan Bupati Maluku Utara Abdullah Assagaf. Ketidak harmonisan ini dilatarbelakangi sentiment etnisitas.Puncak kebencian rakyat Ternate terhadap Bupati Abdullah Asagaf ketika diisukan tidak memberikan sumbangan apa-apa dalam upacara pelantikan *jogugu* (perdana menteri) Kesultanan Ternate. Akhirnya pasukan adat melakukan demostrasi pada tanggal 29 Juni 1999 dengan merusak kantor Bupati Maluku Utara. Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Pustaka Utama, 2000.

Sejak pengunduran dirinya dari ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Utara. Pada saat yang sama, pasukan keamanan kesultanan (Gemusba), membuat kekacauan dengan menyerang beberapa perkampungan di bagian Ternate Selatan yang dianggap bertangungjawab atas tidak terakomodirnya Sultan Mudafar Sjahsebagai calon gubernur. Akibat konflik tersebut Sultan dan keluarganya terpaksa mengungsi ke Manado, sehingga jabatannya sebagai Ketua DPRD Maluku Utara di copot.[570] (mengenai konflik Maluku Utara akan dijelaskan kemudian).

Pada tahun 2001 Sultan Ternate Mudafar Sjah, telah kembali dari tempat pengungsiannya ke Ternate. Tujuannya dapat mengikuti perkembangan pemilihan kepala daerah pertama kali di Maluku Utara.Sejak kehadirannya di Ternate, DPRD Maluku Utara telah dua kali melakukan pemilihan Gubernur Maluku Utara. Dalam pemilihanpada tanggal 5 Juli 2001 dimenangkan oleh Abdul Gafur dan Yamin Tawari, namun kemenangannya di anulir karena di duga melakukan politik uang (*money politik)*. Di samping itu pencalonan Abdul Gafur sebagai calon Gubernur Maluku Utara tidak mendapat restu dari pemerintahan Megawati.[571]Tidak adanya dukungan dukungan politik Presiden Megawati merupakan faktor determinan yang mengakibatkan dibatalkannya kemenangan Abdul Gafur dan Yamin Tawari sebagai pasangan Gubernurdan Wakil Gubernur Maluku Utara.[572]

Begitupula dalam pemilihan tahap II, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2001.Pemilihan tahap II itu, hanya diikuti dua paket, yaitu; pasangan pertama Arifin Raimadoya dan Amin Drakel yang diusung oleh Fraksi PDI-P. Pasangan kedua Thaib Armaiyn dan Yamin Waisale yang diusulkan oleh fraksi Reformasi. Pemilihan ulang ini akhirnya dimenangkan oleh Thaib Armaiyn dan Yamin Waisale sebagai gubernur dan wakil gubernur. Akan tetapi kemenangan Thaib Armaiyn dan Yamin Waisale dalam pemelihan tersebut, dibatalkan atau di tolak oleh Mendagri karena berlangsung tanpa izin dari pemerintah pusat.[573]

Sebagai tindak lanjut atas gagalnya pemilihan tahap II pada tanggal 7 Maret 2002.DPRD Maluku Utara untuk ketiga kalinya melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 28 Oktober 2002.Pada pemilihan tahap III ini, Sultan

.

[570]Alasan pencopotannya sebagai ketua DPRD Maluku Utara, selain di tuduh sebagai tokoh utama penyebab terjadinya kerusuhan kuning-putih di Ternate, adalah lalai dari tugasnya kerena tidak pernah menjalangkan kewajibannya sebagai ketua DPRD selama dua tahun.Lebih jelasnya lihat Patrick Barron, et,al, *Seusai Perang Komunal: Memahami Kekerasan Pasca-Konflik di Indonesia Timur dan Upaya Penanganannya.* Yogyakarta: CSPS Books, 2012.

[571] Masa lalu Abdul Gafur yang tidak bersahabat dengan keluarga Presiden Soekarno, berunjung pada tidak dilantiknya Abdul Gafur sebagai Gubernur Maluku Utara dengan menciptakan skenario keterlibatannya dalam politik uang (*money politik*). Kekalahannya sebagai Gubernur Maluku Utara bukan hanya pada periode 2001-2002, akan tetapi dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara periode 2007-2008 juga mengalami hal yang sama. Lebih jelasnya lihat Nurhasim Muchtar, *et. al, Konflik Antar Elit Lokal dalam Pemelihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah*. Jakarta: LIPI, 2003.

[572] Muchtar Nurhasim, *et. al*,hlm. 97.

[573]Rusdi J. Abbbas, *Demokrasi di Aras Lokal Praktek Politik Elite Lokal di Maluku Utara.*Yogyakarta: Cerah Media, 2012.hlm. 113.

Mudafar Sjah tampil kembali mencalonkan dirinya sebagai Wakil Gubernur melalui fraksi PPP berpasangan dengan Abdul Gafur. (lihat tabel 18). Pencalonan Abdul Gafur dan Mudafar Sjah dalam daftar calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah disetujui oleh semua fraksi di DPRD Maluku Utara, terkecuali fraksi Golkar telah menyatakan sikap politik tidak akan mengikuti pemilihan ulang sebelum ada keputusan dari presiden mengenai penyelesaian kasus kemenganan Abdul Gafur pada pemilihan pertama.[574]

Tabel 19
Nama-nama Pendaftar Calon Gubernur /Wakil Gubernur Maluku Utara Juli 2001

No.	Nama Calon	Posisi Gubernur	Posisi Wakil
1	dr. H. Muhammad Amin Drakel SPOAG, MBA, MM		V
2	Drs. Hi. Bunyamin A. Gafur	V	
3	Drs. Yusuf Wahid Siokona	V	
4	Ir. Muhammad Iqbal Amin		V
5	Drs. H. Fabanyo	V	
6	H.A. Rachman Sulaiman, SH, MBA	V	
7	Drs. M. Yamin Waisale		V
8	Brigjen (Purn.) Hi, Abdullah Assagaf	V	
9	KH Hasan Kiat	V	V
10	Drs. Hi. Thaib Armayin	V	
11	Drs. Said Syafaat Adam	V	
12	Hi. Rusdi Hanafi	V	V
13	Prof. Drs. Hi. Madjid Abdullah, SH, SE, MBA		V
14	Prof. Drs. Hi. Jasin Muhammad	V	
15	Hi. M. Halim Soamole, SH	V	
16	Drs. Hi. A. B. Andili	V	
17	Mayjen (Purn.) Soetopo	V	
18	dr. Abdul Gafur	V	
19	Hi. Hasan Ibrahim	V	
20	Prof. Dr. Ir. Arifin Raimadoya	V	
21	Herry RD Nachrawi	V	
22	Ir. D.H. Djaafar	V	
23	Drs. Muh. Yamin Tawari		V
24	Sunardi	V	V
25	Ir. Zainuddin Umasangaji		V

[574] Muchtar Nurhasim, *et. al*,hlm. 101-102.

No.	Nama Calon	Posisi Gubernur	Posisi Wakil
26	Ridwan Hadji	V	
27	Drs. Abubakar Karim	V	
28	Drs. Jhony Alwi Banyo	V	
29	Drs. H. Abidin Ali	V	
30	Drs. H. Mudafar Sjah		V

Sumber: Muchtar Nurhasim, *et. al,* hlm. 123.

Walaupun pencalonan Abdul Gafur dan Mudafar Sjah telah disetujui semua fraksi di DPRD Maluku Utara.Namun kedua pasangan itu ditolak oleh Mendagri karena tidak memenuhi persyaratan adiministrif.Pada hal pada pemilihan pertama (5 Juli 2001), fraksi PPP dapat mencalongkan Abdul Bahar Andili dan Rusdi Hanafi dan memperoleh 5 suara.[575]Pencoretan nama Abdul Gafur dan Mudafar Syah oleh Mendagri sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam pemilihan tersebut. Sebagai tokoh masyarakat Maluku Utara dan juga Sultan Ternate, Mudafar Sjah mengaku kecewa terhadap Menteri Dalam Negeri yang mencoret namanya untuk dipasangkan dengan Abdul Gafur. Berkaitan dengan hal tersebut maka ia mengatakan:

> *"*Saya kecewa dan sedih melihat cara-cara pemerintah pusat dan Menteri Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi dan DPRD Maluku Utara dalam menangani proses pemilihan calon Gubernur dan wakil Gubernur. Pejabat yang mengatur negara ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpendidikan. Namun Kebijakannya seperti hasil pekerjaan seorang tukang becak dan tidak ada kepastian kebijakan yang ditempuh Pemerintah Pusat dalam menangani proses pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, dimana mereka itu punya slogan mengenai penegakan hukum dan kepastian hukum? Sebagai Sultan Ternate hubungan saya dengan rakyat sangat erat, bukan hanya nama tetapi historis dan emosional. Saya sedih rakyat Maluku Utara diombang-ambingkan, pembangunan juga tidak jalan.Berdasarkan kenyataan seperti yang sedang terjadi di Maluku Utara, selama beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah terbukti tidak tegas dan tidak konsistennya pemerintah atas pelanggaran hukum*".*[576]

Pencoretan nama Abdul Gafur dan Mudafar Sjah oleh Mendagri diprotes oleh Wakil Presiden Hamzah Haz (Ketua umum DPP PPP). Ia meminta agar pemilihan ditunda sebelum Mendagri mencantum nama Abdul Gafur dan Mudafar Sjah diikutsertakan dalam pemilihan.[577] Di saat yang sama, beberapa ormas yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Angkatan Muda Ka'bah (AMK), dan Wanita Persatuan Maluku Utara, mendaftarkan gugatan ke PTUN.[578] Berdasarkan penetapan PTUN Jakarta No. 169/G.TUN/2002/PTUN-JKT, memerintahan kepada

[575] Rusdi J. Abbbas, *op.cit.,* hlm.84.
[576]Muchtar Nurhasim, *et. al*,hlm. 116
[577] Rusdi J. Abbbas,*op.cit.,* hlm. 54-55.
[578]" Muchtar Nurhasim, *et. al*,hlm. 128

tergugat (Mendagri), untuk menunda pelaksanaan pemilihan lebih lanjut tentang penetapan nama pasangan calon gubernur/wakil gubernur dengan tidak melakukan tindakan adiministrasi lainnya yang merugikan pengugat (Abdul Gafur dan Mudafar Sjah), selama perkara ini berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu, meminta agar pemilihan ditunda sesuai perintah PTUN di Jakarta hingga semua calon yang diajukan ke DPRD dan Mendagri harus mencantumkan nama Abdul Gafur dan Mudafar Sjah.[579]

Walaupun ada ketidakpuasaan sebagaian elite dan masyarakat, pemilihan tahap III pada tanggal 28 Oktober 2002 tetap dilakukan.Setelah melalui tahapan-tahapan pembentukan panitia pemilihan hingga penetapan pasangan bakal calon. Dari 30 kontestan yang mencalongkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara hanya tiga bakal calon yang ditetapkan oleh Mendagri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara berdasarkan surat Mendagri No. 121.17/2360/2002 yaitu pasangan Thaib Armain-Yamin Tawary, Sudjud Sirajuddin-Madjid Abdullah, dan Taib Armain-MAdjid Abdullah[580]. Dalam pemilihan tersebut Thaib Armaiyn dan Madjid Abdullah (Fraksi PDIP) memenangkan pemilihan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pertama.

Tabel 20
Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2002

No	Nama Cagub/Wagub	Jumlah Suara
1	Thaib Armaiyn dan Yamin Tawary	15
2	Sudjud Sirajuddin-Madjid Abdullah	1
3	Thaib Armaiyn dan Madjid Abdullah	22
	Cacat abstain	4
	Jumlah suara	42

Sumber: Sekwan DPRD Maluku Utara 2002.

Kemenangan tersebut selain didukung oleh DPRD Maluku Utara adalah atas restu pemerintah pusat (Presiden Megawati), kemudian disahkan oleh DPRD pada tanggal 1 Nopember 2002.Dan ahirnya terpilihlah paket yang didukung oleh Jakarta (yang kebutulan juga di kehendaki sebagian besar oleh sebagian besar masyarakat di Maluku Utara) untuk menempati posisi gubernur dan wakil gubernur di propinsi Maluku Utara.[581]Kemengangan Taib Armain sebagai gubernur Maluku Utara selain kedekatan dengan partai penguasa (*the ruling party*) dan restu dari pemerintah pusat (Presiden Megawati), adalah faktor kedaeraan atau lokalitas dan unsur-unsur primordial lainya tampaknya juga cukup *powerful* sebagai analisis untuk menjelaskan kemenangan Taib Armain.[582]Penerimaan (akseptabilitas) publik

[579] *Ibid.,* hlm. 130

[580]"30 Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara", dalam *Ternate Pos.* Ternate, 22 Oktober 2002.

[581]"Masyarakat Maluku Utara mendukung Taib Armain Menjadi Gubernur Maluku Utara", dalam *Ternate Pos*. Ternate, 29 Nopember 2002.

[582] Rusdi J. Abbbas,*op.cit.,* hlm. 74-75.

terhadap gubernur dan wakil gubernur terpilih(Taib Armain dan Madjid Abdullah) adalah karena faktor ke daeraan (putra daerah).[583] (mengenai politik etnisitas akan dijelaskan selanjutnya). Dengan terpilihnya pasangan Thaib Armaiyn dan Madjid Abdullah (non kesultanan), maka berakhirlah keinginan Sultan Ternate Mudafar Sjah untuk diakomodasikan secara institusional dalam panggung politik pemerintahan formal di Maluku Utara.

Gagalnya Sultan Mudafar Sjah dalam pencalonannya sebagai Gubernur Maluku Utara ternyata tidak menyurutkan untuk berkiprah dalam pentas politik.Kekecewaannya terhadap Golkar, kemudiaan diarahkan untuk mendukung dan bergabung dengan partai Demokrasi kebangsaan (PDK) sebagai penasehat Wilayah Provinsi Maluku Utara pada 24 Desember 2002.[584] Dalam hal ini dia mengatakan:

> Pemilu 2004 lalu, saya memposisikan diri sebagai penasehat Partai PDK Provinsi Maluku Utara.Saya mencalongkan sebagai anggota DPR-RI, dan akhirnya saya terpilih. Begitu pula beberapa bangsawan dan keluarga saya mereka berhasil meraih suara yang signifikan, yakni 9 kursi DPRD Kota Ternate dan 5 kursi di DPRD Provinsi. Dengan demikian keberhasilan ini menjadi ukuran kedepan, bahwa saya akan mencalonkan diri sebagai Gubernur pada pemilihan yang akan datang tinggal mencari pasangan yang cocok. Pasangan yang cocoĸ untuĸ partner saya adalah seorang birokrat tulen, yang memahami betul sistem keuangan dan pelaksanaanya sehingga tidak akan terjadi penyelewengan seperti sekarang dengan maraknya praktek KKN dihampir di berbagai daerah.[585]

Di pakainya PDK sebagai mesin politiknya yang baru, ternyata membuahkan hasil sebagai pemenang kedua Pemilu legislatif 2004 di Kota Ternate. Melalui pertai inilah kemudian mengantarkannya menjadi anggota DPR-RI periode 2004-2009, dan Permaisurinya Nita Budi Susanti sebagai anggota DPD mewakili Maluku Utara dan sejumlah bangsawan menjadi anggota Legislatif tingkat I dan II. (lihat tabel 20).

Tabel 20

Nama-nama pejabat Kesultanan Ternate yang menjadi anggota legislatif 2004-2009

[583]Mengenai kemenangan Taib Armain tidak hanya disambut gembira oleh masyarakat pendukungnya. Beberapa surat kabar yang berafiliasi atau berpihak pada Taib Armian selalu memberitakan kemengana Taib Armayin. Misalnya Koran Cermin Reformasi 3 Nopember 2002 dengan tajuk utama " Pokoknya Taib Armain Saja Yang Lain Tarada. Begitu pula media massa lainya seperti Sineter dan Dodia, semuanya mengulas kemenangan Taib Armaiyn sebagai Gubernur pertama Maluku Utara.

[584]"Deklarasi dan Pelantikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Maluku Utara", dalam *Tabloid Parada.*Ternate, edisi 21, tanggal 20 Januari- 02 Pebruari 2003.

[585]Nurhasim Muchtar, *et. al, Konflik Antar Elit Lokal dalam Pemelihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah*. Jakarta: LIPI, 2003.

.

No	N a m a	Jabatan dalam Kesultanan Ternate	Jabatan Legislatif
1	Mudafar Sjah	Sultan	Anggota DPR RI
2	Nita Budi Susanti	Permaisuri	Anggota DPD RI
3	Hidayat M.Syah	Pangeran	Anggota DPRD Kota Ternate
4	Talabudin Yusuf	Hukum Sangaji	Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara
5	Boy Anggrek	Kapita Lao (panglima perang)	Anggota DPRD Kota Ternate
6	Ismunandar Syah	Bangsawan	Wakil Ketua DPRD Kota Ternate
7	Abdullah Taher	Bangsawan	Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara
8	Arifin Djafar	Bangsawan	Wakil Wali Kota Ternate
9	Muchdar Mustafa	Perdana Menteri	Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara
10	Iksir Baay	Bangsawan	Anggota DPRD Kota Ternate
11	Said Tamhir	Bangsawan	Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara
12	Zulkamaen Soleman	Bangsawan	Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara
13	Mahmud Syah	Bangsawan	Anggota DPRD Kota Ternate
14	Djafar Dano Yunus	Bangsawan	Anggota DPRD Kota Ternate

Sumber*:* Muchdar Abdullah, " Kesultanan Ternate Dalam Ranah Politik" Tesis S2 Ilmu Politik, UGM,2006.

Dalam membangun kembali hegomoni politiknya strategi yang digunakan tidak hanya melalui partai politik, akan tetapi juga lewat penguatan politik kebudayaan atau melakukan perluasan jaringan kekerabatan dengan memberikan gelar kehormatan pada pejabat atau mantan pejabat baik pusat maupun daerah.[586]Selain melakukan perluasan jaringan kekerabatan dengan memberikan gelar kehormatan pada pejabat atau mantan pejabat baik pusat maupun daerah adalah

[586] Pada tanggal 10 Agustus 2002, Akbar Tanjung pada saat itu sebagai ketua DPR RI melakukan kunjungan kerja di Ternate, pihak Kesultanan Ternate melantik Akbar Tanjung sebagai *Kapita Korois* (Panglima Perang) Kesultanan Ternate dengan surat keputusan *Kolano Moloku Kie Raha* No. 33./SKEP/MKR/VII/2002. Lebih jelasnya Lihat " Akbar Tanjung *U Dadi Kapita Korois*", dalam *Tabloid Parada.*Ternate, edisi 09, 29 Juli-11 Agustus 2002.

perluasan pengaruh melalui forum-forum keraton se Nusantara (FKKN). Perluasan pengaruh melalui aliansi keraton se-Nusantara merupakan cara keraton untuk memperkuat posisi tawar keraton untuk berhadapan dengan negara.

Salah satu agenda yang dimiliki oleh oleh aliansi tersebut adalah kejelasan tanah-tanah bekas swapraja yang diambil alih oleh negara pada pemerintahan Soekarno. Misalnya Pada forum Komunikasi Keraton-Keraton se Indonesia (FKKKI) III di Kutai Kalimantan Timur, tahun 2002, Sultan Ternate Mudafar Sjah mengeluarkan pernyataanya membangkitkan kembali kerajaan-kerajaan yang tanah adatnya diambil oleh negara, dengan mengatakan.

> "Kami para sultan dan raja memeliki konsesi atas hutan, tambang dan lain sebagainya karena semua itu adalah hak tradisional kami. Sekarang setelah merdeka, para sultan secara ironis telah dirampok habis hak-hak mereka.Para sultan dimiskinkan, sementara konglomerat bertambah kaya. Saat kami kembali kerumah masing-masing, kami akan berjuang menuntut hak-hak yang telah dirampas pemerintah"[587]

Atas nama adat inilah sultan Ternate disatu sisi menegaskan adanya ketidakadilan di masa lalu yang harus dibereskan, disisi lain sebagai jalan untuk mengamankan posisi-posisi yang menguntungkan dalam perebutan kekuasaan di daerah pasca Soeharto. Forum komunikasi keraton dijadikan sebagai wadah menentang pemerintah dengan jumlah tuntutan yang keras, termasuk pengembalian seluruh tanah adat kepada komunitas masyarakat adat dan penghapusan organ-organ Orde Baru di tingkat pemerintahan desa.Dalam forum itulah Sultan Ternate Mudafar Sjah, terpilih sebagai ketua umum Forum Komunikaasi dan Informasi Keraton se Nusantara.[588]

C. Konflik Maluku Utara: Konflik SARA atau Konflik Elite Politik

Tujuan uraian ini bukanlah untuk memberikan gambaran mengenai setiap proses konflik yang terjadi di Maluku Utara pada tahun 1999-2000. Namun uraian ini menganalisis peran elite politik yang berkonflik diduga turut serta "mendasari" konflik massa dalam usaha memperebutkan kekuasaan politik maupun ekonomi.

Konflik antar warga yang terjadi Maluku dan Maluku Utara di tahun 1999-2000 menyita perhatian banyak pihak baik dari dalam maupun dari luar negeri.[589] Maluku Utara adalah salah satu salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai daerah multietnik. Maluku Utara diperkirakan terdapat 253 pulau, 47 etnik dengan 48 bahasa. Sebagai propinsi yang multietnis, tidak hanya bentuk fisik melainkan juga sistem religi, hukum, arsitektur, obat-obatan, makanan,

---

[587] David Henley, et al,*op.cit.*, hlm. 166-167.

[588] "Empat Sultan *Moloku Kie Raha* bertemu di Kutai Kartanegara", dalam *Tabloid Parada.* Ternate, edisi 14, 28 Oktober-10 Nopember 2002.

[589] Mengenai Konflik Maluku Utara lihat lihat Tamrin Amal Tamagola. *Halmahera Berdarah, Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu*. (Jakarta, LIPI, 2004. Lihat John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban.* (Jakarta: Yayasan Obor Indoensia, 2004). Baca juga Tri Ratnawati, *Maluku Dalam Catatan Seorang Peneliti.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006).

dan kesenian. Dengan keragaman itulah Leonardo Andaya menyebut Maluku adalah sebuah "dunia" tersendiri.[590] Jika keragaman itu tidak dikelola dengan baik, konflik akan mudah pecah. Menurut John Naisbitt dan Alfin Toffler bahwa menguatnya kesadaran etnik *(ethnic consciousnes)* sebagai perlawanan terhadap dominasi negara ataupun kelompok-kelompok etnik lain[591]. Oleh karena itu berbagai peristiwa pada dua dasawarsa terkahir abad ke-21, bermula dari sentimen ideologis kemudian berubah menjadi sentimen agama dan budaya, oleh Samuel Huntington menyebut sebagai perbenturan peradaban *"clash of civilization*.[592]

Salah satu upaya untuk lebih mengefektifkan pemerintahan daerah adalah dengan pemekaran wilayah.Tujuan pemekaran wilayah sebenarnya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.Namun upaya ini sering digunakan oleh birokrat atau politisi lokal sebagai lahan pembagian kekuasaan antar mereka. Hal tersebut mengakibatkan konflik dalam perebutan jabatan-jabatan politik seperti gubernur, bupati dan walikota sering kali tidak bisa dihindari.[593]

Setelah Maluku Utara dimekarkan menjadi propinsi tersendiri berdasarkan UU No. 46 tahun 1999. Persaingan antara elite lokal dalam memperebutkan kursi gubernur Maluku Utara semakin meruncing. Partisipasi dan kontestasi dalam memperebutkan jabatan publik tersebut diwarnai dengan pembentukan aliansi dengan pengunaan kekuatan-kekuatan feodal.

Hal inilah menyebabkan terjadinya polarisasi[594] kekuatan ke dalam dua kubu di Maluku Utara. Kubu pertama kubu Kesultanan Ternate yang terdiri dari Sultan Ternate Mudafar Sjah dan didukung oleh masyarakat Ternate, dewan adat, Kesultanan Jailolo, masyarakat Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan komunitas Kristen. Sementara kelompok kedua kubu non-kesultanan, yang terdiri dari; Sekwilda Taib Armayn, Wali Kota Ternate Syamsir Andili, Bupati Maluku Utara Abdullah Assagaf, Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili, serta didukung oleh

---

[590] Mengenai Maluku lihat Leonardo Andaya, *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993.dan lihat W.R. van Hoevell, *Sejarah Kepulaun Maluku: Kisah Kedatangan Orang Eropa Hingga Monopoli Perdagangan Rempah.* (Yogyakarta: Ombak, 2014), dan mengenai etnis, bahasa dan pola persebarannya lihat Masinambaw E.K.M. (Ed.) *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk. Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi* (Jakarta: LEKNAS-LIPI,1980).

[591] John Naisbitt dan Alfin Toffler, dikutip dalam Harold R. Issacs, *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnik*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia), hlm. 92.

[592] Samuel Hutington, *The Clash of Civilasation and the Remaking of World Order*. (New York : Simon and Schuter, 1997), hlm. 62.

[593] Mengenai Konflik Maluku Utara, lihat Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia.* Jakarta: KITLV, 2007. Dan lihat Patrick Barron, et,al, *Seusai Perang Komunal: Memahami Kekerasan Pasca-Konflik di Indonesia Timur dan Upaya Penanganannya.* Yogyakarta: CSPS Books, 2012.

[594] Pembentukan aliansi elite tersebut menggunakan basis kultural yang mereka miliki. Basis ini kadang lebih menyangkut pada kesamaan etnis atau ras, suku, maupun adat (indentitas lokal). Kesamaan indentitas lokal inilah yang kemudian menjadi kekuatan dari setiap elite untuk menyelimuti kepentingan terselubungnya, sehingga mereka banyak memunculkan atau menggunakan simbol-simbol budaya. Indentitas kultural memang semakin mendapat tempat pada konteks demokrasi lokal pasca-runtuhnya rezim Orde Baru yang sering disebut sebagai bagaian dari proses transisi. Untuk lebih jelasnya baca Maryanto Wahyu Tryatmoko, *op.cit.*,hlm. 80.

masyarakat Ternate Selatan yang berada di bawah pengaruh Kesultanan Tidore, Bacan, Sanana, Makian, dan Halmahera Selatan. Polarisasi itu bukan hanya dilatarbelakangi politik, tetapi juga berbasisikan pada persamaan etnis dan agama.

Penetapan Ternate sebagai ibukota transisi Maluku Utara, dimanfaatkan Sultan Ternate Mudafar Sjah untuk membangkitkan kembali peran politiknya yang masih eksis pasca Orde Baru untuk mengukuhkan kedudukan dengan mencari legitimasi peran sultan. Implikasi dari kebangkitan kesultanan tersebut, adalah upaya Sultan Mudafar Sjah mengfungsikan kembali instrumen kerajaan. Selain mengetuai Golkar Kabupaten Maluku Utara dan menjadi Ketua DPRD, Sultan Mudafar Sjahjuga punya ”kartu rahasia” yakni Generasi Muda Sultan Babullah, Gemusba mengambarkan dirinya sebagai pengamanan tradisional istana.[595]

Akibat pertikaian yang terjadi di Ambon dan konflik di Halmahera (Kao dan Malifut), pada tahun 1999. Sultan Ternate membentuk pam swakarsa (pasukan adat) dengan tujuan untuk pengamanan di wilayah Ternate. Pasukan pengamanan tersebut kemudian dinamakan ”pasukan kuning”.[596] Selain dimaksudkan sebagai penjaga keamanan adalah diharapkan mampu menarik simpati rakyat Ternate.

Selain motivasi tersebut, tampilnya Sultan Mudafar Sjah dipentas politik lokal diduga terkait dengan semakin meluasnya etnis Makian di Ternate, yang secara histroris memeliki hubungan yang tidak harmonis dengan Kesultanan Ternate. Bupati Maluku Utara, Abdulah Assagaf merupakan orang Makian yang selalu bersikap antagonis terhadap pihak Kesultanan Ternate. Beberapa kali Abdullah Assagaf memprofokasi rakyat Ternate untuk meningalkan tradisi dan kepercayaan adat terhadap Sultan Ternate yang terlalu berlebihan dan dianggapnya musrik.[597]Puncak kebencian rakyat Ternate terhadap Bupati Abdullah Assagaf ketika diisukan tidak memberikan sumbangan apa-apa dalam upacara pelantikan *jogugu* (perdana menteri) Kesultanan Ternate. Akibat sikap antagonis yang seringkali dilontarkan oleh Abdullah Assagaf menimbulkan kemaraham rakyat Ternate.Puncaknya pada 29 Juni 1997 para pendukung Sultan Ternate merusak dan membakar kantor Bupati.

Sebulan setelah status Propinsi Maluku Utara, diresmikan (4 Oktober 1999), pada tanggal 6 Nopember meletus konflik antara warga dua kecamatan bertetangga, Malifut dan Kao. Yang disebut pertama dihuni transmigran muslim dari Pulau Makian.[598] Sementara mayoritas warga Kao penduduk asli daerah itu

---

[595]Gemusba adalah salah satu organisasi politik untuk memobilisasi dukungan bagi sultan dalam masyarakat. Kenyataannya Gemusba bukanlah organisasi adat yang muncul dari akar rumput. Gemusba punya hubungan yang solid dengan Golkar dan Militer. Adalah Gemusba itu juga yang mengintimidasi rapat dan menunjuk Sultan Mudafar Syah sebagai ketua Golkar Maluku Utara pada 1998. Lihat Tabloid *Parada.*Ternate, edisi 3 tanggal 20- Desember-4 Januari 1999.

[596]Di sebut pasukan kuning, karena mereka memakai seragam kuning.Bagi masyarakat Ternate warna kuning merupakan simbol kejayaan Kesultanan Ternate dan merupakan warna kebangaan masyarakat Ternate.

[597]Maryanto Wahyu Tryatmoko, *op.cit.*, hlm. 81.

[598]Pada tahun 1973 pemerintah kabupaten Maluku Utara memindahkan etnis Makian (transmigrasi lokal) ke wilayah Kao (Halmahera Utara) akibat gunung Makian meletus. Dari sisi ekonomi masyarakat Kao khawatir jika orang-orang Makian yang notabene pendatang akan

menganut Protestan dan mereka merupakan konstituen Sultan Ternate. Dari sudut pandang masyarakat Kao, pembentukan Kecamatan Makian Malifut yang ditetapkan dengan PP No. 42 1999 itu sebagai pencaplokan tuan tanah adat mereka.Wilayah Malifut adalah bagian dari tanah adat suku Kao yang dipinjamkan sementara kepada warga Makian yang mengungsi karena kekhawatiran meletusnya Gunung Kie Besi di Pulau Makian.

Sementara itu warga Makian yang dipindahkan ke wilayah yang bernama Malifut ini merasa sebagai tugas atau keputusan dari Pemerintah dan merasa berhak atas tanah yang mereka diami.[599]Benih pertentangan ini juga ditambah dengan kecemburuan orang Kao yang melihat orang-orang Makian lebih berhasil dalam penghidupan mereka baik sebagai wiraswasta, pegawai negeri dan pengisi jabatan birokrasi, hingga menjadi pegawai perusahaan Tambang Emas Nusa Halmahera Minerals (NHM).

Pada tanggal 16 Nopember 1999, Bupati Maluku Utara Abdullah Asaggaf kemudian meminta Sultan Mudafar Sjah menyertainya berkunjung ke wilayah Kao untuk berusaha menenangkan suasana. Sultan Mudafar Sjah, memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan agenda pembentukan koalisinya. Menurut orang-orang Kao setempat, dia mengucapkan kata-kata yang menyulut kemarahan dengan mengatakan ”saya punya anjing hitam (*kaso mahema*), dan sekarang ada yang membangunkannya dan berjanji membawa keprihatinan orang-orang Kao kepada Pemerintah Pusat”.[600]

---

menguasai sumberdaya alam ditanah moyangnya. Bahkan dataran Kao terdapat tambang emas.Bagi masyarakat Kao (penduduk asli), tambang emas dapat meningkatan pendapatan asli daerah. Disisi lain orang-orang Makian terlihat semakin menetap mengelola dan bahkan memberikan pengaruh budayanya di wilayah yang diklaim penduduk Kao sebagai tanah mereka. Ketegangan di kawasan ini memuncak ketika pada tanggal 26 Mei 1999 diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 1999 tentang pembentukan kecamatan Makian atau Malifut 16 desa pendatang suku Makian digabung dengan 5 desa asli suku Kao dan desa asli suku Jailolo. Pembentukan Kecamatan Malifut dengan mencaplok 5 desa Kao (Desa Sosol, Wangeotak, Gayok, Balisosang, dan Tabobo), ditolak oleh masyarakat kelima desa tersebut.Menurut mereka kelima desa tersebut telah terikat dalam satu sumpah leluhur yang bernaung dalam satu ikatan Soa yakni Soa Pagu, Boeng, Madole dan Kao yang merupakan kesatuan adat. Sehingga pembentukan kecamatan Malifut, dalam perspektif penduduk Kao akan menghilangkan hak ulayat adat mereka.Ketegangan makin memuncak pada bulan Nopember 1999. Akibat kerusuhan ini warga lima desa suku Kao yang dimasukkan ke wilayah kecamatan Malifut mengungsi ke Kao. Berita yang dibawa oleh warga kelima desa ini membuat marah suku Kao, sehingga mereka (yang Kristen maupun Islam) menyerang desa-desa orang Makian di Malifut pada tanggal 21 dan 25 Agustus 1999.Penyerangan ini menyebabkan sekitar 12.307warga Makian di Malifut mengungsi ke berbagai wilayah.Dalam kerusuhan ini setidaknya 26 orang tewas dan ratusan terluka. Sebanyak 16 desa mengalami kerusakan lebih dari 800 rumah hancur, termasuk fasilitas umum, seperti terminal, kantor kecamatan, dan pasar. Lihat pula Tamrin Amal Tamagola. *Halmahera Berdarah, Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu*. (Jakarta, LIPI, 2004), hlm. 45-46.

[599] Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia.* (Jakarta: KITLV, 2007), hlm. 184.

[600]Tamrin Amal Tamagola. *Halmahera Berdarah, Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu*. (Jakarta, LIPI, 2004), hlm. 21.

Dengan demikian dimata orang-orang Makian, Sultan Ternate telah menempatkan diri sebagai pendukung orang-orang Kao. Para aktivis anti Sultan Mudafar Sjah menggunakan momentum itu untuk memperluas jangkauan mereka. Mereka membangun aliansi dengan para aktivis muslim setempat dan secara krusial mereka mengubah pesan mereka dari etnik Makian menjadi antara agama Islam dan Kristen. Sejak saat itulah orang-orang Makian di Malifut mengeluh pada saudara sesuku mereka di Ternate bahwa mereka merasa diancam oleh orang-orang Kao. Dengan demikian etnis Makian di Ternate menanggapi peluang ini dengan antusias. Mereka memandang orang-orang Kao sebagai " antek Sultan Mudafar Sjah" dan berulang kali meminta kepala kepolisian Maluku Utara untuk melucuti senjata mereka.[601]

Konflik Kao-Malifut menciptakan 12.307 pengungsi Makian, Sultan Ternate mencegah mereka dibawa ke Ternate, kota kecil yang sudah dipenuhi oleh pengungsi Ambon. Namun, tokoh-tokoh etnis Makian yang menguasai birokrasi Maluku Utara dan beraliansi dengan Kesultanan Tidore membawa mereka ke Ternate. Melihat ini, Sultan Mudafar Sjah segera mengirim pasukan kuning ke wilayah Ternate Selatan yang ditempati para pengungsi Makian sebagai milisi "penjaga keamanan".[602]

Wilayah Ternate memiliki wilayah yang strategis untuk mencari dukungan massa. Penduduk Ternate bagian Utara dan Pulau Hiri adalah masyarakat adat yang sangat loyal terhadap Kesultanan Ternate. Sementara penduduk dibagian Selatan Pulau Ternate adalah masyarakat majemuk dan bertipe masyarakat modern. Ternate bagian selatan didominasi oleh orang-orang Makian dan Tidore yang secara budaya dan historis memiliki hubungan tidak harmonis dengan Kesultanan Ternate.

Pada mulanya, lascar Kesultanan Ternate membantu, polisi dan tentara untuk menjaga keamanan di Kota Ternate. Namun seiring berlalunya waktu, mereka secara berlahan-lahan mulai mengambil alih fungsi aparat keamanan sampai pada titik dimana mereka merupakan satu-satunya kekuatan keamanan di kota tersebut. Mereka mulai bertindak kasar dan sewenang-wenang terhadap setiap orang yang menghalangi caranya.Lagipula, mereka sering melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap aktivis Makian dan Tidore yang dianggap bertanggung jawab bagi kerusuhan itu.[603]Tindakan sewenang-wenang dari pasukan Kuning tersebut mendapat reaksi keras dari orang-orang Muslim dari Ternate Selatan.Kendati berhasil mengamankan kota, kelompok non kesultanan mempertanyakan legalitas pasukan ini. Mereka kemudian membentuk "Pasukan Putih"[604] untuk melawan Pasukan Kuning.

Ketika para pengungsi dari Makian Malifut tiba di Kota Ternate. Beberapa tokoh politik non kesultanan mengemas ulang apa yang tadinya pertikaian etnis menjadi pertikaian antar agama (etnis Makian beragama Islam, sedangkan etnis Kao

---

[601][601] Gerry van Klinken,*op,cit,* hlm. 75.

[602]"Pengungsi Malifut dan penolakan Masyarakat Ternate", dalam Koran *Ternate Pos.* Ternate, 28 Nopember 1999.

[603]*Ternate Pos.* Ternate, 29 Nopember 1999.

[604]Pasukan Putih adalah pasukan yang dibentuk oleh masyarakat Makian dan Tidore untuk menghalau kesewenang-wenangan pasukan Ternate yang mengunakan pasukan kuningnya.

beragama Kristen).Orang-orang Makian mengalang dukungan dari kelompok etnis muslim lainya untuk melencarkan serangan protes terhadap Sultan Mudafar Sjah yang dianggap mendukung etnis Kao beragama Kristen. Membingkai ulang konflik Malifut sebagai konflik antar agama memungkinkan orang Makian meraup dukungan diluar kelompok mereka seperti etnis Tidore, Sanana, Kayoa dan Bacan.

Pada akhirnya pertempuran antara pasukan Kesultanan Ternate dan non kesultanan tidak dapat dielakan.Pada 27 Desember pasukan putih membakar Sekolah Katolik di Ternate yang dijadikan markas oleh pasukan adat Ternate.Keesokan harinya pada tanggal 28 permusuhan pun memuncak menjadi skala yang sungguh mengerikan.Pasukan kuning membakar beberapa kampung di Ternate Selatan seperti; Kampung Pisang, Maliora, Tanah Tinggi, dan Takoma. Pembakaran beberapa kampung oleh laskar Kesultanan Ternate inilah menjadi cinta buruk bagi Sultan Ternate. Hal tersebut, membangkitkan kemarahan masyarakat Ternate Selatan dan Tidore untuk menyerang pasukan adat Ternate.Pertarungan ini berakhir dengan menyerahnya pasukan Kesultanan Ternatepada tanggal 29 Desember.Untuk mengakhiri kerusuhan tersebut, akhirnya terjadi kesepakatan antartiga sultan yaitu; Sultan Ternate Mudafar Sjah, Sultan Tidore Djafar dano Yunus dan Sultan Bacan Gahral Syah yang disaksikan oleh Pjs Gubernur Maluku Utara yaitu sebagai berikut:

1. Penarikan kedua pasukan dari semua pos kuning/putih mulai hari Rabu tanggal 29 Desember 1999.
2. Perbaikan/pembenahan kerusakan akibat kerusuhan akan diusahakan bersama oleh kedua sultan beserta pemda dan pemerintah pusat.
3. Masalah keamanan akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan.
4. Masalah Malifut juga akan diselesaikan dalam waktu singkat.[605]

Tabel 21
Dampak Konflik di Kota Ternate 1999

No	Kelurahan	Rumah	Korban Jiwa	Korban Luka-luka
1	Takoma	4 Buah	-	3
2	Tanah Tinggi	27 Buah	9	9
3	Maliaro	43 Buah	7	11
4	Kampung Pisang	53 Buah	13	16
Jumlah Total		127 Buah	29	39

Sumber : Badan Kesbang Linmas Provinsi Maluku Utara; 2003

Akibat kekalahan itu, Sultan Ternate Mudafar Sjah tak lagi populer.Bahkan komunitas Ternate Utara, tadinya merupakan basis Sultan Ternate, ikut bergabung dengan Ternate Selatan.Akibat konflik tersebut Sultan dan keluarganya terpaksa

[605]*Ternate Post*.Ternate, 2 Januari 2000.

mengungsi keluar Maluku Utara.sehingga jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maluku Utara dicopot.

Pada periode tersebut Kesultanan Ternate mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat akibat peranan sultan yang cederung berpihak pada kelompok tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa maupun harta benda dikalangan masyarakat adat (kesultanan) maupun masyarakat non kesultanan. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan tokoh-tokoh kunci non kesultanan seperti Bahar Andili (Bupati Halmahera Tengah), Samsir Andili (Wali Kota Ternate), dan Sekwilda Taib Armayn dan aliansi masyarakat Ternate Selatan dan Tidore membentuk mosi tidak lagi menerima Sultan Ternate.[606]Sehingga dalam perkembangan selanjutnya menjadi salah satu penghalang Sultan Ternate Mudafar Sjahdalam pecalonannya sebagai Gubernur Maluku Utara.

Dalam konteks ini sering kali primordialisme dipakai untuk menjelaskan penyebab konflik etnis di Maluku Utara.Dalam kaitannya dengan etnisitas[607], pemekaran Propinsi Maluku Utara ternyata mempunyai kaitan dengan isu primodial atau kental dengan warna etnisitas. Terbentuknya pemerintah daerah baru melalui proses pemekaran membawa konsekwensi bertambah jumlah baik politis maupun birokratis. Hadirnya jabatan-jabatan politik baru tersebut dapat diraih melalui kompetisi yang relatif ketat di antara mereka dan untuk memenangkan kompetisi ditempuh cara mobilisasi massa dengan mengedepankan isu primodial etnisitas.[608]

Pengoptimalan ikatan primodial etnis kadangkala menimbulkan pemikiran yang tidak rasional terhadap perilakunya. Ketidak rasionalitas ini akan terbawa kepada tingkat sensifitas yang berlebihan terhadap suatu bentuk permasalahan antar etnis. Tidak rasionalitas juga akan membawa sebuah sifat yang radikal yang membuat suasana politik lokal kian memanas. Nantinya akan menuju kepada sebuah konflik yang berlarut-larut. Hal ini dapat dilihat ketika Sultan Ternate Mudafar Sjah tidak terpilih atau terakomodir dari partai Golkar untuk mencalongkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara, maka semua komponen adat (masyarakat Ternate) ramai-ramai melakukan tindakan anarkis di Kota Ternate.[609] Kepatuhan mereka kepada sultannnya sering kali mengabaikan nalar yang sehat atau kepatuhan tak mengenal nilai, begitupula etnis lain.

---

[606] Hasil wawancara Juli 2014.

[607]Entitas diperoleh secara askriptif dalam interaksi sosial antar kelompok etnik. Dalam interaksi tersebut para pelaku dari berbagai kelompok etnik akan menyadari bahwa terdapat perbedaan kelompok di antara mereka. Identitas dasar kemudian menjadi suatu pembeda antara berbagai kelompok etnik yang sedang berinteraksi[607]. Disamping itu warga pendatang juga menganggap rendah kebiasaan dan adat istiadat masyarakat lokal. Mengenai pemanfaatan etnis dalam Pilkada lihat, Bungaran Antonius Simanjuntak, (ed), *Otonomi Daerah Etnonasionalisme dan Masa Depan Indonesia.* (Jakarta: Pustaka Obor, 2010), hlm.213.

[608]Haryanto, "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13. No 2. UGM.2009, hlm. 144.

[609]Pada tanggal 29 Desember 1999, kesultanan Ternate mengarahkan pasukan adatnya (pasukan kuning) untuk melakukan pembakaran terhadap beberapa di kelurahan di Ternate Selatan. Untuk lebih jelasnya lihat "Pasukan Kuning Mengamuk" tanggal 30 Desember 1999, dalam Koran, *Ternate Pos*. Ternate, edisi 11.

Dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara pada tahun 2001-2002, menyuguhkan pertarungan antar etnis di Maluku Utara. Dari 28 etnis yang ada terdapat terdapat lima etnis besar yang mendominasi dalam perpolitiakn di Maluku Utara, yaitu etnis Makian, Tobelo-Galela, Tidore, Sanana dan Ternate. Berbagai gejolak massa dan konflik yang merebak dalam pilkada Maluku Utara sejatinnya merupakan potret tahap perkembangan dari ketidak kedewasan elite politik dalam memaksakan kepentingannya. Sebagai contoh pengerusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk di Kecamatan Kota Ternate Tengah dan selatan. Demikian pula bentrokan antara masa pendukung Sultan Ternate (etnis Ternate) dengan Taib Armayn (etnis Makian) serta aksi pengerusakan kantor Gubernur Maluku Utara. Semuanya dilatarbelakangi oleh fanatik etnik yang berlebihan terhadap calon yang mereka usung.

Mengunakan perspektif Gerry van Klinken melihat persoalan konflik Maluku Utara serta gejala lokal berkaitan dengan dua masalah utama yaitu, *pertama,* adanya pembelahan horizontal yang berakar perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. *Kedua,* pembelahan yang bersifat vertikal yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pandangan para elite lokal yang berorientasi pada kekuasaan.[610] Oleh karena itu konflik yang terjadi di Ternate, bermula dari sentimen politik kemudian berubah menjadi sentimen agama dan budaya menciptakan semacam segregasi dan cara berfikir yang mengunakan mainstream agama dalam kehidupan politik khususnya di tingkat elite politik lokal di Maluku Utara.

Konflik di Maluku Utara hanya dalam tempo sebelas bulan (1999-2000) atau berlangsung singkat tetapi dampak lebih parah dengan 3.257 orang terbunuh, 2.227 luka-lukka dan 9.720 kerusakan bagunan. Di Maluku Utara hampir dua pertiga kematian diseluruh provinsi terkosentrasi di daerah Halmahera Utara.[611] Walaupun Ternate konfliknya relatif singkat dan dampaknya jauh lebih rendah, persaingan politik di kota ini merupakan faktor utama (lokus persaingan politik) dalam menyulut kerusuhan berikutnya di tempat-tempat lain di provinsi Maluku Utara.

[610]Gerry van Klinken,*op.cit.*, hlm. 152.

[611] Menurut hasil penilitian Vicis, angka kematian di Halmahera Utara lebih tinggi bila dibandingan semua daerah yang dilanda perang sipil di Maluku, Poso, Sambas maupun Aceh. Sebagai perbandingan kematian di Ambon mencapai, 1.413, Poso 438 dan Sambas 388. Untuk lebih jelasnya baca Patrick Barron et.al, *Seusai Perang Komunal*.(Yogyakarta: CSPS Books, 2012), hlm. 203.

Tabel 21
Daerah yang Terkena Dampak Konflik Maluku Utara
1999-2000

No	Kabupaten/ Kota	Tewas	Luka-luka	Bangunan
1	Halmahera Utara	2.016	1.804	5.901
2	Halmahera Selatan	444	288	2. 460
3	Halmahera Tengah	246	57	354
4	Halmahera Barat	230	35	44
5	Ternate	76	94	961
Jumlah		3. 257	2.227	9.720

Sumber: Patrick Barron et.al, *Seusai Perang Komunal*. (Yogyakarta: CSPS Books, 2012).

Konflik horisontal di Maluku Utara (1999-2000), selain disebabkan pada faktor-faktor tersebut diatas, namun ada sejumlah kecenderungan umum yang tampaknya bisa disepakati bahwa konflik di Maluku Utara bukan hanya bersifat horizontal tetapi juga bersifat vertikal. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abdurahman Wahid dalam acara "Malam Kumpul Basudara Maluku" tanggal 15 Januari 2000 di Senayan Jakarta mengatakan " Ada tangan-tangan jahat yang selalu menciptakan kerusuhan dimana-mana untuk menghancurkan bangsa dan menjatuhkan wibawa pemerintah, dimana terdapat konspirasi dan skenario yang dirancang oleh pihak yang sengaja diciptakan untuk mengacaukan stabilitas nasional agar pemerintah tidak lagi memeliki legitimasi politik".[612]Artinya tidak mustahil jika konflik-konflik yang bersifat horizontal bersumber dari konflik antar negara-masyarakat yang dipindahkan di tingkat lokal. Dalam persepektif Ben Anderson, pemerintah pusat hanya menginginkan kekayaan dan menjadikan daerah sebagai sapi parahan,tampaknya merupakan faktor terpenting dibalik kekecewaan rakyat daerah yang akhirnya memicu munculnya berbagai pergolakan politik ditingkat lokal.[613]

Dari hasil pengamatan di lapangan akar persoalan sumber konflik di Maluku Utara tidaklah tunggal. Persoalan kesenjangan sosial antar etnis, perebutan sumberdaya alam serta pertikaian elite politik dan birokrasi merupakan faktor pembungkus "konflik agama" yang selama ini diyakini oleh sebagian besar masyarakat baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks lokal. Begitu pula hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti menyimpulkan bahwa, setidaknya ada dua faktor penting yang mendasari konflik di wilayah ini yaitu: (1) Menguatnya etnosentrisme untuk merebutkan sumber-sumber ekonomi dan politik. (2) Rivalitas elite dalam merebutkan pengelolaan sumberdaya alam dan jabatan-jabatan birokrasi atau politik.

[612]*Ternate Post*. Ternate, 18 Januari 2000.

[613] Ben Anderson, (eds), *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. (Jakarta: Penerbit Antara IDEA, 2002), hlm. 128.

Kondisi sosial politik masyarakat Maluku Utara yang hetrogen, kemudian ditambah dengan adanya pemilihan berdasarkan aspirasi dan orientasi politik, turut memperkuat potensi konflik yang bersifat laten maupun yang sudah mewujud. Sejumlah karakteristik hubungan-hubungan sosial yang dapat ditemukan sebagai konsekwensi dari struktur pluralitas sosial. Apalagi para kandidat yang berkompetisi sama-sama memeliki basis massa yang jumlahnya relatif berimbang. Pemekaran Maluku Utara di penuhi oleh konflik karena setiap orang/kelompok mempunyai kepentingan dan pendapat masing-masing yang sering kali tidak saja berbeda, tetapi juga bertentangan.[614]Pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2002 dimenangkan oleh Taib Armain dan Madjid Abdullah merupakan kemenangan dua etnis besar (Makian dan Ternate). Hal ini menunjukan kedua pasangan ini mampu menggalang suara pemilih berdasarkan solidaritas etnis di mana Taib Armain berasal dari etnis Makian (etnis terbesar) dan berasal dari etnis Ternate.

Politisasi etnis di Maluku Utara kadang kala di hubungan dengan agama.Dalam hal ini para elite menjadikan agama dan etnis untuk mencapai tujuan politik. Tidak jarang hal ini akan bisa memicu terjadinya konflik horizontal. Politik ras (etnis) selalu mempengaruhi pemilihan Gubernur Maluku Utara, karena etnis sebagai pihak yang mengalokasikan nilai-nilai yang terkait dengan kekuasaan, status, kemakmuran serta kesempatan hidup kelompok ras dan anggotanya.Kemunculan politik etnis diawali oleh tumbuhnya kesadaran yang mengindentifikasikan mereka dalam satu golongan atau kelompok etnis tertentu.Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kekelompokan dan rasa primodial.[615]

Konflik Maluku Utara 1999-2001, tidak dapat dilepaskan dari peran elite politik. Elite ini kerap menggunakan sentimen anti etnis untuk mendapatkan dukungan politik. Misalnya isu yang banyak dilontarkan masyarakat Ternate adalah pengusiran dan penculikan tokoh masyarakat masyarakat Makian di Pulau Ternate, dan sudah saatnya masyarakat Ternate di pimpin oleh sultan sebagai gubernur Maluku Utara 2002-2007.[616] Gambaran negatif mengenai suku lain memuncak ketika terjadi kerusuhan "Putih Kuning" pada 27-28 Desember 1999. Berbagai konflik dan kekerasaan tersebut, mengindikasikan vanatisme buta atau kecintaan pada suku tertentu. Semua itu tentu bertentangan dengan budaya politik yang dianut oleh Masyarakkat Maluku Utara yang memeliki semangat penghargaan terhadap hetrogenitas, dialog kultural, inklusivisme, toleransi dan keterbukaan sebagaimana tertuang dalam semboyang *marimoi ngone futu doka gosora sebuah lawa om dore momote* (mari kita bersatu hati seperti pala dan cengkeh).

Kebangkitan Kesultanan Ternate seiring dengan paradigma baru otonomi daerah menarik untuk dikaitkan dengan demokrasi ditingkat lokal dengan pemakaian

---

[614]Moch. Nurhasim, *et.al, op.cit.,* hlm 118-119.

[615] Lihat Siti R. Zuhro, *et al.Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*.(Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 64.

[616]"Pasukan Kuning Kesultanan Ternate", dalam *Cermin Reformasi*. Ternate, tanggal 30 1999.

identitas etnis.Keterlibatan etnis dalam ranah politik sebenarnya adalah hal yang baru dalam sejarah perpolitikan di Maluku Utara pasca Orde Baru. Geliat etnis ini lebih mengemuka dalam ranah politik lokal setelah era reformasi dan menjadi titik awal, oleh Pratikno disebut *terminus a qua* yang mengawali transisi politik dari penguasa otoriter yang selama ini telah membelenggu hak-hak individu ataupun kelompok tertentu ke pemerintahan yang demokrasi.[617]

Salah satu faktor yang menarik dalam dinamika politik lokal di Maluku Utara adalah menguatnya fonomena etnisitas[618] dalam pemilihan Gubernur di Maluku Utara pada tahun 2001-2002.Maluku Utara yang memeliki keberagaman etnis (28 suku dan 29 bahasa daerah), dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber daya oleh para elite lokal yang berupaya merebut posisi jabatan gubernur/wakil gubernur. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai kepentingan yang sama dan solidaritas yang kuat karena dilandasi asal usul dan keturunan yang sama akan memeliki nilai yang sangat signifikan sebagai basis untuk meraih kekuasaan. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Nasikun bahwa dalam masyarakat plural, politik kompetitif secara mendasar dicirikan oleh politik etnis. Perbedaan afiliasi dan orientasi politik yang berunjung pada gejolak massa dan konflik itu bisa memunculkan fragmentasi politik yang tidak saja merendahkan kualitas pilihan, tetapi juga berpotensi memperdalam disintegrasi dan instabilitas lokal.[619]

D. Upacara Adat (*Fere Kie*, *Kololi Kie* dan *Legu Gam*) Sebagai Pusat Budaya.

Pada masa pemerintahan Sultan Mudafar Sjah,selain menjadikan istana sebagai pusat politik, adalah sebagai pusat budaya.Sebagai pusat kebudayaan maka diselenggarakan upacara-upacara istana, seperti; *Fere Kie* (mendaki gunung), *Kololi Kie* (mengelilingi gunung), *Legu Gam* (ulang tahun sultan), Isra Miraj, dan Maulid Nabi. Strategi ini diyakini akan membawa dampak yang besar bagi keberadaan istana sebagai pusat anutan.[620]Kondisi inilah elite kesultanan secara trampil memainkan

---

[617]Pratikno, " Good Government and Governability" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, UGM, edisi 3 Maret 2005, hlm. 87.

[618] Etnis diartikan sebagai kumpulan orang (penduduk) yang berasal dari keturunan sama, mempunyai mempunyai latar belakang sejarah dan budaya yang sama, bertempat tinggal dalam kelompok pada teritori tertentu, dan mempunyai kesadaran terhadap kepentingan bersama. Sementara itu, etnisitas mengacu bukan pada property kelompok namun lebih merujuk pada aspek yang berhubungan atau berkaitan dengan etnis.Etnisitas merujuk pada konsep relasional yang mendasarkan pada pengkatagorian kumpulan yang membentuk dan dibentuk oleh kolektivitas. Lihat Haryanto ' Elite Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik" dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 13, No 2 November 2009, hlm. 140. Lihat Khairul Ikhwan Damanik, et.al.,*Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia.* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011).

[619] J. Nasikun, "Konsosiasionalisme dan Tradisi Demokratis dalam Masyarakat Majemuk, Dalam A.E. Priyono, Stanley Adi Prasetyo, Olle Tornquist. *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto.* (Jakarta: DEMOS ,2003), hlm. 73.

[620] Dalam kekuasaan tradisional istana menjadi sumber tunggal produksi wacana pengetahuan, sistem kepercayaan, acuan nilai dalam masyarakat, acuan sistem stratifikasi sosial, simbol status, dan gaya hidup, yang dalam bahasa Djoko Suryo bahwa istana memeliki doktrin pusat anutan

klaim sebagai pusat kebudayaan Maluku Utara.Klaim itulah yang menyebabkan negara dalam hal ini Kementerian Parawisata memilih berkerjasama dengan istana sebagai wujud perhatian pemerintah pada kebudayaan lokal.

Diantara sekian banyak upacara yang diselengarakan oleh *kadaton* Ternate adalah *Legu Gam*[621] mempunyai bobot politik yang cukup penting. Perayaan ini lakukan setiap tahun pada bulan April untuk merayakan hari ulang tahun Sultan Mudafar Sjah yang jatuh pada tanggal 12 April dan pelaksanaanya sebulan penuh. Secara historis perayaan *Legu Gam* telah dilakukan sejak abad ke XVI pada masa pemerintahan Sultan Ternate ke-26 Babullah. Namun pelaksanaannya pada saat itu dilakukan di dalam istana dan hanya dihadiri para kalangan bangsawan dan *bobato akhirat* (ulama kerajaan). Dalam upacara tersebut para *bobato akhirat* bertugas membacakan *doa kiye*[622] (doa kesalamatan), sebagai wujud rasa sukur atas karunia

menyebabkan keraton bukan semata-mata tempat tinggal raja dan kerabatnya, melaingkan juga dipandang sebagai negara itu sendiri Mengenai konsep kekuasaan raja. Lihat Djoko Suryo, *Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern.* Yogyakarta: STPN Press, 2009. Dan baca AA GN Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota.* (Yogyakarta, IRE Press, 2004).

[621] Kata *Legu Gam,* berasal dari Bahasa Ternate dari Kata *Legu* yang artinya pesta dan kata *Gam* berarti negeri. Dengan demikian *Legu Gam* adalah pesta rakyat. Lebih jelasnya lihat Mudaffar Sjah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*.(Ternate : Goheba, 2009), hlm.12-13.

[622] Doa *Kiye* merupakan doa khusus yang yang pakai hanya dalam upacara-upacara istana seperti; *Legu Gam* (ulang tahun sultan), *Kololi Kie* (mengelilingi gunung), *fere Kie* (naik gunung). Adapun isi doa ini sebagai berikut "*Ngofangare ngom ronga bala se ra'ayat Moloku kie Raho Ternate se Tidore, Bacan se Jailolo toma mie gudu-gudu Sula se Taliabo. Misi tede mia puji se mia syukur se Jou Khalikul makhlukRabbul Arsyil Adlim I rahmati se I nikmati, I duka se I gogoru so toma wange enane. Ibu serta rombongan I doru mia ito, I joko mia kaha, so ngofangare ngom mi ma moi-moi rubu-rubu se rame-rame, mi tede se mi saha, mi lego se mi simore so milahi-lahi do'a se jou rabul alamin, la sigila I umur si koko I jaman toma dhahir se bahin, si sehat se afia, I jasad, si fela I akal se I kira-kira la osi gogoko hokum se parenta toma amara bil maaruf wan aha anil mungari, wa yahkumul adilina baenar rijali wan nisai, la osi ogo ma limau toma baldatan thaibatan wa rabban gafura. La ngoni bala se ra'ayat, kie se gam, midorusu maalo se ma rano, mariziki se ma rahmati, toma ngolo se toma nyina, toma murah se toma gampang, toma sehat se afia toma sofutu se wange moso se lobi, toma daiman abadi*". Artinya: Dengan menggunakan nama Tuhan. Kami seluruh sakyat Maluku Utara sejak dari unjung Morotai sampai ke unjung Taliabo, mempersembahkan puja dan syukur kehadirat Allah, Tuhan seru sekalian alam, atas rahmat dan karunianya, cinta dan kasih sayangnya, pada hari ini kami, berkesempatan mengunjungi daerah kami, menginjak bumi kami, maka kami rakyat semua, menyambut dengan hati yang penuh riang dan gembira, diliputi rasa untung dan bahagia. Kami panjatkan do'a kehadirat Mu ya Tuhan. Kiranya kau panjatkan usianya, sehat afiatkan jasadnya, luaskan akal dan pikiranya, tenangkan jiwanya baik lahir maupun batin agar dapatlah ia menjalankan pemerintahan dan menegakan keadilan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, berlaku adil baik kepada laki-laki maupun perempuan, dan berikanlah dia kemampuan menenangkan daerah ini, menjadi negeri yang aman damai dan makmur di bawa naungan rahmatmu ya Tuhan. Semoga kami, rakyat, daerah dan negara, diliputi suasana aman dan damai, dilimpahi rezeki dan rahmat di laut dan di darat, murah dan gampang, sehat dan afiat sepanjang masa siang dan malam, pagi dan malam, pagi dan petang tidak berkeputusan selama-lamanya. Lihat B. Soelarto, op.cit., hlm.123-124.

Tuhan berupa limpahan rezeki, keselamatan, kesehatan bagi seluruh rakyat dan mendatangkan kejayaan bagi negara.

Memasuki tahun 2002, Sultan Mudafar Sjah mengeluarkan *iddin kolano* (fatwa sultan) bahwa upacara *Legu Gam* di laksanakan pada tempat terbuka alun-alun timur istana (lapangan Salero), dengan bobot yang lebih meriah atau dilakukan secara besar-besaran. Sebagai wujud pelastarian budaya Ternate, sehingga diharapkan memperkaya khasanah budaya nasional, sekaligus menjadi perekat sistem nilai dalam kehidupan masyarakat.[623]

Oleh karena itu, panggung pertunjukanpun menampilkan seluruh kemegahan prosesi upacara, busana kebesaran, lambang-lambang kerajaan.Betapa megahnya perayaan *Legu Gam*, sehingga mendorong masyarakat tertarik mengikuti upacara, selain melihat sultannnya yang ada dalam prosesi tersebut.Ratusan abdi dalem yang menjadi barisan penting dan pelopor sultan dan keluargannya, merupakan tontonan tersendiri yang mengasyikan, karena beraneka ragam lambang-lambang seperti payung kebesaran ataupun *stampa* (mahakota) yang anggap memeliki nilai magis.[624]

Dalam upacara tersebut sultan menduduki tempat tertinggi, kemudian diikuti oleh kaum bangsawan, para pengiring serta abdi dalem berada pada bagian paling belakang. Sebagai pusat anutan, tata ruang dan upacara merupakan cara kekuasaan itu berkerja. Sehingga, kekuasaan bukan hanya diukur dari sejauhmana kemegahan serta sejumlah partisipan yang hadir, melaingkan bagaimana mempengaruhi logika penyelengaraan kekuasaan diluar istana, bahwa mereka merupakan pusat anutan ditengah-tengah masyarakat.

Perayaan *Legu Gam* memeliki dimensi politik sangat menonjol, namun perayaan itu sendiri menunjukan adanya kreatifitas pada seni tari dan simbol-simbol lainnya, seperti bahasa, pakaian tata cara yang berhubungan dengan seremoni ritual. Hal ini dapat dilihat pada setiap pertunjukan selalu melibatkan penari dalam jumlah besar.Misalnya pada perayaan *Legu Gam* ke-IV 2007, dengan melibatkan 10.000 penari pria, sehingga mendapat penghargaan dari MURI sebagai penari pria terbanyak di Indonesia. Begitupula pada tahun 2010, panitia perayaan *Legu Gam* menyediakan nasi bambu sepanjang 10 KM, dan mendapatkan penghargaan dari rekor MURI sebagai nasi bambu terpanjang di dunia.[625]Selain sebagai alat untuk mengukur pengaruh kekuasaan seorang sultan. Dari aspek budaya *Legu Gam* sebagai pesta rakyat bertujuan menjaga tradisi dan budaya sebagai manifestasi dari kecintaan rakyat Ternate (*bala kusu se kano-kano*) terhadap sultannya.[626]

Perayaan *Legu Gam* juga dipakai sebagai strategi untuk memperluas jaringan kekerabatan.Dalam setiap pergelaran para tamu negara atau duta-duta besar dari

---

[623] "*Legu Gam* Acara Ritual Kesultanan Ternate", dalam *Tabloid Parada*.Ternate, edisi 10, 03-16 Pebruari 2002.

[624]Sultan Ternate memeliki banyak pusaka yang dipertontonkan dalam acara tersebut, yaitu barang-barang warisan yang dianggap dapat memberi kebahagian dan kekuatan pada orang yang memelikinya.Benda-benda upacara tersebut dikeluarkan untuk menyertai sultan dengan tujuan menambah kemegahan.

[625]Lihat *Tabloid Parada*, 2001.

[626] Abdul Hamid Hasan, *op.cit.,* hlm. 87.

negara asing menerima gelar kehormatan.Kehadiran mereka dalam perayaan iitu sebagai bagian dari kerabat tentu memberikan keuntungan politis bagi mereka, terutama dihadapan masyarakat tradisional.Namun bagi istana, kehadiran politisi dan birokrat juga bisa menaikan pamor istana secara politis.Dengan memanfaatkan relasi yang telah terbangun untuk mendapatkan akses pada sumberdaya ekonomi maupun politik yang dimiliki oleh politisi dan birokrat. Begitu pula para politisi mungkin berharap dengan gelar kebangsawanan yang mereka dapatkan dari istana akan membuka ruang bagi mereka untuk mendapatkan dukungan pemilih tradisional.

Gambar 15 dan 16.

Sultan Mudafar Sjah dan Permaisuri Budi Susanti Melakukan Ritual *Fere Kiye* (Mendaki Gunung Gamalama) dan *Kololi Kie* (Mengelilingi Pulau) pada tahun 2000

Sumber: Tabloid Parada, 2000.

Strategi itulah disebut "politik kekerabatan".[627]Politik kekerabatan ini diambil karena dua hal.*Pertama*, mengubah kekuatan politik berpegaruh dan potensial menjadi musuh menjadi kawan atau kerabat.Misalnya pada tahun 2002, istana mengangkat setiap pejabat militer dan kepolisian, mulai dari Pangdam, Kapolda, sampai Danrem menjadi kerabat melalui pemberian gelar. Demikian pula

[627]Mengenai politik kekerabatan lihat AA GN Ari Dwipayana, *op.cit.*, hlm.123-124.

dengan pejabat birokrasi sipil, akademisi, tokoh LSM, dan pengusaha.[628]*Kedua*, melalui perkawinan, yaitu untuk mendapatkan pihak-pihak yang menguntungkan secara ekonomi maupun politik.

Gelar kebangsawanan tidak hanya diberikan pada para pejabat-pejabat lokal, tetapi juga pejabat pusat atau warga negara asing.Misalnya gelar kebangsawanan di berikan kepada Akbar Tanjung dengan gelar*Kapita Kooris* (panglima perang kesultanan) pada 2002. Hal yang sama juga diberikan kepada Wiranto sebagai *Gam Madodoto* (guru bangsa), begitu pula Hamja Haz dan Sosilo Bambang Yudoyono dan sejumlah duta besar dari Brunai Darusalam dan Malasia.[629]

Gambar 17
Acara Pelantikan Akbar Tanjung sebagai Kapita Korois Kesultanan Ternate

Sumber: Tabliod Parada, 2002.

Pemberian gelar kebangsawanan merupakan strategi politik untuk memperkuat posisi istana ditengah masyarakat. Dengan diberikan gelar, maka kesemua elemen sosial politik secara resmi menjadi bagian dari kerabat Kesultanan Ternate.Menjadi kerabat tentu saja mempunyai konsekuensi logis pada istana baik secara ekonomi, politik maupun budaya.

Apa yang diusahakan Sultan Mudafar Sjah dalam upacara adat *Fere Kiye, Kololi Kie* dan *Legu Gam* sebagai wadah untuk tetap menjadikan istana sebagai pusat politik sekaligus pusat kebudayaan. Sebagai wadah politik, upacara *Fere Kiye, Kololi Kie* dan *Legu Gam* merupakan sintesa politik yang telah dikembangkan telah lama (sebelum kemerdekaan) dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan tujuan mencari legitimasi kekuasaan tradisional. Kehadiran para utusan dari daerah

[628] "Sejarah Hukum Adat dan Lingkungan Hukum Adat Ternate", dalam *Tabloid Parada.*Ternate,edisi 12, 3- 16 Juni 2002.

[629]"Upacara Joko Kaha Bobeto Jou Kolano Ternate", *Parada.*Ternate,edisi 11, 9- 22 Mei 2002.

dalam menghadiri perayaan hari ulang tahun sultan mengandung arti bahwa mereka mengakui kekuasaannya. Di sisi lain, upacara itu erat sekali hubungannya dengan ekonomi. Penggarapannya dilakukan dengan mengejar keindahan dan kemegahan dengan tujuan dapat menjaring wisatawan agar dapat menopang pembangunan sebagai sumber ekonomi.Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari acara *Fere Kiye*, *Kololi Kie* dan *Legu Gam* digunakan untuk memelihara ikatan dengan pengikut tradisional mereka. Surplus ekonomi juga digunakan untuk menyelengarakan upacara-upacara besar yang hegemoni dalam arena cultural lainnya. Dengan demikian, kapasitas material yang cukup digunakan secara kreatif untuk membangun simbol-simbol kemegahan kultural yang pada akhirnya mengukuhkan mereka sebagai pusat anutan.

Penutup

Ada empat strategi yang dipakai oleh Sultan Mudafar Sjah untuk mempertahangkan kembali basis kekuasaanya ketika memasuki era Reformasi dan Maluku Utara di mekarkan menjadi propinsi baru berdasarkan UU No. 46 tahun 1999. *Pertama,* Tampilnyanya Sultan Mudafar Sjahsebagai calon Gubernur Maluku Utara,merupakan usaha pemunculan kembali kekuatan-kekuatan feodal yang sebelumnya terkungkung oleh dominasi pemerintahan Orde Baru.Walaupun Sultan Mudafar Sjah gagal dalam pencalonannya sebagai Gubernur Maluku Utara, karena tidak didukung oleh Partai Golkar.Tapi tidak menyurutkan Sultan Ternate untuk berkiprah dalam pentas politik lokal.

Strategi *kedua,* dalam membangun kembali hegomoni politiknya, strategi yang digunakan Mudafar Sjah adalah memilih partai yang lebih akomodatif atas kepentingannya.Kekecewaan Mudafar Sjah terhadap Partai Golkar yang tidak mencalongkannya sebagai Gubernur Maluku Utara, kemudian diarahkan untuk mendukung dan bergabung dengan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Keberadaan Partai PDK sebagai mesin politik barunya ternyata membuahkan hasil.Di pakainya PDK sebagai mesin politiknya yang baru, ternyata membuahkan hasil sebagai pemenang kedua Pemilu legislatif 2004 di Kota Ternate. Melalui pertai inilah kemudian mengantarkannya menjadi anggota DPR-RI periode 2004-2009, dan Permaisurinya Nita Budi Susanti sebagai anggota DPD mewakili Maluku Utara dan sejumlah elite Kesultanan Ternate menjadi anggota Legislatif tingkat I Propinsi Maluku Utara, dan anggota Legislatif II Kota Ternate.

Strategi *ketiga*, pada era reformasi, strategi politik Kesultanan Ternate lebih variatif tidak hanya melalui partai politik, akan tetapi juga dilakukan penguatan politik kebudayaan dan perluasan jaringan kekerabatan.Politik kebudayaan atau melakukan perluasan jaringan kekerabatan dengan memberikan gelar kehormatan pada pejabat atau mantan pejabat baik pusat maupun daerah, membawa dampak yang besar baik secara ekonomi, politik maupun kultural, sehingga memperkuat jalinan antar kerabat.

Strategi *keempat*, selain melakukan perluasan jaringan kekerabatan dengan memberikan gelar kehormatan pada pejabat atau mantan pejabat baik pusat maupun

daerah adalah perluasan pengaruh melalui forum-forum keraton se Nusantara (FKKN). Perluasan pengaruh melalui aliansi keraton se-Nusantara merupakan cara keraton untuk memperkuat posisi tawar keraton untuk berhadapan dengan negara. Salah satu agenda yang dimiliki oleh oleh aliansi tersebut adalah kejelasan tanah-tanah bekas swapraja yang diambil alih oleh negara pada pemerintahan Soekarno.Di samping itu membangun aliansi politik melalui Forum Komunikasi Keraton-Keraton se-Indonesia (FKKKI).Forum komunikasi keraton dijadikan sebagai wadah menentang pemerintah dengan jumlah tuntutan yang keras, termasuk pengembalian seluruh tanah adat kepada komunitas masyarakat adat dan penghapusan organ-organ Orde Baru di tingkat pemerintahan desa. Misalnya Pada forum Komunikasi Keraton-Keraton se-Indonesia (FKKKI) III di Kutai Kalimantan Timur, tahun 2002, Sultan Mudafar Sjah mengeluarkan pernyataanya membangkitkan kembali kerajaan-kerajaan yang tanah adatnya diambil oleh negara. Dalam forum itulah Sultan Ternate Mudafar Sjah, terpilih sebagai ketua umum Forum Komunikaasi dan Informasi Keraton se Nusantara.

BAB VIII
KESIMPULAN

Tulisan ini disandarkan pada analisis kajian yang ditemukan. Pengkajian ini membuktikan bahwa sepanjang sejarahnya, Sultan Ternate tidak pernah kehilangan legitimasi politiknya di tingkat lokal, dan bahkan pada periode dan konteks politik tertentu mampu berperan di tingkat nasional, karena keberadaan sultan secara politik di dukung secara adat, sehingga memiliki posisi politik sebagai pusat anutan di dalam kehidupan masyarakat Ternate. Keberlangsungan Sultan Ternate menunjukan peran politiknya tidak hanya sebatas bagaimana beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tetapi juga mampu memiliki pengaruh yang menentukan pada aktivitas politik baik tingkat lokal dan nasional.

Dalam membangun basis kekuasanya ada tiga strategi yang dipakai oleh Sultan Ternate. *Pertama*, strategi berasosiasi dengan partai politik. *Kedua*, strategi kebudayaan dengan menghidupkan kembali upacara-upacara istana. Langkah ini dilakukan sebagai politik kebudayaan dengan menjadikan istana sebagai pusat pengemban, pelestarian dan pusat pengembangan kebudayaan Ternate. *Ketiga*, strategi ekonomi. Untuk bertahan secara ekonomi, selain menghandalkan pada tanah-tanah yang masih dimiliki oleh istana. Elite Kesultanan Ternate melakukan perubahan orentasi pekerjaan, dengan memilih masuk kesektor birokrasi negara, menjadi birokrat maupun sektor non birokrasi atau terjun kedalam dunia bisnis.

Dalam sejarahnya, strategi politik Sultan Ternate pada tingkat nasional tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan ideologi politik membuat mereka mengalami pembatasan pada rezim tertentu, dan berubah mengalami pemberdayaan pada periode yang lain. Realitas politik menunjukan, tatkala rezim Soekarno berkuasa elite Kesultanan Ternate mengalami "pembatasan politik". Pilihan politik Sultan Ternate ke 47 Iskandar Muhammad Djabir Sjah (1929-1975), dalam mendukung pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) yang diprakarsai oleh Herbertus J. van Mook, sebagai wakil Pemerintah Hindia Belandapada 1946, berimplikasi diasingkannya ke Jakarta pada 1950, karena dituduh sebagai tokoh federalis.

Namun delegitimasi yang dilakukan Pemerintah Soekarno tidak serta merta menghilangkan eksistensi politiknya di tingkat lokal. Intervensi pemerintah pusat tidak berdampak pada merosot kekuasaan tradisional Iskandar Muhammad Djabir Sjah, karena secara kultural ia tetap mendapatkan tempat dihati rakyat sebagai pusatanutan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, salah satu nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat Ternate adalah menjunjung tinggi perkataan atau perintah sultannya dengan semboyang *jou kasa ngom kage* (dimana ada sultan disitulah kami).

Keberlangsungan politik elite kesultanan pun berlanjut setelah kejatuhan rezim Presiden Soekarno. Tampilnya Mudafar Sjah sebagai figur pengganti sultan sebelumnya memainkan peran baru dalam perpolitikan di Maluku Utara. Strategi politiknya dengan mereposisi hubungannya dengan pemerintah pusat untuk membangun kembali basis kekuasanya dengan mendukung Partai Golkar (pemerintah) mengalami "pemberdayaan politik" pada Pemerintahan Soeharto.

Realitas menunjukan, sejak di lantik sebagai Sultan Ternate ke-48 pada 29 Nopember 1976. Mudafar Sjah mengambil keputusan politik untuk mendukung partai Pemerintah Soeharto (Golkar). Dukungan Kesultanan Ternate pada politik Golkar, dipahami sebagai strategi akomodatif dan menjaga agar tetap bertahan di tengah pusaran kekuasaan yang oteriter dan sentralistik. Keberhasilan strategi tersebut, terbukti dapat mengantarkan sejumlah elite kesultanan menjadi anggota legislatif, akademisi, birokrat, politisi, wartawan, dan pengusaha. Namun demikian, Orde Baru tidak pernah menginginkan terbentuknya kepemimpinan lokal yang kuat. Salah satu jalan adalah dengan menempatkan militer sebagai bagian untuk menjaga kelangsungan politik di Maluku Utara. Pada saat itulah yang menjadi Bupati Maluku Utara harus berlatar belakang militer. Peran negara yang begitu kuat menyebabkan tidak memungkinkannya terjadinya sirkulasi elite.

Selain itu, strategi bertahan Sultan Ternate tidak hanya melalui partai politik, tetapi juga dilakukan melalui arena kebudayaan. Upacara-upacara istana merupakan media untuk menunjukan kekuasaan dan sumber legitimasi kultural bahwa istana mempunyai daya magis, sacral serta simbol kewibawaan. Di samping itu adalah melakukan politik kebudayaan atau perluasan jaringan kekerabatan dengan memberikan gelar kehormatan pada pejabat atau mantan pejabat baik pusat maupun daerah. Di pakainya politik kekerabatan tentu saja mempunyai konsekuensi logis baik secara ekonomi, politik dan budaya. Sesuatu yang tidak pernah dialami sultan sebelumnya di masa Pemerintahan Soekarno.

Runtuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, menandai lahirnya era Reformasi, menghadirkan ruang yang lebih luas bagi elite Kesultanan Ternate untuk mengekspresikan keberadaan dan peran yang sebelumnya terkungkung dominasi pemerintah pusat. Munculnya Sultan Mudafar Sjah sebagai kandidat calon Gubernur Maluku Utara pada 2001/2002, dapat dilihat sebagai pertaruhan untuk mempertahangkan keunggulan kebangsawanan Ternate dari munculnya dominasi baru di luar elite kesultanan. Strategi ini merupakan upaya yang ditempuh elite kesultanan agar tetap terakomodasikan secara institusional kedalam panggung politik pemerintahan formal. Proses pilkada tersebut berlangsung secara relative keras yang diwarnai dengan gesekan-gesekan kepentingan politik, ideologi, sentiment etnik dan sosial budaya.

Kebangkitan Sultan Mudafar Sjah menimbulkan dampak serius pada pemaknaan demokrasi lokal.Partisipasi yang menjadi salah satu indkator keberlangsungan demokrasi pada kenyataanya malahan diwarnai dengan maraknya aksi mobilisasi. Sehingga kompetisi tidak lagi rasional dengan pengunaan kekuatan-kekuatan feodal. Kondisi inilah yang pada akhirnya memperburuk demokratisasi di tingkat lokal. Rivalitas ini kemudian dibangun dengan adanya isu-isu pengelompokan antara kelompok lama dengan kelompok baru, etnis dan agama. Meskipun berakhir pada penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih yaitu Taib Armayin dan Abdullah Majid (non kesultanan).

Gagalnya Sultan Mudafar Sjah dalam pencalonannya sebagai Gubernur Maluku Utara 2002, bukan karena “kekalahan” tetapi karena intervensi pemerintah pusat dan dukungan politik Partai Golkar terhadap figure lain, ternyata tidak

menyurutkan Sultan Mudafar Sjah untuk berkiprah dalam pentas politik. Kekecewaaannya terhadap Golkar kemudian diarahkan untuk mendukung Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).Di pakainya PDK sebagai mesin politiknya yang baru, ternyata membuahkan hasil, sehingga mengantarkannya sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009. Terpilihnya Sultan Mudafar Sjah sebagaianggota DPR RI tersebut, mengindikasikan sepanjang karier politiknya tidak mengalami "pasang surut".

Sebagai sebuah realitas sejarah, kemampuan bertahannya Sultan Ternate dalam panggung politik lokal sejak pasca kemerdekaan hingga era Reformasi, menunjukan bahwa mereka memiliki posisi politik sebagai pusat anutan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemampuan bertahan ini, banyak di pengaruhi oleh kepercayaan masyarakat bahwa kelompok bangsawanlah yang berhak memerintah yang diperoleh lewat legitimasi geonologis. Legitimasi ini di sosialisasikan dalam berbagai upacara-upacara istana seperti *Legu Gam* (hariulangtahun Sultan), *Fere Kiye* (naik gunung) dan *Kololi Kiye* (mengeliligi gunung). Sosialisasi yang terus menerus ini pada gilirannya menghasilkan suatu kepercayaan masyarakat Ternate tentangkelebihandan keistimewaan para sultan, sehingga melahirkan rasa patuhdan kehadiraanya dapat memberi ketentraman dan kesejahtaraan masyarakat. Disamping itu, keterampilan politik para sultan yang dimainkan dalam setiap rezim turut memperkuat eksistensinya dalam ranah politik lokal.

Dalam budaya Ternate, sultan sangat dihormati dan dipatuhi karena diyakini mewarisi kebesaran dan kewibawaan yang membawa pada kedamaian, keadilan dan memberikan kesejahtraan masyarakat. Ini sekaligus menjelaskan bahwa kedamaian, keadilan dan kesejahtraan adalah kata kunci bahwa begitu pentingnya bangsawan dimata rakyat. Hubungan social tersebut bukan hanya bersifat *patron- clein*, namun pada dasarnya mencerminkan cirri budaya masyarakat yang bersifat khusus dalam menjaga hubungan antara masyarakat dan pimpinan dalam tradisisosial Ternate. Hal ini tercermin dalam semboyan hidup masyarakat Ternate "*ino foma Makati nyinga, doka gosora se bualawa, omdoro yamo mote, fomagogoru fomadudara"* (mari kita berkasih sayang, seperti buah pala dan fulinya, matang bersama, gugur bersama, dilandasi kasih dan sayang).

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER ARSIP

ANRI ***Memori van Overgave***Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo Seri 2, Nomor 26

ANRI, ***Memori van Overgave,*** Residen Ternate K.A. James, 1920, (Mailrapport No.209/19.

ANRIMemori van Overgave.ResidenOuwerling, Ternate Tahun 1934 *Reel Mikrofilm Nomor 6, Koleksi MVO 2e*

ANRI *Memorie van Overgave C. Bosscher* Residen Ternate (1859).

Arsip pribadi yang ditulis langsung oleh Iskandar Muhammad Djabir Sjah, berupa riwayat hidup singkat pada tanggal 24 Agustus 1950.

Kutipan dari Daftar besluit Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur, 22 Januari 1949.*Algemene Secretarie* 1361. No. B.Z. 1/144.Karesidenan Maluku Utara

Surat permohonan cuti Sultan Ternate kepada Letnan Gubernur Jenderal Dr. van Mook 26 Maret 1947. Algemene Secretarie No. 6750. 3/4/ 47. AB 10/ABK 6.

Telegram tentang rencana pengangkatan Sultan Ternate sebagai Perwira KNIL.16-7-45. AB10 1945.

Telegram tentang keberangkatan kesatuan NICA ke Ambon dan Makassar 27-9-45. Hfd Nica bureau Dir. B. B 7645/ANIC AB 10

B. Surat Kabar

Indonesia Timoer: Makasar, 7 Pebruari. 1 dan 27 Desember 1947.24 Januari.28 Pebruari.24 Mei.22 Juni.18 dan22 Desember 1948.

Menara Merdeka, Ternate: 12 Desember 1946

Negara Baroe: Makasar 13 Pebruari, 4 Maret. 23 Juni ,13 dan 14 Mei 7 Juli 1947, dan 24 Januari 1948

Soeloeh Rakyat, Makasar 13 September 1945, 1 Pebruari 1946. 14 Mei.18 dan 29 September 1947.10 Januari, 21 Pebruari, 17 Maret,14 April, 21 Mei, 7 Juni, 8 Juli dan 16 September 1948.13 Januari, 19 Pebruari, 18 dan 23 Maret, 30

Mei, 20 dan 25 Juni, 25 dan 30 Juli, 16 dan 25 Agustus, 19 September, 22 Oktober. 10, dan 22 November, 3 dan 26 Desember 1949.

Suluh Indonesia, Jakarta, 10 dan 13 Januari, 19 Pebruari, 10 Maret, 24 April, 21 dan 31 Mei, 3 dan 30 Juni, 10, 17, dan 29 Juli, 1 dan 29 Agustus, 1 dan 31 September, 18 Nopember 1958.

Tabloid Parada, edisi I hingga edisi ke 38, tahun 1998-2003.

C. Artikel dan Makalah

Alamsyah "Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance" dalam *Asosiasi Ilmu Politik Indonesia* (AIPI), Agustus 2002.

Budi Ali Mukmin, " Politik Identitas Etnis Dalam Kontestasi Politik Lokal" *dalam Jurnal Kewarganegraan, Universitas Negeri Medan,* volume 19, Nomor 02, Nopember 2012.

Bambang Purwanto, "Memahami Kembali Nasionalisme Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* .Volume 4 Nomor 3 Maret 2011.

Cornelis Lay " Democratic Transition in Lokal Indonesia: An Overview of Ten Years Democrasy" dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) UGM, Vol. 15, No 3, Maret 2012.

Cahyo Pamungkas. "Interaksi Sosial Antar Umat Beragama di Maluku: Sebelum dan Sesudah Konflik Sosial, 1999. dalam*Jurnal LIPI* Jilid XXXI, No 1, 2005.

Dwi Pratomo Yulianto, "Oposisi Berseragam: Catatan tentang

Hubungan Politik Soeharto dan Militer di Akhir 1980-an" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (JSP) UGM, Vol. 6, No 3, Maret 2003.

Eriyanto, "Media Daerah dan Pertarungan Elite Lokal" dalam *Jurnal Politik Lokal & Sosial,* Humaniora RENAI, Oktober 2004.

Haryanto, "Elite Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Vol. 13, No 2 November 2009.

I Made Gianyar, " Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi di Daerah: Sebuah Tinjauan Emperik", dalam *Surathi, Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 17 Agustus, 2011.

Kutut Suwondo, " Otonomi Daerah dan Dinamika Lokal" dalam *Jurnal Studi Pembangunan interdisiplin*. Vol. XIII, No. 6 Maret-Juni 2001.

Kisno Hadi, "Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional Dalam Konteks Dalam Konteks Otonomi Daerah" dalam *Politika* (*Jurnal Ilmu Politik*), Vol. I. No 2, Oktober 2010.

Leo Agustino dan M.Agus Yusup, " Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik" dalam *Jurnal Ilmu Politik AIPI*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Maryanto Wahyu Tryatmoko, "Pemekaran Wilayah dan Pertarungan Elite Lokal di Maluku Utara, dalam *Jurnal LIPI* Jilid XXXI, No 1, 2005.

Maswardi Rauf, " Pemerintah Daerah dan Konflik Horisontal" dalam *Asosiasi Ilmu Politik Indonesia* (AIPI), Agustus 2002.

Mohtar Mas'oed, " Dilema-dilema Pembangunan Politik Indoesia: sebuah Survei Persoalan" dalam *Jurnal Prospektif*. Vol.5, No, 3, 1993.

Purwo Santoso "Merajut Kohesi Nasional: Etno-nasionalisme dan Otonomi daerah" dalam *Jurnal Ilmu Sosial da Ilmu Politik*. Vol. 4, No 3, Maret 2001.

Pratikno, " Good Government and Governability" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, UGM, edisi 3 Maret 2005.

P van der Crab. "Geschiedenis van Ternate, in Ternataansche en Maleische Teks, Beschreven Door den Ternataan Naidah, Met Vertaling en Aantekeninghen Door" *BKI*, Jilid 26nomor 2.

Riswanda Imawan, " Prospek Peranan Golkar dalam Demokratisasi di Indonesia" dalam *Jurnal Prospektif*. Vol.5, No, 3, 1993.

Ryaas Rasyid, "Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan" dalam *Asosiasi Ilmu Politik Indonesia* (AIPI), Agustus 2002

Slamet Luwihono " Otonomi Desa dan Pertarungan Elite" dalam Jurnal Otonomi Daerah, Vol.I.No 2, Oktober 2002.

Taufik Abdullah, "Indonesianisasi:Sebuah Wacana dan Serentetan Peristiwa" dalam*Lembaran Sejarah.*Vol.8. No. 2, 2005.

D. Buku, Tesis dan Disertasi

A.B. Lapian, dalam pengantar *Memorie van Overgave* J.H. Tobias (1857)- *Memorie van Overgave C. Bosscher* Residen Ternate (1859), Jakarta: ANRI, 1980.

_____, dan PJ Drogglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati*. (Jakarta: Grafiti, 1992.

Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Pustaka Utama, 2000.

_____, dan Yusup Abdulrahman, *Hubungan Kerajaan Ternate dan Tidore dalam Sejarah Maloku Kie Raha.* Ternate: Universitas Khairun, 1995.

Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di*

299

Jawa Timur 1960-1965. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001.

A.E. Priyono, et.al, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca- Soeharto.* Jakarta: DEMOS ,2003.

Anas Dinsie & Rinto Taib *Ternate Sejarah,Kebudayaan & Pembangunan Pedamaian Maluku Utara.* Ternate: LeKRa-MKR, 2010.

Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia, 2007.

_____ dan Irza Arnita Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah* 1800-1950 Jilid 2. Ternate, Unkhair, 2003.

AA GN Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota.* Yogyakarta, IRE Press, 2004.

Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik.* Jakarta: LP3ES, 1986.

A.C. van Der Leeden, " Gale Maya, Phology of a Tone Lenguange of the Raja Ampat Islands" daam Masinambaw E.K.M. (Ed.) *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk. Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi,* Jakarta: LEKNAS-LIPI,1980.

Adnan Buyung Nasution, et, al.*Federalisme Untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas, 1999.

Asvi Warman Adam, "Militerisasi Sejarah Indonesia: Peran A.H. Nasution" Dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (eds.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, Pustaka Larasan, 2008.

Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

_____,*Pergolakan Daerah Pada awal Kemerdekaan.*Jakarta: Grafiti, 1990.

Arthur A. Schillers, *The Formation of Federal Indonesia 1945-1949.* Bandung, 1989.

Andrian Vickers, *Peradaban Pesisir Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara.* Bali: Udayana University Press,2009.

Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*.Yogyakarta: Ombak, 2006.

_____, " Sejarah dan Jati Diri Dalam Ingatan Bersama Asia Tengara" dalam Andrian Vickers, *Peradaban Pesisir Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara,* Bali: Udayana University Press,2009.

_____ "Dimensi Ekonomi Lokal Dalam sejarah Indonesia, dalam Sri Margana dan Widya Fitria Ningsih, *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global. Persembahan Untuk 70 tahun Prof. Dr.Djoko Suryo.*Yogyakarta: Ombak, 2009.

Benedict R. O'G. Anderson, *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia.* Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000.
_____, *Imagined Communities:Komunitas-Komunitas Terbayang.* (Yogyakarta: INSIST Press , 2002.

Battomore T.B., *Elit dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institut.2006.

B.J.O. Schrieke, " The Native Rulers" *dalam Indonesian Sosiological Studies,* I. s-Gravenhage: W. van Hoeve, 1959.

Bungaran Antonius Simanjuntak, (ed), *Otonomi Daerah Etnonasionalisme dan Masa Depan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Obor, 2010.

B. Soelarto, *Sekitar Tradisi Ternate.* Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan RI, 1982.

C.L. Voorhoeve, "The Non-Austronesia Languages in the Nort Moluccas" dalamMasinambaw EKM. (ed), *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi.* Jakarta: LEKNAS-LIPI,1980.

Claire *Holt*(ed).*Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1972.

Chasan Bousoiri,*Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*, Jakarta: tanpa Tahun.

Christiaan Frans van Fraasen, Ternate, "De Molukken en De Indonesische Archipel, Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cultuur en Indonesia", Disertasi Universiteit Leiden, 1987.

Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

Clive Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*. London: Oxford University Press, 1996.

Djoko Suryo, *et al*. *Agama dan Perubahan Sosial Studi: Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*. Yogyakata: UGM LKPSM. 2001.

_____*, et al*. *Agama dan Perubahan Sosial Studi: Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*. Yogyakata: UGM LKPSM. 2001

_____, *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global.*Yogyakarta: Ombak: 2010.

_____,*Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern.* Yogyakarta: STPN Press, 2009.

_____, et, al, *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Budaya.* Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1985.

_____, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang* 1830-1900. Yogyakarta: PAU-SS-UGM, 1989.

Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2002.

Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat di Jawa (Abad XVIII –Medio Abad XX*). Yogyakarta: yayasan Benteng Budaya, 2000.

David Henley, et al., *Adat Dalam Politik Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional.* Jakarta:Pustaka UtamaGrafiti, 1987.

Dheni Tjan "Aristokrasi di era Modern Studi Tentang Pergulatan Elite Lokal dan Masyarakat Tidore Terhadap Kemunculan Kembali Sultan Tidore di Akhir Abad XX". Tesis S2 Ilmu Politik, UGM, 2005.

Edwrd L Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makasar 1906-1942*. Ombak: 2004.

F.S.A. de Clercq, Ternate:Karesidenan dan Kesultanan.Terjemahan Noer Fitriyanti dari,*Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate*, 1890. Ternate: Komunitas Uma Sania, 2007.

FX. Agung Susanta, " Keterkelolaan Fragmentasi dan Dilema Politik". Disertasi Program Pascasarjana Ilmu olitik, UGM, 2012.

George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme and Revolusi Indonesia,* ter. Ismail Muhammad dan Zakaren Abdul Rashid. Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980.

Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia.* Jakarta: KITLV, 2007.

Houben, V.J.H. *Keraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta,* 1830-1870. Leiden: KITLV Press, 1994.

Haryanto, *Kekuasaan Elite Suatu Bahasan Pengantar.* Yogyakarta:FISIPOL UGM, 2000.

Hanna Willard A& Des Alwi, *Ternate dan Tidore Masa Lalu Penuh Gejolak*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996

Henk Schulte Nordholt et.al., (ed), *Politik Lokal di Indonesia.* Jakarta: KITLV,2007.

_____, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (eds), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, Pustaka Larasan, 2008.

H.J. de Graaf dan Th.G.Th Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan 16.*Jakarta: KITLV, 1989.

Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Hasrul Hanif,*Mengembalikan Daulat Warga Pesisir: Partisipasi, Representasi dan Demokrasi di Aras Lokal.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008.

Harold Laswell, *Political Sociology,* Oxford & LBH Publishing Co., New Delhi, 1982.

Husni Putuhena, *Buku Putih seri 2 Konspirasi RMS dalam Kerusuhan di Ambon dan Lease, Gerakan Penghancuran Islam untuk Merebut sebuah Kekuasaan di Bumi Siwa-Lima* 1950-2000. Ambon: Patimura, 2000.

Herry RD.Nachrawy, *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*. Ternate, Yayasan Kie Raha, 2003.

Herbert Feith, *Dynamics of Guided Democracy.* Cornell University: Itacha, 1982.

Ide Anak Agung Gde Agung, *Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat.* Yogkarta; UGM Press, 1985.

Irza Arnita Djafar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. Jakarta Bio Pustaka, 2005.

John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban.* Jakarta: Yayasan Obor Indoensia, 2004.

Jamie S. Davindson, David Henly, Sandra Moniaga (ed), *Adat Dalam Politik Indonesia.*(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Jusuf Abdulrahman, *Kesultanan Ternate*; *Dalam Jou Ngon Ka Dada Madopo Fangare Ngona Ka Alam Madiki*. Manado: Media Pustaka, 2002.

Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa Dimasa Orde Baru.*Yogyakarta: PAU-SS-UGM, 1990.

_____, *Raja Priyayi dan Kawula.*Yogyakarta: Ombak, 2004.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Pustaka Ureka, 2006.

Leonard Y. Andaya, *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993.

L. Katoppo, *Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara.* Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

L. E. Visser, (ed), *Halmahera and Beyond, Social Science Research in The Moluccas.* Leiden: KITLV Press, 1994.

Leslie H. Palmier, *Social Status and Power in Java.* London: The Athlone Press, 1969.

Marwati Djoened Poesponegoro Nugrogo Natosusanto, (ed), *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

_____, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Masinambaw E.K.M. (ed.) *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk. Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi.* Jakarta: LEKNAS-LIPI,1980.

Mangunwijaya, Y.B. *Menuju Indonesia Serikat.* Jakarta: PT. Gramedia, 1998.

Mudaffar Syah, *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. Ternate : Goheba, 2009.

Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Sinar Harapan, 1991.

Muridan Widjojo, *The Revolt of Prince Nuku: Cross Cultural Alliance Making in Maluku, c. 1780-1810.* Leiden: Boston, 2009.

Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih* 1955-2004. Surabaya EUREKA,2006.

Muchdar Abdullah, " Kesultanan Ternate Dalam Ranah Politik" Tesis S2 Ilmu Politik, UGM,2006.

Mohammad Najib, ed. *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal.*Yogyakarta: KPU DIY, 2006.

Nurhasim Muchtar, *et. al*, *Konflik Antar Elit Lokal dalam Pemelihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah*. Jakarta: LIPI, 2003.

Onghokham, *Soekarno Orang Kiri Revolusi & G 30 S* 1965. Yogyakata: Komunitas Bambu, 2009.

Okamoto Masaaki, (ed), *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*. Yogyakarta: IRE Press, 2006.

Pratikno et. al, *Komnas HAM 1993-1997 Pergulatan dalam Otoritarianisme.* Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2002.

Patrick Barron, et,al, *Seusai Perang Komunal: Memahami Kekerasan Pasca-Konflik di Indonesia Timur dan Upaya Penanganannya.* Yogyakarta: CSPS Books, 2012.

Paul Thomson, *Teori dan Metode Sejarah Lisan.* Yogyakarta: Ombak, 2012.

Phillm Sulu, *Permesta dalam Romantika, Kemelut dan Misteri.* Jakarta: Gramedia, 2011.

Roger F Soltau,*The Study Of Politik.* Alih bahasa Daniel Dhakide.*Sosiologi Politik.* Jakarta: Rajawali, 1991.

R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik. Jakarta: LP3ES, 1992.*

R. Nalenan, *Arnold Mononutu Potret Seorang Patriot.* Jakarta: Gubung Agung, 1981.

Radjiloen L. *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir,* Ternate: Depdikbud, 1982.

Rusdi J. Abbbas, *Demokrasi di Aras Lokal Praktek Politik Elite Lokal di Maluku Utara.*Yogyakarta: Cerah Media, 2012.

Richard Chauvel, ***Nationalists, Soldiers, and Separatists,***Leiden: KITLV Press, 1990.

R.Z. Leirissa,*Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI 1975.

_____, *Halmahera Timur dan Raja Jailolo Pergol*akan di *Laut Seram Abad Ke-19.*Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia.* Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Riza Sihbudi,(ed), et, al, *Bara dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua dan Riau.* Bandung: Mizan, 2001.

Rustam Hasim, *Dari Cengkeh Ke Kerang Mutiara*. *Perdagangan Di Karesidenan Ternate 1854-1930*. (Ternate: LepKhair, 2013).

307

_____,"Sultan Iskandar Djabir Syah: from Malino Conference To The Minister Of Internal Affairs Of Negara Indonesia Timur. Jurnal Paramita, Vol.26, No.2, 2016

_____ dan Hasmawati,"Kedudukan Elite Kesultanan Dalam Masyarakat Ternate" Jurnal Ilmu Budaya UNHAS. Vol. 5. No.2 Desember 2017.

_____ "Produksi dan Pemasaran Hasil Bumi di Kesultanan Ternate 1882-1930" Jurnal Pendidikan Edukasi, Unkhair. Vol. 3 No. 1 Juli 2006.

_____ "Dari Mitos Tujuh Putri Hingga Legitimasi Agama: Sumber Kekuasaan Sultan Ternate" Journal of Humanities Sasdaya Gadjah Mada. Vol. 1, No.2, Mei 2017.

_____ dan Mokhtar Yusuf "*Sultan In the History of Ternate 1946-2002*". Jurnal Ilmu Budaya UNHAS. Vol. 4, Nomor 2, Desember 2016

Sita van Bemmelen dan Remco Raben, (ed), *Antara Daerah dan Negara Indonesia Tahun 1950-an.* Jakarta: KITLV, 2011.

Shaleh A. Putuhena, *Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam.* Jakarta: Leknas LIPI, 1987.

Syahril Muhammad, *Kesultanan Ternate:Sejarah Sosial Ekonomi &*Politik. Yogyakarta: Ombak; 2006.

Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978.

_____, *Sejarah Daerah Maluku*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977.

Semuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta Pustaka Obor, 2011.

Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi*

308
Indonesia Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia, 1982.

_____, ed. *Elite dalam Perspektif Sej*arah.Jakarta: LP3ES, 1981.

_____, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992.

_____,(ed), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta:LP3ES, 1990.

Soemarsaid Moertono,*Negara dan Usaha Binna Negara di Jawa Masa Lampau:Studi Tentang Mataram II Abad ke XVI Sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

_____, *Serpihan Budaya Feodal.*Yogyakarta: Agastya Media, 2001.

_____, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakal Moderen*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Siti Zuhro, et.al, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali.* Yogyakarta: Ombak, 2009.

Samuel Hutington, *The Clash of Civilasation and the Remaking of World Order*. New York : Simon and Schuter, 1997.

Syafuan Rozi. et.al. *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Taufik Abdullah dan Abdurrahman Suryomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Perkembangan Historiografi: Arah dan Perspektif.* (Jakarta: Gramedia, 1985.

_____,*Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Tamrin Amal Tamagola. *Halmahera Berdarah, Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu.* Jakarta: LIPI, 2004.

Tri Ratnawati, *Maluku Dalam catatan Seorang Peneliti.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006.

W. F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

R. van Hoevell, *Sejarah Kepulaun Maluku: Kisah Kedatangan Orang Eropa Hingga Monopoli Perdagangan Rempah.* Yogyakarta: Ombak, 2014.

Z.Salampessy dan Thamrin Husain (ed.), ***Ketika Semerbak Cenkeh Tergusur Asap Mesiu.***Ambon, 2001.

Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Elite Penguasa.* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.

Lampiran:

GLOSARIUM

Adat se Atorang — Hukum dasar yang dipatuhi dan disusun menurut kebiasaan yang diterima oleh semua warga.

Aristokrasi — Secara etimologi kata berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu *aristos* (*aristoi*) yang berarti kaum bangsawan atau kaum cendikiawan /orang baik-baik, dan kata *kratos* (*kratein*) yang bermakna sistem kekuasaan (pemerintahan).

Bobato nyagimoi-

Setofkange — Dewan Delapan-belas, merupakan Lembaga Legislatif dalam Kesultanan Ternate, terdiri wakil-wakil rakyat dari 41 marga yang berdomisili di Ternate. Kedelapanbelas marga atau soa terdiri atas; *pertama*, marga *kimalaha* yang meliputi;*Kimalaha Marsaoli, Kimalaha Tomaito, Kimalaha Tomagola, Kimalaha Tamadi, Kimalaha Payahe, Fanyira Jiko, Fanyira* Jawa, *fanyira Tolangara, Fanyira Tabala. Kedua*, marga *Sangaji* yang juga terdiri dari sembilan soa/marga, para pemimpinnya mempunyai pangkat yang sama namanya yakni *Sangaji* yang terdiri atas *Sangaji Tomajiko, Sangaji Malayu, Sangaji Limatahu, Sangaji Kulaba, Sangaji Malaicim, Sangaji Tobolen, Sangaji Tafamutu, Sangaji Tafaga dan sangaji Tokafi.*

Bobato Akhirat — Pimpinan spiritual, pembantu sultan untuk urusan keagamaan Islam.

Bobato Dunia — Pemimpin/pembantu sultan untuk urusan pemerintahan.

Bala Kusu se-Kano-kano — Rakyat.

Dano — Gelar bangsawan yang tidak memegang jabatan dalam struktur kerajaan dan tidak memiliki hak menjadi sultan.

Dopolo Ngaruha — Empat pimpinan/kepala pemerintahan, yakni;*Jogugu, Kapita Laut, Hukum Soasio dan Hukum Sangaji*di

	Kesultanan Ternate.Disebut juga *Komisi Ngaruha atau Tau Raha* di Kesultanan Tidore.
Dola Bololo	Sepotong ungkapan, pernyataan perasaan dan pendapat seseorang dalam bentuk sindiran atau tamsilan.
Federalisme	Paham atau prinsip yang menganjurkan pembagian negara atas bagian-bagian yang berotonomi penuh mengenai urusan dalam negeri atau wilayah otonominya.
Foramadyahi	Berasal dari kata *Fowaro Madiyahi* artinya telah diketahui kebenaranya.
Fala Raha	Rumah empat, empat klan, yakni Soa Marsaoli, Limatahu,Tomagola dan Tomaito.
Federalis	Sebutan bagi mereka yang setuju dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat atas kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Pemerintah Belanda.
Republikan	Sebutan bagi mereka yang tidak setuju dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat.
Gezaghebber	Penguasa atau kepala pemerintah lokal setingkat distrik.
Hakim Syara	Hakim Pengadilan Agama Islam dalam lingkungan kesultanan.
Halmahera	Bahasa Ternate yang berarti induk pertikaian.
Heku Cim	Angkatan Bersenjata.
Jaib Kolano	Hak veto sultan.
Jogugu	Perdana Menteri (mangkubumi).
Jou	Bermakna yang dipertuan agung atau sultan.
Kapita Lau	Laksamana Angkatan Laut Kesultanan. Tugasnya adalah bertangungjawab untuk mengatur masalah pertahanan dan keamanan dalam kesultanan. Di bidang politik, dalam pemilihan seorang sultan, pejabat ini tidak mempunyai hak suara dalam mencalonkan atau menentukan sultan. Namun

	dalam pertemuan untuk mengambil keputusan dengan *bobato nyagimoi setofkange* (dewan delapan belas), jika *Kapita Lau* tidak menghadiri pertemuan tersebut, maka pemilihan sultan tidak sah. Kehadiran *Kapita Lau* dalam pertemuan tersebut merupakan syarat mutlak dalam pengangkatan seorang sultan, walaupun tidak mempunyai hak suara.
Kontrolir	Pegawai Pemerintah Hindia belanda yang kedudukannya di bawah asisten residen.
Kadaton	Istana, kompleks tempat tinggal penguasa.
Kimalaha Tomagola	Adalah memegang kekuasaan pertahanan keamanan Kesulatan Ternate.
Maloko Kie Raha	Adalah nama empat kesultanan di Maluku utara, yaitu; Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Keempat kesultanan tersebut menetapkan Kesultanan Ternate sebagai ketua lembaga adat dan bertanggungjawab atas seluruh kerajaan di Maluku Utara.
Kadi	Ketua majelis peradilan agama Kesultanan Ternate
Kora-kora	Perahu perang yang di gunakan di Maluku Utara.
Kaicil	Pangeran, putera sultan dari permaisuri utama.
Kapita Kie	Kepala pasukan pengawal sultan
Kolano	Raja, sultan.
Kapita Ngofa	Kapten yang berasal dari keluarga sultan, kapten pangeran.
Legu Gam	Pesta rakyat dalam memperingati hari ulang tahun sultan.
Militerisme	Paham yang berdasarkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan sehingga pemerintah dibentuk dan dijalangkan dengan cara-cara disiplin tentara (kekerasan dan kaku) saja .

Moloku Kie Raha	Empat gunung Maluku.Semula menunjuk kepada Ternate, Tidore, Moti dan Makian.Kemudian berkembang dan memiliki arti empat kerajaan Maluku, yakni Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan.
NIT	Merupakan yang tertua dan terbesar di antara negara-negara yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Kuatnya kedudukan Belanda di Indonesia Timur menjadi alasan bagi Belanda untuk memberikan otonomi yang luas kepada Negara Indonesia Timur yang terdiri dari ratusan pulau besar dan kecil dan terbagi kedalam 13 daerah otonom. Ke-13 daerah otonom yang menjadi bagian dari NIT adalah Bali, Flores, Lombok, Maluku Selatan, Maluku Utara, Minahasa, Sangihe dan Talaud, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sunda, Sumbawa, dan Timor.
Totalitarianisme	Wujud sikap atau karakter dari suatu pemerintahan yang menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warganya.
Sangaji	adalah para raja yang wilayah kekuasaanya masuk kedalam kekuasaan Ternate.
Sala Hakan	Merupakan perwakilan Sultan di daerah-daerah otonomi yang jauh. Dalam sejarah Kesultanan Ternate pernah diangkat *sala hakan* di Sanana dan Tabuhkan (Sangir Talaud), dan Sula Taliabu yang bertugas menangani urusan sosial politik, ekonomi, keamanan dan berkordinasi dengan para *sangaji* (bupati).
Stampa	Mahakota Kesultanan Ternate.Salah satu benda pusaka yang dipercayai memiliki nilai magis.
Swapraja	Daerah otonom atau pemerintahan sendiri.
Unitarisme	Paham yang menginginkan bentuk negara kesatuan

Foto 1
SILSILAH SULTAN TERNATE

1. Kolano Cico Bunga (Mashur Malano)	1257-1277
2. Kolano Jamim	1277-1284
3. Kolano Komalo	1284-1298
4. Kolano Bakuku	1298-1304
5. Kolano Ngaralamo	1304-1317
6. Kolano Pastarang Malamo	1317-1322
7. Kolano Aiya (Sidang Arif Malamo)	1322-1331
8. Kolano Paji Malamo	1331-1332
9. Kolano Syah Alam	1332-1343
10. Kolano Tolu Malamo	1343-1347
11. Kolano Kie Mabiji	1347-1350
12. Kolano Ngolo Macaya	1350-1357
13. Kolano Momole	1357-1359
14. Kolano Gapi Malamo	1359-1372
15. Kolano Gapi Baguna	1372-1377
16. Kolano Komalo	1377-1432
17. Kolano Sia	1432-1465
18. Kolano Gapi Baguna (Marhum)	1465-1480
19. Sultan Zainal Abidin	1480-1500
20. Sultan Bayar Sirullah	1500-1522
21. Sultan Duko Lamo	1522-1535
22. Sultan Bohayat	
23. Sultan Tabariji	1535-1537
24. Sultan Khairun	1537-1570
25. Sultan Babullah (mengusir Portugis)	1570-1584
26. Sultan Said Barakati	1584-1606
27. Sultan Mudaffar	1606-1628
28. Sultan Hamzah	1628-1648
29. Sultan Mandarsyah	1648-1675
30. Sultan Muhammad Nurul Islam (Amsterdam)	1675-1691
31. Sultan Said Fatahullah	1691-174
32. Sultan Amir Iskandar Zulkarnain	1714-1751

33. Sultan Alaudin Mansur	1751-1754
34. Sultan Syah Mardan	1754-1763
35. Sultan Zwardekroon	1763-1777
36. Sultan Aerun Syah	1777-1780
37. Sultan Ahral	1780-1796
38. Sultan Sakran	1796-1801
39. Sultan Muhammad Yasin	1801-1807
40. Sultan Muhammad Ali	1807-1822
41. Sultan Muhammad Haeruddi	1822-1823
42. Sultan Muhammad Jen	1823-1859
43. Sultan Muhammad Aersyad	1859-1876
44. Sultan Muhammad Ayanhar	1876-1896
45. Sultan Muhammad Ilham	1896-
46. Sultan Muhammad Usman	1896-1930
47. Sultan Muhammad Jabir Syah	1930-1975
48. Sultan Mudafar Syah	1976-sekarang

Sumber: Abdul Hamid Hasan, *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Pustaka Utama, 2000.

Foto 2
Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan di Benteng Kesatuan Ternate 17 Nopember 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 44

Foto 3
Presiden Soekarno meletakan karangan bunga di Tugu kemerdekaan Ternate 17 Nopember 1951

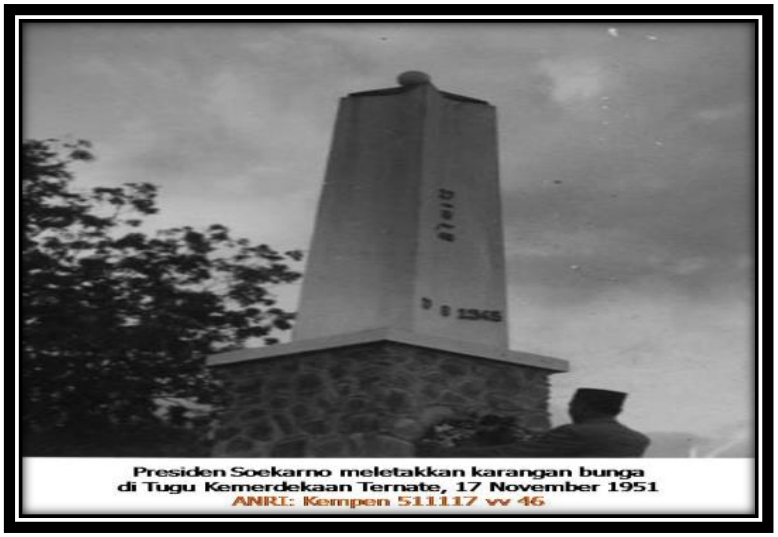

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 44

Foto 4
Presiden Soekarno dengan para pemuka agama di Kesultanan Ternate pada kunjungan ke II, 17 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 4

Foto 5
Presiden Soekarno dan IbuFatmawati berserta rombongan tiba di Pelabuhan Ternate pada17 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 20

Foto 6
Presiden Soekarno dan IbuFatmawati di sambut oleh rakyat Ternate pada17 Juli 1954

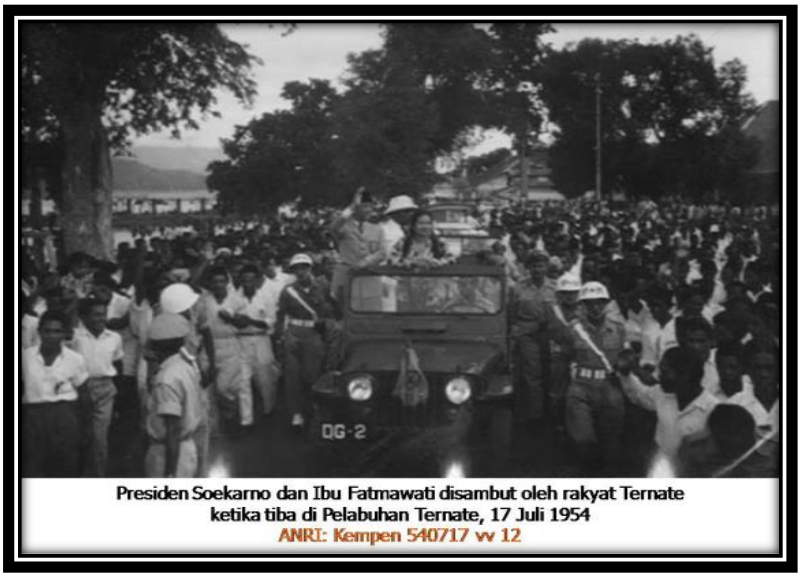

Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati disambut oleh rakyat Ternate ketika tiba di Pelabuhan Ternate, 17 Juli 1954
ANRI: Kempen 540717 vv 12

Foto 7
Para pelajar Ternate menyematkan bunga kepada Presiden Soekarno pada17 Juli 1954

Pelajar Putri Ternate menyematkan bunga kepada Presiden Soekarno ketika tiba di pelabuhan Ternate, 18 Juli 1954
ANRI: Kempen 540718 vv 124

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 124

Foto 9 dan 10.Presiden Soekano dalam rapat terbuka di lapangan Ngaralamo Kesultanan Ternate pada17 Juli 1954

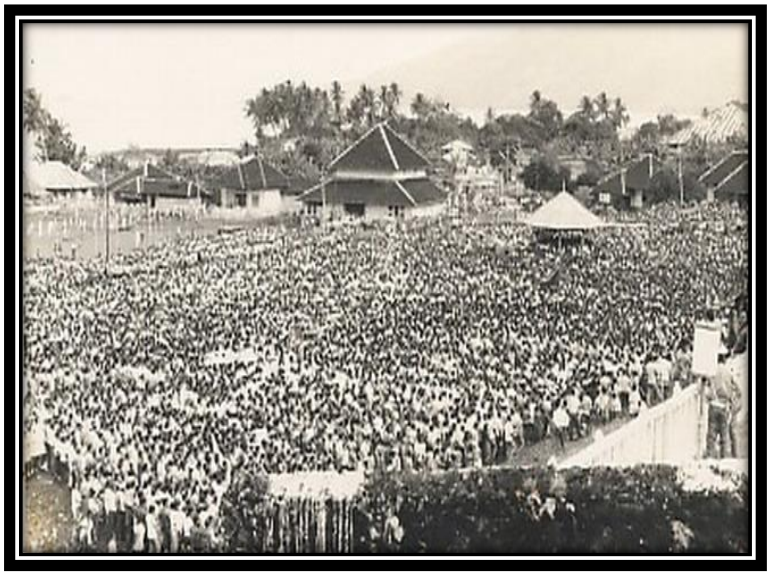

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 20

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 117

Foto 10
Kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Ternate 16 Maret 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511797

Foto 11
Suasana rapat di lapangan Istana Kesultanan Ternate untuk mendukung penyatuan NIT ke RI pada 17 Nopember 1951

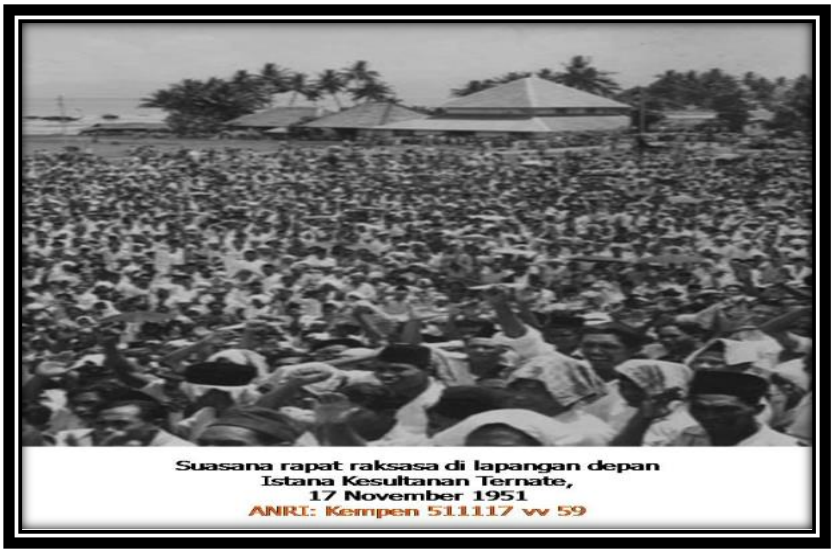

Sumber: ANRI, Kempen 511117 w 59

Foto 12
Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Sekolah Rakyat IV SGB Jln Boshorie pada 17 Nopember 1951

Sumber: ANRI, Kempen 541015 w 5

Foto 13
Sultan-sultan Maluku Utara (Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo)

Foto bersama Empat Sultan Maluku Kie Raha dengan Sultan Kutai, setelah acara Jamuan Makan Siang di Keraton Kutai Kartanegara. Dari kiri ke kanan : Sri Sultan Jailolo Abdullah Sjah, Sri Sultan Bacan Gahral Sjah, Sri Sultan Kutai H. Adji Muhammad Salehuddin II, Sri Sultan Tidore H. Djafar Sjah dan Sri Sultan Ternate H. Mudaffar Sjah. *(Foto. Doc. Parada)*

Sumber:: Tabloid Parada

Surat perjanjian SultanTernate,
Iskandar Muhammad Djabir Sjah dengan Pemerintah
HindiaBelanda, pada saat dilantik menjadi Sultan Ternate ke-47 1929

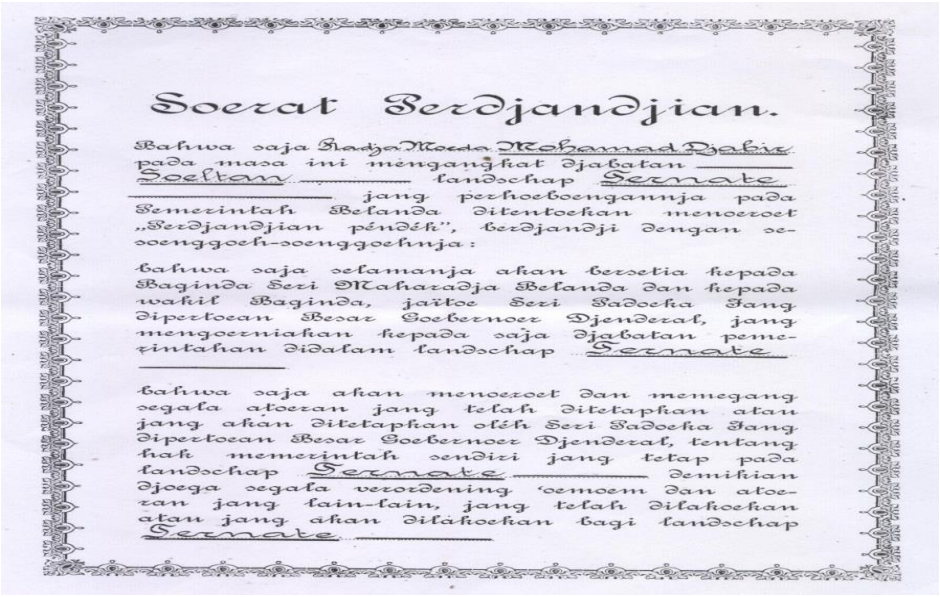

Soerat Perdjandjian.

Bahwa saja Hadja Moeda Mohamad Djabir pada masa ini menganggkat djabatan Soeltan landschap Ternate jang perhoeboengannja pada Pemerintah Belanda ditentoekan menoeroet „Perdjandjian pendék", berdjandji dengan sesoenggoeh-soenggoehnja:

bahwa saja selamanja akan bersetia kepada Baginda Seri Maharadja Belanda dan kepada wakil Baginda, jaitoe Seri Sadoeka Jang dipertoean Besar Goebernoer Djenderal, jang mengoerniakan kepada saja djabatan pemerintahan didalam landschap Ternate

bahwa saja akan menoeroet dan memegang segala atoeran jang telah ditetaphan atau jang akan ditetaphan oléh Seri Sadoeka Jang dipertoean Besar Goebernoer Djenderal, tentang hak memerintah sendiri jang tetap pada landschap Ternate demikian djoega segala verordening 'oemoem dan atoeran jang lain-lain, jang telah dilahoekan atau jang akan dilahoekan bagi landschap Ternate

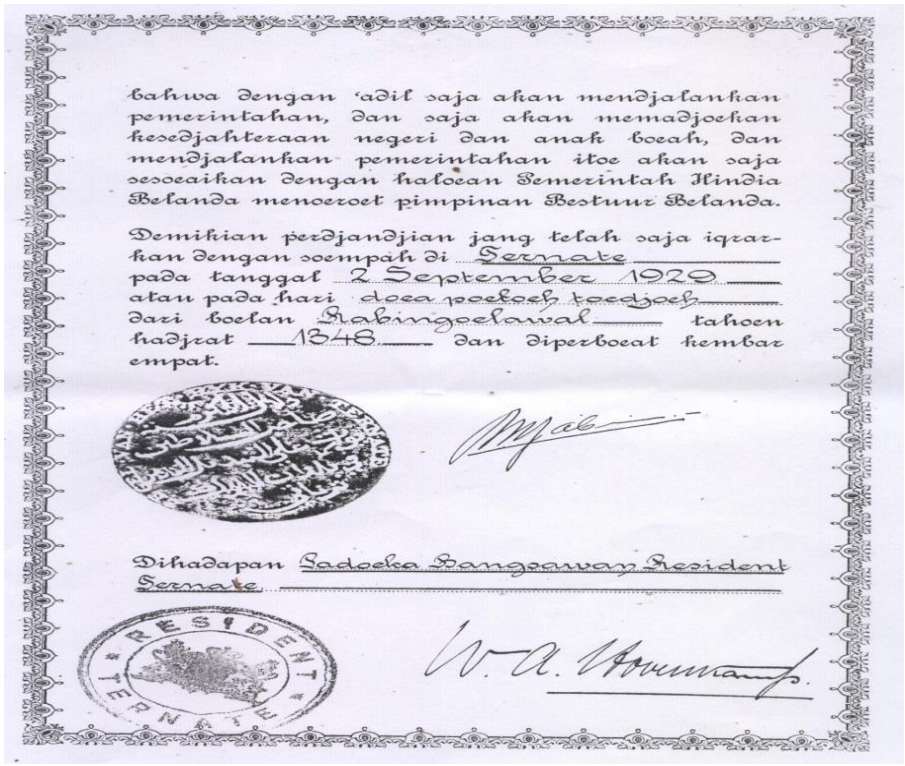

bahwa dengan 'adil saja akan mendjalankan pemerintahan, dan saja akan memadjoekan kesedjahteraan negeri dan anak boeah, dan mendjalankan pemerintahan itoe akan saja sesoeaikan dengan haloean Pemerintah Hindia Belanda menoeroet pimpinan Bestuur Belanda.

Demikian perdjandjian jang telah saja iqrarkan dengan soempah di Ternate pada tanggal 2 September 1929 atau pada hari dosa poeloh toedjoeh dari boelan Rabingoelawal tahoen hadjrat 1348 dan diperboeat kembar empat.

Dihadapan Sadoeka Sangaawan Resident Ternate

RESIDENT TERNATE

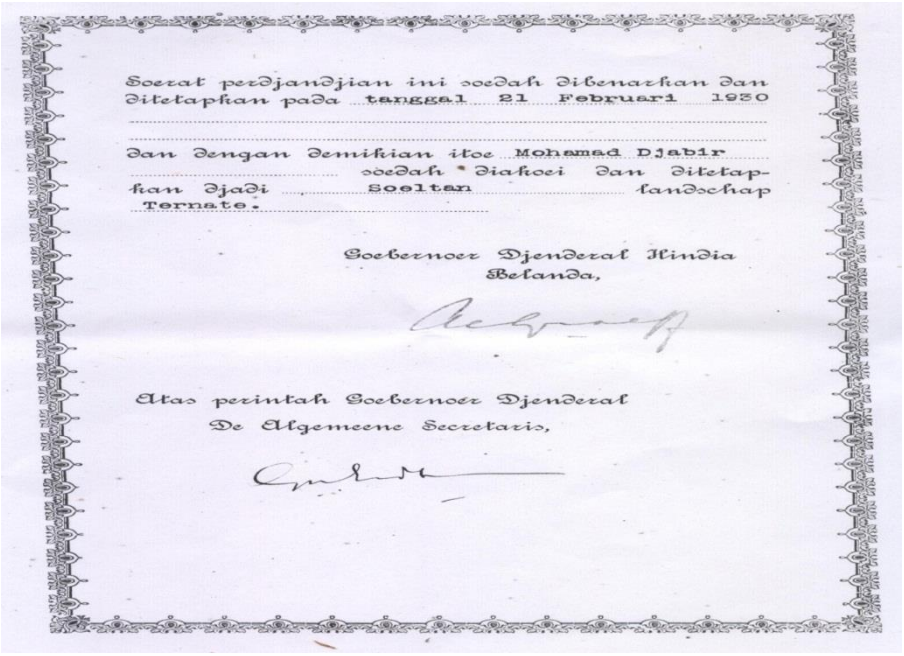

Soerat perdjandjian ini soedah dibenarkan dan ditetapkan pada tanggal 21 Februari 1930

dan dengan demikian itoe Mohamad Djabir soedah diakoei dan ditetapkan djadi Soeltan landschap Ternate.

Goebernoer Djenderal Hindia Belanda,

Atas perintah Goebernoer Djenderal
De Algemeene Secretaris,

Sumber : ANRI, Jakarta.

Telegram rencana mengangkat Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah sebagai perwira KNIL

1945

18 .7.45.

Clg.

In verband met ons gesprek daarover eenigen tijd geleden, lijkt het mij gewenscht gevolg te geven aan het plan om den Sultan van Ternate te benoemen tot officier à la suite van het KNIL. Aangezien hij in rang benedem het hoofd van het Papoeanische en het Mangkoenegarasche huis komt en deze als regel den rang van kolonel hadden, zou hij tot overste moeten worden benoemd.

Pakualamoese

De benoeming à la suite voorkomt m.i. moeilijkheden in de verhouding tot geallieerde opperbevelhebbers, sgonicas en conicas.

De Lt. Gouverneur-Generaal.

Sumber: Irza Arnita Djafar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. (Jakarta Bio Pustaka, 2005).

Kekuasaan Otonomi Ternate

GONICA
MOROTAI.

IN REPLY, PLEASE QUOTE
No. 1781/9.5

NETHERLANDS INDIES CIVIL ADMINISTRATION

RECEIVED Morotai. 6 November 1945.-
9.11-45
No. 754 FI/ AB/10

Onderwerp: Zelfbestuursgezag
Ternate -Tidore.

Met het oog op de gewijzigde omstandigheden, en ten einde het Zelfbestuursgezag te schragen, in het bijzonder dat van den Sultan van Ternate, zij het mij vergund Uwer Excellentie eerbiedig te verzoeken:

ten eerste: te willen intrekken Haar besluiten van 29 November 1944 no's 2 en 3, Staatsbladen 1944 no's 7 en 8, waarin tot nader order werd besloten dat de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van het zelfbestuur van Ternate, respectievelijk van het Zelfbestuur van Tidore, in reeds bevrijd of nog te bevrijden zelfbestuursgebied, voor of namens deze Zelfbesturen zouden worden waargenomen of namens den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie;

ten tweede: te willen besluiten: dat de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van evengenoemde Zelfbesturen weder als voorheen zullen worden uitgeoefend door de betrokken Zelfbesturen; ten aanzien van het landschap Ternate door den Zelfbestuurder van Ternate en ten aanzien van het landschap Tidore door den Raad van Landsgrooten bestaande uit de waardigheidsbekleeders, zullende voorloopig het bestuur worden uitgeoefend door een door den Assistent Resident van Ternate aan te wijzen waardigheidsbekleeder;

ten derde: te willen beslissen dat ten aanzien van het indirect bestuurd gebied van Nederlandsch Nieuw Guinea, hetwelk formeel behoort tot het landschap Tidore, totdat nader anders wordt besloten, de bevoegdheden, de rechten en verplichtingen van het Zelfbestuur worden waargenomen door den fungeerend Resident van Nieuw Guinea te Hollandia, voor en namens den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie;

ten vierde: goed te vinden dat aan deze beslissingen terugwerkende kracht wordt toegekend tot op den 1sten October 1945,

DEN LT. GOUVERNEUR-GENERAAL
VAN NEDERLANDSCH INDIE,
Batavia.

Sumber: Irza Arnita Djafar, *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. (Jakarta Bio Pustaka, 2005).

DAFTAR SINGKATAN

ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BKI	: Bijdragen tot de Taal- Land en Volkenkunde
BFO	: Bijenkoomst Federal Overlag
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dati I atau II	: Daerah Tingkat I atau II
Depdagri	: Departemen Dalam Negeri
FKN	: Festival Keraton Nusantara
FKM	: Forum Kedaulatan Maluku
ELS	: Europese Lagere School
Golkar	: Golongan Karya
HIS	: Hollands Inlandse School
HBS	: Hogere Burger School
HAM	: Hak Asasi Manusia
IBT	: Indonesiaa bagian Timur
Ibid	: Ibidem
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KITLV	: Koninlijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde
KNIL	: Koninlijke Nederlands Indische Leger
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengeahuan Indonesia
MULO	: Meer Uitgebried Lagere Onderwijis
Mvo	: Memorie van Overgave
NIT	: Negara Indonesia Timur
NKRI	: Neegara Kesatuan Republik Indonesia
NICA	: Netherlands Indies Civil Administration
ORLA	: Orde Lama
ORBA	: Orde Baru
NKRI	: Negara kesatuan Republik Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PELITA	: Pembangunan Lima Tahun
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDK	: Partai Demokrasi Kebangsaan
RMS	: Republik Maluku Selatan
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
SARA	: Suku, Agama, Ras dan Antar golongan
UU	: Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar
VOC : Vereeningde Oost-Indische Compagnie